



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

LKPR

BUPATI KABUPATEN BINTAN

AKHIR TAHUN ANGGARAN

2019



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan. Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tahun 2019 merupakan tahun keempat kepemimpinan Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan, dimana Gubernur Kepulauan Riau melantik Bupati dan Wakil Bupati Bintan untuk periode Tahun 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016, maka sesuai kebutuhan disusunlah RPJMD Tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. LKPJ Tahun 2019 juga merupakan LKPJ tahun keempat dalam masa RPJMD Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2018 dilakukan revisi terhadap RPJMD 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018. LKPJ Tahun 2019 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2019 dimana target kinerjanya diukur berdasarkan revisi/perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. LKPJ Tahun Anggaran 2019 mencakup penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Urusan Pembantuan, Dan Urusan Umum Pemerintahan.

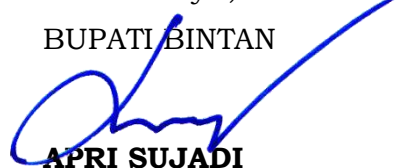
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019, banyak hasil pembangunan yang telah dicapai, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja pembangunan yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu, rekomendasi hasil pembahasan DPRD akan menjadi masukan untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2019.

Demikian LKPJ Tahun 2019 kami sampaikan, akhirnya semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi kerja keras kita semua.

Terima Kasih

Bintan Buyu, Maret 2019

BUPATI BINTAN



APRI SUJADI



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xv
Daftar Gambar	xvii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Visi dan Misi	I-7
1.3.1 Visi	I-7
1.3.2 Misi	I-10
1.3.3 Tujuan dan Sasaran	I-11
1.4 Gambaran umum kondisi daerah	I-15
1.4.1 Kondisi Geografis	I-15
1.4.2 Kondisi Demografi	I-17
1.4.3 Kondisi Ketenagakerjaan	I-19
1.4.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	I-21
1.4.5 Aspek Perkembangan Ekonomi	I-28
1.4.6 Potensi Unggulan Daerah	I-37
1.5 Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	I-42
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	II-1
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	II-3
2.1.1 Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah	II-3
2.1.2 Target dan Realisasi Pendaapatan Daerah	II-4
2.1.3 Permasalahan dan Solusi	II-8
2.2 Pengelolaan Belanja Daerah	II-9
2.2.1 Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah	II-9
2.2.2 Kebijakan Belanja Tidak langsung	II-14
2.2.3 Kebijakan Belanja langsung	II-15
2.2.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah	II-30
2.2.5 Permasalahan dan Solusi	II-31
2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah	II-32
2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan	II-32

2.3.2	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	II-33
2.3.3	Permasalahan dan Solusi	II-34
BAB III	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	III-1
3.1	Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan	III-1
3.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	III-1
3.1.1.1	Urusan Pendidikan	III-1
3.1.1.2	Urusan Kesehatan	III-52
3.1.1.3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	III-150
3.1.1.4	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	III-177
3.1.1.5	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	III-242
3.1.1.6	Urusan Sosial	III-266
3.1.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	III-293
3.1.2.1	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	III-293
3.1.2.2	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	III-305
3.1.2.3	Urusan Ketahanan Pangan	III-315
3.1.2.4	Urusan Lingkungan Hidup	III-406
3.1.2.5	Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	III-422
3.1.2.6	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	III-434
3.1.2.7	Urusan Perhubungan	III-457
3.1.2.8	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	III-469
3.1.2.9	Urusan Penanaman Modal	III-474
3.1.2.10	Urusan Ketenaga Kerjaan	III-482
3.1.2.11	Urusan Kebudayaan	III-493
3.1.2.12	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	III-501
3.1.2.13	Urusan Perpustakaan	III-524
3.1.2.14	Urusan Kearsipan	III-531
3.1.2.15	Urusan Statistik	III-534
3.1.2.16	Urusan Komunikasi Dan Informatika	III-536
3.1.2.17	Urusan Pertanahan	III-542
3.1.3	Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	III-547
3.1.3.1	Urusan Pariwisata	III-547
3.1.3.2	Urusan Kelautan Dan Perikanan	III-565
3.1.3.3	Urusan Pertanian	III-579
3.1.3.4	Urusan Kehutanan	III-670
3.1.3.5	Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral	III-671

3.1.3.6	Urusan Industri	III-671
3.1.3.7	Urusan Perdagangan	III-674
3.1.4	Urusan Pemerintahan Umum	III-680
3.1.4.1	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	III-680
3.1.4.2	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Pengawasan	III-804
3.1.4.3	Urusan Pemerintah Daerah Fungsi Perencanaan	III-827
3.1.4.4	Urusan Pemerintah Daerah Fungsi Penunjang Keuangan	III-848
3.1.4.5	Urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian	III-909
3.1.5	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	III-935
3.1.5.1	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	III-935
3.1.5.2	Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah	III-944
3.1.5.3	Pembinaan Batas Wilayah	III-945
3.1.5.4	Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	III-946
3.1.5.5	Pengelolaan Kawasan Khusus	III-951
3.1.5.6	Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	III-954
3.1.5.7	Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya Yang Dilaksanakan Oleh Daerah	III-958
3.2	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	III-963
3.2.1	Strategi	III-969
3.2.2	Arah Kebijakan	III-974
3.2.3	Program Pembangunan Daerah	III-986
3.2.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan	III-993
3.2.5	Prioritas Pembangunan Daerah 2019	III-1003
3.2.6	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2019	III-1003
3.2.7	Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)D Kabupaten Bintan Tahun 2019	III-1004
3.2.8	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	III-1007
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2018	III-1018

BAB IV	CAPAIAN KINEJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	IV-1
4.1	Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan di Kabupaten Bintan	IV-2
4.2	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan bersumber dari Dana Alokasi Khusus	IV-12
4.3	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	IV-18
BAB V	PENUTUP	V-1
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

D A F T A R T A B E L

Tabel	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Penjabaran Tujuan Dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bintan	I-11
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bintan Tahun 2019	I-18
Tabel 1.3	Kondisi Demografi Kabupaten Bintan Tahun 2019	I-19
Tabel 1.4	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan Tahun 2018 – 2019	I-20
Tabel 1.5	Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2019	I-29
Tabel 1.6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2018-2019	I-31
Tabel 1.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2018-2019	I-32
Tabel 1.8	Distribusi Persentase Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2019	I-33
Tabel 1.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bintan, 2018-2019	I-34
Tabel 1.10	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Bintan (Berdasarkan IHK Kota Tanjungpinang) Tahun 2018-2019	I-35
Tabel 2.1	Gambaran APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun 2019	II-2
Tabel 2.2	Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun 2019	II-3
Tabel 2.3	Target Penerimaan Daerah Tahun 2018-2019	II-5
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018-2019 (Dalam Rupiah)	II-6
Tabel 2.5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	II-7
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2019	II-11
Tabel 2.7	Persentase Alokasi Anggaran Belanja Berdasarkan Bagian Belanja APBD Tahun 2019 Kebijakan Program Dan Kegiatan Belanja APBD	II-16

Tabel 2.8	Tahun 2019 Berdasarkan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan	II-17
Tabel 2.9	Anggaran Belanja Pelayanan Dasar Tahun 2019	II-29
Tabel 2.10	Anggaran Dan Realisasi Belanja APBD Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	II-30
Tabel 2.11	Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 (Dalam Rupiah)	II-33
Tabel 3.1	Dana BOSNAS SD 2011-2018	III-50
Tabel 3.2	Dana BOSNAS SMP 2011-2018	III-51
Tabel 3.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Target Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat	III-242
Tabel 3.4	Daftar Partai Dan Jumlah Kursi Di DPRD Kabupaten Bintang Periode 2014 – 2019	III-248
Tabel 3.5	Daftar Partai Dan Jumlah Kursi Di DPRD Kabupaten Bintang Periode 2019 – 2024	III-248
Tabel 3.6	Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Perkembangan Situasi Pemilihan Umum	III-258
Tabel 3.7	Jenis Dan Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintang Tahun 2019	III-269
Tabel 3.8	Daftar Alokasi Dan Sasaran Bantuan RS RTLH Di Kabupaten Bintang Tahun 2019	III-274
Tabel 3.9	Daftar Alokasi Dan Sasaran Bantuan RS RTLH Sumber Dna APBN Di Kabupaten Bintang Tahun 2019	III-274
Tabel 3.10	Daftar Penerima Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT) Di Kabupaten Bintang Tahun 2019	III-277
Tabel 3.11	Daftar Jumlah Dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Bintang Tahun 2019	III-283
Tabel 3.12	Daftar Penerima Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Bintang Tahun 2019	III-285
Tabel 3.13	Jumlah KPM Dan Bantuan Yang Dibayarkan Pada Tahun 2019	III-285
Tabel 3.14	Nama-Nama Penyuluh Pertanian	III-329
Tabel 3.15	Daftar Peserta Lomba KRPL Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kab. Bintang Tahun 2019	III-333
Tabel 3.16	Daftar Pengelola KRPL Di Kab. Bintang	III-336
Tabel 3.17	Daftar Pemerima KRPL (APBN) Tahun 2019	III-337
Tabel 3.18	Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Di Kabupaten Bintang Tahun 2019	III-344
Tabel 3.19	Hasil Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Tahun 2019	III-346
Tabel 3.20	Daftar Sertifikasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Di Kabupaten Bintang.	III-347
Tabel 3.21	Daftar Nama-Nama Masyarakat Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2018-2019	III-354

Tabel 3.22	Daftar Serangan Penyakit Tanaman Perkebunan Hasil Pengawasan Kegiatan Pengendalian, Pengawasan Dan Perlindungan Tanaman	III-362
Tabel 3.23	Petani Perkebunan Yang Menerima Bantuan Obat – Obatan Tahun Anggaran 2019	III-364
Tabel 3.24	Kelompok Tani Penerima Bibit Bidang Perkebunan Kabupaten Bintan	III-368
Tabel 3.25	Jadwal Kegiatan Pengawasan Dan Penyusunan RDKK	III-384
Tabel 3.26	Alokasi Awal Pupuk Bersubsidi Tahun 2019	III-385
Tabel 3.27	Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019	III-386
Tabel 3.28	Realisasi Serapan Pupuk Bersubsidi	III-386
Tabel 3.29	Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020	III-388
Tabel 3.30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	III-408
Tabel 3.31	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	III-408
Tabel 3.32	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur	III-408
Tabel 3.33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	III-409
Tabel 3.34	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan	III-409
Tabel 3.35	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	III-409
Tabel 3.36	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	III-409
Tabel 3.37	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	III-410
Tabel 3.38	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Dan Lingkungan Hidup	III-410
Tabel 3.39	Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019	III-424
Tabel 3.40	Daftar Desa Yang Mengikuti Lomba Desa Dan Kelurahan	III-437
Tabel 3.41	Perkembangan Jumlah Bumdes Kabupaten Bintan	III-442
Tabel 3.42	Klasifikasi Desa Dan Kelurahan Tahun 2019	III-446
Tabel 3.43	Perkembangan Kelembagaan Desa Kabupaten Bintan	III-449
Tabel 3.44	Perkembangan Kelembagaan Kemasyarakatan Kabupaten Bintan	III-450
Tabel 3.45	Data Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019	III-456
Tabel 3.46	Jumlah Koperasi Di Kabupaten Bintan Tahun 2019	III-469
Tabel 3.47	Realisasi Program / Kegiatan Urusan Penanaman Modal TA 2019	III-474
Tabel 3.48	Realisasi Program / Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan TA 2019	III-482
Tabel 3.49	Data Sanggar Yang Di Bina	III-493
Tabel 3.50	Cagar Budaya Di Kabupaten Bintan	III-494

Tabel 3.51	Indikator Capaian RPJMD Bidang Kepemudaan	III-501
Tabel 3.52	Indikator Capaian RPJMD Bidang Olahraga	III-501
Tabel 3.53	Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Paskibraka	III-503
Tabel 3.54	Penyerapan Anggaran Kegiatan Temu Wicara Kepemudaan	III-505
Tabel 3.55	Penyerapan Anggaran Kegiatan Pelatihan Pengembangan Pemuda	III-506
Tabel 3.56	Penyerapan Anggaran Pelatihan ESQ	III-508
Tabel 3.57	Penyerapan Anggaran Kegiatan Jumpa Bakti Bersama	III-510
Tabel 3.58	Penyerapan Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	III-512
Tabel 3.59	Penyerapan Anggaran Pembinaan Atlet	III-514
Tabel 3.60	Penyerapan Anggaran Lomba Gerak Jalan Tri Lomba Juang Hut Kemerdekaan	III-515
Tabel 3.61	Penyerapan Anggaran Turnamen Golf Bupati Bintan Cup	III-518
Tabel 3.62	Penyerapan Anggaran Kegiatan Balap Motor	III-519
Tabel 3.63	Penyerapan Anggaran Kegiatan Drag Race	III-521
Tabel 3.64	Program / Kegiatan, Target, Realisasi Dan Persentase Realisasi Kegiatan	III-523
Tabel 3.65	Presentase Taman Bacaan / Perpustakaan Kelurahan / Desa Dan Sekolah Yang Aktif	III-525
Tabel 3.66	Objek Wisata Di Kabupaten Bintan	III-547
Tabel 3.67	Daftar Desa Wisata Di Kabupaten Bintan	III-551
Tabel 3.68	Penetapan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan	III-596
Tabel 3.69	Daftar Peserta Lomba KRPL Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kab. Bintan Tahun 2019	III-604
Tabel 3.70	Daftar Pengelola KRPL Di Kab. Bintan	III-607
Tabel 3.71	Daftar Pemerima KRPL (APBN) Tahun 2019	III-607
Tabel 3.72	Sosialisasi Keamanan Pangan Di Kabupaten Bintan Tahun 2019	III-622
Tabel 3.73	Hasil Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Tahun 2019	III-624
Tabel 3.74	Daftar Sertifikasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Di Kabupaten Bintan	III-626
Tabel 3.75	Daftar Serangan Penyakit Tanaman Perkebunan Hasil Pengawasan Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, Dan Perlindungan Tanaman	III-630
Tabel 3.76	Petani Perkebunan Penerima Bantuan Obat – Obatan Tahun Anggaran 2019	III-632
Tabel 3.77	Kelompok Tani Penerima Bibit Bidang Perkebunan Kabupaten Bintan	III-636
Tabel 3.78	Alokasi Awal Pupuk Bersubsidi Tahun 2019	III-651
Tabel 3.79	Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019	III-652
Tabel 3.80	Realisasi Serapan Pupuk Bersubsidi Dari Total Alokasi Yang Ditetapkan	III-652
Tabel 3.81	Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 Dengan Menggunakan Aplikasi E- RDKK	III-653

Tabel 3.82	Jumlah IKM Aktif Di Kabupaten Bintan Tahun 2019	III-672
Tabel 3.83	Rasio Penduduk Dan Tempat Ibadah	III-722
Tabel 3.84	Realisasi Anggaran & Capaian Kinerja Beserta Permasalahan Yang Dihadapi	III-794
Tabel 3.85	Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2019	III-797
Tabel 3.86	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	III-800
Tabel 3.87	Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 Dengan 2018	III-801
Tabel 3.88	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	III-802
Tabel 3.89	Program Pengawasan Utama Tahun 2019	III-804
Tabel 3.90	Komponen Penilaian SAKIP	III-815
Tabel 3.91	Kategori Dan Penilaian Angka	III-817
Tabel 3.92	Hasil Evaluasi SAKIP Terhadap OPD Dan Kategori Penilaian	III-817
Tabel 3.93	Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Kabupaten Bintan	III-819
Tabel 3.94	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah	III-821
Tabel 3.95	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019	III-824
Tabel 3.96	Pendapatan Pajak Daerah Uptd Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Tanjung Uban	III-850
Tabel 3.97	Rekapitulasi Pajak Reklame Tahun 2019 Uptd Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Tg Uban	III-851
Tabel 3.98	Realisasi Pemungutan Pajak UPT Kawal Bulan Januari S/D Desember 2019	III-856
Tabel 3.99	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Tahun 2019	III-858
Tabel 3.100	STPD Yang Tersampaikan	III-858
Tabel 3.101	Perkembangan Hasil Kegiatan Penagihan	III-859
Tabel 3.102	Verifikasi Pajak Hotel Dan Restoran	III-862
Tabel 3.103	Pajak Restoran PT Bintan Putra Berjaya/Hook On Periode Januari S.D Desember 2018	III-863
Tabel 3.104	Pendapatan Hotel D'Bintan Spa Periode Januari S.D Desember 2018	III-864
Tabel 3.105	Pendapatan Restoran PT. Bintan Onbase Resort Periode Januari S.D Desember 2018	III-864
Tabel 3.106	Pendapatan Hotel PT. Bintan Agro Wisata Permai Periode Januari S.D Desember 2018	III-865
Tabel 3.107	Pendapatan Restoran PT. Bintan Agro Wisata Permai Periode Januari S.D Desember 2018	III-865
Tabel 3.108	Pendapatan Restoran PT. Bintan Putra Berjaya/Tee Off Periode Januari S.D Desember 2018	III-866
Tabel 3.109	Pendapatan PT. Pulau Cempedak Periode Januari S.D Desember 2018	III-867

Tabel 3.110	Pendapatan PT. Pulau Nikoi Periode Januari 2016 S.D Desember 2016	III-867
Tabel 3.111	Pendapatan Hotel PT. Bintang Vista / The Residence Periode Januari 2018 S.D April 2019	III-868
Tabel 3.112	Pendapatan Restoran PT. Bintang Vista / The Residence Periode Februari 2018 S.D April 2019	III-868
Tabel 3.113	Pendapatan Penerangan Jalan Non PLN PT. Bintang Vista / The Residence Periode Februari 2018 S.D April 2019	III-869
Tabel 3.114	Jumlah Pencetakan SPPT PBB P2	III-870
Tabel 3.115	Jumlah Penyampaian SPPT PBB P2 Tahun 2018	III-873
Tabel 3.116	Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Pembetulan Dan Pembatalan PBB P2 Tahun 2019 Per Kecamatan	III-874
Tabel 3.117	Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Pembetulan Dan Pembatalan PBB P2 Tahun 2019 Per Kelurahan/ Desa	III-875
Tabel 3.118	SK Keberatan, Pengurangan, Pembetulan Dan Pembatalan PBB P2 Tahun 2019 Per Kelurahan/ Desa	III-876
Tabel 3.119	Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah APBD Murni 2018 Dan 2019	III-885
Tabel 3.120	Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019	III-886
Tabel 3.121	Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun 2019	III-888
Tabel 3.122	Jumlah Wajib Pajak Dan Transaksi Sebagai Dasar Penghitungan Target Pajak Tahun 2019	III-889
Tabel 3.123	Realisasi Pajak Terutang (Pendapatan LO) Tahun 2019	III-890
Tabel 3.124	Jumlah Wajib Pajak Yang Berdasarkan Realisasi Pajak Terutang Tahun 2019	III-891
Tabel 3.125	Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Pendapatan LRA) Tahun 2019	III-891
Tabel 3.126	Pencapaian Realisasi Pajak Terutang Dan Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Target Tahun 2019	III-892
Tabel 3.127	Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bintan Tahun 2019	III-896
Tabel 3.128	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018	III-898
Tabel 3.129	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019	III-898
Tabel 3.130	Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2016 S/D 2019	III-899
Tabel 3.131	Realisasi Penerimaan Atas Piutang Dan Koreksi Atas Piutang	III-901
Tabel 3.132	Target Pencapaian Penagihan Piutang Tahun 2019	III-903
Tabel 3.133	Rincian Realisasi Pembayaran Atas Piutang Dan Atas Masa Berjalan Tahun 2019	III-904

Tabel 3.134	Target Kinerja DPA/DPPA Tahun 2015 S/D 2019	III-905
Tabel 3.135	Realisasi Kinerja DPA/DPPA Tahun 2015 S/D 2019	III-905
Tabel 3.136	Rasio Kinerja DPA/DPPA Tahun 2015 S/D 2018	III-906
Tabel 3.137	Target Kinerja Renstra Bapenda Kabupaten Bintan 2016-2021	III-907
Tabel 3.138	Capaian Kinerja Renstra Bapenda Kabupaten Bintan 2016-2021	III-907
Tabel 3.139	Rasio Capaian Kinerja Renstra Bapenda Kabupaten Bintan 2016-2021	III-908
Tabel 3.140	Realisasi Program Penanggulangan Bencana (Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Kegiatan Monitoring Daerah Bencana Dan Rawan Bencana, Kegiatan Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Di Laut/Pantai Dan Kegiatan Penanganan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran)	III-949
Tabel 3.141	Realisasi Program Mitigasi Bencana (Kegiatan Forum Koordinasi Kesiapsiagaan Dan Kedaruratan Bencana Dan Kegiatan Pelatihan Desa Siaga Bencana)	III-951
Tabel 3.142	Data Efisiensi Pelelangan /Seleksi Melalui LPSE Kabupaten Bintan Tahun 2019	III-962
Tabel 3.143	MISI 1 Mewujudkan Kabupaten Bintan Sebagai Daerah Tujuan Investasi Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Terutama Di Bidang Pariwisata Dan Kelautan	III-969
Tabel 3.144	MISI 2. Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Merata	III-970
Tabel 3.145	MISI 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Demokratis	III-970
Tabel 3.146	MISI 4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Serta Kualitas SDM Agar Bisa Bersaing Dalam Kompetisi Global.	III-971
Tabel 3.147	MISI 5. Mewujudkan Pembangunan Karakter Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Melayu Sebagai Landasan Pembangunan Masyarakat	III-972
Tabel 3.148	MISI 6. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dan Pengarusutamaan Gender Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	III-972
Tabel 3.149	MISI 7. Memberdayakan Pemuda Sebagai Pelopor Pembangunan Di Kabupaten Bintan	III-973
Tabel 3.150	MISI 8.Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	III-973

Tabel 3.151	Arah Kebijakan MISI 1 Mewujudkan Kabupaten Bintang Sebagai Daerah Tujuan Investasi Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Terutama Di Bidang Pariwisata Dan Kelautan	III-974
Tabel 3.152	MISI 2. Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas, Terintegrasi Dan Merata	III-975
Tabel 3.153	Arah Kebijakan MISI 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Demokratis	III-977
Tabel 3.154	Arah Kebijakan MISI 4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Serta Kualitas SDM Agar Bisa Bersaing Dalam Kompetisi Global	III-980
Tabel 3.155	Arah Kebijakan MISI 5. Mewujudkan Pembangunan Karakter Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Melayu Sebagai Landasan Pembangunan Masyarakat	III-982
Tabel 3.156	Arah Kebijakan MISI 6. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dan Pengarusutamaan Gender Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	III-982
Tabel 3.157	Arah Kebijakan MISI 7. Memberdayakan Pemuda Sebagai Pelopor Pembangunan Di Kabupaten Bintang	III-983
Tabel 3.158	Arah Kebijakan MISI 8. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	III-984
Tabel 3.159	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Pada Misi 1	III-994
Tabel 3.160	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Di Misi 2	III-995
Tabel 3.161	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Di Misi 3	III-996
Tabel 3.162	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Di Misi 4	III-996
Tabel 3.163	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Di Misi 5	III-999
Tabel 3.164	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Di Misi 6	III-1000
Tabel 3.165	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Di Misi 7	III-1001
Tabel 3.166	Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Di Misi 8	III-1002
Tabel 3.167	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintang Tahun 2019	III-1005
Tabel 3.168	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintang Tahun 2019	III-1007
Tabel 3.169	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2019	III-1008
Tabel 3.170	Standar Pelayanan Minimal	III-1016

Tabel 3.171	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018	III-1019
Tabel 4.1	Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Non Fisik Tahun Anggaran 2019	IV-15
Tabel 4.2	Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bintan Tahun 2019	IV-19



DAFTAR GRAFIK / GAMBAR

D A F T A R G R A F I K

Grafik	Uraian	Hal
Grafik 1.1	Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019	I-26
Grafik 1.2	Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kepri Dan Bintan-Tanjung Pinang Pada Tahun 2015-2019	I-36
Grafik 3.1	Persentase Balita Gizi Buruk	III-52
Grafik 3.2	Angka Kematian Bayi	III-53
Grafik 3.3	Angka Kematian Ibu	III-54
Grafik 3.4	Jumlah Kecamatan Dengan API < 1 Per 1.000 Penduduk	III-55
Grafik 3.5	Insiden Rate DBD Per 100.000 Penduduk	III-57
Grafik 3.6	Persentase Kecamatan Dengan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru BTA Positif (Success Rate) Minimal 85%	III-59
Grafik 3.7	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	III-60
Grafik 3.8	Jumlah Puskesmas Yang Tersertifikasi Akreditasi	III-61
Grafik 3.9	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta JKN	III-63
Grafik 3.10	Persentase Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan	III-86
Grafik 3.11	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	III-87
Grafik 3.12	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	III-88
Grafik 3.13	Bed Occupancy Ratio	III-89
Grafik 3.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	III-89
Grafik 3.15	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif	III-94
Grafik 3.16	Persentase Anemia Ibu Hamil	III-95
Grafik 3.17	Persentase Persalinan Tenaga Kesehatan	III-96
Grafik 3.18	Persentase Balita Gizi Kurang	III-97
Grafik 3.19	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Minimal 4 Kali Dengan Pelayanan 10T	III-98
Grafik 3.20	Persentase Kunjungan Ibu Nifas Lengkap	III-99
Grafik 3.21	Persentase Ibu Hamil Kompilasi Yang Ditangani	III-99
Grafik 3.22	Persentase Anak Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	III-111
Grafik 3.23	Persentase Angka Kasus HIV Yang Diobati	III-112
Grafik 3.24	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu	III-113
Grafik 3.25	Puskesmas Yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan	III-119

Grafik 3.26	Puskesmas Yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014	III-130
Grafik 3.27	Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas	III-131
Grafik 3.28	Jumlah Penduduk Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bersumber APBD Kabupaten Bintan	III-143
Grafik 3.29	Persentase Desa Siaga Aktif	III-146
Grafik 3.30	Persentase Desa Yang Melaksanakan PHBS	III-147
Grafik 3.31	Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Dari Tahun 2016 S.D 2019	III-527
Grafik 3.32	Perkembangan Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Dari Tahun 2016 S.D. 2019	III-527
Grafik 3.33	Prosentase Jumlah SKPD, BUMD Dan Desa/Kelurahan Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2016 S.D 2019	III-531
Grafik 3.34	Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	III-565
Grafik 3.35	Perkembangan Presentase Pengendalian, Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Ikan Yang Ditangani	III-566
Grafik 3.36	Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	III-567
Grafik 3.37	Perkembangan Presentase Kelompok Nelayan Aktif	III-568
Grafik 3.38	Perkembangan Presentase Pokdakan Aktif	III-569
Grafik 3.39	Perkembangan Jumlah Produksi Pasca Panen Hasil Perikanan	III-570
Grafik 3.40	Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2016 S.D 2019	III-900
Grafik 4.1	Alokasi DAK Di Kabupaten Bintan Pada Tahun 2019	IV-14
Grafik 4.2	Penerimaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Bintan Tahun 2018-2019	IV-20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Kabupaten Bintan	I-10
Gambar 1.2	Batas Wilayah Kabupaten Bintan	I-16
Gambar 1.3	Peta Administratif Kabupaten Bintan	I-16
Gambar 1.4	Potret Pembangunan Manusia di Kabupaten Bintan Tahun 2019	I-23
Gambar 1.5	APM dan APK di Kabupaten Bintan pada Tahun 2019	I-25
Gambar 1.6	Indikator Makro Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019	I-27
Gambar 3.1	Peta Sebaran Kawasan Rumah Pangan Lestari	III-337
Gambar 3.2	Bagan Alur Operasi Pasar	III-385
Gambar 3.3	Perbandingan Target Capaian Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan	III-696



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini dituntut untuk dapat secara komprehensif mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai agenda reformasi. Salah satu perwujudan daripada proses tersebut bagi pemerintah daerah ditandai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang dapat dilihat daripada pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pimpinan pemerintahan daerah yaitu kepala daerah kepada publik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan kewajiban yang menjadi amanat konstitusional bagi Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyampaian daripada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah selanjutnya dengan maksud untuk memaparkan setiap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bintan tahun 2019 ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspek urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara komprehensif, terintegrasi dan informatif. Selain daripada itu LKPJ juga disampaikan berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang terdiri atas hasil-hasil kinerja/capaian indikator makro pembangunan daerah serta capaian pelaksanaan program dan agenda strategis proses kegiatan pembangunan.

Untuk itu seluruh proses kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bintan yang kemudian dituangkan didalam LKPJ-ATA 2019 disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan pada akhir tahun anggaran dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2016-2021 Kabupaten Bintan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 serta merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Kabupaten Bintan yang menjadi pedoman operasional pembangunan, optimalisasi koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mendorong kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri memberikan penilaian salah satunya memberikan apresiasi terhadap daerah yang konsisten didalam pelaksanaan kinerja pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 53 tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, Kabupaten Bintan menduduki peringkat ke-19 dari 397 Kabupaten se-Indonesia dengan skor 3.4239 dan hanya terpaut 0.1687 dari Kabupaten Siadoarjo di peringkat pertama. Sedangkan

untuk kabupaten lainnya seperti Karimun menduduki posisi ke 73, Lingga diposisi 193, Natuna di posisi 222, Kabupaten Kepulauan Anambas diposisi 259, sedangkan untuk kategori Kota di Indonesia dari 93 Kota adapun posisi Kota Tanjungpinang berada pada peringkat 35 dan Batam menyusul di peringkat 39. Hasil lainnya diraih oleh Kabupaten Bintan sebagai satu-satunya pemerintah daerah yang meraih Atribut Bintang 3 (Tiga) diantara pemerintah daerah lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal terpenting dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Bintan selain daripada menjalankan amanat konstitusional namun juga merupakan bentuk komitmen kepala daerah untuk dapat melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif didalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain daripada ini LKPJ merupakan tanggung jawab kepada masyarakat secara luas untuk menyampaikan *progress report* perkembangan daerah yang merupakan hasil kerjasama lintas sektoral organisasi perangkat daerah, pihak legislatif dan tentunya seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bintan untuk bersama-sama terus mewujudkan Bintan Gemilang.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 secara umum memberikan gambaran pelaksanaan program / kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada 2019 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan 2019

1.3. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Memasuki tahun 2019 dalam catatan strategis perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Bintan memasuki tahap keempat dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD Tahun 2005-2025 yaitu **BINTAN GEMILANG 2025” Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata dan Kebudayaan.** Yaitu membangun manusia secara utuh sehingga mencapai derajat sejahtera lahir maupun batin. Di tahun 2019, dibawah kepemimpinan Bupati Bintan memasuki tahun keempat dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJPM) tahun 2016-2021. Tentu saja dalam mencapai seluruh perencanaan yang mengakomodir seluruh elemen-elemen di Kabupaten Bintan guna mewujudkan visi Pemerintah.

1.3.1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kabupaten Bintan yang lebih sejahtera adalah cita-cita dan harapan bersama dengan tekad melakukan sejumlah perubahan-perubahan mendasar untuk mempersiapkan pondasi yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Bintan pada periode 2016-2021, guna menyongsong terwujudnya Kabupaten Bintan Gemilang pada 2025.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 adalah:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN BINTAN YANG
MADANI DAN SEJAHTERA MELALUI PENCAPAIAN
BINTAN GEMILANG 2025**
(Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)

Adapun penjelasan visi tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut :

Madani :

- 1. Masyarakat yang beradab dan agamis;**
- 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;**
- 3. Masyarakat yang demokratis;**
- 4. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan**
- 5. Program-program pembangunan berbasis masyarakat.**

Madani merupakan perwujudan dari masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, *taken for granted*. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus.

Sejahtera :

- 1. Kesehatan**
- 2. Pendidikan**
- 3. Daya beli**

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Bintan untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi daerah lainnya.

Bintan Gemilang 2025 Gerakan Melangkah Maju di Bidang:

- 1. Kelautan**
- 2. Pariwisata**
- 3. Kebudayaan**

Memiliki arti “Gerakan Melangkah Maju”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025. Pembangunan dikembangkan sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor

kelautan dan pariwisata sebagai **core** dan sekaligus sebagai **driver activity**. Serta dengan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat dengan bersandar pada Budaya Melayu.

1.3.2. Misi

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan di Kabupaten Bintan yang pada dasarnya mencakup permasalahan, tantangan, peluang dan ancaman, maka dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan 8 (Delapan) misi pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2016 - 2021 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bintan



1.3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan bagian dari tahap perumusan sasaran strategis yang menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bintan

MISI 1
Tujuan 1 Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan yang sesuai dengan tata ruang
Sasaran :
1. Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang
Tujuan 2 Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan
Sasaran :
1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
2. Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD
3. Meningkatnya nilai produksi perikanan

4. Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok
MISI 2
Tujuan 1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan prasarana transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum
2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan
Tujuan 2 Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana
Sasaran :
1. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan
Tujuan 3 Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata
Sasaran :
1. Terhubungnya Aktivitas antar pulau
MISI 3
Tujuan 1 Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis
Sasaran :
1. Meningkatnya profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah
MISI 4
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing
Sasaran :
1. Meningkatnya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu
2. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)
3. Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa
Tujuan 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.

Sasaran :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Tujuan 3

Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja
2. Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

MISI 5**Tujuan 1**

Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu

Sasaran :

1. Meningkatnya kelestarian nilai- nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah

Tujuan 2

Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan

Sasaran :

1. Terwujudnya toleransi antar umat beragama
2. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing

MISI 6**Tujuan 1**

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Sasaran :

1. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Tujuan 2

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Tujuan 3

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa

MISI 7
Tujuan 1 Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga
Sasaran :
1. Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga
MISI 8
Tujuan 1 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat
Sasaran :
1. Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
Tujuan 2 Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan
Sasaran :
1. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
Sasaran :
1. Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
2. Terpenuhinya standar luas ruang terbuka hijau yang dikelola

Selanjutnya untuk dengan adanya arahan ini kemudian disusun indikator kinerja utama daerah Kabupaten Bintan dan juga Indikator kinerja perangkat daerah. Adapun indikator kinerja utama didalam mencapai tujuan terdapat 17 indikator sedangkan untuk Indikator Kinerja perangkat daerah memiliki 146 indikator yang akan dijabarkan pada bagian selanjutnya terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang pada dasarnya menjadi pondasi daripada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemudian menjadi tolak ukur didalam pelaksanaan kinerja pemerintahan. Seluruh pelaksanaan ini sebelumnya tertuang didalam pedoman rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bintan untuk tahun 2016-2021 yang masuk tahun keempat pada tahun 2019.

1.4. Gambaran umum kondisi daerah

1.4.1. Kondisi Geografis

1.4.1.1. Karakteristik Wilayah

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 1°00' Lintang Utara 1°20' Lintang Selatan 104°00' Bujur Timur 108°30' Bujur Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan adalah 87.411,92 Km² terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 Km² (1,50%) dan wilayah laut seluas 86.092,41 Km² (98,50%). Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bintan telah memekarkan beberapa wilayahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Bintan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong.

Selain itu juga dilakukan Pemekaran Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Dengan terjadinya pemekaran wilayah maka jumlah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bintan bertambah dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintan, Sri Kuala Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya, dan Tambelan.

1.4.1.2. Wilayah dan Batas Administrasi

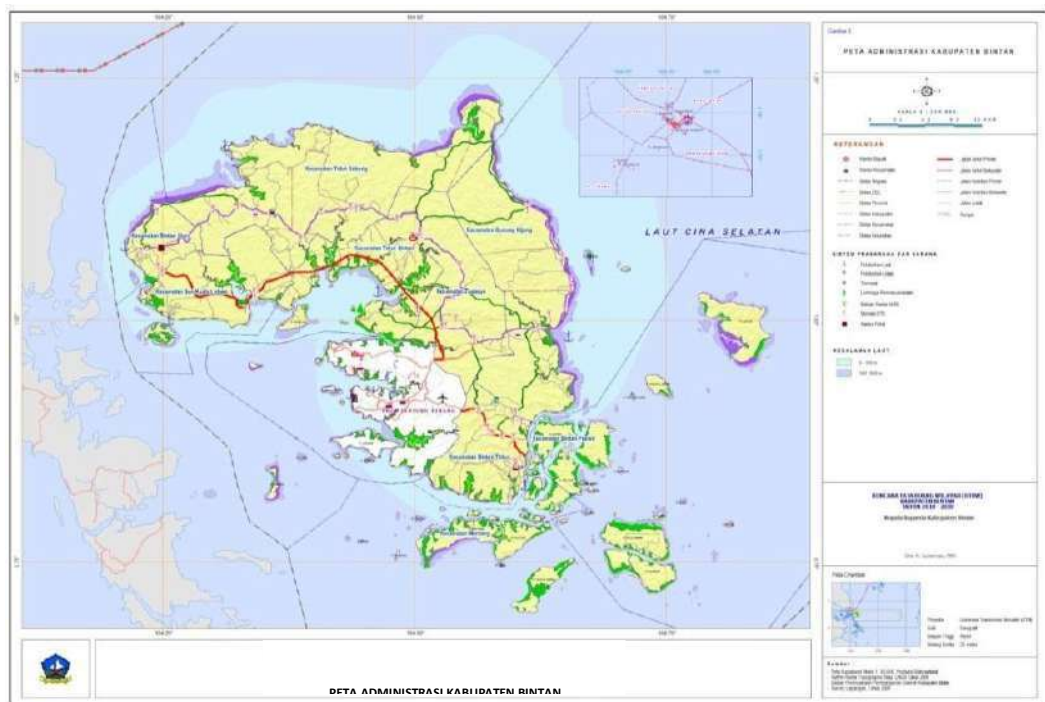
Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di

Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian paparan kontinental yang dikenal dengan nama Paparan Sunda, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Batas Wilayah Kabupaten Bintan



**Gambar 1.3
Peta Administratif Kabupaten Bintan**



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, tahun 2011-2031

Secara morfologi Pulau Bintan memiliki perbedaan ketinggian yang tidak ekstrim, yaitu antara 0-350 meter dari permukaan laut. Puncak tertinggi berada di Gunung Bintan 348 meter, dan selanjutnya Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar.

1.4.1.3. Topografi

Kabupaten Bintan pada umumnya memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-3% hingga di atas 40% pada wilayah pegunungan. Ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Bintan berkisar antara 0-50 meter diatas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kabupaten Bintan relatif datar, umumnya didominasi oleh kemiringan lereng yang berkisar antara 0%-15% dengan luas mencapai 55,98% (untuk wilayah dengan kemiringan 0-3% mencapai 37,83% dan wilayah dengan kemiringan 3%-15% mencapai 18,15%). Sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 15%-40% mencapai 36,09% dan wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 7,92%.

1.4.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan hasil pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebanyak 155.456 jiwa yang tersebar di 10 Kecamatan. Adapun penduduk terbanyak berada di

Kecamatan Bintan Timur dengan jumlah 44.733 jiwa atau menempati proporsi 29 persen (%) dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bintan, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Mantang dengan jumlah penduduk 4.230 Jiwa atau 3 (tiga) persen dari total keseluruhan penduduk di Kabupaten Bintan.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kecamatan Gunung Kijang	7,524	6,926	14,450
2	Kecamatan Bintan Timur	22,956	21,777	44,733
3	Kecamatan Bintan Utara	11,316	11,069	22,385
4	Kecamatan Teluk Bintan	5,794	5,366	11,160
5	Kecamatan Tambelan	2,382	2,271	4,653
6	Kecamatan Telok Sebong	9,045	8,416	17,461
7	Kecamatan Tuapaya	6,398	6,048	12,446
8	Kecamatan Mantang	2,240	1,990	4,230
9	Kecamatan Bintan Pesisir	3,623	3,339	6,962
10	Kecamatan Seri Kuala Lobam	8,602	8,374	16,976
KABUPATEN BINTAN		79,880	75,576	155,456

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan

Kondisi daripada kependudukan di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 1 (Satu) persen. Adapun perbandingan dari jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 79.880 jiwa sementara itu jumlah penduduk perempuan 75.576 jiwa dengan perbandingan persentase antara laki-laki dengan perempuan sebesar 51:49 persen (%). Sedangkan untuk *Sex Ratio* pada tahun 2019 di Kabupaten Bintan sebesar 106, artinya dalam 106 laki-laki terdapat 100 perempuan. Disamping itu juga berkenaan dengan kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 118 penduduk/Km². Untuk tingkat kepadatan

penduduk paling besar berada di Kecamatan Bintan Utara diikuti dengan Kecamatan Bintan Timur serta Sri Kuala Lobam, sedangkan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di wilayah Kabupaten Bintan berada di Kecamatan Tambelan.

Tabel 1.3
Kondisi Demografi Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	155,456
2.	Laki-Laki	Jiwa	79.880
3.	Perempuan	Jiwa	75.576
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1
5.	Kepadatan Penduduk	Jiwa/ Km ²	117.93
6.	Sex Ratio		106

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bintan, Tahun 2020

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatann Sipil Kabupaten Bintan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2019 LPP Kabupaten Bintan diestimasi 1%. Angka ini menunjukkan keberhasilan program pengendalian pertumbuhan penduduk masih berjalan cukup efektif.

1.4.3. Kondisi Ketenagakerjaan

Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bintan cenderung meningkat yaitu dari 104.117 menjadi 105.328, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya perpindahan penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja dari luar daerah ke Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan dan perpindahan penduduk ke Bintan karena tugas. Penambahan penduduk usia kerja diikuti dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan dari 84.010 menjadi 85.129. melihat angka tersebut diasumsikan bahwa terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 1.4
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan
Tahun 2018 – 2019

No	Indikator	Satuan	Jumlah
1.	Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)	Ribu orang	105.328
2.	Penduduk Angkatan Kerja	Ribu orang	85.129
3.	Penduduk Bekerja (15 tahun keatas)	Ribu orang	79.592
4.	Penganggur (Mencari Kerja)	Ribu orang	2.156
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	61.98*
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8.01*
7.	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	93,50

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan, Tahun 2019 dan

* BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Besaran daripada tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Bintan yang mencapai 93 persen dapat diindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja sekaligus menginterpretasikan bahwa kinerja menggembirakan dari pemerintah Kabupaten Bintan dalam urusan tenaga kerja. Berdasarkan hasil survei tenaga kerja (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik pada 2018 penduduk angkatan kerja mencapai sekitar 91,92 persen dan diantaranya telah bekerja. Peningkatan baik daripada segi angkatan kerja yang bekerja disektor formal dari tahun 2018 hingga tahun 2019 menjadi titik perhatian pemerintah dengan menggandeng sektor swasta dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal maupun replikasi *business model* diikuti dengan penanaman modal bagi lingkungan lapapangan pekerjaan bagi masyarakat serta iklim usaha. Berkaitan dengan angka pencari kerjas serta tingkat pengangguran terbuka, polarisasi daripada pekerja sektor informal di era digital ini masih belum dapat seluruhnya teridentifikasi, ditambah lagi dengan pertumbuhan daripada peralihan dari usaha konvensional seperti

usaha mikro yang lebih mengandalkan sistem elektronik dalam mekanisme pemasaran produk. Dalam perkembangannya hal ini masih perlu dijangkau didalam hal indikator pendataan daripada pemerintah. Hingga tahun 2019 persentase tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Bintan sebesar 93 % ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Besaran tingkat kesempatan kerja daripada angkatan kerja yang selanjutnya dengan semakin tinggi TKK maka korelasinya adalah kondisi kesempatan kerja semakin tinggi. Kerja-kerja pemerintah Kabupaten Bintan dalam perluasan kesempatan kerja terus dilakukan, sebab pertumbuhan industri pengolahan, pariwisata, makanan dan minuman juga berkontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja.

1.4.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan di Kabupaten Bintan. Pembangunan dalam lingkup daerah disamping meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten bintan fokus juga didalam memperhatikan aspek pembangunan manusia, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menekan disparitas distribusi investasi antar wilayah di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2019 sebagai salah satu kunci dalam menjalankan kinerja pemerintahan guna memastikan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pendapatan.

1.4.4.1. Indeks Pembangunan Manusia

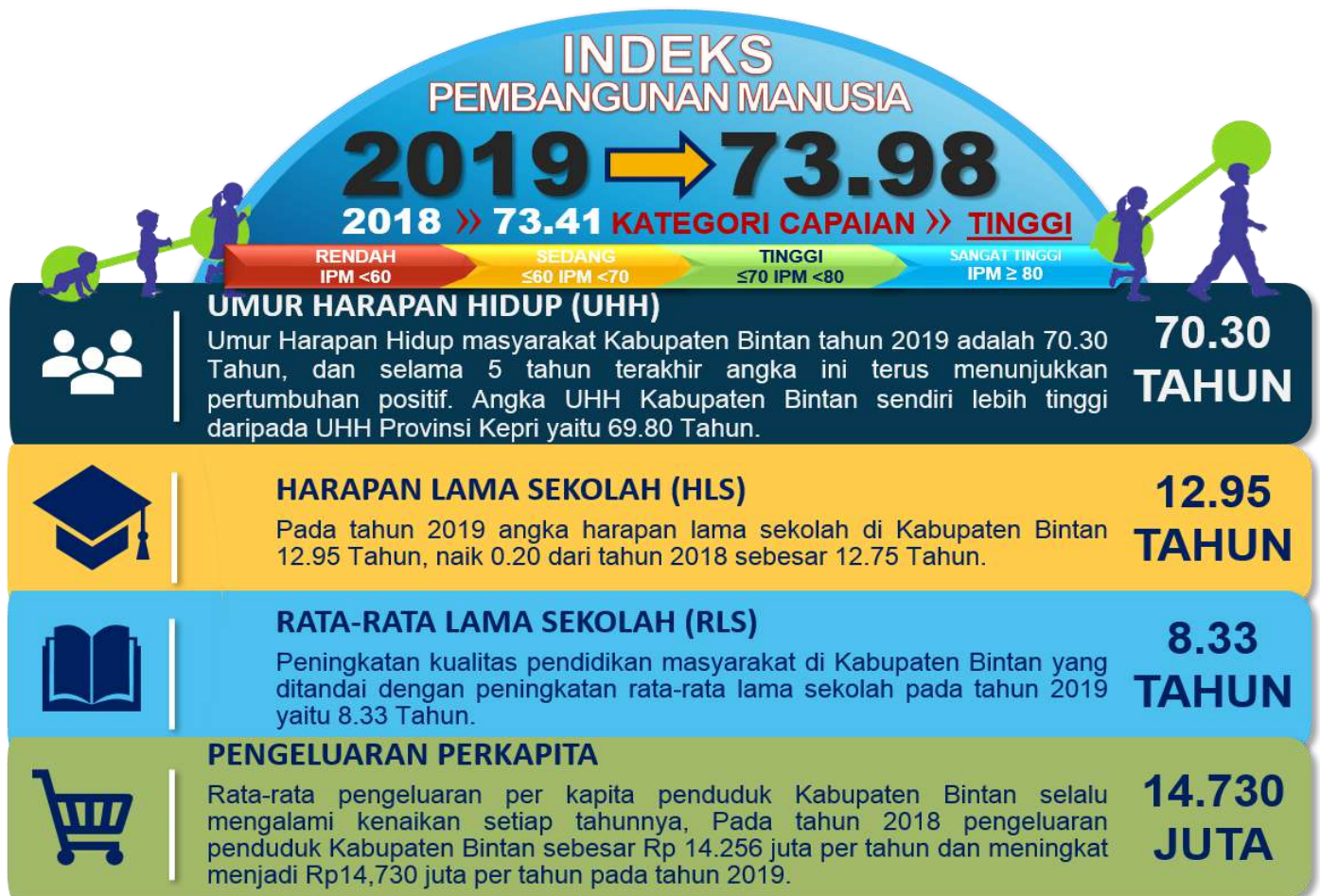
Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi

indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2014 BPS Indonesia mengubah metodologi perhitungan IPM, hal ini dikarenakan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; secara teknis penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi yang lain. Dengan perhitungan IPM metode baru maka indikator yang digunakan lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan adanya data rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, PNB menggantikan PDB juga lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Tingkat pencapaian pembangunan manusia diukur melalui indikator-indikator IPM yang merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik dengan mengacu pada kategori IPM yang telah ditetapkan. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang

diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Gambar 1.4

Potret Pembangunan Manusia di Kabupaten Bintan Tahun 2019



Sumber: Diolah dari Data Makro Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Bintan-BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Pencapaian IPM pada tahun 2019 di Kabupaten Bintan sudah tergolong kategori tinggi yaitu 73.98. Pemerintah Kabupaten Bintan menjaga tren positif ini selama hampir 7 (Tujuh) tahun berturut-turut berdasarkan pertumbuhan capaian IPM.

Disamping itu terkait dengan peningkatan umur harapan hidup (UHH) di tahun 2019 menjadi 70.30 tahun dapat merepresentasikan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bintan

yang semakin baik yang terlihat dari panjang umur dan hidup yang sehat. Peningkatan pada angka harapan sekolah (HLS) menjadi 12,95 tahun maupun rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 8.33 tahun tentu memberikan sinyal yang positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah dan tamat dari sekolah tersebut yang pada akhirnya memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan kualitas manusia di Kabupaten Bintan.

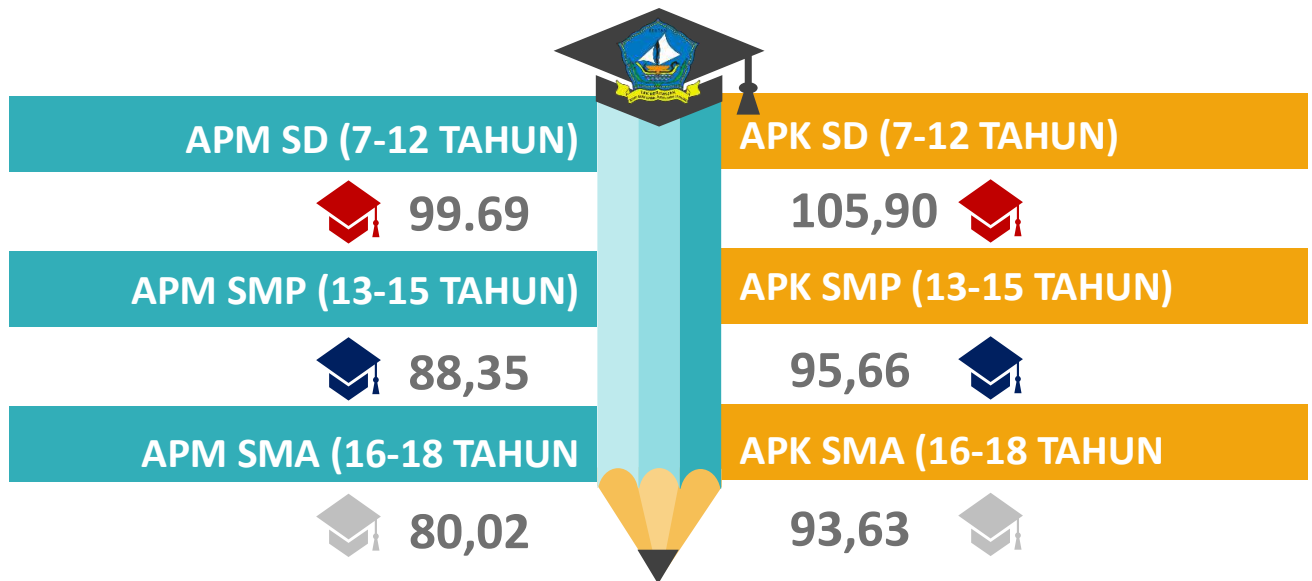
Meskipun begitu Kabupaten Bintan masih tetap berpotensi untuk meningkatkan angka IPM melalui berbagai usaha secara simultan, baik melalui pendekatan sektoral pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maupun secara terintegrasi melalui pemanfaatan daripada sisi anggaran pemerintah, partisipasi swadaya masyarakat serta peran serta dunia usaha, atau kemitraan antara pemerintah, masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan capaian IPM menjadi sangat tinggi serta kondisi pembangunan manusia, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan.

Pada sisi lainnya pencapaian terkait dengan pendidikan di Kabupaten Bintan untuk angka melek huruf (Penduduk 15 Tahun keatas) pada tahun 2019 berdasarkan rilis BPS Kabupaten Bintan sebesar 98,00 meningkat dari sebelumnya 97,62 pada tahun 2018. Hal ini juga diikuti perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bintan yang menunjukkan perkembangan pada tahun 2019 untuk APM SD dengan rentang usia (7-12 Tahun), SMP (13-15 Tahun) kemudian SMA (16-18) Tahun. Dorongan pemerintah Kabupaten Bintan kepada kelompok proporsi penduduk yang masih bersekolah tidak dapat dipungkiri bukan hanya menjadi skala prioritas didalam pencapaian tujuan daerah namun menjadi tanggung jawab serta motivasi tersendiri pimpinan daerah Kabupaten Bintan didalam mencerdaskan anak-anak daerah untuk dapat unggul dan berdaya

saing secara intelektualitas maupun juga pada dunia kerja kedepannya. Pencapaian APM dan APK pada tahun 2019 sebagaimana data BPS Kabupaten Bintan dapat terlihat pada infografis dibawah ini:

Gambar 1.5

APM dan APK di Kabupaten Bintan pada Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

1.4.4.2. Kondisi Penanggulangan Kemiskinan

Dari berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan manfaat (*outcome*) dalam menekan angka kemiskinan. Pada tahun 2019 angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0.24 persen menjadi 6.37 persen (%) yang sebelumnya pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Bintan adalah 6,61 persen (%). Berdasarkan rilis data dari Badan Pusat Statistik, capaian angka kemiskinan Kabupaten Bintan ini masih diatas rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5.90 % yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 1.1
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bintan Tahun 2015-2019



Sumber: Diolah dari Data Makro Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Bintan-BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bintan pada sepanjang tahun 2019 masih disinyalir akibat kondisi ekonomi global yang memberikan dampak negatif terhadap kondisi makro ekonomi nasional-regional dan berdampak pada kondisi awal tahun 2018 dan baru mulai pulih di awal kuartal ke-4 di tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk menekan jumlah penduduk miskin melalui program dan kegiatan baik itu dari pusat maupun kebijakan strategis daerah yang menysasar langsung ke target penduduk miskin. Dari 4 (Empat) Indikator makro kemiskinan yaitu tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan di Kabupaten Bintan terus menunjukkan perkembangan positif terhadap kondisi sosial-kesejahteraan masyarakat. Secara umum kondisi makro kemiskinan kabupaten Bintan dapat terlihat pada infografis dibawah ini:

Gambar 1.6

Indikator Makro Kemiskinan Kabupaten Bintan Tahun 2019

INDIKATOR		2018	2019
	TINGKAT KEMISKINAN	6.61	6.37
	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN	1.24	0.63
	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN	0.40	0.09
	GARIS KEMISKINAN (Rp/Kapita/Bulan)	367.924	384.396
	Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan TURUN pada Tahun 2019 sebesar 10.14 Ribu orang dari kondisi sebelumnya 10.42 Ribu orang di tahun 2018. Perbaikan ini ditunjukkan dari tren positif 4 (Empat) indikator makro kemiskinan yang menunjukkan kondisi sosial-kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.		

Sumber: Diolah dari Data Makro Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Bintan-BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Aktualisasi sinergitas *government to government* (G2G) daripada Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat terus dilakukan dalam upaya penting untuk menekan angka kemiskinan melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; (4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Seluruh upaya ini dapat terlaksana didukung seluruh stakeholder Kabupaten Bintan yang bersama-sama mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

1.4.5. Aspek Perkembangan Ekonomi

Salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, serta usaha dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Beberapa indikator makro pencapaian pembangunan ekonomi adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat inflasi. Gambaran daripada kondisi perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2019 berdampak kepada kondisi ekonomi nasional maupun juga daerah. Secara umum implikasi daripada fluktuasi global menjadi *multiplier effect* bagi kondisi ekonomi domestik. Sehingga ini menjadi akumulasi tantangan dihadapi oleh pemerintah, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, membesarnya sektor informal, posisi *wait and see* investor, sampai dengan tidak tercapainya pendapatan dari sektor perpajakan secara nasional. Hal ini ditambah lagi dengan kondisi dari eksternal, sejumlah faktor ikut berdampak pada ekonomi Indonesia di tahun 2019, seperti eskalasi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, penurunan permintaan serta stagnasi harga komoditas dunia, Brexit, ketegangan dan konflik politik di sejumlah kawasan, dan krisis ekonomi di sejumlah negara Amerika Latin. Adanya kebijakan fiskal dan moneter Indonesia di tengah tren perlambatan ekonomi global menjadi salah satu dampak bagi daerah terutama proyeksi perubahan ekonomi diawal tahun serta koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi ditahun 2019 mengikuti perkembangan global. Hal ini berdampak pula pada konteks penganggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terutama capaian-capaian strategis jangka menengah dan selama setahun penyelenggaraan kinerja yang mesti disinergikan antara Nawacita Presiden RI dan

prospek kebutuhan pembangunan daerah. Capaian dari Pemerintah Kabupaten Bintan didalam ekonomi makro dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5
Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2019
1	PDRB ADHB¹	Milyar Rupiah	21.301,05
2	PDRB ADHK¹	Milyar Rupiah	14.540,09
3	Nilai Investasi PMDN² (Realisasi)	Juta Rupiah	1.240.880.125.339
4	Nilai Investasi PMA² (Realisasi)	Juta US\$	4.454.927.671
6	Inflasi¹	Persen	2.40
7	Pertumbuhan Ekonomi¹	Persen per Tahun	4.71

Sumber: ¹BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020 dan ²DPMPTSP Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Data bahwa kinerja ekonomi nasional yang juga mengalami perlambatan sepanjang tahun 2019 secara bersamaan terjadi dengan kondisi perekonomian di daerah. Pencapaian target indikator kinerja utama Kabupaten Bintan masih terjaga terutamanya pertumbuhan ekonomi tumbuh 4,71 % di tahun 2019. Hal ini seiring perkembangan positif dari kedua struktur PDRB ADHK maupun PDRB ADHB karena pada keduanya menunjukkan tren peningkatan begitu pula dengan kondisi penanaman modal serta pengendalian indeks harga konsumen (inflasi).

1.4.5.1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi-PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Didalam penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan maka PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2019 atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp.21,03 trilyun,- meningkat dari tahun 2018 yaitu Rp.19,59 trilyun,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha. Adapun kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2019 pada 14 sektor lapangan usaha mengalami peningkatan, sedangkan lainnya tumbuh sama seperti tahun sebelumnya namun juga tidak dapat dipungkiri terdapat lambat dan menurun hal ini dipengaruhi daripada sisi permintaan maupun juga ketersediaan. Dari sisi kewenangan juga pada sektor pertambangan memberikan dampak terhadap sektor usaha yang menjadi komponen di daerah. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan yaitu Industri, Pariwisata dan Pertanian, adapun uraian perkembangan daripada PDRB ADHB Kabupaten Bintan tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.6
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan
Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah), Tahun 2018-2019

No.	Lapangan Usaha	Tahun	
		2018	2019
SEKTOR PRIMER		2545.08	2555.93
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1231.35	1314.96
2	Pertambangan dan Penggalian	1313.73	1240.97
SEKTOR SEKUNDER		7681.44	8356.36
3	Industri Pengolahan	7657.43	8331.31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24.01	25.05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.43	12.20
6	Konstruksi	4067.02	4652.21
SEKTOR TERSIER		2243.4	2453.08
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1798.19	1967.03
8	Transportasi dan Pergudangan	445.21	486.05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1164.88	1244.82
10	Informasi dan Komunikasi	226.17	245.97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	321.86	340.64
12	Real Estate	216.52	229.94
13	Jasa Perusahaan	0.17	173.20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	536.71	582.19
15	Jasa Pendidikan	368.23	389.73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	181.28	202.20
17	Jasa lainnya	33.65	35.58
PDRB ADHB		19597.84	21301.05

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Peningkatan dari PDRB ADHB Kabupaten Bintan pada taun 2019 diikuti dengan PDRB ADHK. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bintan maka PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2019 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 diestimasi sebesar Rp.14,54 trilyun,- meningkat dari tahun 2018 yaitu Rp.13,88 trilyun,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha. Adapun kinerja

sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2019 pada 14 sektor lapangan usaha mengalami peningkatan, sedangkan 3 lainnya mengalami penurunan dipengaruhi daripada sisi permintaan maupun juga ketersediaan. Kesiapan pemerintah Kabupaten Bintan didalam perkembangan kondisi ekonomi makro disikapi dengan pelaksanaan kerangka ekonomi makro daerah secara terpadu dan terintegrasi baik secara internal maupun eksternal untuk memastikan iklim dunia usaha serta investasi berjalan sesuai dengan koridor yang telah direncanakan.

Tabel 1.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar
Rupiah), Tahun 2018-2019

No.	Lapangan Usaha	Tahun	
		2018	2019
SEKTOR PRIMER		1907.06	1851.52
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	838.95	865.85
2	Pertambangan dan Penggalian	1068.11	985.67
SEKTOR SEKUNDER		8162.57	8655.85
3	Industri Pengolahan	5356.75	5590.14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19.91	20.3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.71	8.41
6	Konstruksi	2777.2	3037
SEKTOR TERSIER		3816.88	4029.72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1332.79	1405.95
8	Transportasi dan Pergudangan	316.71	335.45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	779.86	824.89
10	Informasi dan Komunikasi	205.39	214.18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	248.36	261.27
12	Real Estate	167.18	175.55
13	Jasa Perusahaan	0.14	0.14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	342.13	367.23
15	Jasa Pendidikan	261.89	273.2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.20	145.73
17	Jasa lainnya	25.23	26.13
PDRB ADHK		13.886,11	14.540.09

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Adapun untuk 5 (lima) besar sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB Bintang pada Tahun 2019 meliputi lapangan usaha pada sektor Industri Pengolahan sebesar 38,45 %; sektor konstruksi 20,89 %; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,67%; sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 6,78 %, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,67 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Distribusi Persentase Kontribusi Sektor Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2019

No.	Lapangan Usaha	Tahun	
		2018	2019
SEKTOR PRIMER			
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.04	5.95
2	Pertambangan dan Penggalian	7.69	6.78
SEKTOR SEKUNDER			
3	Industri Pengolahan	38.58	38.45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	0.14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06
6	Konstruksi	20.00	20.89
SEKTOR TERSIER			
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.60	9.67
8	Transportasi dan Pergudangan	2.28	2.31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.62	5.67
10	Informasi dan Komunikasi	1.48	1.47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.79	1.80
12	Real Estate	1.20	1.21
13	Jasa Perusahaan	0.0010	0.0010
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.46	2.53
15	Jasa Pendidikan	1.89	1.88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.99	1.00
17	Jasa lainnya	0.18	0.18
PDRB ADHK		100	100

Sumber: BPS Kabupaten Bintang, Tahun 2020

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Bintan mampu tumbuh 4,71 persen lebih lambat dibanding pertumbuhan selama tahun 2018 yang sebesar 4,85 persen. Kondisi laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan yang juga mengindikasikan LPE di Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional
Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Bintan, 2018–2019

No.	Lapangan Usaha	Tahun	
		2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.45	3.21
2	Pertambangan dan Penggalian	-19.97	-7.72
3	Industri Pengolahan	4.89	4.36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	- 0.43	1.96
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.97	1.36
6	Konstruksi	16.14	9.46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.44	5.49
8	Transportasi dan Pergudangan	3.67	5.92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.29	5.77
10	Informasi dan Komunikasi	5.45	4.28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.59	5.2
12	Real Estate	5.37	5.01
13	Jasa Perusahaan	1.22	1.82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.56	7.34
15	Jasa Pendidikan	2.68	4.32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.59	6.22
17	Jasa lainnya	4.57	3.56
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK		4.85	4.71

Sumber: BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2020

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018. Pada tahun 2019 LPE Kabupaten Bintan adalah 4,71% sebelumnya pada tahun 2018 pada posisi tumbuh sebesar 4,85%. Perlambatan dari LPE di Kabupten Bintan pada tahun 2019 disinyalir sebagai imbas dari pemulihan ekonomi global yang lebih baik dibandingkan kerkiraan sebelumnya, dampak pemulihan ekonomi dunia ini menyebabkan volume perdagangan dunia meningkat, yang slenajutnya mendorong peningkatan harga komoditas dunia. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh peningkatan ekspor komoditas serta akselerasi investasi baik dalam maupun luar negeri.

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK).

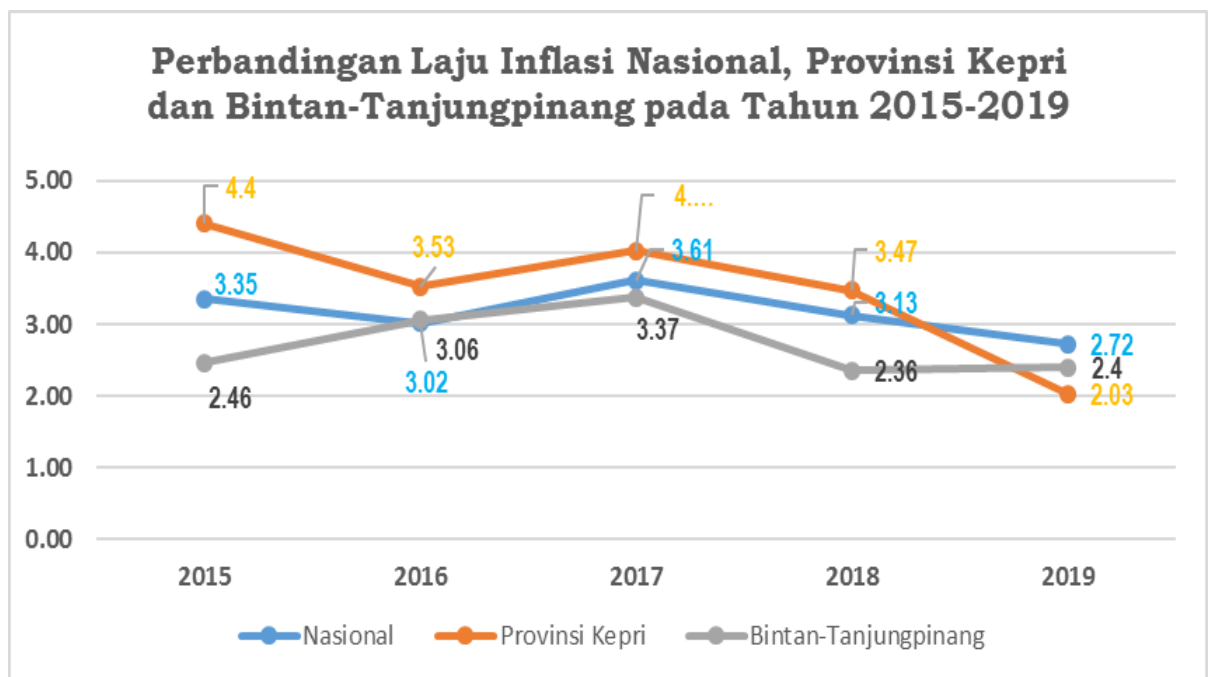
Tabel 1.10
Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Bintan (berdasarkan
IHK Kota Tanjungpinang) Tahun 2018-2019

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun	
		2018	2019
1.	Bahan Makanan	2,55 %	4,73 %
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,90 %	1,76 %
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,06 %	0,71 %
4.	Sandang	2,68 %	3,36 %
5.	Kesehatan	0,49 %	1,84 %
6.	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	3,02 %	2,88 %
7.	Transport, Kominikasi dan Jasa Keuangan	3,79 %	1,82 %
UMUM		2,35	2,40

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2019

IHK Kabupaten Bintan hingga saat ini masih mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang dimana secara umum pada tahun 2019 IHK Kota Tanjungpinang mengalami sedikit kenaikan namun masih sangat terkendali dari tahun 2018 yaitu dari 2,36% naik sekitar 0.04 % menjadi 2,40%. Secara nasional untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 tetap rendah terkendali pada level 2,72% (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$., sedangkan secara tahunan IHK dikepri mengalami infasi sebesar 2,03 persen (yoy), inflasi Bintan yang mengikuti dari perkembangan Tanjungpinang 2019 terkendali capaian Inflasi sebesar 2,40 persen (*Year on year*) dipicu oleh kelompok bahan makanan sebesar 4,01 % (*Year on year*) dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,81 persen (*month to month*) terutama tarif angkutan udara.

Grafik 1.2



Sumber: diolah dari data BPS Kepri dan BPS Bintan, Tahun 2020

Pengendalian dari angka inflasi ini merupakan salah satu bukti nyata kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha pengendalian harga pasar dalam rangka menjaga daya beli

masyarakat. Penguatan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan terus dilanjutkan untuk pengendalian harga. Secara khusus Kabupaten Bintan dalam koordinasi inflasi daerah melibatkan lintas sektor didalam tim pengendali inflasi daerah untuk menjaga agar inflasi terus menurun dan terkendali dalam sasaran dipengaruhi oleh makin terjangkau nya ekspektasi inflasi dan terjaganya kestabilan selaras dengan arahan pemerintah pusat untuk mengimplementasikan strategi 4K dalam menekan inflasi yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif untuk dapat menjaga dan mendukung capaian sasaran inflasi nasional sebesar $3 \pm 1\%$ ditahun ini.

1.4.6. Potensi Unggulan Daerah

Pola pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan perkotaan dan perdesaan terdiri dari Kawasan lindung, Kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan hutan lindung sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah secara umum, terutama pada area sekitar gunung yang ada di setiap pulau Kabupaten Bintan dengan luas 4.490,60 Ha, Sedangkan pemanfaatan yang cukup dominan adalah kawasan lindung setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, mata air dan waduk sebesar 37.223,63 Ha.

Untuk pemanfaatan kawasan budidaya meliputi kawasan perkebunan, dimana pada kawasan ini tersebar di seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, dan Pantai

Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang. Untuk pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut, yang pada umumnya disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan.

Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu, ikan kakap berdasarkan permintaan terus meningkat baik lokal maupun international, hal ini untuk mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dari berbagai jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus* spp), kakap (*Lutjanus* spp), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km². Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau- pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

Salah satu stimulan peningkatan potensi unggulan daerah Kabupaten Bintan adalah dengan ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu Kawasan *Free Trade Zone*. Pembentukan *Free Trade Zone* di Kabupaten Bintan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Adapun daerah yang termasuk dalam *Free Trade Zone* Bintan adalah kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah Pulau Bintan. Terdapat 5 lokasi lain yang berupa *enclave* yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan Maritim Bintan Timur, kawasan galang Batang, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Industri Dompok Barat. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjungpinang menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Dalam hal ini kawasan Senggarang dan kawasan industri Dompok Barat termasuk ke dalam *Free Trade Zone* Bintan wilayah kota Tanjungpinang. Kawasan Industri Lobam termasuk dalam lingkup Kawasan Bintan Bagian Utara. *Free Trade Zone* Bintan dengan luas 62.017,20 Ha tersebut saat ini 23.000 Ha merupakan kawasan wisata internasional Lagoi yang dikelola sendiri oleh Penanam Modal Asing dengan *core* wisata pantai dan golf. Sedangkan seluas 4.000 Ha merupakan kawasan industri Lobam.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Batam, Bintan dan Karimun maka kawasan *Free Trade Zone* Batam Bintan Karimun mencakup 26 Kecamatan yang 7 kecamatan diantaranya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Bintan. Adapun Struktur Ruang Kawasan *Free Trade Zone* Bintan terdiri dari sistem pusat kegiatan (PK) Primer yaitu:

1. Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor, yaitu kawasan industri Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang,

Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Maritim Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi utama Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor ini adalah pengembangan industri skala besar. Sedangkan fungsi pendukungnya sebagai simpul transportasi, pemukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal.

2. Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik, yaitu Kawasan Wisata Internasional Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, Kawasan Wisata Penghujan-Kuala Sempang di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik ini adalah pengembangan kepariwisataan. Sedangkan fungsi pendukungnya sebagai pemukiman dan simpul transportasi penumpang.
3. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, yaitu Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa ini adalah perdagangan dan jasa internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pemukiman, simpul transportasi penumpang dan wisata belanja.
4. Pusat Kegiatan Transportasi Laut, yakni pelabuhan Bandar Seri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan teluk Bintan, dan Pelabuhan Kijang di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi Utama Pusat Kegiatan Transportasi Laut ini adalah pertransportasian.

Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pelayanan perpindahan penumpang dan barang.

5. Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara, yakni Mentigi di Kecamatan Bintan Utara, Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, dan Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong. Fungsi utama Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara ini adalah pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah menjaga kedaulatan KNRI yang meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara.

6. Pusat Kegiatan Kesehatan, Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan berkualitas internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya penyediaan pelayanan perkotaan.

Selain itu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017, KEK Galang Batang resmi ditetapkan dan telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagai bentuk upaya pengembangan potensi perindustrian Kabupaten Bintan. KEK yang berlokasi di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tersebut memiliki luas lahan sebesar 2.333,6 Ha. KEK Galang Batang akan terdiri atas 4 zona yaitu: Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, dan Zona Energi. KEK ini akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refining) menjadi alumina, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot (smelting), energi, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), logistik, pengembangan pelabuhan bongkar muat dan

lainnya. Sektor pertambangan dan penggalian telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Bintan. Dengan ditetapkannya KEK Galang Batang sebagai tempat pemusatan kegiatan industri dengan pengolahan produk dari hulu ke hilir, KEK ini diperkirakan akan menarik investasi senilai Rp 36,25 triliun selama 6 tahun ke depan. Selain itu, KEK Galang Batang juga diproyeksikan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 23.200 orang.

Kabupaten Bintan masih mengandalkan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang PDRB terbesar pada 5 tahun terakhir dengan kontribusi mencapai 38,54%. *Spill over effect* pembangunan Singapura dan Malaysia yang merupakan kutub utama pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara telah berimbas pada perkembangan Industri di Kabupaten Bintan sebagai pendukung sektor industri Singapura. Sedangkan sub sektor Pariwisata dan jasa merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kabupaten Bintan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 PAD dari sub sektor pariwisata mencapai Rp148 Milyar atau mencapai 58,66% dari total realisasi PAD Kabupaten Bintan tahun 2018.

1.5. Sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Mekanisme penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun ruang lingkup LKPJ diantaranya berkenaan dengan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Adapun hasil daripada penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa (a) capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan

pemerintahan, (b) kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya serta (c) tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya. Secara keseluruhan penyusunan LKPJ ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat dasar hukum, visi dan misi kepala daerah serta data umum daerah

BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bab ini tentang penjelasan mengenai perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah serta pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Adapun muatan pada Bab ini merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini adalah capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada bab ini berisikan tentang urusan pemerintahan dengan tugas pembantuan serta termasuk dengan hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan, termasuk didalamnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah didalam tindak lanjut penyelesaian

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok, sebagai ringkasan eksekutif atas rangkaian kegiatan dan hasil yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Bintan.



BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Bintan yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan keuangan daerah erat sekali kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan, untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri.

Dalam hal penyusunan APBD Kabupaten Bintan di Tahun Anggaran 2019 pada dasarnya pemerintah senantiasa menerapkan sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana dalam konteks

pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola keuangan daerah yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi program-program yang dicanangkan. Pengelolaan ini menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah (pos pendapatan), pengeluaran belanja (pos belanja) dan sumber-sumber pembiayaan (pos biaya).

Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna memberikan petunjuk dan ketentuan- ketentuan umum yang telah disepakati bersama sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan instrument dalam penyusunan perencanaan anggaran serta sebagai dasar penilaian kinerja keuangan daerah. Dengan kaedah-kaedah kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar menyasar pada program-program yang telah direncanakan tetap terpadu. Selanjutnya untuk APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Gambaran APBD Perubahan Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Anggaran
1	Anggaran Pendapatan	Rp. 1.252.215.500.798,38
2	Anggaran Belanja	Rp. 1.464.158.403.537,97
	Defisit	Rp. 211.942.902.739,59
3	Pembiayaan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 231.942.902.739,59
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.000.000.000,00
		Rp. 211.942.905.739,59

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Adapun realisasi dari pelaksanaan APBD tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Anggaran	
1	Anggaran Pendapatan	Rp.	1.321.909.450.698,91
2	Anggaran Belanja	Rp.	1.327.556.986.977,38
	Defisit	Rp.	5.647.536.278,47
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	213.946.402.739,59
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.000.000.000,00
		Rp.	211.946.402.739,59
S I L P A		Rp.	206.298.866.461,12

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1.1. Intenfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Guna memenuhi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, baik itu menyangkut upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dan beberapa kegiatan lainnya, diantaranya:

- a) Melaksanakan penataan pengelolaan maupun potensi komponen pendapatan;
- b) Pendataan pada tempat-tempat usaha wajib pajak untuk meyakini omzet yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- c) Melaksanakan pendataaan administrasi pajak dan retribusi daerah;

- d) Pembinaan wajib pajak yang meliputi cara pengisian SPTPD yang baik dan benar, kewajiban membayar pajak secara periodik, perhitungan omzet yang kena pajak;
- e) Pemeriksaan wajib pajak pada wajib pajak yang menghitung sendiri (MPS) dan dilakukan secara rutin;
- f) Sosialisasi peraturan perpajakan daerah;
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan pungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan;
- h) Melakukan monitoring atas pendapatan daerah secara periodik untuk dilakukan evaluasi dan merumuskan rencana tindaknya;
- i) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam rangka perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
- j) Melaksanakan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat maupun Propinsi tentang penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- k) Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait agar kegiatan operasional dapat berlangsung dengan efektif baik secara horizontal maupun vertikal antar level pemerintahan serta kalangan profesi yang memiliki pengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah;

2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2019 terdapat peningkatan target pendapatan daerah sebesar 1,06% dari tahun anggaran yang lalu. Peningkatan tersebut terdiri dari gabungan atas peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1,01%, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 0,96% dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 1,27% dibandingkan target penerimaan tahun 2018.

Adapun target penerimaan daerah tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Target Penerimaan Daerah Tahun 2018-2019

No	Komponen	Target		%
		2018	2019	
1	Pendapatan Asli Daerah	240.554.279.251,96	256.744.718.840,00	106,73
	Pajak Daerah	193.966.820.000,00	201.352.420.000,00	103,81
	Retribusi Daerah	8.624.000.000,00	13.366.600.000,00	154,99
	Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.994.946.188,00	10.477.231.219,00	74,86
	Lain-lain PAD yang Sah	23.968.513.063,96	31.548.467.621,00	131,62
2	Dana Perimbangan	653.872.576.000,00	833.510.234.047,00	127,47
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	46.107.994.000,00	142.788.712.047,00	309,68
	Dana Alokasi Umum	484.586.669.000,00	517.353.797.000,00	106,76
	Dana Alokasi Khusus	123.177.913.000,00	173.367.543.000,00	140,76
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	116.917.723.438,01	161.960.527.911,00	138,53
	Jumlah	1.011.344.578.689,97	1.252.215.480.798,38	123,82

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2018, maka realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bintan ditahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 119,43%. Didalam realisasi tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah

(PAD) mengalami kenaikan sebesar 140,42%, dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 127,47%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami kenaikan sebesar 138,53%. Adapun Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018-2019 (dalam rupiah)

No	Komponen	Realisasi		%
		2018	2019	
1	Pendapatan Asli Daerah	265.020.513.500,05	372.151.880.597,74	140,42
	Pajak Daerah	209.689.787.533,74	300.131.802.766,81	143,13
	Retribusi Daerah	10.391.753.897,00	19.026.602.431,00	183,09
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.994.946.188,00	12.120.731.219,00	89,61
	Lain-lain PAD yang Sah	30.944.025.881,31	40.872.744.180,93	132,09
2	Dana Perimbangan	740.417.202.564,00	805.321.051.217,00	108,77
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	140.258.373.448,00	126.901.263.101,00	90,48
	Dana Alokasi Umum	484.586.669.000,00	514.706.921.000,00	106,22
	Dana Alokasi Khusus	115.572.160.116,00	163.712.867.116,00	141,63
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	101.412.803.097,00	144.436.518.884,17	142,42
	Jumlah	1.106.850.519.161,05	1.321.909.450.698,91	119,43

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Untuk mengetahui penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Realisasi pendapatan asli daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2019 (dalam rupiah)

NO	SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH		SELISIH
		TARGET	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	BPPRD	201.356.620.000,00	301.577.404.190,59	100.220.784.190,59
2	DINAS KESEHATAN	20.334.821.621,00	17.461.936.102,00	(2.872.885.519,00)
3	DINAS PERHUBUNGAN	6.395.000.000,00	8.672.600.000,00	2.277.600.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300.000.000,00	712.370.000,00	412.370.000,00
5	DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	6.380.000.000,00	9.366.321.483,00	2.986.321.483,00
6	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDAG	42.400.000,00	73.697.000,00	31.297.000,00
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	200.000.000,00	175.000.000,00	(25.000.000,00)
8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.017.206.659.177,38	961.096.390.795,84	(56,110,268,381.54)
Total		1.252.215.500.798,38	1.321.909.450.698,91	69.693.949.900,53

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan paling tinggi baik jumlah rupiah maupun presentase pencapaian target adalah perolehan dari pendapatan yang dikelola oleh BKAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pendapatan daerah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bintan pada saat ini antara lain sebagai berikut:

- a) Belum tersedianya secara keseluruhan prosedur hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Terdapat beberapa jenis pungutan pada sektor retribusi daerah yang belum dapat diberdayakan, hal ini disebabkan tidak tersediaanya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.
- c) Tidak terkonsentrasinya wajib pajak dan wajib retribusi yang disebabkan karena letak geografis Kabupaten Bintan yang cukup luas, sehingga terdapat hambatan dalam mensosialisasikan Perda-Perda pungutan oleh dinas dan instansi terkait, sehingga berakibat pada kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya.

Adapun solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah.
- c) Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

- d) Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara intensif.

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.1 Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka pada tahun 2019 kebijakan yang dilaksanakan melalui peningkatan belanja prioritas untuk:

- a) Peningkatkan aksesabilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan rendah;
- b) Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat usaha ekonomi lemah seperti pedagang, usaha kecil dan menengah, petani, serta nelayan;
- c) Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, serta listrik di wilayah kantong-kantong kemiskinan, desa-desa dan pulau terpencil;
- d) Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Keempat prioritas di atas menjadi sasaran utama dalam pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2019. Disamping prioritas tersebut pemerintah daerah juga memperhatikan

beberapa prioritas yang perlu menjadi perhatian daerah sejalan dengan prioritas nasional, prioritas dimaksud adalah:

- a) Penanggulangan kemiskinan;
- b) Peningkatan ketahanan pangan;
- c) Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha;
- d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- e) Pembangunan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik;
- f) Pengembangan kebudayaan, kualitas dan inovasi teknologi;

Berbagai prioritas tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD tahun 2016-2021 serta RKPD tahun 2019 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah dan kebijakan umum belanja daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi belanja daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari sisi perencanaan belanja, ditunjukkan dari alokasi belanja berdasarkan bidang urusan pemerintahan maupun kelompok belanja.

Tabel 2.6
Alokasi anggaran belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2019

URAIAN	TAHUN 2019	
	ANGGARAN (Rp)	%
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	790.665.774.984,97	54,00
PENDIDIKAN	281.960.124.009,97	19,26
Dinas Pendidikan	281.960.124.009,97	19,26
KESEHATAN	181.557.204.775,00	12,40
Dinas Kesehatan	181.557.204.775,00	12,40
PEKERJAAN UMUM	148.778.217.278,00	10,16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.778.217.278,00	10,16
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	127.793.538.892,00	8,73
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	127.793.538.892,00	8,73
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.586.738.234,00	2,57
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.662.521.513,00	0,46
Satuan Polisi Pamong Praja	21.633.728.299,00	1,48
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.290.488.422,00	0,63
SOSIAL	12.989.951.796,00	0,89
Dinas Sosial	12.989.951.796,00	54,00
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	143.222.397.416,00	19,26
TENAGA KERJA	6.481.679.252,00	0,44
Dinas Tenaga Kerja	6.481.679.252,00	0,44
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.105.569.742,00	0,42
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	6.105.569.742,00	0,42

Penduduk dan Keluarga Berencana		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
PANGAN	13.772.013.832,00	0,94
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.772.013.832,00	0,94
PERTANAHAN	8.594.324.400,00	0,59
Sekretariat Daerah	8.594.324.400,00	0,59
LINGKUNGAN HIDUP	9.476.092.141,00	0,65
Dinas Lingkungan Hidup	9.476.092.141,00	0,65
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10.855.656.950,00	0,74
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.855.656.950,00	0,74
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	8.207.773.988,00	0,56
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.207.773.988,00	0,56
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.122.506.228,00	0,28
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.122.506.228,00	0,28
PERHUBUNGAN	15.385.336.696,00	1,05
Dinas Perhubungan	15.385.336.696,00	1,05
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.421.227.599,00	1,33
Dinas Komunikasi dan Informatika	19.421.227.599,00	1,33
KOPERASI, USAHAN KECIL DAN MENENGAH	8.078.884.760,00	0,55
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	8.078.884.760,00	0,55
PENANAMAN MODAL	11.671.530.590,00	0,80
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11.671.530.590,00	0,80
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10.850.899.852,00	0,74
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10.850.899.852,00	0,74
STATISTIK	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
PERSANDIAN	135.000.000,00	0,01
Dinas Komunikasi dan Informatika	135.000.000,00	0,01
KEBUDAYAAN	3.229.676.000,00	0,22
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.229.676.000,00	0,22
PERPUSTAKAAN	6.019.077.232,00	0,41

Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.019.077.232,00	0,41
KEARSIPAN	151.408.000,00	0,01
Dinas Perpustakaan dan Arsip	151.408.000,00	0,01
URUSAN PILIHAN	42.737.713.386,00	2,92
KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.528.279.638,00	1,33
Dinas Perikanan	19.528.279.638,00	1,33
PARIWISATA	16.401.900.498,00	1,12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16.401.900.498,00	1,12
PERTANIAN	3.954.347.600,00	0,27
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.954.347.600,00	0,27
PERDAGANGAN	1.952.470.650,00	0,13
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.952.470.650,00	0,13
PERINDUSTRIAN	900.715.000,00	0,06
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	900.715.000,00	0,06
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	487.532.517.751,00	33,30
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	205.822.770.905,00	14,06
Sekretariat DPRD	37.659.632.364,00	2,57
Sekretariat Daerah	79.946.193.521,00	5,46
Kecamatan Bintan Timur	16.850.681.952,00	1,15
Kecamatan Gunung Kijang	9.535.642.254,00	0,65
Kecamatan Teluk Bintan	6.971.834.210,00	0,48
Kecamatan Bintan Utara	14.642.956.327,00	1,00
Kecamatan Teluk Sebong	7.344.797.550,00	0,50
Kecamatan Tambelan	6.416.373.928,00	0,44
Kecamatan Seri Kuala Lobam	9.579.904.127,00	0,65
Kecamatan Toapaya	8.696.339.058,00	0,59
Kecamatan Bintan Pesisir	3.939.676.524,00	0,27
Kecamatan Mantang	4.163.739.090,00	0,28
Inspektorat Daerah	75.000.000,00	0,01
PENGAWASAN	11.291.316.596,00	0,77
Inspektorat Daerah	11.291.316.596,00	0,77
PERENCANAAN	19.155.549.796,00	1,31
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.757.800,00	0,01
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.068.791.996,00	1,30
KEUANGAN	225.876.063.215,00	15,43

Badan Keuangan dan Aset Daerah	200.689.431.709,00	13,71
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	25.186.631.506,00	1,72
KEPEGAWAIAN	23.975.493.239,00	1,64
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	23.975.493.239,00	1,64
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.411.324.000,00	0,10
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.411.324.000,00	0,10
J U M L A H	1.464.158.403.537,97	100,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Adapun untuk pengalokasian Belanja Daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2019 terdiri atas:

2.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pengalokasian belanja pegawai mengalami peningkatan, kebijakan ini lebih disebabkan karena penambahan jumlah pegawai dan perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dengan memberikan insentif ataupun tambahan penghasilan atas beban kerjanya.

Terhadap komponen belanja bunga tidak dialokasikan anggaran tersebut pada tahun 2019, sedangkan untuk bantuan sosial dan hibah pemerintah daerah mengambil kebijakan tetap mengalokasikan anggarannya hal ini diupayakan guna memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu atas beban ekonomi yang terus bertambah akibat kenaikan harga-harga serta perbaikan strata sosial dalam masyarakat.

Untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan hal ini diupayakan guna membantu proses demokratisasi dan otonomi pemerintahan desa yang mana pada tahun yang bersangkutan sebagian desa mengalami pergantian kepemimpinannya dan telah mulai dilaksanakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Sedangkan pada belanja tidak terduga pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sesuai dengan kondisi dan pengembalian pendapatan tahun-tahun sebelumnya.

2.2.3 Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 2.7
Persentase Alokasi Anggaran Belanja berdasarkan bagian belanja
APBD tahun 2019

URAIAN	PERSENTASE TERHADAP TOTAL		Jumlah	%	%
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			
Pendidikan	173.974.355.905,96	107.985.768.104,01	281.960.124.009,97	61,70	38,30
Kesehatan	63.594.390.470,00	117.962.814.305,00	181.557.204.775,00	35,03	64,97
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.801.102.278,00	141.977.115.000,00	148.778.217.278,00	4,57	95,43
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.028.763.142,00	123.764.775.750,00	127.793.538.892,00	3,15	96,85
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	27.213.467.077,00	10.373.271.157,00	37.586.738.234,00	72,40	27,60
Sosial	3.581.822.296,00	9.408.129.500,00	12.989.951.796,00	27,57	72,43
Tenaga Kerja	3.094.456.832,00	3.387.222.420,00	6.481.679.252,00	47,74	52,26
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.159.126.550,00	2.610.183.346,00	6.769.309.896,00	61,44	38,56
Pangan	10.206.607.582,00	3.565.406.250,00	13.772.013.832,00	74,11	25,89
Pertanahan	0,00	8.594.324.400,00	8.594.324.400,00	0,00	100,00
Lingkungan Hidup	6.083.686.901,00	3.392.405.240,00	9.476.092.141,00	64,20	35,80
Administrasi Kependudukan dan Capil	5.559.664.410,00	5.295.992.540,00	10.855.656.950,00	51,21	48,79
Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.082.194.216,00	4.125.579.772,00	8.207.773.988,00	49,74	50,26
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	4.122.506.228,00	4.122.506.228,00	0,00	100,00
Perhubungan	5.353.087.856,00	10.032.248.840,00	15.385.336.696,00	34,79	65,21
Komunikasi dan Informatika	5.118.956.100,00	14.302.271.499,00	19.421.227.599,00	26,36	73,64
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.000.654.410,00	2.078.230.350,00	8.078.884.760,00	74,28	25,72
Penanaman Modal	6.486.962.100,00	5.184.568.490,00	11.671.530.590,00	55,58	44,42
Kepemudaan dan Olah Raga	4.848.770.052,00	6.002.129.800,00	10.850.899.852,00	44,69	55,31
Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persandian	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
Kebudayaan	0,00	3.229.676.000,00	3.229.676.000,00	0,00	100,00
Perpustakaan	3.440.702.832,00	2.578.374.400,00	6.019.077.232,00	57,16	42,84
Kearsipan	0,00	151.408.000,00	151.408.000,00	0,00	100,00
Kelautan dan Perikanan	6.705.836.068,00	12.822.443.570,00	19.528.279.638,00	34,34	65,66
Pariwisata	4.683.632.498,00	11.718.268.000,00	16.401.900.498,00	28,56	71,44
Pertanian	0,00	3.954.347.600,00	3.954.347.600,00	0,00	100,00
Perdagangan	0,00	1.952.470.650,00	1.952.470.650,00	0,00	100,00
Perindustrian	0,00	900.715.000,00	900.715.000,00	0,00	100,00
Administrasi Pemerintahan	77.680.951.258,00	128.141.819.647,00	205.822.770.905,00	37,74	62,26
Pengawasan	7.526.955.596,00	3.764.361.000,00	11.291.316.596,00	66,66	33,34
Perencanaan	6.968.921.996,00	12.186.627.800,00	19.155.549.796,00	36,38	63,62
Kuangan	192.427.340.855,00	33.448.722.360,00	225.876.063.215,00	85,19	14,81
Kepegawaian	16.955.479.960,00	7.020.013.279,00	23.975.493.239,00	70,72	29,28
Penelitian dan Pengembangan	0,00	1.411.324.000,00	1.411.324.000,00	0,00	100,00
Jumlah	656.577.889.240,96	807.580.514.297,01	1.464.158.403.537,97	44,84	55,16

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Selanjutnya berdasarkan struktur alokasi tersebut di atas kemudian dapat dilihat dari kebijakan belanja dari urusan pemerintahan daerah dan satuan kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Tabel 2.8
Kebijakan program dan kegiatan belanja APBD tahun 2019 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1,01	Pendidikan
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01.1.01.01.01.16	Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
1.01.1.01.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.01.23	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
1,02	Kesehatan
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.1.02.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
1.02.1.02.01.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.1.02.01.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02.1.02.01.01.33	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
1.02.1.02.01.01.34	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02.1.02.01.01.35	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1.02.1.02.01.01.36	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.02	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sebong
1.02.1.02.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.03	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sasah
1.02.1.02.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.03.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.04	PPK BLUD Puskesmas Kijang
1.02.1.02.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
1.02.1.02.01.04.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.05	PPK BLUD Puskesmas Tanjung Uban
1.02.1.02.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.05.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.06	PPK BLUD Puskesmas Kawal
1.02.1.02.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.06.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.07	Puskesmas Kelong
1.02.1.02.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.07.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.08	Puskesmas Mantang
1.02.1.02.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.08.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.09	Puskesmas Toapaya
1.02.1.02.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.09.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.10	Puskesmas Teluk Bintang
1.02.1.02.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.10.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.11	Puskesmas Tambelan
1.02.1.02.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.11.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.12	Puskesmas Berakit
1.02.1.02.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.12.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.13	Puskesmas Sri Bintang
1.02.1.02.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.13.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.14	Puskesmas Kuala Sempang
1.02.1.02.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.14.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.15	Puskesmas Sei. Lekop
1.02.1.02.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.15.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16	Puskesmas Numbing
1.02.1.02.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.16.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.17	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.1.02.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02.1.02.01.17.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.17.34	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02.1.02.01.17.36	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.17.37	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
1.03.1.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.1.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03.1.03.01.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.01.16	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong
1.03.1.03.01.01.18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.01.28	Program pengendalian banjir
1.03.1.03.01.01.34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.1.03.01.01.36	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
1.03.1.03.01.01.37	Program Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Umum
1.03.1.03.01.01.38	Program Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Umum
2.04.1.03.01.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04.1.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.04.1.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.04.1.04.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01.1.04.01.01.16	Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
1.01.1.04.01.01.23	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
1.02.1.04.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.03.1.03.01.01.36	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
1.03.1.04.01.01.37	Program Peningkatan Kapasitas Pekerjaan Umum
1.04.1.04.01.01.21	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
1.04.1.04.01.01.22	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan Dan Permukiman
1.04.1.04.01.01.23	Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
1.04.1.04.01.01.24	Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
3.06.1.04.01.01.20	Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
2.04.1.04.01.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.05.1.04.01.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
2.05.1.04.01.01.25	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05.1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.1.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.1.05.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.05.1.05.01.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.05.1.05.01.01.25	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.01.1.05.01.01.28	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
	Umat Beragama
1.05.1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.1.05.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.1.05.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.05.1.05.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05.1.05.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.05.1.05.02.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.05.1.05.02.01.26	Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat
1.05.1.05.02.01.28	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP
1.05.1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.1.05.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.1.05.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05.1.05.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03.1.05.03.01.28	Program pengendalian banjir
1.05.1.05.03.01.23	Program Mitigasi Bencana
1.05.1.05.03.01.24	Program Penanggulangan Bencana
1,06	Sosial
1.06.1.06.01	Dinas Sosial
1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06.1.06.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06.1.06.01.01.23	Program Pemberdayaan Sosial
1.06.1.06.01.01.24	Program Penanggulangan Kemiskinan
1.06.1.06.01.01.25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.02.2.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02.2.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.02.2.02.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.02.2.02.01.01.20	Program Keluarga Berencana
2.02.2.02.01.01.30	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2.02.2.02.01.01.31	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
2.02.2.02.01.01.34	Program Perlindungan Anak
2,03	Pangan
2.03.2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.2.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
2.03.2.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.2.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.03.2.03.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.03.2.03.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
2,05	Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.2.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.05.2.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.05.2.05.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.05.2.05.01.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05.2.05.01.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.05.2.05.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2,06	Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06.2.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.06.2.06.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.06.2.06.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
2,07	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.07.2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.2.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.07.2.07.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.07.2.07.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.02.2.07.01.01.33	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
2.07.2.07.01.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
2.07.2.07.01.01.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07.2.07.01.01.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
4.03.2.07.01.01.29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
2,09	Perhubungan
2.09.2.09.01	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09.2.09.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.09.2.09.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
	Aparatur
2.09.2.09.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.09.2.09.01.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan
2.09.2.09.01.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.09.2.09.01.01.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
2.09.2.09.01.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
2.09.2.09.01.01.21	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2,11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.2.11.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.11.2.11.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.11.2.11.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.11.2.11.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.11.2.11.01.01.19	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2.11.2.11.01.01.20	Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan UMKM
2.11.2.11.01.01.21	Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM
3.06.2.11.01.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
3.06.2.11.01.01.20	Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
3.07.2.11.01.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2,12	Penanaman Modal
2.12.2.12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2.12.2.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.12.2.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.12.2.12.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.12.2.12.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.01.2.12.01.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.01.2.12.01.01.18	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
2.01.2.12.01.01.19	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2.01.2.12.01.01.20	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
2.12.2.12.01.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.12.2.12.01.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
	Realisasi Investasi
2.12.2.12.01.01.18	Program Pelayanan Perizinan Non Investasi
2.12.2.12.01.01.19	Program Pengawasan dan Pengendalian Investasi
2.12.2.12.01.01.20	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
2,16	Kebudayaan
2.16.2.16.01	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2.16.2.16.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.16.2.16.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.16.2.16.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.16.2.16.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.13.2.16.01.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan
2.13.2.16.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2.16.2.16.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.16.2.16.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2,17	Perpustakaan
2.17.2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2.17.2.17.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.17.2.17.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.17.2.17.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.17.2.17.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.17.2.17.01.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.17.2.17.01.01.16	Program Pengembangan Perpustakaan
2.18.2.17.01.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
2.18.2.17.01.01.19	Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
3	URUSAN PILIHAN
3,01	Kelautan dan Perikanan
3.01.3.01.01	Dinas Perikanan
3.01.3.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.01.3.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.01.3.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.01.3.01.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.01.3.01.01.01.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
3.01.3.01.01.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan
3.01.3.01.01.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap
3.01.3.01.01.01.25	Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan
3,02	Pariwisata
3.02.3.02.01	Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.02.3.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.02.3.02.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
	capaian kinerja dan keuangan
3.02.3.02.01.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.02.3.02.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.02.3.02.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan
3.03.3.03.01	Dinas Pertanian
3.03.3.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.03.3.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.03.3.03.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
3.03.3.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.03.3.03.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.03.3.03.01.01.25	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
3.03.3.03.01.01.27	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
3.03.3.03.01.01.28	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
3.03.3.03.01.01.29	Program Peningkatan Pemenuhan Keamanan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
4,01	Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.01	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.01.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.4.01.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.01.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.01.02.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
4.01.4.01.02	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.02.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.4.01.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.02.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.04.4.01.02.02.24	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
4.01.4.01.02.02.17	Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan
4.01.4.01.02.02.18	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
4.01.4.01.02.02.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan
4.01.4.01.02.02.23	Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
4.01.4.01.02.02.25	Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
	dan Daerah Bawahan
4.01.4.01.02.02.26	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
4.01.4.01.02.02.27	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
4.01.4.01.02.02.31	Program Pembinaan BUMD
4.01.4.01.02.02.32	Program Pembinaan Keagamaan
4.01.4.01.02.02.33	Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
4.01.4.01.02.02.36	Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan
4.01.4.01.02.02.37	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
4.01.4.01.02.02.38	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.4.01.03	Kecamatan Bintan Timur
4.01.4.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.03.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.03.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
4.01.4.01.03.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
4.01.4.01.04	Kecamatan Gunung Kijang
4.01.4.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.04.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.04.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
4.01.4.01.04.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
4.01.4.01.05	Kecamatan Teluk Bintan
4.01.4.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.05.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.05.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
4.01.4.01.05.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
4.01.4.01.06	Kecamatan Bintan Utara
4.01.4.01.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.06.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.06.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
4.01.4.01.06.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
4.01.4.01.07	Kecamatan Teluk Sebong
4.01.4.01.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.07.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
4.01.4.01.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.07.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.07.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
4.01.4.01.07.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
4.01.4.01.08	Kecamatan Tambelan
4.01.4.01.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.08.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.08.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.08.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
4.01.4.01.08.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
4.01.4.01.09	Kecamatan Seri Kuala Lobam
4.01.4.01.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.09.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.09.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.09.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
4.01.4.01.09.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
4.01.4.01.10	Kecamatan Toapaya
4.01.4.01.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.10.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.10.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
4.01.4.01.10.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
4.01.4.01.11	Kecamatan Bintan Pesisir
4.01.4.01.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.11.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.11.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
4.01.4.01.11.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
4.01.4.01.12	Kecamatan Mantang
4.01.4.01.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.4.01.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.4.01.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.4.01.12.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.4.01.12.01.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
4.01.4.01.12.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
4.01.4.01.12.01.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
4,02	Pengawasan
4.02.4.02.01	Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01	Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.02.4.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.02.4.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.02.4.02.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.02.4.02.01.01.15	Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal
4.02.4.02.01.01.16	Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
4,03	Perencanaan
4.03.4.03.01	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.03.4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.03.4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.03.4.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.03.4.03.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03.4.03.01.01.32	Program Perencanaan Tata Ruang
4.03.4.03.01.01.15	Program Pengembangan data dan informasi
4.03.4.03.01.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah
4.03.4.03.01.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi
4.03.4.03.01.01.23	Program perencanaan sosial budaya
4.03.4.03.01.01.26	Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA
4.03.4.03.01.01.27	Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan
4.03.4.03.01.01.28	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4.03.4.03.01.01.29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
4.07.4.03.01.01.15	Program Penelitian Perencanaan Pembangunan
4,04	Keuangan
4.04.4.04.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.01.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH / SKPD/OPD
	(SKPD)
4.04.4.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.04.4.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.04.4.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.04.4.04.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.04.4.04.01.01.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.04.4.04.01.01.17	Program Manajemen Aset Daerah
4.04.4.04.01.01.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
4.04.4.04.02	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
4.04.4.04.02.01	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
4.04.4.04.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.04.4.04.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.04.4.04.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.04.4.04.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.04.4.04.02.01.16	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
4,05	Kepegawaian
4.05.4.05.06	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05.4.05.06.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05.4.05.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05.4.05.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.05.4.05.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.05.4.05.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.05.4.05.06.01.15	Program Pendidikan Kedinasan
4.05.4.05.06.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.05.4.05.06.01.18	Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

Sumber:: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Tabel 2.9
Anggaran belanja pelayanan dasar tahun 2019

Uraian	Tahun 2019	%
PENDIDIKAN	253.481.029.862,00	40,16
Dinas Pendidikan	253.481.029.862,00	40,16
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
KESEHATAN	147.237.722.081,00	23,33
Dinas Kesehatan	144.970.222.081,00	22,97
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.267.500.000,00	0,36
PEKERJAAN UMUM	103.126.568.883,00	16,34
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.946.511.283,00	14,73
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14.410.457.600,00	2,28
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	769.600.000,00	0,12
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	83.018.803.600,00	13,15
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	83.018.803.600,00	13,15
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.992.535.825,00	5,23
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.785.997.000,00	0,92
Satuan Polisi Pamong Praja	19.670.886.504,00	3,12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.535.652.321,00	1,19
SOSIAL	11.257.095.146,00	1,78
Dinas Sosial	11.257.095.146,00	1,78
JUMLAH	631.113.755.397,00	100,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Dari program kegiatan tersebut diketahui bahwa program yang termasuk pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2019 penganggarannya telah mencapai 51,96% dari total anggaran.

2.2.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target anggaran belanja daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa belanja daerah sebesar Rp. 1.185.488.283.028,61 mengalami kenaikan sebesar 1,06% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi realisasi belanja berdasarkan laporan realisasi anggaran 2017 (unaudited) adalah sebesar Rp. 1.067.608.802.940,00. Dengan demikian perbandingan antara target anggaran belanja dan realisasi belanja menunjukkan penyerapan APBD tahun anggaran 2019 sebesar 90,06%.

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi belanja APBD tahun 2019 (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Tidak Langsung	656.577.889.240,96	603.208.321.803,00	91,87
5.1.1	Belanja Pegawai	502.709.954.759,96	456.494.527.991,00	90,81
5.1.4	Belanja Hibah	16.798.210.000,00	15.398.498.000,00	91,67
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.005.404.000,00	7.403.293.430,00	73,99
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	125.064.320.481,00	123.910.502.382,00	99,08
5.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	1.500.000,00	0,08
5.2	Belanja Langsung	807.580.514.297,01	724.348.665.174,38	89,69
5.2.1	Belanja Pegawai	110.278.217.528,70	97.706.108.803,00	88,60
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.780.095.226,91	327.801.233.771,45	90,11
5.2.3	Belanja Modal	333.522.201.541,40	298.841.322.599,93	89,60
	Jumlah Belanja	1.464.158.403.537,97	1.327.556.986.977,38	90,67

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

2.2.5 Pemasalahan dan Solusi

Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam kebijakan umum APBD diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada dan senantiasa dinamis dalam rangka mengakomodir dinamika masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2019 adalah :

1. Dengan diberlakukannya pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi di setiap SKPD maka dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan anggaran pada setiap SKPD.
2. Regulasi atau peraturan dari pusat yang satu sama lainnya saling tidak sinkron akan dapat menimbulkan pemahaman yang multitafsir terutama dengan aparat pemeriksa. Solusi yang ditempuh adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan dilakukannya pendampingan oleh pihak berkompeten.
3. Sistem dan prosedur yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bintan masih perlu perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang terhadap pengelolaan keuangan baik dari segi perencanaan, penatausahaan maupun pelaporan. Kondisi ini mengingat masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, solusinya yang dapat diberikan adalah:

1. Penatausahaan penyediaan informasi sebagai bahan dasar perencanaan anggaran belanja dengan meningkatkan pendataan dan kemampuan penyusunan database.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan pelaksanaan asistensi, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, workshop dan sosialisasi berkaitan dengan penganggaran.
3. Meningkatkan koordinasi dalam bentuk forum diskusi dan studi banding dengan daerah lain untuk berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
4. Penyempurnaan peraturan dan regulasi daerah tentang tata pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimaksud untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.

Arah kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2019 dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai program yang direncanakan pada tahun 2019 melalui peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas, serta digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha-usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan

kesempatan berusaha sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.3.2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Realisasi SILPA merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 176.143.704.338,64 (sebelum audit/audited).

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2019 (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)		206.298.866.461,12
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	206.298.866.461,12
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Neto	206.298.866.461,12	206.298.866.461,12

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

2.3.3 Permasalahan dan Solusi

Dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 175.448.936.299,91 maka SILPA tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 100,04% atau menjadi Rp.176.143.704.338,64 (unaudited). Peningkatan jumlah SILPA tersebut disebabkan pencapaian *over* bagi hasil pajak dan bukan pajak yang mencapai 122,01% dan dana bagi hasil pajak dari provinsi yang mencapai 123,57%. Disamping itu penyerapan belanja tahun 2019 hanya mencapai 90,06 %.

Solusi atas permasalahan pembiayaan tersebut akan dilakukan optimalisasi penggunaan dana dan sebagai bahan pengkajian yang lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan SILPA yang tidak hanya untuk menutupi defisit anggaran namun juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan manajemen kas/investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang bagi kepentingan pembangunan Kabupaten Bintan.

Sebagai gambaran, optimalisasi penggunaan SILPA berupa Manajemen Kas yaitu menempatkan sebagian dana Kas Daerah ke beberapa Bank dalam simpanan deposito bulanan. Pada tahun 2019 pendapatan berupa deposito tersebut mencapai Rp. 13.411.723.176,- atau mencapai 149,02% dari targetnya sebesar Rp. 9.000.000.000,00.



BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.1.1 Urusan Pendidikan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pendidikan** adalah sebagai berikut:

1) APK PAUD

APK digunakan menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan, selain itu untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK PAUD didapat dari perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang TK/PAUD dengan penduduk usia 3-6. Angka Partisipasi Kasar PAUD atau APK PAUD untuk tahun 2019 mencapai sebesar 43.26%. Dibanding capaian tahun 2018 sebesar 57.16% angka capaian ini menunjukkan penurunan dan capaian ini juga belum dapat memenuhi target tahun 2019 sebesar 59.1%, ini disebabkan faktor teknis salah satunya adalah data siswa beberapa lembaga PAUD dibawah wewenang Kementerian Agama masih belum terkumpul.

2) Rasio Guru Murid PAUD

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) telah mengatur beberapa hal penting, antara lain standar pengelolaan PAUD. Permendikbud yang disahkan akhir tahun 2014 tersebut mencantumkan rasio ideal antara jumlah guru dan anak didik. Untuk lembaga PAUD dengan anak didik berusia 4-6 tahun yakni untuk jenjang Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak- maka rasio guru dan anak maksimal 1:15, artinya satu orang guru KB ataupun TK sebaiknya tidak melayani lebih dari 15 orang anak didik. Peraturan tentang Standar PAUD ini disusun untuk menjamin kualitas dan mutu PAUD. Untuk di Kabupaten Bintan Rasio Guru Murid PAUD mencapai 1:7, melihat dari capaian ini Rasio Guru Murid PAUD di Kabupaten Bintan cukup baik.

3) Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi.

Akreditasi adalah sebuah kegiatan pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS)/ Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madariasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan, semakin klasifikasai akreditasi menunjukkan bahwa layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional. Pada tahun 2019 jumlah PAUD di Kabupaten Bintan berjumlah sebanyak 191 lembaga, sampai dengan tahun 2018 sebanyak 75 lembaga TK/PAUD yang sudah terkareditasi. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah PAUD yang terakreditasi yaitu sebanyak 20 lembaga atau dapat dihitung secara akumulatif sampai dengan tahun 2019

sebanyak 95 lembaga TK/PAUD sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional.

4) APM SD/MI/SLB/Paket A

APM bertujuan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. APM merupakan perbandingan jumlah siswa pada umur tertentu terhadap penduduk kelompok usia tertentu. Untuk SD/ sederajat APM di fokuskan pada usia 7-12 tahun, jika APM = 100 berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada indikator ini mencapai 99,69%. Ini berarti, dari total jumlah penduduk 7-12 tahun sebanyak 17.990 orang di Kabupaten Bintan, yang bersekolah di jenjang SD adalah sebanyak 17.935 orang anak usia 7-12. Capaian tahun 2019 ini sama dengan capaian pada tahun 2018.

5) APK SD/MI/SLB/Paket A

APK bertujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah. APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk kelompok usia tertentu. Untuk indikator ini capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan mencapai 105.90%. Angka capaian ini naik 1.28% dibanding dengan capaian 2018 sebesar 104.62%, dan ini menunjukkan bahwa banyak anak usia di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun sudah atau masih bersekolah di jenjang Sekolah Dasar.

6) APM SMP/MTs/Paket B

APM bertujuan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan

fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. APM merupakan perbandingan jumlah siswa pada umur tertentu terhadap penduduk kelompok usia tertentu. Untuk SD/ sederajat APM di fokuskan pada usia 13-15 tahun, jika APM = 100 berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada indikator ini mencapai 88.35%. Ini berarti, dari total jumlah penduduk 13-15 tahun sebanyak 8.036 orang di Kabupaten Bintan, yang bersekolah di jenjang SMP/MTs/Paket B adalah sebanyak 7.100 orang anak usia 13-15. Dibanding angka capaian 2018 sebesar 86.73%, capaian pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan sebesar 1.62%,

7) APK SMP/MTs/Paket B

APK bertujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah. APK merupakan perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk kelompok usia tertentu. Untuk indikator ini capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan mencapai 95.66%, ini menunjukkan bahwa masih ada anak di bawah usia 13 tahun dan atau di atas 15 tahun yang masih atau bersekolah di jenjang SMP/MTs/Paket B. Angka capaian ini turun 1.69% dibanding capaian tahun 2018 sebesar 97,35%.

8) Angka Putus Sekolah SD

Angka putus sekolah dihitung berdasarkan perbandingan jumlah siswa usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Penghitungan Angka putus sekolah bertujuan

untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan, semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Untuk indikator angka putus sekolah pada jenjang SD capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sebesar 0.04%. Atau dari total 20.518 siswa masih terdapat 9 orang siswa yang masih putus sekolah. Angka capaian ini mengalami penurunan dibanding dengan capain tahaun 2018 yaitu sebesar 0.05%. Ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena tidak adanya minat siswa untuk meneruskan pendidikannya dan perpindahan siswa ke luar Kabupaten Bintan namun tidak menyelesaikan administrasi perpindahan, sehingga siswa dimaksud tidak tercatat dalam mekanisme perpindahan secara online.

9) Angka Putus Sekolah SMP

Angka putus sekolah dihitung berdasarkan perbandingan jumlah siswa usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Penghitungan Angka putus sekolah bertujuan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan, semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Untuk indikator angka putus sekolah pada jenjang SMP capaian kinerja Dinas

Pendidikan Kabupaten Bintan sebesar 0.31%. Atau dari total 8.258 siswa masih terdapat 26 orang siswa yang masih putus sekolah. Angka capaian ini mengalami penurunan sebesar 0.13% dibanding dengan capain tahaun 2018 yaitu sebesar 0.18%. Ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena tidak adanya minat siswa untuk meneruskan pendidikannya dan perpindahan siswa ke luar Kabupaten Bintan namun tidak menyelesaikan administrasi perpindahan, sehingga siswa dimaksud tidak tercatat dalam mekanisme perpindahan scara online.

10) Rasio APM perempuan laki-laki di SD

Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SD menunjukkan angka di bawah 100% ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan. Rasio APM Perempuan Laki-laki digunakan sebagai indikator dan keadilan gender di bidang pendidikan, dalam hal ini mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Capaian pada tahun 2019 untuk Rasio APM Perempuan Laki-laki masih sama dengan capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 99.47%, Angka ini masih belum dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan karena dari segi jumlah penduduk usia 7-12 tahun lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan usia 7-12 tahun.

11) Rasio APM perempuan laki-laki di SMP

Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan

perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMP menunjukkan angka di bawah 100% ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SMP lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan. Rasio APM Perempuan Laki-laki digunakan sebagai indikator dan keadilan gender di bidang pendidikan, dalam hal ini mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Capaian pada tahun 2019 untuk Rasio APM Perempuan Laki-laki sama dengan angka capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 104.53%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk perempuan sudah melebihi partisipasi laki-laki pada jenjang SMP sederajat.

12) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah berfungsi untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Pada indikator ini capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan masih sama dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 8.36 tahun atau naik 0.02 dibanding tahun 2018 sebesar 8,34 tahun, angka ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bintan masih dibawah 9 tahun. Ini disebabkan masih bebarapa faktor antara lain kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan dan dikeluarkan dari sekolah.

13) Angka Kelulusan SD

Dalam upaya menyukseskan wajib belajar sembilan tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan perlu memastikan

bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan sudah menamatkan Sekolah Dasar. Salah satu indikatornya adalah melalui persentase kelulusan SD, selain itu indikator ini juga digunakan untuk memetakan kualitas pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Untuk persentase kelulusan SD pada tahun 2019 ini mencapai **100%**, angka ini didapat melalui perbandingan jumlah peserta yang lulus USBN terhadap jumlah peserta yang mengikuti USBN pada tahun 2019.

14) Angka Kelulusan SMP

Dalam upaya menyukseskan wajib belajar sembilan tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan sudah menamatkan Sekolah Menengah Pertama. Salah satu indikatornya adalah melalui persentase kelulusan SMP, selain itu indikator ini juga digunakan untuk memetakan kualitas pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Untuk persentase kelulusan SMP pada tahun 2019 ini mencapai **100%**, angka ini didapat melalui perbandingan jumlah peserta yang lulus Ujian Nasional (UN) terhadap jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional (UN) pada tahun 2019.

15) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013). Persentase SD/MI berakreditasi minimal B adalah perbandingan antara jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SD/MI. Periode waktu akreditasi berlaku 5 tahunan, namun data akreditasi dapat dikumpulkan tahunan. Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SP) sampai

dengan tahun 2019 persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B mencapai **63.54%**, capaian ini menurun dibanding dengan capaian tahun 2018 sebesar **74.04%**. Ini disebabkan penilaian kembali oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madariasah dimana terdapat beberapa sekolah yang belum memenuhi persyaratan untuk mencapai akreditasi B.

16) Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP (Standar Nasional Pendidikan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madariasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madariasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madariasah Aliyah (SMA/MA) bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Untuk capaian kinerja pada indikator ini kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan khusus jenjang SD masih sama dengan capaian pada tahun 2018 yaitu sebanyak 60 sekolah dari 96 sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan atau mencapai **63%**.

17) Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP (Standar Nasional Pendidikan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Untuk capaian kinerja pada indikator ini kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan khusus jenjang SMP masih sama dengan capaian pada tahun 2018 sebanyak 20 sekolah dari 32 sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan atau mencapai **63%**.

18) Angka Melek Huruf (AMH)

Melek huruf dapat diartikan kemampuan untuk membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, arab, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan, angka melek huruf ini didapat dari perbandingan antara jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis terhadap jumlah

penduduk 15 tahun ke atas. Capaian kinerja Dinas Pendidikan tahun 2019 yaitu sebesar 98.00%. Atau naik sebesar 0.08% dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 97,62%.

19) Persentase guru TK bersertifikat profesi

Capaian pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 20.47%. Namun capaian ini masih dapat memenuhi dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan. Ini disebabkan oleh masih sedikitnya pendidik Taman Kanak-kanak (TK) yang memiliki kualifikasi Strata-1 yang merupakan persyaratan wajib untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ).

20) Persentase guru SD bersertifikat profesi

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Untuk capaian kinerja Dinas Pendidikan terhadap indikator ini pada tahun 2019 mencapai 47.10% atau naik 0,49% dibanding tahun 2018 sebesar 46.61%. Masih rendahnya persentase capaian ini disebabkan beberapa faktor: 1). Masih terdapat guru SD yang belum memenuhi kualifikasi S-1 sebagai syarat wajib sebelum mengikuti PPGDJ, 2). Banyak guru di Kabupaten Bintan yang tidak lulus Pre Tes yang merupakan tahapan sebelum mengikuti PPGDJ.

21) Persentase guru SMP bersertifikat profesi

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Untuk capaian kinerja Dinas

Pendidikan terhadap indikator ini pada tahun 2019 mencapai 54,60% atau naik 1,71% dibanding tahun 2018 sebesar 52,89%. Ini disebabkan beberapa faktor : 1). Masih ada beberapa guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 sebagai syarat wajib sebelum mengikuti PPGDJ, 2). Banyak guru di Kabupaten Bintan yang tidak lulus Pre Tes yang merupakan tahapan sebelum mengikuti PPGDJ.

22) Persentase Pengawas bersertifikat profesi

Untuk indikator persentase pengawas bersertifikat profesi Pada tahun 2019 mencapai 100%, angka capaian ini sama seperti capaian pada tahun 2018 artinya dari jumlah pengawas sebanyak 18 orang seluruhnya sudah memiliki sertifikat profesi pengawas sekolah. Dan angka ini sudah memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan

23) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Seorang guru atau pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma empat, ini dimaksud agar guru lebih profesional dalam mengajar sehingga berdampak pada kualitas pendidikan suatu daerah. Untuk tahun 2019 capaian pada indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV masih sama dengan capaian tahun 2018 sebesar 85,5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih ada guru di Kabupaten Bintan masih berkualifikasi dibawah S1, terutama untuk jenjang TK dan SD. Hal ini oleh beberapa faktor seperti kurangnya biaya untuk meningkatkan kualifikasi, kurangnya motivasi guru untuk mengembangkan kompetensi dan usia rata-rata guru SD 50 tahun keatas yang lebih fokus memasuki masa pensiun sehingga kurang memikirkan kualifikasi pendidikan.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.154.930.764 dan realisasi Rp. 71.827.719.081 atau 94,32%. Program ini bertujuan melaksanakan percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, baik melalui jalur formal maupun non formal, yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A serta SMP, MTs, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidak-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititikberatkan pada (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjarangan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD termasuk SDLB/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 491,158,410, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 460,598,000 atau 93.78%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi, adapun hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan ini dilakukan dalam 8 kali pertemuan yang diikuti sebanyak 20 orang dan dilatih oleh 2 narasumber.

(2) Pengadaan Meubiler SMP

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 614,770,000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 612,852,500 atau 99.69%. Output kegiatan ini adalah tersedianya Fasilitas Penunjang Pendidikan, dan hasil kegiatan ini adalah Terpenuhinya Meja Kursi Siswa sebanyak 320 Set. Meubiler ini terdiri meja dan kursi siswa yang di distribusikan pada sekolah-sekolah antara lain SMPN 1 Bintan (32 set), SMPN 3 Bintan (32 set), SMPN 4 Bintan (32 set), SMPN 10 Bintan (32 set), SMPN 12 Bintan (14 unit), SMPN 14 Bintan (32 set), SMPN 16 Bintan (32 set), SMPN 20 Bintan (32 unit), SMPN 26 Bintan (32 Set), SMPN 27 (32 set).

(3) Pengadaan Meubiler SD

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 591,995,000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 571,197,500 atau

96.49%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Meubelair SD dan hasil kegiatan ini adalah tersedianya Meubiler di Sekolah sebanyak 650 Meja dan 1300 kursi. Meuibiler ini terdiri meja kursi siswa yang di distribusikan pada sekolah-sekolah antara lain SDN 003 Teluk Bintang 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 004 Teluk Bintang 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 007 Teluk Bintang 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 008 Teluk Bintang 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 013 Teluk Bintang 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 014 Teluk Bintang 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 002 Gunung Kijang 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 005 Gunung Kijang 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 006 Gunung Kijang 14 Set (14 Meja, 28 Kursi),SDN 008 Gunung Kijang 14 Set (14 Meja, 28 Kursi),SDN 003 Toapaya 14 Set (14 Meja, 28 Kursi),SDN 004 Toapaya 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 001 Bintang Pesisir 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 001 Teluk Sebong 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 003 Teluk Sebong 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 004 Teluk Sebong 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 005 Teluk Sebong 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 006 Teluk Sebong 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 007 Teluk Sebong 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 008 Teluk Sebong 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 010 Teluk Sebong 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 001 Seri Kuala Lobam 20 Set (20 Meja, 40 Kursi), SDN 004 Seri Kuala Lobam 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 005 Seri Kuala Lobam 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 006 Seri Kuala Lobam 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 001 Bintang Utara 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 005 Bintang Utara 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 006 Bintang Utara 14 Set (14 Meja, 28 Kursi

), SDN 006 Bintang Timur 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 007 Bintang Timur 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 011 Bintang Timur 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 012 Bintang Timur 14 Set (14 Meja, 28 Kursi), SDN 014 Bintang Timur 28 Set (28 Meja, 56 Kursi), SDN 017 Bintang Timur 14 Set (14 Meja, 28 Kursi)

(4) Kegiatan Pengadaan Komputer PC SMP/MTs

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 1,254,490,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,249,613,250 atau 99.61%. Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan komputer untuk mendukung pembelajaran dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Komputer Pembelajaran SMP, adapun hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Komputer untuk mendukung pembelajaran dan Ujian Nasional Berbasis Komputer sebanyak 145 unit Komputer PC dan 20 unit lapotp yang didistribusikan kepada sekolah yang akan melaksanakan UNBK antara lain : MTs Bintang Timur (24 Unit KOrputer PC), SMPN 8 Bintang (3 Unit), SMPN 9 Bintang (9 Unit), SMPN 10 Bintang (10 Unit Komputer PC), SMPN 12 Bintang (17 Unit Komputer PC), SMPN 3 Bintang (20 Unit Komputer PC), SMPN 20 Bintang (10 Unit Komputer PC), SMPN 24 Bintang (9 Unit komputer PC), SMPN 14 Bintang (27 Unit Laptop).

(5) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 1,046,610,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 858,479,604 atau 82.02%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas SD/MI. Dan hasil kegiatan ini adalah tersedianya

Prasarana Pendidikan yang Sesuai Standar Nasional Pendidikan. Sasaran kegiatan ini SDN 004 Toapaya (3unit) dan SDIT Syiar Harmoni (1unit)

(6) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 500,000,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 498,873,150 atau 9.77%.

(7) Pembangunan Lapangan Olahraga SD

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 98,400,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 97,869,633 atau 99.46%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Lapangan Olahraga dan hasil kegiatan ini adalah tersedianya Lapangan Olahraga sekolah yang nyaman dan kondusif pada SDN 004 Bintang Utara seluas 286M2.

(8) Pembangunan Ruang Majelis Guru SD

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 170,631,080 dengan realisasi sebesar Rp. 169,144,614 atau 99.13%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Majelis Guru SD. Hasil kegiatan ini adalah Tersedianya Ruang Guru yang nyaman dan memadai, yang menjadi sasaran kegiatan adalah SDN 003 Bintang Timur.

(9) Rehabilitasi Majelis Guru SD

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 200,000,000 dengan realisasi sebesar Rp. 199,488,441 atau 99.74%. Keluaran terlaksananya Rehab Ruang Majelis Guru SD Bintang. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya ruang guru yang nyaman dan memadai. Sasaran pada kegiatan ini adalah SDN 004 Toapaya.

(10) Pembangunan Jamban SD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 992,120,000 dengan realisasi sebesar Rp. 989,570,369 atau 99.74%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan jamban SD, dan hasil kegiatan ini adalah tersedianya Sanitasi yang memadai bagi siswa dan guru. Pembangunan Jamban SD ini diperuntukkan bagi sekolah yang kurang memadai sarana MCK, antara lain : SDN 001 Teluk Sebong (1 unit), SDN 001 Seri Kuala Lobam (1 unit), SDN 001 Bintang Pesisir (1 unit), SDN 002 Bintang Pesisir (1 unit), SDN 002 Teluk Bintang (1 unit), SDN 014 Teluk Bintang (1 unit), SDN 003 Teluk Sebong (1 unit), SDN 007 Teluk Sebong (1 unit), SDN 004 Seri Kuala Lobam (1 unit), SDN 006 Seri Kuala Lobam (1 unit), SDN 007 Bintang Timur (1 unit), SDN 010 Bintang Timur (1 unit)

(11) Pembangunan Jamban SMP

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 200,000,000, dengan realisasi sebesar Rp. 199,156,889 atau 99.58%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya sarana sanitasi yang bersih bagi warga sekolah. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana sanitasi yang memadai bagi SMPN 12 Bintang.

(12) Pembangunan Tempat Ibadah SMP

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 301,200,000, dengan realisasi sebesar Rp. 300,630,500 atau 99.81%. Keluaran kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan sarana ibadah sebagai penunjang program pendidikan disekolah khususnya dibidang keagamaan bagi agama Islam. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas keagamaan bagi guru dan siswa

yang beragama islam, khususnya SMPN 3 Bintan dan SMPN 15 Bintan.

(13) Pembangunan Paving blok halaman SD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 4,032,650,000 dan realisasi sebesar Rp. 4,002,336,044 atau 99.25%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Paving Blok Sekolah. Dan hasil kegiatan ini adalah terciptanya Halaman Sekolah yang asri seluas 9.915 M2, yang tersebar di beberapa sekolah antara lain: SDN 003 Bintan Timur (760 m2), SDN 007 Bintan Timur (160 m2), SDN 019 Bintan Timur (680 m2), SDN 002 Seri Kuala Lobam (330 m2), SDN 004 Seri Kuala Lobam (600 m2), SDN 010 Bintan Utara (680 m2), SDN 006 Teluk Bintan (680 m2), SDN 007 Teluk Bintan (680 m2), SDN 009 Teluk Bintan (520 m2), SDN 012 Teluk Bintan (680 m2), SDN 001 Teluk Sebong (330 m2), SDN 007 Teluk Sebong (680 m2), SDN 009 Teluk Sebong (520 m2), SDN 011 Bintan Timur (695 m2), SDN 014 Bintan Timur (530 m2), SDN 015 Bintan Timur (695 m2)

(14) Pembangunan Batu Miring SD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 567,700,000 dan realisasi sebesar Rp. 566,903,752 atau 99.86%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Batu Miring di sekolah. Dan hasil kegiatan ini adalah terbangunnya Batu Miring di di Sekolah sepanjang 415 M2, yang disasar kepada sekolah-sekolah antara lain SDN 010 Bintan Utara (148 m3), SDN 006 Seri Kuala Lobam (71 m), SDN 013 Bintan Timur (48 m), SDN 002 Teluk Bintan (148 m2).

(15) Pembangunan Pagar SD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 1,202,615,000 dan realisasi sebesar Rp. 1,201,177,436 atau 99.88%. Keluaran dari kegiatan Tersedianya Fasilitas Penunjang Pendidikan SD/MI tersedianya Fasilitas Penunjang Pendidikan SD/MI dan hasil kegiatan ini adalah terbangunnya sarana keamanan lingkungan sekolah sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kenyamanan dan keamanan dalam lingkungan sekolah. Adapun sekolah sasaran pembangunan pagar ini adalah : SDN 001 Seri Kuala Lobam (95 M2), SDN 004 Seri Kuala Lobam (295 M2), SDN 008 Bintang Utara (190 M2), SDN 004 Toapaya (150 M2), SDN 004 Gunung Kijang (285 M2), SDN 002 Teluk Bintang (290 M2), SDN 003 Bintang Timur (226 M2), SDN 013 Bintang Timur (28 M2), SDN 006 Seri Kuala Lobam (203 M2).

(16) Pembangunan Pagar SMP

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 786,200,000 dan realisasi sebesar Rp. 785,642,000 atau 98.93%. Keluaran dari kegiatan Tersedianya Fasilitas Penunjang Pendidikan SMP/MTs dan hasil kegiatan ini adalah terbangunnya sarana keamanan lingkungan sekolah sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga sekolah. Pembangunan pagar SMP pada tahun 2019 dilakukan di beberapa sekolah antara lain: SMPN 20 Bintang Kec.Gunung Kijang (300 Meter), SMPN 3 Bintang Kec.Bintang Timur (150 Meter), SMPN 13 Bintang Kec.Bintang Utara (180 Meter), SMPN 15 Bintang Kec.Seri Kuala Lobam (250 Meter), SMPN 26 Bintang Kec.Bintang Timur (1 Paket).

(17) Kegiatan Penyediaan Sewa Mobilitas Laut

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 2,970,860,000 dan Realisasi Keuangan Rp. 2,583,620,000 atau 86.97%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana transportasi yang aman dan nyaman bagi siswa menuju sekolah bagi siswa dan guru daerah pesisir. Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana transportasi yang aman dan nyaman menuju sekolah sebanyak 21 unit pompong bagi siswa-siswa yang tinggal daerah *hinterland* dengan rincian Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Tambelan, dan Kecamatan Teluk Bintan, Seri Kuala Lobam.

(18) Penyediaan sewa Mobilitas Darat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu sebesar Rp. 9,166,672,800 dengan realisasi sebesar Rp. 8,694,218,700 atau 94.85%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah. Hasil Kegiatan ini adalah tersedianya sarana transportasi darat sebanyak 55 unit bus, Kecamatan Bintan Timur 8 Unit Bus, Kecamatan Bintan Pesisir 2 Unit Bus, Kecamatan Bintan Utara 6 Unit Bus, Kecamatan Seri Kuala Lobam 1 Unit Bus, Kecamatan Teluk Sebong 10 Unit Bus, Kecamatan Teluk Bintan 13 Unit Bus, Kecamatan Gunung Kijang 5 Unit bus, Kecamatan Toapaya 8 Unit, Kecamatan Tambelan 2 Unit Bus.

(19) Kegiatan Try Out dan Pelaksanaan UN (Ujian Nasional) SMP/MTs

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp. 208,350,000 dengan realisasi Rp. 201,560,000 atau 96.74%. Output kegiatan ini

adalah Terlaksananya Try Out Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs, hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kelulusan Ujian Nasional yang diikuti sebanyak 2.423 siswa kelas 9 di 41 sekolah jenjang SMP/MTs tahun pelajaran 2018/2019 dengan kelulusan SMP/MTs 100%.

(20) Kegiatan Try Out Ujian Sekolah Dan Pelaksanaan Ujian Sekolah tingkat SD/MI Se-Kab Bintan

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp. 610,128,400 dengan realisasi Rp. 483,183,884 atau 79.19%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Try Out Ujian Nasional Tingkat SD/MI peserta 2.907 siswa. Hasil Kegiatan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas Ujian Sekolah Tingkat SD/MI siswa kelas 6 sebanyak 3.083 siswa SD/MI dengan capaian kelulusan 100%.

(21) Bedah SKL (Standar Kompetensi Lulusan) Mata Pelajaran Yang di Ujiannasionalkan Tingkat SMP/MTS Se Kabupaten Bintan

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 179,054,000, dengan realisasi sebesar Rp. 168,582,200 atau 94.15%. Keluaran kegiatan ini adalah peserta memahami dan mampu menulis butir soal prediksi UN Tahun 2020 sesuai dengan soal yang terstandar. Hasil kegiatan ini adalah guru mata pelajaran Ujian Nasional mampu mengembangkan indikator soal, mengacu pada indikator SKL UN, mengembangkan kisi-kisi soal, menulis butir-butir soal prediksi Ujian Nasional Tahun 2020.

(22) Pelaksanaan Olimpiade Sains dan Cerdas Cermat Tingkat SD dan SMP

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 159,000,000, dengan realisasi sebesar Rp. 155,831,090 atau 98.01%. keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya olimpiade sains dan cerdas cermat untuk SD dan SMP se Kabupaten Bintan. Hasil kegiatan tersedianya wakil dari Kabupaten Bintan untuk Olimpiade IPA jenjang SMP untuk tingkat nasional

(23) Penyediaan Perlengkapan Sekolah Untuk Siswa Baru Jenjang SD/MI

Dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,994,935,400 dengan realisasi sebesar Rp. 2,965,781,955 atau 99,03%. Tujuan kegiatan ini adalah mendukung tujuan pendidikan melalui pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan mendukung visi misi Kepala Daerah dalam menyukseskan Wajib Belajar Sembilah tahun. Output kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan perlengkapan sekolah untuk siswa baru jenjang SD/MI, hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Perlengkapan Sekolah Untuk Siswa Baru Jenjang SD/MI yang terdiri dari baju osis, batik, baju kurung pakaian olahraga, tas, sepatu kaos kaki bagi 3.575 siswa.

(24) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Sekolah Untuk Siswa Baru Jenjang SMP/MTs

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan alokasi sebesar Rp. 2,677,486,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,661,431,875 atau 99.40%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan perlengkapan untuk siswa baru jenjang SMP/MTS. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan sekolah

untuk siswa jenjang SMP/MTs yang terdiri dari Baju OSIS (Topi, Dasi), Baju Pramuka, Baju Batik, Baju Kurung, Baju Olahraga, Tas, Sepatu (kaos kaki) sebanyak 2.831 stel untuk siswa SMP dan 273 siswa MTs.

(25) Kegiatan Rehab Ruang Kelas SDN Bintang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 1,251,281,000 dan realisasi sebesar Rp. 1,246,776,903 atau 99.64%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD. Hasil yang dicapai adalah terehabilitasi 25 ruang kelas yang nyaman sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan sekolah sasaran antara lain : SDN 005 Bintang Utara (3 Unit Ruang Kelas), SDN 008 Bintang Timur (4 Unit Ruang Kelas), SDN 002 Tambelan (3 Unit Ruang Kelas), SDN 001 Seri Kuala Lobam (3 Unit Ruang Kelas), SDN 013 Teluk Bintang (3 Unit Ruang Kelas), SDN 003 Bintang Timur (3 Unit Ruang Kelas), SDN 014 Bintang Timur (3 Unit Ruang Kelas).

(26) Kegiatan Penunjang DAK SD

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang dengan alokasi sebesar Rp. 386,220,548 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 380,056,248 atau 98.40%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi DAK, adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan, pengawasan, monitoring untuk rehabilitasi 25 ruang kelas, pembangunan 16 ruang kelas baru, pembangunan 3 unit jamban dan 3 unit rumah dinas di 17 SD penerima DAK Fisik.

(27) Kegiatan Rehab Ruang Kelas SMPN Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 559,135,000 dan realisasi sebesar Rp. 539,617,814 atau 96.51%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi 7 ruang kelas untuk SMP. Hasil kegiatan ini adalah terehabilitasinya 4 ruang kelas di SMPN 11 Bintan, 2 ruang kelas di SMPN 3 Bintan, 1 ruang kelas di SMPN 6 Bintan.

(28) Kegiatan Operasional DAK SMP

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan alokasi sebesar Rp. 313,500,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 298,145,000 atau 95.10%. Tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi DAK. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi DAK, hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi DAK untuk 13 sekolah penerima DAK Reguler dan Afiriasi.

(29) Kegiatan Rehab Ruang Kelas SDN Bintan (DAK)

Dilaksanakan langsung oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,842,500,000 dan realiasi anggaran Rp. 1,842,500,000 atau 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bintan sebanyak 25 ruangan. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas ruang kelas bagi siswa SD sebanyak 25 ruangan yang terdiri dari SDN 001 Gunung Kijang (6 Ruang), SDN 002 Gunung Kijang (6 Ruang), SDN 001 Bintan Pesisir (6 Ruang), SDN 002 Bintan Pesisir (4 Ruang), SDN 005 Teluk Sebong (3 Ruang).

(30) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK Reguler)

Dilaksanakan langsung oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,706,021,652 dan realiasi anggaran Rp. 3,706,021,652 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru bagi Sekolah Dasar. Hasil kegiatan ini adalah terbangunnya 18 ruang kelas baru yang diperuntukkan pada: SDN 001 Toapaya (2 Ruang), SDN 002 Toapaya (2 Ruang), SDN 003 Bintang Timur (4 Ruang), SDN 002 Bintang Pesisir (2 Ruang), SDN 011 Bintang Timur (2 Ruang), SDN 013 Bintang Timur (4 Ruang), SDN 005 Bintang Pesisir (2 Ruang)

(31) Kegiatan Pembangunan Jamban SD (DAK Reguler)

Dilaksanakan langsung oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 345,000,000 dan realiasi anggaran Rp. 345,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Sanitas Bagi SD. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya Sarana Sanitasi yang bersih ang diperuntukkan pada SDN 002 Toapaya (1 unit), SDN 004 Toapaya (1 unit), SDN 006 Bintang Utara (1 unit)

(32) Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas SD (DAK Afirmasi)

Dilaksanakan langsung oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 494,668,800 dan realiasi keuangan sebesar Rp. 494,668,800 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah menyediakan perumahan dinas untuk guru bagi daerah perbatasan di Kabupaten Bintang. Hasil kegiatan ini adalah terbangunnya 3 unit rumah dinas di SDN 010

Teluk Sebong (1unit), SDN 002 Seri Kuala Lobam (1 unit), SDN 002 Bintang Pesisir (1 unit).

(33) Kegiatan Rehab Ruang Kelas SMPN Bintang (DAK)

Dilaksanakan langsung oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,800,000,000 dan realiasi keuangan sebesar Rp. 2,800,000,000 atau 100%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMPN Bintang, hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitas ruang kelas SMPN sebanyak 23 unit dengan rincian SMPN 1 Bintang (8 Unit), SMPN 7 Bintang (2 Unit), SMPN 10 Bintang (3 Unit), SMPN 20 Bintang (3 Unit), SMPN 23 Bintang (2 Unit), SMPN 26 Bintang (3 Unit).

(34) Kegiatan Pengadaan TIK SMPN Bintang (DAK)

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang dengan alokasi sebesar Rp. 600,000,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 600,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan TIK SMPN Bintang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan TIK SMPN Bintang sebanyak 10 paket (1 paket terdiri dari 2 Laptop, 2 Proyektor, 2 layar) yang diperuntukkan kepada SMPN 3 Bintang (6 Laptop, 6 unit proyektor), SMPN 7 Bintang (4 Laptop dan 4 Proyektor), SMPN 16 Bintang (4 Laptop dan 4 Proyektor), SMPN 17 Bintang (4 Laptop dan 4 Proyektor), SMPN 28 Bintang (2 Laptop dan 2 Proyektor)

(35) Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP (DAK Afirmasi)

Dilaksanakan oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dengan alokasi sebesar Rp. 451,282,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 451,282,000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya

pembangunan rumah di daerah pesisir yang bersumber dari DAK. Hasil kegiatan ini adalah terbangunnya perumahan bagi guru di daerah pesisir sebanyak 3 unit (SMPn 25 Bintang 1 unit, SMPN 27 Bintang 1 unit, SMPN 28 Bintang 1 unit)

(36) Kegiatan Pembangunan Paving blok halaman SMP

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 1,534,081,500, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,530,255,554 atau 99.75%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemasangan paving blok seluas 3.818M². Hasil kegiatan tertatanya halaman sekolah yang bersih dan rapi di 9 sekolah (SMPN 1 Bintang, SMPN 11 Bintang, SMPN 26 Bintang, SMPN 13 Bintang, SMPN 28 Bintang, SMPN 3 Bintang, SMPN 15 Bintang, SMPN 7 Bintang).

(37) Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Olimpiade Sains dan Festival Seni Nasional Tingkat SD/MI dan SMP dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 545,800,000 dan realisasi anggaran Rp. 539,694,600 atau 98.88. Tujuan kegiatan ini adalah menjaring atlet dan seniman/seniwati jenjang SD dan SMP untuk diikutkan pada lomba O2SN dan FLS2N tingkat Propinsi Kepulauan Riau tahun 2019. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Seni Nasional Tingkat SD dan SMP, hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya siswa berprestasi dibidang olahraga untuk lomba tingkat Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 10 siswa SD dan 13 siswa SMP.

(38) Pembangunan Dariainase SD/MI Bintang

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 200,000,000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 199,854,873 atau 99.93%. Keluaran kegiatan ini adalah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sekolah sehingga secara fisik layak untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya dariainase SDN Bintang dengan sekolah sasaran SDN 002 Toapaya.

(39) Kegiatan Penimbunan Lahan SMP/MTs.

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintang dengan alokasi sebesar Rp. 200,000,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199,045,326 atau 99.52%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penimbunan pada SMP 11 Bintang. Hasil kegiatan ini adalah bertambahnya luas perkarangan SMPN 11 Bintang

(40) Pengadaan Dariumband SMP/MTs

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 209,020,000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 207,592,500 atau 99.32%. Keluara kegiatan ini adalah terlaksananya peralatan kesenian bagi siswa SMP. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan marawis untuk MTs Tambelan dan perlengkapan dariumband untuk siswa SMPN 1 Bintang, SMPN 2 Bintang dan SMPN 19 Bintang.

(41) Penatausahaan dan Pelaporan Dana Bos

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 315,660,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 296,586,950 atau 93.96%. Keluaran kegiatan ini adalah terpantaunya pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah di 90 Sekolah Dasar dan 28 Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bintang. Hasil

kegiatan ini adalah tertatanya keuangan BOSNAS Jenjang SD dan SMP sesuai Petunjuk Teknis yang sudah ditetapkan.

(42) Kegiatan Rehab Ruang Labor SMP (DAK Reguler)

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima DAK dengan alokasi sebesar Rp. 260,000,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 260,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi ruang labor di SMPN 8 Bintan dan SMPN 18 Bintan. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya ruang praktik siswa yang sesuai kebutuhan SMPN 8 Bintan dan SMPN 18 Bintan.

(43) Kegiatan Rehab Ruang Majelis Guru SMP (DAK Reguler)

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 320,000,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 260,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi ruang guru yang nyaman. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya ruang majelis guru yang nyaman di SMPN 18 Bintan dan SMPN 23 Bintan.

(44) Kegiatan Penimbunan Lahan SD/MI

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 139,290,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 138,791,650 atau 99.64%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Penimbunan lahan sekolah. Hasil kegiatan ini adalah bertambahnya Luas Halaman Sekolah dengan sekolah sasaran SDN 008 Bintan Utara (400 m3) dan SDN 010 Bintan Utara (172 m3).

(45) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD/MI

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 454,200,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 453,464,996 atau 99.54%. Keluaran kegiatan ini adalah

mewujudkan ruang perpustakaan yang memadai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang optimal. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya Ruang Baca yang memadai di sekolah dengan sekolah sasaran SDN 001 Toapaya (1 ruang), SDN 002 Teluk Bintan (1 ruang), SDN 008 Bintan Timur (1 ruang), SDN 012 Teluk Bintan (1 ruang), SDN 002 Gunung Kijang (1 ruang)

(46) Kegiatan Rehabilitasi panggung Kesenian SD/MI

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 29,100,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25,308,536 atau 86.97%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan pentas seni sekolah dan program-program lainnya yang ada disekolah. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Panggung Kesenian Sekolah dengan sekolah sasaran SDN 001 Tambelan

(47) Kegiatan Pembangunan Mushola SD/MI

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 142,150,000 dengan realisasi sebesar Rp. 141,491,945 atau 99.54%. Keluaran kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan sarana ibadah sebagai penunjang program pendidikan disekolah khususnya dibidang keagamaan bagi agama Islam. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas keagamaan bagi guru dan siswa yang beragama islam.

(48) Kegiatan Pembangunan Gapura SMP/MTs

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 47,750,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47,663,030 atau 99.82%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan gerbang sekolah. Hasil kegiatan ini adalah tertatanya lingkungan sekolah yang lebih indah.

(49) Kegiatan Pengadaan Rapor SD

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan alokasi sebesar Rp. 321,070,200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 316,801,000 atau 98.67%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan Rapor Kurikulum 13 SD sebanyak 3.000 eksemplar. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya buku laporan hasil belajar siswa SD sebanyak 3.000 eksemplar.

(50) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK Reguler)

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 600,631,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 600,631,000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan ruang kelas baru sesuai SNP. Hasil kegiatan ini adalah terbangunnya 2 unit ruang kelas baru di SMPN 3 Bintan.

(51) Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium SMP (DAK Reguler)

Kegiatan dilaksanakan oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus dengan alokasi sebesar Rp. 940,000,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 940,000,000 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan ruang praktik bagi siswa dan guru. Hasil kegiatan ini adalah terbangunnya ruang pratikum bagi siswa dan guru sesuai SNP.

(52) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa SMP Negeri Swasta Kab. Bintan

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan alokasi sebesar Rp. 33.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32,773,800 atau 99.31%. Tujuan umum dari kegiatan ini mendata penerima Program Indonesia Pintar (PIP) SMP Negeri dan Swasta,

sedangkan tujuan khususnya adalah mengevaluasi kelayakan penerima Program Indonesia Pintar dan mengevaluasi manfaat Program Indonesia Pinta bagi siswa tidak mampu. Output kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP), dan hasil kegiatan ini adalah mendapatkan data penerima Program Indonesia Pintar dari seluruh SMP negeri dan swasta, serta mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Dari hasil kegiatan ini adalah terdapat 2.753 siswa SMP se Kabupaten Bintan yang layak dan mendapatkan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar.

(53) Kegiatan Bimbingan Teknis Pemantapan Tim Teknis UNBK

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 317,843,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 286,202,800 atau 90.05%. Keluaran memberikan informasi pengetahuan tentang Teknis Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kepada para Proktor Se-Kabupaten Bintan. Hasil kegiatan ini adalah terlatihnya proktor Ujian Nasional Berbasis Komputer dalam mengoperasikan dan memecahkan permasalahan ganggaung dalam pelaksana ujian.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Non Formal

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.614.605.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 553436.472,- atau 90,04%. Keluaran program ini adalah mewujudkan pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan non formal. Dengan usaha memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi. Program ini bertujuan untuk terwujudnya pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program pendidikan non formal. Dengan usaha memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan.

a. Pelaksanaan Program

1) Monitoring UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan)

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu alokasi sebesar Rp. 31,559,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28,109,440 atau 89.07%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring di SMKN 1 Bintang Timur sebagai tempat pelaksanaan ujian, ujian dilaksanakan secara online menggunakan komputer. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan pembelajaran non formal. Hasil Kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) untuk 8 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dan diikuti sebanyak 276 peserta dan sebanyak 238 orang peserta ujian kesetaraan yang lulus ujian.

2) Pemberdayaan Penyelenggaraan TBM

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 80,914,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 74,148,296 atau 91.64%. Keluaran kegiatan ini adalah mengimplementasikan program pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam wujud kegiatan Taman Bacaan Masyarakat. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas 10 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kabupaten Bintang.

3) Pemberdayaan Penyelenggaraan PKBM

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 127,112,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121,136,210 atau 95.30%. Keluaran kegiatan ini adalah

meningkatkan pemahaman pengelola PKBM mengenai konsep manajemen pengembangan program pnfi. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman 14 pengelola PKBM mengenai konsep manajemen pengembangan program pnfi, sehingga pada saat diperlukan akan dipakai untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kinerja PKBM

4) Peningkatan Pelayanan Satuan Pendidikan Non Formal

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 165,020,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 120,350,886 atau 72.93%. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelayanan Pendidikan Non Formal. Dan hasil kegiatan ini adalah terlayanninya masyarakat yang putus sekolah untuk melanjutkan pada jenjang non formal (Paket A, Paket B dan Paket C)

5) Pembangunan Ruang Kelas Baru (SKB)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 210,000,000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 209,691,640 atau 99.85%. kegiatan ini bertujuan menyiapkan sarana prasarana dalam pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pertama di Kabupaten Bintan. Keluaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelayanan Pendidikan Non Formal. Dan hasil kegiatan ini adalah tersedianya 1 unit ruang kelas baru dalam proses pembelajaran Paket A, Paket B dan Paket C.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Non Formal tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga kependidikan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.889.524.600,00,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.959.248.897,00 atau 76,08%. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembekalan PPGJ bagi peserta Sertifikasi Guru

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 55,890,388 atau 74.52%. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang perubahan-perubahan dalam proses penetapan dan pendaftaran bagi peserta didik tahun 2018 sebanyak 100 orang. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mendapatkan sertifikat pendidik. Sedangkan hasilnya adalah meningkatnya pemahaman 100 orang calon peserta sertifikasi pendidika yang terdiri dari 55 orang yang sudah lulus pre tes dan 45 orang yang belum lulus pre test .

(2) Pembiayaan Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan pagu anggaran Rp. 72,110,050 dan realisasi keuangan Rp. 66,892,500 atau 92.76%. Tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan juga non guru. output terlaksananya penilaian angka kredit guru dan non guru Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian khususnya dalam penilaian angka kredit bagi guru dan kepala sekolah yang diusulkan dalam kenaikan pangkat, terdapat 120 orang baik guru maupun non guru yang telah diterbitkan SK kenaikan pangkatnya periode April 2019 dan Oktober 2019.

(3) Pemilihan PTK Berprestasi Tingkat Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 178,377,625 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 123,853,613 atau 69.43%. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan motivasi profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam tugasnya, membangun komitmen guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran menuju Standar Nasional Pendidikan. Output kegiatan ini adalah terlaksananya seleksi PTK di Kabupaten Bintan, dan hasil kegiatan ini adalah terpilih 3 guru dan 3 kepala sekolah TK, SD, SMP se Kabupaten Bintan untuk mewakili Kabupaten Bintan di Tingkat Provinsi.

(4) Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 290,972,800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 268,174,400 atau 92.16%. Tujuan kegiatan ini adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatkan

tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, hasil Kegiatan ini adalah terserapnya aspirasi dari masyarakat tentang permasalahan seputar pendidikan baik kebijakan maupun sarana dan prasarana.

(5) Lomba Inovasi pembelajaran Guru

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232,078,625 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 192,112,500 atau 82.78%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya seleksi guru untuk mengikuti lomba Inovasi Guru Tingkat Provinsi sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan ini adalah terpilihnya wakil dari Kabupaten Bintan untuk tingkat Propinsi.

(6) Rakor Kepala Sekolah SD/SMP

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 196,840,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 131,948,950 atau 67.03%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi (rakor) kepala sekolah SD/SMP dengan tujuan membahas isu-isu terkini pendidikan baik daerah maupun nasional. Hasil kegiatan ini adalah terserapnya masukan dan aspirasi dari peserta rapat koordinasi yang terdiri dari 90 orang Kepala Sekolah SD, 28 orang Kepala Sekolah SMP dan 3 orang unsur pendidikan dalam upaya memajukan pendidikan di Kabupaten Bintan

(7) Pelatihan Pembuatan Makalah (Karya Ilmiah) Untuk Kenaikan Pangkat Guru

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu alokasi Sebesar Rp. 181,830,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 152,857,776 atau 84.07%. Keluaran kegiatan ini adalah

meningkatkan kompetensi guru dalam pembuatan karya ilmiah sebagai persyaratan kenaikan pangkat. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan 40 orang guru dalam penulisan karya ilmiah atau makalah.

(8) Bimbingan Tekhnis Calon Kepala Sekolah

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu alokasi Sebesar Rp. 468,675,500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 384,988,790 atau 82.14%. Keluaran kegiatan ini adalah menyeleksi calon kepala sekolah yang berkualitas yakni kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang baik serta mampu memimpin, mengelola, dan mengembangkan sekolah secara optima. Hasil kegiatan ini adalah terseleksinya 46 orang calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik.

(9) Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ)

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu alokasi Sebesar Rp. 612,675,500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 260,288,590 atau 42.48%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah guru Kabupaten Bintan untuk memiliki sertifikat pendidik. Hasil kegiatan ini adalah bertambahnya 16 orang guru Kabupaten Bintan yang memiliki sertifikat.

(10) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menghadapi Pre Test

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu alokasi Sebesar Rp. 364,982,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 311,028,500 atau 85.22%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah kelulusan pre test guru dan guru

yang memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Bintan. Hasil kegiatan ini adalah lulusnya 100 guru dalam mengikuti pretest guru.

(11) Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja dan Penyusunan Sasaran Kerja Bagi Tenaga Fungsional Guru

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu alokasi sebesar Rp. 362,107,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 304,369,350 atau 84.06%. Keluarran kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dalam menilai prestasi kerja guru dan menilai sasaran kerja pegawai dan guru bagi kepala sekolah dan meningkatkan pengetahuan guru dalam membuat sasaran kerja pegawai bagi tenaga fungsional guru yang sesuai ketentuan. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya 100 orang kepala sekolah dan guru dalam penyusunan dan penilaian SKP.

(12) Pelatihan Program Induksi Bagi Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu alokasi sebesar Rp. 485,193,500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 406,223,950 atau 83.72%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan kepala sekolah dan guru pembimbing tentang tugas dan fungsi masing-masing dalam berperan pada program induksi bagi guru pemula. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya 146 kepala sekolah dan guru pembimbing dalam melaksanakan program induksi bagi penilaian guru pemula/CPNS.

(13) Pelatihan Pelaksanaan Program Induksi Bagi Guru Pemula

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu alokasi sebesar Rp. 368,682,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.

300,619,590 atau 81.54%. Keluaran kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan 100 orang guru pemula/CPNS dalam kegiatan orientasi pelatihan di tempat kerja, pengembangan dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya berdasarkan amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) no. 27 Tahun 2010 tentang program induksi bagi pemula. Bertambahnya pengetahuan guru pemula tentang Program Induksi Guru Pemula dan diterbitkannya Sertifikat Pendidik bagi guru pemula (CPNS) di Kabupaten Bintan yang akan digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat pertama kali bagi guru pemula di Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4) Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.540.054.040,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.405.903.085- atau 96,21%. Hasil program ini adalah terwujudnya pelayanan pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, murah dan merata di setiap kecamatan. Secara lebih spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan

pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Pos PAUD, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, murah dan merata disetiap kecamatan. Secara lebih spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Pos PAUD, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 129,279,700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 119,142,740 atau 92.16%. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan wawasan dan melatih serta memberikan informasi kepada pengelola PAUD tentang akreditasi lembaga PAUD dan pendidikan non formal. Output kegiatan meningkatkan jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi, dan hasilnya adalah

meningkatnya jumlah lembaga paud yang terakreditasi yaitu sebanyak 24 lembaga.

(2) Pengadaan Sarana dan Prasarana (APE) PAUD

Kegiatan dilaksanakan dengan pagu alokasi Sebesar Rp. 341,470,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 332,016,038 atau 97.23%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan alat bermain bagi siswa TK dan PAUD. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya alat permainan dalam proses mengembangkan imajinasi bagi siswa.

(3) Pengadaan Dariumband

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 200.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199,872,000 atau 99.94%. Keluaran kegiatan ini adalah menyediakan fasilitas penunjang pendidikan khususnya bidang kesenian. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana penunjang kreativitas peserta didik di 10 lembaga TK/PAUD, masing-masing PAUD mendapatkan 1 set dariumband terdiri dari 11 item.

(4) Lomba Apresiasi Gugus PAUD Tk.Kab.Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 106,562,540 dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 89,287,430 atau 83.79%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Seleksi Apresiasi Gugus PAUD Tingkat Kabupaten Bintan yang diikuti sebanyak 33 orang dari 9 kecamatan, dan hasil kegiatan ini adalah terpilihnya 1 gugus PAUD yang mewakili Kabupaten Bintan di Tingkat Provinsi.

(5) Bantuan Operasional Sekolah PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi Rp. 103.200.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 103,200,000 atau 100% yang bersumber dari Dana

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya Biaya Operasional dalam menunjang proses belajar mengajar bagi jenjang TK/PAUD. Dan hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan sekolah PAUD kepada siswa khususnya siswa TK Pembina Bintang Timur dan TK Pembina Bintang Utara.

(6) Pembangunan Pagar Untuk PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 306,900,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 299,946,836 atau 97.73%. Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas keamanan bagi guru dan siswa PAUD, dan hasil kegiatan ini adalah terbangunnya pagar TK dan PAUD di Kabupaten Bintan. Sasaran kegiatan ini adalah TK Arlica Kecamatan Bintan Utara (85,00 m²), SPS Lengkuas Indah Kecamatan Bintan Timur (135,00 m²), TK ANTAM Kecamatan Bintan Timur (m²).

(7) Rehabilitasi Gedung dan Bangunan TK dan PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 374,670,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 373,607,104 atau 99.72%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana yang nyaman dalam proses belajar mengajar. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya ruang belajar yang nyaman dan memadai. Sasaran kegiatan ini adalah PAUD Tirta Dharma Kecamatan Bintan Utara Rehab Atap (63,00 m²), PAUD Bhakti Awlya Kecamatan Bintan Utara Rehab Atap (60,00 m²), PAUD SPS Anggur Kecamatan Bintan Utara Rehab Gedung(6,00 m²), TK Sinar Bahagia Kecamatan Seri Kuala Lobam Rehab Bangunan/Keramik (84,00 m²), PAUD Terumbu Karang Kecamatan Gunung Kijang

Rehab Atap (105,00 m²), KB Permata Hati Kecamatan Tambelan Rehab Gedung (30,00 m²)

(8) Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan DAK PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 33,740,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33,739,860 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, pembinaan dan evaluasi BOP. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya manajemen pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah PAUD di 118 lembaga TK/PAUD.

(9) Pembangunan Gedung TK/PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 197,100,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 196,093,500 atau 99.49%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya prasarana yang layak dalam mendukung pembelajaran. Hasil kegiatan ini adalah terbangun prasarana pendidikan bagi TK Mutiara Bunda Kecamatan Toapaya.

(10) Pembangunan Paving Blok TK/PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 312,000,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 309,136,827 atau 99.08%. Keluaran dari kegiatan ini adalah menyediakan halaman bermain bagi siswa PAUD. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya halaman bersih dan rapi di PAUD Nurul Ain Kecamatan Teluk Sebong (128,00 m²), TK Nusantara Kecamatan Bintan Utara (185,00 m²), TK Pembina Kecamatan Toapaya (642 m²).

(11) Pengadaan Meubiler TK/PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 100,000,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 83,007,500 atau 83.01%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan Meubiler di 10 lembaga PAUD.

Dan hasil kegiatan ini adalah tersedianya meubiler (meja guru 3 buah, kursi guru 3 buah, lemari buku kelas 3 buah, meja belajar 3 buah, kursi belajar 60 buah) di TK Pembina 3 Kecamatan Toapaya.

(12) Penguatan Kelembagaan PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 166,643,600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145,243,902 atau 87.16%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penguatan kelembagaan PAUD dengan tujuan memberikan manfaat yang besar bagi para pengelola/pendidik PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, dan hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan 12 pendidik PAUD dalam menyiapkan PAUD Percontohan.

(13) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Daerah) Jenjang TK/PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 11,200,000 dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 11,197,200 atau 99.98%. Keluaran kegiatan ini adalah meringankan operasional sekolah dan meringankan orang tua siswa dalam menyekolahkan anaknya di TK. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya biaya operasional sekolah TK Pembina Bintang utara dan TK Pembina Bintang Timur dalam pelaksanaan belajar mengajar.

(14) Lomba Membuat Alat Permainan Edukatif Bagi Guru TK/PAUD Se Kabupaten Bintang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 49,829,900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46,109,043 atau 92.53%. Keluaran kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana tingkat kreatifitas guru PAUD dalam membuat alat permainan edukatif. Hasil kegiatan ini adalah sebanyak 30 orang guru PAUD menjadi lebih

inovatif dan kreatif dalam membuat dan mengembangkan alat pendidikan edukatif, kreatif dan inovatif di PAUD/TK

(15) Apresiasi Bunda Paud Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 190,292,700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 190,017,550 atau 99.86%. Keluaran kegiatan ini adalah mendorong perkembangan PAUD di Kabupaten Bintan. Hasil kegiatan ini adalah sebanyak 10 bunda paud dan 10 pkg 10 gugus karena sudah berpartisipasi dalam mengembangkan PAUD di Kabupaten Bintan.

(16) Pembangunan Jamban Tk/PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 496,760,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 484,166,742 atau 97.46%. Terlaksananya pembangunan prasarana sanitasi yang sesuai kebutuhan lembaga. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya jamban di KB Kasih Kecamatan Bintan Utaram, KB Arlica Kecamatan Bintan Utara, TK Puji Kecamatan Bintan Utara, KB Tirta Dharma Kecamatan Bintan Utara, TK Negeri Pembina Kecamatan Bintan Utara, TK Sinar Bahagia Kecamatan Seri Kuala Lobam, PAUD Sri Kemuning Kecamatan Seri Kuala Lobam.

(17) Lomba Senam Siswa Tk/PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 70,405,600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 65,660,200 atau 93.26%. Keluaran kegiatan ini adalah menumbuhkan sikap anak usia dini melalui olahraga dan anak mampu melakukan gerakan bergembira. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya sportifitas dan kreatifitas 360 siswa peserta lomba dalam pengembangan diri.

(18) Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK Reguler)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 140,000,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 139,766,000 atau 99.83%. Keluaran kegiatan ini adalah memenuhi sarana alat bermain bagi siswa TK Negeri Bintan Utara. Hasil kegiatan terpenuhinya alat bermain edukatif luar sebanyak 1 unit dan alat bermain edukatif dalam sebanyak 6 unit di TK Pembina Bintan Utara.

(19) Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) (DAK Reguler)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 50,000,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49,997,500 atau 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya buku koleksi perpustakaan dan buku panduan pendidik di TK Pembina Bintan Utara. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya buku bacaan, buku referensi dan buku panduan bagi pendidik di TK Pembina Bintan Utara sebanyak 5 paket.

(20) Penunjang DAK Sarana PAUD (DAK Reguler)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 10,000,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9,925,000 atau 99.25%. Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya terlaksananya monitoring dan evaluasi pada sekolah penerima DAK PAUD. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK PAUD.

(21) Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang TK/PAUD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 150,000,000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 124,770,113 atau 83.18%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan kurikulum 2013 sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan belajar mengajar yang terstruktur di satuan pendidikan TK/PAUD. Hasil kegiatan ini adalah terlatihnya 70 orang perwakilan dari PAUD Se Kabupaten Bintan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di lembaganya.

❖ **Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS)**

Pada tahun 2018 dana BOSNAS telah disalurkan kepada 96 SD dengan total siswa yang menerima lebih kurang 17.959 siswa. Dengan masing-masing siswa mendapatkan Rp.800.000/siswa dengan total dana BOSNAS Rp.13.578.198.524,52.

Tabel 3.1
Dana BOSNAS SD 2011-2018

TAHUN	SD					
	TW I	TW II	TW III	TW IV	PER SISWA (Rp)	TOTAL (Rp)
2011	16.453	16.325	16.787	6.787	397.000	6.585.436.000
2012	16.786	6.757	17.300	17.300	397.000	9.880.735.000
2013	17.300	17.300	17.242	18.300	580.000	10.170.590.000
2014	18.227	18.383	18.257	19.244	580.000	10.746.095.000
2015	18.084	18.350	18.189	18.391	800.000	14.602.800.000
2016	18.258	18.715	18.403	15.665	800.000	14.208.200.000
2017	18.732				800.000	14.981.920.000
2018	17.959				800.000	13.578.198.524.,52

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2019

Sedangkan untuk SMP pada tahu 2018 dana BOSNAS telah disalurkan kepada 28 SMPN dengan jumlah total siswa yang menerima lebih kurang 6.969 siswa. Masing-masing siswa mendapatkan Rp.1.000.000/ siswa dengan jumlah dana BOSNAS Rp.7.122.400.000.

Tabel 3.2
Dana BOSNAS SMP 2011-2018

TAHUN	SMP					TOTAL (Rp)
	TW I	TW II	TW III	TW IV	PER SISWA (Rp)	
2011	5.509	5.458	5.416	5.416	570.000	3.106.357.500
2012	5.535	5.495	5.677	5.677	570.000	3.973.160.000
2013	5.677	5.677	5.513	.261	710.000	4.105.220.000
2014	5.887	7.095	6.467	7.459	710.000	4.776.170.000
2015	6.605	6.599	6.582	7.175	1.000.000	6.740.250.000
2016	25.107	25.735	25.361	21.769	1.000.000	20.940.950.000
2017	7.105				1.000.000	7.122.400.000
2018					1.000.000	6.952.675.839,47

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun 2019

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

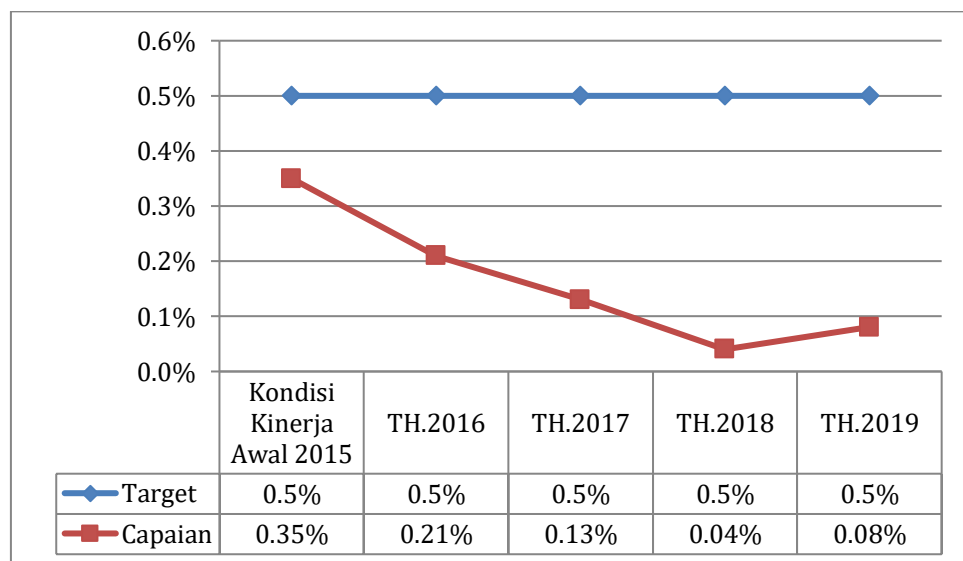
3.1.1.2 Urusan Kesehatan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menyelenggarakan urusan wajib yaitu Urusan Kesehatan, dimana Pencapaian Indikator kinerja pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Kesehatan** adalah sebagai berikut:

1) Balita Gizi Buruk

Pengertian balita gizi buruk adalah balita sangat kurus dengan indeks berat badan menurut panjang badan (BB/TB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang merupakan padanan istilah ***severely wasted*** (sangat kurus) dengan ambang batas antropometri <-3 SD.

Grafik 3.1 Persentase Balita Gizi Buruk



Sumber: Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat dan UKBM

Dari grafik diatas terlihat Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan, yang mana pada tahun 2018 dilaporkan jumlah balita Gizi Buruk 5 balita. sedangkan Tahun 2019 terjadi peningkatan, dari 5 balita (0,04 %) pada tahun 2018 menjadi 9 balita (0,08

%) pada tahun 2019 dan setelah dilakukan intervensi penatalaksana gizi buruk sampai dengan akhir tahun 2019 menjadi 2 balita yaitu: dari Puskesmas Teluk Sasah yang disebabkan oleh Pola Asuh dari orang tua yang masih salah.

2) Angka Kematian Bayi

Untuk tahun 2019, Target untuk Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 12/1.000 KH dan Target Jumlah Kasus Kematian Bayi adalah < 34 kasus.

Grafik 3.2 Angka Kematian Bayi



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Usila

Untuk tahun 2019, Target untuk Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 12/1.000 KH dan Target Jumlah Kasus Kematian Bayi adalah < 34 kasus. Hasil capaian untuk Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2019 adalah 10/1.000 KH, masih dibawah target walaupun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 8,4/1.000 KH.

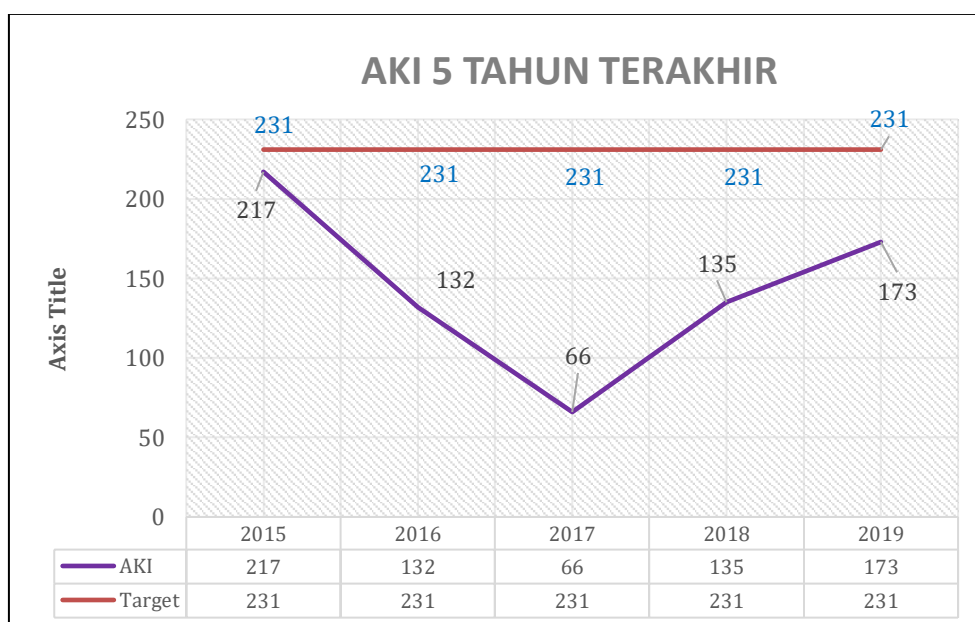
Sementara untuk hasil capaian Jumlah Kasus Kematian Bayi adalah 29 kasus kematian bayi dari 2.897 kelahiran hidup yang ada, masih dibawah target walaupun terjadi peningkatan kasus dari tahun 2018 yaitu jumlah kasus kematian bayi adalah 25 kasus dari 2.962 kelahiran hidup

yang ada. Seluruh Puskesmas telah berupaya menekan / menurunkan kasus kematian bayi di masing-masing Puskesmas.

3) Angka Kematian Ibu

Untuk tahun 2019, Target untuk Angka Kematian Ibu (AKI) adalah < 231/100.000 KH. Hasil capaian untuk Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2019 adalah 173/100.000 KH, masih dibawah target walaupun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 135/100.000 KH.

Grafik 3.3 Angka Kematian Ibu



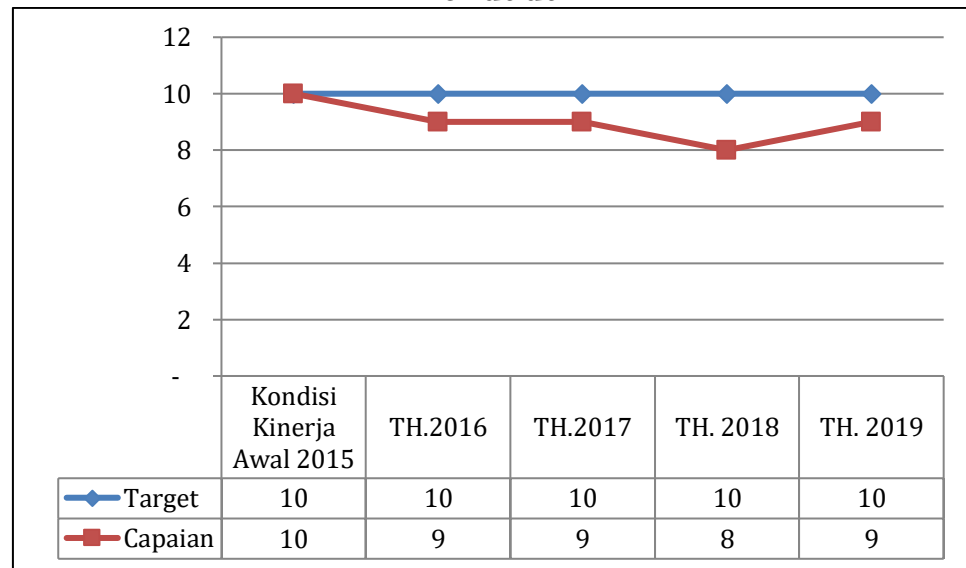
Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Usila

Sementara untuk hasil capaian Jumlah Kasus Kematian Ibu adalah 5 kasus kematian Ibu dari 2.897 kelahiran hidup yang ada, masih dibawah target walaupun terjadi peningkatan kasus dari tahun 2018 yaitu jumlah kasus kematian Ibu adalah 4 kasus dari 2.962 kelahiran hidup yang ada. Seluruh Puskesmas telah berupaya menekan / menurunkan kasus kematian ibu di masing-masing Puskesmas.

4) Kecamatan dengan API < 1 per 1000 Penduduk

Secara keseluruhan angka penemuan dan pengobatan kasus malaria di Kabupaten Bintan dalam seribu penduduk atau *Annual Parasite Inciden* (API) masih sesuai dengan target secara Nasional yaitu API kurang dari satu.

Grafik 3.4 Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 Penduduk



Sumber : Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Berdasarkan tabel diatas jumlah kecamatan dengan API <1 Per 1000 penduduk tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika pada tahun 2018 hanya 8 kecamatan yang angka API<1 per 1000 penduduk, maka pada tahun 2019 ini ada 9 kecamatan yang angka API<1 per 1000 penduduk.

Secara keseluruhan angka penemuan dan pengobatan kasus malaria di Kabupaten Bintan dalam seribu penduduk atau *Annual Parasite Inciden* (API) masih sesuai dengan target secara Nasional yaitu API kurang dari satu, walaupun di beberapa desa secara epidemiologi juga ada peningkatan penemuan kasus malaria positif di daerah endemis malaria khususnya di daerah reseptif seperti di kecamatan Teluk Bintan dan kecamatan Mantang, di kecamatan Teluk Bintan kampung Gisi desa Tembeling, penderita pertama adalah

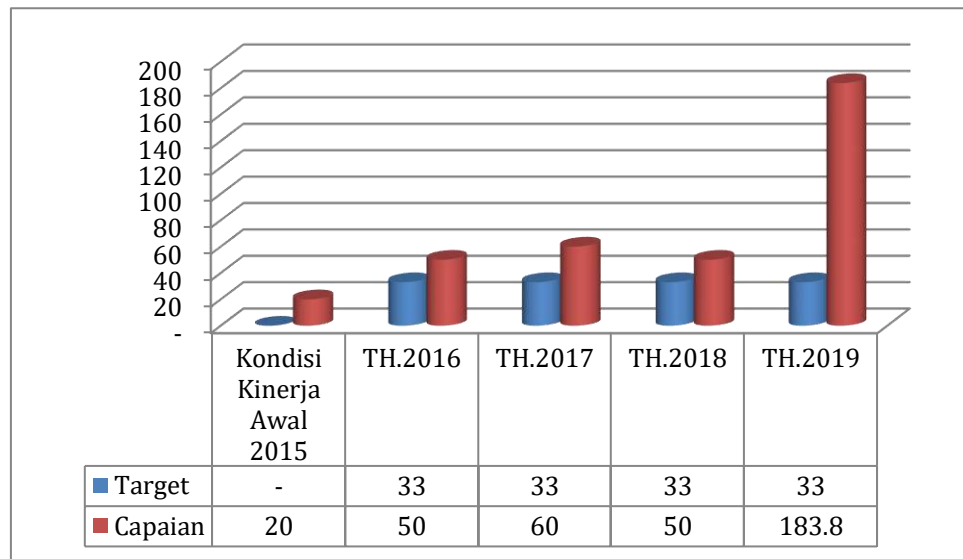
warga kampung Gisi yang sebelumnya pernah berkunjung dan bermalam ke daerah endemis malaria yaitu kampung selat limau desa mantang besar kecamatan Manatang. Sedangkan di kecamatan Mantang desa mantang besar tepatnya di pulau sirai, selat limau dan tanjung elong adanya peningkatan penemuan kasus malaria di ketiga tempat ini disebabkan oleh adanya vektor atau nyamuk anopheles sehingga terjadi penularan setempat atau indogenous dimana pada awalnya adanya keterlambatan penemuan kasus positif malaria dikarenakan terduga malaria atau suspek malaria tidak segera mengunjungi tempat/pasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai fasilitas laboratorium, sehingga parasit malaria yang ada pada/dalam tubuh suspek tidak dapat ditemukan sehingga suspek yang dalam hal ini sebetulnya penderita malaria tidak mendapatkan pengobatan yang tepat untuk penderita malaria atau tidak mendapat obat anti malaria (OAM), sehingga suspek/penderita malaria masih dapat menjadi sumber penularan kepada masyarakat yang ada atau bermukim di sekitar tempat tinggal penderita malaria.

5) Insiden Rate DBD Per 100.000 Penduduk

Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit DBD telah dilakukan beberapa upaya pengendalian penyakit DBD. Pada grafik dibawah ini menjelaskan Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Bintan pada tahun 2019.

Berdasarkan grafik dibawah ini, persentase Kecamatan di Kabupaten Bintan yang memiliki IR (Inciden Rate) DBD per 100.000 penduduk yaitu sebesar 183,8 diwilayah Kabupaten Bintan.

Grafik 3.5 Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk



Sumber : Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit DBD telah dilakukan beberapa upaya pengendalian penyakit DBD, dimulai dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) setelah adanya laporan kasus dari Rumah Sakit/Puskesmas, pengendalian vektor untuk menurunkan faktor resiko penularan dengan meminimalkan habitat perkembangbiakan, menurunkan kepadatan dan umur vektor, mengurangi kontak antara vektor dengan manusia, memutus rantai penularan penyakit. Kemudian dilakukan pengasapan (*Fogging Focus*) dan abatesasi massal dengan radius ± 100 meter dari tempat tinggal kasus.

Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN-DBD) lebih dioptimalkan dengan meningkatkan kinerja Kader Pemantau Jentik Berkala (PJB) yang bertugas untuk memantau secara berkala tempat-tempat penampungan air bersih yang memungkinkan sebagai tempat perindukan nyamuk *Aedes Aegypti* di setiap rumah di masing-masing wilayah kerja dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan gotong royong secara rutin minimal setiap

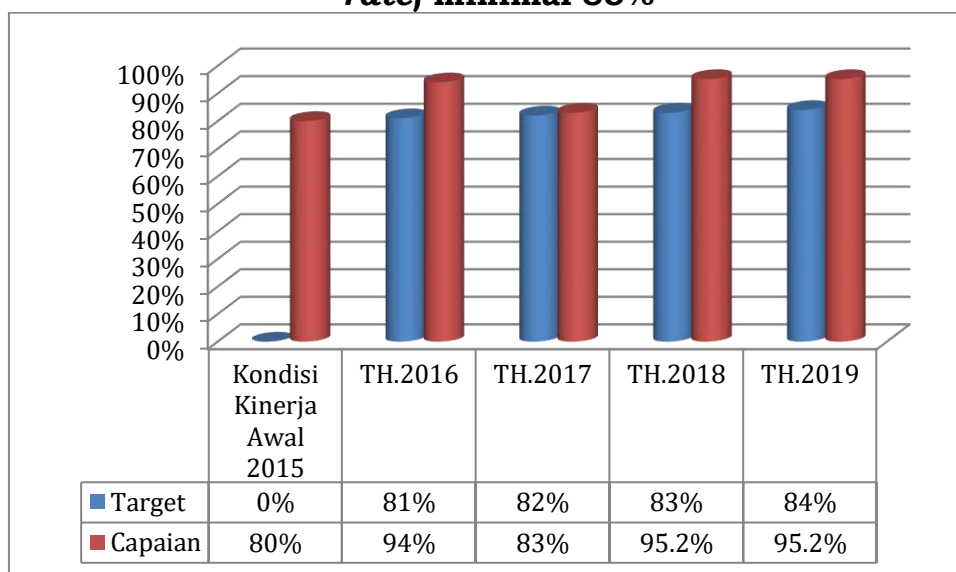
minggu sekali, serta dengan melakukan Gerakan 3M (menguras, menutup, mengubur) secara serentak dan Plusnya adalah membubuhkan larvasida butiran pada tempat-tempat penampungan air yang sulit dijangkau/dibersihkan, serta menjaga kebersihan lingkungan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, apabila Angka Bebas Jentik (ABJ) pada setiap rumah (*House Index*) dan tempat penampungan air (*Container Index*) sudah lebih dari 95%, maka tingkat kepadatan nyamuk penular DBD akan menurun, hal ini dapat mengurangi faktor resiko penularan penyakit DBD.

6) Kecamatan dengan Angka Keberhasilan Pengobatan TB dan Paru TBA Positif

Berdasarkan grafik dibawah ini, Angka indikator Sukses Rate di Kabupaten Bintan Tahun 2019 yaitu 95,2%, dimana dari 137 kasus pasien BTA Positif yang ditemukan 130 orang diantaranya dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap. Capaian SR tahun 2019 sama dengan capaian SR tahun 2018 yang lalu. Namun dari jumlah kasus yang ditemukan secara kumulatif pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2018.

Meningkatnya temuan kasus baru TB Paru BTA Positif disebabkan oleh semakin banyaknya kegiatan *case finding* yang dilakukan terutama melalui integrasi kegiatan PIS-PK. Dan diharapkan pada tahun berikutnya kegiatan integrasi ini dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak terduga TB yang dapat ditemukan nantinya.

Grafik 3.6 Persentase Kecamatan dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (*success rate*) minimal 85%



Sumber : Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

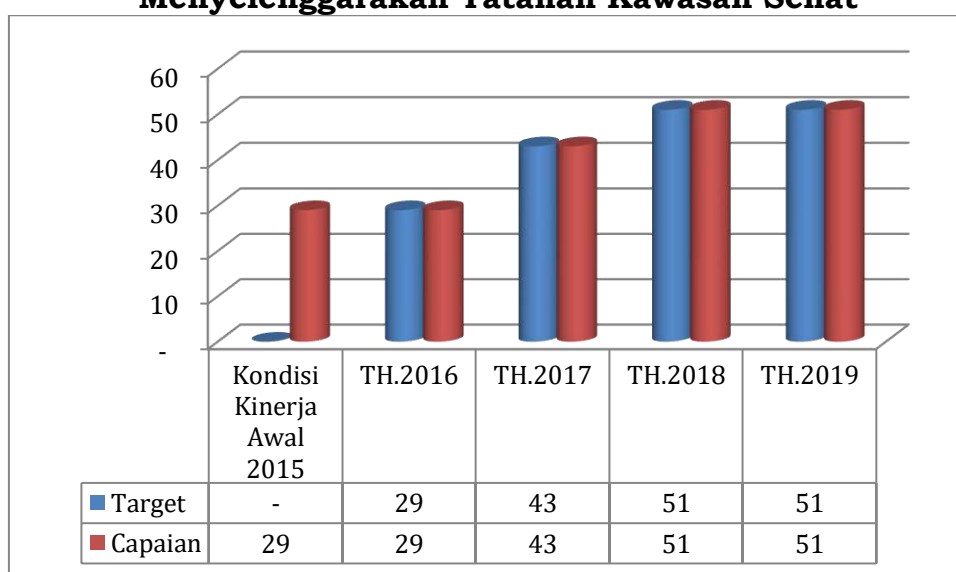
Seluruh kasus TB Paru yang ditemukan 100% sudah dilakukan pengobatan sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan setiap penderita diawasi/dipantau oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).

7) Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat

Kawasan sehat merupakan kondisi yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah, pada tahun 2017 di Kabupaten Bintan telah melaksanakan 4 tatanan dalam mendukung kawasan sehat yaitu Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum dan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri, Industri dan perkantoran sehat, serta Tempat Pariwisata sehat, yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten sehat di 8 (delapan)

desa/Kelurahan di 9 wilayah Kecamatan. Pada tahun 2019 Kabupaten Bintan melaksanakan 5 tatanan kawasan sehat. Berdasarkan grafik dibawa ini terlihat bahwa pencapaian target Jumlah Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat pada tahun 2019 telah tercapai, Desa/Kelurahan di Kab. Bintan yang telah menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebanyak 51 Desa/ kelurahan.

Grafik 3.7 Jumlah Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat



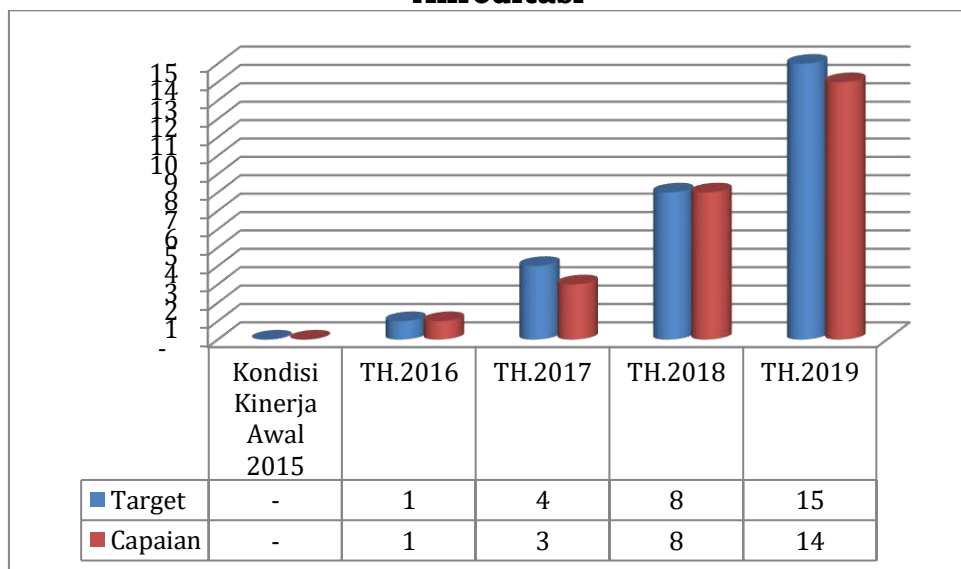
Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

8) Puskesmas Akreditasi

Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan, dimana 1 kecamatan yang memiliki Puskesmas terakreditasi tahun 2016 yaitu UPTD Puskesmas Kawal yang terletak di Kecamatan Gunung Kijang. Tahun 2017 ada 3 kecamatan yang memiliki Puskesmas terakreditasi yaitu UPTD Puskesmas Tanjung Uban yang terletak di Kecamatan Bintan Utara, UPTD Puskesmas Teluk Sasah yang terletak di Kecamatan Seri Kuala Lobam, UPTD Puskesmas Teluk Sebong yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong. Tahun 2018 ada 8 Puskesmas yaitu UPTD Puskesmas Kijang

Kecamatan Bintang Timur, UPTD Puskesmas Teluk Bintang
 Kecamatan Teluk Bintang, UPTD Puskesmas Sri Bintang
 Kecamatan Teluk Sebong, UPTD Puskesmas Toapaya
 Kecamatan Toapaya, UPTD Puskesmas Kuala Sempang
 Kecamatan Seri Kuala Lobam, UPTD Puskesmas Sei Lekop
 Kecamatan Bintang Timur, UPTD Puskesmas Berakit
 Kecamatan Teluk Sebong, UPTD Puskesmas Kelong
 Kecamatan Bintang Pesisir.

Grafik 3.8 Jumlah Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi



Sumber: Seksi Pelayanan Rujukan dan Jaminan Mutu Kesehatan

Tahun 2019 Puskesmas terakreditasi yaitu UPTD Puskesmas Tambelan yang terletak di Kecamatan Tambelan, UPTD Puskesmas Mantang yang terletak di Kecamatan Mantang, sementara itu untuk UPTD Puskesmas Kawal yang terletak di Kecamatan Gunung Kijang, adalah 1 Puskesmas yang melaksanakan Re Akreditasi (Akreditasi Ulang). Untuk Tahun 2019 Capaian Puskesmas yang sudah Terakreditasi sebanyak 14 Puskesmas (93 %).

9) Terselenggaranya Standarisasi dan Akreditasi Rumah Sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

Pada tahun 2017 pelaksanaan Survei Akreditasi RSUD Bintan dilaksanakan pada bulan Desember dengan hasil Survei dengan Status Perdana, Pelaksanaan Akreditasi di RSUD Bintan masih dilakukan secara bertahap pada beberapa unsur penilaian saja. Dengan hasil Perdana maka bila di bandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kab. Bintan maka target kinerja tersebut telah tercapai.

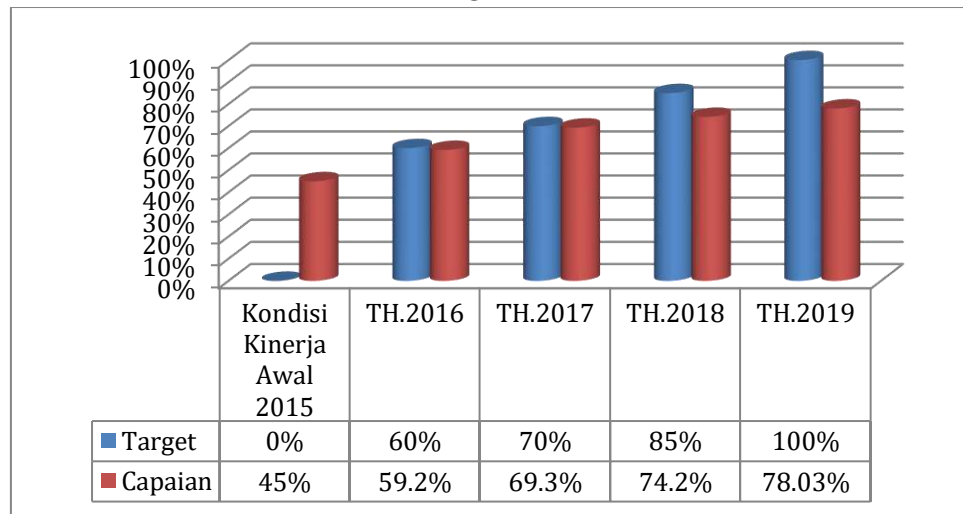
Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Survey Evaluasi Akreditasi yang dilakukan oleh surveyor dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan RI. Survey evaluasi tersebut untuk menilai/ evaluasi Status Akreditasi Perdana yang telah dicapai pada tahun lalu, dimana tidak ada perubahan status dari survey evaluasi ini yaitu masih tetap dengan status Perdana.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Survey Evaluasi Akreditasi yang dilakukan oleh surveyor dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan RI. Survey evaluasi tersebut untuk menilai/ evaluasi Status Akreditasi Perdana yang telah dicapai pada tahun lalu, dimana tidak ada perubahan status dari survey evaluasi ini yaitu masih tetap dengan status Perdana.

10) Persentase Penduduk yang Menjadi Peserta JKN

Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN pada tahun 2019 sebesar 78,03% (120.104 jiwa) hal ini disebabkan oleh belum seluruh masyarakat Kabupaten Bintan terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik itu PBI APBN maupun PBI APBD. Terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Bintan untuk membiayai masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN,

Grafik 3.9 Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN



Sumber: Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bintan terus menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan JKN setiap tahunnya. Hambatan lainnya adalah kurangnya sosialisasi Program JKN kepada masyarakat dan mitra kerjanya dan masih adanya kepesertaan ganda.

Keberhasilan Kinerja tersebut diatas dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.235.655.111,- realisasi sebesar Rp. 42.051.710.581,- atau 87,17%. *Outcome* dari kegiatan ini adalah”

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Kijang dan Jaringannya

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.196.720,-

realisasi sebesar Rp.111.612.276,- atau 93,64%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Kijang dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP, uang saku dan transportasi PNS dan Non PNS. Tersedianya alat tulis kantor, alat kebersihan, cetak, penggandaan. Penyerapan anggaran ini kurang maksimal disebabkan honorarium panitia pelaksana kegiatan dan uang saku PNS tidak bisa dicairkan karena adanya tunjangan kinerja PNS

(2) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Kelong dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.844.720,- realisasi sebesar Rp.166.920.360,- atau 97,7%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Kelong dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP, insentif jaga medis/paramedis, uang transportasi PNS dan Non PNS serta jasa pelayanan kesehatan. Selain itu juga telah disediakan sewa sarana mobilitas air untuk perjalanan dokter ke Mapur. Penyerapan anggaran kegiatan ini belum maksimal disebabkan oleh ada beberapa belanja yang tidak bisa dicairkan berkaitan dengan Peraturan Bupati no. 02 tahun 2018 tentang pemberhentian pembayaran seluruh honorarium kegiatan PNS di Lingkungan Pemenintah Kabupaten Bintan yang meliputi : honorarium panitia

pelaksana, uang transportasi PNS, insentif jaga PNS. Jasa pelayanan tidak dicairkan sama sekali dikarenakan kesulitan dalam proses administrasi.

(3) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Mantang dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.216.836.800,- realisasi sebesar Rp.216.197.100,- atau 99,7%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Mantang dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga, belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan belanja penggandaan.

(4) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.245.040,- realisasi sebesar Rp.111.464.210,- atau 98,43%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Toapaya dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP, uang transportasi PNS, insentif jaga medis/paramedis dan pembelian belanja modal komputer. Penyerapan anggaran masih dibawah belum maksimal karena belanja pegawai hanya bisa dicairkan sampai triwulan II disebabkan berlakunya peraturan baru

namun untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal terserap dengan baik.

(5) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.123.120,- realisasi sebesar Rp.165.922.131,- atau 99,87%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kawal dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga, uang transportasi PNS dan belanja jasa pelayanan kesehatan. Penyerapan anggaran kegiatan ini belum maksimal disebabkan oleh uang insentif jaga untuk PNS tidak bisa dicairkan karena terbentur peraturan bupati dimana yang boleh dicairkan hanya non PNS.

(6) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.820.080,- realisasi sebesar Rp.119.676.142,- atau 96.65%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga, jasa uji laboratorium, belanja makan dan minum kegiatan, belanja jasa pelayanan kesehatan dan belanja modal. Penyerapan

anggaran kegiatan ini belum maksimal disebabkan karena honorarium PNS, insentif jaga PNS, dan jasa pelayanan tidak bisa dicairkan dengan adanya tunjangan kinerja PNS.

(7) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.226.071.080,- realisasi sebesar Rp.212.961.717,- atau 94,2%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah disediakan insentif jaga medis/paramedis dan belanja jasa pelayanan kesehatan. Penyerapan anggaran kegiatan ini belum maksimal disebabkan oleh honorarium panitia pelaksana kegiatan PNS dan insentif jaga PNS tidak bisa dicairkan lagi sejak TW III disebabkan adanya tunjangan kinerja untuk PNS.

(8) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.249.040,- realisasi sebesar Rp.110.868.815,- atau 94,55%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di Puskesmas Teluk Sasah dan Jaringannya berupa : honorarium pelaksana kegiatan, insentif jaga, belanja jasa pelayanan kesehatan, belanja modal meubelair, AC dan alat laboratorium.

(9) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.408.055.920,- realisasi sebesar Rp.345.655.912,- atau 84,70%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP, uang transportasi PNS dan non PNS. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga, pembelian bahan keperluan dapur, makan minum pasien, belanja jasa pelayanan kesehatan dan belanja modal computer dan alat kesehatan.

(10) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.745.360,- realisasi sebesar Rp.155.206.307,- atau 89,32%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Tambelan dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga dan tersedianya alat tulis kantor, belanja cetak, belanja penggandaan, makan dan minum kegiatan serta jasa pelayanan kesehatan.

(11) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Berakit dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.974.000,- realisasi sebesar Rp.82.654.334,- atau 99,61%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Berakit dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga dan tersedianya alat tulis kantor dan belanja penggandaan. Penyerapan anggaran kegiatan ini rendah disebabkan karena uang transportasi PNS dan insentif jaga PNS tidak bisa dicairkan terbentur dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Bupati.

(12) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp166.879.120,- realisasi sebesar Rp.166.145.188,- atau 99,56%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif jaga bagi medis/paramedis dan belanja jasa pelayanan kesehatan.

(13) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.073.440,- realisasi sebesar Rp.77.124.400,- atau 96,32%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga, belanja makan dan minum kegiatan dan belanja modal. Penyerapan rendah karena insentif jaga medis/para medis PNS dan jasa pelayanan kesehatan tidak bisa dicairkan terhitung bulan Juli karena rekening ini berhubungan dengan tunjangan kinerja PNS.

(14) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.343.680 realisasi sebesar Rp.123.591.890,- atau 99,39%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Sei Lekop dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga dan belanja jasa pelayanan kesehatan. Penyerapan anggaran kegiatan ini belum maksimal karena honorarium PNS tidak bisa dicairkan dikarenakan terbentur Peraturan Bupati.

(15) Kegiatan Pengelolaan di UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringannya

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.251.618.800,- realisasi sebesar Rp.250.995.220,- atau 99,75%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar kepada Masyarakat di UPTD Puskesmas Numbing dan Jaringannya berupa pemberian honorarium kepada pengelola data, pengelola administrasi SPM, koordinator UKM dan koordinator UKP. Selain itu juga telah diberikan insentif bagi petugas jaga PNS dan non PNS, sewa mobilitas air, belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja jasa pelayanan kesehatan. Penyerapan anggaran ini belum maksimal disebabkan belanja pegawai PNS yaitu honorarium panitia pelaksana kegiatan dan insentif jaga PNS tidak bisa dicairkan lagi pada triwulan IV.

(16) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Kawal

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.785.391.812 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.768.864.252,- atau 97,9%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai dan terlaksananya bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).

(17) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD Unit Kerja Puskesmas Teluk Sasah

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.586.718.856,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.525.936.831,- atau 89,64%. Hasil melaksanakan kegiatan ini adalah pemberian jasa pelayanan untuk pns dan non pns. Tersedianya meubelair, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, terlaksananya operasional BLUD, tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis, alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi dan terlaksananya 1 kegiatan bimbingan teknis Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).

**(18) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD
Unit Kerja Puskesmas Kijang**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.044.061.836,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.945.013.414,- atau 90,51%. Hasil melaksanakan kegiatan ini adalah pemberian honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, uang saku, jasa pelayanan untuk pns dan non pns. Tersedianya komputer, penggandaan dan makan minum kegiatan.

**(19) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BLUD
Unit Kerja Puskesmas Tanjung Uban**

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.483.689.863,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.400.407.293,- atau 94,38%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa transaksi keuangan, panitia pelaksanaan kegiatan dan uang transportasi PNS. Pembayaran listrik, telepon, surat kabar, internet, cetak dan penggandaan. Tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis, alat tulis kantor, lemari, air conditioner, personal computer, operasional BLUD dan 1 bimbingan teknis tentang Penyusunan Laporan Keuangan BLUD berbasis Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akutansi Keuangan (SAK).

(20) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar di PPK-BLUD Unit Kerja Puskesmas Teluk Sebong

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.460.529.708,- realisasi anggaran sebesar Rp.1.233.531.715,- atau 84,4%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian jasa transaksi keuangan, panitia pelaksanaan kegiatan dan uang transportasi PNS. Pembayaran listrik, telepon, surat kabar, internet, cetak dan penggandaan, service, perawatan gedung kantor. Tersedianya obat-obatan, bahan kimia, bahan medis, alat tulis kantor, lemari, dan operasional BLUD.

(21) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan oleh BLUD Rumah Sakit

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- realisasi Rp. 10.599.414.320,- atau 75,71. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya pelayanan kesehatan rujukan PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

(22) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik) UPTD Puskesmas Kijang dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.210.798.732,- realisasi Rp. 1.088.766.590,- atau 89,92%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(23) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik) UPTD Puskesmas Kelong dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.078.732,- realisasi Rp. 490.943.583,- atau 98,96%.

Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(24) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)

UPTD Puskesmas Mantang dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.380.000,- realisasi Rp. 479.911.040,- atau 96,68%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(25) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)

UPTD Puskesmas Toapaya dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 974.240.000,- realisasi Rp. 917.399.060,- atau 94,17%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(26) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)

UPTD Puskesmas Kawal dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 963.230.000,- realisasi Rp. 888.960.260,- atau 92,29%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(27) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)
UPTD Puskesmas Teluk Bintan dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 517.900.000,- realisasi Rp. 512.818.665,- atau 99,02%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(28) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)
UPTD Puskesmas Teluk Sebong dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 587.553.804,- realisasi Rp. 544.516.925,- atau 92,67%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(29) Bantuan Operasional kesehatan (BOK DAK Non Fisik)
UPTD Puskesmas Teluk Sasah dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 630.400.000,- realisasi Rp. 594.490.032,- atau 94,3%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan. Penyerapan anggaran ini belum maksimal karena adanya peraturan Bupati yang menyatakan bahwa tidak bisa mencairkan anggaran honorarium, insentif jaga PNS serta disebabkan kurangnya penyerapan jasa pelayanan untuk pengobatan Bintan secara gratis.

(30) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)
UPTD Puskesmas Tanjung Uban dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.140.550.000,- realisasi Rp. 953.089.260,- atau 83,56%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan. Penyerapan anggaran kegiatan ini kurang maksimal disebabkan oleh pada belanja pegawai terjadi perubahan kebijakan sehingga ada kode rekening belanja yang tidak bisa dicairkan. Penyebab lain adalah keterbatasan jumlah tenaga mengingat ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada waktu yang sama sedangkan sesuai aturan tidak dibenarkan satu orang melakukan dua kegiatan dengan surat tugas disaat bersamaan.

(31) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)
UPTD Puskesmas Tambelan dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 976.900.000,- realisasi Rp. 881.000.950,- atau 90,18%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan. Penyerapan anggaran kegiatan ini kurang maksimal disebabkan oleh kesalahan kode rekening pada saat penyusunan anggaran dimana tidak ada kesesuaian dengan juknis BOK.

(32) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)
UPTD Puskesmas Berakit dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 339.010.000,- realisasi Rp. 333.780.887,- atau 98,45%.

Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(33) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)

UPTD Puskesmas Sri Bintang dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 623.600.000,- realisasi Rp. 471.150.700,- atau 75,55%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan. Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini belum maksimal karena keterbatasan waktu untuk pencairan kegiatan disebabkan adanya penambahan anggaran di APBD-P dan bisa dicairkan pada bulan November.

(34) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)

UPTD Puskesmas Kuala Sempang dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 668.330.000,- realisasi Rp. 653.610.750,- atau 97,79%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(35) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)

UPTD Puskesmas Sei Lekop dan jaringannya

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 701.318.732,- realisasi Rp. 698.047.292,- atau 99,53%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

**(36) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)
UPTD Puskesmas Numbing dan jaringannya**

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.710.000,- realisasi Rp. 200.907.820 atau 94,9%. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dalam kegiatan MDG's/SDG's yang meliputi, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesehatan lingkungan.

(37) Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (P3K)

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.176.250.000,- realisasi sebesar Rp.175.886.500,- atau 99,79%. Hasil kegiatan berupa terlaksananya pelayanan P3K di acara Kecamatan (acara agustusan, MTQ tingkat kecamatan dan lomba sepak bola), Kabupaten (Tour de Bintan, Ironman, KasmaRun, Bintan Triathlon, MTQ tingkat kabupaten, Goes Hero) dan Provinsi (MTQ tingkat provinsi, Tour de Kepri).

(38) Kegiatan Pembinaan Pemeriksaan Upaya Kesehatan Kerja

Ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) realisasi sebesar Rp. 3.900.000 (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) (97,5%) Output dari kegiatan ini adalah terbinanya klinik perusahaan, dan POS UKK melalui kegiatan berupa perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring

dan evaluasi. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah belum semua puskesmas yang melakukan pembentukan POS UKK, belum semua perusahaan yang memiliki Klinik, serta minimnya dana yang dianggarkan, sehingga belum semua Puskesmas dan Perusahaan yang dilakukan pembinaan secara langsung ke lapangan. Solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini adalah mendorong puskesmas agar segera untuk membentuk POS UKK, serta turun ke Perusahaan untuk melakukan pembinaan. Serta mengajukan untuk penambahan Dana.

(39) Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas DTPK (DAK AFIRMASI)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.290.058.000,- , dengan realisasi sebesar Rp. 4.979.837.784,- atau 94,13 %

(40) Peningkatan Pelayanan Kesehatan USILA

Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Lanjut usia (Lansia) dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.350.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 8.250.000,- atau 98,8 %. Pelaksanaan hasil kegiatan ini adalah, Belanja makan dan minum pertemuan, Monitoring dan evaluasi.

(41) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja

Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Remaja dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.430.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.868.500 (90,22%).

(42) Pelayanan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.475.000 (76,10%)

(43) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Lansia, Remaja, dan UKS (BOK DAK NON FISIK)

Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.510.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.743.905 (79,10%)

(44) Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Kesehatan Tradisional/Komplementer Alternatif (BOK DAK NON FISIK)

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.118.510.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan realisasi kegiatan sebesar Rp 110.367.703,- (93,12%). Output dari kegiatan ini adalah berkembangnya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kabupaten Bintan.

(45) Kegiatan Peningkatan mutu dan akses pelayanan bagi keluarga rawan (perkesmas)

Hasil kegiatan adalah terlaksananya perawatan kesehatan masyarakat pada keluarga yang mempunyai masalah kesehatan Keluarga mendapat perawatan di rumah, Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD yang alokasi anggarannya adalah sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah). Realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah). atau 100 % dari pagu yang di sediakan. Ouput dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi ke puskesmas tentang perkesmas melalui kegiatan berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah.

(46) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional/ komplementer alternatif

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, dengan alokasi anggaran pada tahun 2019

sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Realisasi Kegiatan ini pada tahun 2019 sebesar Rp 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Output kegiatan ini adalah terbinanya Penyehat Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembinaan dan pengawasan kepada penyehat tradisional empiris yaitu Penyehat tradisional urut dan penyehat tradisional totok punggung. Capaian program yang dicapai melalui kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan penyehat tradisional tentang pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(47) Kegiatan Pelestarian Keluarga Donor Darah Sukerela

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah). Adapun realisasi kegiatan sebesar Rp 59.969.800,- (99,94%). Pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi mengenai pentingnya terbentuk Keluarga donor darah dengan sasaran generasi muda (800 sisiwa SLTP dan SLTA) sebagai cikal bakal pendonor pemula, sehingga kedepan manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya kelompok ini dapat meningkatkan jumlah pendonor sukarela di Kabupaten bintan dalam rangka memenuhi kebutuhan darah. Selanjutnya dilakukan pendataan, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat dengan mudah untuk dihubungi.

(48) Kegiatan Operasional Instalasi Farmasi

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.243.200.000,- realisasi sebesar Rp.240.127.426,- atau 98,73%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan di instalasi farmasi.

(49) Pembinaan Teknik Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah) realisasi sebesar Rp. 3.500.000 (87,5%) Output dari kegiatan ini adalah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Depot air minum isi ulang yang Saniter dan Hyangiene. Kegiatan berupa Perjalanan daerah dalam rangka monitoring ke TPM dan Damiu.

(50) Peningkatan Upaya Penyehatan Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.010.000 (Sembilan juta sepuluh ribu rupiah).realisasi sebesar Rp. 8.996.800 (Delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). (99,85%).) Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan dan Minum ,Meningkatnya Hyangine Sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman, tersedianya makan dan minum untuk pertemuan, pemberian honor untuk tenaga Narasumber, tersedianya alat tulis kantor dan penggandaan serta perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi

(51) Monitoring dan Evaluasi Penyehatan Lingkungan (BOK DAK NON FISIK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp.158.428.000 (Seratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Realisasi sebesar Rp.117.275.290(74,02%). Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Program Pembinaan STBM, TPM, dan Damiu, tersedianya makan dan minum untuk pertemuan, pemberian honor tenaga STBM, pemberian honor untuk tenaga Narasumber, tersedianya alat tulis

kantor dan penggandaan, cetak stiker, serta perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Adapun dana yang tidak terserap sebesar Rp.35.177.710 (Tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Hal ini disebabkan karena transport Non Pns yang tidak dicairkan (kegiatan sudah dijalankan namun perbup belum terbit), perjalanan dinas luar daerah eselon III sudah menggunakan dana seksi lain, serta cetak sebagian sudah dilaksanakan oleh puskesmas

(52) Kegiatan Peningkatan dan Pemantapan Penyelenggaraan Akselerasi Desa Sehat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.940.000 (Delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp. 18.066.000 (Delapan belas juta enam puluh enam ribu rupiah) (95.39%) Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan/renovasi Sarana Air Bersih sebanyak 2 buah.

(53) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Singgah Pemkab Bintan di Kalimantan Barat

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.996.000,- realisasi sebesar Rp.133.349.758,- atau 95,93%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya usaha kesehatan masyarakat. Output kegiatan ini adalah tersedianya biaya pengelolaah rumah singgah jika ada pasien rujukan di Singkawang (Kalimantan Barat) dan disediakan transportasi untuk antar dan jemput pasien.

(54) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Singgah Pemkab Bintan di Jakarta

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.752.000,- realisasi sebesar Rp.173.921.887,- atau 98,96%. Output kegiatan ini adalah tersedianya biaya

pengelolaah rumah singgah jika ada pasien rujukan di Jakarta dan disediakan transportasi untuk antar dan jemput pasien.

(55) Kegiatan Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.060.000(Tujuh belas juta enam puluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp. 17. 049.880 (99.94%) Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan STBM di Desa/Kelurahan melalui kegiatan berupa Pertemuan pengelola Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Tersedianya makan dan minum untuk pertemuan, pemberian honor untuk tenaga Narasumber, tersedianya alat tulis kantor dan penggandaan serta perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi.

(56) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Kesehatan Dasar

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui seksi Alkes, PKRT dan sarpras pada Bidang Sumberdaya kesehatan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.183.253.116,-. Realisasi pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.837.814.489,- atau 91,74 % dari pagu anggaran kegiatan. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya bangunan Puskesmas Teluk Sebong.

(57) Dukungan Manajemen BOK

Dukungan Manajemen BOK di Kabupaten Bintan Tahun 2019 berjumlah Rp. 723.000.000,-. Realisasi keuangan manajemen BOK di Kabupaten Bintan Tahun 2019 sebesar Rp 672.281.733,- (92,98%).

(58) Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 38.691.564,- atau 96,72%.

(59) Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD RSUD Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 84.110.000- (delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 60.529.460,- (enam puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau 71.96% dari pagu anggaran kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat untuk RSUD Kabupaten Bintan.

(60) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (P3K).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD RSUD Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 17.870.000- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 0,- (nol rupiah) atau 0% dari pagu anggaran kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan P3K yang dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Bintan.

(61) Kegiatan Pengelolaan UPTD RSUD Bintan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD RSUD Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.150.000.000- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.648.799.461,- (tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) atau

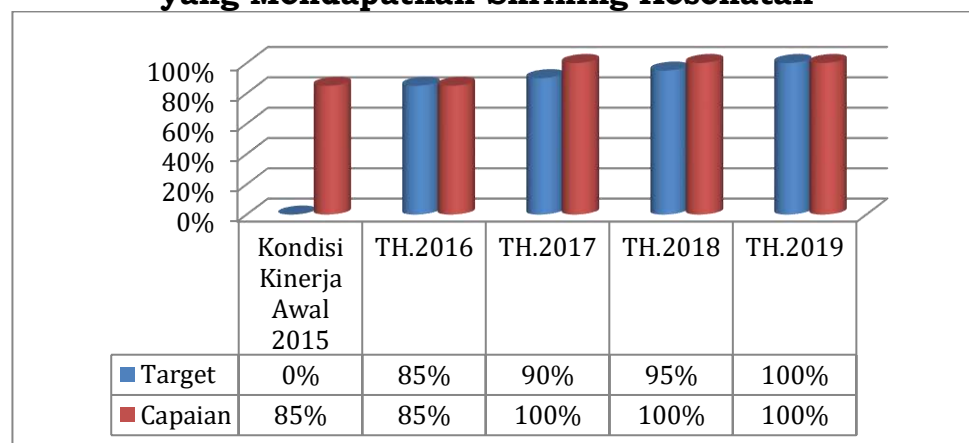
87.92% dari pagu anggaran kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan operasional RSUD Kabupaten Bintan.

Capaian kinerja tahun 2019 untuk program ini antara lain :

1) Persentase Anak Usia Dini Pendidikan dasar yang mendapatkan Skrining Kesehatan

Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Skrining Kesehatan merupakan indikator kinerja baru dalam Indikator Capaian Program Pembangunan.

Grafik 3.10 Persentase Anak Usia Dini Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan



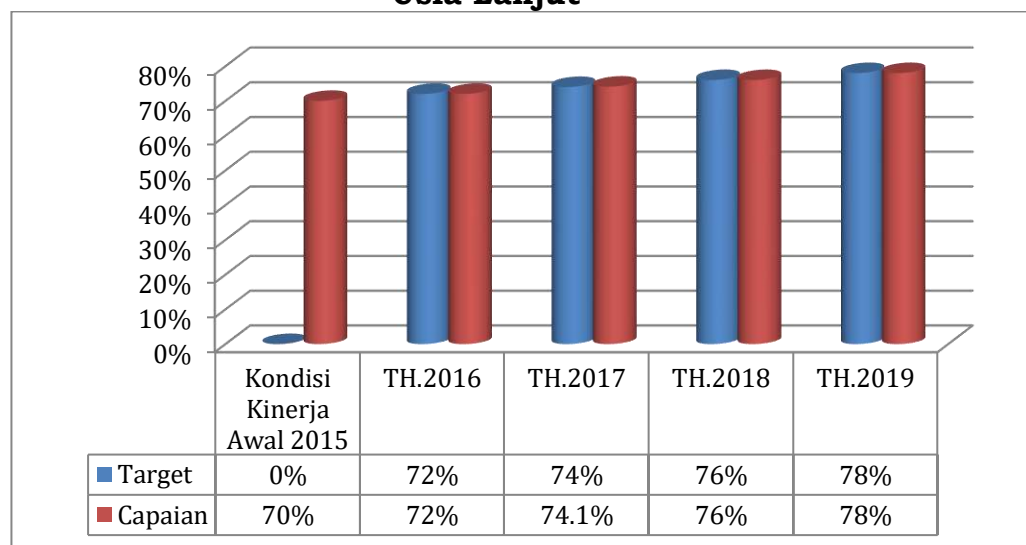
Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Usila

Tahun 2016 ada 113 sekolah dengan 3.732 murid dan semua murid (3.732) di skrining sehingga capaian 100%. Tahun 2017 ada 114 sekolah dengan 3.662 murid dan semua murid (3.662) di skrining sehingga capaian 100%. Tahun 2018 ada 113 sekolah dengan 3.642 murid dan semua murid (3.642) di skrining sehingga capaian 100%, dan pada Tahun 2019 ada 113 sekolah dengan 3.657 murid dan semua murid (3.657) di skrining sehingga capaian 100%

2) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Target 2019 adalah 78%, Capaian 78,08% Target bisa tercapai disebabkan oleh Defenisi Operasional mengalami revisi yaitu semua lansia sudah mendapatkan skrining pelayanan kesehatan minimal 1 kali dalam setahun, artinya semua Lansia yang ada di wilayah Kabupaten Bintan telah kontak dengan Nakes dan telah mendapatkan Skrining kesehatan minimal 1 kali dalam setahun. Adapun Persentas dari Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Bintan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 tergambar pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.11 Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut



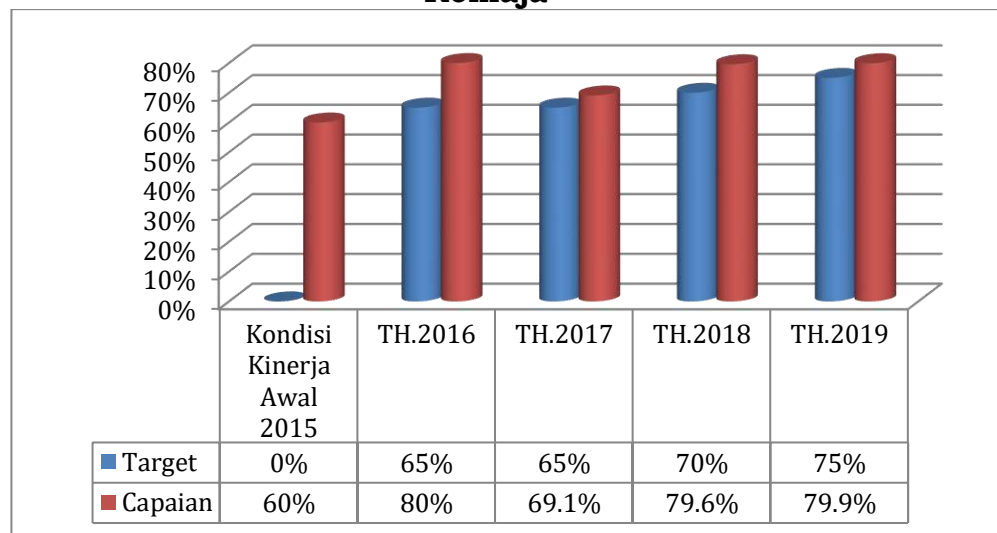
Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Usila

3) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja

Remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 adalah Kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun. Kebijakan bidang kesehatan terkait pelayanan kesehatan remaja ditujukan agar setiap anak memiliki kemampuan berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki keterampilan hidup sehat, dan keterampilan sosial

yang baik sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis.

Grafik 3.12 Persentasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja



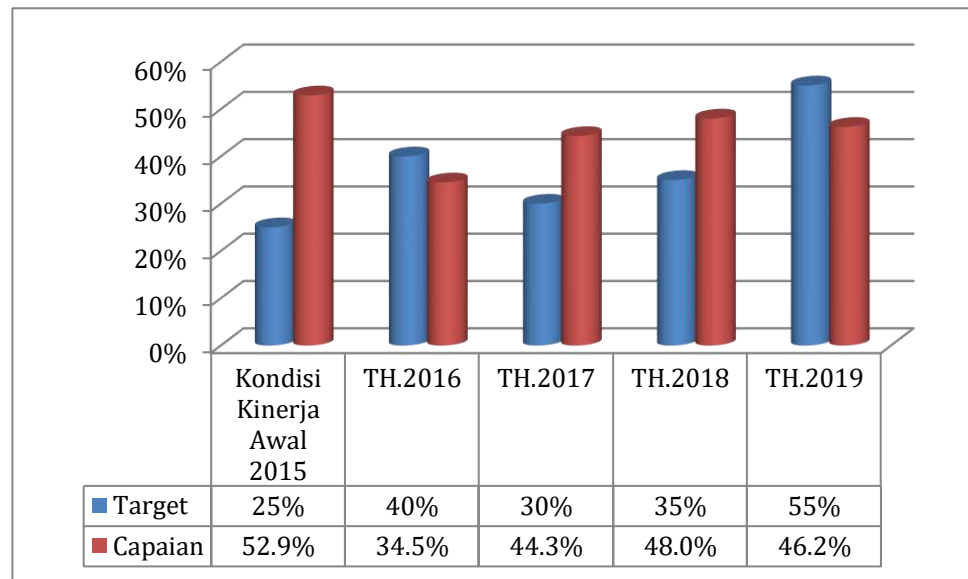
Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Usila

Jumlah asumsi remaja di Kabupaten Bintan pada tahun 2019 berjumlah 21.546 jiwa, Cakupan Pelayan kesehatan remaja 17.224 (79,94%) meliputi Pelayanan di Puskesmas PKPR, Pelayanan kesehatan di sekolah, Pelayanan di Posyandu Remaja. Di kabupaten Bintan sudah terbentuk 6 Posyandu Remaja yaitu di wilayah kerja Puskesmas Toapaya, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Tanjung Uban, Kelong, dan Tambelan. Dan sudah terlaksana kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pelajar SMA/SMK di 6 sekolah di kabupaten Bintan.

4) BOR (*Bed Occupancy Ratio*)

Dari grafik dibawah ini adapun capaian BOR Rumah Sakit Umum Daerah Bintan pada tahun 2019 adalah 46,2% angka ini berada dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan capaian dibandingkan pada tahun 2018.

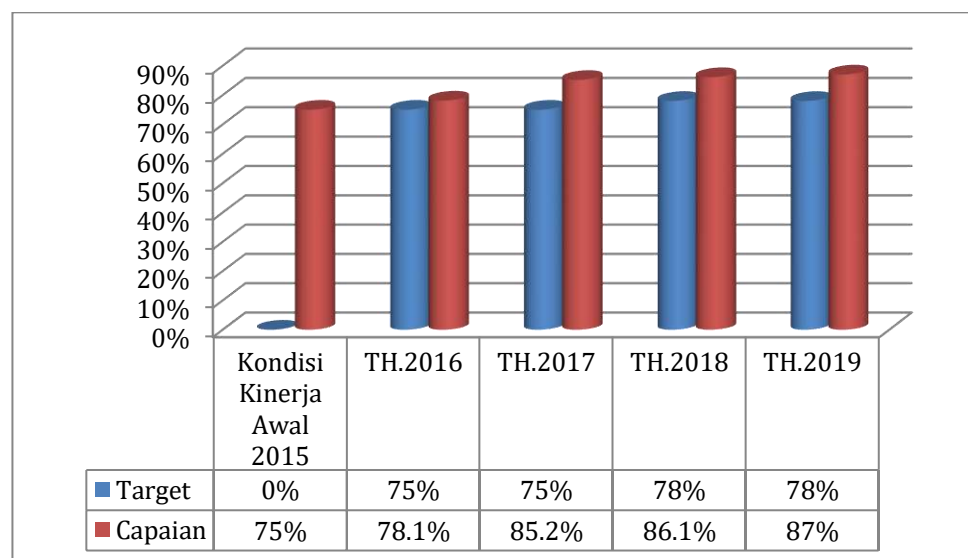
Grafik 3.13 Bed Occupancy Ratio



Sumber : RSUD Kabupaten Bintan

5) Indeks Kepuasan Masyarakat

Grafik 3.14 Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber : RSUD Kabupaten Bintan

Dari grafik diatas tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit pada tahun 2019 sudah mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 85,2% dengan target 75% pada tahun 2017, menjadi 86,1% dengan target 78%

pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 terjadi lagi peningkatan capaian yaitu sebesar 87%.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Tidak adanya keluarga yang bisa/mendampingi lansia untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan diposyandu setiap bulannya.
- b) Kurangnya tenaga kesehatan (dokter) dalam memberikan pelayanan kesehatan di posyandu Lansia, sehingga Pelayanan Posyandu Lansia kurang optimal.
- c) Belum ada monitoring evaluasi penyelenggaraan IKM sehingga tindak lanjut terhadap hasil IKM belum dapat dilakukan
- d) Rendahnya cakupan kunjungan remaja ke Puskesmas dikarenakan jadwal sekolah.
- e) Tidak adanya pelatihan Konselor Sebaya sehingga kurangnya wadah penjaring masalah remaja di sekolah.

2) Solusi

- a) Membentuk tim yang mempunyai komitmen dalam penyusunan IKM khususnya dalam hal penyebaran kuesioner
- b) Diupayakan penyusunan IKM untuk tahun-tahun berikutnya dilakukan oleh tiap unit pelayanan yang ada di RSUD Kab. Bintan
- c) Melakukan monitoring evaluasi secara rutin terhadap hasil IKM
- d) Memberikan informasi tentang kesehatan lansia bagi keluarga dan masyarakat dilingkungan lansia berada sehingga mampu mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan lansia.

- e) Mengusulkan tambahan tenaga kesehatan khususnya dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan di posyandu Lansia.
- f) Sudah terbentuk 6 Posyandu Remaja di Kabupaten Bintan untuk mendekatkan akses kesehatan bagi usia remaja yang tidak dapat melakukan kunjungan ke Puskesmas.
- g) Mengusulkan untuk diadakan pelatihan konselor sebaya bagi remaja agar mendekatkan pelajar dan menjangkau masalah remaja melalui pendekatan remaja itu sendiri.

2) Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.378.540.000,- realisasi sebesar Rp.5.337.525.000 , - atau 99,23%. *Outcome* dari kegiatan ini adalah

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Penyusunan Peta Informasi masyarakat Kurang Gizi

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.570.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.420.000,- atau 99,27%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya surveilans gizi serta tersedianya data informasi masyarakat kurang gizi melalui pelaksanaan pertemuan surveilans gizi, dan pertemuan penyusunan peta informasi peta informasi masyarakat kurang gizi bagi seluruh Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas se-Kabupaten Bintan, kegiatan pengumpulan dan verifikasi dan validasi data gizi, bimbingan teknis surveilans/pemetaan gizi, monitoring dan evaluasi kegiatan ke masing-masing puskesmas berupa pemberian Uang saku PNS dan Non PNS, transportasi PNS dan Non PNS,

makan dan minum kegiatan, penggandaan dan tersedianya alat tulis kantor.

(2) Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi mikro lainnya

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.095.000,- dan realisasi sebesar Rp. 32.521.000,- atau 98,26 %. Output tersedianya PMT pemulihan bagi balita kurang gizi berupa biskuit sebanyak 16.020 bungkus untuk sasaran seluruh balita kurang gizi. Dilaksanakan juga kegiatan bimbingan teknis program, monitoring PMT serta konsultasi program gizi ke Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berupa pemberian transportasi Non PNS, honor narasumber, tersedianya makan dan minum kegiatan, belanja seminar kit, penggandaan dan tersedianya alat tulis kantor.

(3) Kegiatan Revitalisasi Operasional Posyandu dan Pengembangan TOGA/UPGK

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.087.720.000,- realisasi sebesar Rp. 4.066.348.250,- atau 99,47%. Output kegiatan adalah terdistribusinya honor kader posyandu untuk 165 posyandu masing-masing 9 kader per posyandu (1.485 orang) untuk 12 bulan. Terlaksananya pembinaan teknis monitoring dan evaluasi program posyandu serta konsultasi program ke Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berupa dan tersedianya alat tulis kantor.

(4) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.47.862.500,- atau 98,08%. Hasil kegiatan ini adalah terlayannya

kesehatan seluruh ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Ibu menyusui/Nifas yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, melalui kegiatan Pertemuan AMP, Pertemuan Updating dan Refreshing Program Ibu, Belanja ATK, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (monitoring dan evaluasi, supervisi fasilitatif), Konsultasi program ke Kemenkes RI.

(5) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan Anak (Bayi)

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.840.000; dengan realisasi sebesar Rp.19.776.400,- atau 99,68%. Hasil kegiatan ini adalah Terlayannya kesehatan seluruh Bayi, Balita dan Anak Usia Prasekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, melalui kegiatan Pertemuan Updating dan Refreshing Program Anak, Belanja ATK, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring dan evaluasi, Supervisi fasilitatif).

(6) Kegiatan Penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan)

Kegiatan Penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan) dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.222.603.000; dengan realisasi sebesar Rp.222.597.960; atau 99,99%. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya ketersediaan obat public dan perbekalan kesehatan, dimana focus sasaran dalam pengadaan obat gizi di prioritaskan pada penanggulangan Stunting.

(7) Kegiatan peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi (pelayanan medik KB)

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.120.000,- atau 95,63%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan Medik KB, berupa Monitoring Evaluasi ke Puskesmas di wilayah Kabupaten Bintan untuk mensikronisasi laporan PWS KB, Akseptor KB baru, KB Aktif dan tersedianya Alat tulis Kantor.

(8) Kegiatan Jaminan Persalinan Normal (DAK Non Fisik)

Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.821.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.520.432.611,- atau 63,39%. terlaksananya Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan, Belanja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), Belanja ATK, Uang Transportasi PNS, Honor Pengelola Kegiatan.

(9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu (BOK DAK NON FISIK)

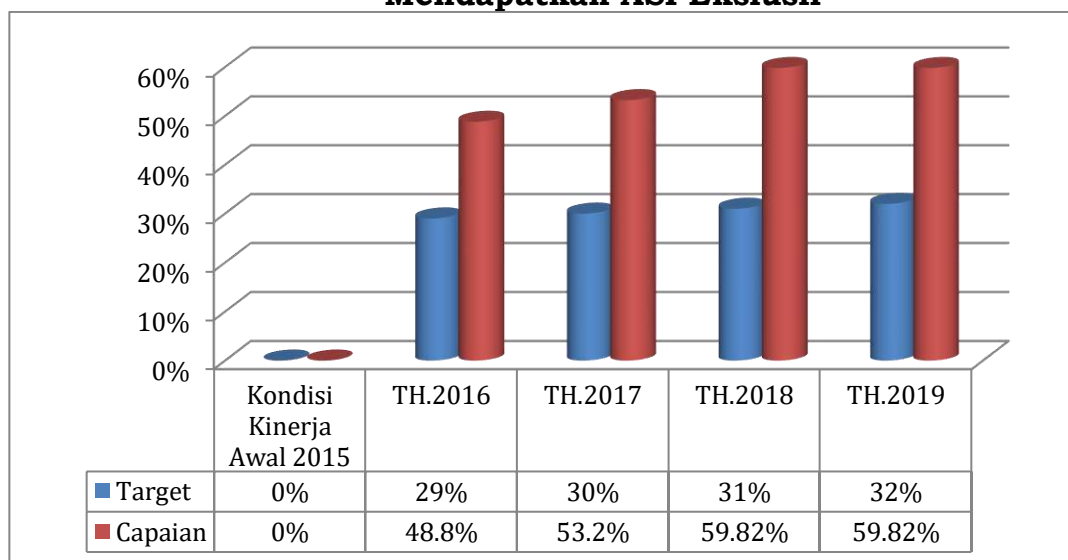
Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.118.512.000,- dengan realisasi sebesar Rp.99.877.900,- atau 84,27%.

Capaian kinerja untuk tahun 2019 dari program ini antara lain:

1) Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif

Cakupan bayi 0-6 bulan yang masih ASI eksklusif di Kabupaten Bintan tahun 2019 sebesar 49,74 %, menurun dibanding tahun 2018 (59,82 %).

Grafik 3.15 Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif



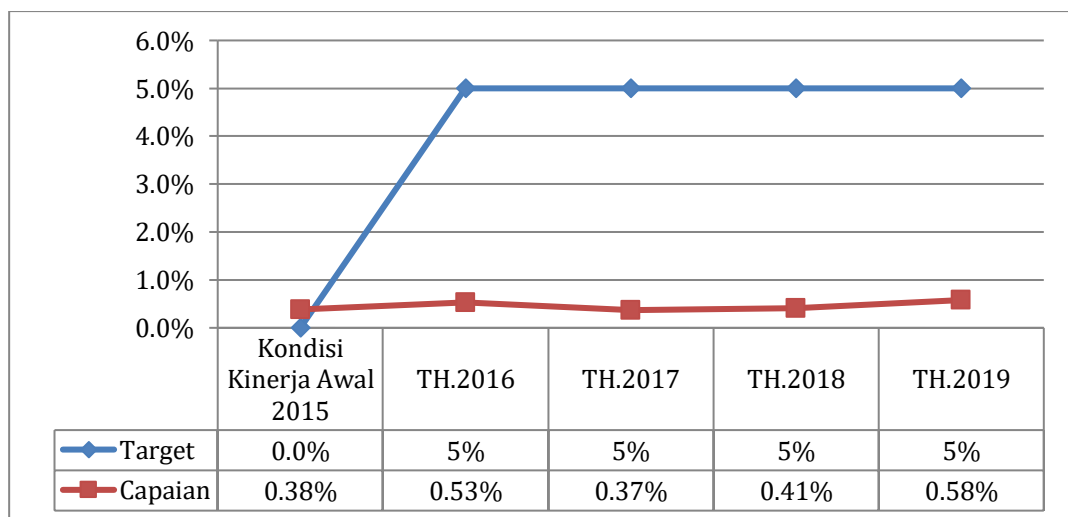
Sumber : Seksi Gizi Masyarakat dan UKBM

Angka tersebut belum mencapai target Nasional yaitu 50%. Penurunan capaian Asi Eksklusif pada tahun 2019 disebabkan meningkatnya jumlah sasaran bayi usia 0-6 bulan dan masih adanya bayi baru lahir diberikan susu formula dengan alasan ASI tidak lancar.

Harapannya ibu hamil dan ibu menyusui tetap diberikan konseling dan pengetahuan agar memiliki kesadaran yang tinggi mengenai manfaat dan kegunaan ASI Eksklusif sehingga perlu upaya meningkatkan promosi dan penyuluhan tentang ASI Eksklusif secara terus menerus kepada masyarakat. Pada tahun 2019 sudah disahkan Perda ASI Eksklusif Kabupaten Bintan dan untuk Tahun 2020 akan dilakukan Sosialisasi Perda Asi Eksklusif di Tingkat Kecamatan.

2) Persentase Anemia Ibu Hamil

Grafik3.16 Persentase Anemia Ibu Hamil



Sumber : Seksi Gizi Masyarakat dan UKBM

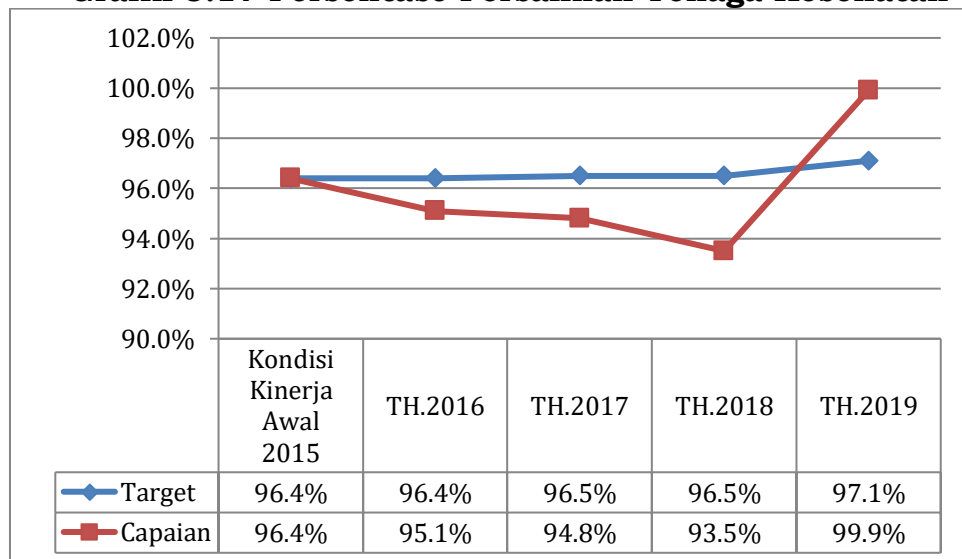
Dari tabel dan grafik diatas presentase ibu hamil anemia di Kabupaten Bintan masih dibawah target Nasional dan target Renstra Dinas Kesehatan (< 5%). Capaian presentase ibu hamil anemia berat ($Hb < 8$ g/dl) di Kabupaten Bintan mengalami sedikit kenaikan dari 0,41% pada tahun 2018

menjadi 0,58 % pada tahun 2019. Untuk itu perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan ibu hamil, gizi ibu hamil, serta pemberian TTD yang merupakan salah satu indikator kinerja pembinaan gizi masyarakat. Pemberian TTD pada ibu hamil bertujuan untuk mencegah ibu hamil anemia dan mengurangi risiko kematian ibu melahirkan, kematian bayi BBLR dan bayi kurang gizi.

3) Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Untuk tahun 2019, Target yang telah ditentukan adalah 97.1%. Hampir seluruh persalinan yang terjadi sudah ditolong oleh tenaga kesehatan.

Grafik 3.17 Persentase Persalinan Tenaga Kesehatan



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Usaha

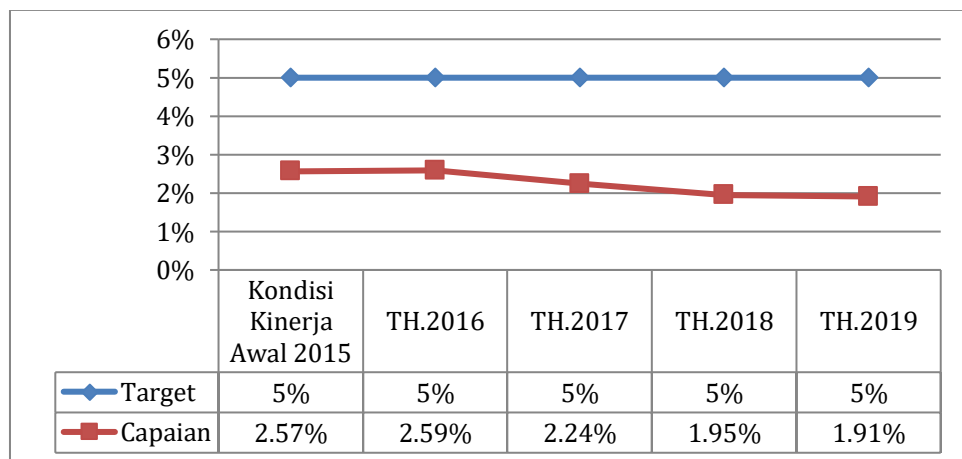
Hasil Capaian yang didapatkan adalah 2.888 (99.9) dari 2.890 jumlah ibu bersalin yang ada (sumber data sasaran Real) . Masih terdapat 2 persalinan dengan Non Nakes (Dukun) di 1 (satu) wilayah kerja yang ada di Kabupaten Bintan yaitu Kuala Sempang. Pelaksanaan kegiatan

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dengan capaian 2.970 (95.8)

4) Persentase Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang adalah balita usia 0 sampai dengan 59 bulan dengan status gizi yang berdasarkan pengukuran antropometri dengan indeks berat badan menurut umur (BB/U) berada pada ambang batas <-1 SD sampai dengan <-3 SD.

Grafik 3.18 Persentase Balita Gizi Kurang



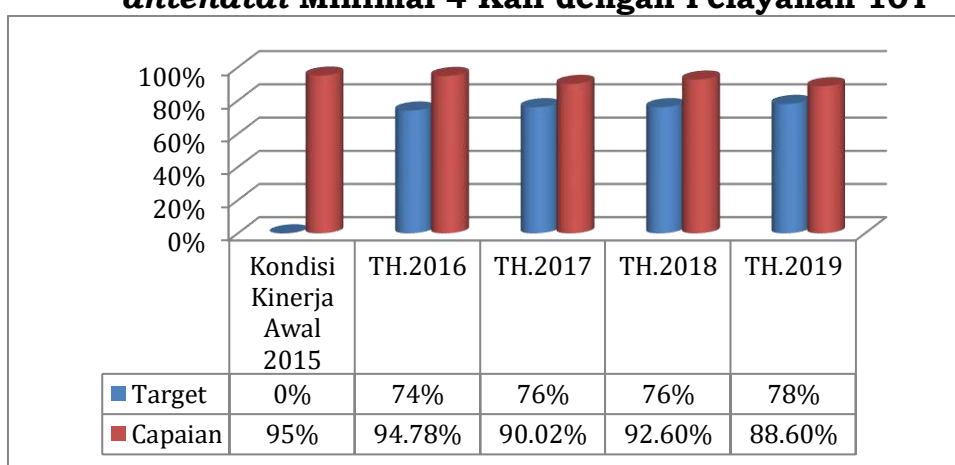
Sumber : Seksi Gizi Masyarakat dan UKBM

Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Bintan tahun 2019 sebesar 1,91 % (222 balita). Angka tersebut telah mencapai target kinerja Kabupaten yaitu $<5\%$ dan cukup rendah jika dibandingkan dengan angka kurang gizi provinsi (11,9%) (PSG, 2017) dan nasional (17.7%) (Riskesdas, 2018). Tahun 2019 terjadi penurunan prevalensi balita kurang gizi secara bermakna.

5) Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan *antenatal* Minimal 4 Kali (K4) dengan Pelayanan 10T

Untuk tahun 2019, Target yang telah ditentukan adalah 78 %, Seluruh Puskesmas telah melaksanakan kegiatan pelayanan Antenatal minimal 4 kali (K4) dengan kualitas 10T di masing-masing Puskesmas dengan nilai capaian 2.880 (88,6 %) dari 3.250 jumlah Bumil yang ada .

Grafik 3.19 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan *antenatal* Minimal 4 Kali dengan Pelayanan 10T



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Usaha

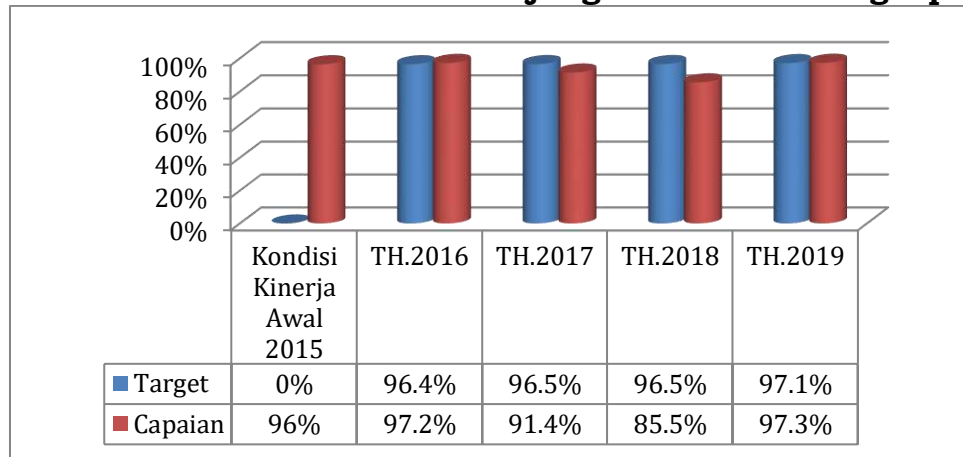
Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antenatal minimal 4 kali ini telah mencapai target, walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu 3.076 (94,6 %) dari 3.250 Bumil yang ada . Semua puskesmas telah maksimal melaksanakan pelayanan Antenatal minimal 4 kali dengan orientasi pelayanan 10T walaupun terdapat beberapa kendala.

6) Persentase Kunjungan Ibu Nifas Lengkap

Untuk tahun 2019, Target yang telah ditentukan adalah 97.1%. Hampir seluruh ibu Nifas yang ada sudah diberikan pelayanan oleh tenaga kesehatan. Hasil Capaian yang didapatkan adalah 2.811 (97.3) dari 2.890 jumlah ibu bersalin yang ada (sumber data sasaran Real) . Pelaksanaan

kegiatan sudah mencapai target dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dengan capaian 2.843 (91.7). Adapun grafik Persentase Kunjungan Ibu Nifas Lengkap dari tahun 2015-2019 dapat terlihat dibawah ini:

Grafik 3.20 Persentase Kunjungan Ibu Nifas Lengkap

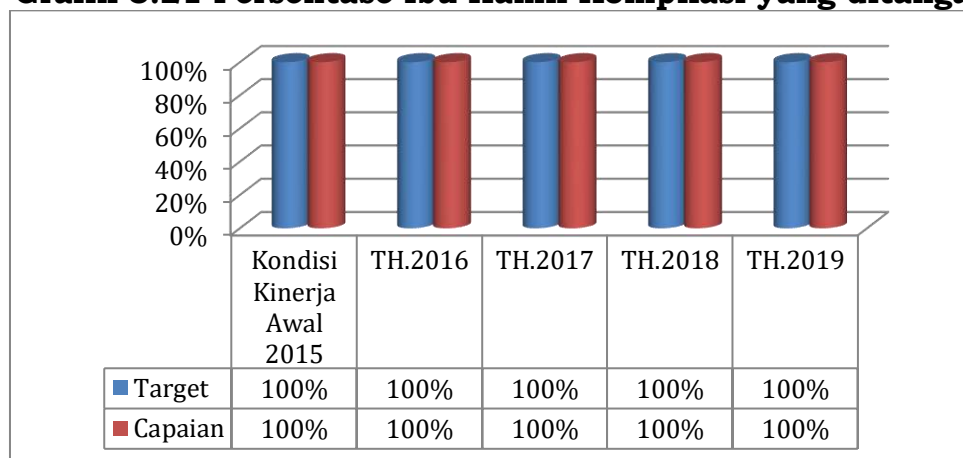


Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Usila

7) Persentase Bumil Komplikasi yang ditangani

Untuk tahun 2019, Target yang telah ditentukan adalah 100%. Hampir seluruh ibu dengan komlikasi tertangani oleh tenaga kesehatan. Hasil Capaian yang didapatkan adalah 651 (100) dari 651 jumlah sasaran ibu hamil komplikasi yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan sudah mencapai.

Grafik 3.21 Persentase Ibu Hamil Kompilasi yang ditangani



Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga dan Usila

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) SDM masih minim mendapatkan peningkatan skill/kompetensi dalam pelayanan kebidanan (keterbatasan Dana untuk melaksanakan pelatihan peningkatan skill bidan).
- b) Sarana prasarana tidak lengkap sehingga hampir sebagian besar Polindes yang ada (70%) tidak layak menjadi Standar Faskes yang layak sesuai Permenkes nomor 75 Tahun 2014
- c) Beberapa Puskesmas merasa terjadi kesenjangan antara Sasaran Asumsi (sumber Disduk) yang ditentukan dengan sasaran real yang ada , sehingga jika menggunakan sasaran asumsi maka capaian tidak akan tercapai.
- d) Masih adanya Dukun yang aktif (sudah bermitra dengan Nakes) di 1 (satu) wilayah yang ada di Kabupaten Bintan.
- e) Masih ditemukannya kekeliruan dalam penimbangan dan pengukuran balita oleh kader posyandu serta pencatatan dan pelaporan data baik oleh kader Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas.
- f) Sebagian besar Puskesmas tidak mempunyai ahli gizi.
- g) Pemanfaatan dana Jampersal belum maksimal karena terbatasnya jenis kegiatan yang dapat diakomodir dengan dana tersebut sesuai juknis DAK non Fisik.
- h) Capaian KF3 masih dibawah target dikarenakan :
 - Terjadi ketidaksesuaian antara jadwal pengiriman akhir laporan dari Puskesmas ke Dinkes dengan jadwal Kunjungan Nifas (KF3).

- Masih ada Bumil yang belum bersalin .
- Dan terjadi perpindahan penduduk (pulang kampung)

2) Solusi

- a) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan balita gizi buruk melalui pembinaan gizi secara terus menerus, pemberian PMT pemulihan dan perawatan kasus gizi buruk.
- b) Memotivasi SDM yang belum kompeten untuk mau meningkatkan skill/kompetensinya dengan dana mandiri (keterbatasan anggaran)
- c) Faskes yang tidak layak wajib di telaah oleh tim PKM, sambil menunggu menjadi layak, persalinan dialihkan ke Faskes yang layak (Puskesmas terdekat dengan upaya pertolongan persalinan paling sedikit 4 tangan)
- d) Memberikan dukungan sarana/prasarana, pemahaman program, dan pembinaan terus menerus kepada tenaga kesehatan, kader dan masyarakat dengan dukungan lintas program dan sektor terkait .
- e) Meningkatkan pengetahuan keterampilan petugas dan kader dalam mendukung surveilans gizi dan tersedianya data yang akurat.
- f) Diadakan peningkatan skill/Kompetensi Bidan melalui Pelatihan/ Orientasi
- g) Pemanatapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta meningkatkan/ memotivasi lagi Bumil agar bersalin di Fasyankes.

3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.064.099.000,- realisasi sebesar Rp. 957.253.079,- atau 89,95%. *Outcome* dari kegiatan ini adalah

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan surveilans dan penanggulangan KLB penyakit

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.300.000,- dan realisasi sebesar Rp 21.275.000,- atau 99,88%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan surveilans dan penanggulangan KLB penyakit dengan target kinerja 100% desa/kelurahan KLB dilakukan PE < 24 jam. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyelidikan Epidemiologi/ investigasi KLB melalui kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, mengantar Jemaah haji ke Embarkasi Batam melalui Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Tenaga Ahli untuk rujukan kesehatan jamaah haji, biaya perjalanan dinas bimbingan teknis ke Puskesmas dan belanja penggandaan.

(2) Kegiatan peningkatan imunisasi

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 20.760.000,- atau 99,81%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya imunisasi dasar (UCI) yaitu 100% (51 Desa/Kelurahan UCI) melalui perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan bimbingan teknis, supervise, ke Puskesmas-puskesmas, belanja perjalanan dinas luar daerah untuk konsultasi, dan belanja penggandaan.

(3) Kegiatan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit TBC

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.808.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.805.164,- atau 99,99%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit Menular TBC di 10 Kecamatan di Kabupaten Bintan dan 15 Puskesmas, 2 Rumah Sakit dan 1 Lapas dengan melakukan penjarangan suspek TB baik di dalam maupun di luar gedung, meningkatkan jejaring internal tiap unit pelayanan kesehatan maupun jejaring eksternal antara UPK dengan melibatkan petugas pustu, polindes, kader, PKK, tokoh masyarakat, klinik swasta maupun DPS yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, melakukan survey kontak serumah terhadap setiap penderita TB BTA Postif, pengembangan kemitraan dan jejaring internal maupun jejaring eksternal, khususnya ke Lapas, Rumah Sakit Tanjung Uban dan Rumah Sakit Bintan melalui penandatanganan MoU/Nota Kesefahaman tentang penerapan strategi DOTS di UPK tersebut, melakukan skrining TB pada setiap WBP baru, melakukan sosialisasi dan Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB ke tingkat desa dengan melibatkan anggota TNI yang telah mendapatkan pelatihan sebagai kader TB serta dengan mendekatkan akses layanan pengobatan TB ke masyarakat dengan menempatkan OAT di unit pelayanan kesehatan yang dekat dengan domisili atau tempat tinggal pasien TB, setiap pasien TB di dampingi oleh PMO dimana PMO tersebut dipilih sendiri oleh pasien dan disetujui oleh petugas kesehatan, skrining HIV pada setiap pasien TB juga dilakukan mengingat TB merupakan infeksi oportunistik terbesar bagi ODHA, begitu juga sebaliknya semua ODHA dilakukan kaji status TB.

(4) Kegiatan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit DBD

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 240.929.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 237.736.400,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 98.67% dari pagu anggaran kegiatan. Output Kegiatan ini adalah Tercapainya Pengendalian Penyakit DBD di Kabupaten Bintan serta Insiden Rate (Jumlah Kasus Per Tahun / 100.000 penduduk dan ABJ (Angka Bebas Jentik).

(5) Kegiatan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Diare

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.199.900,- (Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 99,99 % dari pagu anggaran kegiatan. Output Kegiatan ini adalah Tercapainya Pelayanan dan Pencegahan Penyakit Diare

(6) Kegiatan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Pneumonia

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.199.900,- (Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Ratus Rupiah) atau 99,99 % dari pagu anggaran kegiatan. Output Kegiatan ini adalah Tercapainya Penemuan dan Tatalaksana Penderita Pneumonia Balita.

(7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Klinik IMS

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 10.200.000,- atau 100% dari pagu anggaran kegiatan.

Output Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Klinik IMS dan LKB. Adapun pelaksanaan Kegiatan ini meliputi :

a. Bimbingan Teknis ke Puskesmas

Pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua Ratus Ribu Rupiah) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- atau 100%.

b. Klinik IMS dan LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan)

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Klinik IMS dan LKB di Kabupaten Bintan Tahun 2019 dilaksanakan pada 2 (dua) Klinik IMS yaitu Klinik IMS Sri Indah Bt.24 Toapaya dan Klinik IMS Sri Senyum Bt.79 Tanjung Uban serta 6 (enam) Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) yaitu LKB Puskesmas Toapaya, LKB Puskesmas Kijang, LKB Puskesmas Tanjung Uban, LKB Puskesmas Kawal, LKB Puskesmas Teluk Sasah dan LKB Puskesmas Teluk Sebong. Untuk Kegiatan di Klinik IMS meliputi Honorarium Petugas Lapangan yaitu Honor PNS dan Non PNS dan Uang transportasi PNS dan Non PNS yang secara total dialokasikan sebesar Rp 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) secara fisik kegiatan tersebut 100% telah dilaksanakan, namun secara keuangan realisasi anggarannya hanya sebesar Rp. 13.248.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 60,1%.

c. Belanja Penggandaan

Kegiatan ini di buat untuk mendukung pelaksanaan pengadministrasian bagi kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan di klinik IMS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 100%.

(8) Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Malaria

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 139.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 137.528.899,- atau 98,58% dari pagu anggaran kegiatan.

(9) Kegiatan Partisipasi Komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

Dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan kegiatan ini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.680.000; dengan realisasi sebesar Rp.35.279.050; atau 88,90%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya operasional KPAD, terlaksananya sosialisasi HIV AIDS bagi kelompok nelayan, terlaksananya sosialisasi HIV AIDS di daerah berisiko dan terlaksananya kampanye hari AIDS sedunia.

Komisi Penanggulangan AIDS juga berperan dalam hal meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS, dimana ini perlu dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga kelangsungan dan menghindari dampak di bidang kesehatan, sosial, politik dan ekonomi yang akan timbul nantinya. Namun sayangnya pada tahun 2018 ini peran KPA dalam upaya pengendalian penyakit HIV AIDS di Kabupaten Bintan dirasakan mulai berkurang, hal ini mungkin disebabkan karena mulai berkurangnya dukungan dana yang mendukung kegiatan KPAD selama ini, sehingga fokus

pengendalian HIV AIDS lebih di bebaskan kepada Dinas Kesehatan.

(10) Kegiatan Penanggulangan Pemberantasan Penyakit Filariasis

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.199.000,- (Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 99,98% dari pagu anggaran kegiatan.

(11) Kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dalam program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar Rp.44.800.000,- (Empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran adalah Rp. 44.548.750,- atau sebesar 99,44%.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui kegiatan Pertemuan Review Posbindu PTM, Pertemuan sosialisasi Kamis IVA dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader tentang kanker. Penggunaan anggaran berupa honor narasumber, transportasi kader non.PNS, penyediaan ATK, bahan cetak PTM, makan minum pertemuan dan biaya perjalanan dinas pembinaan, monitoring dan evaluasi program ke Puskesmas serta konsultasi teknis program. Realisasi keuangan belum optimal karena adanya kebijakan

Kabupaten tidak boleh dibayarkan honor panitia kegiatan dan uang transportasi PNS serta tidak direalisasikan belanja sewa mobilitas udara dan sewa kamar hotel narasumber pusat dikarenakan berhalangan hadir.

(12) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan imunisasi (BOK DAK NON FISIK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran BOK DAK Non Fisik program upaya kesehatan masyarakat sebesar Rp.118.510.000,- dan realisasi sebesar Rp.107.613.931,- Atau 90,80 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan surveilans dan penanggulangan KLB penyakit dengan target kinerja 100% desa/kelurahan KLB dilakukan PE < 24 jam dan terlaksananya imunisasi dasar (UCI) yaitu 100% (51 Desa/Kelurahan UCI) Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyelidikan Epidemiologi/ investigasi KLB melalui kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, menjemput Jemaah haji ke Embarkasi Batam dan konsultasi ke Kedinas Kesehatan Provinsi Kepri melalui Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Jasa Tenaga Ahli/narasumber, seminar kit dan makan minum untuk pertemuan review, biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk bimbingan teknis ke Puskesmas, belanja penggandaan, cetak sertifikat imunisasi (IDL) belanja ATK dan transportasi lokal surveilans aktif rumah sakit dan bimbingan di posyandu.

(13) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa (BOK DAK NON FISIK)

Dukungan anggaran dari BOK sekunder (DAK non fisik) tahun 2019 untuk program PTM dan Kesehatan jiwa tahun 2019 sebesar Rp.118.510.000,-. Realisasi sebesar

Rp.91.058.180,- (76,84%). Sisa anggaran sebesar Rp.27.451.820,- yaitu biaya makan/minum fullboard hotel untuk kegiatan sosialisasi program kesehatan jiwa remaja, tempat pelaksanaan kegiatan dialihkan ke Aula Kantor Bupati Bintan karena adanya kekeliruan Mata Anggaran Kegiatan pada DPA. Namun untuk realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%.

(14) Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyakit menular (BOK DAK NON FISIK)

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi Rp.118.510.000,- realisasi sebesar Rp.109.044.425,- atau sebesar 92,01%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan STBM di Desa/Kelurahan melalui kegiatan berupa Pertemuan pengelola Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, tersedianya makan dan minum untuk pertemuan, pemberian honor untuk tenaga Narasumber, tersedianya alat tulis kantor dan penggandaan serta perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi.

(15) Kegiatan Pengadaan bahan habis pakai pemeriksaan HIV (DAK PENUGASAN)

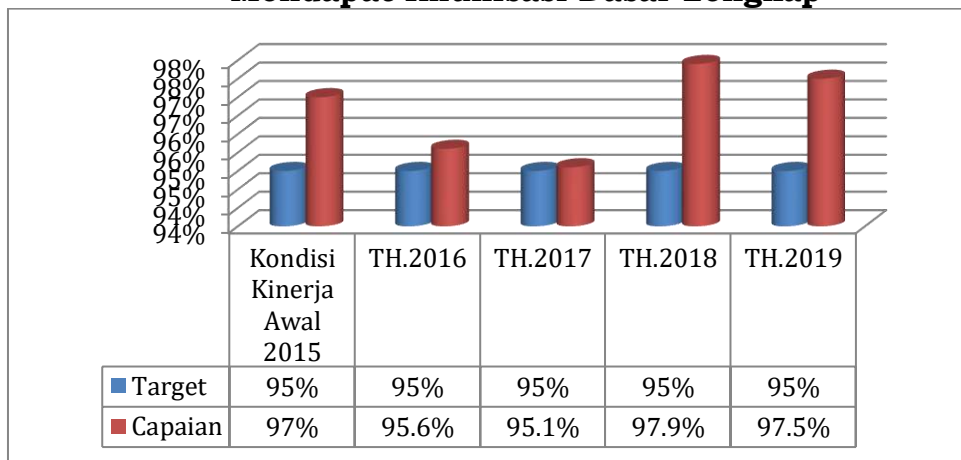
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.149.952.000,- realisasi sebesar Rp.100.804.480,- atau 67,22%.

Capaian kinerja tahun 2019 untuk program ini antara lain adalah:

1) Persentase Anak Usia 0 Sampai 11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibody dalam kadar tertentu. agar antibody tersebut terbentuk, seseorang harus diberikan vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Grafik 3.22 Persentase Anak Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap



Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi

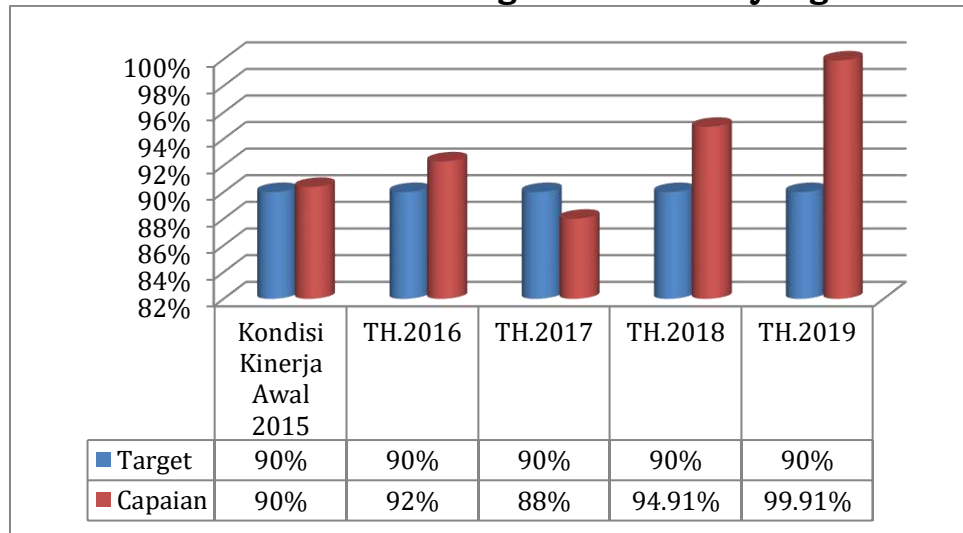
Kegiatan Imunisasi Dasar Lengkap merupakan pemberian vaksin kepada bayi 0 sampai 11 bulan yang meliputi HB0,BCG,Polio,DPT HBHiB dan Campak.Pemberian vaksin ini bertujuan untuk mencegah penyakit- penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu Difteri, Pertusis, Tetanus Neonaturum, Campak, Polio dan Hepatiotis B.Sebagai indikator keberhasilan program imunisasi di tingkat desa atau kelurahan apabila imunisasi dasar lerngkap mencapai 95 pesen dari jumlah bayi di bawah 0 sampai 11 bulan atau di sebut juga dengan Universal Child Immunization (UCI).

Di Kabupaten Bintan dari tahun 2014 sampai tahun 2019 semua desa dan Kelurahan telah UCI.Adapun usaha – usaha yang dilakukan agar tetap mempertahankan tiap Desa dan Kelurahan tetap UCI adalah dengan melakukan posyandu rutin setiap bulan nya, melakukan Sweeping, pendataan bayi, menjaga logistic vaksin tetap lancar dan penggunaan vaksin yang efektif dan efisien serta menjalin kerja sama Lintas sektor.

2) Persentase angka kasus HIV yang diobati

Pada tahun 2019 Grafik diatas jumlah penemuan kasus HIV di Kabupaten Bintan pada tahun 2019 menurun sebagaimana tergambar dibawah ini:

Grafik 3.23 Persentase Angka Kasus HIV yang diobati



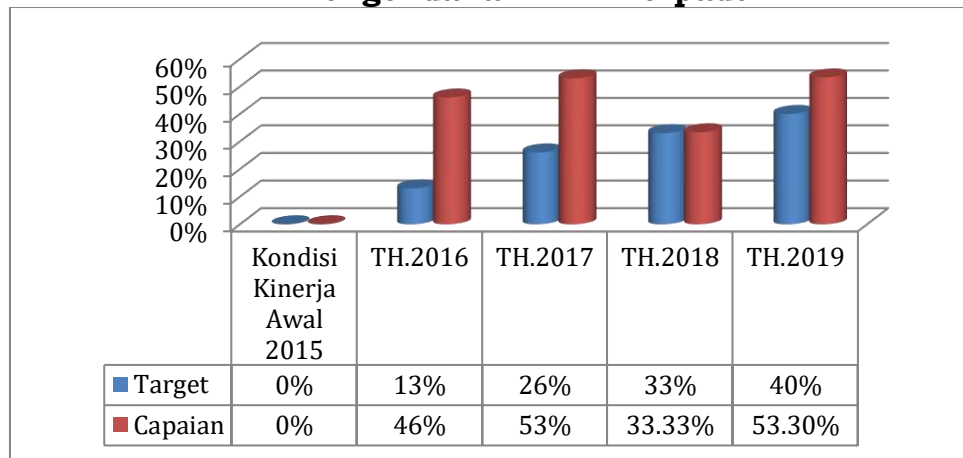
Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2018 jumlah kasus yang ditemukan berjumlah 59 kasus sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 39 kasus. Begitu juga dengan persentase kasus HIV yang di obati tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu jika pada tahun 2018 kasus yang di obati hanya 59 kasus (94,9%) sedangkan pada tahun 2019 jumlah kasus yang diobati yaitu 39 kasus (100%) dari total kasus yang di temukan.

3) Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu

Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kesehatan pada tahun 2019 menargetkan 6 Puskesmas (40%) di Kabupaten Bintan melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu. Adapun capaiannya dapat terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.24 Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu



Sumber : Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Promosi Kesehatan

Tahun 2019 di targetkan 6 Puskesmas (40%) di Kabupaten Bintan melaksanakan pengendalian PTM terpadu. Capaian adalah 8 Puskesmas (53,3%). Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan terpadu tahun 2019 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 cakupan Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan terpadu PTM adalah 5 Puskesmas (33%).

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Sebagian besar Puskesmas belum dilatih tentang Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Puskesmas
- b) Pengelola Program PTM sebagian besar melaksanakan tugas rangkap untuk beberapa kegiatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung.
- c) Jangkauan desa yang sangat terpencil untuk kegiatan Posbindu PTM
- d) Kunjungan masyarakat ke Posbindu PTM untuk pemeriksaan dan kegiatan pencegahan PTM masih kurang.

- e) Penginputan data PTM masih lambat karena masih lemahnya jaringan Internet di beberapa wilayah puskesmas.
- f) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan Faktor Resiko (FR) Penyakit Tidak Menular khususnya pemeriksaan IVA.
- g) Belum semua Puskesmas melaksanakan survey merokok anak sekolah
- h) Masih adanya perbedaan persepsi Definisi Operasional (DO) Pneumoni di puskesmas
- i) Masih Kurangnya kerjasama lintas program
- j) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang HIV-AIDS
- k) Masih adanya stigma dan diskriminasi
- l) Jumlah kader penjangkau yang masih minim
- m) Masih rendahnya penggunaan kondom pada populasi beresiko tinggi
- n) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit kusta
- o) Masih banyaknya anggapan bahwa penyakit kusta adalah penyakit turunan dan kutukan sehingga mereka tidak memerlukan pengobatan
- p) Belum semuanya Puskesmas menggunakan cold chain vaksin yang standart sebagaimana di rekomendasikan oleh WHO yaitu buka atas
- q) Penetapan sasaran menggunakan data estimasi sehingga data sasaran cukup tinggi berbanding data sebenarnya (data riil)
- r) Pemborosan penggunaan salah satu antigen (vaksin) dalam kegiatan Posyandu
- s) Rendahnya pemahaman petugas di Puskesmas tentang rantai dingin vaksin

- t) Kurangnya kesadaran pengelola atau penanggung jawab PTM sehingga masih banyak TPM yang belum mempunyai tempat sampah sehat dan terpilah, air bersih yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas, peralatan dapur dan makan yang kurang hygiene

2) Solusi

- a) Penyediaan *cold cain* untuk Puskesmas sesuai dengan rekomendasi WHO yaitu buka atas
- b) Permintaan vaksin dihitung sesuai kebutuhan (sasaran) Posyandu untuk menghindari pemborosan dalam penggunaan vaksin
- c) Penggunaan data riil dalam menetapkan sasaran untuk meminimalkan kesenjangan data sasaran
- d) Penambahan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan terpadu Penyakit Tidak Menular di Puskesmas
- e) Menyiapkan ruangan pelayanan khusus PTM di Puskesmas serta menyediakan peralatan dan logistik kegiatan PTM.
- f) Puskesmas memberikan pembinaan dan membekali kader Posbindu secara rutin
- g) Meningkatkan Promosi dan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya melakukan cek kesehatan dan faktor risiko PTM.
- h) Meningkatkan kerjasama antar pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk Pelayanan terpadu Penyakit Tidak Menular serta pembinaan Posbindu PTM
- i) Input data PTM dilaksanakan di area yang mendukung jaringan internet.

- j) Meningkatkan kerjasama dan dukungan dari lintas sektor terkait khususnya organisasi wanita untuk pemeriksaan IVA dan Sadanis.
- k) Mengupayakan dukungan dari anggaran Dekonsentrasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
- l) Mengusulkan alokasi dana dari SPM dan BOK Puskesmas untuk kegiatan survey merokok dan survey PHBS
- m) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit kusta pada masyarakat
- n) Deteksi dini pada kusta dapat mengurangi angka kesakitan dan kecacatan, dan penyakit kusta dapat disembuhkan jika minum obat secara teratur
- o) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang HIV-AIDS pada masyarakat dan melakukan kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu HIV-AIDS) pada usia 15-24 tahun
- p) Melakukan pelatihan bagi kader penjangkau agar dapat berkontribusi dalam pencegahan, pengobatan dan deteksi dini pada HIV-AIDS
- q) Menerapkan aturan wajib pemakaian kondom 100 % pada lokasi batu 24 dan batu 79 sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama
- r) Menyamakan persepsi Definisi Operasional (DO) pneumoni dengan pihak – pihak yang terkait (dokter, pengelola program, petugas poli / yang sudah dilatih MTBS)
- s) Melibatkan program – program lain yang ada di puskesmas dalam penemuan kasus pneumoni
- t) Kerjasama baik dari pengusaha/ pengelola TPM & jg petugas kesling & lintas sektor yang lain utk

melakukan pengawasan terhadap TPM supaya tercipta TPM yang memenuhi syarat atau sehat dengan adanya sertifikat sehat yang direkomendasikan oleh dinkes

4) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.224.856.098,- realisasi sebesar Rp. 7.781.076.673,- atau 94,60%. *Outcome* dari kegiatan ini adalah

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pembinaan Penerapan Standarisasi, Akreditasi dan Mutu Puskesmas (Puskesmas)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 49.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.669.160,- atau 99,78%.

Ouput dari kegiatan ini adalah 1 kecamatan yang memiliki Puskesmas terakreditasi melalui kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas berupa:

1. Belanja Alat Tulis Kantor
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Luar
4. Belanja Makan dan Minum Kegiatan

(2) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui seksi Alkes, Pkrt dan sarpras pada Bidang Sumberdaya kesehatan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.325.927.000,- Realisasi pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.262.690.703,- atau 98,09% dari pagu anggaran kegiatan.

(3) Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana DAK Non Fisik yang alokasi anggarannya adalah sebesar Rp 1.123.750.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran pada tahun tersebut sebesar Rp 836.109.550,- (Delapan ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 74,40% dari pagu yang di sediakan

(4) Kegiatan Penyelenggaraan Standarisasi, Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan (RSUD).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD RSUD Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 304.019.920,- (tiga ratus empat juta sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 249.954.787,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 82,22% dari pagu anggaran kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Standarisasi, Akreditasi dan Mutu Pelayanan di RSUD Kabupaten Bintan.

(5) Kegiatan Pengembangan Manajemen Database dan Penyebaran Informasi Rumah Sakit (RSUD)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD RSUD Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 217.610.000,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 214.212.900,- (dua ratus empat belas juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) atau 98,44% dari pagu anggaran kegiatan. Output

dari kegiatan ini adalah terlaksananya manajemen database dan penyebaran informasi rumah sakit (BLUD).

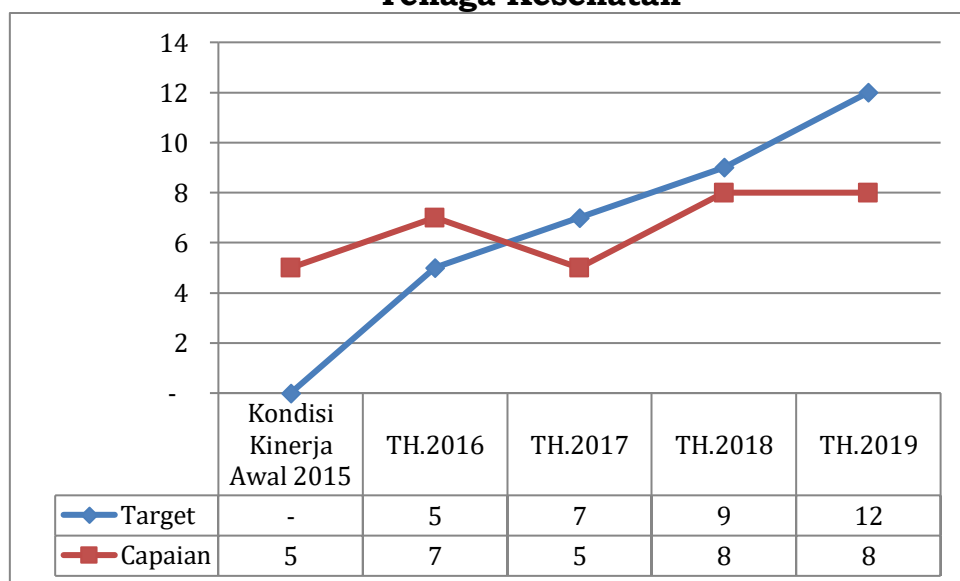
(6) Kegiatan Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit (DAK Reguler)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD RSUD Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.203.769.178,- (tiga milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.168.439.573,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 98.9% dari pagu anggaran kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk RSUD Kabupaten Bintan.

Capaian kinerja tahun 2019 untuk program ini antara lain:

1) Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan

Grafik 3.25 Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan



Seksi : Seksi SDMK Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan dasar di puskesmas Se-Kabupaten Bintan, pada tahun 2019 dan 2018 sama yaitu 8 Puskesmas, namun secara persentase di tahun 2019 menurun dikarenakan Targetnya meningkat, yaitu pada tahun 2019 ada 8 puskesmas yang memiliki 5 jenis nakes dasar (66,7%) sedangkan di tahun 2018 ada 8 puskesmas yang memiliki 5 nakes dasar (88,9%).

2) Peningkatan Kelas/Type Rumah Sakit

Pada tahun Akhir 2019 type Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bintan setelah dilakukan penyesuaian dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana, Jenis Pelayanan yang tersedia serta ketenagaan yang tersedia maka ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi RSUD dengan kelas/Type C, yang sebelumnya pada tahun 2018 masih berstatus RSUD Tipe D.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Kualitas hasil pendidikan Sumber Daya Manusia kesehatan dan pelatihan kesehatan pada umumnya masih belum memadai. Salah satu penyebabnya kurangnya penganggaran untuk kegiatan tersebut.
- b) Sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-perundangan di bidang pengembangan tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara memadai terkait kurangnya penganggaran untuk kegiatan tersebut.

2) Solusi

- a) Melakukan sosialisasi tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang telah di ikuti dengan memaksimalkan atau menambah anggaran pada kegiatan tersebut.
- b) Meningkatkan Kualitas hasil pendidikan Sumber Daya Manusia kesehatan dan pelatihan kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan diklat yang telah tersertifikasi.

5) Program kefarmasian dan Alat Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.719.515.380,- realisasi sebesar Rp. 25.078.557.650,- atau 97,50%. *Outcome* dari kegiatan ini adalah

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (APBD)

Alokasi anggaran sebesar Rp. 299.200.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 295.245.898 atau 98,67%. Pelaksanaan kegiatan meliputi :

- 1) belanja obat-obatan dengan total anggaran Rp. 105.000.000 penyerapan 100% terdiri dari
 - belanja multivitamin ibu hamil untuk program kesehatan keluarga dan belanja multivitamin balita gizi kurang untuk program Gizi dengan realisasi sebesar Rp. 104.087.500 atau 100%,
- 2) belanja bahan kimia dengan anggaran Rp. 100.000.000 dan penyerapan sebesar 100% terdiri dari

- Untuk kebutuhan persediaan gigi dengan realisasi sebesar Rp. 48.475.000 atau penyerapan sebesar 48.47% dilakukan dengan mekanisme e-purchasing.
 - Untuk kebutuhan rutin dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung dengan realisasi sebesar Rp. 49.362.198 atau 51.53%.
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.200.000 telah dilaksanakan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.079.000 atau 100%.
 - 4) Kegiatan rapat koordinasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional serta rapat konsultasi teknik anggaran DAK dilaksanakan dengan penyerapan sebesar 100% (Rp. 30.000.000).
 - 5) Belanja cetak buku LPLPO untuk puskesmas dengan realisasi sebesar Rp. 15.950.000 atau 100%
 - 6) Belanja modal pengadaan komputer dengan realisasi sebesar Rp. 17.000.000 atau penyerapan sebesar 100% dengan mekanisme e-purchasing
 - 7) Belanja jasa uji mutu obat dengan realisasi sebesar Rp. 14.210.000 atau 94.73% yang dilaksanakan oleh Balai POM di Batam.

(2) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (DAK BINFAR)

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan obat dan bahan medis habis pakai dengan pagu Rp. 3.913.165.884 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.694.565.423 atau penyerapan sebesar 94.41% dari pagu anggaran kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi :

- 1) Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai

- mekanisme e-purchasing menggunakan katalog elektronik sebanyak 29 kontrak dari 55 penyedia
 - mekanisme tender sebanyak 1 kontrak
- 2) Belanja penggandaan dilaksanakan untuk mendukung operasional pekerjaan dengan realisasi untuk belanja penggandaan sebesar Rp. 16.500.000 atau 100%
 - 3) Kegiatan rapat koordinasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional serta rapat konsultasi teknik anggaran DAK dilaksanakan dengan penyerapan sebesar 100% (Rp. 27.767.200)
 - 4) Belanja makan minum rapat Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.596.800 penyerapan 100%

(3) Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.000.000. dengan realisasi sebesar Rp. 3.850.000 atau 96,25%. Pelaksanaan kegiatan meliputi :

Bimbingan teknis ke puskesmas dan rumah sakit mengenai pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan serta pelayanan farmasi klinik juga dilakukan bimbingan teknik mengenai pemantauan penggunaan antibiotic dan injeksi di puskesmas dalam kaitan penggunaan obat rasional. Dilaksanakan juga penguatan pelaksanaan GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) yang telah disosialisasikan pada tahun 2016 ke seluruh puskesmas melalui aktifitas tenaga kefarmasian dalam melakukan edukasi ke masyarakat seperti dalam program Posbindu, PTM, Posyandu usila, Posyandu balita, Keselamatan Kerja serta ke sekolah-sekolah. Khususnya puskesmas yang memiliki SDM

Apoteker juga telah melakukan visit ke pasien rawat inap bersama dengan dokter untuk memantau pemberian obat. Sedangkan GEMA CERMAT ini sendiri ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengedukasi tentang pengelolaan obat rumah tangga dalam swamedikasi.

(4) Pengadaan/Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Alat Kesehatan, PKRT dan Fasyankes pada Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp142.498.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.133,109,900,- atau 93,41% dari pagu anggaran kegiatan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya. Sasaran kegiatan ini yaitu 15 (lima belas) Puskesmas dan jaringannya. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1) Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan

Belanja jasa pemeliharaan alat kesehatan dialokasikan sebesar Rp20.000.000,- realisasi anggarannya adalah 100% (seratus persen) pemeliharaan alat kesehatan berupa Pemeliharaan Cold Chain dan kursi gigi di Puskesmas

2) Kalibrasi Alat Kesehatan di Puskesmas

Belanja kalibrasi alkes di puskesmas total dana yang di anggarkan RP. 61.320.000,- Pelaksanaan kalibrasi alkes.

3) Selain Belanja Pemeliharaan alat-alat kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan berupa monitoring ketersediaan alat kesehatan diseluruh Puskesmas se-kabupaten Bintan, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.

(5) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Alat Kesehatan, PKRT dan Fasyankes pada Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.037.999.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.022.652.448,- atau 99% dari pagu anggaran kegiatan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya alat kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya. Sasaran kegiatan ini yaitu 15 (lima belas) Puskesmas dan jaringannya. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Umum anggaran pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum dialokasikan sebesar Rp.1.656.274.081,- berupa pengadaan set pemeriksaan umum untuk 12 Puskesmas, dan set tindakan gawat darurat untuk 13 Puskesmas.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Gigi anggaran pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran Gigi dialokasikan sebesar Rp.432.954.735,-. Dialokasikan untuk Puskesmas Mantang dan Puskesmas Teluk Sebong berupa pengadaan Dental Unit, ART set, Set tang gigi dewasa dan anak serta compressor dental unit.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit kandungan. Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit kandungan dialokasikan sebesar Rp.898.770.184,- untuk 13 puskesmas.
- 4) Selain Belanja Modal (Alat Laboratorium, Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi dan Alat

Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan), dilaksanakan juga Belanja Pegawai berupa Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas, terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, Belanja Penggandaan, Belanja Jasa Transportasi Mobilitas terdiri dari Jasa transportasi mobilitas darat, peruntukannya yaitu untuk biaya pengiriman alat kesehatan yang diadakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menuju Puskesmas yang dialokasikan.

(6) Peningkatan dan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Rumah Sakit)

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.431.148.484,- realisasi Rp.3.422.524.179,- atau 99,75%. Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya obat publik dan perbekalan kesehatan pada fasilitas pelayanan tingkat lanjut atau Rumah Sakit.

(7) Pengadaan Alat Kesehatan (Rumah Sakit) DAK Rujukan

Kegiatan ini dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.925.473.822,- realisasi Rp. 13.553.175.256,- atau 97,33%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya alat kesehatan rumah sakit.

(8) Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi pada Sarana Distribusi

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.16.000.000,- atau 100%. Hasil pembinaan dan pengawasan tahun 2019 capaian sarana yang diperiksa yaitu rumah sakit, apotek, Pedagang Eceran Obat (toko obat), swalayan/toko kelontong, Produksi Industri Rumah Tangga Pangan dan produsen Air Minum

Dalam Kemasan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yaitu
 - Pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar di pasaran dan pemeriksaan sarana prasarana baik di rumah sakit, apotek, toko obat berizin (pedagang eceran obat) yang ada di kabupaten Bintan. Tahun 2019 dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 2 rumah sakit, 15 apotek dalam rangka pengawasan rutin dan 5 apotek dalam rangka perizinan serta 15 toko obat dalam rangka pengawasan rutin dan 7 toko obat dalam rangka perizinan
 - pengawasan distribusi pangan dilakukan terhadap produk-produk makanan, minuman dan kosmetik yang beredar di pasaran seperti tanggal kadaluarsa, nomor izin pendaftaran, kualitas fisik barang yang beredar. Tahun 2018 dilakukan pengawasan dan pembinaan sebanyak 20 swalayan/mini market/toko kelontong/gudang distribusi
- b. Melaksanakan pengawasan di sarana produksi obat dan makanan yaitu
 - Pengawasan diproduksi AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) terhadap sarana prasarana pengelolaan air minum. Tahun 2019 dilakukan terhadap 1 sarana produksi
- c. Melaksanakan penyuluhan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) bekerjasama dengan Balai POM di Batam. Dilakukan di 4 sekolah dasar

- d. Melaksanakan pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel takjil di titik-titik penjualan pangan jajanan sepanjang Ramadhan bekerjasama dengan Balai POM di Batam dengan hasil pengujian tidak ada yang mengandung bahan berbahaya.
- e. Melakukan penyebaran informasi/penyuluhan mengenai narkoba bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Tanjungpinang-Bintan, dilakukan di 6 sekolah dasar.

(9) Kegiatan Peningkatan SDM Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.671.200,- dengan realisasi sebesar Rp.27.525.720,- atau 99,47%. Hasil kegiatan ini adalah melaksanakan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan perizinan Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) sesuai peraturan BPOM. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Bintan menjadikan meningkatnya industri rumah tangga, sedangkan anggaran yang tersedia hanya bisa mengakomodir 26 orang peserta (dengan peserta yang lulus dan mendapatkan sertifikat PKP sebanyak 21 orang). Dibandingkan tahun 2018 SDM yang diberikan penyuluhan sebanyak 40 orang, penurunan peserta menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Tetapi pada tahun 2019 ini juga dilakukan Penyuluhan Keamanan Pangan bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Balai POM di Batam dan DP3KB Kabupaten Bintan sebanyak 87 orang dan 1 orang peserta mandiri.

(10) Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Alkes dan PKRT

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Alat Kesehatan, PKRT dan Fasyankes pada Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.108.990,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.739.990,- atau 96,95% dari pagu anggaran kegiatan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan peredaran Alkes dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga di wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya. Sasaran kegiatan ini yaitu 15 (lima belas) Puskesmas dan jaringannya. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi monitoring peredaran Alat Kesehatan dan PKRT di swalayan, Apotik, Toko Obat, adapun produk PKRT yang diawasi misalnya (Pampers, Kapas lidi, pembalut wanita, kapas muka, dll).

(11) Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (RSUD).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD RSUD Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 381.800.000- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi kegiatan ini pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 378.673.316,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah) atau 99.18% dari pagu anggaran kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan RSUD Kabupaten Bintan.

(12) Kegiatan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK NON FISIK)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.145.877.210,- atau 99,61%.

Output kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan di instalasi farmasi. Hasil kegiatan ini adalah tercapainya pendistribusian obat-obat dari instalasi farmasi ke 15 Puskesmas.

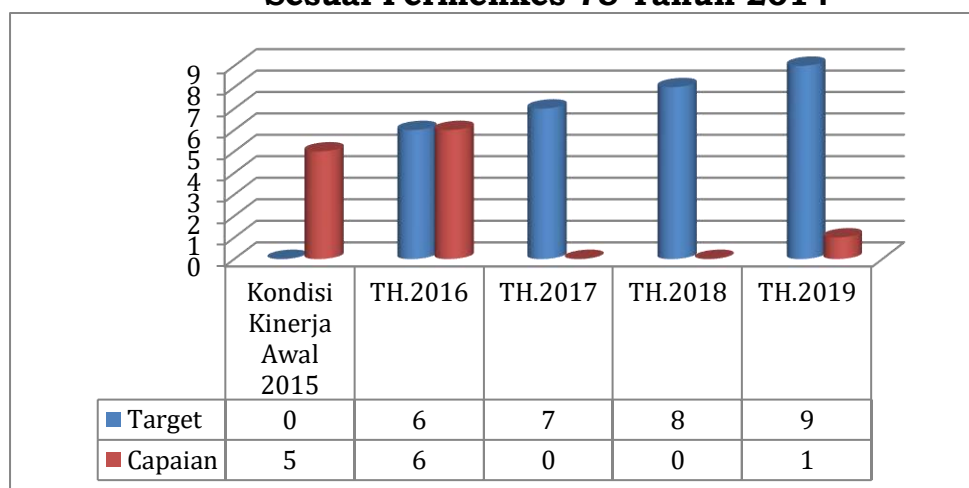
(13) Kegiatan Pembangunan Baru / Rehabilitasi / Penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi (DAK REGULER)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.382.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.373.618.310,- atau 97,8%. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana pendukung instalasi farmasi (DAK REGULER). Hasil kegiatan ini adalah pengadaan mobil box guna menunjang pendistribusian obat ke 15 puskesmas.

Capaian tahun 2019 untuk program ini adalah:

1) Jumlah Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2019

Grafik 3.26 Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014



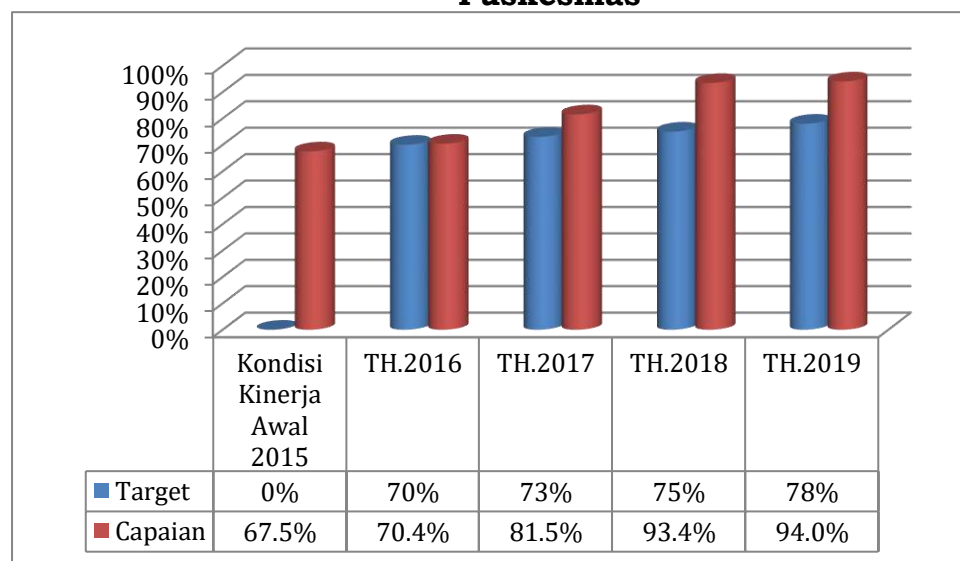
Sumber : Seksi Alat Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Seksi Alkes, PKRT dan Sarpras ditahun 2019 adalah 1

Puskesmas, sejak tahun 2017 setelah diterapkannya Aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) oleh Kementerian Kesehatan RI secara Online up to date maka sangat berdampak pada target pemenuhan alkes di puskesmas yang sebelumnya di hitung secara manual. Selain itu masih lemahnya kemampuan petugas puskesmas dalam menginventarisir dan mengentri ketersediaan alkes di puskesmas pada aplikasi ASPAK serta jenis alat kesehatan yang terdapat pada Lampiran Alat-alat kesehatan berdasarkan permenkes NO 75 tahun 2014 banyak yang tidak dipenuhi pada saat pemesanan di e-katalog juga menghambat pencapaian target kinerja ini.

2) Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Grafik 3.27 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas



Sumber : Seksi Kefarmasian

Definisi operasional dari indikator kinerja Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas adalah tersedianya obat dan vaksin indikator di Puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator. Obat-obat yang dipilih sebagai obat indikator merupakan obat

pendukung program kesehatan ibu, kesehatan anak, penanggulangan penyakit serta obat pelayanan kesehatan dasar yang banyak digunakan dan terdapat di dalam Formularium Nasional.

Penetapan persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah kumulatif item obat indikator yang tersedia di (n) Puskesmas}}{\text{Jumlah (n) Puskesmas yang melapor x Jumlah total item obat indikator}} \times 100\%$

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Berdasarkan indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Seksi Alkes, PKRT dan Sarpras ditahun 2019 adalah 9 Puskesmas, namun baru dapat terpenuhi 1 Puskesmas berdasarkan data dari ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan).
- b) Penayangan catalog elektronik obat dilakukan secara bertahap sehingga satker membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyusunan kebutuhan obat dan adanya perubahan catalog elektronik setiap minggu yang menyebabkan adanya perubahan rencana belanja obat.
- c) Pelaksanaan pemusnahan obat rusak dan kadaluwarsa sementara dianggarkan oleh Seksi Farmasi Makanan dan Minuman dengan memanfaatkan anggaran yang tidak terserap melalui anggaran perubahan. Pemusnahan pada tahun 2019 belum mampu untuk memusnahkan obat yang dikirim dari puskesmas dan yang ada di BPAK sehingga harus segera dilakukan pemusnahan berikutnya.

- d) Adanya ketidakmampuan suplai obat oleh penyedia yang memenangkan lelang katalog elektronik sehingga menyebabkan kekosongan obat

2) Solusi

- a. Meminta puskesmas agar dalam pengusulan alat-alat kesehatan harus sesuai dengan daftar pada lampiran permenkes No 75 tahun 2014.
- b. Mengusulkan pada kementerian kesehatan agar berkoordinasi dengan LKPP Pusat untuk meminta para penyedia barang dan jasa/perusahaan Alat-alat kesehatan agar menyediakan barang/Alat kesehatan sesuai Permenkes No 75 tahun 2014.
- c. Melaporkan tentang kondisi ketidakmampuan suplai obat oleh penyedia kepada Kementerian Kesehatan RI dan tembusan ke LKPP
- d. Memberikan masukan kepada LKPP dan Kementerian Kesehatan RI mengenai hal tersebut di atas dan meminta agar catalog elektronik dapat ditayangkan segera di awal tahun
- e. Mengajukan rencana kerja anggaran pemusnahan obat kadaluwarsa di anggaran perubahan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga yang menangani pengolahan dan pemusnahan produk dan limbah medis. Kegiatan ini juga akan mengakomodir penanganan obat kadaluwarsa di puskesmas sehingga akan dilaksanakan tingkat kabupaten.
- f. Telah dibuatkan surat kepada puskesmas dan BPFAC mengenai pelimpahan tanggungjawab pemusnahan obat ke UPTD BPFAC sesuai dengan tupoksi dan untuk berikutnya penganggaran dilakukan oleh UPTD BPFAC

6) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.979.946.120,- realisasi sebesar Rp. 9.235.738.639,- atau 92,54%. *Outcome* dari kegiatan ini adalah

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp.6.803.171.000,- realisasi Rp.6.718.486.634,- atau 98,76%. **Output** dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin.

Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi :

1. Monitoring dan Evaluasi serta Bimbingan Teknis ke Puskesmas dan Rumah Sakit di dalam pulau Bintan

Di alokasikan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Realisasi sebesar Rp. 15.967.000,- atau 99.79 % dari alokasi yang telah di anggarkan.

2. Pendampingan Pasien Rujukan, Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit Rujukan Luar Daerah

Di alokasikan sebesar Rp. 169.008.000,- (seratus enam puluh Sembilan juta delapan ribu rupiah). Realisasi sebesar Rp. 132.724.279,- atau 78.53% dari alokasi yang telah dianggarkan. Penyerapan anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar 78.53% dikarenakan ada penambahan anggaran di APBDP untuk pendampingan pasien rujukan ke luar daerah sementara jumlah pasien yang dirujuk ke luar daerah

mengalami penundaan sampai menunggu kondisi pasien stabil untuk dirujuk.

3. Belanja Penggandaan untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin

Di alokasikan sebesar Rp. 3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Realisasi sebesar Rp. 3.988.600,- atau 99.96% dari alokasi yang telah dianggarkan.

4. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Di alokasikan sebesar Rp. 6.614.173.000,- (enam milyar enam ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Realisasi sebesar Rp. 6.565.806.755,- atau 99,27% dari alokasi yang telah di anggarkan, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Premi BPJS Kesehatan PBI APBD sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 17.937 jiwa dari target yang direncanakan sebesar 18.000 jiwa (Rp. 4.894.883.000,-)
- Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan sebanyak 171 tenaga kerja dari bulan Februari s/d Desember 2019 (Rp. 10.157.400,-) dan Kader Posyandu sebanyak 1.485 tenaga kerja dari bulan Januari s/d Oktober, untuk bulan November dan Desember terdapat kader posyandu yang meninggal dunia sebanyak 3 tenaga kerja sehingga jumlah kader posyandu menjadi 1.482 tenaga kerja (Rp. 48.097.800)
- Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dengan Rumah Sakit yang memiliki Perjanjian Kerjasama

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan (Rp. 1.612.668.555,-) dengan rincian sbb :

- Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang tagihan pelayanan dari bulan Juni s/d November 2019 sebesar Rp. 342.475.305,-
- Rumah Sakit Engku Haji Daud Tanjung Uban tagihan pelayanan dari bulan Desember 2018 s/d 15 Desember 2019 sebesar Rp. 390.074.300,-
- Rumah Sakit dari. Abdul Aziz Singkawang tagihan pelayanan dari bulan Januari s/d Desember 2019 sebesar Rp. 17.110.900,-
- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan tagihan pelayanan dari bulan Januari s/d November 2019 sebesar 863.008.000,-

(2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.271.814.016,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.240.553.133,- atau 88.49%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kesehatan peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Sri Bintan dan jaringannya (Pustu/Polindes). Pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai, dan alat kedokteran umum.

(3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Berakit dan Jaringannya

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.967.111,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.283.133,- atau 73,44%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini

adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan medis habis pakai. Penyerapan anggaran ini belum maksimal karena adanya penambahan anggaran di APBD-P sehingga ada kegiatan yang belum sempat dikerjakan dan puskesmas disibukkan dengan persiapan akreditasi.

(4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Mantang dan Jaringannya

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176.684.859,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 172.436.250,- atau 97,59%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 1.578 jiwa peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Mantang dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

(5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Kelong dan Jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.470.220.480,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.315.080.010,- atau 67,01%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan bakar minyak, obat-obatan, bahan medis habis pakai. Penyerapan anggaran kegiatan ini belum maksimal disebabkan oleh belanja bahan bakar minyak tidak bisa dicairkan karena sudah diakomodir pada kegiatan operasional puskesmas, belanja obat-obatan dan bahan medis tidak dicairkan karena sulitnya prosedur pencairan

dan stok obat Puskesmas Kelong dan Puskesmas Kelong masih mencukupi.

- (6)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Tambelan dan Jaringanya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 340.428.921,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.281.308.366,- atau 82,63%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan kimia, meubelair dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk 3.600 peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Tambelan dan Jaringanya (Pustu/Polindes).
- (7)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Toapaya dan Jaringanya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.430.078.296,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.415.930.640,- atau 96,71%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, tabung gas, obat-obatan, bahan kimia, bahan medis habis pakai. Penyerapan belum maksimal karena belanja obat-obatan dan bahan medis tidak terealisasi. Belanja obat-obatan dan bahan medis menggunakan dana JKN apabila kebutuhan obat dan bahan medis benar-benar tidak ada di gudang farmasi. Untuk tahun 2019 obat-obatan dan bahan medis hanya beberapa yang tidak tersedia dan tidak mencukupi.
- (8)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.061.799,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.275.927.800,- atau 95,13%. Hasil

pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya (Pustu/Polindes).

- (9)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.353.241.511,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.305.595.837,- atau 86,51% Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya (Pustu/Polindes).
- (10)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN di Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 268.328.514,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 254.881.836,- atau 94,99%. Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah pembayaran jasa transaksi keuangan, honorarium insentif petugas, cetak, penggandaan. Tersedianya alat tulis kantor, bahan kimia, bahan medis habis pakai dan terlaksananya pelayanan kesehatan untuk peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya (Pustu/Polindes).
- (11)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Sri Bintan dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.975.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.885.000,- atau 73,71%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Sri

Bintan dan Jaringannya. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas dan pendamping PNS dan Non PNS, belanja bahan bakar minyak/gas. Penyerapan anggaran untuk kegiatan ini rendah disebabkan keterbatasan transfer dari BPJS ke kas sementara kegiatan sudah di SPJkan.

- (12)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Berakit dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.675.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.150.000,- atau 66,97%. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas, belanja makanan dan minuman kegiatan dan honor narasumber.
- (13)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Mantang dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- atau 14,29%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Mantang dan Jaringannya. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas dan pendamping PNS dan Non PNS. Penyerapan anggaran rendah disebabkan target persalinan yang ditetapkan ada 10 orang akan tetapi realisasi cuma 4 orang yang menggunakan anggaran BPJS dan pasien banyak dirujuk karena adanya komplikasi kehamilan.
- (14)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kelong dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.580.000,- atau 10,08%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kelong

dan Jaringannya. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas dan pendamping PNS dan Non PNS. Anggaran kegiatan ini tidak bisa dicairkan sama sekali karena berkas sudah diajukan ke BPJS tapi belum ada pencairan yaitu ada sebanyak 3 persalinan.

- (15)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Tambelan dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.42.490.000,- atau 38,98%. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas, tersedianya bahan bakar minyak/gas, belanja makanan dan minuman kegiatan dan honor narasumber. Penyerapan anggaran kegiatan ini rendah disebabkan oleh pengklaiman persalinan dan rawat inap dari BPJS belum belum terealisasi dimana SPJ sudah diajukan tetapi belum diverifikasi dan telah dilakukan koordinasi tetapi jawaban dari BPJS masih menunggu.
- (16)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Toapaya dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.27.125.000,- atau 43,23%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Toapaya. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas. Penyerapan rendah dikarenakan menunggu kwitansi persalinan dari BPJS.
- (17)** Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Teluk Bintan dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.525.000,- atau 12,58%. Kegiatan ini ditujukan bagi

persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Teluk Bintan. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas.

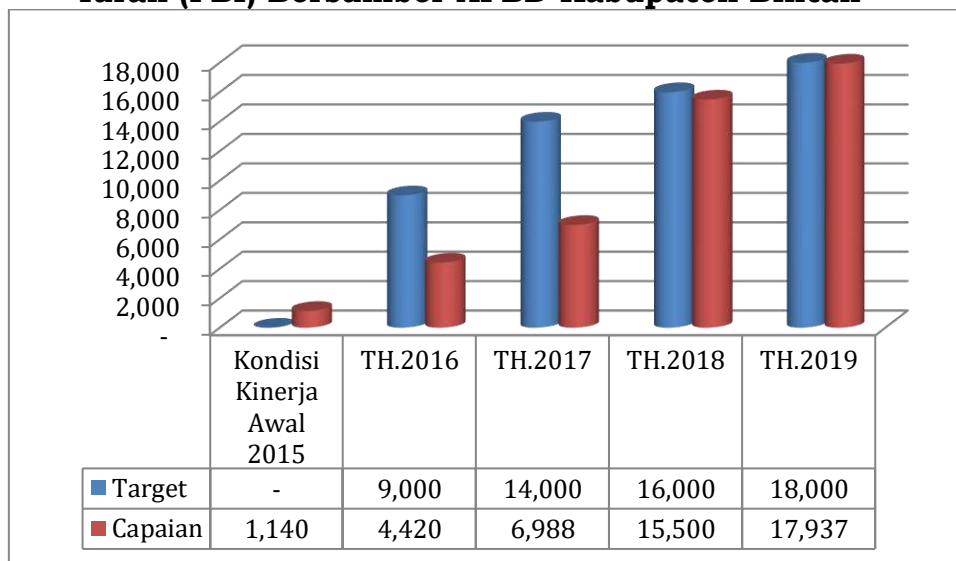
- (18) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Sei. Lekop dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.500.000,- atau 18,66%. Lekop dan Jaringannya. Penyerapan anggaran rendah disebabkan karena biaya persalinan yang belum dibayarkan BPJS ada 18 persalinan yang baru dibayarkan 4 persalinan.
- (19) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kuala Sempang dan Jaringannya dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0%. Kegiatan ini ditujukan bagi persalinan peserta JKN Non Kapitasi di Puskesmas Kuala Sempang. Hasil kegiatan ini adalah pembayaran honorarium insentif petugas. Anggaran untuk kegiatan ini tidak dicairkan sama sekali karena karena bidan yang ditempatkan mengalami kesulitan administrasi.

Capaian tahun 2019 untuk program ini adalah:

1) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBD Kab. Bintan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Untuk tahun 2019 jumlah penduduk miskin yang menjadi peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Bintan dengan nilai capaian 17.937 jiwa (99.65%) dibanding tahun 2018 untuk kepesertaan JKN yang dibiayai oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan.

Grafik 3.28 Jumlah Penduduk Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bersumber APBD Kabupaten Bintan



Sumber : Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Rincian Distribusi peserta JKN 17.937 jiwa berdasarkan FKTP adalah sebagai berikut :

- Puskesmas Berakit : 500 jiwa
- Puskesmas Kawal : 1.617 jiwa
- Puskesmas Kelong : 1.159 jiwa
- Puskesmas Kijang : 2.483 jiwa
- Puskesmas Kuala Sempang : 1.443 jiwa
- Puskesmas Mantang : 1.038 jiwa
- Puskesmas Sei Lekop : 708 jiwa
- Puskesmas Sri Bintan : 672 jiwa
- Puskesmas Tambelan : 940 jiwa
- Puskesmas Tanjung Uban : 1.434 jiwa
- Puskesmas Teluk Bintan : 2.180 jiwa
- Puskesmas Teluk Sasah : 1.278 jiwa
- Puskesmas Teluk Sebong : 859 jiwa
- Puskesmas Toapaya : 1.606 jiwa

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

- a) Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan baik yang bersumber APBN maupun APBD dikarenakan

kurangnya pendataan dari tingkat RT/RW yang melapor ke Dinas Sosial, serta keterbatasan anggaran untuk pembayaran premi BPJS PBI APBD sehingga tidak tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

- b) Kecelakaan tunggal tidak dijamin BPJS karena masyarakat tidak mau melapor kejadian kecelakaan ke pihak kepolisian dan Jasa Raharja sehingga semakin banyak anggaran yang harus disiapkan daerah untuk menangani kasus kecelakaan tersebut.

2) Solusi :

- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, dengan melakukan kerjasama antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam hal pendataan sehingga dapat di proyeksikan berapa jumlah masyarakat Kabupaten Bintan yang belum terdaftar sebagai peserta JKN baik APBN maupun APBD.

-

7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.670.000,- realisasi sebesar Rp. 176.853.058,- atau 86,83%. *Outcome* dari kegiatan ini adalah:

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Media Promosi Kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.300.000,- realisasi sebesar Rp.43.268.000,- (91,48%).

Output dari kegiatan ini adalah tersebarnya informasi kesehatan di masyarakat melalui kegiatan : publikasi melalui media elektronik (Radio), media cetak (Koran), diseminasi informasi kesehatan melalui media cetak (baliho, banner, spanduk, flyer, leaflet dan stiker), pertemuan review program promosi kesehatan tingkat kabupaten. pembinaan, monitoring dan evaluasi serta konsultasi program. Alokasi anggaran berupa pengadaan bahan cetak, biaya publikasi, perjalanan dinas serta makanan /minuman pertemuan.

(2) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.860.000,- , dengan realisasi sebesar Rp.34.404.718,- atau 90,87%. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya tahapan desa siaga di Kabupaten Bintan, sehingga jumlah tahapan desa siaga Kabupaten Bintan sampai dengan akhir tahun 2019 dengan rincian ; 36 desa dan 15 kelurahan siaga aktif dengan strata: Pratama 0 (0%), Madya 6 (11,7%), Purnama 22 (43,1%), Mandiri 23 (45,0%)

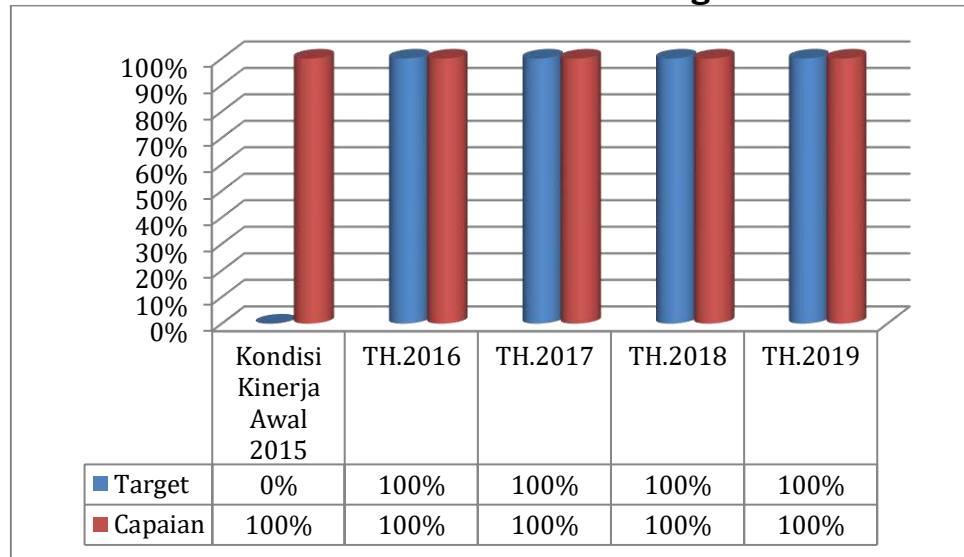
(3) Kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Desa Siaga dan Promosi Kesehatan (BOK DAK NON FISIK)

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 118.510.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.180.340,- atau 83.69 %. Output kegiatan adalah terlaksananya pertemuan Orientasi kader kesehatan tentang PHBS, terlaksananya refresing kader desa siaga, pembinaan teknis monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan dan desa siaga serta konsultasi program ke Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau serta tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK).

Capaian tahun 2019 untuk program ini adalah:

1) Persentase Desa Siaga Aktif

Grafik 3.29 Persentase Desa Siaga Aktif



Sumber: Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM

Berdasarkan grafik diatas target yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah 100% desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bintan telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk Kabupaten Bintan pada tahun 2019, 100% dari desa dan kelurahan yang ada telah menjadi desa siaga aktif sejak mulai dicanangkan karena telah terpenuhinya seluruh kriteria untuk menjadi desa dan kelurahan siaga aktif.

Desa dan kelurahan Siaga Aktif merupakan pengembangan dari Desa Siaga, yaitu Desa atau Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

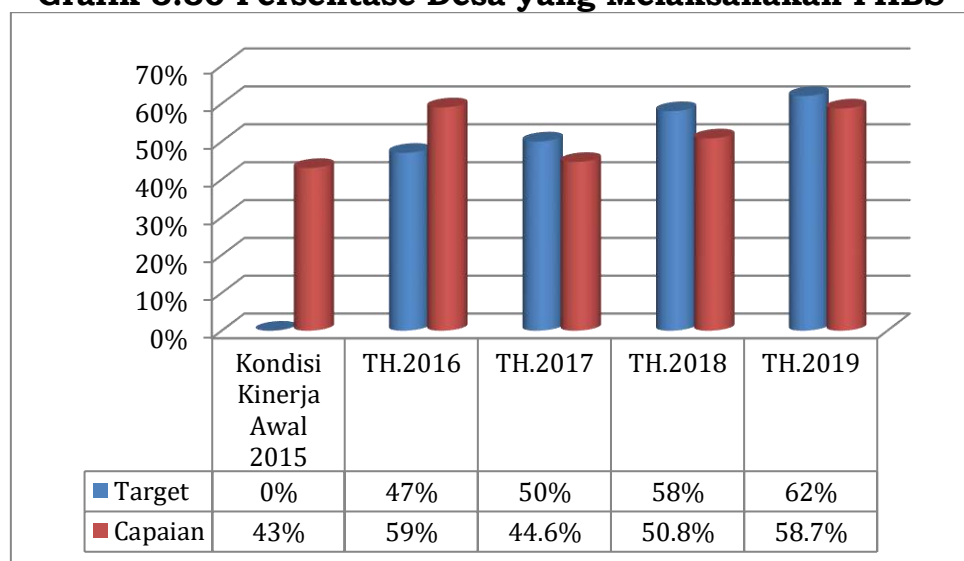
- a. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah

tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), atau sarana kesehatan lainnya.

- b. Penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaduratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2) Persentase Desa yang melaksanakan PHBS

Grafik 3.30 Persentase Desa yang Melaksanakan PHBS



Sumber: Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM

Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) ditandai dengan indikator cakupan rumah tangga yang ber-PHBS melalui kegiatan survey PHBS rumah tangga di seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Bintan. Pada tahun 2019 presentase rumah tangga ber PHBS meningkat dibanding tahun 2018 yaitu 50,8% tahun 2018 dan 58.7% pada tahun 2019.

Persentase Rumah Tangga ber PHBS tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD pada tahun 2019 yaitu 62%. Hal tersebut disebabkan hasil survei rumah tangga ber PHBS tahun 2019 masih belum memenuhi nilai lengkap memenuhi untuk seluruh indikator rumah tangga ber PHBS yaitu sebanyak 10 indikator. Masih terdapat indikator PHBS yang nilainya masih rendah yaitu Perilaku Merokok di dalam rumah, hal ini disebabkan karena sulitnya merubah perilaku anggota keluarga yang merokok didalam rumah.

Hasil survey PHBS dari 25.619 RT yang di survey sebanyak 15047 Rumah tangga merokok di dalam rumah (58,7%). Untuk mendukung program PHBS di Kabupaten Bintan perlu lebih ditingkatkan lagi promosi kesehatan antara lain publikasi, diseminasi informasi dan penyuluhan melalui berbagai media baik elektronik dan cetak tentang bahaya merokok serta mencari dukungan sosial melalui tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan program-program kesehatan, agar masyarakat mau menerima dan mau berpartisipasi terhadap program kesehatan tersebut.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a) Pengelola Program Promkes sebagian besar melaksanakan tugas rangkap untuk beberapa kegiatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung.
- b) Masih kurangnya tenaga ahli promosi kesehatan baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas.
- c) Masih ada beberapa Desa yang sulit di jangkau karena geografis dan akses menuju desa tersebut masih sulit.

- d) Maraknya iklan rokok dan pengaruh pergaulan remaja.
- e) Realisasi keuangan Dak Non Fisik (Bok) masih belum mencapai 100% dikarenakan sesuai dengan Permenkes No 3 tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi Non fisik Bidang Kesehatan tidak boleh dimanfaatkan untuk promosi kesehatan di media cetak dan elektronik.
- f) Realisasi Keuangan APBD masih belum mencapai 100% dikarenakan adanya dukungan dana DAK Non Fisik (BOK)

2) Solusi

- a) Melatih tenaga puskesmas tentang promosi kesehatan di Puskesmas
- b) Meningkatkan kerjasama antar pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam pembinaan Promosi Kesehatan.
- c) Meningkatkan kapasitas kader Desa siaga dan kader Kesehatan.
- d) Meningkatkan Sosialisasi, publikasi dan penyuluhan tentang kebijakan larangan merokok serta bahaya rokok.
- e) Meningkatkan penyuluhan tentang PHBS di setiap tatanan.
- f) Meningkatkan advokasi dengan perusahaan dan organisasi kemasyarakatan untuk dukungan program kesehatan.

3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua dan Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut :

1) Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna)

Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) adalah kondisi ruas jalan sedang sampai dengan baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas. Panjang target jalan mantap sempurna per tahun adalah 5 km. Total panjang jalan Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2019 adalah 656,239 km, jalan yang dibangun pada tahun anggaran 2019 sepanjang 8,547 Km. (Persentase Mantap sempurna = panjang jalan yang dibangun dibagi total panjang jalan x 100) maka Tingkat Kemantapan Jalan Mantap Sempurna mencapai **100 %**

2) Panjang Jalan Yang Dibangun dan Ditingkatkan

Tahun 2019 panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan ditargetkan sepanjang 5 Km. Namun dapat direalisasikan sepanjang 8,547 Km. Target tersebut dapat terpenuhi di Tahun 2019

3) Persentase Drainase Jalan Yang Terbangun

Kondisi existing persentase drainase jalan yang terbangun sampai tahun 2019, 82.98 %. Ditahun 2019 target penanganan yang rencanakan sebesar 94 % dengan realisasi sebesar 78%. Sedangkan untuk panjang drainase jalan yang terbangun sampai tahun 2019 sebesar 12.450 m'. Target penanganan di tahun 2019

direncanakan sebesar 2.600m' dengan realisasi pelaksanaan sebesar 2.100 m' atau sebesar 80.769 % dari rencana.

4) Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Urusan Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas industri, pariwisata, kelautan dan perikanan melalui optimasi pemanfaatan ruang yang terintegrasi serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Maka diperlukan upaya penyelarasan kebijakan **Penataan Ruang** baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan penataan ruang kepala daerah dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Sebagai tindak lanjut pada tahun 2016 Pemerintah Daerah telah melakukan Peninjauan Kembali Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, hal ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa pada pasal 16 ayat satu bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang melalui koordinasi penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 78 rekomendasi dengan jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dapat diberikan sejumlah 27 rekomendasi. Di tahun 2019 rekomendasi yang masuk sebanyak 239 dan yang dapat diberikan dari jumlah tersebut sebanyak 194 rekomendasi. Dengan **Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang** di Kabupaten Bintan mencapai **78%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dalam rangka Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 2.768.861.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.527.782.790,- atau 91,29%. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. Dan capaian dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.500.000,- (100 %)

(2) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.237.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.199.554.161,- (84.04 %)

(3) **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.264.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.314.700,- (69.38 %)

(4) **Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan**

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.578.570.000,- dengan realisasi sebesar Rp.448.845.000,- (77.58 %)

(5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.49.800.000,- (99,60 %)

(6) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.199.416.800,- (99.71 %)

(7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.89.986.600,- (99,99 %)

(8) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp. 213.513.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 212.949.800,- (99,74 %)

(9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.160.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.160.266.250,- (99,98 %)

(10) Penyediaan Makanan dan Minuman

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.170.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp.132.630.300,- (78.02 %)

(11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.632.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.667.962.179,- (105.69 %)

(12) Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.199.997.500,- (100,00 %)

(13) Penyusunan Dtsnfsr Oprasional Pelayanan (SOP)

Pada kegiatan ini tersedianya alokasi anggaran sebesar Rp.141.264.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.560.000,- (69.77 %)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dalam rangka Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pembangunan. Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 1.566.849.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.512.929.400,- atau 96.56%. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kapasitas peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.534.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- atau 93.81 %. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya kendaraan dinas/operasional dengan hasil keluaran terpenuhinya kebutuhan operasional kantor sebagai sarana kerja.

(2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 677.849.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 664.967.600,- atau 98.10 %. Adapun *Program* dari kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan kantor yang memadai untuk menunjang kinerja, dengan keluaran terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor sebagai sarana kerja.

(3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Untuk kegiatan ini sebesar Rp.215.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.207.491.100,- atau 96.51 %. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, dengan keluaran terpeliharanya peralatan kantor

(4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.140.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.139.250700,- atau 99.66 %. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, dengan keluaran terpeliharanya peralatan kantor

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

- 1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**
- 2. Persentase Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

Ditahun 2019 target peningkatan kualitas SDM yang direncanakan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dari yang telah direncanakan.

Permasalahan Dan Solusi

Pada pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program ini tidak terdapat permasalahan yang di hadapi.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ini sebesar Rp. 23.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.056.000,- atau 94,15%. Adapun *program* dari kegiatan ini adalah Untuk tersedianya pakaian batik. Dengan keluaran terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus dan hari-hari tertentu.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan Pendidkan dan pealtihan formal sebesar Rp. 177.940.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.529.469,- atau 94.15%. Adapun *program* dari kegiatan ini adalah untuk Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pendidikan dan pelatihan formal Dengan Keluaran Tersedianya pemdidikan dan pelatihan formal, dengan hasil terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 168.290.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.064.001,- atau 99.87%. Adapun capaian program dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas pengembangan

sistem pelaporan dengan output tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporandan menghasilkan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang akuntabel.

6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dengan total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 84.827.018.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.75.046.753.958,- atau 88.47%. Adapun capaian dari program ini diharapkan adalah meningkatkan kapasitas pembangunan jalan dan jembatan, dengan outpun terlaksananya pembangunan/pengaspalan jalan, penataan persimpangan dan jembatan, dengan hasil tersedianya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan peningkatan dan jembatan serta memperlancar arus transportasi darat.

Adapun kegiatan memperlancar arus yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 37.055.239.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.375.269.368,- atau 79.27%. *Adapun capaian program* dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas pembangunan jalan dan jembatan. Dengan output Terlaksananya Pembangunan/pengaspalan jalan, penataan persimpangan dan jembatan. Dengan hasil tersediannya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan dan jembatan serta memperlancar arus transportasi darat.

(2) Pembangunan Infrastruktur Jalan (DAK-Penugasan)

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.19.303.349.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.415.004.574,- atau (95.40%). Adapun capaian dari program kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas pembangunan jalan dan jembatan, dan output terlaksananya pembangunan badan jalan dan pengaspalan jalan dengan hasil keluaran . dengan hasil tersedianya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan serta memperlancar arus transportasi darat.

(3) Pembangunan Infrastruktur Jalan (DAK-Affirmasi)

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.5.740.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.405.335.305,- atau (94.07%). Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan badan jalan dan pengaspalan jalan. Dari kegiatan ini pula diharapkan dengan hasil tersedianya prasarana jalan, menambah kapasitas jalan serta memperlancar arus transportasi darat. Adapun capaian dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pembangunan jalan dan jembatan.

(4) Penujang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Bangunan (DAK)

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.310.001.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.309.757.648,- atau (99.92%). Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya perasional penunjang pengelolaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi (DAK), untuk capaian program tersebut adalah meningkatnya Kapasitas Pembangunan jalan dan

jembatan dengan hasil tersedianya operasional penunjang pengelolaan kegiatan pembangunan jalan dan transportasi (DAK)

(5) Pengelolaan Pendataan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bintan

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.416.376.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.440.736.320,- atau (92.02%). Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan Kab.Bintan untuk capaian program tersebut adalah meningkatnya Kapasitas Pembangunan jalan dan jembatan, dengan hasil tersusunnya laporan Data Base pendataan jalan dan jembatan

(6) Pembangunan Infrastruktur Jalan (DAK-Reguler)

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.21.482.983.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.659.106.059,- atau (96.14%). Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan badan jalan dan pengaspalan jalan. Dengan hasil Tersedianya prasarana jalan, menambah kapasitasa jalan serta memperlancar arus transportasi darat. Adapun capaian dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pembangunan jalan dan jembatan.

(7) Perencanaan tekhnis (DED) Jalan dan Jembatan

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.445.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.440.544.680,- atau (99.00%). Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Perencanaan Teknis (DED) jalan dan jembatan. Dengan hasil Tersedianya

dokumen perencanaan teknis (DED) jalan dan jembatan. Adapun capaian dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pembangunan jalan dan jembatan.

7) Program Pembangunan Dariainase dan Gorong-Gorong;

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dalam rangka optimalisasi saluran dariainase jalan untuk mengurangi genangan yang dapat merusak konstruksi jalan. Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.4.755.074.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.226.440.363,- atau 88.88%. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya pembangunan saluran derainase jalan dan box curvert, dengan capaian dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pembangunan derainase jalan dan box culvert, serta tersedianya saluran derainase dikiri kanan jalan dapat memperlancar aliran air dan menghindari kerusakan jalan akibat genangan air. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah:

a) Pelaksanaan Program

(1) Pembangunan dan Perbaikan Saluran Derainase Jalan

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.552.581.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.092.112.163,- atau 87.04 %. Adapun capaian Program kegiatan ini adalah Meningkatkan Prasarana Kapasitas Pembangunan Derainse dan Gorong-gorong jalan. Untuk output kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan Saluran Derainase Jalan dan Box Curvert. Dan diharapkan dari kegiatan ini dengan hasil tersedianya saluran derainase kiri kanan jalan yang dapat

memperlancar aliran air dan menghindari kerusakan jalan akibat genangan air.

(2) Pembangunan duiker, box culvert dan gorong-gorong jalan

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 964.106.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 905.307.026,- atau 93.90 %. Adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan gorong-gorong dan box culvert jalan. Dan diharapkan dari kegiatan ini dengan hasil tersedianya saluran derainase kiri kanan jalan yang dapat memperlancar aliran air dan menghindari kerusakan jalan akibat genangan air. Dengan capaian meningkatnya kapasitas pembangunan derainase dan gorong-gorong jalan.

(3) Pengelolaan Pendataan Saluran Derainase Kabupaten Bintan

Adapun pagu anggaran sebesar Rp. 207.970.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 229.021.174,- atau 96.07 %. Adapun output kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan Saluran Derainase Kab. Bintan saluran derainase jalan dan box culvert. Dengan hasil tersusunnya laporan pendataan saluran derainase Kab.Bintan. untuk capaiannya adalah meningkatnya Kapasitas pembangunan derainase dan gorong-gorong jalan..

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

❖ **Persentase Dariainase Jalan Dalam Kondisi Baik**

Panjang dariainase jalan yang terbangun pada tahun 2019 sebesar 78 % dari target 94 %.

b) Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja pada masing – masing kegiatan. Target 94 % tidak terpenuhi disebabkan keterbatasan APBD. Sehingga hasil yang bias dicapai hanya 78 %,

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.16.698.359.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.349.348.898,- atau (73.96%). Adapun capaian program kegiatan ini meningkatnya kapasitas Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan badan jalan/lapisan permukaan/aspal. Bahu jalan dan derainase jalan, dinding penahan tanah jalan dan jembatan. Dan diharapkan dari kegiatan ini adalah terpeliharanya jalan yang dapat meperpanjang umur jalan dan memperlancar arus transportasi.

Adapun program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Adapun total belanja pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.552.581.400,- dengan realisasi sebesar Rp.3.092.112.163,- atau 93.90 % dengan output dari kegiatan ini adaah terlaksananya pemeliharaan badan jalan/lapisan permukaan/aspal, bahu jalan dan derainase jalan, dinding penahan tanah jalan dan jembatan. Dengan hasil terpeliharanya jalan yang dapat

memperpanjang umur jalan dan memperlancar arus transportasi.

(2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan

Total belanja pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.715.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.9.604.993.467,- atau 96.07 % dengan output dari kegiatan ini adaah terlaksananya pemeliharaan berkala struktur jalan dan jembatan. Dengan hasil terpeliharanya jalan yang dapat memperpanjang umur jalan dan memperlancar arus transportasi.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Marginal)

Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Marginal) adalah kondisi ruas jalan sedang sampai dengan baik dari aspek kondisi namun tidak mantap secara aspek pemanfaatan atau sebaliknya. Prosentase panjang jalan mantap marginal s/d tahun 2019 adalah 47,936 %, total target panjang jalan yang akan dibangun s/d tahun 2019 adalah 47,936 %. (Persentase Mantap marginal) adalah pengurangan dari pesentase mantap sempurna. Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan capaiannya terpenuhi disebabkan oleh keterbatasan dana APBD Kabupaten Bintan.

2) Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (Tidak Mantap)

Untuk Tahun Anggaran 2019 indikator ini telah direvisi.

3) Jumlah Jembatan Yang Dibangun

Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menetapkan target pembangunan jembatan 1 buah, dan terealisasi 1 buah jembatan.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja pada masing – masing kegiatan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) Jumlah Jembatan Kabupaten yang di pelihara

Adapun Target Porsentase jembatan dalam kondisi baik ditahun 2019 sebesar 86.71 %, dan capaiannya 100 %. Memenuhi target dalam capaian kinerja di tahun 2019.

2) Jumlah Jembatan Kabupaten yang di pelihara

Adapun kondisi existing jumlah jembatan yang dipelihara sampai tahun 2019 adalah 1 unit jembatan. Di tahun 2019, kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan Melaksanakan Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan ditargetkan sebanyak 1 unit, dan teralisasi di .tahun 2019 ini sebanyak 1 unit. Hal ini dikarenakan jembatan yang ada masih dalam kondisi baik.

9). Program Pengendalian Banjir

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dalam rangka mengatasi permasalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat banjir yang terjadi. Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.3.283.1063.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.142.446.376,- atau 95,72%. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah terlaksananya pembangunan dinding pengaman tebing pantai.. Dengan hasil tersedianya dinding pengaman tebing pantai.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembangunan prasarana pengaman pantai.

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.995.792.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.917.675.668,- atau 92.16%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan dinding pengaman tebing pantai. Dengan hasil tersedianya dimding pengaman tebing pantai.

(2) Pemeliharaan dan normalisasi saluran/sungai

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.475.484.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.461.742.550,- atau 97.11%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan saluran derainase. Dengan hasil terpeliharanya saluran derainase untuk meperlancar aliran air dan pencegahan banjir.

(3) Pembangunan / Peningkatan dan Normalisasi Saluran dan Bangunan Pengendali Banjir.

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.811.826.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.763.028.158,- atau 97.31%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan saluran derainase. Dengan hasil terpeliharanya saluran derainase untuk memperlancar aliran air dan pencegahan banjir.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

❖ Jumlah Panjang Normalisasi Saluran/Sungai.

Kondisi existing saluran/sungai yang telah di normalisasi sampai tahun 2019 adalah sebesar 9.479 m'. Ditahun 2019 target penanganan yang direncanakan sebesar 20.000 m' dengan realisasi sebesar 9.479 m' atau sebesar 47.40% dari yang telah direncanakan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program ini terdapat permasalahan yang di hadapi pada anggaran yang tersedia dari keterbatasan APBD.

10) Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Jasa Konsrta Verifikasi Perizinan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perizinan. Adapun indikator kinerja dari program ini adalah sebagai berikut :

Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.1.106.257.700,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.908.083.476,- atau 82.09%. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan perizinan Dengan autput terlaksananya pengadaan peralatan laboratoriu, Dinas PUPR. Dengan hasil tersedianya biaya pengadaan peralatan laboratorium Bintsu adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengadaan Peralatan Pengujian Laboratorium Mutu Konstruksi

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.498.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.396.924.000,- atau 79.62%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengadaan peralatan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan. dengan hasil keluaran Tersedianya biaya pengadaan peralatan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan.

(2) Penunjang Pengelolaan Pengujian Laboratorium Mutu Konstruksi

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 209.831.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.207.605.577,- atau 98.94%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya operasional pengelolaan pengujian laboratorium mutu konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Bintan. Dengan hasil tersedianya operasional pengelolaan laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan.

(3) Penunjang Pengelolaan Pengujian Verifikasi Perizinan dan Jasa Konstruksi

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 192.016.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.189.207.500,- atau 98.54%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Proses verifikasi dan rekomendasi penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dan jasa konstruksi. Dengan hasil tersusunnya laporan monitoring dan penyelenggaraan perizinan bangunan gedung dan jasa konstruksi.

(4) Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 205.909.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.114.346.390,- atau 55.53%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pengawasan pembangunan bangunan gedung, dengan hasil tersedianya biaya operasional pengelolaan pengawasan pembangunan bangunan gedung.

11) Program Infrastruktur Sumber daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Program ini dilaksanakan oleh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka meningkatkan kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum dan ketersediaan energi. Adapun indikator kinerja dari program ini adalah sebagai berikut :

Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp.10.024.614.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.234.777.800,- atau 92.12%. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah Terlaksananya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi masyarakat dan rumah panel. Dengan hasil tersedianya

sarana air minum bagi masyarakat perdesaan dan sanitasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembangunan SPAM perdesaan

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.288.109.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.906.758.903,- atau 70.39%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Program penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat dan rumah panel dengan hasil keluaran Tersedianya Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Perdesaa dan sanitasi

(2) Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK-Penugasan)

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.991.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.945.490.036,- atau 70.93%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengembangan, Optimalisasi dan pembangunan SPAM, dengan hasil tersedianya bangunan dan infrastruktur SPAM.

(3) Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK-Reguler)

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.113.369.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.967.320.746,- atau 93.09%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengembangan SPAM IKK dengan hasil tersedianya bangunan dan infrastruktur SPAM IKK

(4) Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK-Affirmasi)

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.571.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.486.423.297,- atau 96.71%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Optimalisasi dan pembangunan SPAM dan pada kegiatan ini juga diharapkan dengan hasil tersedianya bangunan dan infrastruktur SPAM.,

(5) Penunjang Pengelolaan UPT Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 944.327.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.891.806.354,- atau 94.44%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya operasional UPT Air Bersih dan pembinaan pengelolaan SPAM IKK dan prdesaan Kab. Bintan, dan dengan hasil terkelolanya sarana dan prasarana SPAM pedesaan dan perkotaan di Kab. Bintan.

(6) Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK)

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 243.808.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.185.283.964,- atau 76.00%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penunjang pengelolaan kegiatan pembangunan Infrastruktur Air Minum (dak) Dengn hasil tersedianya penunjang pengelolaan kegiatan pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) .

(7) Perencanaan Teknis (DED) Sarana dan Prasarana SPAM

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 873.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.851.694.500,- atau 97.56%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Perencanaan Teknis (DED) Sarana dan Prasarana SPAM Dengan hasil tersedianya perencanaan Teknis (DED) Sarana dan Prasarana SPAM.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik.

Untuk Tahun Anggaran 2019 indikator ini telah direvisi.

2) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perdesaan.

Kondisi existing persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sampai tahun 2019 sebesar 43.993% dari total jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Bintan. Di tahun 2019, Dengan demikian target indikator kinerja untuk tahun 2019 dapat dipenuhi dengan baik. Dengan terpenuhinya target di tahun 2019, maka persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih mengalami peningkatan sebesar 100%. Untuk jumlah sambungan rumah (SR) di perdesaan, kondisi existing sampai tahun 2019 sesuai RPJMD.

3) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan.

Sedangkan untuk jumlah saluran rumah (SR) di perkotaan, kondisi existing sampai tahun 2019 sesuai

RPJMD 2016 – 2021 sebesar 37%. Target penanganan di tahun 2019 sebesar 39.69 % dengan realisasi pelaksanaan sebesar 43.93% kawasan perkotaan realisasi pelaksanaan telah memenuhi target dari rencana penanganan yaitu sebesar 100 % dari yang direncanakan pada tahun 2019.

b. Permasalahan Dan Solusi

Pada pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program ini terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi. Adapun permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Pekerjaan Pembangunan SPAM Kp. Sei.Lepan Desa Kec. Seri Kuala Lobam (1 Paket) permasalahan terdapat pada akses jalan menuju lokasi yang belum memadai
- 2) Pembangunan SPAM arana Air Bersih Perumahan Lobam Mas Asri Desa Kec. Seri Kuala Lobam (1 Buah) terdapat permasalahan pada jaringan yang banyak rusak.

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, diambil langkah-langkah sebagai berikut : Untuk pekerjaan yang tidak terdapat akses jalan untuk segera dianggarkan pada anggaran tahun yang akan datang. Dan pada jaringan yang terdapat kerusakan agar segera diperbaiki.

12). Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan daerah Sesuai Rencana Tata Ruang.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dalam rangka Peningkatkan kualitas Pekerjaan Umum. Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan

program ini sebesar Rp.1.492.002.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.322.806.370,- atau 88.06%. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah Peningkatnya kualitas dan penataan kawasan daerah sesuai Rencana Tata Ruang :

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

1. Penyusunan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.988.204.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.900.090.215,- atau 91.09%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan pusat pemerintahan Kab, Bintan. Dengan hasil tersedianya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan pusat pemerintahan.

2. Monitoring dsan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.194.642.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.193.090.484,- atau 99.20%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Mopnitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan hasil tersusunnya laporan monitoring dan pengendalian penataan ruang yang akuntabel.

3. Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.309.156.100,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.229.500.671,- atau 74.24%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan hasil tersusunnya laporan monitoring dan pengendalian penataan ruang yang akuntabel.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2018 untuk program ini adalah :

1) Persentase Bangunan Kantor Pemerintah Yang Terbangun

2) Persentase Bangunan Kantor Pemerintahan Dan Kondisi Baik

Kondisi existing persentase pelayanan yang terlaksana sampai tahun 2019 adalah sebesar 100%. Ditahun 2019 target peningkatan kualitas pemeliharaan dan pembangunan fisik yang rencanakan sebesar 65% dengan realisasi sebesar 88.8% dari yang telah direncanakan.

b. Permasalahan Dan Solusi

Pada pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program ini tidak terdapat permasalahan yang dihadapi.

13). Program Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dalam rangka meningkatnya kapasitas peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan. Dengan alokasi dana sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.297.436.000,- atau 99.15%. *Outcome* yang

diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kualitas dan pengendalian pemanfaatan kawasan daerah sesuai Rencana Tata Ruang.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil dari program ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

1. Perencanaan Teknis (DED) Gedung Kantor

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.297.436.000,- atau 99,15%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Perencanaan Teknis (DED) Gedung Kantor, dengan hasil tersedianya dokumen perencanaan teknis (DED) gedung kantor.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Total Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.14.785.543.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.005.299.933,- atau 94.72%. Adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembangunan dinding penahan tanah, penataan lanskap, partisi ruangan, parkir, papan informasi, gudang arsip, balai pertemuan masyarakat, batu miring dan penambahan ruang, dengan hasil tersedianya bangunan dinding penahan tanah, penataan lanskap, partisi ruangan, parkir, papan informasi, gudang arsip, balai pertemuan masyarakat, batu miring dan penambahan ruang

b. Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan Program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Tata Ruang.

3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan memiliki Struktur Organisasi sendiri seperti Badan, Dinas, Kantor dan Instansi lain yang berada di Kabupaten Bintan. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan mendapatkan alokasi dana pada Tahun 2019 sebesar Rp. 127.793.538.892,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.778.455.900,- atau 95,29%. Dengan Jumlah Program sebanyak 12 dan Kegiatan sebanyak 47 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 3.593.904.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.058.771.378,- atau 85,11%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 11 Kegiatan. Adapun capaian programnya yaitu Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan uraian sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.900.000,- atau 99 %. Didalam kegiatan ini, segala kebutuhan benda pos terpenuhi. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya Materai dan Perangko (1 Tahun). Hasil (Outcome) dari

kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kebutuhan Benda Pos (1 Tahun). Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 148.171.750,- atau 80,09%. Didalam kegiatan ini, segala kebutuhan sarana listrik, telepon, internet, majalah dan Koran terpenuhi. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya sarana listrik, telepon, internet, majalah dan koran. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet, majalah dan koran. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(3) Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 461.112.000,- dengan realisasi fisik 100% dan Keuangan sebesar Rp. 308.748.000,- atau 66,96%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi perkantoran. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Honorer Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.882.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 88.352.550,- atau 97,22%. Output

dari kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kondisi kebersihan kantor. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(5) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 196.775.975,- atau 98,39%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya alat tulis kantor. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk keperluan kantor. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.640.400,- dengan realisasi fisik 100% dan Keuangan sebesar Rp. 101.530.000,- atau 99,89%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 65.165.100,- atau 86,89%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Hasil

(Outcome) dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(8) Penyediaan bahan logistik kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 1.593.007.820,- atau 99,56%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas untuk kendaraan dinas dan operasional selama 1 tahun. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas untuk kendaraan dinas dan operasional selama 1 tahun. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kendaraan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(9) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.270.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 156.014.500,- atau 63,61%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan minuman harian non PNS, peserta rapat dan tamu. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan konsumsi harian non PNS, peserta rapat dan tamu. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.000.000,- dengan realisasi fisik 100%

dan keuangan sebesar Rp. 248.880.683,- atau 56,56 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti rapat/koordinasi/konsultasi ke luar daerah. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Aparatur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(11) Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 142.225.000,- atau 76,88%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah . Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Meningkatnya koordinasi Dalam Daerah. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu pada masing – masing kegiatan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.263.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.203.333.970,- atau 97,34%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 6 Kegiatan.

Adapaun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan uraian sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 154.000.000,- atau 75,12%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan kendaraan operasional. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya operasional. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kabupaten Bintan.

(2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 497.100.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 494.711.800,- atau 99,52%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peralatan gedung kantor. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya peralatan gedung kantor. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 266.550.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 266.398.000,- atau 99,94%. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(4) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 925.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 924.082.870,- atau 92,90%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan peralatan kerja dan pembuatan STNK. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional / peralatan kerja dan tersedianya STNK. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 144.864.500,- atau 96,58%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(6) Pembangunan gedung kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 219.276.800,- atau 99,67%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan gedung kantor. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah terpenuhinyakebutuhan untuk kantor. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu pada masing – masing kegiatan.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 15.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp 15.043.600,-atau 99,76%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 1 Kegiatan. Adapaun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya Kapasitas Disiplin Aparatur, dengan uraian sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.080.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp 15.043.600,-atau 99,76%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pakaian batik. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah terpenuhinyakebutuhan seragam batik. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu pada masing – masing kegiatan.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 235.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 117.184.510,-atau 49,87%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 1 Kegiatan. Adapaun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan uraian sebagai berikut :

(1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp 117.184.510,-atau 49,87%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu pada masing – masing kegiatan.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 225.986.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.194.858,- atau 92,57%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 1 Kegiatan. Adapaun Capaian Programnya

yaitu Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan uraian sebagai berikut :

(1) Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 225.986.600,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 209.194.858,- atau 92,57%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

Prmasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu pada masing – masing kegiatan.

6) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Program Penyehatan Masyarakat mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 6.674.809.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.492.290.900,- atau 97,27%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 4 Kegiatan. Adapaun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya Kapasitas peningkatan penyehatan lingkungan permukiman, dengan uraian sebagai berikut :

(1) Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Limbah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 269.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 251.638.539,- atau 93,27%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penunjang pengelolaan instalasi air limbah. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah terkelolanya sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi (IPAL, SEPTIC TANK KOMUNAL). Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Kabupaten Bintan.

(2) Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.520.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 3.492.796.155,- atau 99,23 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan saluran dariainase lingkungan. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah terbentuknya alur saluran/sungai yang baik (memenuhi kaidah sistem pengaliran air) dan memperlancar serta meningkatkan debit aliran. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut:

- Pembangunan Dariainase Kp. Tanjung Kapur Kec. Gunung Kijang (1 Paket) pagu anggaran sebesar Rp. 170.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 169.803.000
- Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Gg. Damai RT. 002 RW. 002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur pagu anggaran

- sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 84.938.000
- Pembangunan Dariainase RT.01 RW.03 Kp. Kolam Renang Sembat Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 84.903.000
 - Pembangunan Dariainase Perum. Lobam Bestari RT.01 RW.06 Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Koala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 170.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 169.845.000
 - Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan RT. 008 RW. 002 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 29.934.000
 - Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Jl.Rosela RT. 001 RW. 001 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 127.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 127.384.000
 - Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Gg. Kemunting I RT. 004 RW. 003 Kel. Gunung Lengkuas Kec.Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 127.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 127.329.000
 - Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Gg. Granit RT. 001 RW. 002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp.153.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 152.816.000
 - Peningkatan Saluran Dariainase Lingkungan Gg.Garuda IV RT. 003 RW. 001 Blok A Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam pagu

anggaran sebesar Rp. 70.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 69.664.834,23

- Pembangunan Dariainase RT.003 RW.020 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 47.907.000
- Pembangunan Dariainase RT.001 RW.005 Gg. Al Hasanah Kel. Kijang Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 47.922.000
- Pembangunan Dariainase RT.002 RW. 010 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 47.911.000
- Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Kp. Pisang RT. 002 RW. 009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 47.863.000
- Pembangunan Dariainase RT.002 RW.016 Kp. Nosari Barat Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 162.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 161.889.000
- Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan RT. 006 RW. 002 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 34.935.000
- Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Jl.Panglima Husein Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Rp. 25.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 24.896.000

- Pembangunan Dariainase RT.008 Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir (33M x 50CM x 60CM) pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 29.934.000
- Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan RT. 004 RW. 001 Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 29.937.000
- Pembangunan Duiker Saluran Dariainase Lingkungan Kp.Baru RT.002 RW.001 Kel.Sei Lekop Kec.Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 84.851.000
- Normalisasi Dariainase RT.02 Kp. Sidoarjo Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 127.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 127.393.000
- Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Kp.Nosari Kebun Nanas RW.15 dan RW.16 Kel. Kijang Kota Kec.Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 199.837.000
- Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Kp. Sidodadi RT. 003 RW. 003 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 79.880.000
- Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Kp. Budi Mulya Gg. Seta RT. 002 RW. 004 Kel. Kijang Kota Kec.Bintan Timur (Lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp. 181.750.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 181.608.000

- Pembangunan/ Peningkatan Saluran Dariainase Lingkungan Kp. Pisang RT. 001 RW. 009 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 69.840.000
- Pembangunan Dariainase Lingkungan RT 001 RW 24 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 178.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 177.860.000
- Pembangunan Dariainase Jalan Kp. Budi Mulya Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 177.770.000
- Pembangunan Dariainase Lingkungan RT. 003 RW. 004 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 135.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 134.610.000
- Pembangunan Dariainase Kp. Kolom Enam RT. 004 RW 022 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 155.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 155.360.000
- Pembangunan Dariainase Jln. Lembah Sari RT. 012 RW. 012 Kel. Tanjung uban selatan Kec. Bintan utara pagu anggaran sebesar Rp. 103.700.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 103.480.000
- Pembangunan Saluran Dariainase Lingkungan Kp Bukit Batu RT 005 RW 003 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 161.300.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 161.020.000

(3) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK AFFIRMASI)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.490.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 2.377.702.173,- atau 95,49 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan dan pengembangan infrastruktur sanitasi. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya infrastruktur sanitasi septictank komunal bagi masyarakat pedesaan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

- Pembangunan Septictank Komunal Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 861.465.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 859.270.607
- Pembangunan Septictank Komunal Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 767.070.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 751.607.096
- Pembangunan Septictank Komunal Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 861.465.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 836.207.508

(4) Penunjang Pengelola Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK AFFIRMASI)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 395.009.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 370.154.033 atau 93,71 %. Output

dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan dan pengembangan infrastruktur sanitasi. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya infrastruktur sanitasi septictank komunal bagi masyarakat pedesaan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

7) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 78.006.022.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 75.332.073.400,- atau 96,57%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 15 Kegiatan. Adapaun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya kapasitas pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, dengan uraian sebagai berikut :

(1) Pembangunan Jalan Semenisasi /Paving Block dan Buras

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.186.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 23.976.038.049,- atau 99,13 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan jalan lingkungan, semenisasi/paving block/buras dan sarana pendukung. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya jalan lingkungan kawasan perumahan dan permukiman. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

- Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Triokom Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 747.840.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 706.186.982
- Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Panglima Lida Belang RT.006 RW.03 Desa Kampung Hilir Kec. Tambelan pagu anggaran sebesar Rp. 874.620.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 850.175.291
- Pembangunan Semenisasi RT.01 RW.04 Kel. Sei Nam Darat Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 832.095.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 785.351.080
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jl. Gereja Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang (Lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp. 196.185.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 195.940.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jl. Melur RT.006 RW.003 Berakit Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 196.185.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 195.910.000
- Pembangunan Paving Block Jl. Anastra RT.02 RW.03 Kp.Kerajaan Kel. Kota Brau kec. Teluk Sebong (Lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp. 196.140.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 195.870.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Martabe Kp. Baru RT.02 RW.03 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara pagu anggaran sebesar Rp. 140.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 140.150.000

- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Lele RT.01 RW.01 Tanjung Uban Timur Kec. Bintang Utara pagu anggaran sebesar Rp. 93.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.360.000
- Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Perum. Bukit Mas Indah RT. 004 RW.07 Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 167.895.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 167.780.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Teratai I RT.003 RW.002 Desa Teluk Sasah kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 94.095.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 94.000.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Jalak I RT.005 RW.02 Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 167.895.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 166.520.000
- Pembangunan Jalan Beton Bertulang Perum. Permata Bintang Indah I RT.01 RW.05 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara pagu anggaran sebesar Rp. 112.545.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 111.450.000
- Pembangunan Paving Block Gg. Bandeng I Perumahan Telaga Surya RT.04 RW.04 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara pagu anggaran sebesar Rp. 93.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.230.000
- Pembangunan Paving Block Gg. Garuda 2 RT.04 RW.01 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintang Utara

- pagu anggaran sebesar Rp. 196.140.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 196.020.000
- Pemabngunan Paving Block Gg. An Nur II RT.07 RW.02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 196.140.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 196.010.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Rambai RT.01 RW.03 Kel.Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 186.960.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 186.810.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Kuantan Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 167.895.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 167.720.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan lingkaran Gg. Melati RT.03 RW.03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 140.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 140.140.000
 - Pembangunan Paving Block Gg. Cermai Kp. Sidomulyo Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 168.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 167.840.000
 - Pembangunan Paving Block Gg. Rawa RT.001 RW.06 Kp. Kuala Lumpur Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 139.860.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 139.710.000
 - Pembangunan Jalan Sawah Desa Kp. Hilir Kec. Tambelan pagu anggaran sebesar Rp. 193.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.840.000

- Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Lingkungan Kp. Gudang Arang RT.10 RW.01 Gin Besar Kec. Bintan Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 143.325.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 142.360.000
- Pembangunan Jalan Lancang ke Batu Asok Kel. Teluk Sekuni Kec. Tambelan pagu anggaran sebesar Rp. 193.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 192.950.000
- Pembangunan jalan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Tembus Taman Kota RT.01 RW.06 Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 187.575.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 187.450.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan R.A . Kartini RT.04 RW.01 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 163.590.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 163.410.000
- Pembangunan Paving Block Gg. Teratai 2 RT.03 RW.01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 193.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 192.860.000
- Pembangunan Paving Block RT.04 RW.02 Kp. Jawa Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 193.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 193.140.000
- Pembangunan Paving Block Gg. Wisata 3 Km 20 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 199.920.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 199.800.000

- Pembangunan Paving Block RT.03 RW.03 Sembat Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 193.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 193.130.000
- Pembangunan Paving Block Gg. Nomad II RT.01 RW.02 Kel. Gunung lengkuas Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 93.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.180.000
- Pembangunan Semenisasi Perumahan Mawadah Km.17 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 93.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.180.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Sisipan Damai RT.04 RW.01 Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 187.575.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.440.000
- Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Block RT.01 RW.01 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 49.980.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 49.540.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Masuk Gereja HKBP RT.01 RW.04 Kp. Harapan Desa Sebong Perih Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 93.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.380.000
- Pembangunan Paving Block RT.03 RW.01 Kp. Solor Desa Sebong Perih Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 93.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.060.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Mente RT.01 RW.02 Kp. Sakera Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara pagu anggaran sebesar Rp.

- 140.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
139.940.000
- Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Perum. Industri RT.01 RW.02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 140.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
140.010.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Mulyasari 1 RT.12 RW.02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 93.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
93.350.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Jl. Mulyo Sari RT.12 RW.02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 140.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
140.000.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Mak Alang RT.05 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 116.850.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
116.560.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Taman Sari RT.02 RW.02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 163.590.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
163.430.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Mangga RT.02 RW.01 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 163.590.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 163.470.000

- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Tok Sahdan RT.01 RW.02 Kel. Tanjung Ubang Kota Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 126.075.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 125.960.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Al Mursyid RT.04 RW.01 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 116.850.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 116.390.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Bambu 1 RT.04 RW. 01 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 83.640.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 83.500.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. H. Selamat RT.05 RW.02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 102.705.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 102.350.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Lengkung RT.01 RW.04 Jl. Sei Nam Darat Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 93.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.370.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Menuju Jalan Lintas Korindo Gg. Semprong Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 93.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.340.000
- Pembangunan Paving Block Jl. Sisno RT.01 RW.02 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 93.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.130.000

- Pembangunan Paving Block Gg. Dahlia Kp. Jawa RT.01 RW.03 Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 93.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.110.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi RT.03 RW.05 Jl. Naga Sido Mulyo Gg. Selaras Km. 20 RT.01 RW.04 Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 93.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.360.000
- Pembangunan Semenisasi Gg. Gabus RT.03 RW.02 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 93.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.350.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jl. Penepat Desa batu Lepuk Kec. Tambelan pagu anggaran sebesar Rp. 98.900.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 98.630.000
- Pembangunan Semenisasi Gg. Mawar RT.05 RW.01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 186.960.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 186.780.000
- Pembangunan Paving Block RT.03 RW.02 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 93.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.000.000
- Pelebaran Paving Block Jl. Pari RT.002 RW.003 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 93.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.060.000
- Rabat Beton Bertulang RT.003 RW.020 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp.

- 186.960.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
186.720.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang
Gg. Camar II RT.14 RW.04 Desa Toapaya Selatan
Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp.
140.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
140.160.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang
Desa Ekan Aculai Kec. Teluk Sebang pagu
anggaran sebesar Rp. 186.960.000 dengan
realisasi sebesar Rp. ,- 186.890.000
 - Pembangunan Semenisasi Buras Beton RT.04
RW.20 Kp. Sidodadi Kel. Kijang Kota Kec. Bintan
Timur pagu anggaran sebesar Rp. 180.195.000
dengan realisasi sebesar Rp. ,- 180.080.000
 - Pembangunan Jalan Paving Blok Gg. Purnama Kp.
Beringin Indah RT 001 RW 014 Kec. Kijang Kota
Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp.
148.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
142.670.000
 - Pembangunan Jalan Paving Block Jalan Makam
RT.09 RW.04 Kp. Banjar Desa Gunung Kijang Kec.
Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp.
196.140.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
195.990.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang
Gg. Bambu 2 RT.04 RW.01 Kel. Tanjung Uban
Timur Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar
Rp. 126.075.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
125.950.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi dua Lokasi Kp.
Harapan RT.01 RW.04 Desa Sebang Perih Kec.

- Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 93.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 93.100.000
- Pembangunan Jalan Paving Block Jl. Asoka Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 172.620.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 172.480.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Buras Beton Jl. Arjuna 1 RT.02 RW.02 Kp. Sidodadi Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 186.960.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 186.860.000
 - Pembangunan Paving Block Jalan Kp. Siantan RT.001 RW.003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang pagu anggaran sebesar Rp. 134.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 134.370.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jl. Cendariawasih 11 RT.02 RW.03 Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 74.415.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 74.300.000
 - Pembangunan Jalan Paving Block RT.03 RW.02 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 93.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 93.190.000
 - Pembangunan Jalan Paving Blok Gg. Kencana Kp. Beringin Indah RT 001 RW 014 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 142.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 142.690.000
 - Pembangunan Jalan Paving Blok Gg. Purnama Kp. Beringin Indah RT 001 RW 014 Kec. Kijang Kota

- Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 148.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 142.670.000
- Pembangunan Jalan semenisasi jl Jahe Kp Lengkuas RT 04 RW 02 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 190.650.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 190.430.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Gg Bima 2 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 191.880.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 189.620.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan di RT 02 RW 04 Surau AL-IJITHAD Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 142.680.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 141.100.000
 - Pembangunan jalan Lingkungan paving Blok Kp Sukamaju RT 002 RW 24 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 162.120.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 162.020.000
 - Pembangunan jalan Lingkungan paving Blok Gg Pelita 3 RT 002 RW 014 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 172.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 172.070.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg Taqwa 2 Kp Nosari Timur Kel Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 153.750.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 153.410.000

- Pembangunan Paving Block Gg. Flaminggo RT 02 RW 02 Kp. Jawa Simpang Korindo Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 97.440.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 97.300.000
- Pembangunan jalan Lingkungan paving Blok Gg Pancur RT 001 RW 002 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 163.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 163.550.000
- Pembangunan jalan Lingkungan paving Blok RT 003 RW 002 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 191.520.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 191.460.000
- Pembangunan jalan Lingkungan paving Blok Masuk Gg Natuna RT 001 RW 002 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 162.120.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 162.070.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Sayur Kp.Wacopek RT 001 RW 004 Kel.Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 194.340.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 194.170.000
- Lanjutan Pembangunan Jalan Linkungan Paving Blok dan Dariainase GG Pala 1 Kp Lengkuas RT 001 RW 002 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 170.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 163.530.000

- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Raja Husen RT.04 RW.01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 193.110.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 193.010.000
- Semenisasi dan Batu Miring Gg. Cheli RT 13 RW 04 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 143.850.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 143.780.000
- Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok Gg Muris RT 012 RW 004 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 182.280.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 181.890.000
- Pembangunan Jaln Semenisasi Gg Pucuk Merah RT 015 RW 004 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 182.040.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 181.610.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg Walet RT 05 RW 02 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 198.030.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 195.190.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Perum Mawaddah RT 05 RW 02 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 198.030.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 197.880.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Menuju pos Yandu Bhakti Ananda RT 7 Rw 2 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 196.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 196.720.000
- Pembangunan Jalan semenisasi Gang Durian RT 05 RW 02 Toapaya Asri Kec. Toapaya pagu

anggaran sebesar Rp. 98.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 98.300.000

- Pembangunan Jalan Semenisasi kampung sumber karya RT 14 RW 05 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 95.940.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 95.860.000
- Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok Kamboja 2 RT.011 RW.003 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 178.080.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 177.780.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi RT.013 RW.004 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 178.350.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 177.880.000
- Pembangunan jalan Lingkungan Paving Blok Gg.Cendariawasih RT.007 RW.002 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 178.080.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 177.560.000
- Pembangunan jalan Semenisasi Gg. Sejahtera RT.013 RW.004 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 193.110.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.960.000
- Pekerjaan Jalan Lingkungan Paving Blok Gg. Mawar RT.012 RW.004 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 193.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.820.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Salak RT.05 RW.02 Toapaya Asri Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 188.190.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.790.000

- Pembangunan Jalan Semenisasi Jl Nenas RT 007 RW 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (Lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp. 182.040.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 181.700.000
- Pembangunan Jaln Semenisasi Jl Cempedak RT 007 RW 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (Lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp. 182.040.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 181.590.000
- Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok Gg Ismail Musa Cikolek RT 002 RW 001 Toapaya Utara Kecamatan Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 182.280.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 182.010.000
- Pembangunan Semenisasi Gg Karet 1 RT 002 RW 001 Toapaya Utara Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 182.280.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 181.780.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jl Sari RT 006 RW 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 182.040.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 181.750.000
- Pembangunan Paving Blok Jalan Kapas Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 191.520.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 191.420.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi JL. Mawadah KM. 17, Perumahan Mawadah Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 195.570.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 195.360.000
- Pekerjaan Jalan Semenisasi Kp. Boyan Cikolek Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp.

- 173.430.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
173.010.000
- Pekerjaan Jalan Lingkungan Paving Blok Jl. Kelapa RT.011 RW.003 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 193.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.800.000
 - Pekerjaan Jalan Semenisasi Jl. Sengon RT.006 RW.003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp. 191.880.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 191.520.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Tiup-tiup RT 009 RW 004 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang (Lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp. 178.350.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 178.120.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Jl. Jawa Gg. Kenaga Kp. Banjar Lama RT 003 RW 004 Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 178.350.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 178.010.000
 - Pembangunan Paving Blok GG Nuri RW 05 Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 142.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 142.460.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Kuansing Buyu Kec. Teluk Bintang pagu anggaran sebesar Rp. 191.880.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 191.720.000
 - Pembangunan Paving Blok Jl Mawadah Gg Durian Blok D RT 05 RW 05 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 191.520.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 188.900.000

- Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Block RT 02 RW 05 Kp.Sidoharjo Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 144.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 144.290.000
- Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Block Jalan Menuju Pemakaman Umum Kp.Teluk Dalam RT 01 RW 03 Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 198.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 198.130.000
- Pekerjaan Jalan Semenisasi Gg. Nanas Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 178.350.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 178.180.000
- Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi Gg. Ramen Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 193.110.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.940.000
- Pembangunan Semenisasi Perumahan Lobam Bestari RT 2 RW 1 Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 191.880.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 191.670.000
- Pembangunan Semenisasi Perumahan Taman Surya RT 3 RW 4 Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 191.880.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 191.490.000
- Pembangunan Paving Blok Gang Kenanga RT 1 RW 1 Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 191.880.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 191.700.000
- Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok Perumahan Bukit Mas Indah kel. Teluk Lobam

- Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 96.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 96.360.000
- Pembangunan Paving Blok Perumahan Garden View Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 191.520.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 191.340.000
 - Semenisasi Jalan Anastra 1 dan 2 Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 191.880.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 191.390.000
 - Pembangunan Semenisasi Jalan Menuju Surau Al Fadillah Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 191.880.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 191.410.000
 - Pembangunan Paving Blok Gg Yayasan Arrahman Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 47.880.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 47.710.000
 - Pembangunan semenisasi GG Durian RT 04 RW 01 Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 145.140.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 144.990.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg Nurul Haq Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 198.030.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 197.890.000
 - Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jl. An Nur Gg. Rahmat RT.07/RW.02 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 164.820.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 164.620.000

- Pembangunan Jalan Semenisasi Jl. Pengudang Gg. Pisang Desa Sri Bintang Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 119.310.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 119.230.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Balau Berakit RT.004 Kec.Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 193.110.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.980.000
- Pembangunan jalan Semenisasi Penghijauan Desa Sebong Pereh Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 193.110.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.540.000
- Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Flamboyan Senggiling Desa Sri Bintang Kec. Teluk sebong pagu anggaran sebesar Rp. 193.110.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.880.000

(2) Pembangunan Talud/Dinding Penahan Tanah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.898.650.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 1.869.147.410,- atau 98,45 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan talud/dinding penahan tanah. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya bangunan talud/dinding penahan tanah. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

- Pembangunan Dinding Penahan Tanah Area Masjid Baitul Makmur Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp.

1.672.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
1.495.194.338

- Pembangunan Dinding Penahan Tanah Gg. Batas RT.01 RW.01 Kp. Jati Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 193.230.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 193.140.000

(3) Pembangunan Pelantar/ Tambatan Perahu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.265.350.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 1.262.913.700 atau 99,81 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan pelantar/tambatan perahu. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya bangunan pelantar/tambatan perahu. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

- Pembangunan Pelantar Permukiman JL. KP. Panglong RT.01 RW.01 Desa Berakit Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 199.112.400 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 198.682.000
- Pembangunan Pelantar Permukiman Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 100.958.400 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 86.859.000
- Pembanguna Pelantar Permukiman RT. 001 RW.001 Desa Mantang Besar Kec. Mantang pagu anggaran sebesar Rp. 84.132.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 84.050.000

- Pembangunan Pelantar Permukiman RT. 04 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 179.481.600 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 179.269.000
- Pembangunan Pelantar Permukiman Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 100.958.400 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 100.898.000
- Rehab Berat Pelantar Permukiman RT.004 RW.003 Desa Mantang Besar Kec. Mantang pagu anggaran sebesar Rp. 47.674.800 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 47.482.000
- Pembangunan Pelantar Permukiman RT. 04 RW.01 Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 96.076.800 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 95.832.000
- Pembangunan Pelantar Permukiman RT. 07 RW. 04 Desa Numbing I Kec. Bintang Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 179.481.600 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 179.397.000
- Pembangunan Pelantar Permukiman RT. 01 RW. 01 Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 176.667.200 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 176.578.000

(4) Penunjang Kegiatan RTLH

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 111.750.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 83.820.135,- atau 75,01 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya oprasioanal dukungan teknis pelaksanaan program DAK Desa/Kelurahan, RTLH dan penanggulangan

kemiskinan. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya oprasioanal dukungan teknis pelaksanaan program DAK Desa/Kelurahan, RTLH dan penanggulangan kemiskinan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(5) Penataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.601.130.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 4.554.484.199,- atau 98,99 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pematangan lahan dan kegiatan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya pematangan lahan dan kegiatan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

- Pematangan Lahan Rumah Tahfiz Desa Teluk Bakau , Kecamatan Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 325.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 290.190.000
- Pembangunan Sarana RTH Kolam Kijang (Lanskap dan Pedestrian) Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp.

3.128.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
2.929.101.354

- Land Clearing Rumah Khusus Pengudang Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 190.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 189.611.000
- Pembangunan Rumah jaga Kolam (Air Mancur) Kijang Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 508.500.000

(6) Penunjang Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 125.340.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 77.122.893,- atau 61,53 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penunjang program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) Kabupaten Bintan. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya penunjang program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) Kabupaten Bintan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(7) Penunjang Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 129.505.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 80.966.742,- atau 62,52 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penunjang kegiatan pembangunan infrastruktur

permukiman (PIP) Kabupaten Bintan. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya penunjang kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman (PIP) Kabupaten Bintan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(8) Penunjang Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK-AFFIRMASI)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 444.192.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 338.075.008,- atau 76,11 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya oprasioanal kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya (DAK-AFFIRMASI). Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya oprasioanal kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya (DAK-AFFIRMASI). Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(9) Penunjang Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 594.765.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 512.702.350,- atau 86,20 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penunjang kegiatan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya penunjang kegiatan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Kelompok Sasaran pada

kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(10) Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 22.088.700,- atau 40,16 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya operasional kegiatan peningkatan kualitas BSPS bagi MBR. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional kegiatan peningkatan kualitas BSPS bagi MBR. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(11) Pendataan Perumahan di Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 476.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 438.441.160,- atau 92,11 %. Output dari kegiatan ini adalah diperoleh gambaran kondisi perumahan dan permukiman daerah berdasarkan data dan informasi. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(12) Penunjang Kegiatan sertifikasi Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

189.722.630,- atau 78,45 %. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pada seksi sertifikasi perumahan. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya rekomendasi dokumen sertifikasi perumahan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan.

(13) Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman untuk Kepentingan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.319.465.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.772.689.875,- atau 96,43 %. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pembangunan prasarana dan sarana gedung pertemuan, TK, lapangan bola, lapangan volley, gedung pemuda, fasum dan gerbang. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya pembangunan prasarana dan sarana gedung pertemuan, TK, lapangan bola, lapangan volley, gedung pemuda, fasum dan gerbang. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

- Pembangunan Lapangan Bola Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam (Lanjutan) (Tahap III) (1 Paket) pagu anggaran sebesar Rp. 7.710.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 7.364.726.503
- Pembangunan Gedung Pertemuan TK Antam Kijang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu

anggaran sebesar Rp. 962.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 863.803.315

- Pembangunan TK Pembina Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Tahap 1) pagu anggaran sebesar Rp. 3.255.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 3.070.097.663
- Pembangunan Gerbang Rumah Bahagia Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 175.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 174.810.000
- Pembangunan Gedung Sekretariat Pemuda Kp. Beringin Indah Kijang Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 89.440.000
- Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Pemuda KM. 20 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 89.720.000
- Pembangunan Balai Pertemuan Masyarakat Kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 142.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 142.280.000
- Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum RT.06 RW.03 Lobam Mas Kec. Seri kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 44.940.000
- Peningkatan sarana dan prasarana Lapangan Futsal Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 177.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 177.530.000
- Pembangunan Paving Block Balai Pertemuan Kp. Nosari RT. 01 RW.16 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan

- Timur pagu anggaran sebesar Rp. 135.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 134.780.000
- Pembangunan Panggung dan Awning Rumah Adat Tambelan Desa Kampung Hilir Kec. Tambelan (6,5 x 7) pagu anggaran sebesar Rp. 175.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 172.900.000
 - Rehab Atap Taman Kota Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 89.780.000
 - Rehab Sanggar Krida Budaya Jl Wisata Bahari Kp taman Kota RT 01 RW 04 Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 79.550.000
 - Pembangunan Gapura RT 002 RW 001 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung kijang pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 59.810.000
 - Peningkatan Balai Pertemuan Kp. Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 199.920.000
 - Pembangunan Pendestrian Jl Hang Tuah Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 320.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 278.949.590
 - Pembangunan Tugu Mesjid raya Tanjung Uban Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 440.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 416.157.696

(14) Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.466.845.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.105.321.001,- atau 95,22 %. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pembangunan sarana prasarana (Masjid/ Surau/ Mushalla, TPQ, Gereja, Kelenteng/Vihara). Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya pembangunan sarana prasarana (Masjid/ Surau/ Mushalla, TPQ, Gereja, Kelenteng/Vihara). Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut:

- Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Al Hasanah Sei Datuk Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 488.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 476.557.515
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Surau AL Khair jl. Kp. Sukamaju (Keke Tengah) RT.02 RW.024 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 141.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 140.650.000
- Pembangunan MCK dan Kamar Mandi Panti Asuhan Miftahul Hasanah Kp. Nosari Timur RT.003 RW.015 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 39.650.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Surau Asshirat Gg. Garuda Km.19 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur pagu anggaran sebesar

Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,-
49.680.000

- Peningkatan Sarana Prasarana Surau Al Ikhlas Barek Motor Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 70.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 70.400.000
- Pembangunan Paving Halaman Surau Nurul Hidayah RT. 01 RW. 01 Sei Jati Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 159.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 159.700.000
- Pembangunan Tempat Wudhu Surau Nurul Huda Kp. Tanjung Paku RT.04 RW 02 Desa Numbing Kec. Bintang Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.790.000
- Pembangunan Toilet Gereja RT. 008 Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir pagu anggaran sebesar Rp. 63.450.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 63.320.000
- Pembangunan Gedung Babulhairot Surau Nurul Qomar RT.2 RW 5 Sido Mulyo Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.560.000
- Pemasangan Keramik TPQ Al Mukadimmah Korindo Kel. Sei Lekop Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 29.940.000
- Renovasi Mesjid Al Azhar RT. 06 RW 04 Kp. Batu Licin Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur

pagu anggaran sebesar Rp. 131.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 131.520.000

- Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Baitullah RT. 01 RW. 03 Kel. Sungai Enam Kec. Bintan Timur (Lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp. 141.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 140.930.000
- Pembangunan Paving Block Halaman Surau Jamiatul Muslimin RT. 02/RW. 01 Kp. Jati Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 169.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 169.080.000
- Pembangunan WC/Toilet KB RA Amriyadus Sholihin, Jl. Nusantara Km. 24 Kp. Budi Mulya RT. 01 RW. 04 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 39.930.000
- Peningkatan Sarana Prasarana Masjid Al Musabirin Kp. Pulau Sirai Desa Mantang Besar Kec. Mantang pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.930.000
- Rehab Mesjid Ihwanul Muslimin Kp. Masiran Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 49.880.000
- Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid Al Amal RT.11 RW. 04 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.940.000
- Rehab Surau Al Ikhlas RT. 14 RW.04 KM.19 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran

- sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.850.000
- Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid Al Ihsan RT. 05 RW. 02 Desa Toapaya Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.860.000
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana (Paving Block, dan Pagar) Surau Al Hidayah RT. 03 RW. 01 Kel. Topaya Asri Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 164.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 164.440.000
 - Pembangunan Batu Miring TPA Nurul Hidayah RT.003 RW.002 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 197.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 197.340.000
 - Rehab Surau Al Kautsar Kp. Sumber Karya RT. 15 RW. 06 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.880.000
 - Renovasi Mesjid Al Amin Tasnurhadi Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.910.000
 - Rehabilitasi Masjid Al-Amin Kp. Melukap Dusun II RT. 008RW. 004 Desa Penaga Kec. Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 752.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 710.671.553
 - Renovasi Mushola At Taubah Kp. Bloreng Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 183.300.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 183.240.000

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Ar Rahman Kp. Belak Desa Penaga Kec. Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 183.300.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 183.080.000
- Renovasi Mesjid Al Ikhlas Kp. Kebun Sari KM.48 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.440.000
- Pembangunan TPQ Al Ikhlas, Jl. Kebun Sari Km. 48 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.490.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Al Munawarah Bintan Enau Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.900.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Mushola Al Gafur RT.04 RW.01 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.830.000
- Pembangunan Semenisasi Beton Bertulang Halaman Vihara Dharna Shanti Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 186.380.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana masjid Al Barokah Kel. Tanjung Uban selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.840.000

- Pembangunan Gerbang Kelenteng Hua Kwang Tai Ti Pelita Baru Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 141.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 140.880.000
- Pembangunan Paving Block Halaman Mesjid As Syakirin RT. 001 RW. 002 Kp. Tg. Arang Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 84.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 84.480.000
- Pembangunan Paving Block Masjid Al Hikmah RT. 01 RW. 01 Kp. Harapan Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 187.940.000
- Peningkatan Sarana Prasarana Musholla SD 06 Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 49.830.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Minggu Gereja Karo Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 187.490.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Mushola Nurul Haq Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 93.390.000
- Peningkatan Sarana Prasarana Gereja St. Veronika RT.05 RW.03 Desa Pengudang Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 93.960.000

- Peningkatan Sarana Prasarana Mesjid Nurul Huda Kp. Harapan Desa Sebong Pereh Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.810.000
- Pekerjaan Struktur Masjid Nurul Iman Dusun I Margo Sari Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.780.000
- Pembangunan Gedung Yayasan Nurul Alquran RT.01 RW.01 Kp. Pasir II Desa Sebong Pereh Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.850.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Miftahul Ulum Kp. Solor Rt.03 Rw.01 Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk sebong pagu anggaran sebesar Rp. 188.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.670.000
- Rehab Mesjid Nur Assyadiyah Desa Pengudang Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 70.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 70.330.000
- Peningkatan Pekerjaan Struktur Musholla Al Fadhillah RT. 01 RW. 01 Kp. Ekang Darat Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.890.000
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Musholla Al Hidayah Kp. Pasiran Desa Sri Bintang Kec.Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.690.000

- Pembangunan Masjid Agung di Bandar Seri Bentan Kecamatan Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 8.620.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 8.065.230.544
- Renovasi Masjid Al Mukmin RT.02 RW.01 Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang pagu anggaran sebesar Rp. 282.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 267.602.470
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Fastabiqul Khairat Kp. Kolam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 1.536.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 1.446.054.860
- Pembangunan Masjid Ar Rahim Kp. Kamboja, Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 921.273.056
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Al Amin Perumahan Taman Surya Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 282.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 276.319.340
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Masjid At Taubah Km.18 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 800.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 607.096.611
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Tahfidz Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 2.350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 1.945.800.000

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid At-Taqwa Kp. Cahya Sari RT. 001/RW. 003 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 470.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 436.301.961
- Pembangunan Gedung Serba Guna Gereja Katolik St. Cosmas & Damianus Kijang Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 2.350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 2.276.904.998
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Muizoh RT.01 RW.14 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 99.890.000
- Renovasi Surau Pintu Hidayah RT.03 RW.03 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 102.300.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 102.030.000
- Rehab Masjid Al Karim RT. 01 RW. 03 Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 193.100.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.770.000
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Masjid Al - Amin Taman surya desa Teluk sasah Kec. Seri kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 188.100.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 187.760.000
- Pembangunan Pagar Dan paving Blok Masjid Jamiatul Muslimin Kelurahan Toapaya Asri pagu anggaran sebesar Rp. 169.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 168.900.000
- Renovasi Gedung GPI Sialang lobam Desa Teluk sasah Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran

- sebesar Rp. 193.100.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.990.000
- Pembangunan Mushola Kp. Bintang Berkapur Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang pagu anggaran sebesar Rp. 193.100.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 192.820.000
 - Pembangunan sarana prasaran pendukung masjid Nurul Ikhsan RT 16 RW 05 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 93.930.000
 - Pembangunan Pagar Mesjid Al-Kautsar Cikolek RT.002 RW.001 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 194.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 193.550.000
 - Pembangunan Pagar Mesjid Nur As Adiah Rt .06 Rw.03 Desa Pengudang Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 185.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 184.720.000
 - Peningkatan sarana dan prasarana Mesjid Al-Ihsan RT 5 RW 02 Desa Toapaya Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 193.450.000
 - Rehab surau Al Ijtihad RT 02 RW 04 Kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur pagu anggaran sebesar Rp. 189.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 188.760.000

(15) Penunjang Kegiatan Program PB2BT

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.180.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.539.548,- atau 53,83 %. Output dari kegiatan ini

adalah tersedianya pembangunan sarana prasarana (Masjid/ Surau/ Mushalla, TPQ, Gereja, Kelenteng/Vihara). Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya pembangunan sarana prasarana (Masjid/ Surau/ Mushalla, TPQ, Gereja, Kelenteng/Vihara). Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan.

8) Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.038.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.908.091.395,- atau 98,70%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 2 Kegiatan. Adapaun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya penerangan jalan / fasilitas umum, dengan uraian sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Lampu Jalan/Fasilitas Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.815.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.761.322.447,- atau 97,01%. Output dari kegiatan ini adalah Terpeliharanya Lampu Jalan/Fasilitas Umum, (Outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya penerangan jalan/fasilitas umum. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(2) Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan Dan Fasilitas Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.222.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

8.146.768.948,- atau 99,08%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan dan pemasangan lampu jalan / fasilitas umum. (Outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya penerangan jalan / fasilitas umum. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kab. Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tiang Single Ornament pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 109.922.000
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Kawasan Bumi Perkemahan pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 109.861.000
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di kabupaten Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 4.608.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 4.227.667.768
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di Perum. TanjungPermai dan Lobam Bestari Kec. Seri Kuala Lobam pagu anggaran sebesar Rp. 96.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 95.900.000
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan 4 Kecamatan (Kec. Teluk Sebong, Kec. Toapaya, Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 96.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 95.915.000
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan 2 Kec. (Kec. Seri Kuala Lobam dan Kec. Bintan Utara)

- pagu anggaran sebesar Rp. 180.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 179.878.000
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya di Kec. Tambelan pagu anggaran sebesar Rp. 132.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 131.615.000
 - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tanah Kuning Kp Keke Kel. Kijang Kota Kec. Bintang timur pagu anggaran sebesar Rp. 192.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 191.758.000
 - Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Pasar Baru Tanjung permai Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara pagu anggaran sebesar Rp. 192.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 191.652.000
 - Pengadaaan dan Pemasangan Lampu Jalan Pemakaman Umum Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara pagu anggaran sebesar Rp. 165.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 164.850.000
 - Pengadaaan dan Pemasangan Lampu Jalan Menuju Perum Telaga Surya Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintang Utara pagu anggaran sebesar Rp. 92.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 91.874.000
 - Pengadaaan dan Pemasangan Lampu Jalan Martosari Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintang Utara pagu anggaran sebesar Rp. 92.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 90.257.000
 - Pengadaaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gg Walet Desa Taopaya Selatan Kec. Taopaya pagu

anggaran sebesar Rp. 92.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 91.616.000

- Pengadaan dan pemasangan lebel lampu di Kabupaten Bintan pagu anggaran sebesar Rp. 68.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 67.909.000
- Pengadaan Lampu Hias Taman Kec. Bintan Utara dan Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 185.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 184.745.000
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Gg Cemara Kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 47.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 46.853.000
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Bundaran Tanjak Kel. Kijang Kota kec. Bintan Timur pagu anggaran sebesar Rp. 467.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 460.511.393
- Pembangunan Lampu Jalan 6 Unit di Desa Toapaya Kecamatan Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 115.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 106.894.000
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kec. Gunung Kijang, Kec. Toapaya, Kec. Teluk Bintan, Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 185.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 184.835.000
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan dari Simpang Lampu Merah ke arah Pom Bensin Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 467.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 457.751.935

Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja pada masing – masing kegiatan.

9) Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum

Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.506.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.484.126.676,- atau 99,12%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 1 Kegiatan. Adapaun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya Pengelolaan tempat pemakaman umum, dengan uraian sebagai berikut :

(1) Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Areal TPU

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.506.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.484.126.676,- atau 99,12 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembangunan/pengelolaan prasarana areal TPU. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah tersedianya prasarana areal TPU dan Pengelolaan Areal TPU. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah TPU se- Kabupaten Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

- Pembangunan Gudang Penyimpanan Alat-alat Pemakaman dan Pengadaan tenda 1 unit untuk Bukit Mentangor Kp. Melayu Kec. Toapaya pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 43.228.000

- Pembangunan Pagar Makam Banjar Kec. Gunung Kijang (Lanjutan) pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 172.465.000
- Pembangunan Pagar Makam Sekar Sari Desa RT. 006 RW. 003 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya agu anggaran sebesar Rp. 210.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 183.263.000
- Pembangunan Pagar Makam Desa Sebong Pereh Kec. Teluk Sebong pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 129.425.000
- Pembangunan Pagar Makam RT. 06 RW. 03 Dusun 3 Desa Pengujan Kec. Teluk Bintang pagu anggaran sebesar Rp. 175.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. ,- 151.388.000

Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja pada masing – masing kegiatan.

10) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 12.405.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.599.737.589,- atau 93,50%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 2 Kegiatan. Adapaun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya Kapasitas Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan uraian sebagai berikut :

(1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.101.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.065.589.734,- atau 98,29%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya sarana kerja satgas untuk operasional kegiatan persampahan. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana persampahan.

(2) Kegiatan Peningkatan kebersihan jalan-jalan umum dan lingkungan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.304.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.534.147.855,- atau 92,53%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya peningkatan, pelayanan kebersihan di kecamatan dan pengadaan rambu rambu himbauan kebersihan.. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya kebersihan lingkungan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.

Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja pada masing – masing kegiatan.

11) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 6.945.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.047.384.764,- atau 87,07%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 3 Kegiatan.

Adapaun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan uraian sebagai berikut :

(1) Pembangunan dan Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.803.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.077.453.693,- atau 87,49%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana taman dan ruang terbuka hijau. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan. Untuk mencapai hasil keluaran tersebut dilaksanakan pekerjaan pada Tahun 2019 sebagai berikut:

- Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Masjid Baitul Makmur Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara pagu anggaran sebesar Rp. 2.810.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. , - 2.637.000.000

(2) Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kebun Binatang Kijang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 842.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 709.901.593,- atau 84,25%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya operasional dan pengelolaan kebun binatang kijang. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan kebun binatang kijang. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan

(3) Pengelolaan Peningkatan dan Pelayanan Kijang City Walk (KCW) Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 260.029.478,- atau 86,68%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan dan pelayanan KCW. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan dan pelayanan KCW. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan.

Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja pada masing – masing kegiatan.

12) Program Sertifikasi Perumahan dan Permukiman

Program Sertifikasi Perumahan dan Permukiman mendapat alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp. 854.243.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 743.008.900,- atau 86,98%. Dengan Jumlah Kegiatan sebanyak 2 Kegiatan. Adapun Capaian Programnya yaitu Meningkatnya kapasitas pekerjaan umum, dengan uraian sebagai berikut :

(1) Perencanaan Teknis (DED) Sarana Prasarana dan Sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 388.515.000,- atau 92,28%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Perencanaan Teknis (DED) sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen

(DED) sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

(2) Perencanaan teknis (DED) Sarana dan Prasarana Persampahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 433.243.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 354.493.900,- atau 81,82%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya perencanaan teknis (DED) sarana prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman. Hasil (Outcome) dari kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen perencanaan teknis (DED) sarana dan prasarana persampahan. Kelompok Sasaran pada kegiatan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.

Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan program tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaannya, Secara umum pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian kerja pada masing – masing kegiatan.

3.1.1.5 Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat

Rencana kinerja tahun 2019 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dengan demikian diharapkan seluruh proses pelayanan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan dapat berjalan dengan baik.

Sasaran stratejik Tahun 2019, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat

NO	Sasaran Strategis	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	400 Lembar	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
		5 Jenis	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 64.344.000	Rp 52.910.897
		12 Orang	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 215.144.000	Rp 166.444.000
		31 Jenis	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 20.000.000	Rp 19.897.900
		4 Jenis	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 66.872.950	Rp 63.375.950
		2 Jenis	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp 30.000.000	Rp 23.884.960
		8 Jenis	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 10.000.000	Rp 9.981.400
		10.000 Liter	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 100.000.000	Rp 79.170.025
		2 Jenis	Penyediaan makanan	Rp 53.560.000	Rp 39.689.800

NO	Sasaran Strategis	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
			dan minuman		
		27Org /Kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 130.000.000	Rp 121.680.545
		27Org /Kali	Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	Rp 100.000.000	Rp 99.997.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 39.204.000	Rp 39.179.800
		2 Bh Roda Empat & 5 Bh Roda dua	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional	Rp 54.500.000	Rp 44.318.100
		5 Jenis	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 10.000.000	Rp 9.999.000
		7 Jenis	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 20.000.000	Rp 19.976.000
		3 Jenis	Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur	Rp 96.000.000	Rp 89.837.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
3.	Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur	36 Stell	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Rp 10.440.000	Rp 10.414.800
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
4.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan dan laporan kerja	9 Dok	Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	Rp 100.822.857	Rp 92.445.621
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
5.	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	150 Orang	Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	Rp 154.488.500	Rp 141.777.188
		30 Orang	Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Rp 62.303.000	Rp 53.413.945
Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik					
6.	Meningkatnya	1 Kali	Verifikasi dan seleksi	Rp 47.434.000	Rp 43.683.487

NO	Sasaran Strategis	Target	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rapat	bantuan keuangan partai politik		
		21 Orang/ 3 Kali Rapat	Rapat Koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bintan	Rp 58.770.500	Rp 55.205.473
		23 Orang/ 2 Kali Rapat	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemantauan Orang Asing di Kabupaten Bintan	Rp 67.906.050	Rp 66.496500
		306 Orang	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan	Rp 312.187.000	Rp 288.981.810
		80 Orang	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bintan	Rp 109.149.000	Rp 101.884.434
		32 Orang	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik	Rp 64.661.000	Rp 59.053.460
		40 Orang	Penyelenggaraan Pendidikan Politik Kabupaten Bintan	Rp 79.023.000	Rp 78.122.380
		36 Orang Petugas Jaga	Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	Rp 144.410.000	Rp 118.235.900
		30 Orang dan 221 Orang	Peningkatan Sumber Daya Manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Rp 294.168.000	Rp 259.016.160
Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Manusia					
7.	Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama	4 Kali	Rapat koordinasi kerukunan antar umat beragama (FKUB) Kabupaten Bintan	Rp 70.494.000	Rp 53.709.635

Program dan Kegiatan-kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Antara lain :

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan melalui 2 (Dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 216.791.500,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp 195.191.133,- atau 90,03%. Outcome dari program ini antara lain tercapainya pemahaman pencegahan peredaran narkoba kepada aparaturnya dan tercapainya kerukunan antar pemuka masyarakat, suku dan etnis di Kabupaten Bintan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.488.500,- dan realisasi sebesar Rp 141.777.188 atau 91,77%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba tahun anggaran 2019 yang dilakukan secara efektif, sistematis dan sesuai dengan kaedah dan norma yang berlaku di dalam masyarakat Kabupaten Bintan. Hasilnya diberikan penyuluhan kepada 150 pelajar Kabupaten Bintan.

(2) Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.303.000,- dan realisasi sebesar Rp 53.413.945 atau 85,73%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat forum Pembauran Kebangsaan, sedangkan hasil kegiatan adalah terciptanya pembauran kebangsaan berdasarkan identitas, suku, ras, etnis masing-masing di Kabupaten Bintan. Rapat dilakukan sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari pemuka adat, suku dan etnis, yang selanjutnya diharapkan tercapainya

kerukunan antar pemuka masyarakat, suku dan etnis di Kabupaten Bintan.

FPK merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Daerah adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan, yang bertujuan menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah NKRI. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pembauran Kebangsaan adalah meningkatkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila serta mendorong persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan Rapat Koordinasi dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kali yang dihadiri sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang peserta yang terdiri dari berbagai suku atau etnis yang ada di Kabupaten Bintan.

Hasil dari resume Rapat berupa rumusan yang menjadi masukan kepada Pimpinan Daerah dalam menyusun

kebijakan-kebijakan terkait pemeliharaan situasi yang kondusif khususnya di wilayah Kabupaten Bintan.

2) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan melalui 9 (Sembilan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 1.177.708.550,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.070.679.604,- atau 90,91%. Outcome dari program ini antara lain terpantaunya kegiatan orang asing di daerah serta kegiatan pemantauan dalam daerah, terwujudnya pemberian bantuan kepada partai politik di Kabupaten Bintan, Terwujudnya koordinasi antar aparatur dalam penyelesaian konflik sosial di Kab. Bintan, Tercapainya Deteksi dini dan Cegah Dini situasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) di Bidang IPOLEKSOSBUDKAMTIBMAS di Kabupaten Bintan dan Pembekalan Dasar-dasar Deteksi dini dan Cegah dini bagi OPD dan Masyarakat, Tercapainya pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

(1) Verifikasi dan seleksi bantuan keuangan partai politik

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.434.000,- dan realisasi sebesar Rp 43.683.487 atau 92,09%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya verifikasi dan seleksi administrasi bantuan keuangan partai politik, sedangkan hasil kegiatan adalah terwujudnya pemberian bantuan kepada partai politik di Kabupaten Bintan. Pemberian bantuan keuangan kepada kepada 8 (Delapan) Partai Politik (Parpol) yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bintan. Tujuan dari pemberian Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik ini adalah sebagai sarana pembinaan politik dari Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik. Parpol yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, adalah :

Tabel 3.4 Daftar Partai dan Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Bintan Periode 2014 – 2019

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Golongan Karya	6 (Enam)
2.	Partai Demokrat	6 (Enam)
3.	Partai Keadilan Sejahtera	3 (Tiga)
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 (Tiga)
5.	Partai Amanat Nasional	3 (Tiga)
6.	Partai Hati Nurani Rakyat	2 (Dua)
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1 (Satu)
8.	Partai Nasdem	1 (Satu)
Jumlah Kursi		25 (Dua Puluh Lima)

Tabel 3.5 Daftar Partai dan Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Bintan Periode 2019 – 2024

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrat	8 (Delapan)
2.	Partai Golongan Karya	6 (Enam)
3.	Partai Nasdem	4 (Empat)
4.	Partai Keadilan Sejahtera	3 (Tiga)
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2 (Dua)
6.	Partai Amanat Nasional	1 (Satu)
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	1 (Satu)
Jumlah Kursi		25 (Dua Puluh Lima)

Sumber : KPU Bintan

(2) Rapat Koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bintan

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.770.500,- dan realisasi sebesar Rp 55.205.473 atau 93,93%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan temu tim satgas di daerah Kabupaten Bintan, sedangkan hasil kegiatan adalah terbentuknya tim satgas penyelesaian konflik sosial di daerah Kabupaten Bintan. Kegiatan Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten Bintan dilakukan dengan menggunakan metode rapat dan koordinasi sebanyak 3 kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

(3) Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.906.050,- dan realisasi sebesar Rp 66.496.500 atau 97,92%. Keluaran dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi pemantauan kegiatan Orang Asing , NGO dan Lembaga Asing di Kabupaten Bintan merupakan suatu wadah bersama yang tidak melampaui kewenangan masing-masing instansi maupun antar unit kerja efektif sistematis dan sesuai dengan kaidah –kaidah hukum tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi atau Lembaga-Lembaga baik tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten.
2. Tim koordinasi pemantauan kegiatan Orang Asing , NGO dan Lembaga Asing adalah sebagai wadah koordinasi dan

tidak menukar informasi yang di gunakan dalam menentukan suatu tindak/ kebijakan Bupati di bidang pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing.

3. Rapat koordinasi pemantauan kegiatan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing di dilaksanakan minimal (satu) kali dalam sebulan dan apabila di pandang perlu dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam situasi kondisi yang sangat mendesak.
4. Hasil Koordinasi pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di daerah di laporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Kesbang pol setiap bulan dan atau sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah.

Hasil kegiatan ini sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi sebanyak 2 Kali.
2. Telah dilaksanakanya pemantauan terhadap Aktivitas Orang Asing dan Pengawasan ORMAS di wilayah Kabupaten Bintan sebanyak 50 Kali Kegiatan meliputi Pemantauan aktivitas pengungsi dari Luar Negeri di Hotel Bhadaria, Aktivitas kegiatan orang asing yang melaksanakan Farm Trip, Aktivitas Pejabat Negara Asing, deteksi aktivitas Tenaga Kerja Asing, Aktivitas Ormas Asing dan Aktivitas Ormas Lokal di Wilayah Kabupaten Bintan.

Kegiatan ini melibatkan Unsur TNI. POLRI, Instansi Vertikal dan OPD di Kabupaten Bintan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 312.187.000,- dan realisasi sebesar Rp 288.981.810 atau 92,56%. Keluaran dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Terlaksananya Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah dini Antar OPD dan Masyarakat se Kabupaten Bintan.
2. Tim Kewaspadaan Dini berkoordinasi dan saling tukar menukar informasi yang di gunakan dalam menentukan suatu tindakan/ kebijakan Bupati.
3. Sinergi antar Aparatur Pemda dengan Intelijen Negara, Kepolisian, TNI, dan Instansi Vertikal.
4. Hasil pemantaun disusun didalam bentuk format laporan dan di laporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen POLPUM setiap hari/bulan dan atau sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah.

Hasil kegiatan ini sebagai berikut :

Telah dilaksanakannya Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap segala bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Wilayah Kabupaten Bintan sebagai berikut :

1. Terhimpunnya Laporan Informasi sejumlah 195 Laporan yang terdiri dari Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan.
2. Terlaksananya Deteksi Dini yang dilakukan oleh Personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan sebanyak 30 Kegiatan Deteksi Dini.
3. Terlaksananya Komunikasi Sosial di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan yang diselenggarakan sebanyak 2 Kali dalam Tahun 2019.

Kegiatan ini melibatkan Unsur ASN Pemerintah Daerah dari OPD se Kabupaten Bintan dan Masyarakat Kabupaten Bintan 226 Orang Berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 94/I/2018.

(5) Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bintan

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.149.000,- dan realisasi sebesar Rp 101.884.434 atau 93,34%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan organisasi masyarakat dalam menunjang program pemerintah daerah. Kegiatan Pembinaan Ormas ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus/anggota ormas dalam melaksanakan aktifitasnya dan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, serta terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah dan ormas/lsm, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul ditengah masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan adanya perubahan yang cukup strategi dalam beberapa tahun ini, pertumbuhan ormas dan LSM semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa elemen masyarakat semakin berkesempatan untuk membuat kelompok, organisasi atau lembaga yang berorientasi pada penghimpunan potensi yang ada untuk menjadi sebuah kekuatan yang riil. Namun tentu saja, dengan karakter, corak dan tujuan yang berbeda itu dalam pembentukannya akan memperkaya khasanah pemikiran untuk bersama sama membangun bangsa dan negara. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pola pembinaan ormas yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga berbagai regulasi yang berhubungan dengan pembangunan daerah, terlebih

dahulu kita uraikan definisi ormas dan LSM, karena saat ini orang agak sulit membedakan apa perkumpulan itu masuk dalam kategori ormas, LSM atau hanya sekedar berkumpul sesuai dengan kondisi yang berkembang atau sebagai bentuk respon atas kondisi yang terbangun di sekitarnya. Secara garis besar, yang dimaksud ormas adalah sekumpulan orang yang bersepakat menyatukan diri untuk membentuk organisasi, yang terdiri atas adanya AD/ART, memiliki sekretariat berkedudukan di suatu daerah dan akan membentuk perwakilan/cabang di daerah lain, yang terdaftar serta berbadan hukum yang berkekuatan tetap. Sementara LSM dibentuk oleh beberapa orang untuk tujuan tertentu serta memfokuskan diri pada suatu kelompok kerja bidang tertentu yang anggotanya tidak cukup banyak. Dan, terakhir, kelompok orang yang secara insidental menyesuaikan dengan arus dan arah perkembangan yang melingkupi untuk memberi koreksi terhadap sebuah kebijakan, program lembaga pemerintahan ataupun penyampaian aspirasi yang diakibatkan adanya pengaruh yang berdampak luas dalam lingkungan global. Dari batasan sederhana di atas, dapat disimpulkan bahwa ormas, LSM atau kelompok orang, mencirikan kesepakatan untuk berada dalam satu wadah berhimpun untuk mencapai tujuan.

Pembinaan ormas yang seyogyanya di laksanakan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah dan pembangunan demokrasi antara lain, kesatu, adanya kesepakatan terhadap nilai nilai dasar, ideologi dan cita cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (Integrasi normatif). kedua, adanya rasa ketergantungan fungsional dan manfaat fungsional yang konkrit dari tiap ormas dengan terintegrasi dalam satu kesatuan (Integrasi

fungsional), ketiga, adanya kekuatan dalam menjaga komitmen tiap ormas untuk menciptakan kestabilan dan keteraturan (Integrasi koersif). Untuk maksud tersebut pemerintah daerah hendaknya menciptakan keserasian sosial dengan memberikan kesempatan pada masyarakat (ormas/LSM/kelompok masyarakat) untuk mengembangkan sumber daya lokal yang khas serta natural helping system, memberikan kesempatan kepada local genius serta local leaders untuk mencari dan mengembangkan mekanisme kontrol sosial yang sesuai dengan lingkungan budaya setempat. Dalam situasi sekarang, kebijakan pemerintah daerah harus lebih banyak bersifat memfasilitasi dari pada memaksakan peraturan peraturan di masyarakat lokal. Dalam beberapa hal, pemerintah perlu memberikan bantuan untuk memperkuat pranata atau organisasi massa lokal bila benar benar dibutuhkan mereka disamping itu, ke depan perlu ada ruang yang lebih luas dalam pembentukan LSM, tanpa harus ada izin untuk mengesahkan keberadaannya, kecuali sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan hukum, hendaknya didaftarkan pada institusi hukum. Juga disarankan kepada Lembaga swadaya Masyarakat/ormas untuk menjadi bagian dari pemberdayaan, bukan beban bagi masyarakat.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah dihadiri sebanyak 80 (Delapan Puluh) Orang peserta dari berbagai Organisasi Masyarakat maupun Pemuda.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bintan dilaksanakan dalam bentuk simposium yang menghadirkan Narasumber serta Kepala Kantor Kesbangpol sebagai pembicara yang dilaksanakan Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang lalu, bertempat di

Hotel Bhadaria Resort, Jalan Raya Kawal Km. 25. Tema kegiatan tahun ini adalah "Tingkatkan Konsolidasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mewujudkan Bintang Gemilang 2025".

Kegiatan dihadiri oleh Ormas se Kabupaten Bintan, baik yang sudah berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum dan terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata kembali Ormas dan mengingatkan kepada Ormas untuk melakukan pendaftaran kepada Instansi Pemerintah atau Kesbangpol di daerah. Dalam kegiatan ini juga ditegaskan kembali implementasi terkait Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2013.

Badan Kesbangpol Bintan juga telah membentuk Tim Pengawasan Ormas yang terdiri dari beberapa Instansi terkait yang akan bekerja mengawasi aktivitas Ormas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan akan dilakukan pembinaan hingga usulan pembubaran kepada kementerian terkait jika melanggar ketentuan yang berlaku.

(6) Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.661.000,- dan realisasi sebesar Rp 59.053.460 atau 91,32%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pemahaman pengelolaan laporan pertanggungjawaban banpol di Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya sumber daya manusia partai politik yang profesional dalam mempertanggungjawabkan bantuan keuangan partai politik

(7) Penyelenggaraan Pendidikan Politik Kabupaten Bintan

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.023.000,- dan realisasi sebesar Rp 78.122.380 atau 98,86%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan pendidikan politik di daerah Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya karakter bangsa yang berbudaya, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat

(8) Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.410.000,- dan realisasi sebesar Rp 118.235.900 atau 81,87%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik daerah. Hasil dari kegiatan ini Tercapainya pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik daerah

Kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah adalah kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, maka perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi untuk mengetahui perkembangan politik di daerah Kabupaten Bintan, untuk pelaksanaannya telah dibentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bintan dengan Surat Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 475/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018. Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan telah dibentuk posko pemantauan dalam rangka melakukan pemantauan perkembangan politik menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 2019.

Pemantauan yang dilakukan pada saat kampanye dan pemantauan pada saat pemungutan suara di 425 TPS pada 10 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

- Kecamatan Gunung Kijang	: 38 TPS
- Kecamatan Bintan Timur	: 119 TPS
- Kecamatan Bintan Utara	: 58 TPS
- Kecamatan Teluk Bintan	: 33 TPS
- Kecamatan Tambelan	: 17 TPS
- Kecamatan Teluk Sebong	: 45 TPS
- Kecamatan Toapaya	: 35 TPS
- Kecamatan Mantang	: 13 TPS
- Kecamatan Bintan Pesisir	: 24 TPS
- Kecamatan Seri Kuala Lobam	: <u>43 TPS</u>
Jumlah	: 425 TPS

Disamping pemantauan pelaksanaan Pemilu 2019 dilakukan juga pemantauan dan evaluasi perkembangan situasi politik pada setiap bulan dalam tahun 2019 disetiap kecamatan guna pelaporan perkembangan politik di daerah yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah

**Tabel 3.6 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan
Situasi Pemilihan Umum**

N O	PEMILU 2019-2024	Jumlah Pemilih dalam DPT	Pengguna hak pilih			Jumlah Pengguna hak pilih (4+5+6)	Jumlah Pengguna hak pilih dibagi DPT (7:3)	100	Tingkat partisipasi Persentase (%)
			Pengguna hak pilih dalam DPT	Pengguna hak pilih dalam DPTb	Pengguna hak pilih dalam DPK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presiden dan Wapres	103,512	82,625	1,190	5,332	89,147	0.86122382	86.12	86
2	DPR RI	103,512	82,831	818	5,341	88,990	0.85970709	85.97	86
3	DPD	103,512	82,783	810	5,327	88,920	0.85903084	85.90	86
4	DPRD Provinsi	103,512	82,817	508	5,334	88,659	0.85650939	85.65	86
5	DPRD Kab :								
	Bintan 1	37,885	30,692	134	1,383	32,209	0.85017817	85.02	85
	Bintan 2	11,591	9,090	246	168	9,504	0.81994651	81.99	82
	Bintan 3	30,188	24,004	6	1,361	25,371	0.84043328	84.04	84
	Bintan 4	23,848	19,022	19	2,421	21,462	0.89994968	89.99	90
	DPRD kab. Bintan	103,512	82,808	405	5,333	88,546	0.85541773	85.54	86

(9) Peningkatan Sumber Daya Manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 294.168.000,- dan realisasi sebesar Rp 259.016.160 atau 88,05%. Keluaran dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Terlatihnya ASN Pemkab Bintan dan masyarakat kemampuan Intelijen bagi deteksi dini dan cegah dini menangkal ATHG di Wilayah Kabupaten Bintan.
2. Sinergi Antar OPD Pemkab Bintan dan masyarakat didalam mengatasi ATHG di wilayah Kabupaten Bintan.

Hasil kegiatan ini sebagai berikut :

Telah dilaksanakannya 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Intelijen bagi ASN dan Pembekalan Forum-Forum untuk meningkatkan kewaspadaan Dini Masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan Unsur ASN Pemerintah Daerah dari perwakilan OPD se Kabupaten Bintan sebanyak 30 Orang dan Masyarakat Kabupaten Bintan 226 Orang yang terdiri dari Unsur FKDM, FKUB dan FPK.

3) Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan melalui 1 (Satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 70.494.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 53.709.635,- atau 76,19%. Outcome dari program ini antara lain kewaspadaan dini masyarakat guna menjaga kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. pelaksanaan program

1. Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.494.000,- dan realisasi sebesar Rp 53.709.635,- atau 76,19%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan. Hasil dari kegiatan ini Tercapainya Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan

- Forum Kerukunan umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam

rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

- Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama.
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan Kebijakan Bupati
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang – undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- Kegiatan FKUB bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan konsolidasi internal organisasi FKUB agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal.
 - b. Meningkatkan koordinasi eksternal dengan instansi, majelis – majelis agama, ormas – ormas keagamaan serta pihak ter kait lainnya; dalam pembinaan dan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kabupaten Bintan
 - c. Meningkatkan pemahaman dan saling pengertian serta mendorong partisipasi dan kerjasama umat

beragama dalam memperkuat dasar dasar KUB guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional.

- d. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, guna menumbuhkembangkan dan memberdayakan FKUB dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung-jawabnya, dalam rangka memelihara Kerukunan Umat
 - e. Meningkatkan pemahaman, saling pengertian, dan partisipasi semua pihak dalam pendirian rumah ibadat sesuai semangat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 guna memelihara Kerukunan Umat Beragama.
 - f. Mempersatukan umat beragama
 - g. Memperkokoh kerukunan
 - h. Mewujudkan harmoni umat dalam kedamaian hidup berdampingan
- Sedangkan sasaran Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan adalah :
 - a. Tertatanya sistem dan manajemen kelembagaan (organisasi FKUB) di Kabupaten Bintan agar dapat memberikan pelayanan fungsional secara maksimal.
 - b. Terbinanya suasana yang kondusif yang didukung oleh adanya koordinasi & kerjasama yang harmonis antar semua pihak terkait secara fungsional, dalam pembinaan dan pemeliharaan Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Bintan
 - c. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pemahaman, penghayatan dan

pengamalan ajaran agama serta tumbuhnya saling pengertian, partisipasi dan kerjasama umat beragama, yang mendukung bagi pembinaan dan pemeliharaan FKUB.

- d. Terciptanya suasana yang kondusif bagi FKUB dalam memberdayakan diri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab guna memelihara FKUB.
 - e. Terbinanya suasana kondusif dalam pendirian rumah ibadat sesuai semangat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 guna memelihara Kerukunan Umat Beragama dengan saling memahami, saling pengertian dan partisipasi semua pihak guna memelihara FKUB.
- Kegiatan Rapat Koordinasi dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kali yang dihadiri sebanyak 17 (Tujuh Belas) Orang peserta .
 - Hasil dari resume rapat berupa rumusan yang menjadi masukan kepada Pimpinan Daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 di daerah sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta rasa nyaman bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Berikut adalah jumlah rumah ibadah yang terdapat di Kabupaten Bintan :

* Mesjid	167 Buah
* Mushalla	175 Buah
* Gereja	16 Buah
* Gereja Katedral	11 Buah
* Pura	1 Buah
* Vihara	6 Buah
* Cetiya	12 Buah
* Klenteng	12 Buah

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006, sehingga masih ada masyarakat yang belum memahami tentang peraturan terkait pembangunan rumah ibadah.
- b) Masih banyak ormas di Kabupaten Bintan yang belum memiliki SKT/terdaftar, yang habis masa berlaku SKT tidak melapor pada Badan Kesbangpol Bintan. Demikian pula Ormas yang berganti kepengurusan, seharusnya segera melapor ke Badan Kesbangpol Bintan
- c) Banyaknya suku atau etnis yang ada di Kabupaten Bintan sehingga tidak semua suku atau etnis yang bisa diakomodir dalam kegiatan ini. Mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini
- d) Masih ditemukannya bantuan keuangan Partai Politik untuk pendidikan Politik dan operasional sekretariatnya

yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman Pengurus Partai Politik dalam mengelola penggunaan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten Bintan, sehingga penggunaan bantuan keuangan Partai Politik belum maksimal

- e) Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang karakter bangsa yang berbudaya, berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politik, sehingga pemahaman pendidikan politik tentang karakter bangsa masih belum maksimal
- f) Masih adanya temuan LHP BPK RI atas LPj bantuan keuangan Partai Politik. Hal ini disebabkan minimnya Sumber Daya Manusia pengurus Partai Politik dalam pengelolaan bantuan keuangan parpol, sehingga pemahaman pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik masih belum maksimal

(2) Solusi

- a) Perlunya optimalisasi sosialisasi terkait Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 kepada masyarakat sehingga meningkatnya pemahaman masyarakat terkait peraturan pembangunan rumah ibadah
- b) Perlunya dilakukan pemantauan serta pengawasan secara intensif kepada LSM atau Ormas yang ada di Kabupaten Bintan agar tertib administrasi sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Badan Kesbangpol Bintan serta bersinergi sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan di daerah serta mencegah

faham radikalisme berkembang yang menyusup ke dalam Ormas

- c) Perlunya penambahan anggaran dalam mendukung kegiatan FPK agar berjalan lebih optimal, baik berupa rapat-rapat maupun kegiatan lainnya yang menunjang dalam menumbuhkan kembangkan rasa kebangsaan diantara suku atau etnis yang ada di Kabupaten Bintan
- d) Rencana tindakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bakesbangpol Kab. Bintan dalam pengendalian penggunaan bantuan tersebut dan dengan penambahan anggaran untuk mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan.
- e) Rencana tindakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bakesbangpol Kab. Bintan dalam upaya mewujudkan karakter Bangsa yang berbudaya, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat tersebut dan dengan penambahan anggaran untuk mengadakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Infra dan Supra Struktur di Kabupaten Bintan.
- f) Rencana tindakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bakesbangpol Kab. Bintan dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang profesional dalam mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut dan dengan penambahan anggaran untuk mengadakan kegiatan mengadakan kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bintan.

3.1.1.6 Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Tahun 2019 dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1) Program Rehabilitasi Sosial

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelayanan Sosial bagi Anak yang Mengalami Permasalahan Sosial
2. Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia di Luar Panti
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
4. Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Napza secara Efektif
5. Penanganan Orang Mengalami Gangguan Jiwa/ Mental
6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia
7. Pemberian Bantuan UEP bagi Lanjut Usia Potensial
8. Peningkatan Kapasitas Anak Putus Sekolah melalui Usaha Ekonomi Produktif.

2) Program Pemberdayaan Sosial

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
2. Pemberdayaan Keluarga
3. Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Peningkatan Kapasitas Pengelola Organisasi Sosial

5. Peningkatan Pendayagunaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
6. Pemantapan Manajemen Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Aktif (WKSBM)

3) Program Penanganan Fakir Miskin

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Adminstrasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas KUBE
3. Pembinaan KUBE dan UEP Fakir Miskin
4. Penanganan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
5. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif bagi Fakir Miskin
6. Verifikasi dan validasi Basis data Terpadu
7. Peningkatan Kapasitas SDM KUBE
8. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Masyarakat Miskin

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat
2. Administrasi Kegiatan Program Keluarga Harapan
3. Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana
4. Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar
5. Administrasi Verifikasi dan Validasi Data PBI JK
6. Bimbingan Teknis Service Provider PKH
7. Peningkatan Kualitas SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana)

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keenam** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Sosial** adalah sebagai berikut :

1) Persentase Penduduk Miskin

Dari berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan belum menunjukkan manfaat (outcome) dalam menekan angka kemiskinan pada tahun 2019. Angka kemiskinan Tahun 2019 di Kabupaten Bintan adalah 6.37% (sumber BPS Kabupaten Bintan Angka Sementara ***)

2) Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Ditangani

Pada tahun 2019, penanganan fakir miskin (59,39%) belum mencapai target (60%) tapi meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2018 (58.36,1%).

3) Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Yang Kompeten/Terlatih (Terkait Tenaga Kerja)

Persentase Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Yang Kompeten/Terlatih (Terkait Tenaga Kerja) pada tahun 2019 (65%) sudah melebihi target (39%).

4) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2019 (61.18%)

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.204.943.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.972.241.254,-, atau 89,44%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.88.412.000,- realisasi sebesar Rp.87.195.950,- atau (98,62%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing, melalui pembinaan pada potensi sumber kesejahteraan sosial baik yang bersifat kelembagaan. Jenis dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bintan Tahun 2019 seperti table di bawah ini :

Tabel 3.7 Jenis dan jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Jenis PSKS	Jumlah
I	PSKS Perseorangan	
	1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	40
	2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK)	10
II	PSKS Keluarga	

No	Jenis PSKS	Jumlah
	1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
	2. Family Care Unit (FCU)	1
III	PSKS Kelembagaan	
	1. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	16
	2. Karang Taruna	51
	3. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	9
	4. Forum CSR Kesejahteraan Sosial	0

(2) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.128.604.000,- realisasi sebesar Rp.125.760.800,- atau (97,79%). Hasil dari kegiatan ini adalah, meningkatnya pelayanan pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya permasalahan psikososial keluarga melalui penyediaan fasilitas dan sarana operasional LK3. Jumlah kasus yang ditangani selama Tahun 2019 sebanyak kasus psikososial keluarga.

(3) Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.090.201.550,- realisasi sebesar Rp.942.542.045,- atau (86,46%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya peranan serta partisipasi dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam

penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan pembinaan PSKS sebanyak 40 orang, Sehari Bersama Lansia, pemberian bantuan untuk lansia sebanyak 2.600 paket, sebanyak Bhakti Sosial dengan memberikan souvenir bagi 400 lansia, bantuan alat bantu bagi disabilitas dan lanjut usia sebanyak 220 orang, Melalui kegiatan ini disediakan peralatan kantor LK2S sebanyak 20 jenis.

(4) Peningkatan Kapasitas Pengelola Organisasi Sosial

Dilaksanakan bekerja sama dengan Karang Taruna Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.496.611.350,- realisasi sebesar Rp 428.913.974,- atau (86,37%). Hasil dari kegiatan ini terlaksananya penilaian Karang Taruna, Bhakti Sosial Karang Taruna, dan terlaksananya Safari Ramadhan, tersalurkanannya bantuan paket bagi anak sekolah sebanyak 200 paket, tersalurkanannya bantuan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna di sebanyak 2 kelompok.

(5) Peningkatan dan Pendayagunaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.323.825.000,- realisasi sebesar Rp.312.517.485,- atau (96,51%). Hasil dari kegiatan ini adalah tumbuhnya semangat penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial bagi para pelajar SMP dan

SMU sebanyak 30 orang pelajar melalui Kegiatan Wisata Sejarah, Jelajah Kepahlawanan, tersalurkan bantuan peralatan sekolah sebanyak 150 paket, tersalurkan bantuan berupa uang jasa pengabdian dan souvenir bagi veteran/janda veteran sebanyak 30 orang. Melalui kegiatan ini juga dilaksanakan gotong royong di Makam Pahlawan Dwikora Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke- 74.

(6) Pemantapan Manajemen Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Aktif (WKSBM)

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.290.000,- realisasi sebesar Rp.75.311.000 atau (97.44%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Hari Kesetiakawanan Nasional Tingkat Kabupaten

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) Persentase PSKS kelembagaan yang menjalankan fungsinya secara profesional

PSKS kelembagaan atau potensi dan sumber kesejahteraan sosial merupakan PSKS yang memberikan pelayanan sosial kepada sasaran program melalui lembaga kesejahteraan sosial. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menjalankan fungsinya secara professional pada Tahun 2019 adalah LKS atau %

2) Persentase PSKS perseorangan yang menjalankan fungsinya secara profesional

PSKS perseorangan merupakan PSKS yang turut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing. Jumlah PSKS perseorangan yang menjalankan fungsinya secara profesional pada Tahun 2019 adalah orang atau %

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada masalah dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.

2) Program Penanggulangan Kemiskinan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kabupaten Bintan** melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.530.291.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.408.354.852,- atau 95,18%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.880.000,- realisasi sebesar Rp.177.098.786,- atau (88,16%). Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)) bagi 94 sasaran bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan sebesar

Rp.2.579.500.000,- dan APBN melalui Kementerian Sosial sebesar Rp.600.000.000,- bagi 40 sasaran

Tabel 3.8 Daftar Alokasi dan Sasaran Bantuan RS RTLH di Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Kecamatan/ Desa/ Kel	Jlh sasaran (unit)	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber dana
1	BINTAN TIMUR Kel. Kijang Kota Kel. Sei Lekop	6 1	134.000.000,- 21.000.000,-	APBD Bintan
2	TAMBELAN Desa Mentebung Ds Pulau Pinang Ds Kukup Desa Kp Hilir Ds Batu Lepuk Kel. Teluk Sekuni Ds Kp Melayu	25 4 8 8 10 14 7	837.500.000,- 130.000.000,- 208.000.000,- 208.000.000,- 260.000.000,- 364.000.000,- 182.000.000,-	APBD Bintan
3	TOAPAYA Ds Toapaya Selatan	2	42.000.000,-	APBD Bintan
4	GUNUNG KIJANG Desa Kawal Desa Malang Rapat	6 3	130.000.000,- 63.000.000,-	APBD Bintan
	TOTAL	94 UNIT	2.727.500.000,-	

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2019

Tabel 3.9 Daftar Alokasi dan Sasaran Bantuan RS RTLH Sumber Dna APBN di Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Kecamatan/ Desa/ Kel	Jlh sasaran (unit)	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber dana
1	BINTAN TIMUR Kel. Kijang Kota	10	150.000.000,-	APBN
2	GUNUNG KIJANG Kel. Kawal Desa Gunung Kijang Desa Teluk Bakau	17 5 8	255.000.000,- 75.000.000,- 120.000.000,-	APBN
	TOTAL	40 UNIT	600.000.000,-	

(2) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas KUBE

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.307.000.000,- realisasi sebesar Rp.275.806.034,- atau (89,84%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis bagi 50 pengurus dan anggota Kube Kecamatan Bintan Timur tentang manajemen pengelolaan dan pengembangan Kube menuju Kube yang Mandiri, dan tersedianya outlet KUBE sebagai sarana untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk KUBE.

(3) Kegiatan Pembinaan KUBE dan UEP Fakir Miskin

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.415.040.000,- realisasi sebesar Rp.384.878.668,- atau (89,84%). Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya penyaluran bantuan Kube sumber dana Dekonsentrasi sebanyak 40 Kube, terlaksananya verifikasi calon penerima bantuan UEP sumber dana APBD Provinsi Kepri sebanyak 20 UEP, terlaksananya penilaian KUBE Prestasi, tersedianya insentif bagi 18 pendamping KUBE dan terlaksananya pembinaan KUBE.

(4) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.260.000.000,- realisasi sebesar Rp.258.703.516,- atau (99,5%). Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan permodalan bagi 100 KPM (10 Kube) sesuai dengan bidang usaha masing-masing, dengan total nilai bantuan Rp.200.000.000,- dimana masing-masing Kube mendapatkan nilai bantuan sebesar Rp.20.000.000,-

(5) Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif bagi Fakir Miskin

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran Rp.299.650.000,- realisasi sebesar Rp.285.794.604,- atau (95.38%). Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan permodalan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kube bagi 75 KPM (75 UEP) sesuai dengan bidang usaha masing-masing, dengan total nilai bantuan Rp.255.000.000,- dimana 40 UEP mendapat bantuan masing-masing Rp.2.000.000,- dan 35 UEP mendapat bantuan Rp. 5.000.000,- di Kecamatan Gunung Kijang dan Bintang Timur.

(6) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran Rp.473.965.000,- realisasi sebesar Rp.471.473.368,- atau (99,47%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya verifikasi dan validasi terhadap basis data terpadu sebanyak 9.724 Rumah Tangga Sasaran (RTS) sehingga diperoleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 sebanyak 9.552 RTS.

(7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KUBE

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran Rp.180.000.000,- realisasi sebesar Rp.179.181.300,- atau (99,55%). Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan manajemen Pendamping KUBE dalam mendampingi KUBE sehingga Kube berjalan sesuai dengan aturan dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebanyak 18 orang pendamping, terlaksananya kegiatan Study Tiru Pendampingan Kube oleh Tim Pendamping Kube Kabupaten Bintang bersama Tim Dinas Sosial Kabupaten

Bintan, sebanyak 18 orang ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, pada Tanggal 24 s/d 27 Januari 2019.

(8) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Masyarakat Miskin

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran Rp.393.655.000,- realisasi sebesar Rp.363.655.000,- atau (95,37%). Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 4.595 KPM. Pada Bulan September 2019 terjadi transformasi dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana pada BPNT KPM tidak menerima bantuan dalam bentuk tunai tetapi diganti dengan voucher yang berisi uang Rp. 110.000,- yang bisa ditukarkan dengan beras dan telur.

Tabel 3.10 Daftar Penerima Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT) di Kabupaten Bintan Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Kpm	Sumber Dana
Bintan Pesisir	326	APBN
Bintan Timur	889	
Bintan Utara	577	
Gunung Kijang	456	
Seri Kuala Lobam	446	
Tambelan	606	
Teluk Bintan	369	
Teluk Sebong	474	
Toapaya	348	
Mantang	104	
Jumlah	4.595	

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) *Persentase Fakir Miskin Penerima Bantuan Ekonomi Produktif yang meningkat pendapatannya*

Pada tahun 2019 jumlah keluarga miskin yang ditangani oleh Dinas Sosial mencapai 4.595 Keluarga Miskin atau Keluarga Penerima Manfaat melalui kegiatan Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Masyarakat Miskin dan Bantuan Tunai Bersyarat / Program Keluarga Harapan. Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan usaha ekonomi produktif pada tahun 2019 adalah 595 KPM.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program Penanganan Fakir Miskin tersebut tidak ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Kabupaten Bintan** melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.633.193.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.574.467.520,- atau 96,40%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Penanganan Anak Yang Mengalam Permasalahan Sosial

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.018.000,- realisasi sebesar Rp.90.958.200,- atau 99,93%. Hasil dari kegiatan ini adalah tertangani anak yang mengalami permasalahan sosial seperti anak mengalami tindak kekerasan, eksploitasi seksual, pendampingan pada anak yang berhadapan dengan hukum, dan penguatan pada keluarga anak yang mengalami permasalahan sosial. Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Sosial Kabupaten Bintan dibantu oleh 1 orang Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Kementerian Sosial RI. Jumlah anak yang ditangani selama Tahun 2019 adalah sebanyak 65 orang anak, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebanyak 21 orang anak. Melalui kegiatan ini juga dilaksanakan acara Sehari Bersama Anak sebanyak 200 anak dari 9 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Bintan.

(2) Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia di Luar Panti

Dilaksanakan bekerja sama dengan Komisi Daerah (KOMDA) Lanjut Lansia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.223.000,- realisasi sebesar Rp.218.069.820,- atau (99,93%). Bentuk kegiatannya adalah Sehari Bersama Lansia yang diisi dengan pemeriksaan kesehatan, pemberian nutrisi dan souvenir kepada 1850 orang lanjut usia yang berasal dari 7 Kecamatan se Kab. Bintan. Pelayanan home care bagi lanjut usia dilaksanakan di Kecamatan Gunung Kijang, sasarannya

adalah 50 orang lanjut usia. Pelayanan home care ditujukan bagi lanjut usia yang berada dalam asuhan keluarga.

(3) Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.788.000,- realisasi sebesar Rp.57.252.070,- atau 94,18%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya keberfungsian sosial penyandang cacat guna terwujudnya kemandirian dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha, peningkatan kemampuan diri melalui pelatihan di panti rehabilitasi, juga melalui pendampingan yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Sosial sehingga Usaha Ekonomi Produktif yang sudah terbentuk bisa tetap berjalan dan bahkan mungkin berkembang. Pada tahun 2019 Dinas Sosial mengadakan kegiatan Sosialisasi tentang Pengasuhan Anak Disabilitas Bagi Orang Tua (Parenting Skill) sebanyak 34 orang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi bagi para orang tua tentang kebutuhan anak disabilitas dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas serta fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga tumbuh keinginan untuk memberi kesempatan kepada anak disabilitas dalam mengecap pendidikan formal maupun informal sesuai dengan minat dan bakatnya. Pada tahun 2019 Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kedisabilitas (FKKADK) melalui dana APBD Kabupaten Bintan melakukan pendampingan bagi 16 Anak dengan Disabilitas Berat, memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 12 Penyandang Disabilitas Berat.

(4) Kegiatan Penanganan orang yang mengalami gangguan jiwa/ mental

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.330.400,- realisasi sebesar Rp.97.096.910,- atau (99,76%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman penyandang gangguan jiwa/ mental yang dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Tampan di Pekan Baru sebanyak 10 orang pasien, ke Rumah Sakit Busung sebanyak 22 orang dan yang dijemput pasca rehabilitasi sebanyak 9 orang. Pengobatan di Rumah Sakit Jiwa tidak menyembuhkan ODGJ secara permanen, dibutuhkan tindak lanjut pemulihan mental dan sosial melalui rehabilitasi. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga sangat perlu, oleh karena itu pembinaan pasca penyembuhan kepada pihak keluarga untuk perawatan dan pengobatan dilakukan pada tahun 2018, sehingga keluarga bisa meneruskan pendampingan pengobatan kepada klien. Pada Tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Bintan mengadakan hubungan kerjasama dengan Panti Sosial Bina Laras di Bengkulu untuk pengobatan lanjutan bagi pasien yang sudah sembuh dari RSJ. Pada tahun 2018 telah dikirim 1 orang klien ke PSBL Bina Laras di Bengkulu, dengan pengobatan lanjutan ini diharapkan para Penyandang Gangguan Jiwa/ Mental dapat sembuh, kembali ke tengah-tengah keluarganya dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat.

(5) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.611.800.000,- realisasi sebesar Rp.609.820.660,-

atau 99,68%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia di panti Rumah Bahagia melalui penyediaan kebutuhan pangan, sandang dan sosial bagi 41 orang lanjut usia serta insentif bagi 9 orang pengurus Rumah Bahagia.

(6) Pemberian Bantuan UEP bagi Lanjut Usia Potensial

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.99.109.740,- atau 99,11%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi 45 orang lanjut usia di Kecamatan Gunung Kijang dan Toapaya sumber dana APBD Kab. Bintan. Tujuan yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan lanjut usia baik secara ekonomi maupun sosial.

(7) Kegiatan Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan NAPZA Secara Efektif.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.354.034.000,- realisasi sebesar Rp.303.125.410,- atau (85.62%). Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya penutupan 2 lokalisasi di Kabupaten Bintan dan dipulangkannya pekerja seks komersil (PSK) ke daerah asal sebanyak 56 PSK.

(8) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anak Putus Sekolah Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.99.034.710,- atau 99,03%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi 13 orang anak yang

mengalami permasalahan sosial . Tujuan yang diharapkan adalah tersedianya sarana bagi anak putus sekolah untuk mengisi waktu luang dan menumbuhkan kemandirian anak.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) Jumlah PMKS (anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Jumlah PMKS di luar keluarga miskin di Kabupaten Bintan Tahun 2019 adalah 5441 jiwa, yang ditangani atau diberi pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah sebanyak 2.676 orang atau 49.18%.

Tabel. 3.11 Daftar Jumlah dan Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Jenis PMKS	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	P
1	Keluarga Miskin	9552		
2	Penyandang Disabilitas	310	166	124
3	Orang Dengan Gangguan Jiwa	142	83	59
4	Anak di Panti Asuhan/Non Panti	257	100	157
5	Anak yang mengalami permasalahan sosial (anak nakal, ABH, AMPK)	249		
6	Wanita Tuna Susila	56		56
7	Lanjut Usia	3674		
8	Bekas Warga Binaan LP	8	8	
9	ODHA	18	10	8
10	Korban Bencana Alam	718		
11	Orang Terlantar	14		
	Jumlah	11.428		

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total alokasi

anggaran sebesar Rp.1.055.772.000,-. dan realisasi anggaran sebesar Rp.996.095.135,- atau 94,35%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas jaminan dan perlindungan sosial

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat

Dilaksanakan bekerja sama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Persatuan Isteri-isteri Dewan (PISWAN) Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.305.000.000,- realisasi sebesar Rp.303.468.300,- atau (99,5%). Bentuk kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu di 10 Kecamatan se Kabupaten Bintan sebanyak 1730 paket.

(2) Kegiatan Administrasi Program Keluarga Harapan

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.320.000,- realisasi sebesar Rp.195.671.975,- atau (99,67%). Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi antar Pelaksana Program (provider) dan pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan yang diterima peserta sasaran Program Keluarga Harapan sebanyak 3.121 KPM, dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 3.12 Daftar Penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bintan Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Kpm	Sumber Dana
Bintan Pesisir	216	APBN
Bintan Timur	576	
Bintan Utara	380	
Gunung Kijang	324	
Mantang	61	
Seri Kuala Lobam	311	
Tambelan	414	
Teluk Bintan	271	
Teluk Sebong	322	
Toapaya	246	
Total	3.121 KPM	

Kegiatan Bantuan Tunai Bersyarat Program Keluarga Harapan ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan perbaikan gizi, diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Tabel 3.13 Jumlah KPM dan bantuan yang dibayarkan pada Tahun 2019

N o	Uraian Kegiatan	Jumlah KPM	Jumlah dana (Rp.)	Ket.
1	Tahap I	3380	4.973.550.000,-	APBN
2	Tahap II	3323	2.518.450.000,-	
3	Tahap III	3292	2.629.175.000,-	
4	Tahap IV	3156	1.844.050.000,-	
	TOTAL		11.865.225.000,-	

(3) Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.216.902.000,- realisasi sebesar Rp.211.816.000,- atau (97,66%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran bantuan logistik masa tanggap darurat dengan cepat dan tepat bagi korban bencana di Kabupaten Bintan. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bintan selama Tahun 2019 sebanyak 21 kali dengan korban jiwa berjumlah 835 jiwa.

(4) Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.800.000,- realisasi sebesar Rp.66.248.750,- atau (63.21%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya perlindungan sosial kepada orang terlantar baik yang sehat secara fisik maupun tidak. Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal pada Tahun 2019 adalah 5 orang. Jumlah orang terlantar yang ditangani di Rumah Singgah sebanyak 14 orang

(5) Administrasi Verifikasi dan Validasi serta Perubahan Data bagi Peserta PBI JK

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 32.750.000,- realisasi sebesar Rp. 32.347.450,- atau (98,77%). Hasil dari kegiatan ini terlaksananya verifikasi dan validasi bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JK sumber dana APBD (BPJS) sehingga diperoleh data PBI JK APBD yang akurat.

(6) Bimbingan Teknis Service Provider SDM PKH

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi sebesar Rp. 95.531.740,- atau

(95,53%). Hasil dari kegiatan ini terlaksananya bimbingan teknis bagi pemberi layanan kesehatan dan pendidikan, Pendamping, Asisten penamping, Operator dan Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan sebanyak 75 orang

(7) Peningkatan Kualitas SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.91.009.020,- atau (91,01%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis bagi anggota taruna siaga bencana dalam penanganan korban bencana dalam lingkup penyaluran bantuan tanggap darurat, evaluasi dan dapur umum lapangan sebanyak 63 orang anggota tagana..

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

1) *Persentase Masyarakat Yang Mendapat Bantuan Jaminan Sosial*

Yang dimaksud dengan masyarakat pada indikator ini selain yang termasuk dalam PMKS juga mereka yang tidak termasuk PMKS tetapi rawan untuk masuk kategori PMKS, misalnya adalah para pekerja sector informal atau buruh pabrik yang dikontrak oleh perusahaan, penghuni panti, penyandang psikotis, penyandang disabilitas berat, lanjut usia dengan kriteria tertentu, rumah tangga sangat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan konflik. Sifat bantuannya berupa uang tunai untuk kategori PMKS dan pembayaran premi asuransi kepada masyarakat

yang rawan PMKS dan bantuan logistic padasaat tanggap darurat bencana. Sebagian besar kegiatan ini bersumber dari Kementerian Sosial RI.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terpilah khususnya data pada bidang Rehabilitasi Sosial seperti lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, wanita tuna susila, korban tindak kekerasan, ODHA, orang dengganggu jiwa, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan dan korban napza sehingga menyulitkan dalam menentukan sasaran kegiatan dan mengukur hasil kinerja.
- b. Penetapan penerima bantuan kegiatan penanganan keluarga miskin khususnya dari Kementerian Sosial RI yang mensyaratkan bahwa calon penerima harus peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau terdaftar dalam Basis Data Terpadu, sementara kondisi real di lapangan banyak keluarga miskin yang tidak menerima PKH atau tidak terdaftar di Basis Data Terpadu sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
- c. Kegiatan pada Program Penanganan Fakir Miskin, khususnya sumber dana APBD Kabupaten Bintan belum menggunakan Basis Data Terpadu, sehingga sulit untuk mengukur indikator kinerjanya.
- d. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial baik kualitas maupun

kuantitas sementara sarana tidak tersedia misalnya rumah singgah atau shelter bagi orang yang mengalami gangguan jiwa/ mental dan orang terlantar, sehingga menyulitkan dalam penanganannya.

- e. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diterima dari pemerintah membuat masyarakat cenderung menjadi manja dan malas sehingga setiap bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan secara maksimal
- f. Pembangunan kesejahteraan sosial masih dititikberatkan pada penanganan masyarakat miskin, sehingga alokasi dana untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lain sangat kecil dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial belum optimal.
- g. Anggaran yang terbatas menyulitkan untuk melaksanakan pembinaan secara kontiniu karena kondisi geografis daerah pada umumnya terpencar dan harus ditempuh dengan menggunakan transportasi laut dengan biaya relatif tinggi.
- h. Frekuensi bencana alam yang cenderung meningkat, mengakibatkan buffer stock untuk masa tanggap darurat penanggulangan bencana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat ke Kabupaten Bintan tidak cukup.

2. Solusi

- a) Melakukan pemutakhiran data dan pemilahan data dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada

- b) Membuat usulan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan agar melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang tercakup dalam Basis Data Terpadu dan secara perlahan memperbaiki Basis data Terpadu khususnya pada data penerima program seperti data penerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Program Keluarga Harapan.
- c) Mengusulkan agar dalam pemberian bantuan bagi masyarakat miskin harus bersumber dari Basis Data Terpadu untuk menjaga ketepatan sasaran.
- d) Membuat usulan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan agar menyedakan bantuan logistic masa tanggap darurat sehingga semua korban bencana bisa dilayani.
- e) Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menangani permasalahan sosial yang ada dilingkungannya dengan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan maupun lembaga pelayanan sosial yang ada di Kabupaten Bintan.
- f) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia potensi dan sumber kesejahteraan sosial melalui pemberian bimbingan teknis dan pelatihan sehingga mampu menjadi mitra Dinas Sosial di wilayahnya masing-masing.
- g) Mengembalikan fungsi pelayanan sosial kepada hakikatnya semula yaitu “ Help People To Help

Them Self” sehingga masyarakat tidak tergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menyusun rencana kegiatan yang sasarannya adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial sehingga PSKS yang ada di Kabupaten Bintan bisa optimal dalam menjalankan tugas dan peranannya.

Jumlah anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bintan tahun 2019 adalah Rp. 12.989.951.796,- meliputi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp 3.581.822.296,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.408.129.500,- (sembilan milyar empat ratus delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Dana konversi sebesar Rp. 1.984.030.200,- (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dan untuk kegiatan yang langsung ditujukan kepada masyarakat sebesar Rp. 7.424.099.300,- (tujuh milyar empat ratus dua puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Bahwa secara keseluruhan anggaran Dinas Sosial Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.732.856.796,- atau mencapai 13.34 % dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2018. Hal ini juga menunjukkan semakin besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bintan.

Secara keseluruhan realisasi keuangan Dinas Sosial Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 12.178.692.678,- (dua belas milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu

enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau **93,75** % dari total anggaran Dinas Sosial. Realisasi keuangan untuk Belanja Langsung adalah Rp.8.865.034.361 ,- atau **94,23%** dan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.313.658.317,- **atau 92,51** % dari jumlah Belanja Tidak Langsung. Sehingga secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bintan tahun 2018 adalah **93,75** %.

3.1.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

3.1.2.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keenam** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dan **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** adalah sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender adalah ukuran kesenjangan pembangunan manusia terpilah, IPG merupakan rasio dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki terhadap Indeks pembangunan Manusia (IPM) perempuan, Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2019 berdasarkan rilis daripada BPS Kabupaten Bintan adalah sebesar **93,10** dari target **92,41** sehingga dapat dikatakan pelaksanaan keadilan gender di Kabupaten Bintan telah berjalan dengan baik melalui sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat baik lingkungan kerja, sekolah maupun lingkungan masyarakat.

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam bidang politik dan ekonomi serta peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2019 adalah sebesar **63,41** dari target **68,50** atau sebesar 92,57 % dari target

sehingga dapat dikatakan pelaksanaan keadilan gender di Kabupaten Bintan telah berjalan dengan baik melalui sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat baik lingkungan kerja, sekolah maupun lingkungan masyarakat.

3) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Salah satu indikator untuk melihat sejauh mana terselenggaranya penanganan korban yang maksimal dan efisien. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2019 adalah sebesar **0,01** dari target **0,01** atau sebesar 100 % dari target sehingga dapat dikatakan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga telah berjalan dengan baik di Kabupaten Bintan.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 869.727.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 843.853.948,- atau 97,03 %. *Outcome* program ini untuk meningkatnya pengetahuan dan peran serta organisasi kewanitaan dan terselenggaranya penanganan korban yang maksimal dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender:

- Berkoordinasi dengan Dinas terkait agar perempuan pelaku Industri Rumahan tercatat sebagai pelaku usaha.
- Berkoordinasi dengan pihak swasta dalam pemasaran produk Industri Rumahan agar dapat dipasarkan di pasar

oleh oleh yang sering dikunjungi wisatawan dan sebagai souvenir di beberapa penginapan di lagoi.

- Bersinergi dengan DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau untuk pelatihan politik perempuan dan pembinaan perempuan sebagai pelaku Industri Rumahan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Fasilitas Pengembangan P2TP2A di Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.125.200,-. terealisasi sebesar Rp. 64.885.760,- (96,66 %). Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah terlaksananya upaya perlindungan, pencegahan, penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak khususnya di Kabupaten Bintan. Sedangkan hasil (*outcomes*) dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Fasilitas Pengembangan P2TP2A di Kabupaten Bintan merupakan pusat pelayanan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. P2TP2A Cahaya Bintan merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan anak serta menyediakan pelayanan terpadu meliputi pendampingan, pelayanan psikologis, bantuan hukum serta rujukan medis dan rumah aman gratis di Kabupaten Bintan.

(2) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 132.218.100,-. terealisasi sebesar Rp.

130.450.069,- (98,66 %). *Output* kegiatan ini adalah tersebarnya informasi tentang kesetaraan gender dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan PUG kedalam siklus perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dalam pelaksanaan PUG di daerah diharapkan setiap SKPD dapat melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Untuk mewujudkan program tersebut Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen melaksanakan program yang responsif gender guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan, salah satu program yang dilaksanakan adalah Pertemuan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) untuk merealisasikan setiap program yang responsif di setiap SKPD.

(3) Jambore PKK

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 292.740.000,-. terealisasi sebesar Rp. 284.365.126,- atau 97,14 %. *Output* kegiatan ini adalah

terlaksananya kegiatan jambore PKK. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah tercapainya kesejahteraan keluarga. Yang menjadi sasaran adalah PKK se-Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Bintan. Kegiatan ini merupakan turunan dari kegiatan PKK Pusat dan Provinsi dan rutin dilaksanakan setiap tahun. Pembiayaan meliputi: Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim penilaian, Dokumentasi/ publikasi, cetak dan penggandaan, makan minum rapat, makan minum kegiatan, hadiah, seragam kegiatan dan biaya penginapan pada hari puncak kegiatan jambore PKK tahun 2019.

(4) Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.088.000,-. terealisasi sebesar Rp. 103.179.355,- atau 99,13 %. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan Penyuluh keamanan Pangan dan seni ketrampilan Decoupage bagi perempuan pelaku industri rumahan di Kabupaten Bintan. *Outcomes* kegiatan ini adalah yaitu sebanyak 40 Perempuan pelaku Industri rumahan (IR) di wilayah kabupaten Bintan mendapat sertifikat Keamanan pangan yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pelaku industri Rumah Tangga.

(5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Anggota Keluarga ASN (DW)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 129.264.900,-. terealisasi sebesar Rp 123.969.798,- atau 95,9 %. Pembiayaan meliputi: Honorarium panitia pelaksana kegiatan non PNS, Honor fasilitator dan juri lomba, Dokumentasi/ publikasi, belanja pakaian olah raga,

makan minum rapat dan makan minum kegiatan. *Output* kegiatan ini adalah 40 Anggota Keluarga ASN mendapat pelatihan keterampilan seni melukis puding 3 dimensi. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan ketrampilan anggota keluarga ASN. Sasarannya adalah ibu – ibu anggota keluarga ASN Se-kabupaten Bintan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Pelatihan keterampilan seni menghias puding 3 dimensi (Puding ART) dan family gathering DWP Kabupaten Bintan.

(6) Peningkatan Kapasitas Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.291.400,-. terealisasi sebesar Rp. 137.003.840,- atau 94,95 %. pembiayaan meliputi: Honorarium panitia pelaksana kegiatan non PNS, Honor Nara sumber, seminarkit, Transfortasi peserta, Dokumentasi/ publikasi, sewa ruang pertemuan, makan minum rapat dan makan minum kegiatan. *Output* kegiatan ini adalah Sebanyak 80 Anggota organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bintan mengikuti seminar, sebanyak 110 Pengurus Organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bintan mendapat pembinaan organisasi dan terpilihnya Ketua dan Pengurus GOW yang baru, masa Bakti 2018-2023. Hasil (Outcomes) kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan perempuan di lingkup Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Salah satu komponen pembentuk IDG adalah keterwakilan perempuan di parlemen, hasil pemilu di kabupaten Bintan tahun 2019 yang lalu, tercatat sekitar 6 orang (24%) perempuan di parlemen, meskipun mengalami kenaikan dari periode sebelumnya yang hanya 5 orang (16%), namun IDG kabupaten Bintan belum mencapai kuota minimal yang ditetapkan oleh UUD N.8 tahun 2008 tentang bakal calon parlemen yaitu 30%
- b) Perempuan sebagai tenaga manager Profesional, administrasi dan tehnisi di pada tahun 2019 tercatat hanya 3 orang eselon 2, eselon 3 berjumlah 47 Orang, sedangkan eselon 4 sebanyak 207 Orang. dan di perusahaan swasta jumlah pekerja wanita yang menjabat managemant level hampir sama dengan laki-laki yaitu 48%.
- c) Dalam dunia kerja atau usaha, pada kenyataannya banyak ibu-ibu yang menjadi pelaku industri rumahan (IR), namun mereka tetap di data sebagai ibu rumah tangga padahal penghasilan mereka sangat membantu dalam peningkatan ketahanan keluarga
- d) Semakin tingginya angka kasus anak di kabupaten bintan
- e) Rendahnya support APBD yang diberikan oleh pemerintah
- f) Pergantian Perencana di perangkat daerah membuat terputusnya informasi tentang pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsive gender sehingga perlu pembinaan dari awal bagi perencana yang baru .

- g) Masih terbatasnya Fasilitator PPRG di Kabupaten Bintan
- h) Belum tersedianya Profil Gender di Kabupaten Bintan yang memadai.

(2) Solusi

- a) Perlu peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak agar kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat berkurang, sehingga angka IPG terus meningkat.
- b) Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bintan masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- c) Perlu selalu diadakan pelatihan politik perempuan dan sosialisasi UU No.8 tahun 2008 tentang penetapan kuota minimal bakal calon anggota parlemen perempuan sebesar 30%.
- d) Perlu adanya pemikiran dan koordinasi stakeholder bagaimana pelaku usaha industri rumahan (IR) bisa berkontribusi dalam mendongkrak IDG di kabupaten Bintan
- e) Peningkatan strategi Pencegahan di masyarakat melalui sosialisasi dan pembekalan serta kegiatan pelatihan kepada aktivis guna memperdalam pengetahuan yang dimiliki
- f) Peningkatan melalui support anggaran untuk kekerasan terhadap anak
- g) Perlu dilaksanakan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Perencana Program Perangkat Daerah Se Kabupaten Bintan

- h) Perlu dilaksanakan Pelatihan Fasilitator PPRG di Kabupaten Bintan.
- i) Perlu pengadaan buku profil gender Kabupaten Bintan.

2) Program Perlindungan Anak

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 487.959.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 465.475.461,- atau 95,39 %. *Outcome* program ini untuk fasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka melindungi anak di Kabupaten Bintan seperti Kegiatan Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Konvensi Hak Anak (KHA).

a. Pelaksanaan Program

(1) Penguatan Kelembagaan Forum Anak

Forum Anak merupakan suatu wadah partisipasi anak yang anggotanya adalah perwakilan dari kelompok anak dan dikelola oleh anak dibina oleh pemerintah. Fungsi dari forum anak adalah untuk mendengar, memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Kegiatan penguatan kelembagaan forum anak ini dilaksanakan bekerjasama dengan 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Dana yang di alokasikan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Forum Anak sebesar Rp. 432.863.400,-. terealisasi sebesar Rp. 412.877.876,- atau 95,38 %. *Output* kegiatan ini adalah terbinanya 10 forum anak kecamatan dan fasilitator forum anak. Selain itu output dari kegiatan ini adalah terlatihnya Sumber Daya Manusia (tenaga kesehatan, pendidikan, LSM, penegak hukum, yayasan, Forum Anak , PATBM dll), 4 Kecamatan. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini

adalah terlaksananya pelatihan Konvensi Hak Anak se-Kabupaten Bintan.

(2) Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)

Dana yang di alokasikan Kegiatan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) sebesar Rp. 55.095.700,-, terealisasi sebesar Rp. 52.597.585,- (95,46 %). *Output* kegiatan ini adalah terbinanya 19 PATBM desa/kelurahan di 7 Kecamatan dan fasilitator. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan 19 PATBM desa/kelurahan di 7 kecamatan dan fasilitator.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

1) Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Anak

Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada anak tahun 2019 adalah sebesar 100% dari target 100% karena koordinasi cukup baik dengan SKPD terkait (Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, KPPAI) dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, dan sudah terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

2) Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan pada Perempuan

Persentase penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan tahun 2019 adalah sebesar 100% dari target 100% karena koordinasi cukup baik dengan SKPD terkait (Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, KPPAI) dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan, dan sudah terbentuknya Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak).

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Masih tingginya persentase anak korban kekerasan
- b) Pembinaan forum anak dapat dilaksanakan di 10 kecamatan, tahun ini hanya terlaksana 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan, Mantang, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong.
- c) Geografis yang sulit dan jauh serta minimnya anggaran untuk forum anak.
- d) Masih rendahnya tingkat pengetahuan aktivis tentang kekerasan dan perlindungan anak
- e) Pembinaan PATBM dapat dilaksanakan di 7 kecamatan, tahun ini hanya terlaksana 4 desa/kelurahan yaitu Kecamatan Gunung Kijang (4 desa/kelurahan), Kecamatan Bintan Utara (2 Kelurahan Tg Uban Kota dan Tg Uban Selatan), Kecamatan Toapaya (desa Toapaya) dan Kecamatan Bintan Timur (4 Kelurahan Kijang Kota , Kelurahan Sei Lekop, Kelurahan Gunung Lengkuas dan Kelurahan Sei Enam. Jadi total keseluruhan ada 19 PATBM desa/kelurahan.
- f) Geografis yang sulit dan jauh minimnya anggaran untuk PATBM
- g) Masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia kita tentang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak
- h) Belum adanya Narasumber atau Fasilitator yang kompeten tentang Konvensi Hak anak (KHA).

(2) Solusi

- a) Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak.
- b) Melaksanakan pembinaan ke 8 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Toapaya, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan dan Teluk Sebong,
- c) Pembentukan Forum Anak untuk Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Tambelan.
- d) Penambahan anggaran untuk Forum Anak
- e) Meningkatkan pengetahuan Aktivis PATBM tentang kekerasan dan perlindungan anak .
- f) Melaksanakan pembinaan ke 7 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Toapaya dan Kecamatan Gunung Kijang.
- g) Penambahan anggaran untuk PATBM.
- h) Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia tentang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.
- i) Mengirimkan tenaga untuk di latih sebagai Narasumber atau Fasilitator Konvensi Hak Anak (KHA)

3.1.2.2 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keempat** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** adalah sebagai berikut:

1) *Persentase Unmetneed*

Kegiatan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Kontrasepsi Tetap (KONTAP) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kegiatan pendukung untuk indikator unmetneed sebesar 13,98 dari target 10,25 yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 artinya realisasi hanya mencapai sebesar 73,32 % sedangkan bila dibandingkan capaian persentase unmetneed pada tahun 2018 hanya terealisasi 65,27 % dari target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi 8,05 %.

2) *Total Fertility Rate (TFR)*

Berdasarkan hasil data keluarga tahun 2019 Kabupaten Bintan merupakan daerah dengan jumlah penduduk 153.915 jiwa. Laki-laki 79.200 jiwa dan perempuan 74.715 jiwa. Pencapaian dengan menahan laju pertumbuhan penduduk TFR di angka 2,3 dari target tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 3,00 atau mencapai 130,43% merupakan hasil maksimal yang harus ditekan atau dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang. APBD Kabupaten Bintan dalam Bidang Pengendalian Penduduk tentunya harus ditingkatkan guna lebih menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan. Melalui kegiatan Pembangunan Balai Penyuluhan KB, Pengadaan Sarana Pendataan dan Pengadaan Alat Peraga Program KKBPK bagi PPKBD dan Sub PPKBD dari

Dana Alokasi Khusus (Fisik), Bantuan Operasional Balai Penyuluhan KB Dana Alokasi Khusus (Non Fisik). Pembinaan Kader KB dan Tenaga Penyuluh, Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Kependudukan telah memberikan pengaruh besar pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang secara tidak langsung mampu menekan TFR Angka Pertumbuhan Penduduk, kegiatan tersebut mampu memberikan komunikasi informasi dan edukasi sehingga membumikan program KKBPK baik ditengah masyarakat maupun hubungan antar organisasi Perangkat Daerah dengan penyerasian kebijakan.

3) *Persentase Tribina (BKB, BKR dan BKL), UPPKS dan PIK-R aktif;*

Kegiatan peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga menuju keluarga berkualitas mandiri dengan indikator jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina sebesar 600 keluarga yang kemudian terrealisasi sebesar 222 keluarga sehingga pada tahun 2019, terdiri dari:

1. Jumlah Kelompok BKB = 102 Kelompok
2. Jumlah Kelompok BKR = 30 Kelompok
3. Jumlah Kelompok BKL = 44 Kelompok
4. Jumlah Kelompok UPPKS = 46 Kelompok

Dengan demikian persentase Tribina (BKB, BKR, BKL), UPPKS dan PIK-R aktif sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 100%..

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan** melalui 11 (sebelas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.899.343.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.470.595.412,- atau 89,00 %. Tujuan program ini untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk didalamnya upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. Terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK FISIK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.259.874.000,-. terealisasi sebesar Rp. 1.174.326.355,- atau 93,21 %. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Balai Penyuluhan KB. Penyebab tidak terserapnya dana yang disediakan 100% dikarenakan adanya sisa perjalanan dinas dalam daerah dan sisa kontrak pengadaan E-Katalog Meubelair kursi. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Balai Penyuluhan KB. Sasaran kegiatan ini adalah Desa / Kelurahan yang ditunjuk sebagai Kampung KB dan memiliki lahan untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB. Pada tahun 2018 telah di laksanakan kegiatan tersebut yang berlokasi di Kecamatan Teluk Sebong (1 unit) dan Kecamatan Teluk Bintan (1 unit). Tahun 2019

telah dilaksanakan pembangunan 2 Balai Penyuluhan KB yaitu di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan Timur.

(2) Pengadaan Sarana Pendataan (DAK FISIK)

Dana yang di alokasikan Kegiatan Pengadaan Sarana Pendataan (DAK FISIK) sebesar Rp. 72.323.530,-. terealisasi sebesar Rp. 72.160.000,- (99,77%). Hasil kegiatan ini adalah tersedianya sarana pendataan berupa 3 buah laptop, 1 buah infokus dan layar yang dialokasikan ke Balai Penyuluh KB Kecamatan.

(3) Pengadaan Alat Peraga Program KKBPK Bagi PPKBD dan Sub PPKBD (DAK FISIK)

Dana yang di alokasikan Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Program KKBPK bagi PPKBD dan Sub PPKBD (DAK FISIK) sebesar Rp. 37.676.470,-. terealisasi sebesar Rp. 37.565.000,- (99,70%). Hasil kegiatan ini adalah tersedianya PPKBD Kit sebanyak 10 buah yang dialokasikan kepada 10 orang PPKBD Kecamatan yang merupakan koordinator KB Kecamatan di Kabupaten Bintan.

(4) Bantuan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan (DAK NON FISIK)

Dana yang di alokasikan Kegiatan Bantuan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan (DAK NON FISIK) sebesar Rp. 468.801.000,-. terealisasi sebesar Rp. 384.636.765,- atau 82,05 %. Penyebab tidak terserap 100% dari anggaran yang tersedia adalah dikarenakan adanya belanja transportasi lokal, biaya makan minum rapat dan makan minum kegiatan yang tidak bisa dicairkan dikarenakan adanya penyesuaian dengan SSH Kabupaten Bintan, serta

adanya sisa kontrak. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan di Kabupaten Bintan.

(5) Bantuan Operasional Distribusi Alokon (DAK NON FISIK)

Dana yang di alokasikan Kegiatan Bantuan Operasional Distribusi Alokon (DAK NON FISIK) sebesar Rp. 26.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.768.999,- (44,5 %). Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional distribusi alokon. Distribusi Alokon dilakukan sesuai dengan permintaan masing-masing faskes di Kabupaten Bintan dan melihat stok alokon yang tersedia di Gudang Alokon.

(6) Bantuan Operasional Pergerakan Di Kampung KB (DAK NON FISIK)

Dana yang di alokasikan Kegiatan Bantuan Operasional Pergerakan Di Kampung KB (DAK NON FISIK) sebesar Rp. 1.094.000.000,-. terealisasi sebesar Rp. 921.857.480,- (84,26 %). Hasil kegiatan ini adalah tersedianya operasional pergerakan di Kampung KB dan terlaksananya kegiatan di Kampung KB. Penyebab tidak 100% penyerapan dana yang tersedia adalah karena adanya belanja transportasi lokal, biaya makan minum rapat dan makan minum kegiatan yang tidak bisa dicairkan dikarenakan adanya penyesuaian dengan SSH Kabupaten Bintan, serta adanya sisa kontrak.

(7) Bantuan Operasional Pembinaan Program Oleh Kader KB (DAK NON FISIK)

Dana yang di alokasikan Kegiatan Bantuan Operasional Pembinaan Program Oleh Kader KB (DAK NON FISIK) sebesar Rp. 382.200.000,-. terealisasi sebesar Rp. 381.999.770,- (99,95 %). Hasil kegiatan ini adalah

tersedianya operasional pembinaan program oleh Kader KB. Sasaran kegiatan ini adalah keluarga yang memiliki PUS, lansia, balita, dan remaja melalui kegiatan kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Bina Keluarga Remaja).

(8) Dukungan Media KIE (DAK NON FISIK)

Dana yang di alokasikan Kegiatan Dukungan Media KIE (DAK NON FISIK) sebesar Rp. 124.000.000,-. terealisasi sebesar Rp. 123. 274.340,- (99,41 %). Hasil kegiatan ini adalah tersedianya operasional dukungan media KIE yaitu belanja cetak media promosi KKBPK berupa baliho, stiker, gantungan kunci serta kipas.

(9) Pelayanan KB MKJP

Dana yang di alokasikan Kegiatan Pelayanan KB MKJP sebesar Rp. 105.562.000,-. terealisasi sebesar Rp. 58.974.750,- atau 64,25 %. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan target 23.029 orang sedangkan realisasinya sebanyak 26.197 orang (100 %).

(10) Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Kependudukan

Dana yang di alokasikan Kegiatan Penyusunan Grand Design Pengendalian Kependudukan sebesar Rp. 206.786.200,-. terealisasi sebesar Rp. 190.505.172,- atau 92,13 %. Hasil kegiatan ini adalah telah dilaksanakannya proses penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Kependudukan. DPK Kabupaten Bintan Tahun 2019-2035 di desain untuk menjadi acuan pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian

kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan database kependudukan. Melalui GDPK, Kabupaten Bintan diharapkan akan memiliki panduan arahan kebijakan pembangunan kependudukan dengan memperhatikan target-target pencapaian yang disepakati hingga tahun 2035.

(11) Pembinaan Kader KB dan Tenaga Penyuluh

Dana yang di alokasikan Kegiatan Pelayanan KB MKJP sebesar Rp. 121.320.000,-. terealisasi sebesar Rp. 117.527.780,- atau 64,25 %. Sasaran dari kegiatan ini adalah Honor untuk Kader KB di lapangan.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa dicairkan dikarenakan tidak sesuai dengan SSH Kabupaten Bintan.
- b) Kurangnya petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sehingga pembinaan terhadap para kader KB belum maksimal.
- c) Untuk kegiatan Grans Design tidak semua data penyusunan Grans Design tersedia.
- d) Belum adanya tindak lanjut terhadap Grand Design dikarenakan kurangnya anggaran

- e) Perlu dituangkannya didalam Peraturan Daerah untuk memaksimalkan Grand Design sehingga sesuai tujuan perencanaannya yang mengacu kepada Grand Design yang telah disusun.
- f) Untuk pelaksanaan MOW tidak dapat dilaksanakan karena RSUD belum siap untuk melayani peserta MOW pada tahun 2019
- g) Jarak tempuh untuk wilayah yang di Pulau-pulau aksesnya masih sulit terutama dari segi transportasi.

(2) Solusi

- a) Untuk kegiatan yang tidak bisa dicalirkan dievaluasi kembali dengan juknis.
- b) Menyampaikan permintaan penambahan PLKB dan PKB kepada BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- c) Disediakkannya anggaran untuk menindaklanjuti kegiatan Grand Design.
- d) Melaksanakan pendekatan ulang ke RSUD maupun RSUP Provinsi terkait MOW.

2) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 223.162.828,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 185.910.801,- atau 83,31 %. Terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelatihan Kualitas Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Dan Saka Kencana

Dana yang di alokasikan Kegiatan Pelatihan Kualitas Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Dan Saka Kencana sebesar Rp. 161.128.608,-. terealisasi sebesar Rp. 133.430.581,- atau 82,81%. *output* kegiatan ini adalah tersedianya kader PIKR yang profesional. Sedangkan hasil (outcomes) dari kegiatan ini adalah terbentuknya remaja yang berkarakter dan berakhlak mulia. Sasaran dari kegiatan ini adalah 900 orang dari 23 SLTA dan SLTP dari se-Kabupaten Bintan.

(2) Pembinaan Kelompok Tribina, UPPKS Dan Catin

Dana yang di alokasikan Kegiatan Pembinaan Kelompok Tribina, UPPKS Dan Catin sebesar Rp. 62.034.220,-. terealisasi sebesar Rp. 52.480.220,- atau 82,81 %. *Output* kegiatan ini adalah diharapkan agar masyarakat mampu melaksanakan pembinaan terhadap pengasuhan bayi, pembinaan remaja dan perlindungan terhadap lansia. Disamping itu pembinaan terhadap remaja tentang pernikahan dini yang harus dihindari. Pembinaan Ketahanan Keluarga juga harus ditingkatkan agar ada tambahan penghasilan keluarga seperti pembentukan UPPKS. Pembinaan 222 kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS se Kabupaten Bintan adalah :

1. Jumlah Kelompok BKB = 102 Kelompok
2. Jumlah Kelompok BKR = 30 Kelompok
3. Jumlah Kelompok BKL = 44 Kelompok
4. Jumlah Kelompok UPPKS = 46 Kelompok

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Terdapat 3 kecamatan yang tidak terjangkau yaitu Kecamatan Tambelan, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir karena keterbatasan anggaran.
- b) Pergantian Kader KB selalu terjadi di beberapa Desa/Kelurahan sehingga proses pembinaan terhadap kader terhambat.
- c) Masyarakat masih ada yang kurang paham dan kurang peduli dengan pendataan keluarga.
- d) Kurangnya respon dari sekolah tentang adanya PIK-R

(2) Solusi

- a) Perlunya penambahan anggaran untuk mengundang remaja-remaja daerah pesisir untuk bisa ikut di kegiatan pembinaan mengingat pentingnya peran konseler tingkat remaja yang dibangun melalui kegiatan ini.
- b) Mengajak para kader untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan KKBPK.
- c) Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya pendataan keluarga.
- d) Sosialisasi pergerakan secara masiv sehingga masyarakat mengetahui tentang fungsi ketahanan dan keluarga sejahtera.

3.1.2.3 Urusan Ketahanan Pangan

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2019 oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Bintan melalui 4 (empat) kegiatan pokok yaitu:

1. Pembinaan dan peningkatan informasi penyuluhan pertanian
2. Penyusunan program penyuluhan pertanian
3. Pertemuan kelompok petani
4. Peningkatan kapasitas kerja penyuluh pertanian lapangan

Total alokasi anggaran yang disediakan dalam mendukung program ini sebesar **Rp. 667.612.000,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 594.981.016,-** atau sebesar **89,12 %** dari total anggaran yang dialokasikan. dengan realisasi pencapaian fisik sebesar **100%** dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan

(1) Pembinaan dan Peningkatan Informasi Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 136.720.000,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 121.886.316,-** atau dalam prosentase sebesar **89,15%** dengan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar **100%**.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap petani dan kelompok tani dalam melakukan usaha tani secara baik dan tepat sasaran. serta menyediakan informasi dalam bentuk data base petani

dan kelompok tani sebagai acuan dalam menyusun kebijakan penyuluhan pada tahun berikutnya dengan harapan sebagai berikut :

- Terbinanya pengurus dan anggota HKTI sebagai ujung tombak pembangunan pertanian secara mantap.
- Terciptanya kondisi pertanian di Kabupaten Bintan yang maju.
- Terwujudnya petani dan nelayan di Kabupaten Bintan yang handal.
- Terlaksananya kegiatan penyuluhan informasi pertanian
- Terbentuknya wadah bagi Kelompok Tani

Sasaran dari kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Informasi Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2019 adalah petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di Kabupaten Bintan yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan informasi penyuluhan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Dan Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah meningkatnya pembinaan dan penyampaian informasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Bintan

Dalam kegiatan ini juga diperoleh hasil lain berupa susunan kepengurusan HKTI tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Bintan.

Selanjutnya pelaksanaan pembinaan dan peningkatan informasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dalam rangka peningkatan informasi penyuluh pertanian meliputi :
 - a. Penyuluh pertanian dengan sasaran petani se Kabupaten Bintan sejumlah 12 terdiri dari 3 orang laki-laki PNS, 1 orang perempuan CPNS, 1 orang perempuan THL-TB, 1 orang perempuan honor bidang kegiatan, 6 orang laki-laki honor.
 - b. Pengurus HKTI Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Tingkat Kecamatan ada 30 orang sedangkan tingkat Kabupaten ada 50 orang.
2. Pertemuan pengurus HKTI tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - a. Pertemuan pengurus Tingkat Kecamatan sebanyak 2 kali.
 - Pertemuan I tingkat Kecamatan untuk wilayah Utara terdiri dari Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Bintan dilaksanakan di Rumah Bapak Jumadi pada tanggal 10 April 2019.
 - Pertemuan II tingkat Kecamatan untuk wilayah Selatan terdiri dari Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang dilaksanakan di Pasar Tani, Kecamatan Toapaya pada tanggal 3 Mei 2019
 - b. Pertemuan pengurus Tingkat Kabupaten Bintan sebanyak 4 kali dalam setahun terealisasi sebanyak 3 kali yang bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.

- Pertemuan I Pengurus HKTI Tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada tanggal 02 September 2019
 - Pertemuan II Pengurus HKTI Tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada tanggal 07 oktober 2019
 - Pertemuan III Pengurus HKTI Tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada tanggal 20 November 2019
3. Pencetak banner dan brosur untuk di bagikan kepada pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Petani untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Brosur yang dicetak dan dibagikan adalah :
- Diagram Proses Pengolahan minyak kelapa
 - Lima Kelebihan Ayam Kampung Kemala Farm
 - Bagan Alur Penyediaan Pupuk Bersubsidi
 - Profil HKTI Kabupaten Bintan
 - Kebutuhan Pupuk dan Pengendali OPT untuk Budidaya Ubi Jalar.
 - Pestisida Nabati

b. Permasalahan Dan Solusi

Secara Umum Pelaksanaan Kegiatan ini masih ditemukan permasalahan namun demikian permasalahan tersebut telah berhasil ditindak lanjuti, sebagaimana uraian sebagai berikut:

(1) Permasalahan

- a) Tingkat kesadaran anggota pengurus HKTI masih rendah untuk menghadiri acara pertemuan pengurus HKTI.
- b) Tidak adanya uang saku dan transportasi peserta di RKA sehingga mengurangi minat peserta pengurus HKTI.
- c) Tidak adanya dana sound sistem untuk kegiatan
- d) Masih kurangnya sinkronisasi antara HKTI Provinsi dengan HKTI Kabupaten sehingga program-program HKTI Pusat tidak diketahui oleh HKTI Kabupaten.
- e) Masih kurangnya kemampuan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman pada penyuluh lapangan.
- f) Faktor cuaca yang sangat mempengaruhi produksi dan pertumbuhan tanaman.
- g) Lahan yang digarap petani ada sebagian menumpang sehingga tidak leluasa melakukan usaha pertanian.
- h) Kurangnya Akses Petani dengan lembaga keuangan untuk penambahan modal usaha.
- i) Harga produk di tingkat petani rendah, sedangkan di tingkat pedagang tinggi.
- j) Dalam pemasaran produk masih bersifat individual sehingga terjadi persaingan tidak sehat antar petani.
- k) Kerjasama petani dan pedagang masih belum menguntungkan dipihak petani.
- l) Kurangnya Iptek dalam melaksanakan tugas bagi penyuluh.
- m) Kurangnya jumlah tenaga penyuluh.
- n) Pencapaian target kegiatan penyuluhan belum maksimal.
- o) Perlu peningkatan koordinasi antar penyuluh dengan instansi terkait dan lembaga vertikal.

- p) Perlu Penambahan anggaran untuk Kegiatan Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian.

(2) Solusi

- a) Rencana kedepan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Informasi Penyuluhan Pertanian akan dihibahkan ke petani Pengurus HKTI sehingga mendapatkan hasil out put yang lebih optimal.
- b) Akan diupayakan untuk kegiatan mendatang lebih diperbanyak turun lapangan oleh pengurus HKTI
- c) Akan diupayakan untuk bantuan CSR dari kawasan Lagoi dan Lobam untuk bisa di alokasikan ke petani
- d) Perencanaan yang lebih valid dan matang sehingga memastikan ada dana untuk uang saku dan transportasi untuk Pengurus HKTI dan sewa sound sistem untuk berlangsungnya kegiatan.
- e) Penambahan Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga Penyuluh Lapangan
- f) Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
- g) Peningkatan pembinaan dan informasi penyuluh pertanian dengan melakukan studi banding atau diklat ke Badan Diklat atau ke Provinsi lain.

(2) Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 42.666.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 28.383.300,-** atau **66,52 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Tujuan kegiatan ini adalah Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat Kabupaten, Memberikan acuan bagi penyuluh di Kabupaten dan Kecamatan dalam menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian, Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan pertanian, Memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menyusun Programa penyuluhan dan kebijakan Kabupaten agar sejalan dengan kebijakan baik Programa Penyuluhan Provinsi maupun Nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pasal 13 ayat 1 butir a. Sasaran Programa penyuluhan adalah para penyuluh pertanian para pelaku utama serta pelaku usaha. Untuk tingkat Kabupaten Bintan difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan programa penyuluhan tahun 2019 (1 Dokumen) yang didalamnya berisi hal sebagai berikut :

- Keadaan umum wilayah Kabupaten Bintan meliputi deskripsi umum wilayah, luas wilayah, karekteristik tanah dan iklim.
- Kondisi fisik petanian meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta sumber daya manusia.
- Tujuan dan sasaran yang selaras dengan pembangunan nasional
- Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian
- Cara pencapaian tujuan berdasarkan analisa keadaan spesifik lokasi dan masalah yang dihadapi.
- Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) yang didalamnya berisi tujuan, masalah, metode penyuluhansasaran, volume waktu, lokasi, pembiayaan, penanggungjawab pelaksana dan instansi terkait

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pertemuan penyusunan program penyuluhan pertanian dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Jl. Nusantara Km. 18 Kijang, dengan peserta tim perumus program yang berasal dari petugas baik dari seluruh bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dan penyuluh pertanian lapangan serta Penyuluh Pertanian Swadaya juga pelaku usaha pembangunan pertanian.

b. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti secara maksimal sebagaimana uraian sebagai berikut :

- Terbatasnya waktu pelatihan penyusunan program karena terbatasnya anggaran pendanaan
- Tidak adanya format dan pedoman khusus tentang standard penyusunan program tingkat kabupaten yang bersumber dari kementerian pertanian.

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan maka dapat dirumuskan permasalahan dari berbagai sub sektor sebagai berikut :

- a. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Kurangnya pengetahuan dan minat pelaku utama dalam penggunaan bibit unggul yang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan hasil tanaman selain pupuk, air, pencahayaan dan iklim.

- Kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam teknik budidaya dan pengolahan tanaman hortikultura.
 - Kurangnya pengetahuan pelaku utama dalam pengendalian hama terpadu (PHT) sehingga petani memilih menggunakan pestisida daripada melakukan tindakan preventif ataupun menggunakan pestisida alami,
 - Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tani dalam pengaturan pola tanam dalam upaya memutus siklus hidup organisme pengganggu tanaman (OPT)
 - Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang pemupukan yang tepat.
 - Kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap pelaku utama, pelaku usaha dan petugas tentang mutu, jumlah kontinuitas dan harga produk hortikultura.
 - Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tani dalam hal budidaya tanaman bawang merah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena harganya relatif stabil dan dapat tumbuh dan berproduksi secara baik di pulau Bintan.
 - Kurangnya minat pelaku usaha tani khususnya wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan secara maksimal.
- b. Sub Sektor Perkebunan
- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam hal budidaya tanaman kelapa
 - Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha dalam penyadapan karet.
 - Kurangnya minat petani untuk mengembangkan budidaya lada

- Tingginya harga saprodi
 - Ketidakstabilan harga produk pertanian ditingkat petani, bahkan relatif rendah karena harga ditentukan oleh tengkulak.
 - Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam hal pemasaran dan pengolahan hasil pertanian yang dapat meningkatkan nilai produk
 - Masih rendahnya produksi tanaman kelapa
 - Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam memanfaatkan limbah pertanian untuk dimanfaatkan menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk organik pada lahannya bahkan dapat dijual.
 - Belum ada penampung ubi kayu dalam skala besar.
- c. Sub Sektor Peternakan
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha (peternak) untuk melakukan vaksinasi dan sanitasi kandang
 - Tingginya harga saprodi dan pakan ternak
 - Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan juga sikap pelaku utama dalam hal penyediaan kandang, pakan tambahan maupun pengolahan limbah kotoran ternak.
 - Orientasi pelaksanaan kegiatan dalam usaha ternak belum bercorak agribisnis kecuali ayam ras.
- d. Sub Sektor Sumber Daya Manusia
- Masih rendahnya pengetahuan, ketrampilan pelaku utama dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki.
 - Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama untuk memilih usaha yang paling menguntungkan, mengidentifikasi kebutuhan informasi, teknologi dan sarana yang diperlukan

untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

- Masih rendahnya minat kelompok pelaku utama untuk mencoba inovasi teknologi baru, meskipun teknologi tersebut berkaitan dengan usaha taninya.
- Masih rendahnya kesadaran anggota kelompok untuk aktif hadir pada pertemuan kelompok.
- Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan kurang berjalan dengan baik
- Peningkatan kompetensi penyuluh melalui diklat masih kurang dan tidak merata.
- Kompetensi penyuluh masih belum sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha
- Belum adanya penyuluh yang memiliki kompetensi dalam teknik pengendalian hama terpadu yang menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produksi secara arif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Belum terpenuhinya penempatan satu desa satu penyuluh (kurangnya jumlah penyuluh pertanian)

(2) Solusi

Beberapa rumusan Solusi yang disepakati guna mengatasi permasalahan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan pelaku utama, pelaku usaha dalam mengidentifikasi potensi yang dimilikinya.
- b) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama untuk memilih usaha yang paling menguntungkan, mengidentifikasi kebutuhan informasi, teknologi dan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
- c) Meningkatkan pengetahuan dalam hal keswadanaan dan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha dalam

penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan mempertahankan kesetaraan gender.

- d) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dalam teknik fasilitasi dan organisasi petani (penyuluh swadaya)
- e) Penyempurnaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (melalui pembinaan khusus)
- f) Penerapan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan pelaku utama, pelaku usaha dan petugas.
- g) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (penyuluh/petugas dan pelaku utama)
- h) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama melalui upaya peningkatan produktivitas.
- i) Meningkatkan kemampuan Gapoktan dan KTNA dalam perencanaan, mengolah administrasi keuangan (pembukuan) dan sekretariat kelompok.
- j) Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga terkait melalui kegiatan dan pertemuan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.
- k) Peningkatan peran para ibu tani melalui kelompok wanita tani dalam hal teknik pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolahan hasil.
- l) Mengusulkan penambahan pendanaan untuk kegiatan penyusunan programa

(3) Pertemuan Kelompok Petani

Kegiatan Pertemuan Petani adalah forum konsultasi antara pelaku utama dan / atau Pelaku Usaha dengan Pihak Pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha pelaku utama dan atau Pelaku Usaha dalam kaitan dengan pelaksana program pembangaunan pertanian di Kabupaten Bintan. Dengan adanya pertemuan Kelompok petani tersebut maka diharapkan pembangunan

pertanian di Kabupaten Bintan dapat maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 292.866.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 263.676.800,-** atau **90,03 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%.**

Tujuan dari kegiatan Pertemuan Kelompok Tani ini adalah:

- Sebagai sarana transfer informasi, teknologi, fasilitasi kemitraan dan jejaring agribisnis para kontak tani.
- Sebagai media fasilitasi kegiatan ekonomi dan kemitraan usaha
- Sebagai sarana transfer pengetahuan, teknologi dan informasi.
- Sebagai wadah mengakomodasi aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bintan
- Sebagai sarana evaluasi kegiatan pembangunan pertanian yang telah dilakukan
- Sebagai penyeleksi petani yang akan mewakili Pekan Nasional (Penas) XX di Padang Sumatera Barat.

Sasaran Kegiatan Pertemuan Kelompok Petani adalah petani, kelompok tani, gapoktan, para pelaku utama serta pelaku usaha pertanian di Kabupaten Bintan yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Pertemuan Kelompok Petani se Kabupaten Bintan sebanyak 1.000 orang, dan terlaksananya pembangunan pertanian yang didukung oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pertemuan Kelompok Petani ini

adalah meningkatnya pengembangan pertanian dan produksi di Kabupaten Bintan.

(4) Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

Kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kapasitas kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian guna mendukung pencapaian Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 195.360.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 181.034.600,-** atau **92.67%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

Tujuan dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan ini adalah :

- Meningkatkan kemampuan kerja dengan cara menambah jumlah petugas penyuluh pertanian lapangan lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan penunjangnya agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya pertanian sehingga dapat bermanfaat dalam peningkatan produktifitas, pendapatan serta kesejahteraan masyarakat petani
- Mempersempit ruang kerja/rentang kendali sehingga pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat terlaksana lebih optimal

Sasaran dari kegiatan adalah Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Bintan sebanyak 12 orang (3 orang PNS, 1 orang CPNS, 1 orang THL-TB dan 7 orang tenaga kontrak yang dibiayai oleh sumber dana APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan). Keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas kerja

penyuluh pertanian lapangan sebanyak 7 orang dan Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan ini adalah tercapainya peningkatan kapasitas kerja penyuluh pertanian lapangan.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Inti dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan ini adalah :

- Honorarium Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan Kontrak sebanyak 7 orang selama 12 bulan.
- Insentif Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan Kontrak sebanyak 7 orang selama 12 bulan.
- Peralatan kerja berupa tas ransel, jas hujan, dan sepatu boot masing-masing sebanyak 7 buah sebagai pendukung kerja 7 orang Petugas Penyuluh Pertanian kontrak.
- Biaya kunjungan ke lapangan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja serta persiapan dokumen kebijakan teknis penyuluh pertanian lapangan.
- Biaya konsumsi pertemuan rutin penyuluh pertanian lapangan.

(2) Penetapan wilayah kerja penyuluh pertanian lapangan.

Tabel 3.14 Nama-Nama Penyuluh Pertanian

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja / Alamat
1	Syahrinaldi, SP	Penyuluh Pertanian Muda	Desa Penaga, Pengujan, Pangkil, Bintang Buyu
2	Gindriawan S, SP	Penyuluh Pertanian Muda	Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Bintang Timur dan Mantang
3	Suyanta	Penyuluh Pertanian	Kelurahan Kota Baru, Ekang Anculai, Sebung Pereh, Sebung Lagoi

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja / Alamat
4	Siti Jaziroh, A.Md	THL-TB Penyuluh Pertanian	Desa/Kelurahan Se- Kecamatan Seri Kuala Lobam
5	Nurul Hidayati, SP	Penyuluh Pertanian Pertama	Kelurahan Toapaya Asri, Desa Toapaya Selatan, Malang Rapat, Teluk Bakau
6	Ariani Susanti, SP	Penyuluh Pertanian	Kelurahan Kawal, Desa Gunung Kijang
7	Arif Gunarso, S.Pt	Penyuluh Pertanian	Desa Toapaya Utara, Toapaya
8	M. Zamsari, SP	Penyuluh Pertanian	Desa/ Kelurahan Se Kecamatan Bintan Pesisir
9	Akmal Khairi, SP	Penyuluh Pertanian	Desa/Kelurahan Se- Kecamatan Tambelan
10	Dicky Andrian	Penyuluh Pertanian	Desa Berakit, Pengudang, Sri Bintan
11	Supiandi	Penyuluh Pertanian	Desa/Kelurahan Se- Kecamatan Bintan Utara
12	Islaniyanto	Penyuluh Pertanian	Kelurahan Tembeling Tanjung dan Tembeling

b. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih perlu dimaksimalkan sebagai upaya penyempurnaan kedepan diantaranya sebagai berikut :

- Masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan yang idealnya 2 orang petugas setiap Desa/Kelurahan, hal ini menyebabkan kurang optimalnya intensitas kunjungan pembinaan ke tingkat petani/Kelompok Tani mengingat pada periode 31 Desember 2019 diketahui mengalami peningkatan dan yang sudah mencapai 325 Kelompok

- Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan

(2) Solusi

Guna mengoptimalkan penyuluhan yang dilakukan, berikut adalah hal yang dapat dilakukan adalah :

- Mengusulkan penambahan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian
- Mengusulkan penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bintan pada **bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan** dan **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** melalui 7 (Tujuh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 842.962.250,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 700.490.040** atau **90,33%** serta realisasi fisik sebesar 99,09% dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan.

Pada Tahun Anggaran 2019 Seksi Konsumsi Pangan mendapat alokasi Kegiatan Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.035.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.104.841 atau 95,02 % dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang tersebar di 10 Kecamatan.

a. Lomba KRPL 18 kelompok di 10 Kecamatan

Dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019, diimplementasikan melalui beberapa sub kegiatan, antara lain :

- Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan mengadakan Pelaksanaan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) se Kabupaten Bintan, dimana kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui konsep KRPL dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Dasa Wisma sebagai peserta lomba;
- Pelatihan Diversifikasi Pangan, dengan memberikan anggota stimulus pengetahuan budidaya tanaman pangan;
- Pengadaan Belanja bahan/ bibit tanaman pertanian/ tanaman lainnya, yang bertujuan untuk Praktek dalam budidaya tanaman pangan untuk bisa membudidayakan berbagai tanaman di pekarangan rumah.

Adapun lokasi lomba Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (KRPL) pada 10 (sepuluh) kecamatan dengan jumlah peserta 20 (dua puluh) kelompok. Adapun pelaksanaan pada 1 (satu) Kecamatan Tambelan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 dan 9 (sembilan) Kecamatan lainnya pada tanggal 01 Juli sd 03 Juli 2019.

**Tabel 3.15 Daftar Peserta Lomba KRPL
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bintang Tahun 2019**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama KWT/Dasawisma	Ketua
1	Bintang Utara	Desa Lancang Kuning	KWT Lancang Kuning Jaya	Maria Kedy
		Desa Lancang Kuning	KWT Pisang	Sri suwarni
2	Seri Kuala Lobam	Kel Teluk Lobam	KWT Maju Bersama	Sukriyah
		Desa Teluk Sasah	KWT Nipah Pantai	Kamisah
		Desa Kuala Sempang	KWT Seroja	Suti sulaiha
3	Teluk Sebong	Desa Ekang Anculai	KWT Kemuning	Katmirah
4	Teluk Bintang	Kel Tembeling	KWT Abdi Karya	Susi Handayani
5	Toapaya	Kel Toapaya Asri	KWT Kamboja	Khorida
		Kel Toapaya Asri	KWT Barokah	Musponasih
		Desa Toapaya	KWT Bintang Karya	Saudah
6	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	DW Bunga Raya	Susiliyah
7	Bintang Pesisir	Desa Air Glubi	KWT Mandiri	Dwi Cahya Ningsih
8	Mantang	Desa Mantang Besar	Cenut 1	Idayu
9	Bintang Timur	Kel Sei Lekop	KWT Puspa Kenanga	Nati
		Kel Gunung Lengkuas	KWT Harapan	Suharmi
		Kel Gunung Lengkuas	KWT Telaga Biru	Suparti
		Kel Kijang Kota	KWT Kusuma Jaya	Masriva
10	Tambelan	Kel Teluk Sekuni	DW Anggrek	Sari kurniati
		Desa Kampung hilir	DW Flamboyan	Nana
		Desa Kukup	DW Kemunting	Musniar

Ruang lingkup kerja Kegiatan lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang

bersumber dari dana APBD Tahun 2019, yaitu terdiri dari : Pendataan, monitoring dan seleksi. Adapun tahapan dalam pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dimulai dengan tahapan pendataan kepada kelompok, selanjutnya monitoring dan dilanjutkan dengan tahapan seleksi.

Adapun tim penilai lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terdiri dari :

- 1) Tim Penilai dari DKPP Kabupaten Bintan terdiri dari 2 orang;
- 2) Tim Penilai dari BPTP Propinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1 orang;
- 3) Tim Penilai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terdiri dari 1 orang;
- 4) Tim Penilai dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan terdiri dari 1 orang;

Adapun hasil dari hasil penilaian Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dinilai kelapangan untuk Tahun 2019, diperoleh hasil penilaianan tersebut sebagai berikut :

- a. Juara pertama diraih oleh KWT Kemuning dari Desa Ekang Anculai Kecamatan Telok Sebong, dengan nilai 1.335;
- b. Juara kedua diraih oleh KWT Mandiri dari Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, dengan nilai 1.135;
- c. Juara ketiga diraih oleh KWT Nipah Pantai dari Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam, dengan nilai 945;
- d. Juara Harapan yaitu :

Juara harapan pertama diraih oleh KWT Maju Bersama Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam, dengan nilai 940;

Juara harapan kedua diraih oleh KWT Bintang Karya Desa Toapaya Kecamatan Toapaya, dengan nilai 825;

Juara harapan ketiga diraih oleh Dasawisma Flamboyan Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan, dengan nilai 815.

Sedangkan 14 (empat belas) kelompok lainnya yang juga sebagai peserta mendapatkan dana pembinaan. Adapun semua kelompok peserta menerima Piagam Penghargaan dan Dana Pembinaan mulai dari Rp. 3.000.000,- sd Rp. 500.000,- dari dana APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan sebagai hadiah lomba.

Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Pangan

Dalam upaya untuk pengembangan pangan lokal dengan mengadakan pelatihan budidaya tanaman pangan yang diisi oleh narasumber seorang tenaga PPL Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan. Dimana hal ini untuk memberikan stimulus pengetahuan dalam hal bercocok tanam tanaman pangan dan buah, serta agar mengurangi ketergantungan pola pangan masyarakat terhadap komoditi beras. Namun, bisa lebih mengembangkan sumber bahan pangan yang bervariasi, seperti sumber bahan pokok lainnya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk membudidayakan pola konsumsi pangan yang berkonsep Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Kegiatan ini diikuti oleh 60 (enam puluh) orang yang berasal dari 30 (tiga puluh) kelompok wanita (KWT dan Dasawisma), yang dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada tanggal 09 April 2019.

Pengelolaan tanaman di pekarangan dengan menggunakan konsep organik, adalah suatu sistem pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia buatan. Namun mewujudkan sikap dan perilaku hidup yang menghargai alam dan berkeyakinan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan yang harus dilestarikan (Joko Prayogo,dkk 1999).

Pengelolaan pekarangan oleh kelompok wanita adalah mengelola tanaman sejumlah 75 polybag/ lahan dengan berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Pertanian. Namun dalam pelaksanaan pemantauan di lapangan pada kelompok wanita melebihi dari jumlah minimal dimaksud. Berikut data perkembangan KRPL di Kabupaten Bintan melalui program aksi KRPL .

Tabel 3.16 Daftar Pengelola KRPL di Kab. Bintan

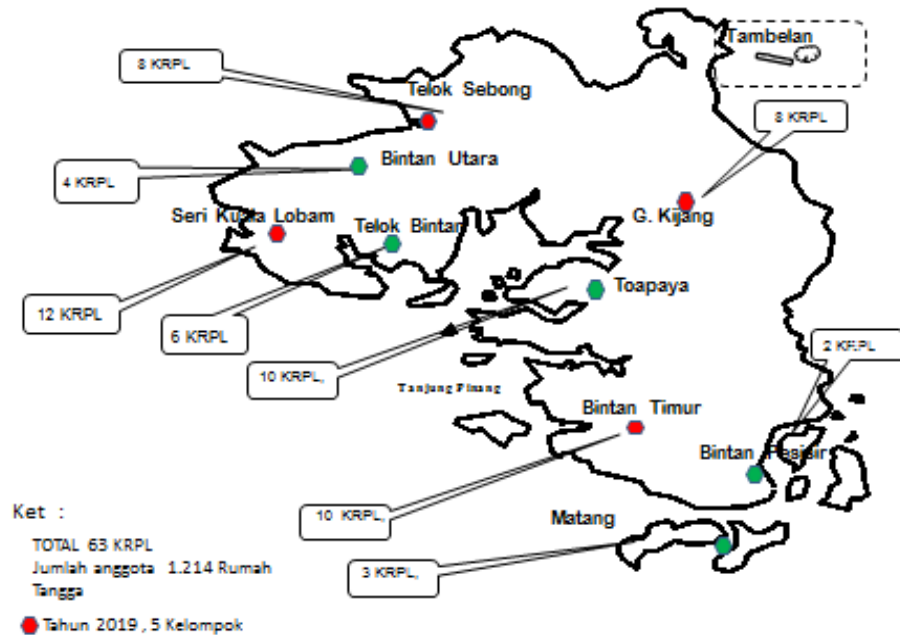
No	Tahun Anggaran	Jumlah Kelompok KRPL	Jumlah Anggota	Jumlah Tanaman (btg/polybag)	Luas Pekarangan Organic (m2)	Ket
1	2011 sd 2013	26	520	41.600	13.000	
2	2014	10	161	12.880	4.025	
3	2015	6	98	7.840	2.450	
4	2016	6	85	6.800	2.125	
5	2017	5	85	6.800	2.125	
6	2018	5	115	9.200	2.875	
7	2019	5	150	11.250	2.875	
	Jumlah	63	1.214	96.370	29.475	

Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan diharapkan Kelompok Wanita Tani sebagai sasaran penerima bantuan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam upaya mengembangkan pekarangan sebagai alternative penyediaan sumber pangan keluarga melalui membudidayakan berbagai jenis tanaman

sesuai kebutuhan pangan keluarga, dan usaha pengolahan pangan local untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Gambar 3.1 Peta Sebaran Kawasan Rumah Pangan Lestari

PETA SEBARAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
(KRPL) DI KAB. BINTAN TAHUN 2011 S/D 2019



Tabel 3.17 Daftar Penerima KRPL (APBN) Tahun 2019

No	Nama Kelompok	Desa/ Kelurahan/ Kec	Jumlah Bantuan	Ket
1	KWT Seroja	Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang	65.000.000	
2	KWT Kusuma Jaya	Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	65.000.000	
3	KWT Maju Bersama	Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam	65.000.000	
4	KWT Kemuning	Desa Ekanh Anculai Kec. Telok Sebung	65.000.000	
5	DW Bunga Raya	Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang	65.000.000	

Adapun diatas peta sebaran kelompok penerima bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN (*terlampir*) . Diharapkan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Lokal melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Bintan. Perkembangan luasan lahan tanaman organic dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya konsistensi penganggran pengembangan KRPL dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan dari dukungan perkembangan APBD Kabupaten Bintan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, berupa : kegiatan diversifikasi pangan yang mensejalankan dengan kegiatan praktek budidaya tanaman,bantuan polybag dan benih serta pelaksanaan lomba KRPL setiap tahunnya, yang dalam hal ini bermaksud untuk memotivasi anggota dalam mengembangkan KRPL di kelompok masing-masing.

b. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Belum Optimalnya kesadaran anggota kelompok untuk memanfaatkan lahan pekarangan sekitar.
- b) Belum Optimalnya kerjasama kelompok dalam mengelola kebun bibit dan demplot'
- c) Terbatas sumber air untuk merawat tanaman khususnya pada saat musim kemarau.
- d) Belum optimalnya perputaran dana kas kelompok sehingga kesulitan dalam pengelolaan rumah bibit sebagai sumber bibit kelompok.
- e) Kurangnya pemahaman dalam pengisian laporan bulanan

(2) Solusi

- a) Melaksanakan pertemuan sosialisasi, koordinasi dengan melibatkan PPL, anggota kelompok agar lebih optimal dalam memanfaatkan pekarangan.
- b) Membuat system kerja sama dalam kelompok dengan melibatkan seluruh anggota, tokoh masyarakat desa dan petugas penyuluh lapang terkait pembagian peran dalam kelompok;
- c) Mencari sumber sumber air aleternatif untuk mengelola KRPL diantaranya mengusulkan pembuatan sumber air dan perlengkapannya kepada Dinas terkati.
- d) Melakukan sosialisasi terkait pemahaman dan tata cara pengisian laporan bulanan.

(2) Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 57. 065.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.754.817,- atau 53,89 % dengan realisasi fisik sebesar 79,38 %. Output kegiatan ini adalah meningkatnya Peran Dewan Ketahanan Pangan Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi Kelompok Kerja Dewan Ketahanan pangan dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dan melibatkan dari unsur perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dari segi aksesibility, distribusi, transportasi dan produksi.

b. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Kurangnya koordinasi data korban bencana

- b) Laporan kejadian sering terlambat dari Desa/kelurahan atau kecamatan.
- c) Kurangnya pengetahuan dan skill petugas.
- d) Penetapan harga beras mengalami perubahan
- e) Jauhnya rentang kendali petugas.
- f) Kurang lancarnya koordinasi antar OPD dalam Pokja Dewan Ketahanan Pangan.
- g) Perencanaan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

(2) Solusi

- a) Memaksimalkan koordinasi dengan OPD terkait.
- b) Membuat rencana dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
- c) Sosialisasi ke Kecamatan mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah.
- d) Pelatihan atau bimbingan teknis.

(3) Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 178.400.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 160.798.230 atau 90,13 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pangan di 10 Kecamatan.

Pemerintah melalui Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 di mana pada salah satu pasalnya mengatur tentang keamanan pangan. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk

mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan dewasa ini selain terbatasnya produksi adalah juga masih dijumpainya praktek penanganan pangan mulai dari budidaya hingga konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Kondisi meningkatkan potensi terjadinya residu atau kontaminasi pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Sedangkan dari aspek mutu, mutu pangan yang rendah menyebabkan daya saing produk pangan menjadi berkurang. Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait dengan perdagangan pangan, dimana keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global.

Dalam rangka mewujudkan pangan yang aman, bermutu serta berdaya saing tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan sebagai *leading sector* dalam produksi pangan segar asal tumbuhan telah membentuk Tim Pengawas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) unit kerja di Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 195/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 yang beranggotakan Bupati, wakil Bupati, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan, Balai Pengawas Obat dan Makanan Kepulauan Riau Loka Tanjung Pinang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dan Kepolisian resort Kabupaten Bintan. Tim dimaksud untuk menangani

penjaminan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan produk segar pertanian di Kabupaten Bintan.

Pada Tahun 2019 tidak terjadi kasus keracunan yang diakibatkan oleh konsumsi pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Bintan.

Koordinasi selalu dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan – kegiatan oknum yang akan merugikan dan membahayakan dalam keamanan pangan yang beredar setiap harinya dan juga pada saat hari – hari besar keagamaan.

Pada hari – hari besar keagamaan melakukan kegiatan sidak bersama terhadap pasar tradisional dan pasar modern dengan pelaksanaan tupoksi OPD bidang masing – masing. Hal yang perlu diketahui oleh masyarakat selaku konsumen adalah bahwa setiap bahan pangan baik segar maupun olahan, pada dasarnya sangat memungkinkan mengandung residu bahan kimia yang dilarang dan sangat membahayakan kesehatan manusia. Penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida, bakterisida, nematisida dan rodentisida yang berlebihan berdampak terhadap kesehatan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya ulah sebagian oknum yang sengaja menjual bahan pangan yang tidak layak dikonsumsi, seperti sayuran dan buah-buahan yang mengandung residu pestisida di atas ambang batas. Residu pestisida dapat berpengaruh terhadap kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang seperti menyebabkan kanker, cacat kelahiran dan mengganggu sistem saraf. Anak-anak yang terpapar pestisida beresiko memiliki stamina dan tingkat kecerdasan yang kurang baik selain itu dapat juga berakibat perubahan orientasi seksual.

Keracunan pangan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial tidak sedikit, tetapi juga mengakibatkan banyaknya korban menderita sakit bahkan meninggal dunia. Perlu disadari bahwa semua kejadian dan akibat buruk dari pangan yang tidak aman, baik terhadap kesehatan maupun terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, menjadi peringatan bagi pemerintah dan pelaku usaha (petani, eksportir maupun importir pengolah bahan pangan), serta konsumen tentang pentingnya penanganan keamanan pangan secara terus menerus. Untuk dapat mewujudkan pangan asal pertanian yang aman dan berdaya saing tinggi, diperlukan program yang berkelanjutan. Misalnya melalui publikasi di media massa, sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan, dan advokasi terhadap para pengambil kebijakan baik di eksekutif maupun legislatif. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan selain akan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada konsumen untuk dapat memilah dan memilih produk pangan berkualitas, juga meminimalkan pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan, tanpa memperhitungkan dampak kerugiannya. Pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan bekerjasama dengan LOKA BPOM Tanjung Pinang telah melakukan sosialisasi keamanan pangan di sekolah sekolah khususnya SLTA yang ada di Kabupaten Bintan, perincian detail kegiatan dimaksud sebagai berikut :

**Tabel 3.18 Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan
Di Kabupaten Bintan Tahun 2019**

No	Sekolah	Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Seri Kuala Lobam	14-Agust-19	150
2	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Bintan Utara	14-Agust-19	150
3	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Gunung Kijang	15-Agust-19	150
4	Sekolah Menengah Atas Negeri I Teluk Bintan	15-Agust-19	150
5	Sekolah Menengah Atas Negeri I Toapaya	16-Agust-19	150
6	Sekolah Menengah Atas Negeri I Bintan Timur	16-Agust-19	150
	Jumlah		900

Kegiatan dari Pembinaan dilaksanakan kepada para pelaku usaha baik yang berada di pre market dan post market. Pembinaan pre market dilaksanakan dengan turun langsung ke petani – petani yang berada di kabupaten Bintan dengan memberikan pembinaan keamanan pangan dari mulai penanaman sampai pemanenan serta menerapkan SOP dan GAP yang baik dan tetap sesuai petunjuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan tim teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.

Pembinaan di post market dilaksanakan dengan memberikan pembinaan kepada para pedagang yang berada di pasar tradisional maupun modern dalam penataan pangan segar dengan barang – barang lain untuk dapat memisahkannya agar tidak terkontaminasi antara satu dengan lainnya. Selain pembinaan juga melaksanakan pemantauan terhadap para pelaku usaha yang sudah dilakukan pembinaan keamanan pangan. Pemantauan juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan

Hewan Propinsi Kepulauan Riau untuk mutu beras yang beredar di kabupaten Bintan.

Guna mendukung Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang beredar di masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengadakan pembelian alat uji cepat (rapid test kit) yaitu uji deteksi residu pestisida sebanyak 30 test kit. Pengujian cepat dilakukan untuk mendeteksi residu pestisida pada pangan segar dan jenis pangan yang beredar. Pengujian cepat ditujukan terutama pada pangan segar yakni buah dan sayur berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat, isu dan jenis pangan yang dianggap perlu. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan pengujian sebanyak 30 sample yang di lokasi Pasar Berek Motor Kijang Bintan Timur, Pasar Baru Tg Uban Kecamatan Bintan Utara, Pasar Kawal Kecamatan Gunung Kijang, KWT Melati Desa Ekan Aculai Kecamatan Telok Sebong, Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur, Pasar Berdikari Kecamatan Bintan Timur. Hasil pengujian menunjukkan dari 30 sample maka ditemui 27 sample negative tercemar residu pestisida dan 3 sample tercemar residu pestisida, namun untuk mengetahui apakah residu pestisida tersebut melebihi batas maksimum residu (BMR) atau tidak maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 / Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan masih dibutuhkan pemeriksaan pada laboratorium yang memenuhi syarat.

**Tabel 3.19 Hasil Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Tahun 2019**

No.	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditi	Hasil Uji	Ket
1.	Pasar Barek Motor	1. Semangka Lokal	-	
	Kijang Bintang Timur	2. Sawi Manis Lokal	-	
		3. Tomat Medan	+	
		4. Cabe Medan	+	
		5. Wortel Medan	+	
2	Pasar Baru	1.Cabe Merah Berastagi	-	
	Tanjung Uban	2. Bawang Merah Medan	-	
		3. Cabe Rawit	-	
		4. Buah Naga Lokal	-	
		5. Jeruk Medan	-	
3	Pasar Kawal	1. Tomat Hijau Medan	-	
	Gunung Kijang	2. Terong Medan	-	
		3. Sawi Pahit Wacopek	-	
		4. Sawi Pahit Toapaya	-	
		5. Pare Wacopek	-	
4	Ekang Anculai	1. Sawi Minyak	-	
		2. Daun Sop	-	
		3. Daun Bawang	-	
5	Gunung Lengkuas	1. Sawi Putih	-	
	Kijang Bintang Timur	2. Selada	-	
		3. Timun	-	
		4. Bayam	-	
		5. Kangkung	-	
6	Pasar Berdikari	1. Cabai Merah	-	
	Kijang Bintang Timur	2. Cabai Rawit	-	
		3. Kacang Panjang	-	
		4. Pare	-	
		5. Pepaya	-	
7	Pasar Barek Motor	1. Cabai Merah Lokal	-	
	Kijang Bintang Timur	2. Sawi Manis Lokal	-	

Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan

pangan di tingkat proses produksi (*On Farm*). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan dari aspek keamanan pangan; Prima 2 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan.

Pemberian sertifikasi Prima oleh OKKPD Propinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan DKPP Kabupaten Bintan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan bersama OKKPD Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan sertifikasi di Kabupaten Bintanm hasil sertifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.20 Daftar sertifikasi produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Di Kabupaten Bintan.

No	Petani	Alamat	Jenis Sertifikasi	Komoditi	Tahun	Ket
1.	Sofian /Kelompok Tani Makmur	Kampung Pemukiman RT. 003/001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang	Prima 3	Cabe Hijau	2018	

(1) Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan kami masih mengalami kendala diantaranya :

- a) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keamanan Pangan yang akan dikonsumsi.

- b) Sebagian pelaku usaha yang kurang kooperatif apabila Dinas akan melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di pasar.
- c) Masih rendahnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Good Agriculture Practice (GAP) di tingkat petani.
- d) Belum adanya petugas Teknis atau petugas pengambil contoh yang bersertifikat.

(2) Solusi

Solusi yang dijalankan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat ex. Anak sekolah, ibu rumah tangga, pelaku usaha dll
- b) Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha baik di pre market dan post market tentang Keamanan Pangan.
- c) Melaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha agar hasil yang diharapkan yaitu persentase keamanan pangan dapat tercapai .
- d) Menyarankan kepada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk melaksanakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu.
- e) Mengikut sertakan aparatur Dinas Keamanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dalam pelatihan terkait.

(4) Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Amanah (LCM B2SA).

Pada Tahun anggaran 2019 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mendapat alokasi 2 kegiatan yaitu :

- a) Lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (LCM B2SA) dana APBD II dengan nilai sebesar Rp. 105.800.000.-
- b) Pengembangan pangan lokal bernilai komersil sebesar Rp. 130.000.000.-

Kegiatan Lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Ama (LCM B2SA) dana APBD II ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.728.640 atau 97,10% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya bahan pangan yang segar, berimbang, bergizi sehat dan aman untuk dikonsumsi yang tersebar di 10 Kecamatan.

Kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan promosi konsumsi pangan segar merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, cerdas dan produktif, setiap individu diharapkan mengkonsumsi anekaragaman pangan secara seimbang, baik berasal dari pangan sumber karbohidrat, protein (nabati maupun hewani) serta vitamin dan mineral karena tidak ada satupun bahan pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap. Guna memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan akan terus melakukan promosi dan sosialisasi maupun gerakan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang yang pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan skor Pola Pangan Harapan masyarakat Kabupaten Bintan.

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, dan Aman telah dilaksanakan rutin setiap tahun , dalam pelaksanaan kegiatan lomba cipta menu B2SA selalu bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan . Sebagai upaya promosi pola pangan Beragam, Bergizi, dan Aman lomba dilaksanakan secara berjenjang mulai dari lomba tingkat kecamatan yang dimanfaatkan untuk memilih juara yang akan mewakili kecamatan yang bersangkutan pada lomba tingkat kabupaten.

Tujuan diselenggarakan kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) dan promosi konsumsi pangan segar adalah untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
2. Mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat pada umumnya dan ibu rumah tangga khususnya dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu beragam, bergizi dan berimbang sesuai potensi sumberdaya local.
3. Memasyarakatkan dan membiasakan keluarga untuk mengkonsumsi aneka menu makanan beragam, bergizi dan berimbang untuk kebutuhan sehari-hari, dengan memanfaatkan potensi pangan yang ada di sekitar (pekarangan).
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan prinsip B2SA.

b. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), sebagai

besar masyarakat saat ini masih mengandalkan nasi sebagai sumber karbohidrat,

- b) Kurangnya sosialisasi dan promosi kepada masyarakat tentang menu yang Beragam, bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) dan olahan pangan lokal komersial.
- c) Ketersediaan bahan pangan umbi-umbian masih terbatas.
- d) Pemanfaatan terbatas pada bahan pangan lokal umbi-umbian segar (produk belum beragam).

(2) Solusi

- a) Meningkatkan pengetahuan, budaya dan pendapatan masyarakat bahwa pola konsumsi pangan B2SA sangat penting untuk kesehatan.
- b) Menambahkan anggaran Kegiatan, dalam sosialisasi dan promosi kepada masyarakat.
- c) Ketersediannya dan akses sumber pangan lokal.
- d) Pengolahan bahan pangan umbi-umbian menjadi tepung untuk memperluas aneka produk olahan dan meningkatkan pemanfaatannya.

(5) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 139.152.250,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 128.851.100,-** atau **92,60 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Output kegiatan ini adalah tersediannya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras dan 12 laporan Ketersediaan Pangan Masyarakat.

Target RPJMD Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Bintan Tahun 2019 adalah sebanyak 5.300 Kg Beras, Realisasi sebesar 5.600 Kg Beras. Realisasi Kegiatan Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah dibanding

dengan target (5.300 kg), Capaian Kinerja: 100 % (sangat baik).

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Daerah sejak Tahun 2017 sebanyak 16.100 Kg. Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Bintan, saat ini ada di Gudang BULOG Subdivre Tanjungpinang sebesar 7.308 Kg .

Jenis beras tersebut adalah :

Kualitas/Jenis: Kualitas Medium dengan spesifikasi :

Kadar air	: maksimum 14 %
Butir patah	: maksimum 20%
Kadar menir	: maksimum 2 %
Derajat sosoh	: minimum 95%

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan,, penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok yaitu beras dalam menghadapi keadaan darurat, pasca bencana dan gejolak harga pangan.

Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil;
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana, masalah pangan serta terjadinya gejolak harga;
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien (bersifat mendadak dan sementara) khususnya pada daerah terisolir dan/atau

dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.
- b. Gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut.
- c. Bencana sosial berupa kebakaran, kebakaran hutan, kerusuhan yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian atau kerusakan harta benda, lahan atau kebun sebagai mata pencaharian.
- d. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- e. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam pengelolaannya, untuk:

1. Sebagai persediaan yang siap salur sewaktu – waktu, begitu ada bencana.
2. Disalurkan kepada masyarakat pasca bencana alam : angin puting beliung, banjir, kebakaran, gempa, tanah longsor dlsbnya.
3. Rawan pangan transien.
4. Gejolak harga beras dengan kenaikan 25 % selama 2 minggu berturut-turut.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 melalui MoU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dengan Perum Bulog Subdivre

Tanjungpinang No. Nomor : 520/DKPP/MoU/333/VI/2019
dan Nomor : MoU- 008.03A.01.06.2019.

Penyaluran CPP Kab Bintan. Dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, melalui Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bintan telah menyalurkan untuk masyarakat yang terkena musibah banjir, tanah longsor dan angin putting beliung, yang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.21 Daftar Nama-Nama Masyarakat Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2018-2019

DAFTAR NAMA - NAMA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 -2019

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah keluarga (KK)	Jumlah Anggota keluarga (Jiwa)	Jumlah Penyaluran Beras CPP (Kg)	KET
	Tahun 2018					
1	Kecamatan Tambelan	Desa Kampung Melayu	32	128	768	
		Desa Teluk Sekuni	3	9	54	
		Desa Kukup	1	6	36	
		Desa Batu Lepuk	78	263	1,578	
		Desa Kampung Hilir	3	11	66	
	Total		117	417	2502	
2	Kecamatan Bintan Pesisir	Desa Kelong	19	73	438	
		Desa Air Glubi	24	84	504	
	Total		43	157	942	
	Tahun 2019					
1	Kecamatan Tambelan	Desa Kampung Melayu	37	121	1210	
		Desa Teluk Sekuni	22	98	980	
		Desa Kukup	1	5	50	
		Desa Batu Lepuk	67	270	2700	

(6) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 133.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp 116.092.662,- atau 86,95 % dengan realisasi fisik sebesar 96,25 %. Output kegiatan ini adalah tersedianya Pangan di Lumbung Pangan Masyarakat sebesar 5.000 Kg Beras.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi daerah yang terindikasi rentan pangan akibat cuaca yang menyebabkan sulitnya akses dan distribusi pangan ke suatu daerah seperti Kecamatan Tambelan. Dengan adanya Lumbung Pangan di Kecamatan Tambelan dapat meningkatkan ketersediaan pangan beras di masyarakat.

(7) Pengembangan pangan lokal bernilai komersil

Pengembangan pangan lokal bernilai komersil dana APBD II ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.118.750 atau 98,55% dengan realisasi fisik sebesar 97,38 %. Output kegiatan ini adalah Berkembangnya usaha pengolahan pangan pokok lokal telah dilaksanakan dengan baik yang tersebar di 10 Kecamatan.

Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat. Dimana Keanekaragaman pangan merupakan upaya di daerah peningkatnya ketersediaan dan konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas . Hal ini diupayakan agar masyarakat tidak tergantung pada beras dan terigu sebagai makna pokok karbohidrat saja, namun pangan mengenal berbagai olehan pangan lokal lainnya

yang bisa dikonsumsi dikreasikan dan dipasarkan, sehingga semuanya semakin suka dan terbiasa mengonsumsi produk olahan pangan lokal.

Penganekaragaman konsumsi pangan khususnya konsumsi karbohidrat harus didukung oleh penyediaan sumber pangannya dan minat masyarakat untuk mengonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang manakala ketersediannya kurang dan harganya relatif mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras perlu didukung upaya pengadaannya yaitu melalui pengembangan pengolahan pangan lokal.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning, dan yang lainnya sudah banyak dikembangkan dengan dijadikan tepung. Kedepan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Melalui kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) ini diharapkan dapat lebih memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional. Gerakan diversifikasi pangan semakin efektif apabila didukung oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan melalui pengembangan industrialisasi usaha pangan lokal dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan.

Pelaksana program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal bernilai komersial Lokasi untuk tahun 2019 yang merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan pengembangan olahan pangan lokal yang bernilai komersial berbasis sumber daya lokal yang ada di wilayah daerah. Sampai dengan tahun anggaran 2019 jenis pangan lokal yang telah dikembangkan di Kabupaten Bintan yaitu ubi kayu, ubi jalar, jagung, talas, sukun, labu, pisang, bengkuang dan ganyong.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan olahan pangan lokal bernilai komersil dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2019 bertempat di aula Kantor Camat Toapaya Kabupaten Bintan dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang yang merupakan perwakilan kelompok Wanita Tani dan perwakilan Dasawisma di Kabupaten Bintan. Narasumber pada kegiatan ini adalah Ibu Kartika Kusumuwati dan Ibu warlina yang merupakan pengusaha Citra Sari.

Pelatihan Pengembangan Olahan Pangan Lokal yang bernilai komersial akan di adakan melalui dua metode pertama teori yang dilaksanakan didalam ruangan dan praktek mengolah pangan lokal yang dilaksanakan di halamam aula :

- a. Praktek pertama membuat olahan pangan lokal dengan menggunakan bahan baku tepung ganyong membuat kue lapis warna- warni atau sesuai selera.
- b. Praktek kedua membuat olahan pangan lokal dengan menggunakan bahan baku sagu untuk membuat kue kering.

- c. Praktek ketiga membuat olahan pangan lokal dengan menggunakan bahan baku sagu untuk membuat kue lapis berwarna.
- d. Praktek keempat membuat olahan pangan lokal dengan menggunakan bahan baku ganyong untuk membuat kue kering.

Dengan melalui pelatihan ini diharapkan agar nantinya peserta dapat meningkatkan ketrampilan dalam mengolah bahan pangan serta menambah pendapatan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia.

b. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

Pengembangan Olahan Pangan Lokal serta pemanfaatan sebagai pangan pokok antara lain :

- a. Ketersediaan bahan baku terbatas
- b. Harga kurang kompetitif dibandingkan beras
- c. Produktivitas pangan lokal umumnya masih rendah karena riset baik varietas maupun teknologi kurang intensif
- d. Dorongan kebijakan masih terfokus ke komoditas Padi, Jagung dan Kedelai.

(2) Solusi

Untuk dapat meningkatkan Pengembangan Olahan Pangan Lokal dan mewujudkan Diversifikasi pangan lokal maka diharapkan adanya berbagai upaya diantaranya :

- a. Meningkatkan Pengembangan tanaman Pangan lokal yang ada di Kabupaten Bintan
- b. Dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk inovasi pengembangan diversifikasi produk pangan Lokal.

- c. Meningkatkan implementasi hasil pelatihan pengolahan pangan lokal di kehidupan nyata.
- d. Meningkatkan alat produksi pembuatan produk makanan dalam skala besar
- e. Meningkatkan sosialisasi teknologi dan gizi bahan pangan kepada masyarakat dan petani.

3) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 87.000.000,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 83.048.550,-** atau **95,46 %** serta realisasi fisik sebesar **100 %** dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Program :

(1) Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 44.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 43.404.000,-** atau **98,65%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Output kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan dan pupuk tanaman perkebunan.

Tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah membuka pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan kebun yang benar, meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu

tanaman perkebunan, menjamin keberkelanjutan produksi tanaman perkebunan sebagai sumber bahan baku industri, serta meningkatkan pendapatan petani melalui sektor perkebunan karet unggul melalui pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan kondisi tanaman perkebunan di Kabupaten Bintan pada umumnya banyak terserang hama, terutama tanaman karet rakyat dan cengkeh secara umum banyak tanaman Tua dan rusak kondisi tidak terawat dan terserang berbagai macam jenis penyakit. Sedangkan Tanaman perkebunan yang lainnya seperti kelapa dalam, kelapa sawit, kakao dan lada belum terlalu banyak di kembangkan di bintan hanya ada beberapa petani yang baru mengembangkannya , hanya sebagian kecil terserang hama.

Dalam upaya menciptakan kebun karet dan cengkeh yang bersih dari gulma dan meminimalkan resiko kebakaran sehingga tanaman karet dan cengkeh dapat terpelihara dengan baik dan produktifitas tetap tinggi maka di perlukan adanya upaya- upaya untuk menjaga kebun tersebut agar tetap terjaga dengan baik. Upaya- upaya tersebut diantaranya dengan memberikan penyuluhan kepada petani.

Produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Bintan masih kurang optimal hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya:

- 1) Tanaman karet rakyat terserang hama rayap dan Jamur akar putih.
- 2) Tanaman Cengkeh terserang hama cacar daun dan penggerek batang.
- 3) Tanaman lada terserang hama jamur *Phytophthora capsici* Busuk pangkal batang).

- 4) Tanaman Kakao terserang hama Kepik penghisap buah dan daun muda terpotong.
- 5) Tanaman Kelapa terserang hama kumbang nyiur dan kumbang janur.

Tujuan Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tananaman Perkebunan Berkelanjutan sebagai berikut :

- Membuka pola pikir Masyarakat terhadap pengelolaan kebun yang benar.
- Meningkatkan Produksi, produktifitras dan mutu tanaman perkebunan
- Menjamin berkelanjutan produksi tanaman perkebunan sebagai sumber bahan baku industri.
- Meningkatkan pendapatan petani melalui sektor perkebunan .
- Mengendalikan hama Penyakit pada tanaman perkebunan.

Keluaran Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi (monev) petani kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan di kelompok Tani Kabupaten Bintan.
- Terlaksananya belanja obat - obatan .
- Tersalurnya obat-obatan kepada petani yang tanamannya terserang hama.

Berdasarkan pada hasil pengamatan penyakit tanaman perkebunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, dapat diketahui jumlah serangan penyakit tanaman

perkebunan rakyat sebanyak lebih kurang 2.780 batang. Kondisi tanaman Perkebunan rakyat tersebut banyak terserang penyakit Organisme Pengganggu Tumbuhan, Kondisi serangan penyakit tanaman perkebunan di Kabupaten Bintan sangat mungkin lebih besar dari hasil pengamatan ini, jangkauan petugas pengamat dalam melaksanakan pengamatan masih sangat terbatas hal ini disebabkan minimnya tenaga teknis dan alokasi anggaran yang diberikan kepada Seksi Perlindungan, Pengawasan Tanaman Perkebunan.

Tabel 3.22 Daftar Serangan Penyakit Tanaman Perkebunan Hasil Pengawasan Kegiatan Pengendalian, Pengawasan Dan Perlindungan Tanaman

No.	Kelompok Tani	Nama Petani	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Serangan				Keterangan
					Karet (btng)	Kelapa (btng)	Kakao (btng)	Lada (btng)	
1	Ngudi Luhur	Sutarno	Bintan Buyu	2 Ha	100				Rayap/Jap
2				300 btng				50	Jamur
3	Jaya Patih	Dullah	Ekang Anculai	2 Ha	100				Rayap/Jap
4		Cecep		0,5 Ha	30				Rayap/Jap
5		Sukemi		2 Ha	80				Rayap/Jap
6	Sekuning Makmur	Tahang	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
7		Sukatwan		2 Ha	120				Rayap/Jap
8	Sri Rezeki	Mispani	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
9									Rayap/Jap
10	Wijaya	Sarmuji	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
11									Rayap/Jap
12	Jati Mulyo	Poniman	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
13		Jumawan	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
14	Sumber Rezeki	Sugianto	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
15	Flo Java	Amiruddin	Sebong Pereh	1 Ha		10			Rayap/Jap
16	Cinta Tanah Air	M. Dharma Sebayang		800 btng				60	Jamur
17		Caca		500 btng				50	Jamur
18	Sido Dadi	Pranoto		1600 btng				120	Jamur

No.	Kelompok Tani	Nama Petani	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Serangan				Keterangan
					Karet (btng)	Kelapa (btng)	Kakao (btng)	Lada (btng)	
19	Cahaya Purnama	Zainal Abidin	Desa Tembeling	1,5 Ha	100				Rayap/Jap
20				400 btg				30	Jamur
21	Sari makmur	Sugiono	Toapaya Utara	1 Ha	40				Rayap/Jap
22				200 btng				100	Jamur
23		Sutrisno		100 btng	20				Rayap/Jap
24		Sumarjan		1 Ha	35				Rayap/Jap
25	Maju Jaya	Suyanto	Tuapaya	2 Ha	60				Rayap/Jap/ gugur daun
26	Sumber Rezeki	Sukamto	Tuapaya Asri	2 Ha	80				Rayap/Jap/ gugur daun
27	Makmur Jaya	Sakim		2 Ha	120				Rayap/Jap/ gugur daun
28				200 btng				30	Jamur
29	Makmur	Supa'at	Kawal	0,5 Ha		10			Kumbang
30	Sumber Kelapa	M. Saidi	Kawal	2 Ha		20			Kumbang
31		Kasim		2 Ha		20			Kumbang
32		Abdul Fatah		4 Ha		40			Kumbang
33		Abu Bakar		2 Ha		20			Kumbang
34		M. Ishak		2 Ha		20			Kumbang
35		Acok		2 Ha		20			Kumbang
36		Hafizar		1 Ha		10			Kumbang
37		Barnas Edi		1 Ha		10			Kumbang
38		Syamsul		2 Ha		20			Kumbang
39		Samad		2 Ha		20			Kumbang
40	Beringin Jaya	Sugeng	Kuala Sempang	2 Ha	100				Rayap/Jap/ gugur daun
41				1000 btng				200	Jamur
42	Subur Makmur	Munari		2 Ha	60				Jamur
43		Alias		2 Ha	100				Jamur
44		Aldi May (Sugiono)		2 Ha	100				Jamur
45		Hari Susanto		2 Ha	75				Jamur
	Jumlah				1865	240	0	640	2745

**Tabel 3.23 Petani Perkebunan Yang Menerima Bantuan Obat –
Obatan Tahun Anggaran 2019**

NO	PETANI	ALAMAT (Desa)	JENIS OBAT – OBATAN			JML	TANGGAL PENYERAHAN
			Herbisida (Roundap) Liter	Insektisi da (Dusban) liter	Fungisi da (Dithen N 45) kg		
1	Dullah	Ekan Anculai	2	2	1	5	01-07-2019
2	Cecep Supiadi	Ekan Ancul	2	2	1	5	01-07-2019
3	Sukemi	Ekan Anculai	2	2	1	5	01-07-2019
4	Jumawan	Sri Bintang	2	2	1	5	02-07-2019
5	Sarmuji	Sri Bintang	2	2	1	5	02-07-2019
6	Sukatwan	Sri Bintang	2	2	1	5	02-07-2019
7	M. Saidi	Kawal	2	2	1	5	01-08-2019
8	M. Ishak	Kawal	2	2	1	5	01-08-2019
9	Acok	Kawal	2	2	1	5	01-08-2019
10.	Barnabas Edi	Kawal	2	2	1	5	01-08-2019
11	Caca Hidayat	Sebong Pereh	2	2	1	5	21-08-2019
12	M. Dharma Sebayang	Sebong Pereh	2	2	1	5	21-08-2019
13	Odi	Sebong Pereh	2	2	1	5	21-08-2019
14	Amiruddin	Sebong Pereh	2	2	1	5	21-08-2019
15	Sutarno	Bintan Buyu	2	2	1	5	23-08-2019
16	Zainal Abidin	Tembeling	2	2	1	5	23-08-2019
17	Sugeng	Kuala Sempang	2	2	1	5	23-09-2019
18	Munari	Kuala Sempang	2	2	1	5	23-09-2019
19	Sakim	Toapaya	2	2	1	5	08-10-2019
20	Sugiono	Toapaya Utara	2	2	1	5	15-10-2019
21	Suyanto	Toapaya	2	2	1	5	24-10-2019
22	Sugiyanto	Sri Bintang	2	2	1	5	06-11-2019
23	Mispan	Sri Bintang	2	2	1	5	13-11-2019
24	Rio May Aldi	Kuala Sempang	2	2	1	5	18-11-2019
25	Aliyas	Kuala Sempang	2	2	1	5	18 -11-2019
Jumlah			50	50	25	125	

b. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum, Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 546.800.000,-

dan realisasi anggaran sebesar Rp. 529.273.400,- atau 97,30% serta realisasi fisik sebesar 99,83% namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, permasalahan tersebut telah berhasil ditindak lanjuti, sebagaimana uraian sebagai berikut :

(1) Permasalahan

- a) Pemeliharaan kebun bibit perkebunan sebagai sentra pembibitan membutuhkan tenaga teknis yang tetap dan selama ini hanya tenaga THL.
- b) Kondisi alam yang ekstrim mempengaruhi tingkat tumbuh bibit.
- c) Masih rendahnya sebagian kualitas SDM petani dalam pembibitan budidaya lada atau merica.
- d) Kurangnya modal petani untuk perawatan, pemupukan dan pemeliharaan tanaman perkebunan.
- e) Rendahnya pengupahan tenaga THL sehingga pembibitan kurang optimal.
- f) Rendahnya pemanfaatan teknologi sederhana pada tingkat petani.
- g) Maraknya alih fungsi kebun menjadi areal penggunaan lainnya .
- h) Rendahnya harga jual karet sehingga menyebabkan usaha ini kurang menarik hal ini mengakibatkan motivasi petani untuk merawat dan menjalankan usaha perkebunan karet rakyat rendah.

(2) Solusi

- a) Peningkatan modal dan kualitas sumber daya manusia petani sebagai upaya peningkatan produksi perkebunan.

- b) Meningkatkan harga jual karet melalui peningkatan kualitas produksi dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan.
- c) Peningkatan pengembangan tanaman lada untuk meningkatkan taraf hidup petani dikarenakan harga lada yang stabil.
- d) Perlunya tenaga teknis yang tetap dalam pengelolaan kebun bibit perkebunan.

(4) Peningkatan Produksi Perkebunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 43.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 39.644.550,-** atau **92,20%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Output kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan dan pupuk tanaman perkebunan.

Seray wangi merupakan salah satu jenis tanaman minyak atsiri, yang tergolong sudah berkembang dan permintaan ke Luar Negeri cukup meningkat. Hasil penyulingan daunnya diperoleh minyak seraywangi yang dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama Citronella Oil. Minyak seray wangi Indonesia dipasaran dunia terkenal dengan nama “Citronella Oil of Java”. Industri minyak atsiri memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki keunggulan komperatif dalam penyediaan bahan bakunya, Selain itu pembangunan minyak atsiri akan menimbulkan efek berganda berupa peningkatan pendapatan petani tanaman atsiri, pembukaan lapangan kerja di bidang agro industri serta pengenalan sistem dan perilaku industri di pedesaan. Untuk Tahun anggaran 2019 Pemerintah Daerah melalui Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan akan merencanakan pengembangan bibit seray wangi sebanyak 5006 batang, dan pengadaan pupuk kandang sebagai penunjang sebanyak 681 karung untuk dikembangkan

dikelompok tani tunas harapan di desa Kuala Sempang Kecamatan Sri Kuala Lobam. Disamping itu kita bekerja sama dengan pihak provinsi untuk membuka lahan seluas 5 ha di tanah Pemda untuk mengembangkan kelapa dalam unggul varitas lampanah di desa malang rapat Kecamatan Gunung Kijang sebanyak 600 batang.

Tujuan pelaksanaan program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan adalah sebagai berikut :

- ✓ Tersedianya bibit seray wangi di Kabupaten Bintan sehingga petani lainnya dapat mengembangkannya di kelompok tani lainnya.
- ✓ Tersedianya bibit seray wangi sebanyak 5006 batang
- ✓ Tersedianya bibit kelapa dalam unggul
- ✓ Tersedianya pohon indukan kelapa unggul varitas lampanah yang sudah tersertifikasi
- ✓ Meningkatnya jumlah bibit tanaman perkebunan di Kabupaten Bintan.

Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan adalah untuk menyediakan sentra bibit bibit perkebunan yang unggul pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas kebun rakyat dan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Bidang Perkebunan telah mendistribusikan bibit lada, kelapa, karet, cengkeh, pala, dan seray wangi pada tahun 2018 s/d 2019 kepada petani di Kabupaten Bintan dengan jumlah bibit sebanyak 12.306 bibit dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.24 Kelompok Tani Penerima Bibit
Bidang Perkebunan Kabupaten Bintan**

No.	Lokasi	Kelompok	Jumlah (Btg)	Tahun
1	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Harapan	350	2018
2	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Beringin Jaya Purnama	550	2018
3	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Tunas Harapan	200	2018
4	Desa Gunung Kijang	Subur	200	2018
5	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Beringin Jaya	600	2018
6	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Beringin	1.150	2018
7	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Harapan	500	2018
8	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Doa Ibu	500	2018
9	Kec.Teluk Sebong	Yanto	500	2018
10	Kec.Teluk Bintan	PKK	200	2018
11	Kec.Gunung Kijang Karet	Lukman	100	2018
12	Kec.Gunung Kijang Karet	Zalmi	200	2018
13	Kec.Gunung Kijang Kelapa	Tunas Jaya	150	2018
14	Kec.Gunung Kijang Kelapa	Kel.Kawal	100	2018
15	Kec.Gunung Kijang	Desa Teluk Bakau	100	2018
16	Kec.Toapaya Pala	UPT Km.27	250	2018
17	Kec.Teluk Bintan Cengkeh	Kota Kara	250	2018
18	Kec.Srikuala Lobam Kelapa	Beringin Jaya	165	2018
19	Kec.Toapaya Kelapa	Masyarakat	85	2018
20	Kec.Sri Kuala Lobam Seray Wangi	Tunas Harapan	5006	2019
21	Kec.Gunung Kijang Kelapa Dalam	Tanah Pemda	600	2019
	Jumlah		12306	

Produksi perkebunan di Kabupaten Bintan masih kurang optimal hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

1. Sentra pengembangan bibit tanaman perkebunan belum memadai
2. Anggaran untuk menciptakan produksi tanaman perkebunan cenderung terbatas
3. Tenaga trampil khusus pengelolaan kebun bibit belum ada
4. Tenaga trampil untuk OPT perkebunan belum tersedia
5. Tempat penampungan dan pengolahan hasil belum ada.

b. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum, Program Peningkatan produksi, Produktivitas dan mutu produk Tanaman Perkebunan berkelanjutan, telah dilaksanakan dengan baik, Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan terealisasi fisik 97.23 %,namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, permasalahan tersebut telah berhasil ditindak lanjuti, sebagaimana uraian sebagai berikut :

(1) Permasalahan

- a) Petugas kebun bibit perkebunan sebagai sentra pembibitan membutuhkan tenaga teknis yang tetap dan selama ini belum ada.
- b) Kondisi alam yang ekstrim mempengaruhi tingkat tumbuh bibit.
- c) Masih rendahnya sebagian kualitas SDM petani dalam budidaya dan pembibitan perkebunan.
- d) Kurangnya modal petani untuk perawatan, pemupukan dan pemeliharaan tanaman perkebunan.
- e) Rendahnya pemanfaatan teknologi sederhana pada tingkat petani.

- f) Maraknya alih fungsi kebun menjadi areal penggunaan lainnya

Rendahnya fluktuasi harga yang tidak stabil sehingga menyebabkan usaha ini kurang menarik hal ini mengakibatkan motivasi petani untuk merawat dan menjalankan usaha perkebunan sangat rendah.

(2) Solusi

- a) Peningkatan modal dan kualitas sumber daya manusia petani sebagai upaya peningkatan produksi perkebunan.
- b) Meningkatkan fluktuasi harga jual hasil perkebunan melalui peningkatan kualitas produksi dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan.
- c) Peningkatan pengembangan tanaman seray wangi dan alat olahannya untuk meningkatkan taraf hidup petani dikarenakan harga minyak seray wangi yang cenderung stabil.
- d) Perlunya tenaga teknis yang tetap dalam pengelolaan kebun bibit perkebunan.

5) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Pangan

a. Pelaksanaan Program :

(1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Padi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. Rp. 67.148.000,-** dan terealisasi sebesar **66.122.300,-** atau **98,47 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

Keluaran dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya pupuk 8 Ha dengan lokasi di Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong. Inti dari kegiatan ini adalah pengembangan kawasan Tanaman pangan (Padi). Kegiatan

ini merupakan untuk meningkatkan jumlah populasi tanaman pangan dengan cara disebar/dihibahkan kepada masyarakat yaitu : Pupuk untuk lahan 8 Ha berdasarkan SK Bupati Nomor : 191/III/2019 tanggal 01 Maret 2019. diserahkan kepada :

- Kelompok Tani Poyotomo Makmur (Ketua Ali Aspan) yang beralamat Jl. Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong sebanyak Pupuk Urea 100 Kg, Pupuk TSP 650 Kg dan Pupuk KCL 650 Kg berdasarkan NPHD Nomor 521/DKPP/160 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Rekomendasi HKTI No 137/HKTI/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.
- Kelompok Tani Hidup Bersama (Ketua H. Abdul Rasid) yang beralamat Jl. Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong sebanyak Pupuk Urea 100 Kg, Pupuk TSP 650 Kg dan Pupuk KCL 650 Kg berdasarkan NPHD Nomor 521/DKPP/161 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Rekomendasi HKTI No 138/HKTI/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.

b. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum, Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan. Permasalahan tersebut telah ditindak lanjuti secara maksimal , namun hasilnya masih sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana uraian sebagai berikut:

(1) Permasalahan

- a) Kurangnya jumlah pupuk yang tidak sebanding dengan luas lahan.

- b) Potensi tanah di beberapa daerah masih miskin unsur hara sehingga diperlukan upaya pemupukan.
- c) Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam memperbanyak komoditi tanaman pangan.
- d) Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan petani dalam penanganan hama dan penyakit pada tanaman khususnya tanaman Padi.
- e) Kurangnya keinginan tenaga petani dalam mengembangkan usaha tanaman pangan dan juga kurangnya aslin dalam pengolahan lahan untuk pengembangan tanaman pangan terutama padi.

(2) Solusi

- 1) Perlunya penambahan kuota pupuk sehingga dapat meringankan petani dalam pengadaan pupuk.
- 2) Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan dan upaya peningkatan kapasitas daya dukung lahan.
- 3) Peningkatan penggunaan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara hayati serta perlakuan pasca panen yang baik
- 4) Peningkatan Penggunaan dan pengadaan aslin sehingga dalam pelaksanaan olah lahan tidak terhambat.

6) Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 732.824.000,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp 675.315.830,-** atau **92,15%** serta realisasi

fisik sebesar **96,97%** dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Program :

(1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. Rp. 250.136.000,-** dan terealisasi sebesar **201,460,000,-** atau **80,54%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

Keluaran dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya 4.200 batang tanaman hortikultura (bibit durian) dengan lokasi di Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Sebong. Inti dari kegiatan ini adalah pengembangan produk unggulan daerah pengembangan kawasan tanaman Hortikultura. Kegiatan ini merupakan untuk meningkatkan jumlah populasi tanaman hortikultura dengan cara disebar/dihibahkan kepada masyarakat yaitu:

- a. Bibit tanaman durian sebanyak 4.200 batang berdasarkan SK Bupati Nomor : 192/III/2019 tanggal 01 Maret 2019
- b. Diserahkan kepada :
 - Kelompok Tani Doa Ibu (Ketua Badrudin) yang beralamat Jl. Kebun Nangka Desa Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam sebanyak 1900 batang bibit Durian berdasarkan NPHD Nomor 521/DKPP/132 tanggal 14 Maret 2019 dan Surat Rekomendasi HKTI No 135/HKTI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.
 - Kelompok Tani Jaya Patih (Ketua Dullah) yang beralamat Jl. Kp. Bale Rejo RT 003 RW 003 Desa Ekan Aculai Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 2300 batang bibit Durian berdasarkan NPHD Nomor 521/DKPP/133

tanggal 14 Maret 2019 dan Surat Rekomendasi HKTINo 136/HKTI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.

b. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum, Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura ramah lingkungan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan khususnya dalam pengadaan bibit yang belum ada penangkar dari daerah kabupaten bintan sehingga proses pengadaan terlalu lama dan pengiriman. Permasalahan tersebut telah ditindak lanjuti secara maksimal , namun hasilnya masih sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana uraian sebagai berikut :

(1) Permasalahan

- a) Sumber bibit/benih masih mendatangkan dari luar pulau Bintan
- b) Potensi tanah di beberapa daerah masih miskin unsur hara sehingga diperlukan upaya pemupukan
- c) Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam perbanyakan komoditi hortikultura
- d) Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan petani dalam penanganan hama dan penyakit pada tanaman khususnya tanaman cabe dan bawang merah yang menjadi fokus pengembangan hortikultura Kabupaten Bintan.

(2) Solusi

- a) Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas Kebun Bibit Pertanian Kabupaten sebagai sumber bibit/benih di Kabupaten Bintan dan menumbuhkan petani penangkar di Kabupaten Bintan.

- b) Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan dan upaya peningkatan kapasitas daya dukung lahan
- c) Peningkatan penggunaan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara hayati serta perlakuan pasca panen yang baik

(2) Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura Ramah Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,-** dan terealisasi sebesar 194.743.700,- atau **97,37 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Target keluaran (output) berupa Terlaksananya Perlindungan Tanaman Hortikultura.

Target hasil kegiatan (outcome) adalah Pelatihan Petani dalam Perlindungan Tanaman (OPT).

a. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum, Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura ramah lingkungan telah dilaksanakan dengan baik, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, namun demikian permasalahan tersebut telah berhasil ditindak lanjuti, sebagaimana uraian sebagai berikut :

(1) Permasalahan

1. Perlu Peningkatan Pengetahuan petani dalam Pelaksanaan Perlindungan Tanaman berbasis ramah lingkungan.
2. Perlunya Penyuluh sebagai pendamping petani yang faham permasalahan di lapangan mengenai pengendalian hama penyakit ramah lingkungan

3. Perlunya Peningkatan alat penunjang dalam pelaksanaan perlindungan tanaman.

(2) Solusi

1. Perlunya Pelatihan Petani dan Penyuluh dalam pengendalian Hama dan Penyakit yang ramah lingkungan.
2. Perlunya penambahan bantuan alat penunjang penanganan OPT di Petani
3. Perlunya pendampingan petani baik dari pengolahan lahan penanaman dan perawatan tanaman serta pascapanen

(3) Pengembangan Kebun Bibit Pertanian Kabupaten (UPTD Perbenihan)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 282.698.000,-** dan terealisasi sebesar 279.112.130,- atau **98,73 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Target keluaran (output) berupa Tersedianya bibit salak, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan, Sarana Pendukung Operasional Kebun Target hasil kegiatan (outcome) adalah Penambahan populasi tanaman salak Sari Intan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan terpeliharanya tanaman pohon induk seluas 10 hektar.

a. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum, telah dilaksanakan dengan baik, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, namun demikian permasalahan tersebut telah berhasil ditindak lanjuti, sebagaimana uraian sebagai berikut :

(1) Permasalahan

- a) Terbatasnya anggaran yang tersedia, berdampak kepada tidak tersedianya sarana pendukung kerja yang memadai.

- b) Tidak terealisasi nya belanja minyak (Solar dan Pertalite) khususnya bahan bakar pertalite karena berubahnya usaha bisnis pihak ketiga (PT. KHARISMA PETRO GEMILANG) yang telah tanda MoU dari awal Tahun.

(2) Solusi

- a) Menggunakan fasilitas yang tersedia, walaupun hasilnya kurang maksimal.
- b) Merealisasi bahan bakar solar untuk operasional pompa air dan traktor, sedangkan bahan bakar pertalite untuk operasional mesin rumput, power sprayer dan cultivator diadakan secara swadaya (eceran)

7) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Bintan melalui 6 (enam) kegiatan pokok yaitu :

- Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian
- Pengawasan Dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi
- Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan (BPP) di Kecamatan dan sarana pendukung (DAK)
- Penunjang DAK Bidang Pertanian
- Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal (DAK).
- DAK Pembangunan / Perbaikan Balai / Instalasi Pembibitan dan Hijauan Pakan ternak, Pusat Kesehatan hewan, Rumah Potong Hewan Rumansia dan Penyediaan Sarana Pendukung.

Total alokasi anggaran yang disediakan dalam mendukung program ini sebesar **Rp. 1.260.436.600,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 1.093.410.636,-** atau sebesar **97,83 %** dari total anggaran yang dialokasikan, dengan realisasi pencapaian fisik sebesar **100%** dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

(1) Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 155.999.600,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 154.435.900,-** atau dalam prosentase sebesar **99%** dengan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar **100%**.

a. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pupuk , pestisida dan alat pengolah tanah berupa cultivator untuk pengembangan usaha tani

b. Sasaran

Sasaran lokasi kegiatan adalah Kelompok Tani yang berada di daerah sentra produksi hortikultura di wilayah Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.

c. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan pupuk yang diperlukan dalam usaha tani sebanyak 2.000 Kg, Tersedianya 3 unit Cultivator, dan tersedianya obat obatan tanaman sebanyak 46 Liter yang diharapkan dapat meringankan beban petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

d. Hasil

Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah meningkatnya produktivitas pertanian dan meningkatnya pendapatan/penghasilan petani di Kabupaten Bintan.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Verifikasi Kelompok Tani calon penerima bantuan yang diserahkan kepada masyarakat. Verifikasi dilakukan setelah adanya proses CPCL pada tahun 2018. Seleksi CPCL dilaksanakan berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditentukan. Adapun aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan petani penerima bantuan adalah minat dan kemampuan petani serta potensi wilayah
- Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan kelompok petani penerima bantuan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pertanian atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan Kelompok Tani penerima bantuan.
- Penyiapan Spesifikasi teknis dan Pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Langsung dan e- pengadaan langsung
- Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 % dari rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.dan selanjutnya penyerahan dari Kepala Dinas Pertanian Kepada Kelompok Tani penerima barang
- Perjalanan dinas digunakan untuk verifikasi, penyerahan barang dan pembinaan ke lapangan serta konsultasi kegiatan ke Kementerian Pertanian (Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dan Bagian Perencanaan) dengan hasil diantaranya tentang tata cara pengusulan dan penggaran bantuan Alat dan Mesin Pertanian.

Penyerahan barang hasil pengadaan kepada masyarakat dengan perincian sebagai berikut :

- Pupuk NPK sebanyak 2.000 Kg yang diserahkan kepada kelompok tani Beringin Jaya, Ketua Hasan Basori, Alamat Jl.Kp.Bansun RT.013 / RW. 004 Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang.
- Fungisida sebanyak 4 Liter, Insektisida sebanyak 12 Liter dan Cultivator 1 Unit yang diserahkan kepada kelompok tani Karya Tani Jaya, Ketua Saderi, Alamat Jl. Kp. Baru RT.002/RW.001 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintang Timur.
- Fungisida sebanyak 4 Liter, Insektisida sebanyak 11 Liter dan Cultivator 1 Unit yang diserahkan kepada kelompok tani Mandiri, Ketua Supardi, Alamat Kp. Bina Maju RT.004 / RW. 003 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintang Timur
- Fungisida sebanyak 4 Liter, Insektisida sebanyak 11 Liter dan Cultivator 1 Unit yang diserahkan kepada kelompok tani Pemuda Lingkar Wacopek, Ketua Edy Yasid, Alamat Jl. Kp. Bina Maju RT.003 / RW. 004 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintang Timur

Permasalahan Dan Solusi

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Pertanian sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana uraian sebagai berikut :

(1) PERMASALAHAN

- a) Kemampuan dan pengetahuan petani dalam merawat alat dan mesin pertanian masih rendah sehingga dikhawatirkan alat mesin sehingga akan memperpendek umur ekonomisnya .

- b) Kemampuan dan pengetahuan petani dalam budidaya baik dalam hal perawatan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman masih rendah yang menyebabkan kurang maksimalnya produksi yang dihasilkan.
- c) Rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian yang menyebabkan kurang maksimal dan meratanya pembinaan dan bantuan sarana produksi kepada petani

(2) Solusi

- a) Mengotimalkan dan menabab intensitas kunjungan dalam rangka pembinaan perawatan alsintan dan budidaya tanaman.
- b) Mengusulkan penambahan anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.

(2) Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

Pupuk merupakan kebutuhan mendasar bagi petani karenanya kecukupan pupuk merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan yang dalam berusaha tani. Berdasarkan hal tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pupuk bagi seluruh petani menjadi prioritas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.Kabupaten Bintan dengan penduduk yang besar bermata pencaharian sebagai petani tentunya pupuk baik itu bersubsidi maupun non subsidi menjadi isu sentral dalam pembangunan pertanian.

Dalam upaya menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bintan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi kegiatan untuk pengamanannya yang tertuang dalam Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi.

Kegiatan utama Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 meliputi pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) pembinaan, pertemuan penyusunan RDKK, entry RDKK ke dalam e-RDKK pada seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 45.720.000,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 37.560.306,-** atau dalam prosentase sebesar **82.15 %** dengan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar **100%**.

a. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempermudah pemerintah dan petani dalam mengawasi serta memperoleh pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bintan.

b. Sasaran

Sasaran penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Petani
- Kelompok tani
- Gabungan Kelompok Tani
- Para pelaku utama usaha pertanian

Sasaran lokasi kegiatan ini adalah 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bintan yaitu :

- Kecamatan Bintan Timur
- Gunung Kijang
- Toapaya
- Teluk Bintan
- Teluk Sebong
- Bintan Utara
- Seri Kuala Lobam
- Bintan Pesisir
- Mantang.

c. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan tersedianya data RDKK Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bintan tahun 2019.

d. Hasil

Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi terdiri dari beberapa uraian belanja yang masuk kedalam belanja langsung (5.2) yakni belanja pegawai (5.2.1) dan belanja barang dan jasa (5.2.2). Untuk belanja pegawai, berupa honorarium Non PNS yakni honorarium peserta kegiatan (Uang Saku Harian).
- Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, ruang lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah belanja perjalanan dinas (5.2.2.15) yang terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah (5.2.2.15.01) dan belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02), dan belanja makanan dan minuman kegiatan (5.2.2.39.04).
- Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah tim bidang penyuluhan dengan melibatkan bidang lain di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.
- Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi untuk belanja honorarium non PNS (honorarium peserta kegiatan/uang saku harian) dan honorarium PNS (Honorarium Tim Kelompok Kerja untuk petugas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida/KP3 yang

berasal dari luar lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan) dan belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan metode swakelola. Sedangkan untuk belanja makanan dan minuman rapat dilaksanakan melalui penyedia (pihak ketiga).

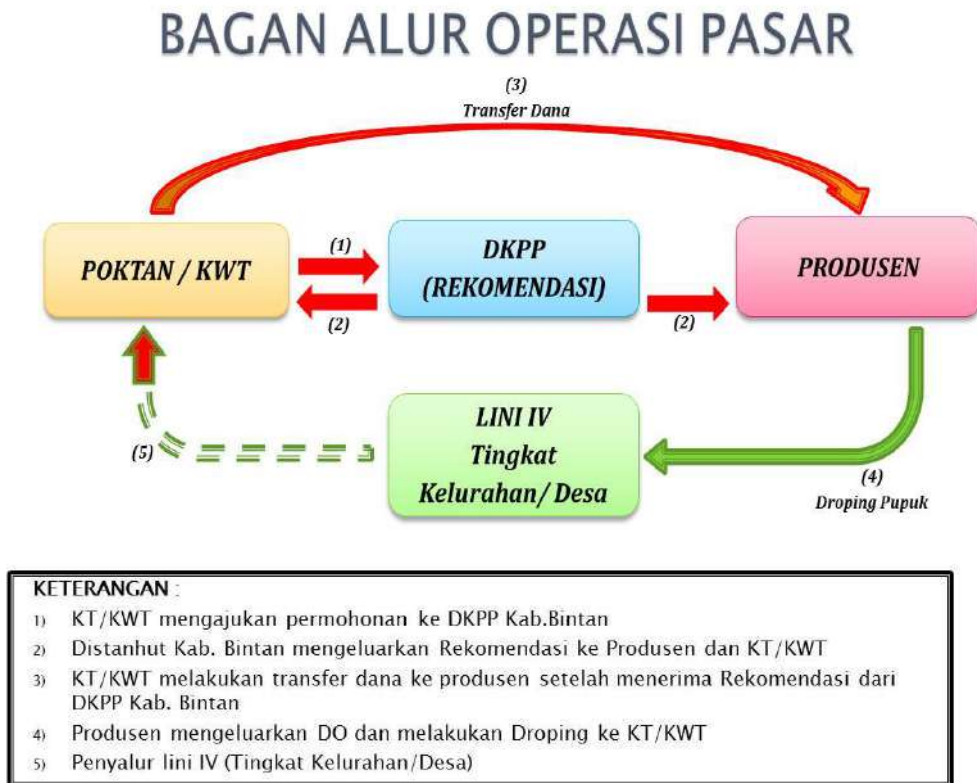
- Seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa untuk Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 adalah selama 1 Tahun (12 Bulan) terhitung sejak keluarnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 yakni dari Januari s/d Desember 2019 dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel. 3.25 Jadwal Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK

NO	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan (Penyusunan KAK, penyusunan SK Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dan SK Tim Verifikasi Validasi Tingkat Kabupaten)												
2	Pengumpulan data RDKK Tingkat Kabupaten												
3	Pengentrian e-RDKK												
4	Penyusunan SK HET Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019												
5	Penyusunan SK Kuota pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019												
6	Penerimaan permohonan penebusan dan penerbitan Rekomendasi penebusan pupuk bersubsidi												
7	Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi												
8	Pelaksanaan rapat penyusunan RDKK pupuk bersubsidi												
9	Pembinaan Kelompok Tani												
10	Monitoring , evaluasi dan pelaporan												

- (1) Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Bintan melalui operasi pasar karena belum adanya pengecer yang menangani pupuk bersubsidi di Kabupaten Bintan

Gambar 3.2 Bagan Alur Operasi Pasar



Tabel 3.26 Alokasi awal Pupuk Bersubsidi Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (Kg)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Bintan Timur	1,050	400	250	6,100	3,240
2	Bintan Pesisir	100	100	-	-	680
3	Mantang	-	50	-	250	-
4	Gunung Kijang	1,400	150	100	3,950	1,880
5	Toapaya	1,500	350	250	7,600	3,760
6	Teluk Bintan	2,150	550	550	7,250	2,800
7	Teluk Sebong	2,800	350	500	14,100	7,160
8	Bintan Utara	750	50	50	4,000	120
9	Seri Kuala Lobam	250	-	300	1,750	360
JUMLAH		10,000	2,000	2,000	45,000	20,000

Tabel 3.27 Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019

NO	KEC	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (Kg)									
		SEMULA					MENJADI				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Bintan Timur	1,050	400	250	6,100	3,240	1,250	400	250	6,100	3,240
2	Bintan Pesisir	100	100	-	-	680	100	100	-	-	680
3	Mantang	-	50	-	250	-	-	50	-	250	-
4	Gunung Kijang	1,400	150	100	3,950	1,880	1,400	150	100	3,950	1,880
5	Toapaya	1,500	350	250	7,600	3,760	2,100	350	250	7,600	3,760
6	Teluk Bintan	2,150	550	550	7,250	2,800	3,000	550	550	7,250	3,240
7	Teluk Sebong	2,800	350	500	14,100	7,160	2,800	350	500	14,100	7,160
8	Bintan Utara	750	50	50	4,000	120	750	50	50	4,000	120
9	Seri Kuala Lobam	250	-	300	1,750	360	250	-	300	1,750	360
JUMLAH		10,000	2,000	2,000	45,000	20,000	11,650	2,000	2,000	45,000	20,440

(2) Realisasi serapan pupuk bersubsidi

Realisasi serapan pupuk bersubsidi dari total alokasi yang ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.28 Realisasi Serapan Pupuk Bersubsidi

NO	KEC	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Bintan Timur	1,250	400	250	6,100	3,240
2	Bintan Pesisir	100	100	-	-	680
3	Mantang	-	50	-	250	-
4	Gunung Kijang	1,400	150	100	3,950	1,880
5	Toapaya	2,100	350	250	7.200	3,760

6	Teluk Bintan	3,000	550	550	7,250	3,240
7	Teluk Sebong	2,400	350	500	10.600	7,160
8	Bintan Utara	750	50	50	4,000	120
9	Seri Kuala Lobam	250	-	300	1,750	360
JUMLAH		11,250	2,000	2,000	41.100	20,440

4. Pertemuan evaluasi penyusunan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi
 - a. Pertemuan evaluasi penyusunan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 yang dimulai pada jam 08.30 WIB, bertempat di Pasar Tani Kabupaten Bintan, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang dan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Bintan dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dalam pertemuan ini dibahas beberapa hal di antaranya :
 - Perubahan mekanisme pengajuan pupuk bersubsidi tahun 2020
 - Penyampaian syarat pengajuan pupuk bersubsidi tahun 2020
 - Penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019
 - Realokasi pupuk bersubsidi tahun 2019
 - Permasalahan dan kendala dalam pengajuan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi
 - b. Rekapitulasi kebutuhan pupuk Bersubsidi tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi e-RDKK dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Petani (Orang)	Luas Lahan Garapan (Ha)	Jenis Pupuk Bersubsidi (Kg)				
				Urea	NPK	ZA	SP 36	Organik
1	Bintan Utara	37	22.15	4,250	15,750	-	2,750	1,100
2	Seri Kuala Lobam	74	93.80	5,750	19,600	1,400	6,000	2,980
3	Teluk Sebong	101	130.75	32,150	48,300	4,650	10,350	9,800
4	Teluk Bintan	55	56.50	16,400	21,350	4,000	1,300	3,050
5	Toapaya	80	111.30	21,800	37,150	13,200	4,250	10,350
6	Gunung Kijang	61	66.80	11,550	17,850	3,100	3,450	8,350
7	Bintan Timur	81	80.60	7,450	26,250	2,850	7,550	3,714
8	Mantang	2	1.00	-	150	-	150	1,000
9	Bintan Pesisir	3	6.00	500	2,550	-	700	1,120
10	Tambelan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		494	568.90	99,850	188,950	29,200	36,500	41,464

b. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana uraian sebagai berikut :

(1) Permasalahan

- a) Kuota Pupuk Bersubsidi yang dialokasikan belum dapat mencukupi kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
- b) Lambatnya pengajuan surat permohonan rekomendasi penebusan dari kelompok tani.
- c) Lambatnya proses administrasi dalam penerbitan DO dari produsen/distributor yang menyebabkan lambatnya serapan dan adanya realokasi pupuk bersubsidi

- d) Lamanya proses waktu yang dibutuhkan untuk penebusan pupuk bersubsidi dikarenakan tidak ada pengecer di wilayah Kabupaten Bintan
- e) Lamanya proses waktu yang dibutuhkan untuk penebusan pupuk bersubsidi dikarenakan adanya pergantian pengurus dari distributor pupuk (petrokimia) dan pindahnya gudang pupuk serta tidak adanya perwakilan dari PT. Petrokimia Gresik di Provinsi Kepulauan Riau.
- f) Banyaknya petani yang melakukan kesalahan transfer yang disebabkan kurangnya pendampingan dari petugas akibat terbatasnya jumlah anggaran dan jumlah petugas untuk pembinaan
- g) Banyaknya petani yang tidak mau menyerahkan dokumen pelengkap pengajuan RDKK pupuk bersubsidi berupa KK/KTP yang menyebabkan gagalnya proses entry RDKK ke dalam e-RDKK yang secara otomatis petani bersangkutan tidak bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2020.
- h) Masih rendahnya pengetahuan petani dalam hal waktu dan cara penggunaan pupuk yang tepat.
- i) Pelaksanaan pertemuan hanya dapat mengakomodir sebagian kecil petani penerima manfaat pupuk subsidi dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan
- j) Lambatnya respon balasan surat permintaan petugas yang akan ditetapkan sebagai anggota dalam Komisi Pupuk dan Pestisida dari Kepolisian Resort Bintan serta Kejaksaan Negeri Bintan sehingga menjadi kendala dalam pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bintan.

(2) Solusi

- a) Mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi yang dialokasikan di wilayah Kabupaten Bintan.
- b) Mengusulkan untuk pembentukan kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bintan.
- c) Mengusulkan penambahan anggaran guna penambahan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan dan penambahan intensitas pembinaan petugas ke lapangan serta penambahan peserta pertemuan yang dapat diakomodir.
- d) Mengirimkan surat susulan terkait dengan permintaan petugas yang akan ditetapkan sebagai anggota dalam Komisi Pupuk dan Pestisida dari Kepolisian Resort Bintan serta Kejaksaan Negeri Bintan.

(3) Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukung

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 783.546.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 777.049.874,-** atau **99.17%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana berupa pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian dalam rangka untuk menunjang pelayanan prima bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, kinerja dan pelayanan penyuluhan di Kabupaten Bintan

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Teluk Bintan

c. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana penyuluh pertanian berupa pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak 1 unit

d. Hasil

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

e. Pelaksanaan Kegiatan

- Kegiatan Pembangunan/perbaikan Balai penyuluhan (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukung (DAK) terdiri dari beberapa uraian belanja yang masuk kedalam belanja langsung (5.2) yakni belanja barang dan jasa (5.2.2) dan belanja modal (5.2.3)
- Ruang lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah belanja perjalanan dinas (5.2.2.15), Belanja Jasa Konsultansi (5.2.2.48) dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja (52.3.49)
- Pelaksanaan Kegiatan ini untuk belanja belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan metode swakelola, sedangkan untuk Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultansi baik untuk konsultansi perencanaan maupun konsultansi pengawasan dilaksanakan melalui penyedia (pihak ketiga).

a. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukung (DAK) sudah terlaksana dengan baik, namun demikian ada beberapa kekurangan diantaranya sebagai berikut :

- Belum tersedianya alokasi anggaran untuk pemagaran, paving block dan sarana air bersih serta peralatan penunjang kerja.

(2) Solusi

- Mengusulkan alokasi anggaran untuk pemagaran, paving block dan sarana air bersih serta peralatan penunjang kerja pada tahun 2020.

(4) Penunjang DAK Bidang Pertanian

Salah satu aspek pendukung keberhasilan pengembangan pertanian adalah adanya unsur - unsur yang melibatkan berbagai pihak baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang semuanya memiliki fungsi yang berbeda - beda. Untuk itu diperlukan suatu penguatan kelembagaan dari beberapa aspek pendukung tersebut.

Kabupaten Bintan adalah salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan alokasi Dana Alokasi Khusus yang ditujukan untuk pembangunan irigasi air tanah, Pembangunan Gedung BPP serta Pemeliharaan Gedung UPT Puskesmas dan Rumah Potong Hewan guna peningkatan prasarana dan sarana pertanian. Untuk itu dana penunjang yang berfungsi untuk pendampingan dan pengawalan dalam penyediaan sarana prasarana merupakan salah satu hal sangat penting dilakukan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian berfungsi membantu mendampingi pengembangan dan pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan dan pengembangan di masa akan datang yang membutuhkan biaya yang cukup besar, maka diperlukan bantuan pembiayaan dari pemerintah yang bersumber dari APBD II dimana dana yang disediakan oleh pemerintah melalui dana APBN jumlahnya tidak mencukupi. Dilain pihak pelaksanaan pendampingan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari DAK akan melibatkan berbagai instansi terkait baik di pusat, wilayah maupun di

daerah, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi secara baik dengan instansi terkait tersebut

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 35.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 30.317.556,-** atau **86.62%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan dukungan pembiayaan yang sifatnya operasional untuk pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan irigasi air tanah, Pembangunan Gedung BPP serta Pemeliharaan Gedung UPT Puskesmas dan Rumah Potong Hewan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan irigasi air tanah, Pembangunan Gedung BPP serta Pemeliharaan Gedung UPT Puskesmas dan Rumah Potong Hewan.

c. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian mendukung Hortikultura sebanyak 8 Unit

d. Hasil

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Bintan sebanyak 8 unit.

a. Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Ruang lingkup pekerjaan dari Kegiatan Penunjang DAK terdiri ini adalah belanja barang dan jasa (5.2.2) yaitu

belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.

(2) Pelaksanaan belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan metode swakelola

b. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian sudah terlaksana dengan baik, namun demikian ada beberapa kekurangan diantaranya sebagai berikut :

- Alokasi kekurangan pendanaan untuk perjalanan dinas luar daerah yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan mengingat kegiatan yang bersumber dari dana DAK Dilaksanakan Oleh Beberapa Bidang.

(2) Solusi

- Mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk biaya perjalanan dinas luar daerah pada tahun 2020.

(5) Pembangunan Irigasi Air Tanah (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 196.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 49.876.000,-** atau **25,45%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di bidang pengairan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu) Kelompok tani di Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan

c. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya prasarana dan sarana pertanian irigasi tanah dangkal mendukung hortikultura sebanyak 1 unit

d. Hasil

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pengairan mendukung hortikultura

a. Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Kegiatan Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal terdiri dari beberapa uraian belanja yang masuk kedalam belanja langsung (5.2) yakni belanja barang dan jasa (5.2.2)
- (2) Ruang lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga (5.2.2.51) dan Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS (5.2.2.65)
- (3) Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode melalui penyedia (pihak ketiga).
- (4) Lokasi kegiatan yaitu di Kelompok Tani Unggul Jaya yang beralamat di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
- (5) Jenis barang yang diserahkan :
 1. Sumur gali sebanyak 1 paket
 2. Mesin pompa air dan perlengkapannya sebanyak 1 paket
 3. Jaringan irigasi air tanah sebanyak 1 paket

b. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

- Mekanisme Proses Pencairan Awal Yang Agak Terlambat Dan Memakan Waktu Yang Panjang.

(2) Solusi

- Persiapan Dokumen Asminitrasi Di Awal

(6) Pembangunan / Perbaikan Balai / Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak Pusat Kesehatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar DAK Pertanian **Rp. 44.171.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 44.171.000,-** atau **100%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk mendukung pencapaian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di di UPTD.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah UPTD RPS dan Puskesmas

c. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya prasarana dan sarana pada UPTD RPH dan Puskesmas.

d. Hasil

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pengairan mendukung hortikultura

a. Permasalahan Dan Solusi

(1) PERMASALAHAN

- Mekanisme proses Pencairan awal yang agak terlambat dan memakan waktu yang panjang.

(2) SOLUSI

- Persiapan dokumen asminitrasi di awal

8) Program Peningkatan Pemenuhan Keamanan Pangan Asal Ternak Dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 1.806.929.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.644.683.785 atau 91,02 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Outcome dari program ini adalah tersedianya produk pangan asal hewan yang ASUH (aman,sehat, utuh dan halal). Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengembangan Ternak Masyarakat

Pengembangan ternak masyarakat bertujuan untuk mengembangkan ternak yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 894.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 811.555.930,- atau 90,72 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan ternak sapi, kambing dan pakan dan ayam buras melalui kegiatan terlaksananya pengembangan ternak sapi (sapi Bali), kambing (rambon) dan pakan dan ayam buras dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Sapi sebanyak 27 ekor dikembangkan ;
 - Kelompok Bumo Jaya (Kelurahan Tanjung Uban Timur) sebanyak 5 ekor jantan
 - Kelompok Bintan Barokah sebanyak 5 ekor (3 jantan ; 2 betina)

- Kelompok Puji Mulya (Desa Toapaya Utara) sebanyak 17 ekor
- b. Kambing sebanyak 48 ekor dikembangkan;
 - Kelompok Maju Bersama (Kelurahan Kawal) sebanyak 28 ekor (6 jantan; 22 betina)
 - Kelompok Gin Besar (Desa Numbing) sebanyak 20 ekor (2 jantan; 18 betina)
- c. Ayam Buras sebanyak 2.100 ekor beserta pakan ternak sebanyak 4.200 kg dikembangkan ;
 - Kelompok Asri (Kel.Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg
 - Kelompok Karya Mandiri (Kel.Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg
 - Kelompok Jaya Bahagia (Kel.Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg
 - Kelompok Tunas Muda (Kel.Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg
 - Kelompok Jaya Bahagia II (Kel.Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg
 - Kelompok Berkah (Desa Toapaya Selatan) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg
 - Kelompok Hidayah (Desa Toapaya Selatan) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg
 - Kelompok Maju Jaya (Kel.Kawal) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg
 - Kelompok Bina Sejahtera (Kp.Galang Batang) sebanyak 220 ekor dan pakan 440 kg
 - Kelompok Rosela (Desa Teluk Bakau) sebanyak 280 ekor dan pakan 560 kg

(2) Pengembangan Budidaya Ternak Unggas

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 325.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 282.413.530,-

atau 86,9 % dengan realisasi fisik 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan budidaya ternak unggas. melalui kegiatan operasional pengembangan budidaya ternak ayam buras dengan rincian sebagai berikut

- Kelompok Makaryo (Ke.Toapaya Asri) sebanyak 1000 ekor dan pakan ternak 2000 kg
- Kelompok Tunas Muda Satu (Desa Toapaya) sebanyak 500 ekor dan pakan ternak 1000 kg
- Kelompok Mandiri II (Desa Teluk Bakau) sebanyak 300 ekor dan pakan ternak 600 kg
- Kelompok Makmur Jaya (Ke. Gunung Lengkuas) sebanyak 500 ekor dan pakan ternak 1000 kg.

(3) Pengembangan Hijauan Makanan Ternak

Pengembangan hijauan makanan ternak untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan makanan ternak yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan ternak, dapat menanggulangi kekurangan hijauan pakan ternak terutama di musim kemarau, serta meningkatkan nilai gizi pada hijauan pakan ternak untuk meningkatkan produktivitas ternak secara optimal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 97.041.250,- atau 97,04 % dengan realisasi fisik 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan hijauan makanan ternak berupa 18.000 tek rumput King Grass kepada Kelompok Puji Mulya Desa Toapaya Utara.

(4) Pengamanan Ternak Daerah dan Pengendalian Zoonosis

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 277.829.000,- dan terealisasi sebesar Rp 266.738.975,- atau 96,01 % dengan realisasi fisik 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan ternak daerah dan pengendalian zoonosis melalui kegiatan pengamanan ternak daerah dan pengendalian zoonosis berupa belanja

pengadaan neck tag sapi (penanda sapi telah dilakukan pemeriksaan / Sehat Layak untuk hewan kurban), honorarium petugas lapangan paramedis veteriner dan belanja obat – obatan hewan.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah menjaga kesehatan ternak secara umum (sapi, unggas, kambing dan babi) baik ternak pemerintah maupun yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara pelayanan aktif (active service) kesehatan hewan kepada masyarakat, pengendalian dan surveillance penyakit zoonosis dengan tujuan meningkatnya ketahanan tubuh hewan / ternak sehingga terciptanya kesehatan hewan yang berimplikasi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Bintan. Hingga Tahun 2019 Kabupaten Bintan masih dinyatakan sebagai daerah yang bebas dari beberapa penyakit zoonosis berbahaya seperti Rabies, Anthrak, Brucellosis dan penyakit hewan menular strategis (PHMS) lainnya seperti Jembrana dan Demam Babi (African swine fever). Khusus Untuk Penyakit Rabies Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat sertifikat Bebas Rabies dari Menteri Pertanian pada tahun 2015.

Dalam upaya melakukan pembebasan penyakit Avian influenza (AI/ flu burung) provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau serta Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi (BVet Bukittinggi) melakukan monitoring dan surveillans pada tahun 2019 sebanyak 2 kali. Berdasarkan hasil monitoring dan surveillans tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan pemeriksaan AI Real Time-PCR, dari 249 sampel seluruhnya

negatif Flu Burung, demikian juga dengan pemeriksaan AI Inokulasi TET/TAB terdapat 222 sampel negatif AI, tetapi sebanyak 27 sampel menunjukkan positif AI. Dari hasil 27 sampel yang positif ini, kondisi ayam tidak menunjukkan gejala sakit flu burung, sehingga secara umum, kasus klinis penyakit zoonosis Flu Burung di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2019 tidak ada laporan (nihil / *zero case*).

Pada tahun 2019, dunia kesehatan hewan secara umum dihadapkan juga pada permasalahan penyakit pada ternak Babi yakni *African Swine Fever* (ASF) yang secara cepat telah menular dari satu negara ke negara lain. Hal ini semakin diperjelas dengan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 820 tahun 2019 tentang pernyataan wabah penyakit demam babi afrika (*African swine fever*) pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, Indonesia pun menjadi salah satu negara tertular penyakit ASF ini. Oleh sebab itu, upaya pengawasan dan pengamanan ternak daerah terhadap babi yang dipelihara oleh peternak lokal Bintan menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan. Tercatat jumlah populasi ternak Babi yang telah dilakukan pembinaan kesehatan hewan sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 1.024 ekor yang tersebar di Kecamatan Teluk Sebong, Toapaya, Gunung Kijang dan Bintan Timur.

Disamping itu, Kegiatan pengamanan ternak daerah dan pengendalian Zoonosis pada tahun 2019 juga melaksanakan kegiatan pengawasan kesehatan hewan untuk hewan kurban 1440 H, dukungan kegiatan yang diberikan berupa pemberian tanda (neck tag) sapi Sehat dan Layak sebagai hewan kurban setelah hewan dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan atau petugas paramedis veteriner dibawah penyeliaan dokter hewan. Kegiatan ini dilaksanakan di 10

Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. yakni Kecamatan Toapaya, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Seri Kuala Lobam, Mantang, Bintan Utara, Gunung Kijang dan Tambelan. Namun demikian, mengingat daerah potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Bintan terfokus di Pulau Bintan saja, maka fokus pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan hewan kurban dominan di pulau Bintan. Pada tahun 2019, jumlah stok hewan kurban di kandang yang telah dilakukan pengawasan kesehatan hewan kurban sebanyak 875 ekor, dengan rincian 447 ekor ternak sapi dan 428 ekor ternak kambing. Stok hewan kurban ini sebagian besar di potong di wilayah Kabupaten Bintan dan beberapa yang di potong di wilayah Kota Tanjungpinang.

(5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) merupakan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.500.000, terealisasi 85,68% yaitu Rp 85.391.600 dan realisasi fisik sebesar 100%

Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner seperti :

- dilaksanakannya pelatihan juru sembelih halal sebanyak 40 peserta melibatkan LPPOM MUI dan MUI Kabupaten Bintan
- sertifikasi tempat pemotongan ayam sebanyak 10 unit (sertifikat halal LPPOM MUI)
- sertifikasi juru sembelih halal oleh LPPOM MUI Propinsi Kepulauan Riau

- pengawasan dan pembinaan tempat pemotongan ayam dan RPH Unggas di Kabupaten Bintan
- pemeriksaan/uji laboratorium terhadap produk hewan yaitu ayam potong dan bakso sebanyak 30 sampel
- pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap hewan kurban di mesjid dan tempat pemotongan
- melakukan sidak, pemantauan dan pengambilan produk hewan bersama instansi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Propinsi Kepulauan Riau dan Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang.

(6) Kegiatan Penyusunan DED Rumah Potong Hewan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.000.000, terealisasi 92,31 % yaitu Rp 101.542.500 dan realisasi fisik 100%. Output kegiatan DED ini adalah tersedianya sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU). Kegiatan DED Rumah Potong Hewan Unggas ini dilaksanakan mengingat Kabupaten Bintan baru memiliki 1 (satu) RPH Unggas di Kecamatan Bintan Utara. Adanya RPH Unggas yang sekarang belum maksimal penggunaannya. Kegiatan DED Rumah Potong Hewan Unggas menghasilkan 3 (tiga) dokumen DED di Kecamatan Bintan Timur, Toapaya dan Bintan Timur. Kegiatan DED ini dimaksudkan agar di Kecamatan Bintan Timur, Toapaya dan Bintan Utara dapat memiliki RPH Unggas yang layak dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

b. Permasalahan Dan Solusi

(1) Permasalahan

- Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam menjalankan usaha ternaknya

- b) Kurangnya pelatihan terkait peningkatan SDM Terampil Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c) Kurang maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dan bantuan ternak yang telah diberikan
- d) Potensi Ancaman Penularan penyakit yang berasal dari Produk Pangan Asal Hewan (PAH) kepada masyarakat
- e) Rentannya hewan dan ternak tertular penyakit hewan menular dan penyakit hewan menular strategis
- f) Potensi ancaman Penularan penyakit yang berasal dari hewan ke manusia (zoonosis) khususnya Penyakit Emerging yang dapat menyebabkan wabah
- g) Harga Produksi peternakan (Harga pakan, bibit dan sapronak) yang tidak stabil

(2) Solusi

- a) Memaksimalkan peran Penyuluh Pertanian yang Polivalen dan optimalisasi pembinaan peternakan oleh petugas lapangan paramedis veteriner
- b) Melakukan upaya permohonan usulan mengikuti pelatihan atau melakukan kerjasama dengan Balai Pelatihan Peternakan (BBPKH Cinagara, BPTU HPT Padang Mangatas dan BBPP Batu)
- c) Memaksimalkan upaya reward dan punishment
- d) meningkatkan upaya pengawasan dengan cara pengambilan sampel produk pangan asal hewan
- e) Melakukan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif kesehatan hewan kepada hewan terdampak dan masyarakat
- f) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral melalui optimalisasi TGC (Tim Gerak Cepat) Pengendalian dan penanggulangan penyakit emerging dan zoonosis

- g) meningkatkan penggunaan pakan, bibit dan sapronak lokal yang berasal dari dalam wilayah Bintan

3.1.2.4 Urusan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan urusan wajib tersebut dibagi atas program – program sebagai berikut :

A.1. Program dan Kegiatan

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan bahan logistik kantor
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporann kegiatan

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a. Peningkatan sarana dan Prasaran Pengelolaan Persampahan
- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
- c. Pengelola TPA Sei Enam
- d. Pengelolaan Sampah Tanjung Uban
- e. Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup
- f. Pengolahan Sampah Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK PENUGASAN)

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

- a. Pemantauan kualitas lingkungan
- b. Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- c. Penaatan hukum lingkungan
- d. Pengaduan lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
- f. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- g. Koordinasi penilaian kota adipura
- h. Instrumen pengendalian lingkungan hidup
- j. Penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Bintan

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- a. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Adiwiyata

8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- a. Gerakan sadar lingkungan
- b. Penyusunan profil keanekaragaman hayati
- c. Informasi bidang lingkungan

A.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.30 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.650.000	3.000.000	82.19
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik	113.500.000	89.871.630	79.18
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.120.000	105.984.000	98.94
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.000.000	8.961.975	99.58
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.987.650	60.856.950	99.79
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.450.000	47.963.300	99.00
7.	Penyediaan komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.972.050	99.72
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.640.000	78.611.500	98.71
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	73.047.995	85.94
9.	Pengadaan Makanan Dan Minuman	56.7800.000	48.495.000	85.41
10.	Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke luar Daerah	230.100.000	228.379.489	99.25
11.	Rapat – Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi dalam Daerah	80.960.000	78.950.000	97.52
	Jumlah	885.187.650	755.482.389	94.23

Tabel 3.31 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	48.450.000	48.219.160	99.52
2.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	42.000.000	38.907.500	92.64
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	39.000.000	35.003.000	89.75
	Jumlah	129.450.000	122.129.660	94.35

Tabel 3.32 Program Peningkatan Kapasitas Disiplin aparat

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	26.100.000	26.136.000	99.91
2.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	11.600.000	11.572.000	99.76
	Jumlah	37.760.000	37.708.000	99.86

Tabel 3.33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	46.800.000	40.622.866	86.80.
	Jumlah	46.800.000	40.622.866	86.80

Tabel 3.34 Program Peningkatan Sistim Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Penyusunan Rencana Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	44.809.000	42.873.716	95.68
	Jumlah	44.809.000	42.873.716	95.68

Tabel 3.35 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	44.020.000	44.009.100	99.98
2.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampah	188.904.250	182.011.500	96.35
3.	Pengelola TPA Sei Enam	635.862.000	633.344.919	99.60
4.	Pengelolaan sampah Tanjung Uban	15.156.000	14.950.000	98.64
5.	Penunjang DAK Bidang Lingkungan	58.212.600	54.094.240	92.93
6.	Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukungnya (DAK PENUKASAN)	636.035.000	629.106.480	98.91
	Jumlah	1.578.189.850	1.557.516.239	98.69

Tabel. 3.36 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pemantauan Kualitas Lingkungan	80.143.680	79.096.320	98.69
2.	Pengawasan Pengelola B3 dan Limbah B3	35.076.000	32.031.500	91.32
3.	Penaatan Hukum Lingkungan	30.795.000	30.445.875	98.87
4.	Pengaduan Lingkungan Hidup	36.390.000	35.468.547	97.47
5.	Pelaksanaan Pemantauan dan penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup	31.810.000	30.852.963	96.99
6.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	33.463.660	33.462.157	100
7.	Koordinasi Penilaian Kota Adipura	79.560.000	79.284.500	99.65

8.	Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup	38.526.000	35.259.880	91.52
9.	Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan	150.000.000	148.860.900	99.24
	Jumlah	515.764.340	504.762.642	97.87

Tabel 3.37 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Adiwiyata	53.046.000	52.126.385	98.27
	Jumlah	53.046.000	52.126.385	98.27

Tabel 3.38 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Gerakan Sadar Lingkungan	35.241.600	29.077.700	82.51
2.	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	30.460.000	27.191.680	89.27
3.	Informasi bidang Lingkungan	35.696.000	34.003.360	95.26
	Jumlah	101.397.600	90.272.740	89.03

Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Kedelapan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten Bintan untuk urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1.) Jumlah kelompok masyarakat bersama PEMDA yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan 3 R (reduce, reuse, recycle)

Dari 14 target sudah terrealisasi 36 kelompok 257% yaitu dengan terbentuknya kelompok masyarakat bersama PEMDA yang terlibat dalam melaksanakan 3 R(reduce, reuse, recycle) dicapai melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

2.) Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R dan Bank Sampah.

Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R dan Bank Sampah capaiannya 18% dari 18% yang ditargetkan yaitu 100 % (amat baik) yaitu sebanyak 3.457 ton sampah yang berkurang melalui 3 R dari 19.207 ton total sampah keseluruhan.

3.) Nilai TPA terkelola dengan baik di kabupaten Bintan

Nilai TPA terkelola dengan baik di Kabupaten Bintan yang ditargetkan 76,5 capaiannya 100 %.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan oleh Dibnas Lingkungan hidup kabupaten Bintan melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.578.189.850,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.557.516.239,- atau 98.69 % Outcome dari program ini adalah meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.

Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan Alokasi Anggaran Rp. 44.020.00,- dan realisasi Rp. 44.009.100,- atau 99,98%. Hasil Kegiatan Ini adalah terlaksananya penyediaan 7 unit sarana dan prasarana persampahan (Tempat sampah terpilah 5) 5 Unit di Kecamatan Bintan Timur dan 2 Unit di Kecamatan Bintan Utara

(2) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bintan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp.

188.904.250,- dan realisasi anggaran Rp. 182.011.500,- atau 96,35%. Hasil kegiatan ini adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di 3 lokasi yaitu di Kecamatan Bintan Timur , Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara bertujuan untuk pembinaan masyarakat dalam mengelola sampah dapat ditingkatkan, melalui pemilahan, daur ulang dan pakai ulang 3 R, sehingga volume sampah residu dapat berkurang, masyarakat dapat menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian lingkungan terhadap kebersihan, pengetahuan masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah organik dan sampah an organik semakin bertambah, masyarakat dapat mengetahui cara tata cara membuat kompos yang baik dan daur ulang sdampah, masyarakat dapat mengetahui system kerja bank sampah dan dapat membentuk kelompok masyarkat yang peduli lingkungan . Kegiatan ini sejak tahun 2016 dan sampai tahun 2019 jumlah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan telah mencapai 36 kelompok . Untuk target capaian sasaran didalam RPJMD Pembentukan Kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3 R pada tahun 2019 ditargetkan 14 Kelompok telah terpenuhi,

(3) Kegiatan Pengelolaan TPA Sei Enam

Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 635.862.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 633.344.919,- atau 99.60% (amat baik). Hasil kegiatan ini terlaksananya operasional TPA di Kecamatan Bintan Timur. Untuk target capaian sasaran didalam RPJMD nilai TPA

terkelola dengan baik di kabupaten Bintan pada tahun 2019 ditargetkan 76.5 telah terpenuhi (100%).

(4) Kegiatan Pengelolaan Sampah Tanjung Uban

Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bintan dengan Alokasi Anggaran Rp. 15.156.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 14.950.000,- atau 98.64% (amat baik). Hasil kegiatan ini tersedianya operasional UPTD Pengelolaan Sampah Tanjung Uban.

(5) Kegiatan Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup

Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan Alokasi Anggaran Rp. 58.212.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 54.094.240,- atau 92.93 % (amat baik). Hasil kegiatan ini terlaksananya kegiatan Operasional DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(6) Kegiatan Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukungnya (DAK Penugasan)

Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dengan Alokasi anggaran Rp. 636.035.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 629.106.480,- Atau 98.91% hasil kegiatan ini terlaksananya pengadaan Bangunan Bank Sampah, mesin pencacah sampah, mesin pencacah plastic, timbangan digital serta kendaraan pengangkut sampah roda tiga di TPA dan Sekolah SMPN 1 Bintan Timur.

b. Permasalahan dan Solusi

Secara umum Pelaksanaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan tidak terdapat permasalahan, maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan melalui 9 (Sembilan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 515.764.340,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 504.762.642,- Atau 97.87%. Outcome dari program ini adalah Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 80.143.680,- realisasi anggaran sebesar Rp. 79.096.320,- atau 98.69% . Pemantauan Kualitas Air dilaksanakan pada Sei Gesek, Kolong Sei Enam, Sei Jago, dan TPA Sei Enam, untuk pemantauan kualitas udara dilaksanakan pada Kantor Lurah Kijang(mewakili wilayah perumahan) Pos Polisi Batu 16 (mewakili transportasi), Gerbang masuk Kantor Bupati (mewakili perkantoran) dan Kawasan Industri Lobam/PT. Sanden (mewakili Industri)

(2) Kegiatan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 35.076.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 32.031.500,- atau 91.32% hasil kegiatan ini Terlaksananya pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3 pada 4 Kecamatan yaitu kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Sebong 21 perusahaan (PT. Meitech Eka Bintan, PT. Pertamina TBBM Kijang, RSUD Kabupaten Bintan, CV. Kencana Prima Recycling Industri, PT. Pertamina Depot LPG Tanjung Uban, PT. Pertamina TBBM Tanjung Uban, PT. A And One Precision, PT, Bintan Inti Industrial Resort, PT.

CCI Bintan, PT. Cedar Accesories, PT. Esco Bintan Indonesia, PT. Pepperl And Fuchs, PT. Pertama Pertama Precision Bintan, PT. Sanden Elektronik Indonesia, PT, Singatac Bintan, PT, Yoshikawa Elektronik Bintan, PT. Bintan Offshore Marine Centre, PT. Alam Indah Bintan, PT. Bintan Resort Cakrawala, PT. Pelangi Bintan Indah, PT. Ria Bintan).

(3) Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan Hidup

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 30.795.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.30.445.875,- atau 98.87% hasil kegiatan ini terlaksananya penataan hukum lingkungan kepada usaha/kegiatan pada 14 usaha/kegiatan (1. PT. Pulau Nikoi, 2. PT. Bintan Kharisma Pratama, 3. PT. Bintan Industrial Estate, 4. PT. Meitech Eka Bintan, 5. PT. Sumber Izumi Mas, 6. PT. Pertamina TBB Uban, 7. PT. Bintan Resort Cakrawala, 8. PT. Pulau Bintan Dyaja, 9. PT. Tirta Madu, 10. PT. Singatac, 11. PT. Indo Jaya Agrinusa, 12. PT. Bintan Nusamulti, 13. PT. Bintang Mahkota Sukses, 14. PT. Magrove Industrial Park)

(4) Kegiatan Pengaduan Lingkungan Hidup

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 36.390.000,- realisasi anggaran Rp. 35.468.547,- atau 97.47% hasil kegiatan ini terakomodir dan tertindak lanjuti pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan sebanyak 6 pengaduan masyarakat.

(5) Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 31.810.000,- realisasi anggaran 30.852.963,- atau 96.99%. Hasil kegiatan ini Tersedianya data kerusakan lingkungan hidup pada 9 kecamatan di Kabupaten Bintan terekait

kegiatan yang terindikasi maupun yang terjadi kerusakan lingkungan hidup

(6) Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 33.463.660,- realisasi anggaran Rp. 33.462.157,- Atau 100%. Hasil kegiatan ini pengendalian pencemaran dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan pada 14 usaha/kegiatan yaitu :

1. AMP Simpang Korindo,
2. AMP PT. Mitra Bersama Sukses Gemilang,
3. Pabrik Es Chellya,
4. Marjolie Beach & Resort,
5. Madu Tiga,
6. PT. Indo Bintang Trijaya (White Sands Island),
7. AMP PT. Nugroho Lestari,
8. Kunang-kunang,
9. De Bintang Villa,
10. Poyo Tomo,
11. Desa Wisata Ekan,
12. RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau,
13. PT CCI Bintang,
14. PT. Pepperl And Fuchs Bintang

(7) Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Adipura

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 79.560.000,- realisasi Anggaran RP. 79.284.500,- Atau 79.284.500 Atau 99.65%. hasil Kegiatan ini adalah terwujudnya Gerakan Bintang Bersih di kabupaten Bintang dan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bintang melalui Kecamatan Bintang Timur dalam Program Adipura Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Untuk program Adipura dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan sosialisasi tentang kebersihan dan pengelolaan sampah di tingkat RT/RW, Dasa Wisma, PKK, pertokoan, Perkantoran, Sekolah.

(8) Kegiatan Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup

Dilaksanakan dengan Alokasi anggaran Rp. 38.526.000,- realisasi anggaran Rp. 35.259.880,- atau 91.52%. Hasil Kegiatan ini terkendalinya dan terlaksananya

rekomendasi dokumen lingkungan sebanyak UKL-UPL 18 kegiatan dan DPLH sebanyak 8 Kegiatan

(9) Kegiatan Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 150.000.000,- realisasi anggar Rp. 148.860,900,- Atau 99.24%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya dokumen kriteria baku kerusakan lingkungan hidup kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

1) Persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan dan izin PPLH

Realisasi 152% dari target yang telah ditetapkan 46% usaha yang mendapat pengawasan, pembinaan terkait izin lingkungan dan izin PPLH meliputi usaha yang bergerak dibidang pariwisata, kesehatan, industry, agro industry dan perkebunan.

2) Indek Kualitas Air

Realisasi 63.85 indek atau 91.21% dari 70 indek kualitas air yang ditargetkan tahun 2019

3) Indek Kualitas Udara

Realisasi 100% dari 1 indek kualitas udara yang ditergetkan

4) Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

Realisasi 111% dicapai melalui kegiatan pengaduan lingkungan hidup sebanyak 90% target pengaduan yang ditindak lanjuti sebanyak 100% dari 6 pengaduan yang masuk.

b. Permasalahan dan Solusi

(1). Permasalahan.

Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup tidak terdapat masalah, maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bintan melalui 1(satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran Rp. 53.046.000,- realisasi anggaran Rp. 52.126.385,- Atau 98.27%. Hasil kegiatan ini terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dengan terpilihnya 1 sekolah Adiwiyata tingkat Mandiri (SMAN 1 Toapaya) 4 sekolah tingkat Provinsi (SDN 001 Toapaya, SDN 003 Toapaya, SDN 004 Toapaya, dan SMPN 20 Pulau Pucung) dan 4 sekolah tingkat Kabupaten (SDN 007 Seri Kaula Lobam, SMPN 15 Bintan, SMAS Tunas Bangsa dan SMKN 1 Bintan Timur). Dicapai melalui program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adiwiyata.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

1) Persentase sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata (sekolah peduli dan berbudaya Lingkungan)

Adapun capaiannya adalah dari target 53.23% realisasi 64.51%

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total Alokasi Anggaran sebesar Rp. 101.397.600,- realisasi anggaran Rp. 90.272.740,- atau 89.03 %, Outcome program ini adalah meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Gerakan Sadar Lingkungan

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 35.241.600,- realisasi anggaran Rp. 29.077.700,- atau 82.51%. Hasil kegiatan ini terciptanya Gerakan Sadar Lingkungan melalui Kampung Iklim di Kecamatan Bintan Timur

(2) Kegiatan Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 30.460.000,- realisasi anggaran Rp. 27.191.680,- Atau 89.27% Hasil kegiatan ini tersedianya data informasi keanekaragaman hayati.

(3) Kegiatan Informasi Bidang Lingkungan Hidup

Dilaksanakan dengan Alokasi Anggaran Rp. 35.696.000,- realisasi anggaran Rp. 34.003.360,- Atau 95.26%. Hasil Kegiatan ini tersusunya 7 status yang dimaksud ialah data 1. Sumber Daya Alam, 2. Bencana Alam, 3. Demografi, 4. Demografi Sosial, 5. Sosial Ekonomi, 6. Sumber Pencemaran, 7. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

1) Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Status lingkungan hidup yang disusun dari target yang telah ditetapkan 7 status capaiannya 7 status 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

(1) Permasalahan

- a) Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang sesuai dengan SOP yang berlaku;
- b) Minimnya SDM untuk pengujian / analisis (air limbah, air sungai, laut dan udara) maupun peralatan untuk pengujian pencemaran udara dan kebisingan sehingga hasil sampel yang diambil masih diujikan pada pihak ketiga dan memerlukan waktu yang relatif cukup lama
- c) Implelementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan / badan usaha;
- d) Minimnya inventarisasi sumber-sumber pencemaran;
- e) Kurangnya pemahaman tentang Pengharagaan Nasional Lingkungan Hidup seperti Kalpataru, Adiwiyata, Adipura dan Status Lingkungan Hidup Daerah

(2) Solusi

- a) Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan dengan melibatkan aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan pelaksanaan dan pengawasan.

- b) Untuk memperlancar dan mempercepat hasil analisa pantauan dilapangan (air, udara dll), maupun untuk penguji pencemaran udara dan kebisingan perlu didukung laboratorium yang memadai dan SDM yang handal.
- c) Terus dilakukan pengawasan yang intensif khususnya bagi pengusaha-pengusaha yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan dan pelaporan.
- d) Melakukan penegakan hukum lebih intensif.
- e) Melakukan Inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran.

3.1.2.5 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** adalah sebagai berikut:

1) Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan berkenaan dengan perbandingan antara jumlah ber-KTP el dan jumlah wajib KTP-el (108.107 : 109.288 orang) dari target (98.935 : 109.199 orang). **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan** akan terus mengambil langkah – langkah pro aktif agar seluruh penduduk segera melakukan perekaman KTP-el, khususnya menjelang menghadapi Pemilukada Serentak di Tahun 2020.

2) Rasio bayi berakte kelahiran Usia 0 -18 Tahun

Pada tahun 2019 Rasio bayi berakte kelahiran Usia 0 -18 Tahun, yaitu perbandingan antara jumlah bayi berakte kelahiran dan jumlah bayi (44.091 : 49.722 orang) dari target (43.092 : 58.136 orang),

3) Jumlah Berakte Kematian yang Meninggal

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan berkenaan dengan indikator Jumlah Berakte Kematian yang Meninggal, yaitu jumlah warga meninggal tahun 2019 yang berakte kematian dan jumlah warga yang meninggal (871 : 928 orang) dari target (1.049 : 1.703 orang),

4) Ratio pasangan berakte nikah

Ratio pasangan berakte nikah, yaitu perbandingan antara jumlah berakte Nikah dan jumlah Nikah (62.793 : 72.995 orang) dari target (60.816 : 68.961 orang)

5) Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan 77% dari target 60%, berdasarkan dari Data Bersih Integrasi Nasional (Dirjen Dukcapil) Semester II Tahun 2019.

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Program penataan administrasi kependudukan adalah rangkaian dalam penertiban, penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipi, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Untuk penyelenggaraan program penataan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan - kegiatan Pada Program Penataan Administrasi Kependudukan sebagaimana berikut :

- a. Implementasi sistem administrasi kependudukan (pembangunan, up-dating dan pemeliharaan);
- b. Koordinasi Kerjasama Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan;

- d. Peningkatan pelayanan public dalam bidang Pencatatan Sipil;
- e. Update Data Kependudukan;
- f. Update Data Pencatatan Sipil;
- g. Peningkatan kapasitas aparatur Pelayanan Administrasi Informasi kependudukan dan catatan sipil;
- h. Penerapan KTP el (elektronik);
- i. Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan
- j. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

A. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel.3.39 Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

REALISASI ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2019

No	Uraian	ANGGARAN APBD	Realisasi (Rp)	SISA ANGGARAN
I	BELANJA	10,855,656,950	10,092,495,596	763,161,354
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,559,664,410	5,082,801,500	476,862,910
1.	Gaji dan Tunjangan	2,362,729,410	2,211,652,474	151,076,936
2.	Tambahan Penghasilan PNS	3,196,935,000	2,871,149,026	325,785,974
B.	BELANJA LANGSUNG	5,295,992,540	5,009,694,096	286,298,444
1.	Belanja Pegawai	455,668,000	417,223,000	38,445,000
2.	Belanja Barang dan Jasa	3,322,632,420	3,083,205,374	239,427,046
3.	Belanja Modal	1,517,692,120	1,509,265,722	8,426,398

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	ANGGARAN APBD 2019		JUMLAH	%
		PAGU	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 5,295,992,540	Rp 5,009,064,096	Rp 286,928,444	94.6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 929,796,750	Rp 804,837,735	Rp 124,959,015	86.6
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3,200,000	Rp 2,202,000	Rp 998,000	68.8
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Rp 141,200,000	Rp 98,494,281	Rp 42,705,719	69.8
3	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Rp 175,100,000	Rp 161,100,000	Rp 14,000,000	92.0
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 4,000,000	Rp 3,999,895	Rp 105	100.0
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 229,717,370	Rp 185,288,800	Rp 44,428,570	80.7
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 10,000,000	Rp 9,986,000	Rp 14,000	99.9
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp 11,531,500	Rp 11,516,960	Rp 14,540	99.9
8	Penyediaan Bahan Logistik	Rp 100,000,000	Rp 99,939,388	Rp 60,612	99.9
9	Penyediaan Makan dan Minum	Rp 56,500,000	Rp 47,077,250	Rp 9,422,750	83.3
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 97,150,000	Rp 83,840,161	Rp 13,309,839	86.3
11	Rapat-rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Rp 101,397,880	Rp 101,393,000	Rp 4,880	100.0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 602,818,370	Rp 596,582,322	Rp 6,236,048	99.0
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 100,000,000	Rp 99,999,917	Rp 83	100.0
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 408,818,370	Rp 403,904,305	Rp 4,914,065	98.8
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 20,000,000	Rp 19,824,000	Rp 176,000	99.1
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 54,000,000	Rp 53,846,100	Rp 153,900	99.7
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 20,000,000	Rp 19,008,000	Rp 992,000	95.0
	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 27,130,000	Rp 25,706,060	Rp 1,423,940	94.8
17	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Rp 27,130,000	Rp 25,706,060	Rp 1,423,940	94.8
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 30,000,000	Rp 28,495,291	Rp 1,504,709	95.0
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 30,000,000	Rp 28,495,291	Rp 1,504,709	95.0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 98,091,500	Rp 97,986,282	Rp 105,218	99.9
19	Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	Rp 98,091,500	Rp 97,986,282	Rp 105,218	99.9
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 3,608,155,920	Rp 3,455,456,406	Rp 152,699,514	95.8
20	Impelementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Pembangunan, Updating dan Pemeliharaan)	Rp 1,615,833,870	Rp 1,538,316,300	Rp 77,517,570	95.2
21	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil	Rp 368,899,250	Rp 358,988,550	Rp 9,910,700	97.3
22	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Rp 982,338,000	Rp 980,851,744	Rp 1,486,256	99.8
23	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Rp 128,836,300	Rp 116,244,250	Rp 12,592,050	90.2
24	Koordinasi Kerjasama Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Rp 87,692,500	Rp 80,294,622	Rp 7,397,878	91.6
25	Update Data Pencatatan Sipil	Rp 80,213,280	Rp 76,794,600	Rp 3,418,680	95.7
26	Penerapan KTP el	Rp 65,952,840	Rp 62,072,392	Rp 3,880,448	94.1
27	Update Data Base Kependudukan (Pemutakhiran Data Kependudukan)	Rp 74,262,880	Rp 67,317,798	Rp 6,945,082	90.6
28	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan	Rp 65,350,000	Rp 55,057,250	Rp 10,292,750	84.2
29	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 138,777,000	Rp 119,518,900	Rp 19,258,100	86.1

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran APBD 2019 sebesar Rp. 1.615.833.870,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.538.316.300,- atau (95%). Hasil dari kegiatan adalah terlaksananya jaringan data, maintenance, perawatan dan pemeliharaan di setiap titik jarkomdat (jaringan komunikasi data) pada sarana yang dibangun di 10 (sepuluh) Kecamatan, 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Bintan Timur dan 1 (satu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan. Dari hasil sasaran tersebut juga tersedianya alat perekaman yang akan difungsikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlokasi di Bintan Buyu sehingga dapat membantu akses pelayanan masyarakat dalam melakukan pencatatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta tersedianya sarana pendukung yang dapat memonitoring waktu pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat Bintan dan terupdatenya data kependudukan yang akurat dan valid selama 1 tahun, yang mana kegiatan ini menjaga keamanan data, jaringan yang terkoneksi antar pusat ke Kabupaten dan kecamatan.

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan alokasi anggaran APBD 2019 sebesar Rp. 368.899.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 358.899.550,- atau (97%). Hasil dari kegiatan ini adalah, peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yaitu akta kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan. Capaian pelaksanaannya yang mana penerbitan akta kelahiran 0 – 18

Tahun pada tahun 2019 tercatat sebanyak 44.091 jiwa, berbanding dari wajib kepemilikan akta kelahiran sebesar 49.722 jiwa (89 %), dari target rasio kepemilikan Akta Lahir 0-18 Tahun sebanyak 43.092 jiwa dari wajib kepemilikan akta kelahiran sebesar 58.136 jiwa, capain ini telah melebihi dari target nasional yaitu 85%, , untuk jumlah penerbitan berakta kematian umum di tahun 2019 sebanyak 871 jiwa berbanding dari jumlah penduduk yang meninggal pada tahun 2019 sebanyak 928 jiwa (94%) dari target (1.049 : 1.703 orang) hal ini Pemerintah Bintan berhasil dalam penekanan Angka Kematian bagi penduduk Bintan, dan untuk ratio pasangan berakte nikah sebanyak 62.793 jiwa pasangan yang berstatus kawin, dari pasangan yang berstatus kawin dan teradministrasi sebanyak 72.995. Sebagaimana tersebut diatas pelayanan kepemilikan akta dokumen pencatatan sipil pada tahun 2019 dari data bersih semester II yang dikeluarkan oleh Pusat (Dirjen Dukcapil) adanya peningkatan yang baik dalam capaian pengurusan dokumen akta yang belum terealisasi di tahun 2018, dengan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan Inovasi yang berkelanjutan dalam pelayanan administrasi dokumen pencatatan sipil pada masyarakat sehingga capaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan perubahan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.836.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 116.244.250,- atau (90%). Hasil dari

kegiatan ini adalah terlaksananya Pelayanan Publik Dalam kepemilikan dokumen kependudukan baik kepemilikan KTP-El, Kartu Keluarga (KK) Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Pindah/Datang maupun dokumen kependudukan lainnya yang tercatat secara valid dan akurat. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan Inovasi yang berkelanjutan dalam pelayanan administrasi dokumen kependudukan pada masyarakat sehingga capaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan perubahan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

4. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.692.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.340.622,- atau (90%). Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan data kependudukan yang valid dan akurat bagi masing-masing OPD terkait dan organisasi lainnya, sehingga tidak adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan data kependudukan.

5. Kegiatan Update Data Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.213.280,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.794.600,- atau (96%). Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Sistem dan pengelolaan informasi

yang berkelanjutan dalam pembaharuan data-data pencatatan sipil, baik secara online maupun melalui program kunjungan langsung ke desa/kelurahan sehingga tingkat kepemilikan dokumen pencatatan sipil pada masyarakat yang belum terealisasi dapat tercapai dan terpenuhi.

6. Kegiatan Penerapan KTP-El dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.952.840,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.072.392,- atau (94%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penerapan KTP-El, yang mana Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, yaitu perbandingan antara jumlah ber-KTP el dan jumlah wajib KTP-el (108.107 : 109.288 orang) dari target (98.935 : 109.199 orang) (100%) Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan KTP-el. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan terus menerus melakukan peningkatan informasi dan komunikasi kepada masyarakat Bintan yang belum melakukan perekaman baik untuk Wajib KTP el Pemula maupun yang sudah memasuki usia wajib KTP el.

7. Kegiatan Update Data Base Kependudukan (Pemutakhiran Data Kependudukan) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.262.880,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.942.798,- atau (82%). Hasil dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan pembaharuan dalam pemutakhiran data

kependudukan ini difokuskan pada pemetaan KK dimana KK merupakan identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga, didalam KK terdapat beberapa anggota keluarga, masih ada data Penduduk ganda dan penduduk yang sudah pindah dan meninggal dunia, sebagaimana tujuan pembaharuan dalam pemutakhiran data kependuduk ini dilakukan supaya terciptanya keakuratan data penduduk, mengantisipasi penduduk yang tidak terdata, terhapusnya data penduduk ganda dan tercapainya tertib administrasi kependudukan yaitu tertib database kependudukan, tertib menertibkan NIK dan tertib dokumentasi kependudukan.

8. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.057.250,- atau (84%). Hasil dari kegiatan ini adalah Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 77% dengan katagori BAIK dari target 60%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan terus berbenah dan melakukan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan berbasis online guna meningkatkan pelayanan lebih baik lagi yang diharapkan bagi masyarakat.

9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.777.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.518.900,- atau (86%). Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Orang operator di OPD Kecamatan, hal ini terciptanya kerja sama seluruh operator dalam pelayanan updating data dan kendala permasalahan di lapangan dapat ditindak lanjuti dengan cepat dalam pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

10. Tugas Pembantuan Anggaran Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terfasilitasinya pada Dana ALokasi Khusus (DAK) Non Fisik,

Program/kegiatan ini **sebagai dana pendukung pelaksanaan** pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 982.338.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 980.851.744,- atau (99%). Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, yang mana dilaksanakan diantaranya :

- a. Penyusunan laporan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan adminduk Kab/Kota.
- b. Koordinasi dan konsultasi Administrasi Kependudukan.
- c. Monitoring dan evaluasi ke Kecamatan.
- d. Pengelolaan akutansi administrasi kependudukan.
- e. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil.

- f. Pelayanan dokumen kependudukan.
- g. Penerbitan dokumen kependudukan.
- h. Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Belum maksimalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Seperti proses pelayanan berbasis teknologi elektronik kependudukan dan pencatatan sipil belum sepenuhnya menggunakan program tersebut.
- b) Faktor masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan.
- c) Masih kurang sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan aparatur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d) Penduduk pendatang dari luar Kabupaten/Kota masih tidak memiliki dokumen kependudukan.

(2) Solusi

- a) Mengingat pentingnya dokumen kependudukan bagi Masyarakat dalam pengurusan administrasi maka perlu dilakukan himbauan secara terkoordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Instansi terkait melalui informasi elektronik dan sosialisasi yang menekankan pentingnya memiliki dokumen kependudukan bagi Masyarakat Kabupaten Bintan.
- b) Tersedianya aparatur SDM pemerintah yang mempunyai kualitas dan inovatif dalam perencanaan pembangunan

di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

- c) Perlu upaya meningkatkan kerjasama dalam koordinasi dan persepsi terhadap penanganan kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur pemerintah baik pusat, propinsi kabupaten/kota lainnya, masyarakat, tokoh dan ormas kepemudaan.
- d) Mengingat pentingnya dokumen kependudukan, perlu adanya Informasi berbasis teknologi maupun media public, himbauan, sosialisasi dan koordinasi melalui instansi pemerintah yang terkait di Kabupaten Bintan.
- e) Peningkatan anggaran program kegiatan, baik itu sarana dan prasarana pendukung dalam penertiban Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi sesuai dengan persaingan global yang berkembang.
- f) Pentingnya pengawasan melalui kegiatan yustisi yang mampu dalam memotivasi mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga Masyarakat Kabupaten Bintan benar-benar sadar akan arti pentingnya dokumen kependudukan dalam hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

3.1.2.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Keenam** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa** adalah sebagai berikut :

1) *Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan*

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan pada tahun 2019 mencapai 89,4% dari target 70%. Pencapaian angka ini lebih baik dari target dan dibanding tahun sebelumnya. Ada berapa indikator yang menentukan terjadi kenaikan tingkat partisipasi masyarakat desa diantaranya:

- a) Jumlah kehadiran masyarakat desa dalam setiap musyawarah desa dari undangan yang disebar ke hadirannya di atas 89,4%.
- b) Jumlah inisiatif penyampaian usulan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat cukup banyak dan variatif (tidak terfokus pada pembangunan fisik saja) .
- c) Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan secara swakelola cukup banyak, bahkan ada swadaya masyarakat/ gotong royong dalam bentuk tenaga, material bahan untuk mendukung kegiatan tersebut di beberapa desa.
- d) Partisipasi masyarakat terhadap Tentara Manunggal Masuk Desa juga tinggi.
- e) Partisipasi dalam teknologi tepat guna setiap tahun ada dari sekolah sekolah.
- f) Dan partisipasi dalam kegiatan lomba desa

2) Persentase Pendapatan Asli Desa

Persentase Pendapatan Asli Desa pada tahun 2019 adalah mencapai 50% dari target 40% yang ditargetkan atau meningkat sebesar 10% dari target tahun 2019

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.573.413.512,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.482.046.066 ,- atau 94,19%. *Outcome* Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sebesar 80%

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.359.640.000,- dan realisasi sebesar Rp.347.152.900,- atau 96,53%. *Output* dari kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Bintan
- Juara 2 (dua) lomba teknologi tepat guna tingkat propinsi dengan inovasi Metode daur ulang sampah organik dengan pembudidayaan black soldier fly
- Terbentuknya tiga posyantekdes untuk dipersiapkan ke tingkat nasional perwakilan Bintan
- Terjalinnya kerjasama antara Posyantekdes Teluk Bakau dan Balitbang Umrah dalam pengelolaan Magot dan produksi turunannya

- Pembentukan Posyantekdes di 13 (tiga belas) desa se Kabupaten Bintan
- Memperoleh penghargaan dari Kemendes PDTT sebagai Kabupaten yang sangat mendukung melaksanakan lomba teknologi tepat guna
- Terlaksananya sosialisasi TTG kepada masyarakat melalui kegiatan TTG go to school
- Terlaksananya penerapan dari hasil lomba TTG yaitu budidaya kepiting soka di desa penaga dan merupakan pilot proyek pemberdayaan masyarakat desa yang kedepannya akan dikembangkan lebih luas ke desa yang lain
- Terbentuknya Forum Komunikasi Posyantek Bintan

(2) Lomba Desa Dan Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.83.423.500,- dan realisasi sebesar Rp.78.741.680,- atau 94,39%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya acara Lomba Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan desa dan kelurahan dapat melengkapi semua administrasi desa dan kelurahan secara berkelanjutan dan terformat dengan rapi dan sistematis. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bintan adalah Desa dan Kelurahan berada di 8 (Delapan) Kecamatan di Kabupaten Bintan., 2 Kecamatan Tidak mengirimkan utusan karena Kendala keterbatasan anggaran untuk melaksanakan perlombaan Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan Dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 3.40**Daftar Desa yang Mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan**

No	Desa / Kelurahan	Kecamatan
I.	Desa:	
	1. Desa Teluk Bakau	Kecamatan Gunung Kijang
	2. Desa Sri Bintan	Kecamatan Teluk Sebong
	3. Desa Lancang Kuning	Kecamatan Bintan Utara
	4. Desa Teluk Sasah	Kecamatan Seri Kuala Lobam
	5. Desa Numbing	Kecamatan Bintan Pesisir
	6. Desa Mantang Besar	Kecamatan Mantang
II	7. Desa Toapaya Selatan	Kecamatan Toapaya
	Kelurahan:	
	1. Kelurahan Sungai Enam	Kecamatan Bintan Timur
	2. Kelurahan Toapaya Asri	Kecamatan Toapaya
	3. Kelurahan Kota Baru	Kecamatan Teluk Sebong
	4. Kelurahan Tanjung Uban Seltan	Kecamatan Bintan Utara
	5. Kelurahan Teluk Lobam	Kecamatan Seri Kuala Lobam
	6. Kelurahan Kawal	Kecamatan Gunung Kijang.

(3) Operasional Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Dengan TNI AD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.135.621.200,- dan realisasi sebesar Rp.129.079.400,- atau 96.81%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya acara Operasional Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Dengan TNI AD. Maksud pelaksanaan Program ini adalah sebagai Program untuk membantu Desa dalam memperbaiki sarana Prasarana Jalan sebagai sarana Transportasi yang bermanfaat langsung kepada masyarakat luas. sehingga diperlukan adanya kegiatan

penunjang yaitu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini:

- Terlaksananya penanaman pohon penghijauan dan Pembersihan dan penanaman pohon mangrove di sungai gesek
- Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat desa pengudang
- Terlaksananya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya

(4) Temu Wicara Perdesaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.336.130.982,- dan realisasi sebesar Rp.330.533.000,- atau 98,33%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Temu wicara pedesaan sebagai wadah bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan dan aspirasi langsung dari masyarakat. Juga merupakan wujud pembinaan Pemerintahan Daerah kepada perangkatnya agar dapat meningkatkan kinerja aparatur dan pemerintahan desa, sehingga setiap aparatur memahami tugas dan fungsinya, serta memiliki pemahaman dan kreatifitas pembangunan desanya. Sekaligus menyampaikan persepsi tentang visi dan misi Bupati Bintan untuk mewujudkan Bintan yang Gemilang, Bintan Yang Lebih Baik.

Adapun hasil yang dicapai selama tahun 2019 ini antara lain :

- Terlaksananya kegiatan temu wicara di Desa Ekang Anculai antara lain membahas masalah wisata

desa, penjelasan kepada kelompok dasa wisma akan pentingnya penanaman tanaman obat dan penghijauan berupa tanaman hias sebagai penunjang desa wisata dan pengaspalan jalan menuju lokasi wisata yang berkerja sama dengan Bumdesa serta mempekerjakan masyarakat lokal

- Terlaksananya temu wicara didesa Numbing dengan hasil adalah warga yang rela menghibahkan sebagian tanahnya untuk pemasangan jaringan listrik PLN, pemanfaatan dana desa untuk kegiatan kelompok nelayan dan permintaan masyarakat akan sarana olah raga yang memadai
- Terlaksananya temu wicara di Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam hasil yang dicapai adalah peningkatan honor RT RW serta pengkatan poskamling di masing masing RT/RW dan dukungan penyertaan modal bumdes untuk supliar beras dan memanfaatkan keberadaan perangkat RT dan RW untuk menjadi stokis
- Terlaksananya temu wicara di Kecamatan Bintan Timur hasil yang dicapai adalah bekerja sama antara stege holder dan masyarakat serta pemuda untuk memerangin peredaran narkoba serta himbauan untuk tidak membakar hutan atau pun lahan perkebunan
- Terlaksananya temu wicara di Kecamatan Tambelan dengan hasil yang disepakati tentang pengelolaan dana desa yang akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pembentukan Bumdesa bersama dan permintaan penambahan gas elpiji subsidi yang keberadaannya sering langka

- Terlaksananya temu wicara di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya dengan hasil yang disepakati tentang pengelolaan nanas sebagai komoditas unggulan desa menjadi prospek usaha yang bisa dikembangkan masyarakat serta melaksanakan iven-iven di desa yang sifatnya rutin tahunan untuk mengangkat perekonomian masyarakat
- Terlaksananya temu wicara di Desa Sri Bintan antara Pemerintah dan masyarakat serta pemaparan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan melalui dana APBD dan dana desa serta menggali aspirasi dan keinginan masyarakat desa, pembangunan apa yang diharapkan untuk tahun depan

(5) Pendamping PAMSIMAS

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.19.822.130,- dan realisasi sebesar Rp.15.399.600,- atau 77,69%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pendampingan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) ini dipusatkan pada 6 Desa yaitu :

- a) Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.
- b) Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan.
- c) Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir.
- d) Desa Mantang Besar Kecamatan Bintan Pesisir.
- e) Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan.
- f) Desa E kang Anculai Kecamatan Teluk Sebong.

(6) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.638.775.700,- dan realisasi sebesar Rp.581.139.889,-

atau 90,98%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui gerakan PKK dengan *output* dari kegiatan ini adalah:

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Kurang tanggapnya masyarakat terhadap kebutuhan teknologi sederhana yang bermanfaat;
- b) Kondisi cuaca pada pelaksanaan dengan curah hujan yang cukup tinggi
- c) Jadwal Bupati yang sering berubah-ubah hal ini karena padatnya jadwal Bupati sehingga harus dibuat skala prioritas
- d) Kondisi rentang wilayah Bintan yang sebagian besar pesisir (lautan) sehingga menyulitkan untuk penyampaian informasi ke desa-desa tentang jadwal kegiatan
- e) Perbedaan regulasi penganggaran PAMSIMAS serta Permasalahan Penyediaan Lahan

(2) Solusi

- a) Melakukan pembinaan secara intensif kepada Posyantekdes yang telah terbentuk
- b) Pelaksanaan kedepan harus memperhatikan kondisi alam dan masyarakat untuk menentukan pelaksanaan kegiatan
- c) Membuat penyesuaian secara berkala dengan berpedaoman pada agenda kerja Bupati
- d) Menyiapkan bantuan transportasi dan lainnya bagi warga disesuaikan dengan aturan yang berlaku
- e) Melakukan koordinasi berkala serta penyediaan lahan yang sesuai dengan perencanaan

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.199.835.689,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.173.911.768 ,- atau 87,03%. *Outcome* meningkatnya pembinaan usaha ekonomi pedesaan sebesar 80%

Dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pembinaan Dan Pengembangan BUMDES dan Bumdes Bersama

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.57.284.000,- dan realisasi sebesar Rp.53.729.358,- atau 93,79%. *Output* dari kegiatan ini Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa 34 Bumdes. Jumlah BUMDes yang terbentuk di Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2019 berjumlah 34 BUMdes. Berdasarkan data tahun 2019 jumlah BUMDes yang telah menghasilkan PADes sebanyak 23 BUMDes dari 32 BUMDes yang aktif,. Adapun realisasi kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan BUMDes Dan BUMDes Bersama capaian Fisik sebesar 100% dan Keuangan sebesar 93,79%.

Tabel 3.41 Perkembangan Jumlah BUMDes Kabupaten Bintan

No	Uraian	2017	%	2018	%	2019	%
1	Kontribusi PADes terhadap APBDes	Rp88.997.837	0,1%	Rp182.129.633*	0,19%	Rp262.084.525	0,21
2	Jumlah BUMDES	31	86%	34	94%	34	94%
	Jumlah Bumdes Aktif	28	90%	31	91%	31	91%
3	Jumlah Bumdes Yang Menghasilkan PADes	5	16%	24	70%	21*	62%

Sumber :Data Hasil Analisa 2020. * Data Perhitungan Sementara

(2) Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.74.998.689,- dan realisasi sebesar Rp.73.991.230,- atau 98,66%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan usaha ekonomi di 34 BUMDes. Usaha-usaha ekonomi ini terdiri dari berbagai jenis seperti usah penjualan gas elpi, usaha penjualan beras dan usaha ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan.

(3) Pelatihan Manajemen BUMDES

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.67.553.000,- dan realisasi sebesar Rp.46.191.180,- atau 68,38%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan manajemen BUMDES sebanyak 40 orang Pada kegiatan Pelatihan Manajemen Bumdes, Pengembangan BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di pedesaan (BUMDES Percontohan) adalah meningkatnya kapasitas manajemen BUMDES dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan yang dapat dicapai diantaranya melalui Bimtek-Bimtek Pengelolaan Keuangan BUMDES dan serta bagi Pengelola BUMDES. Dalam Bimtek ini peserta yang dilatih sebanyak mungkin tetapi dari segi pendanaan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bintan hanya dapat melatih sebanyak 40 orang. Pelatihan ini mengenai bagaimana cara mengelola manajemen keuangan BUMDES dan pengembangan usaha BUMDES.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia dalam mengurus BUMDes
- b) Belum optimalnya sarana dan prasaran pendukung

- c) Lambatnya pemahaman tentang materi pelatihan dikarenakan kualitas SDM yang masih rendah

(2) Solusi

- a) Dibutuhkan pelatihan Manajemen BUMDes secara berkelanjutan
- b) Dibutuhkan Studi Potensi Desa dan Penentuan Produk Unggulan Desa.
- c) Dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung
- d) Dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas manajemen BUMDES

3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.86.757.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.77.036.976 ,- atau 88,80%. *Outcome* Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Dan Kelembagaan Masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 80%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Sinkronisasi Data Profil Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.43.059.800,- dan realisasi sebesar Rp.41.123.150,- atau 95.50%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya data profil desa dan kelurahan di 36 desa dan 15 kelurahan. Setiap Desa dan kelurahan sudah tersedia data pokok desa, potensi desa dan perkembangan potensi desa, secara

lengkap dan melaporkan ke Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa, laporan yang terkumpul berupa hard copy. Melalui Data Profil ini aparat pemerintah akan mengetahui kondisi riil dari masyarakat. Kondisi riil tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam bertindak dan mencari Solusi atas permasalahan yang ada. Dengan demikian dengan tersedianya data ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara aparat dan masyarakat terutama dalam merencanakan pembangunan desa. Pengisian Profil Desa dan Kelurahan merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Disamping itu juga untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral. Pengisian Profil Desa dan Kelurahan meliputi pengisian Data Dasar Keluarga, Potensi Desa dan Kelurahan yakni keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan serta kelembagaan, sarana dan prasarana yang ada di desa, dan tingkat perkembangan desa berupa capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan keberhasilan masyarakat dan pemerintahan desa / kelurahan.

Hasil yang dicapai dari 36 Desa dan 15 Kelurahan se Kabupaten Bintan dapat menyusun Data Profil Desa dan Kelurahan yang ter update. Dari data tersebut dapat digambarkan Klasifikasi perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.42 Klasifikasi Desa dan Kelurahan Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Indeks	Klasifikasi
1	2	3	4	5
1.	Teluk Sebong	Sebong Pereh	0,74	Swakarya
2.		Sebong Lagoi	0,69	Swakarya
3.		Ekang Anculai	0,72	Swakarya
4.		Sri Bintang	0,72	Swakarya
5.		Pengudang	0,72	Swakarya
6.		Berakit	0,70	Swakarya
7.		Kota Baru	0,70	Swakarya
8.	Bintan Utara	Lancang Kuning	0,81	Swasembada
9.		Tanjung Uban Selatan	0,83	Swasembada
10.		Tanjung Uban Kota	0,70	Swakarya
11.		Tanjung Uban Utara	0,74	Swakarya
12.	Teluk Bintan	Tanjung Uban Timur	0,79	Swakarya
13.		Bintan Buyu	0,69	Swakarya
14.		Pangkil	0,72	Swakarya
15.		Penaga	0,75	Swakarya
16.		Pengujan	0,77	Swakarya
17.		Tembeling	0,72	Swakarya
18.		Tembeling Tanjung	0,74	Swakarya
19.	Seri Kuala Lobam	Kuala Sempang	0,84	Swasembada
20.		Busung	0,80	Swasembada
21.		Teluk Sasah	0,83	Swasembada
22.		Teluk Lobam	0,74	Swakarya
23.		Tanjung Permai	0,80	Swakarya
24.	Bintan Timur	Kijang Kota	0,62	Swakarya
25.		Sungai Enam	0,66	Swakarya
26.		Gunung Lengkuas	0,67	Swakarya
27.		Sungai Lekop	0,69	Swakarya
28.	Gunung Kijang	Gunung Kijang	0,77	Swakarya
29.		Kawalwa	0,67	Swakarya
30.		Teluk Bakau	0,74	Swakarya
31.	Mantang	Malang Rapat	0,73	Swakarya
32.		Mantang Lama	0,73	Swakarya
33.		Mantang Besar	0,76	Swakarya
34.		Mantang Baru	0,74	Swakarya
35.	Bintan Pesisir	Dendun	0,69	Swakarya
36.		Mapur	0,78	Swakarya
37.		Numbing	0,79	Swakarya
38.		Kelong	0,72	Swakarya
39.	Toapaya	Air Glubi	0,73	Swakarya
40.		Toapaya Utara	0,80	Swakarya
41.		Toapaya	0,71	Swakarya
42.		Toapaya Asri	0,75	Swakarya
43.	Tambelan	Toapaya Selatan	0,72	Swakarya
44.		Pulau Pinang	0,79	Swakarya
45.		Pulau Mentebung	0,76	Swakarya
46.		Kampung Melayu	0,69	Swakarya
47.		Kampung Hilir	0,70	Swakarya
48.		Teluk Sekuni	0,70	Swakarya
49.		Batu Lepuk	0,72	Swakarya
50.		Kukup	0,78	Swakarya
51.		Pengikik	0,78	Swakarya

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Bintan Tahun 2020

(2) Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.43.698.000,- dan realisasi sebesar Rp.35.913.826,- atau 82,19%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen RKP dan APBDes sebanyak 36 Desa.

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Untuk mempercepat tersedianya data profil desa dan kelurahan, perlu komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah menata kembali struktur pendataan, teknik pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan publikasi data profil desa.
- b) Belum maksimalnya jaringan internet di beberapa desa dan kelurahan menyebabkan keterlambatan penyediaan data yang *Up To Date*
- c) Terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa dari pusat sehingga menyebabkan penyesuaian perencanaan APBdes

(2) Solusi

- a) Pemerintah perlu terus menerus memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menempatkan data profil desa dan kelurahan sebagai input utama dalam manajemen pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b) Dibutuhkan kapasitas internet yang memadai
- c) Diharapkan sosialisasi perubahan kebijakan pengelolaan dana desa dilaksanakan lebih awal sehingga penyesuaian terhadap perencanaan APBDes lebih maksimal.

4) **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.572.723.960,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.439.083.458,- atau 76,67%. *Outcome* meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa sebesar 80%

Dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Kegiatan**

(1) **Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.283.742.000,- dan realisasi sebesar Rp.208.149.493,- atau 73,36%. *Output* dari Kegiatan ini Terlaksananya Pelatihan Perangkat Desa 36 desa dari 9 Kecamatan, 36 Orang Kepala Desa , 36 Orang Sekdes , 108 Orang Kaur , 108 Orang Kasi, 48 Orang PTPD Kecamatan (Kasi PMD Kecamatan),TA, PD, dan PLD . Tujuan dari kegiatan ini adalah diharapkan terpenuhinya pengetahuan dan kemampuan bagi kepala desa dan sekretaris desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa.

(2) **Pelatihan Aplikasi SISKEUDES**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.36.299.760,- dan realisasi sebesar Rp.30.971.645,- atau 85.32%. *Output* dari Kegiatan ini terlaksananya pelatihan aplikasi Siskeudes untuk 36 desa di Kabupaten Bintan.

Aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu bagi Pemerintah Desa guna mencatat perencanaan pembangunan Desa, penganggaran serta penatausahaan secara digital sehingga mempermudah dalam menyajikan laporan sesuai dengan

perundangan yang berlaku. Penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut membutuhkan peletakan yang baik sesuai dengan regulasi dan kebutuhan dalam Struktur Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berfungsi dengan optimal.

(3) Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.169.893.000,- dan realisasi sebesar Rp.140.204.120,- atau 82.52%. Output dari Kegiatan ini meningkatnya pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan di 36 desa dan 15 kelurahan dengan sasaran BPD, LPM, RW, RT Karang Taruna, dan Posyandu untuk 10 Kecamatan, 36 Desa dan 15 Kelurahan, dimana akan terlaksananya kegiatan Pembinaan, Perangkat Desa dan Kelurahan.

(4) Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa untuk pemerintah desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.82.789.200,- dan realisasi sebesar Rp.59.758.200,- atau 72,18%. Output dari Kegiatan ini terlaksana pelatihan sebanyak 108 kaur dan kasi di pemerintahan desa.

Bimtek Barang dan Jasa diharapkan kaur dan kasi dapat memahami peran dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan di desa.

Tabel 3.43 Perkembangan Kelembagaan Desa Kabupaten Bintang

No	Kelembagaan Desa	Jumlah	Pembinaan	Aktif
1	BPD	36	36	36
2	PEMERINTAH DESA	36	36	36
3	BUMDESA	30	30	
4	BKD	36	29	29
5	LEMBAGA ADAT	1	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bintang Tahun 2020

Tabel 3.44**Perkembangan Kelembagaan Kemasyarakatan Kabupaten Bintan**

No	Kelembagaan Kemasyarakatan	Jumlah	Pembinaan	Aktif
1	LPM	51	36	51
2	RW	199	114	199
3	RT	604	300	604
4	PKK	51	36	36
5	KARANG TARUNA	51	29	25
6	KPMD	51	36	51

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bintan Tahun 2020

Capaian indikator kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) *Meningkatnya Kualitas SDM Aparatus Desa*

Kualitas SDM Aparatus Desa dari tahun ketahun terus meningkat dan merata tahun 2019 tercatat mencapai 100%

a. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Kondisi rentang wilayah Bintan yang sebagian besar pesisir (lautan) sehingga menyulitkan untuk penyampaian informasi ke desa-desa tentang jadwal pembinaan.
- b) SDM perangkat desa yang masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa.
- c) Sumberdaya Manusia yang berbeda- beda butuh waktu untuk memahami dalam penggunaan aplikasi Siskuedes.

(2) Solusi

- a) Penyampaian informasi harus lebih cepat, paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai sudah si informasikan.

- b) Butuh lebih pembinaan ekstra sehingga capaian yang dimaksud dapat terealisasi
- c) Bekerjasama dengan kegiatan pemeliharaan aplikasi siskuedes. Masing-masing bendahara dan kaur perencanaan dilatih kembali.

5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan** melalui 6 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.392.438.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.336.610.967 ,- atau 85,77%. *Outcome* Terwujudnya azas keuangan desa yang akuntabel, transparan, tertib dan disiplin serta partisipatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pendataan Aset Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.38.860.000,- dan realisasi sebesar Rp.36.607.400,- atau 94,20%. *Output* dari kegiatan ini Tersusunya Laporan Aset Desa di (36 Desa).

(2) Operasional Sekretariat Bersama (Sekber) Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.980.000,- atau 3,96%. *Output* dari kegiatan ini Terlaksanya operasionalisasi SEKBER. Kegiatan ini belum terealisasi pada anggaran 2019 hal ini disebabkan perubahan kebijakan di pusat sehingga daerah implementasi di daerah

mengalami stagnasi. Disisi lain sulinya implentasi kegiatan ini disebabkan terjadinya pengantian personil di instansi vertical sehingga penetapan formatur surat keputusan mengalami berbagai perubahan.

(3) Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.167.240.000,- dan realisasi sebesar Rp. 163.449.967,00,- atau 97,73%. Output dari kegiatan ini Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (36 Desa). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara umum tidak ada permasalahan mendasar, walaupun ada DPMD Kabupaten Bintan berusaha untuk meminimalisir segala bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Kondisi 16 desa berada di pulau pulau kecil ini akan sangat beresiko terhadap penyaluran dana desa maka DPMD Kab. Bintan melakukan kerjasama dengan pihak Bank Riau.

(4) Pembinaan Penysunan APBDesa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.64.144.000,- dan realisasi sebesar Rp.64.041.000,- 99,84%. Output dari kegiatan ini Tersusunya Dokumen APBDesa untuk (36 Desa).

(5) Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi SISKEUDES

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.35.620.000,- dan realisasi sebesar Rp.34.142.300,- atau 95,85%. *Output* dari kegiatan ini adalah terupdatenya Aplikasi Siskeudes di 36 desa secara berkala. Dalam rangka mewujudkan azas keuangan desa yang akuntabel, transparan, tertib dan disiplin serta partisifatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya yang lain dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa adalah melalui aplikasi siskuedes. Untuk membangun sistem informasi yang dapat melakukan analisis data pengolahan keuangan dan pelaksanaan program-program kegiatan di tingkat desa yang berbasis Web. Untuk menjaga keberlangsungan aplikasi dimaksud di anggarkan biaya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi siskeudes.

Aplikasi Siskeudes Versi 2 ini sudah mengalami banyak penyesuaian terutama karena diterbitkannya Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga ada tambahan beberapa Filtur yang menyesuaikan dengan Permendagri tersebut.

Sebagaimana pada versi sebelumnya, Aplikasi ini tetap menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Meskipun aplikasi ini bisa berjalan menggunakan database SQLServer . Namun, penggunaan database tersebut belum dirasa perlu karena kita tahu bahwa ssecara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil,sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Microsoft Access.

Menu Data Umum dan RPJMDes merupakan menu yang digunakan untuk menginput data pemerintahan desa seperti Nama Kepala Desa,Jabatan Kepala Desa,No Perdes Ptgiwb, Nama Sekdes,Jabatan Sekdes>Nama Kaur Keuangan,Jabatan Kaur Keuangan,NPWP,dan Ibu Kota Desa. Lain seperti versi sebelumnya, Data Umum Desa berada pada Menu Penganggaran. Pada versi 2.0 Menu Data

Umum berada pada Menu Perencanaan. Untuk dapat mengoperasikan serta menginput Data Umum Desa

(6) Penyusunan Kebijakan Keuangan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.36.574.000,- dan realisasi sebesar Rp.36.390.000,- atau 98,95%. Output dari kegiatan ini adalah tersedinya kebijakan keuangan desa berdasarkan peraturan perundangan yang terbaru sebanyak 11 Peraturan.

6.1 Peraturan Bupati

1. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 tentang Tatacara pembagian dan penetapan besaran dana Desa di kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019
2. Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Pedoman pembagian Alokasi dana Desa.
3. Peraturan Bupati Bintan Nomor 6 tentang Pedoman Besaran Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah
4. Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala edoman Penyusunan APBDesa Tahun 2019
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 18 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2019.
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Perubahan APBDesa . Tahun 2019.
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 tentang pedoman Perjalanan Dinas di lingkungan pemerintahn Desa
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 tentang Pedoman Umum Pengadaan Baramg dan jasa di Desa.
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 tentang Pedoman Umum perhitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa , {angkat Desa dan BPD dan Operasional Penyelenggaran Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 49 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa

6.2 Keputusan Bupati

1. Keputusan Bupati Bintan Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2019.
2. Keputusan Bupati Bintan Tentang Penetapan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bintan Tahun 2019.
3. Keputusan Bupati Bintan Tentang Penetapan Rincian Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.
4. Keputusan Bupati Bintan Tentang Penetapan Perubahan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.

✓ Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menyalurkan Dana Desa (DD) dan pemerintan daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang

cukup besar untuk disalurkan kepada Desa. Pada tahun 2019, total (DD dan ADD) disalurkan sebesar Rp120,84 milyar yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen APBDesa Tahun 2019. Dari implementasi APBDesa dan APBD Kabupaten Bintan dapat dipaparkan beberapa pencapaian pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.45
Data Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019

No	Uraian	2017	%	2018	%	2019	%
1	Jumlah Dana Desa (Rp)	Rp31.516.891.000	35%	Rp30.903.914.000	33%	Rp 36,845,062,000	29.37
2	Pajak Bagi Hasil (PBH)					Rp 19,759,852,047.00	15.75
3	Jumlah ADD (Rp)	Rp52.857.188.001	59%	Rp53.075.293.800	57%	Rp 64,238,788,000.00	51.21
4	SILPA (Tahun Sebelumnya)	Rp4.800.058.020	5%	Rp9.289.840.380	10%	Rp 4,597,115,587.00	3.66
	Total APBDes	Rp89.174.137.021		Rp93.269.048.180		Rp 125,440,817,634.41	100.00
Sumber : Data Hasil Analisa Tahun 2020 * data Sementara ** Sangat sementara							

Capaian indikator kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) Jumlah Desa Yang Dibina

Hingga tahun 2019 seluruh desa sebanyak 36 Desa telah terbina mencapai 100%

a. Permasalahan dan Solusi

Terbatasnya alokasi anggaran monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa sehingga pelaksanaan kegiatan belum berjalan maksimal sehingga perlu penambahan dana alokasi monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa

3.1.2.7 Urusan Perhubungan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kedua** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Sosial adalah sebagai berikut :

1) Jumlah Pulau Yang Tercakupi Jaringan Transportasi

Hingga tahun 2019 pulau-pulau yang tercakupi oleh jaringan transportasi umum berjumlah 11 Pulau;

2) Jumlah Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

Tahun 2018 Jumlah Kasus Kecelakaan menurun menjadi 17 Kasus Kecelakaan.

3) Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KIR)

Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sampai diperolehnya akreditasi.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan** melalui 1 (Satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.141.889.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.122.955.000,- atau 86,65%. *Outcome* dari program ini antara lain tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang akurat, efisien dan efektif. Secara lebih spesifik, program ini bertujuan dalam melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan harus berdasarkan Detail Engineering Design (DED).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.141.889.000,- dengan realisasi sebesar Rp.122.955.000,- atau 86,65%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (satu) dokumen Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Ponton Dermaga Bandara Tambelan.

(2) Kegiatan Pembangunan Dermaga/ Pelabuhan Rakyat dan Ruang Tunggu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.28.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.000.000,- atau 100%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya 3 (tiga) dokumen Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Ponton Dermaga Bandara Tambelan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

1) Persentase Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Tahun 2019 telah disusun 4 (empat) dokumen Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Ponton Dermaga Bandara Tambelan dengan persentase sampai dengan tahun 2019 sebesar 59% terhadap target sebesar 71%.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di tahun 2019 telah berjalan sesuai target namun untuk capaian penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2019 tidak sesuai target yang direncanakan hal ini karena pada tahun 2018

kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Bidang ASDP tidak terlaksana yang berdampak terhadap target capaian indikator kinerja OPD dan Solusi untuk kegiatan tersebut sudah diusulkan kembali di tahun berikutnya.

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan** melalui 6 (Enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.2.312.974.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.192.615.732 atau 94,8 %. *Outcome* dari program ini antara lain terpeliharanya dermaga/pelabuhan dan alat pemberi Isyarat lalu lintas (APILL) agar selalu dalam kondisi baik. Secara lebih spesifik, program ini bertujuan agar dermaga/pelabuhan sebagai tempat turun naiknya penumpang orang/barang selalu dalam kondisi baik sehingga dipandang perlu untuk direhabilitasi/dipelihara supaya para pengguna jasa dermaga merasa aman, nyaman dan cepat. Sedangkan pemeliharaan APILL adalah salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang bertujuan memberikan isyarat kepada pengguna jalan agar dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas khususnya dipersimpangan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Dermaga

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.128.950.000,- dan realisasi sebesar Rp.128.545.700,- atau 99,7 %. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya

perawatan 35 unit Solar Cell dan perawatan 2 Unit Gedung Penunjang Fasilitas/Pelabuhan) sehingga terpeliharanya fasilitas penunjang pada Dermaga/Pelabuhan dan selalu dalam kondisi baik sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna dermaga/Pelabuhan.

(2) Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.600.000,- dan realisasi sebesar Rp.202.181.500,- atau 96%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan terhadap APILL yaitu 9 Unit Traffic Light dan 33 Unit Warning Light, sehingga terpeliharanya Traffic Light dan Warning Light sehingga dapat membantu memberikan petunjuk bagi pengguna jalan .

(3) Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Dan Pagar Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan ini dilaksanakan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.600.000,- realisasi sebesar Rp.49.420.000,- atau 99,6%. *Output* dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rambu rambu jalan dan delineator sebanyak 200 bh rambu dan 200 bh delineator, sehingga dapat membantu memberikan petunjuk bagi pengguna jalan.

(4) Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Balai/UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.137.976.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.136.838.477,- atau 99,2%. *Output* dari kegiatan ini adalah terpeliharanya 1 unit gedung pengujian sehingga selalu dalam kondisi baik untuk memberikan kenyamanan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa pengujian.

(5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/Halte Bus/Taxi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.668.000,- dan realisasi sebesar Rp 95.508.000,- atau 99,8%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan 1 Terminal dan 5 halte dan terpeliharanya gedung terminal dan halte sehingga memberikan kenyamanan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa terminal dan Halte.

(6) Rehabilitasi dan pemeliharaan dermaga/ pelabuhan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.690.180.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.580.122.055,- atau 93,5%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi dermaga Dakomas Pulau Pucung Kec. Gunung Kijang, sehingga terpeliharanya dermaga/pelabuhan yang membantu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi mobilitas orang dan barang.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) *Persentase Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik*

Sampai dengan tahun 2019 jumlah prasarana yang dalam kondisi baik yaitu 1 Terminal, 36 Halte, 50 Dermaga, dan 1 Gedung Pengujian dengan persentase capaian sebesar 95% terhadap target sebesar 95%

2) *Persentase APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Dalam Kondisi Baik*

Tahun 2019 jumlah APILL yang dalam kondisi baik sebesar 44 unit yang tersebar pada jalan-jalan di seluruh Kabupaten Bintan dengan persentase capaian sebesar 100% terhadap target sebesar 95%

3) *Persentase Rambu – Rambu Lalulintas Dalam Kondisi Baik*

Tahun 2019 jumlah rambu – rambu lalu lintas yang dalam kondisi baik sebesar 1107 yang tersebar pada jalan-jalan di seluruh Kabupaten Bintan. Dengan persentase sebesar 100% terhadap target sebesar 100%

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan tidak terdapat kendala dan berjalan sesuai dengan rencana.

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan** melalui 5 (Lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.947.286.000,- dan realisasi sebesar Rp.944.210.730,- atau 99,7%. *Outcome* dari program ini antara lain terlaksananya operasional peningkatan pelayanan kepelabuhanan, sewa kapal/transportasi laut ke Tambelan dan pembinaan angkutan Laut/Pompong Masyarakat. Secara lebih spesifik, program ini bertujuan agar tersedianya pelayanan di pos-pos dermaga/peleabuhan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut, baik yang datang maupun yang berangkat ke berbagai pulau-pulau yang telah berpenghuni. Melaksanakan penyediaan transportasi laut ke Tambelan (angkutan lebaran) kegiatan ini dilaksanakan sehubungan pada saat libur hari raya rute pelayaran ke Kecamatan sangat terbatas sedangkan penumpang yang akan berpergian/berangkat ke Tambelan melebihi kapasitas kapal yang tersedia. Pembinaan Angkutan Laut/Pompong masyarakat bertujuan memberikan sosialisasi keselamatan kepada pemilik Angkutan Laut/Pompong masyarakat di Kabupaten Bintan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan Pengawasan Dan Pelayanan Kepelabuhanan ASDP

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.43.400.000,- dan realisasi sebesar Rp.43.223.750,- atau 99,59%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan dan pengawasan pada pelabuhan/dermaga penyeberangan bagi pengguna jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Khususnya pada pelabuhan penyeberangan di Tanjung Uban dan Tambelan.

(2) Peningkatan dan Pelayanan Kepelabuhan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp.304.200.000,- dan realisasi sebesar Rp.303.554.180,- atau 99,79%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan di pos-pos kepelabuhan/dermaga bagi pengguna jasa kepelabuhan sebagai mobilitas orang/barang. Yaitu pelayanan kepada penumpang yang datang dan berangkat ke pulau-pulau yang berpenghuni pada 5 dermaga /pelabuhan.

(3) Sewa Kapal/Transportasi Laut Ke Kecamatan Tambelan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.530.600.000,- dan realisasi sebesar Rp.529.943.000,- atau 99,88%. *Output* dari kegiatan ini adalah berupa bantuan operasional transportasi laut sehingga tersedianya angkutan laut (kapal cepat) bagi masyarakat yang akan ke Tambelan (pada saat libur lebaran/hari raya) sebanyak 4 trip.

(4) Pembinaan Angkutan Laut/Pompong Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.42.500.000,- atau 99,27%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya

pemberian memberikan sosialisasi keselamatan kepada pemilik Angkutan Laut/Pompong masyarakat di Kabupaten Bintan.

(5) Peningkatan Dan Pelayanan Terminal Angkutan Darat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.086.000,- dan realisasi sebesar Rp.24.989.800 atau 99.62%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan di Terminal angkutan Darat sebagai tempat mobilitas orang/barang.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2018 untuk program ini adalah :

1) Jumlah Orang Yang Melalui Terminal Tahun

Tahun 2019 Jumlah Orang yang melalui terminal di Kabupaten Bintan berjumlah 1452 orang yang mana telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu 1100 orang.

2) Jumlah Orang Yang Melalui Pelabuhan Tahun

Tahun 2019 Jumlah Orang yang melalui Pelabuhan di Kabupaten Bintan Berjumlah 1.018.220 Orang yang mana telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu berjumlah 620.000 Orang

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.490.670.000,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp.486.572.540 atau 99,16%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendukung/penunjang bidang perhubungan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembangunan Dermaga/Pelabuhan Rakyat Dan Ruang Tunggu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.490.670.000,- dan realisasi sebesar Rp.486.572.540 atau 99,16%. *Output* dari kegiatan adalah terlaksananya Pembangunan Dermaga Rakyat Sebong Pereh dan Pembangunan Pagar Abutmen Dermaga Semelur.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) Persentase Prasarana Perhubungan yang Dibangun

Tahun 2019 Jumlah Prasarana Perhubungan yang dibangun berjumlah 1 Dermaga Rakyat Sebong Pereh Prasarana Perhubungan yang dibangun sebesar 94% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 96% dikarenakan defisit anggaran dan akan dicapai pada Tahun Anggaran berikutnya.

2) Persentase Sarana Perhubungan Yang Diadakan

Tahun 2019 tidak ada pengadaan/pembangunan Sarana perhubungan yang sebelumnya telah diusulkan melalui DAK Afirmasi untuk Sarana Transportasi Darat namun belum disetujui yang menyebabkan persentase Sarana Perhubungan yang diadakan tidak meningkat sebesar 77% yang mana belum mencapai target sebesar 82%.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam mencapai target Tahun Anggaran 2019 terdapat kendala pada Anggaran dan tidak disetujuinya usulan DAK Afirmasi untuk pengadaan sarana Transportasi Pedesaan

yang mana menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan untuk Tahun 2018. Target yang belum terpenuhi akan dicapai pada tahun anggaran berikutnya.

5) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.745.200.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.737.967.461 atau 99%. *Outcome* adalah tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas dan pengamanan lalu lintas agar angka kecelakaan dapat diturunkan. Secara lebih spesifik, program ini bertujuan agar dengan tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas dan pelaksanaan pengamanan lalu lintas dapat mengurangi/menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan pengadaan Marka Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.304.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.302.880.000 atau 99,56%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemasangan Marka Jalan (6500 M') dan Pita Penggadah (150M2).

(2) Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.441.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.435.087.461,- (98,66%). *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan sebanyak 12 kegiatan dalam 1 tahun yaitu : pengamanan anak sekolah sebanyak 188 kali, kunjungan Gubernur sebanyak 3 kali, kunjungan Bupati dan wakil Bupati sebanyak 30 kali, Upacara Kenegaraan 9 kali,

Perayaan hari Raya Keagamaan 8 kali, Posko arus mudi dan balik 27 kali, event olah raga Nasional dan Internasional 8 kali, event budaya/tari tradisional 2 kali, Sembahyang keselamatan Vihara 16, gerak jalan santai 3 kali, pernikahan dan khitanan 9 kali, dan pengamanan pengaspalan, penggalian dan pembangunan jalan raya 80 kali.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) ***Jumlah Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan***

Pada kondisi awal penyusunan Renstra terjadi sebanyak 60 kasus kecelakaan lalu lintas, berdasarkan kondisi awal tersebut ditargetkan tahun 2019 berkurang sebanyak 16,6 % atau 10 kasus. Realisasi penurunan kecelakaan lalu lintas di tahun 2019 sebesar 71,6 % atau menurun 43 kasus dari kondisi awal 60 kasus.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan **Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas** tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

6) **Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.183.930.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.181.003.240 atau 98,40%. *Outcome* dari program ini antara lain terlaksananya operasional peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.183.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp.181.003.240,- atau 98,40%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengujian kendaraan bermotor angkutan umum, angkutan orang dan barang dengan target 2.200 kendaraan bermotor.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) *Persentase kepemilikan KIR kendaraan bermotor wajib uji (KIR)*

Untuk tahun 2019 Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor hanya mencapai 0 % tidak mencapai target karena UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan belum terakreditasi sehingga tidak dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Namun demikian UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tetap melakukan pelayanan berupa pemberian surat pengantar bagi pemilik kendaraan yang akan melakukan uji berkala di daerah lain.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan **Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas** tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target dikarenakan permasalahan akreditasi. Untuk memenuhi akreditasi yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2020 .

3.1.2.8 Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Koperasi Dan Usaha Mikro** adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah Koperasi Aktif 142 Unit**
2. **Jumlah Usaha Mikro Berizin 238 Unit**
3. **Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha mikro 8340 Orang**
4. **Persentase Pelaku Usaha Mikro yang terlatih 24%**

Tabel 3.46 Jumlah Koperasi di Kabupaten Bintan Tahun 2019

NO	JENIS KOP	AKTIF	TIDAK AKTIF	ANGGOTA		MODAL SENDIRI (RP.JUTA)	MODAL LUAR (RP.JUTA)	VOLUME USAHA	S H U (RP.JUTA)
				Pria	Wanita				
1	KPRI	29	2	1840	1.061	27.024	7.223	32.176	4.259
2	KUD	2	5	15	20	865	430	72	18
3	KSU	15	25	86	61	982	116	797	61
4	KOPANTREN	1	1	15	27	184	6	129	8
5	SEKUNDER	0	1	0	0	0	0	0	0
6	KOP WANITA	24	5	0	524	850	362	1.344	150
6	KOP. LAINNYA	71	56	2.302	829	21.063	4.550	8.117	1.215
	2019	142	95	4.258	2.522	50.968	12.687	42.635	5.711
	2018	132	96	4578	2661	42.020	12.748	19.498	6.240

Sumber : Bidang Koperasi Tahun 2019 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat kenaikan jumlah koperasi aktif sebanyak 10 unit koperasi dari tahun 2019. Pertambahan jumlah koperasi aktif ini didapat dari pertumbuhan koperasi baru sebanyak 9 unit dan aktivasi kembali sebanyak 1 unit. Dan hal ini telah melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Bintan dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 142 unit untuk tahun 2019.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 51.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.565.774,- atau 98,76%. *Outcome* program ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Koperasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 51.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 50.565.774,- atau 98,76%. *Output* kegiatan ini adalah pembinaan dan peningkatan kualitas kelembagaan terhadap koperasi-koperasi maupun kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Bintan melalui sosialisasi/penyuluhan tata cara pembentukan/pendirian koperasi, pengurus koperasi yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan dan pendistribusian 15 (lima belas) set buku administrasi koperasi kepada 15 (lima belas) koperasi di wilayah Kabupaten Bintan; Tahun 2019 terdapat kenaikan jumlah pelaku usaha mikro sebesar 88 unit dari tahun 2018 menjadi 2.278 pelaku usaha mikro. Peningkatan Jumlah Pelaku usaha mikro ini tentunya berdampak positif bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum dan bagi Kabupaten Bintan khususnya. Jumlah usaha mikro berizin pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6

pelaku usaha dari jumlah usaha mikro berizin tahun sebelumnya menjadi 238, dan ini telah melampaui dari target yang telah ditentukan pada RPJMD Kabupaten Bintan. Begitu juga dengan jumlah tenaga kerja di sektor usaha mikro yang mengalami kenaikan sebanyak 41 orang menjadi 8066 orang pada tahun 2019.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Daya Saing Usaha Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 431.260.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 411.679.677,- atau 95,46%. *Outcome* Meningkatnya Daya Saing Usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha bagi Usaha Mikro

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 203.130.000,- dan realisasi sebesar Rp. 201.925.000,- atau 99,41%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya Pengembangan Sarana Usaha bagi Usaha Mikro dengan memberikan bantuan peralatan kepada 8 (delapan) kelompok Usaha Ekonomi Produktif di wilayah Kabupaten Bintan;

(2) Kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan bagi Usaha Mikro

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 210.130.000,- dan realisasi sebesar Rp. 209.754.677,- atau 99,82%. *Output* dari kegiatan ini adalah

tersedianya Bantuan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan bagi Usaha Mikro dengan memberikan bantuan peralatan kepada 8 (delapan) kelompok Usaha Ekonomi Produktif di wilayah Kabupaten Bintan;

Pada tahun 2019 terdapat kenaikan persentase pelaku usaha mikro yang terlatih menjadi 30,6% hal ini dikarenakan pada tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha mikro sebanyak 100 orang.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 193.866.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.225.800,- atau 85.74%. *Outcome* Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Pemula (Start Up Business)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 193.866.000 dan realisasi sebesar Rp. 166.225.800,- atau 85.74%. *Output* dari kegiatan ini adalah pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan potensi dan kapasitas para pelaku usaha tersebut.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Masih banyak gerakan koperasi yang belum menjalankan roda organisasi perkoperasian berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b) Lemahnya tingkat SDM pengurus dan pengelola koperasi yang mengakibatkan pengelolaan kegiatan usaha tidak maksimal;
- c) Terbatasnya modal sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan usaha koperasi yang mana diantaranya disebabkan permohonan pembiayaan ke Bank tidak terealisasi.
- d) Belum optimalnya promosi dan pemasaran serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah;
- e) Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha koperasi dan usaha mikro dengan pelaku usaha lainnya;
- f) Akses koperasi dan usaha mikro terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah;

(2) Solusi

- a) Penguatan Sumber Daya Manusia PNS khususnya di Bidang Koperasi guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi koperasi-koperasi binaan Kabupaten Bintan;
- b) Alokasi anggaran yang memadai guna penunjang kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan;
- c) Sosialisasi kepada para pengurus tentang tata cara mengajukan permohonan pembiayaan ke bank maupun sektor jasa keuangan lainnya dan kemudahan persyaratan dalam permohonan tersebut.

3.1.2.9 Urusan Penanaman Modal

DPMPTSP merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan penanaman modal. Berikut realisasi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP tahun 2019 beserta narasi pelaksanaannya.

Tabel 3.47 Realisasi Program / Kegiatan Urusan Penanaman Modal TA 2019

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Dana DPA/DPPA	KEUANGAN		FISIK		Ket
				Realisasi (Rp.)	(%)	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	1.536.365.600	1.484.586.825				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1580 lembar/12 bulan	7.600.000	7.410.000	98,61	100	100	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	7 line tlp, 8 jenis koran/ma jalah, 745 00 VA	372.750.000	198.196.771	96,97	100	100	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	13 org honorer/12 tenaga sukarela (BEC)	435.769.600	396.900.000	94,52	100	100	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21 Jenis, 300 Buah	25.000.000	22.923.270	99,67	100	100	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33 jenis, 300 0 buah	123.788.198	140.885.855	96,04	100	100	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis cetakan, 4 penggandaan	86.000.000	29.940.680	99,8	100	100	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis, 391 buah	35.000.000	17.771.600	98,73	100	100	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16550 liter	182.000.000	112.961.916	94,13	100	100	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	13 honorer/12 bulan	157.260.000	77.966.000	89,77	100	100	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	55 kali	350.000.000	299.817.709	99,94	100	100	
11	Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	142 kali	231.000.000	179.813.024	99,9	100	100	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	920.629.200	868.870.440				
1	Pembangunan Gedung Kantor	1 paket	250.000.000	249.132.200	99,65	100	100	

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Dana DPA/DPPA	KEUANGAN		FISIK		Ket
				Realisasi (Rp.)	(%)	Target	Realisasi	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8 jenis	493.865.196	273.559.000	96,38	100	100	
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	2 bangunan	405.000.000	216.239.000	91,32	100	100	
4	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	9 Unit	100.000.000	63.725.740	91,04	100	100	
5	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	6 jenis	126.800.000	66.214.500	82,77	100	100	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60%	12.470..000	11.965.800				
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	43 stel	34.650.000	11.965.800	95,96	100	100	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	75.400.000	70.991.700				
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 perempuan, 6 laki-laki	118.300.000	70.991.700	94,15	100	100	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60%	69.038.150	67.142.178				
1	Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	9 Dokumen	69.038.150	67.142.178	97,25	100	100	
VI	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	60%	1.192.662.800	1.134.343.901				
1	Pameran/expo ke dalam negeri	2 kali	452.400.000	450.204.028	99,51	100	100	
2	Penyusunan materi promosi dan informasi investasi	2 jenis	43.222.000	43.202.000	99,95	100	100	
3	Optimasi peran dekranasda Kabupaten Bintan	2 kegiatan	494.656.800	441.956.699	89,35	100	100	
4	Pemetaan potensi dan peluang investasi Kabupaten Bintan	Materi roadmap	84.184.000	81.892.674	97,28	100	100	
5	Pameran/expo luar negeri	1 kali	118.200.000	117.088.500	99,06	100		
VII	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	60%	1.378.002.740	1.355.421.770				
1	Optimalisasi peran Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) di Kabupaten Bintan	PMA/ PMDN Kab. Bintan	464.000.000	454.998.150	98,06	100	100	
2	Optimasi pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Bintan	90 jenis perizinan dan non perizinan	195.125.000	194.640.554	99,75	100	100	
3	Update data perusahaan PMA/PMDN dan non PMA/PMDN di Kabupaten Bintan	Database perusahaan PMA/ PMDN	16.308.400	16.253.710	99,66	100	100	

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Dana DPA/DPPA	KEUANGAN		FISIK		Ket
				Realisasi (Rp.)	(%)	Target	Realisasi	
4	Pemantauan permasalahan investasi di Kabupaten Bintan	30 PMA, 10 PMDN	53.398.940	52.211.140	97,78	100	100	
5	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu	85 jenis perizinan	242.015.700	235.059.500	97,13	100	100	
6	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat pelaku usaha perizinan di kabupaten Bintan	Dokumen	37.135.700	37.051.500	99,77	100	100	
7	Sosialisasi pelayanan perizinan investasi online	250 peserta sosialisasi	260.657.000	256.835.590	98,53	100	100	
8	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu non perizinan	22 jenis perizinan dan 10 template	109.361.000	108.371.626	99,1	100	100	
Jumlah			5.184.568.490	4.993.322.614	96,31	100	100	

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

(1) Kegiatan Pameran/ expo ke dalam negeri

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 452.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 450.204.028,- atau 99,51 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya mengikuti pameran dan promosi di dalam negeri. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya/tersebarnya informasi produk daerah, potensi dan peluang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan expo ke dalam negeri adalah 1. Pameran seleksi tilawatol quran (STQ) tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur; 2. Ikutserta dalam kegiatan Regional Investment Forum (RIF) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang, Banten ; 3. Berpartisipasi pada Pontianak Investment, Agriculture, Tourism, Trade dan Export Commodity Expo 2019 di Pontianak ; 4. Bekerjasama dengan BP Bintan mengikuti Pameran Medan Investment, Agriculture, Tourism dan Trade Expo 2019 di Medan.

(2) Penyusunan materi promosi dan informasi investasi

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.222.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.202.000,- atau 99,95%. Output

dari kegiatan ini adalah tersedianya materi promosi dan informasi investasi sebanyak 2 jenis (Booklet dan leaflet). Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya/tersebar nya informasi potensi dan peluang investasi.

(3) Optimasi peran dekranasda Kabupaten Bintan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 494.656.800,- dan realisasi sebesar Rp. 441.956.699,- atau 89,35%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pameran, Perlombaan fashion show Dekranasda. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkat nya kualitas dan dsitribusi kerajinan Kabupaten Bintan. Pada tahun 2019 adanya mesin sablon dan packing yang bertujuan untuk meningkatkan pengrajin kube yang tersebar di kecamatan Kabupaten Bintan dalam pembuatan kerajinan batik corak padi mas.

(4) Kegiatan Pemetaan potensi dan peluang investasi

Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.184.000,- dan realisasi sebesar Rp. 81.892.674,- atau 97,28 %. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya feasibility study tentang potensi dan peluang investasi Kabupaten Bintan. Pemetaan dilaksanakan pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Bintan Utara.

(5) Kegiatan pameran/expo luar negeri

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 117.088.500,- atau 99,06%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya mengikuti pameran dan promosi di luar negeri. Hasil yang diharapkan adalah meningkat nya/tersebar nya informasi produk daerah, potensi dan peluang investasi daerah. Pameran/expo luar negeri tahun 2019 dilaksanakan dengan turut serta dalam mengikuti pameran Word Travel Market London 2019 di London Inggris pada tanggal 2 sd 8 NOPEMBER 2019.

Sebanyak 61 industri pariwisata yang terdiri atas hotel/resor, operator tur, agen perjalanan dan DMC dari 11 propinsi antara lain Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan serta Kepulauan Riau menggencarkan promosi pariwisata di WTM gedung pameran excel London.

2) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

(1) Kegiatan Optimalisasi peran Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) di Kabupaten Bintan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 464.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 454.998.150,- atau 98,06%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan investasi di kawasan FTZ Bintan. Kegiatan ini berupa belanja pegawai untuk kepengurusan BPK Bintan. Selama tahun 2019 jumlah perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 121 izin.

(2) Kegiatan Optimasi pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Bintan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 195.126.000,- dan realisasi sebesar Rp. 194.640.554,- atau 99,75%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang baik jenis perizinan maupun non perizinan. Selama tahun 2019 sudah terbit 25 masterlist perizinan.

(3) Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.015.700,- dan realisasi sebesar Rp. 235.059.500,- atau 97,13%. Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebanyak 64 jenis perizinan. Izin terbit yang dikeluarkan DPMPSTSP pada tahun 2019

sebanyak 532 izin. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya SOP perizinan.

(4) Kegiatan Penyusunan indeks kepuasan masyarakat pelaku usaha perizinan di Kabupaten Bintan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.135.700,- dan realisasi sebesar Rp.37.051.500,- atau 99,77%. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya buku indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2019. Hasilnya adalah tersedianya data indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP. Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 adalah 84,01%.

(5) Kegiatan Update data perusahaan PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN di Kabupaten Bintan

Dengan alokasi anggaran Rp. 16.308.400,- dan realisasi sebesar Rp. 16.253.710,- atau 99,66%, Output kegiatan ini adalah terlaksananya update data perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Bintan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengolah data/informasi terkait perkembangan perusahaan/investasi yang ada di wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019. Adapun jumlah data perusahaan PMA sebanyak 117 perusahaan, dan data perusahaan PMDN sebanyak 82 perusahaan. Dari data perusahaan tersebut tersebar di beberapa Kecamatan yaitu di Kecamatan Bintan Timur sebanyak 30 perusahaan, Kecamatan Bintan Utara 22 perusahaan, Kecamatan Teluk Sebong 69 Perusahaan, Kecamatan Toapaya 6 perusahaan, Kecamatan Teluk Bintan 4 perusahaan, Kecamatan Seri Kuala Lobam 27 perusahaan, Kecamatan Bintan Pesisir 3 perusahaan, Kecamatan Gunung Kijang sebanyak 37 perusahaan, dan Kecamatan Mantang sebanyak 1 perusahaan.

(6) Kegiatan Pemantauan permasalahan investasi di Kabupaten Bintan

Dengan alokasi anggaran Rp. 53.398.940,- dan realisasi sebesar Rp. 52.211.140,- atau 97,78%, Output kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan permasalahan investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bintan. Selama tahun 2019 ada 44 PMA dan 11 PMDN yang telah dilakukan pemantauan dengan permasalahan yang beragam.

(7) Kegiatan Sosialisasi pelayanan perizinan investasi online

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perusahaan/masyarakat perorangan atau berbadan hukum dalam mengurus perizinan secara elektronik. Alokasi anggaran sebesar Rp. 260.657.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 256.835.590,- atau 98,53%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi online single submission (OSS) untuk pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 200 orang, dan sosialisasi pelayanan pengaduan secara online dalam OSS kepada pelaku usaha berbadan hukum sebanyak 50 orang/perusahaan di Kabupaten Bintan.

(8) Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu non perizinan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.361.000,- dan realisasi sebesar Rp. 108.371.626 atau 99,1%. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk sebanyak 20 jenis perizinan dan 15 template aplikasi sicantik cloud. Selama tahun 2019 ada 226 izin yang telah diterbitkan.

a. Permasalahan Dan Solusi

- (1) Masih kurangnya SDM aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Bintan, serta adanya pelaksanaan tugas ganda. Solusi : Perlu adanya penambahan SDM aparatur pada DPMPTSP Kabupaten Bintan

- (2) Tidak jelasnya status lahan di Kabupaten Bintan sehingga menghambat proses kegiatan promosi dan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan.

Solusi : adanya koordinasi dengan BPPPD dan BPN terkait status lahan di Kabupaten Bintan

- (3) Belum cukupnya alokasi anggaran pada penyelenggaraan kegiatan promosi

Solusi : Perlu adanya penambahan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan promosi

- (4) Rentang kendali pelaksanaan koordinasi antar OPD

Solusi : adanya satu kawasan yang menempatkan semua OPD di Kabupaten Bintan sehingga mempermudah koordinasi antara DPMPTSP dan OPD Kabupaten Bintan.

Solusi : Meningkatkan sinkronisasi internal Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan dan meningkatkan pemahaman Serikat Pekerja tentang ketentuan upah minimum.

3.1.2.10 Urusan Ketenaga Kerjaan

Dinas Tenaga Kerja merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan ketenagakerjaan. Berikut realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja tahun 2019 beserta narasi pelaksanaannya.

Tabel 3.48
Realisasi Program / Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan TA 2019

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Dana DPA/DPPA	KEUANGAN		FISIK		Ket
				Realisasi (Rp.)	(%)	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	925.729.000	706.696.925	76,34	100	100	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1030 lembar / 12 Bulan	5.000.000	4.890.000	97,8	100	100	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	5 Sarana	102.200.000	49.485.567	48,42	100	100	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 Org Pegawai Honorer / 1 Tenaga Pengelola Simda	115.964.000	86.342.000	74,46	100	100	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21 Jenis	20.000.000	19.979.080	99,90	100	100	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33 jenis	86.158.700	85.069.050	98,74	100	100	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis cetakan, 4 penggandaan	28.000.000	27.855.400	99,48	100	100	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Jenis	18.000.000	17.944.960	99,69	100	100	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18472 liter	134.996.300	80.148.410	59,37	100	100	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	7 honorer / 1 2 bulan	45.410.000	37.250.900	82,03	100	100	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	60 kali	200.000.000	162.369.558	81,18	100	100	

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Dana DPA/DPPA	KEUANGAN		FISIK		Ket
				Realisasi (Rp.)	(%)	Target	Realisasi	
11	Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	155 kali	170.000.000	135.362.000	79,62	100	100	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	827.370.300	800.519.690	96,75	100	100	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11 jenis	224.370.300	223.976.500	99,82	100	100	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9 jenis	200.000.000	199.756.700	99,88	100	100	
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	1 Bangunan	243.000.000	240.621.550	99,02	100	100	
4	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	6 Unit	70.000.000	50.599.210	72,28	100	100	
5	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	90.000.000	85.565.730	95,07	100	100	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	80%	6.960.000	6.958.600	99,98	100	100	
1	Pengsdaan pakaian khusus hari-hari tertentu	24 Stel	6.960.000	6.958.600	99,98	100	100	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80%	75.400.000	65.896.900	87,4	100	100	
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 perempuan, 3 laki-laki	75.400.000	65.896.900	87,4	100	100	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80%	78.341.530	75.791.399	96,74	100	100	
1	Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	9 Dokumen	78.341.530	75.791.399	96,74	100	100	
VI	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	80%	323.324.790	318.478.444	98,50	100	100	
1	Kebijakan Pengupahan dan Pengembangan Sistem Pengupahan Kab. Bintan	1 Dokumen	155.432.050	153.775.915	98,93	100	100	
2	Pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	20 Perusahaan	30.275.340	29.061.614	95,99	100	100	

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Dana DPA/DPPA	KEUANGAN		FISIK		Ket
				Realisasi (Rp.)	(%)	Target	Realisasi	
VII	Rapat Kebijakan Lembaga Kerja Sama Tripartit	1 Dokumen	137.617.400	135.640.915	98,56	100	100	
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	80%	136.389.130	134.424.097	98,56	100	100	
	Peningkatan Kapasitas Data Ketenagakerjaan	Dokumen / laporan	81.541.190	79.731.892	97,78	100	100	
VIII	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	50 orang	54.847.940	54.692.205	99,72	100	100	
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	80%	112.743.200	97.360.109	86,36	100	100	
	Penyediaan Fasilitas Serikat Pekerja	5 SP	67.296.500	54.913.170	81,6	100	100	
	Pembinaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	17 perusahaan	31.973.000	30.873.489	96,56	100	100	
	Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1 Dokumen	13.473.700	11.573.450	85,9	100	100	
IX	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	80%	900.964.470	889.802.218	98,76	100	100	
	Pelatihan keterampilan tenaga kerja	20 orang	245.000.000	242.120.412	98,82	100	100	
	Pelatihan Instalasi Listrik	35 Orang	165.964.470	164.549.066	99,15	100	100	
	Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat dan Angkut	32 Orang	245.000.000	241.875.981	98,72	100	100	
	Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat (Rigger)	32 Orang	245.000.000	241.256.759	98,47	100	100	
	Jumlah		3.387.222.420	3.095.928.382	90,06	100	100	

1) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan program

(1) Kegiatan Kebijakan Pengupahan dan Pengembangan Sistem Pengupahan Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dengan alokasi anggaran Rp. 155.432.050,- dan realisasi Rp. 153.775.915,- atau 98,93%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Pengupahan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan survey yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan . Hasilnya berupa 1 (satu) dokumen Penetapan UMK Kabupaten Bintan. Sistem pengupahan di Kabupaten Bintan dari tahun ketahun semakin membaik dengan adanya formula penentuan upah minimum kabupaten/kota melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengupahan Kabupaten Bintan yang terus meningkat. Pada tahun 2017 tingkat upah di Kabupaten Bintan tercatat Rp. 2.863.231,- dan pada tahun 2018 telah mencapai Rp. 3.112.618,- , dan pada tahun 2019 telah tercapai Rp. 3.648.714,- yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Nomor 965 Tahun 2019 Tanggal 29 Oktober 2019.

(2) Pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.275.340,- dan realisasi sebesar Rp. 29.061.614,- atau 95,99%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan Lembaga Kerja Sama Bipartit pada 20 perusahaan. Bentuk kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dengan turun langsung ke perusahaan-perusahaan. Melalui kegiatan ini hasil yang diharapkan adalah terbentuknya serta optimalnya fungsi Lembaga Kerja

Sama Bipartit. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit. Hingga tahun 2019 LKS Bipartit yang sudah terbentuk adalah 20 lembaga di perusahaan yang tersebar di Kabupaten Bintan.

(3) Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Lembaga Kerja Sama Tripartit

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 137.617.400,- dan realisasi sebesar Rp. 135.640.915,- atau 98,56%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi kebijakan lembaga kerjasama tripartit yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi UMK. Melalui kegiatan ini diharapkan optimalisasi fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Hasilnya berupa 1 dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Lembaga Kerja Sama Tripartit

2) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

(1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Data Ketenagakerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 81.541.190,- dan realisasi sebesar Rp. 79.731.892,- atau 97,78%, Output kegiatan ini adalah tersedianya data ketenagakerjaan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui petugas lapangan (pengumpul data) dari masing-masing desa/kelurahan, Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen data ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan yang disusun dalam bentuk buku Data Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan sebanyak 20 buku.

(2) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Tenaga Kerja

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dengan alokasi anggaran Rp. 54.847.940,- dan realisasi sebesar Rp. 54.692.205,- atau 99,72%, Output kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan informasi pasar kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Kecamatan Bintan Utara melalui penyuluhan penyebarluasan informasi pasar tenaga kerja kepada calon tenaga kerja sebanyak 50 orang, yang merupakan tenaga kerja pemula, Kegiatan ini juga berupa penyebarluasan informasi kebutuhan tenaga kerja kepada masyarakat.

3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(1) Penyediaan Fasilitas Serikat Pekerja

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.67.296.500,- dan realisasi Rp.54.913.170,- atau 81,6%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya persediaan fasilitas serikat pekerja. Sasarannya adalah 5 (lima) Serikat Pekerja (SP) yang ada di Kabupaten Bintan. Bentuk kegiatan ini adalah menciptakan sinergi serta memfasilitasi Serikat Pekerja agar pekerja dan pengusaha mengetahui dan memahami serta melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antara Serikat Pekerja dan pengusaha.

(2) Kegiatan Pembinaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 31.973.000,- dan realisasi Rp. 30.873.489,- atau 96,56%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja dan

pengusaha sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sehingga dapat tercipta keharmonisan hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha dan terhindar dari terjadinya perselisihan hubungan industrial. Ada 17 perusahaan yang dilakukan pembinaan terhadap PP dan PKB tersebut.

(3) Kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 13.473.700,- dan realisasi Rp. 11.573.450,- atau 85,9%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan permasalahan lainnya karena adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.

4) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

(1) Kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 245.000.000,- dan realisasi Rp. 242.120.412,- atau 98,82%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja (Pelatihan Bahasa Asing) untuk 20 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi Bahasa Asing (Bahasa Inggris).

(2) Kegiatan pelatihan dan sertifikasi operator angkat dan angkut

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 245.000.000,- dan realisasi Rp. 241.875.981,- atau 98,72%.

Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pelatihan operator pesawat angkat dan angkut untuk 32 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi dan kompetensi operator pesawat angkat dan angkut.

(3) Kegiatan pelatihan dan sertifikasi juru ikat (Rigger)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 245.000.000,- dan realisasi Rp. 241.256.759,- atau 98,47%. Output kegiatan ini adalah pelatihan dan sertifikasi juru ikat (Rigger) untuk 32 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi dan kompetensi juru ikat (Rigger).

(4) Kegiatan pelatihan Instalasi Listrik

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 165.964.470,- dan realisasi Rp. 165.549.066,- atau 99,15%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pelatihan instalasi listrik untuk 35 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi berbasis kompetensi (PBK) Instalasi Listrik Penerangan (Bangunan Rumah Sederhana).

b. Permasalahan Dan Solusi

- (1) Masih kurangnya SDM aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, serta adanya pelaksanaan tugas ganda.

Solusi : Perlu adanya penambahan SDM aparatur pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

- (2) Terbatasnya Lowongan Kerja Antar Kerja Local.

Solusi : melakukan kerjasama dengan perusahaan, melakukan pendekatan persuasif dengan pihak perusahaan untuk menyampaikan informasi lowongan kerja secara terbuka dan mengoptimalkan sosialisasi Kepres No. 4 Tahun

1980 tentang wajib lapor lowongan kerja ke perusahaan – perusahaan.

- (3) Kualifikasi keterampilan calon tenaga kerja belum memenuhi kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh penyedia kesempatan kerja.

Solusi : Pemenuhan kesempatan kerja yang dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kewirausahaan. Peningkatan akses terhadap informasi pasar kerja.

- (4) Masih banyaknya perselisihan hubungan industrial yang belum dapat diselesaikan secara Bipartit.

Solusi : Meningkatkan pemahaman hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara karyawan dan pengusaha dengan cara melaksanakan Pembinaan dan penyuluhan perundang - undangan ketenagakerjaan.

- (5) Usulan angka Upah Minimum Kabupaten Bintan ke Bupati masih ada perbedaan usulan antara pemerintah dan serikat pekerja.

Solusi : Meningkatkan sinkronisasi internal Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan dan meningkatkan pemahaman Serikat Pekerja tentang ketentuan upah minimum.

- (6) Masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan aturan ketenagakerjaan.

Solusi : Meningkatkan frekwensi dan efektifitas Pembinaan tentang peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada perusahaan.

- (7) Kurangnya jumlah pegawai teknis ketenagakerjaan seperti pegawai pengantar kerja dan Mediator.

Solusi : Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat Pegawai Pengantar Kerja dan Mediator.

Dari jumlah pencari kerja yang tercatat di Disnaker Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar 2.156 orang, sementara pencari kerja yang ditempatkan (kesempatan kerja) yang tersedia 1.311 orang, Dari data tersebut dapat disimpulkan juga bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan kurangnya lowongan pekerjaan bagi pekerja Antar Kerja Lokal (AKL).

Kasus perselisihan / persengketaan yang terjadi antara pengusaha dengan karyawannya dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama hanya sebesar 22,22% disebabkan antara lain karena tidak adanya kata sepakat antara pekerja yang berkasus dengan pengusaha sehingga diberikan anjuran oleh mediator, perlunya pembinaan kepada perusahaan tentang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yang akan menjadi rujukan pertama untuk kedua belah pihak ketika terjadi perselisihan.

Pada tahun 2019 jumlah kasus perselisihan atau persengketaan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 9 kasus yang melibatkan 13 tenaga kerja, 2 kasus yang melibatkan 3 tenaga kerja dapat diselesaikan dengan tanda bukti Perjanjian Bersama (PB) dan 7 kasus yang melibatkan 10 tenaga kerja diselesaikan dengan anjuran, 1 kasus dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tercatat sebanyak 8 kasus yang melibatkan 10 tenaga kerja, 2 kasus yang melibatkan 3 tenaga kerja dapat diselesaikan dengan tanda bukti Perjanjian Bersama (PB) dan 7 kasus yang melibatkan 7 tenaga kerja diselesaikan dengan anjuran, 1 kasus dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Masih adanya perusahaan yang belum melaporkan ketersediaan lowongan pekerjaan di perusahaannya sehingga menghambat dalam hal penyebaran informasi ketenagakerjaan. Perlunya peran pengantar kerja atau bidang ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan tentang Kepres nomor 4 tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan kerja.

3.1.2.11 Urusan Kebudayaan

Pecapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kelima** pada Tahun 2019 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Bintan untuk **Urusan Kebudayaan** adalah sebagai berikut:

1) **Jumlah Grup Kesenian Yang Di Bina 40 Group;**

Indikator jumlah grup kesenian yang di bina Tahun 2019 tercapai sebesar **40 Grup Kesenian**, Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah **35 Grup Kesenian**, adapun Rincian Data tersebut Sebagai Berikut :

Tabel 3.49 Data Sanggar Yang Di Bina

No	Nama Sanggar	Lokasi	Budaya
1	Sanggar Joget Dangkong Melayu Serumpun Bersatu	Gunung Kijang	Seni Budaya
2	Sanggar Sang Nila	Bintan Timur	Seni Tari
3	Sanggar Kreasi Guru	Bintan Timur	Seni Tari/Musik
4	Sanggar Tuah Pusaka	Bintan Timur	Seni Tari
5	Sanggar Sirih Delima	Bintan Timur	Kesamaan Fungsi
6	Sanggar Sri Bintan	Bintan Timur	Seni Tari
7	Sanggar Sirih Junjung	Bintan Timur	Seni Tari
8	Sanggar Tepak Sirih	Toapaya	Seni Tari
9	Sanggar Bintan Pelangi	Gunung Kijang	Seni Tari
10	Sanggar Kelana	Gunung Kijang	Seni Rupa/Kriya
11	Sanggar Kemilau	Sri Koala Lobam	Seni Tari
12	Sanggar Seni Teater Makyong Warisan	Bintan Timur	Seni Teater Makyong
13	Sanggar Bungsu Sakti	Mantang	Seni Teater Makyong
14	Sanggar Sri Penolak	Tambelan	Seni Tari
15	Sanggar Seni Bintan Penao	Teluk Bintan	Seni Tari
16	Sanggar Seni Sekapur Sirih	Bintan Utara	Seni Tari
17	Sanggar Tari Melayu Bertuah	Bintan Utara	Seni Tari
18	Sanggar Sinar Bintan Budaya	Bintan Utara	Kompang/Marawis
19	Sanggar Warisan Bunda	Bintan Timur	Seni Teater
20	Sanggar Bujang Dara	Bintan Timur	Tari Kreasi

No	Nama Sanggar	Lokasi	Budaya
21	Sanggar Sri Bintang Buana	Sri Koala Lobam	Seni Tari
22	Sanggar Mutiara Bintang	Sri Koala Lobam	Seni Tari
23	Sanggar Cempaka Putih	Sri Koala Lobam	Seni Tari
24	Sanggar Bintang Bertuah	Bintang Timur	Seni Tari
25	Sanggar Dang Merdu	Teluk Bintang	Seni Tari
26	Sanggar Bukit Siguntang	Teluk Bintang	Seni Tari
27	Sanggar Laksemana	Bintang Utara	Seni Tari
28	Sanggar Serampit	Bintang Timur	Seni Tari
29	Sanggar Gelora	Teluk Sebong	Seni Tari/Silat
30	Sanggar Langlang Buana	Teluk Sebong	Seni Tari
31	Sanggar Tari Pesona	Bintang Pesisir	Seni Tari
32	Sanggar Sekapur Sirih	Bintang Timur	Seni Tari
33	Lasqi	Bintang Utara	Seni Tari/Joged Dangkong
34	Madani Bintang	Toapaya	Seni
35	Karida Budaya	Gunung Kijang	Seni Tari/Musik
36	Sanggar Segak	Bintang Timur	Seni Musik
37	Kompas	Bintang Timur	Gambus
38	Sanggar Seloka Bertabuh	Mantang	Seni Musik
39	Intan Bestari	Teluk Sebong	Seni Tari
40	Bungsu Muda Legak Cahaya	Bintang Timur	Seni

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun 2019

2) **Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dipelihara 3 Cagar Budaya**

Indikator jumlah cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Tahun 2019 tercapai sebesar **4 Cagar Budaya**, adapun Rincian Data tersebut Sebagai Berikut :

Tabel 3.50 Cagar Budaya di Kabupaten Bintang

No	Nama Cagar Budaya	Jumlah
1.	Situs Bukit Kerang	1
2.	Situs Sejarah Dapur Arang	1
3.	Situs Rumah Adat Melayu di Berakit	1

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintang Tahun 2019

Dalam penyelenggaraan Urusan Kebudayaan adapun program kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Bintan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.674.312.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.559.414.900,-. atau 82,96 %. Output Program yaitu Terlaksananya fasilitas perlindungan benda warisan budaya. Outcome program adalah tersedianya fasilitas perlindungan benda warisan budaya.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengembangan Museum Bahari

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.022.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.99.387.300,- atau 86,41%. Output kegiatan adalah terpeliharanya museum bahari dan Benda Warisan Budaya. Outcome Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan museum bahari.

(2) Pemeliharaan Cagar Budaya Bintan Dan Situs-Situsnya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.022.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.99.387.300,- atau 86,41%. Output kegiatan adalah Terlaksananya fasilitas perlindungan benda warisan budaya. Outcome Tersedianya fasilitas perlindungan benda warisan budaya.

(3) Pemeliharaan Museum Bahari Bintan (Dak Non Fisik)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.022.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.99.387.300,- atau 86,41%. Output kegiatan adalah Terlaksananya fasilitas perlindungan benda warisan

budaya. Outcome Tersedianya fasilitas perlindungan benda warisan budaya.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Status aset lahan yang masih dimiliki oleh perseorangan atau PT;
- b) Keterlambatan Petunjuk Teknis DAK Non Fisik dari Kemendikbud sehingga mempengaruhi progres pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan seperti kurator museum ataupun tenaga ahli yang mahir dalam berbahasa Inggris ataupun berbahasa China.

(2) Solusi

- a) Perlunya pembebasan lahan disekitar cagar budaya, sehingga memudahkan dalam perawatan dan pelestarian;
- b) Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan seperti Kurator Museum dan Tenaga Ahli yang mahir dalam berbahasa Inggris ataupun berbahasa China.

2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.555.364.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.188.767.195,-. atau 85,65%. *Outcome* program ini adalah terpeliharanya keragaman budaya di Kabupaten Bintan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengembangan dan Seni Budaya Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.262.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.95.008.332,- atau 36,21%, Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya pengembangan seni budaya. Outcome Kegiatan yaitu Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni budaya.

(2) Partisipasi Kegiatan Parade Tari Kepri

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp.191.090.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.151.885.500,- atau 79,48%. *Output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya Partisipasi Kegiatan Parade Tari Provinsi Kepulauan Riau. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatkan Potensi Atraksi Budaya di Kabupaten Bintan, kegiatan ini dimaksudkan untuk Meningkatkan dan memperkenalkan potensi atraksi budaya (Seni Tari) yang ada di Kabupaten Bintan. Kegiatan Partisipasi Kegiatan Parade Tari Kepulauan Riau yang dilaksanakan dengan membawa perwakilan kelompok sanggar seni peraih juara I pada kegiatan Festival Tari Kabupaten Bintan untuk berlaga di Parade Tari Tingkat Provinsi Kepri agar dapat menjadi perwakilan terbaik dari Kabupaten Bintan yang akan memenangkan Kompetisi seni tari dan menjadi perwakilan Provinsi Kepri pada Parade Tari Nasional. Kegiatan Partisipasi Mengikuti Parade Tari Tingkat Provinsi Kepri tahun 2019 dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Komplek Gedung Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

(3) Pentas Kesenian Rakyat

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp.448.336.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.375.228.000,- atau 83,69%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Kegiatan Pentas Kesenian Rakyat seperti Pagelaran Wayang Kulit dan Pagelaran Kuda Kepang. Hasil kegiatan ini adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan kesenian, sehingga dapat melestarikan Adat Istiadat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kabupaten Bintan agar seluruh masyarakat Kabupaten Bintan dapat mengetahui dan terutama bagi generasi muda, dapat mempelajari dan melestarikannya sekaligus menangkal adat/budaya asing agar tidak berkembang di kabupaten Bintan.

(4) Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp.995.904.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.899.664.063,- atau 94,12 %. *Output* dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Peningkatan apresiasi pawai budaya. Hasil kegiatan ini adalah Terwujudnya Pemeliharaan Kesenian daerah, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan eksistensi dan potensi daerah Kabupaten Bintan dan Kebudayaannya, mengelola keragaman budaya yang beragam di kab. Bintan dn menjaga nilai-nilai budaya serta mempertahankan khazanah Kabupaten Bintan yang semakin baik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan ikut berpartisipasi pada kegiatan Pawai Budaya tersebut sebagai wujud pengelolaan keragaman budaya yang ada di Kabupaten Bintan dan merupakan wujud partisipasi dalam MTQ VIII tingkat provinsi Kepri yang di selenggarakan setiap tahun serta untuk mengingatkan internalisasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Bintan.

(5) Festival Tari

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.197.684.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.189.222.800,- atau 95,72%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Festival Tari. Hasil kegiatan ini adalah, kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi bagi para pelaku seni tari (Sanggar-sanggar) untuk terus mempertahankan dan mengeksplor ketrampilan seni tari agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang dimiliki. Kegiatan Festival tari Kabupaten Bintan ini dilaksanakan demi meningkatkan kualitas sumber daya di Bidang seni tari dan kebudayaan dengan menampilkan tarian dari tiap sanggar-sanggar seni, diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas, kualitas, kuantitas serta ketrampilan seni dari tiap-tiap sanggar yang ada di Kabupaten Bintan.

(6) Gebyar Budaya Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.477.758.500,- atau 95,55%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Gebyar Budaya Kab. Bintan. Hasil kegiatan ini adalah meningkatnya potensi atraksi budaya di Kabupaten Bintan. Kegiatan Gebyar Budaya Bintan dilaksanakan pada 2 (dua) Kecamatan dengan pelaksanaan kegiatan dimasing – masing tempat selama 2 (dua) hari yaitu di Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Timur dengan waktu yang berbeda dengan menampilkan semua potensi kebudayaan yang ada di Kabupaten Bintan, dimana kegiatan ini merupakan wujud dari aspiratif atau keinginan masyarakat yang tergabung dari beberapa pelaku seni dan budaya yang selama ini mereka tampil tanpa di fasilitasi oleh Pemerintah.

Kegiatan Gebyar Budaya ini banyak menghimpun Kelompok Seni dan Budaya yang ada di Kabupaten Bintan, yang terdiri dari beberapa Suku dan Kebudayaan diantaranya Suku Flores, Jawa, Melayu, Batak, Minang, Bawean dan Etnis Cina, kegiatan ini juga di ditutup dengan pementasan Wayang Kulit semalam suntuk di dua tempat yang berbeda yaitu di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Timur.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Kurangnya koordinasi mengenai perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya, sehingga mengakibatkan tumpang tindihnya anggaran yang berimbas pada penyerapan anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.
- b) Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi pada kegiatan festival tari tidak sesuai dengan rencana.

(2) Solusi

- a) Perlunya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan OPD Terkait sehingga lebih efisien anggaran dan tepat sasaran;
- b) Perlunya koordinasi dengan Dewan Kesenian Kabupaten Bintan dalam menentukan jumlah peserta tari yang akan mengikuti Kegiatan Festival Tari tingkat Kabupaten Bintan.

3.1.2.12 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

A. Urusan Kepemudaan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Ke Tujuh (disesuaikan dengan Misi RPJMD 2016 – 2021) pada Tahun 2019 terhadap penyeleggaran urusan pemerintah Kabupaten Bintan untuk Urusan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.51 Indikator Capaian RPJMD Bidang Kepemudaan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			
a) Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	70 Organisasi	73 Organisasi	100 %
b) Jumlah Pemuda yang mandiri dan berdaya saing	54 Pemuda	60 Pemuda	100%

B. Urusan Olahraga

Pecapaian indikator kinerja daerah pada Misi Ke Tujuh (disesuaikan dengan Misi RPJMD 2016 – 2021) pada Tahun 2018 terhadap penyeleggaran urusan pemerintah Kabupaten Bintan untuk Urusan Olahraga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.52 Indikator Capaian RPJMD Bidang Olahraga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olahraga			
a) Jumlah Prestasi Olahraga yang di raih	45 Prestasi	109 prestasi	100 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
a) Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Standar	58 Unit	69 Unit	100 %

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan pada tahun 2019 ini telah melaksanakan beberapa program / kegiatan yang di biayai oleh APBD Bintan. Program- program yang telah di rencanakan dan diuraikan seperti tersebut diatas, ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan, hal ini di karenakan adanya pelimpahan wewenang kepada Dinas atau Instansi yang lain seperti Program Pembinaan dan Pemanfaatan Migas yang dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi di Sekretariat Daerah,

Kegiatan merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelaksanaan PASKIBRAKA di Kabupaten Bintan dan Pengiriman PASKIBRAKA Ke Tk. Povinsi Kepulauan Riau

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.100.190.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.030.675.380,- atau 93,68 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengibaran bendera pusaka oleh paskibraka. Hasil kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pengibaran Bendera Pusaka oleh Paskibraka, terkait kegiatan ini untuk mempersiapkan peserta pengibaran Bendera Pusaka pada HUT RI 17 Agustus, serta menumbuhkan rasa kebangsaan kepada generasi muda dan mengajarkan nilai-nilai sejarah kepadanya. Kegiatan ini dilaksanakan di Relif Antam Kijang kabupaten Bintan peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari 17 orang putra dan 16 orang Putri yang berjumlah 33 orang Pelajar

SLTA di Wilayah Kabupaten Bintan.

Tabel 3.53 Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Paskibraka

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALIASI %
1.	Honorarium Peserta Kegiatan	23.720.000	23.720.000	100%
2.	Honorarium Tim/Kelompok Kerja	44.480.000	44.455.000	99.94%
3.	Honorarium Peserta Kegiatan	38.610.000	38.610.000	100%
4.	Belanja Obat-Obatan	938.300	930.600	99.17%
5.	Belanja Seminar Kit	6.451.500	6.425.100	99.59%
6.	Belanja Dekorasi Dan Dokumentasi / Publikasi	10.250.000	10.249.250	99.99%
7.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	14.825.000	98.83%
8.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.050.000	193.048.850	99.99%
9.	Belanja Cetak	6.788.000	6.688.000	98.52%
10.	Belanja Penggandaan	400.200	400.200	100%
11.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000	0	0%
12.	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	82.800.000	82.096.000	99.14%
13.	Belanja Sarana Darat Sewa Mobilitas	5.600.000	5.500.000	98.21%
14.	Belanja Dan Makanan Minuman Rapat	1.200.000	1.080.000	90%
15.	Belanja Dan Makanan Minuman	340.627.000	276.281.280	81.10%
16.	Belanja Pakaian Olahraga	87.510.000	87.483.000	99.96%
17.	Belanja Barang Souvenir	6.600.000	6.534.000	99%
18.	Belanja Pakaian Khusus Kegiatan	165.865.000	165.749.100	99.93%
19.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber/ Fasilitator Pns	14.000.000	13.600.000	97.14%
20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber/ Fasilitator Non Pns	31.900.000	31.600.000	99.05%
21.	Belanja Transport Lokal	21.400.000	21.400.000	100%

Capaian Realisasi Laporan Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelaksanaan PASKIBRAKA di Kabupaten Bintan dan Pengiriman PASKIBRAKA Ke Tk. Povinsi Kepulauan Riau

(Pendidikan dan Pelatihan) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dengan Pagu Rp.1.100.190.000,- yang Target Fisiknya 100% dan Realisasi Fisik 95,24%, Target Keuangan 100% dan Realisasi Keuangan 93,68%. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Pelaksanaan PASKIBRAKA di Kabupaten Bintan dan Pengiriman PASKIBRAKA Ke Tk. Povinsi Kepulauan Riau (Pendidikan dan Pelatihan) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan (Daftar terlampir). Hasil Pelaksanaan Kegiatan 1. Pelaksanaan PASKIBRAKA di Kabupaten Bintan dan Pengiriman PASKIBRAKA Ke Tk. Povinsi Kepulauan Riau (Pendidikan dan Pelatihan) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan.

(2) Temu Wicara Kepemudaan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- , serta realisasi anggaran sebesar Rp. 158.197.800,- atau 94,12 %. Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya *Temu Wicara Kepemudaan* di kalangan Generasi Muda Kab. Bintan. Hasil dari Kegiatan Temu Wicara Kepemudaan diarahkan agar para Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kab. Bintan khususnya pemuda untuk dapat terus meningkatkan rasa nasionalisme dalam mengisi pembangunan daerah sesuai dengan Tema Hari Sumpah Pemuda ke-90 yaitu “BANGUN PEMUDA SATUKAN INDONESIA”. Penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Temu Wicara Kepemudaan ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.54 Penyerapan Anggaran Kegiatan Temu Wicara
Kepemudaan**

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI %
1.	Honorarium Tim/Kelompok Kerja	6.450.000	6.450.000	100%
2.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi / Publikasi	12.965.000	12.915.000	99.61%
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000	2.850.000	100%
4.	Belanja Cetak	7.600.000	7.590.000	99.86%
5.	Belanja Penggandaan	1.200.000	1.200.000	100%
6.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000	800.000	100%
7.	Belanja Sewa Tenda dan Perlengkapannya	1.500.000	1.485.000	99%
8.	Belanja Sewa Kursi Susun/Stacking	8.000.000	7.920.000	99%
9.	Belanja Sewa Sound System	3.000.000	2.970.000	99%
10.	Belanja Sewa Meja	375.000	375.000	100%
11.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	3.740.000	99.73%
12.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.810.000	37.782.800	99.92%
13.	Belanja Sewa Pakaian Bercorak Kesenian, Kebudayaan	8.000.000	7.920.000	99%
14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS	2.550.000	2.550.000	100%
15.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS	1.950.000	1.650.000	84.61%
16.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	150.000.000	60.000.000	40%
17.	Belanja Transport lokal	1.200.000	0	0%

Capaian Realisasi Laporan Fisik dan Keuangan Kegiatan Temu Wicara Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dengan pagu Rp. 250.000.000,- yang target fisiknya 100% dan realisasi fisik 94,12%, Target keuangan 100% dan Realisasi Keuangan 63,28%. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Temu Wicara Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Daftar Terlampir). Hasil Pelaksanaan

Kegiatan Temu Wicara Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2018. Hasil dari terselenggaranya kegiatan Temu Wicara Kepemudaan adalah menghasilkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kab. Bintan khususnya pemuda untuk dapat terus meningkatkan rasa nasionalisme.

(3) Pelatihan Pengembangan Kepemudaan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.739.800,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.027.300,- atau 98,45%. Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Kegiatan Tentang Peraturan Lembaga Kepemudaan 2018. Kegiatan ini dilaksanakan dan dibiayai oleh APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.739.300,-. Penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Pemuda ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.55 Penyerapan Anggaran Kegiatan Pelatihan Pengembangan Pemuda

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	Honorarium Peserta Kegiatan Non PNS	21.000.000	21.000.000	100
2	Belanja Seminar Kit	15.890.000	15.554.000	97,88
3	Belanja Dokumentasi/ Publikasi (Iklan Media Cetak)	3.551.800	3.000.000	84,46
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000	1.350.000	96,42
5	Belanja Cetak	2.060.000	2.027.300	98,41
6	Belanja Penggandaan	450.000	450.000	100
7	Belanja Sewa Gedung	3.000.000	3.000.000	100
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	600.000	100
9	Belanja Makan Minum Rapat	300.000	300.000	100
10	Belanja Makan Minum Kegiatan	26.406.000	26.080.000	98.76

NO	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
11	Belanja Baju Batik Tradisional	15.200.000	14.784.000	97,26
12	Belanja JASA Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/ fasilitator PNS	1.794.000	1.794.000	100
13	Belanja JASA Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber /fasilitator Non PNS	3.888.000	3.888.000	100
14	Belanja Transportasi Lokal	15.200.000	15.200.000	100
JUMLAH		110.739.800	109.027.300	98,45%

Capaian Realisasi Laporan Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dengan pagu Rp. 110.739.300,- yang target fisiknya 100% dan realisasi fisik 100%, Target keuangan 100% dan Realisasi Keuangan 98.45%. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelatihan tentang peraturan lembaga kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Daftar Terlampir). Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019. Dokumen Monitoring Kegiatan Pelatihan Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Daftar Terlampir). Hasil dari terselenggaranya kegiatan Pelatihan Pengembangan Pemuda adalah terbentuknya organisasi kepemudaan yang kompeten di kabupaten Bintan.

(4) Pelatihan ESQ Bagi Pemuda Kabupaten Bintan

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 114.751.591,- atau 93,75 %. Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pelatihan ESQ di Kab. Bintan. Hasil Kegiatan Pelatihan Esq

bagi Pemuda terdiri dari unsur mahasiswa dan pemuda Kab. Bintan. Maksud dari Pelatihan adalah mengembangkan kepribadian untuk membentuk karakter tangguh dan memadukan konsep kecerdasan intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spritual (SQ) secara terintegrasi dan transendental. Sehingga hasil dari Pelatihan ini peserta diarahkan untuk dapat mencapai nilai-nilai dasar tersebut dan membantu membangkitkan kekuatan tersembunyi serta mengarahkan seluruh potensi dirinya untuk kehidupan dan pekerjaan yang lebih produktif, lebih aktif dan lebih berhasil sesuai dengan tema Pelatihan adalah Peran Mahasiswa dan Pemuda Untuk Satukan Visi dan Misi Menuju Bintan Gemilang. Kegiatan Pelatihan Esq Untuk Mahasiswa Dan Pemuda dengan waktu pelaksanaan di Bhadra Resort and Convention Hall Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Esq Bagi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.56 Penyerapan Anggaran Pelatihan ESQ

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1.	Honorarium Peserta Kegiatan	4.000.000	4.000.000	100%
2.	Belanja Seminar Kit	11.680.000	11.668.800	99.90%
3.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi/ Publikasi	4.735.000	4.685.000	98.94%
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	2.500.000	100%
5.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.850.000	19.575.191	98.61%
6.	Belanja Cetak	1.600.000	1.597.200	99.82%
7.	Belanja Penggandaan	600.000	375.000	100%
8.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000	3.000.000	100%
9.	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	19.035.000	18.800.000	98.76%
10.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000	800.000	100%
11.	Belanja Makanan dan	825.000	825.000	100%

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
	Minuman Rapat			
12.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.175.000	22.969.000	99.11%
13.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.250.000	12.181.400	99.44%
14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Fasilitator PNS	4.800.000	4.800.000	100%
15.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/ Fasilitator Non PNS	6.750.000	6.750.000	100%
16.	Belanja Transport Lokal	9.400.000	0	0%

Capaian Realisasi Laporan Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelatihan Esq Bagi Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dengan pagu Rp. 125.000.000,- yang target fisiknya 100% dan realisasi fisik 93,75%, Target keuangan 95,2% dan Realisasi Keuangan 91.80%. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelatihan Esq Bagi Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Daftar Terlampir). Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Esq Bagi Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019 Hasil dari terselenggaranya kegiatan Pelatihan Esq Bagi Pemuda adalah menghasilkan Mahasiswa dan Pemuda yang lebih produktif, lebih aktif dan lebih berhasil.

(5) Jumpa Bakti Bersama (JUMBARA)

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 258.314.900,- atau 86,10 %. Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Jumpa Bakti Bersama (JUMBARA) di Kab. Bintan. Hasil Kegiatan Jumpa Bakti Bersama (JUMBARA) adalah meningkatkan dan menumbuh kembangkan peran serta

Pemuda dalam menciptakan Lingkungan hijau dan asri dalam mewujudkan Bintang Gemilang.

Penyerapan anggaran yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Kegiatan Jumpa Bakti Bersama (JUMBARA) ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57 Penyerapan Anggaran Kegiatan Jumpa Bakti Bersama

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL %
1.	Honorarium Peserta Kegiatan	28.000.000	28.000.000	100%
2.	Honorarium Tim/Kelompok Kerja	3.220.000	3.220.000	100%
3.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.760.000	1.716.000	97.50%
4.	Belanja Obat-obatan	1.050.000	1.045.000	99.52%
5.	Belanja Seminar Kit	18.900.000	18.749.500	99.20%
6.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi/ Publikasi	5.500.000	4.988.500	90.70%
7.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.900.000	33.600.400	50.98%
8.	Belanja Cetak	3.350.000	3.338.500	99.65%
9.	Belanja Penggandaan	900.000	900.000	100%
10.	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	51.600.000	51.366.000	99.54%
11.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.600.000	7.535.000	99.14%
12.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.188.000	99%
13.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	52.809.000	51.286.000	97.11%
14.	Belanja Pakaian Olahraga	22.848.000	22.836.000	99.94%
15.	Belanja Barang Souvenir	3.563.000	3.553.000	99.71%
16.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Fasilitator PNS	15.400.000	15.400.000	100%
17.	Belanja Transport Lokal	16.400.000	0	0%

Capaian Realisasi Laporan Fisik dan Keuangan Kegiatan Jumpa Bakti Bersama (JUMBARA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dengan pagu Rp. 300.000.000,- yang target fisiknya 100% dan realisasi fisik 92,94%, Target

keuangan 100% dan Realisasi Keuangan 86,10%. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Jumpa Bakti Bersama (JUMBARA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Daftar Terlampir).

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Permasalahan yang di hadapi pelaksanaan paskibraka dalam pelaksanaan kegiatannya adalah kurangnya jadwal pendidikan dan pelatihan seharusnya 30 hari, jadwal yang ada Cuma 18 hari
- b) Pelaksanaan kegiatan Temu Wicara Kepemudaan berjalan lancar tetapi sempat terkendala karena sulitnya menghubungi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kab. Bintan yang akan mengikuti kegiatan dimaksud karena berasal dari seluruh Kecamatan di Kab. Bintan.
- c) Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Esq Bagi Pemuda berjalan lancar tetapi sempat terkendala karena sulitnya mencari peserta dari Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan dimaksud karena berasal dari Tempat Kuliah dari beberapa daerah di Indonesia.
- d) Pelaksanaan kegiatan Jumpa Bakti Bersama (JUMBARA) berjalan lancar tetapi sempat terkendala karena sulitnya mencari peserta dari Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan dimaksud karena berasal dari Tempat Kuliah dari beberapa daerah di Indonesia.

(2) Solusi

- a) Solusinya dengan penambahan jadwal kegiatan
- b) Melakukan pendekatan kepada Ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

- c) Melakukan pendekatan kepada Ketua dari masing-masing Himpunan Mahasiswa di daerah tempat kuliah.

2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.743.339,- atau 93,37%. Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda (Mesin Digital Printing). Kegiatan ini dibiayai oleh APBD-P Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-. Penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.58 Penyerapan Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL %
1.	Honorarium Peserta Kegiatan	8.000.000	0	0%
2.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi / Publikasi	3.700.000	3.700.000	100%
3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.300.000	11.663.339	94.82%
4.	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	176.000.000	171.380.000	93.37%

Capaian Realisasi Laporan Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dengan pagu Rp. 200.000.000,- yang target fisiknya 100% dan realisasi fisik 100%, Target keuangan 100% dan Realisasi Keuangan 93.37%. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pelatihan

Keterampilan Bagi Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Daftar Terlampir). Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019. Dokumen Monitoring Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2019 (Daftar Terlampir). Hasil dari terselenggaranya kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda adalah Pengadaan Mesin Digital Printig agar pemuda dapat berperan serta dalam Peningkatan Keterampilan bagi pemuda di kabupaten Bintan.

3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan Atlet

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.740.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.435.300,- atau 99,06 %. Output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pembinaan Atlet. Hasil kegiatan ini adalah Tersedianya Atlet Olahraga untuk 10 (Sepuluh) Cabang Olahraga yang ada di Bintan, terkait kegiatan ini untuk Ikut serta dalam Even Perlombaan POPDA tingkat Provinsi Kepri di Tingkat Pelajar yang ada di Kepulauan Riau. Pemusatan pembinaan atlet terbagi di beberapa tempat sesuai dengan masing-masing Cabang Olahraga, untuk cabang olahraga renang pemusatan pelatihan berada di kolam renang Melayu berdendang, Cabang olahraga Basket di Lapangan Bola Basket Tanjung Uban, Cabang Olahraga sepak bola di pusatkan di lapangan sepak bola Demang Lebar daur dan Cabang Olahraga Bulu Tangkis dipusatkan di lap.Bulutangkis Kijang, Cabang Olahraga Pencak Silat di

Kecamatan Gunung Kijang dan beberapa tempat untuk Cabang Olahraga lainnya. Sebelum mengikuti POPDA, atlet-atlet terlebih dahulu dilakukan pembinaan juga dilakukan dan dipilih melalui musyawarah bersama dengan BAPOPSI Kecamatan dan Kabupaten Bintan. Hasil / Capaian Pelaksanaan Kegiatan pertama berupa penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Atlet ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.59 Penyerapan Anggaran Pembinaan Atlet

No	Uraian	PAGU ANGGARAN		REALISASI		PERSENTASI (%)
1	Honorarium Peserta Kegiatan (Uang Saku Harian)	Rp	32.560.000	Rp	32.560.000	100,00%
2	Belanja Peralatan Olahraga	Rp	2.250.000	Rp	2.244.000	99,73%
3	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi/Publikasi	Rp	2.700.000	Rp	2.700.000	100,00%
4	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp	12.780.000	Rp	12.580.000	98,44%
5	Belanja Cetak	Rp	650.000	Rp	600.000	92,31%
6	Belanja Pengandaan	Rp	300.000	Rp	300.000	100,00%
7	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp	4.000.000	Rp	3.795.000	94,88%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp	3.200.000	Rp	3.190.000	99,69%
9	Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	100,00%
10	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp	44.500.000	Rp	44.055.000	99,00%
11	Belanja Pakaian Olahraga	Rp	20.280.000	Rp	19.891.300	98,08%
12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS	Rp	14.520.000	Rp	14.520.000	100,00%
Jumlah		Rp. 138.740.000		Rp. 137.435.300		99,06%

(2) Lomba Gerak Jalan Tri Lomba Juang dalam HUT Kemerdekaan RI

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.050.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.190.876.900 atau 96,38 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Lomba gerak jalan memperingati HUT Kemerdekaan RI. Hasil kegiatan terlaksana secara sistemik, terpadu, terarah

dan terprogram dengan jelas dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti : (1) Tersedianya Peserta gerak jalan dan (2) Tersedianya anggaran yang cukup. Adanya program yang berjenjang dan berkelanjutan, di tunjang dengan adanya anggaran yang mencukupi agar dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat juang. Lomba Gerak Jalan ini di bagi 3 kategori yaitu 5 KM, 8 KM dan 17 KM. Dari 3 kategori total jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 428, dengan rincian 5 KM sebanyak 65 peserta, 8 KM sebanyak 226 peserta dan 17 KM sebanyak 137 peserta. Tempat dan waktu penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan di Tanjung Uban Kab. Bintan di mulai dari pagi hingga malam. Hasil / Capaian Pelaksanaan Kegiatan dalam penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Lomba Gerak Jalan Tri Lomba Juang dalam HUT Kemerdekaan RI ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.60 Penyerapan Anggaran Lomba Gerak Jalan Tri Lomba Juang Hut Kemerdekaan

NO	KODE BELANJA	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL %
1.	5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	4.830.000	4.830.000	100%
2.	5.2.1.02.05	Honorarium Tim Kelompok Kerja	15.000.000	15.000.000	100%
3.	5.2.1.02.23	Belanja Barang Penunjang Perlombaan	20.500.000	19.778.000	96.47%
4.	5.2.1.03.15	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi/Publikasi	8.820.000	3.740.000	42.40%
5.	5.2.1.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.650.000	8.270.000	95.60%
6.	5.2.2.34.01	Belanja Cetak.	23.800.000	23.604.900	99.18%
7.	5.2.2.34.02	Belanja Penggandaan	591.000	591.000	100%
8.	5.2.2.36.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000	3.960.000	99%
9.	5.2.2.38.15	Belanja Sewa Tenda dan Perlengkapannya.	5.000.000	4.950.000	99%
10.	5.2.2.38.16	Belanja Sewa Kursi Susun/Stacking	2.500.000	2.475.000	99%
11.	5.2.2.38.17	Belanja Sewa Sound System.	3.000.000	2.750.000	91.66%

NO	KODE BELANJA	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REAL %
12.	5.2.2.39.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat.	4.000.000	3.960.000	99%
13.	5.2.2.39.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan.	7.234.000	7.068.000	97.70%
14.	5.2.2.42.04	Belanja Pakaian Olahraga .	10.125.000	9.900.000	97.77%
15.	5.2.2.68.02	Uang Hadiah Perlombaan/Turnamen/ Pertandingan.	80.000.000	80.000.000	100%
Jumlah			198.050.000	190.876.900	96,37%

(3) Turnamen Bola Volly Bupati CUP

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.292.565.100 atau 97,52 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Turnamen Bola Volly. Hasil kegiatan ini adalah Tersedianya Atlet Bola Volly, terkait kegiatan ini untuk dapat mencapai prestasi atlet bola voly, namun harus secara sistemik, terpadu, terarah dan terprogram dengan jelas. keberhasilan atlet yang sistemik, terpadu, terarah dan terprogram dengan jelas dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti: (1) Tersedianya Atlet Potensial (Talenta Athletes) yang mencukupi, (2) Tersedianya Pelatih Profesional dan dapat menerapkan IPTEK, (3) Tersedianya sarana dan Prasarana kelengkapan olahraga yang memadai dan (4) Adanya program yang berjenjang dan berkelanjutan, ditunjang dengan adanya anggaran yang mencukupi dan hubungan yang baik antara semua pihak (Atlet, Pelatih, Pembina, pengurus, Pengprov, Koni dan Pemerintah); Pemusatan Turnamen Bola Volly Bupati CUP di Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara.

Hasil / Capaian Pelaksanaan Kegiatan berupa Penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Turnamen Bola Volly Bupati Bintan CUP.

(4) Jalan Santai dan Senam Sehat

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 246.015.800,- atau 98,41 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Jalan Santai dan Senam Sehat. Hasil kegiatan ini untuk memberikan motivasi masyarakat berolahraga serta menumbuh kembangkan bakat-bakat olahraga masyarakat, mempererat persaudaudaraan antara warga, menumbuh kembangkan sifat percaya diri, dan kekompakan sehingga dapat menumbuh kembangkan generasi muda yang berprestasi, jelas dapat dilihat dri beberapa faktor yang mempengaruhi seperti:

- 1) Tersedianya peserta senam sehat yang profesional;
- 2) Tersedianya sarana dan Prasarana kelengkapan senam yang memadai;
- 3) Adanya program yang berjenjang dan berkelanjutan, di tunjang dengan adanya anggaran yang mencukupi dan hubungan yang baik antara semua pihak (peserta, Pelatih, Pembina, pengurus, Pengprov, Koni dan Pemerintah);

Pemusatan Jalan Santai dan Senam Sehat di Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara. Adapun Hasil / Capaian Pelaksanaan Kegiatan adalah penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Jalan Santai dan Senam Sehat ini adalah:

(6) Turnamen Golf Bupati Bintan Cup

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp.149.653.000,- atau 99,77 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Turnamen Golf. Di Kab. Bintan. Hasil kegiatan ini adalah

Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Olahraga, terkait kegiatan ini untuk memberikan motivasi masyarakat berolahraga serta menumbuh kembangkan bakat-bakat olahraga masyarakat, mempererat persaudaudaraan antara warga, menumbuh kembangkan sifat percaya diri dan kekompakan sehingga dapat menumbuh kembangkan generasi muda yang berprestasi.

Tabel 3.61 Penyerapan Anggaran Turnamen Golf Bupati Bintang Cup

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp 10.400.000	Rp 10.400.000	100,00%
2	Belanja Cetak	Rp 600.000	Rp 600.000	100,00%
3	Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp 2.000.000	Rp 1.980.000	99,00%
4	Belanja Pakaian Olahraga	Rp 13.000.000	Rp 12.980.000	99,85%
5	Belanja Barang Piala	Rp 11.000.000	Rp 10.967.000	99,70%
6	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan/Event Organizer	Rp100.000.000	Rp 99.726.000	99,73%
7	Uang Hadiah Perlombaan/Turnamen /Pertandingan	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	100,00%
JUMLAH		Rp 150.000.000	Rp 149.653.000	99,77%

(7) Balap Motor (Road Race)

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 208.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.203.949.600,- atau 98,05 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Balap Motor (Road Race). Hasil kegiatan ini adalah Meningkatkan Kapasitas Pembalap serta Sarana dan Prasarana Balap Motor, terkait kegiatan ini untuk memberikan motivasi pembalap serta menumbuh

kembangkan bakat-bakat pembalap muda, mempererat persaudaraan, menumbuhkan kembangkan sifat percaya diri, dan kekompakan sehingga dapat menumbuhkan kembangkan generasi muda yang berprestasi. Kegiatan Balap Motor Race merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan pada tahun 2019, kegiatan Road Race merupakan kejuaraan balap sepeda motor yang dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi didalam lintasan jalan aspal yang di pacu dengan mengelilingi sirkuit sesuai yang di perlombakan , dimana balapan ini dilakukan secara serentak bersama sama.

Hasil / Capaian Pelaksanaan Kegiatan dalam hal Penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Balap Motor (Road Race) ini adalah :

Tabel 3.62 Penyerapan Anggaran Kegiatan Balap Motor

NO	KODE BELANJA	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERS ENTA SE (%)
1	5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1,610,000	1,610,000	100
2	5.2.2.02.23	Belanja Bahan Penunjang Perlombaan	43,280,000	43,203,600	99,82
3	5.2.2.03.15	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi/Publikasi	5,500,000	5,445,000	99,00
4	5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	5,000,000	3,032,000	60,64
5	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,000,000	11,000,000	100
6	5.2.2.34.01	Belanja Cetak	18,500,000	18,441,500	99,68
7	5.2.2.34.02	Belanja Penggandaan	300,000	300,000	100
8	5.2.2.35.05	Belanja sewa kamar hotel/Penginapan	5,250,000	4.196.500	79,93
9	5.2.2.36.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,110,000	4,092,000	99,56
10	5.2.2.38.15	Belanja sewa Tenda dan Perlengkapannya	9,000,000	8.992.500	99,92
11	5.2.2.38.16	Belanja sewa kursi susun/Stacking	800,000	800.000	100

NO	KODE BELANJA	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERS ENTA SE (%)
12	5.2.2.38.17	Belanja Sewa Sound System	2,500,000	2,497,000	99,88
13	5.2.2.39.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,950,000	1,950,000	100
14	5.2.2.39.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11,350,000	11,165,000	93,82
15	5.2.2.42.04	Belanja Pakaian Olahraga	11,900,000	11.819.500	99,32
16	5.2.2.43.02	Belanja Barang Piala	7,500,000	7,480,000	99,73
17	5.2.2.65.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS	30,050,000	30,050,000	100
18	5.2.2.68.02	Uang hadiah perlombaan/turnamen/pertandingan	38,400,000	38,400,000	100
JUMLAH			208.000.000	204,474,600	98,30

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 2.13.2.13.01.20.559.52 APBD- P Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

(8) Drag Bike

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp.247.243.400,- atau 98,90 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan Drag Bike. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya Atlet Drag Bike serta dapat meningkatkan kualitas Pembalap, terkait kegiatan ini untuk memberikan motivasi pembalap serta menumbuh kembangkan bakat-bakat pembalap muda, mempererat persaudaudaraan, menumbuh kembangkan sifat percaya diri, dan kekompakan sehingga dapat menumbuh kembangkan generasi muda yang berprestasi.

Hasil / Capaian Pelaksanaan Kegiatan dalam hal Penyerapan anggaran yang dilaksanakan untuk pelaksanaan Kegiatan Balap Motor (Road Race) ini adalah :

Tabel 3.63 Penyerapan Anggaran Kegiatan Drag Race

NO	KODE BELANJA	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERS ENTA SE (%)
1	5.2.1.02.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1,610,000	1,610,000	100
2	5.2.2.02.23	Belanja Bahan Penunjang Perlombaan	41,780,000	41,723,000	99,86
3	5.2.2.03.15	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi/Publikasi	5,500,000	5,445,000	99,00
4	5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	5,000,000	3.032.000	60,64
5	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,600,000	12,600,000	100
6	5.2.2.34.01	Belanja Cetak	21,500,000	21.230.000	98,74
7	5.2.2.34.02	Belanja Penggandaan	1,050,000	990,000	94,29
8	5.2.2.35.05	Belanja sewa kamar hotel/Penginapan	7,500,000	7.380.000	98,40
9	5.2.2.36.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,110,000	4,092,000	99,56
10	5.2.2.38.15	Belanja sewa Tenda dan Perlengkapannya	9,000,000	8.992.500	99,92
11	5.2.2.38.16	Belanja sewa kursi susun/Stacking	800,000	800.000	100
12	5.2.2.38.17	Belanja Sewa Sound System	2,500,000	2,497,000	99,88
13	5.2.2.39.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,950,000	1,950,000	100
14	5.2.2.39.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12,550,000	12,540,000	99,92
15	5.2.2.42.04	Belanja Pakaian Olahraga	11,900,000	11.847.000	99,55
16	5.2.2.43.02	Belanja Barang Piala	9,000,000	8.976.000	99,74
17	5.2.2.65.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS	44,050,000	44,050,000	100
18	5.2.2.68.02	Uang hadiah perlombaan/turnamen/pertandingan	57,600,000	57,600,000	100
JUMLAH			250.000.000	247,354,500	98,94

Kegiatan Kejuaran Drag Bike Bupati Bintang Cup Tahun 2019 pada tanggal 9 dan 10 November 2019, Bertempat di Sirkuit Non Permanen Jalan Baru Korindo RT.01/RW.02 Kampung Jawa Kel. Sei Lekop Kec. Bintang timur -Bintan.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengadaan Peralatan Olahraga

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 723.570.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 650.600.301,- atau 88,92 %. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan olahraga. Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Kapasitas Perlengkapan Olahraga, terkait kegiatan ini untuk memberikan motivasi masyarakat berolahraga serta menumbuh kembangkan bakat-bakat olahraga masyarakat, mempererat persaudaudaraan antara warga, menumbuh kembangkan sifat percaya diri dan kekompakan sehingga dapat menumbuh kembangkan generasi muda yang berprestasi. Pembangunan sarana Lapangan Volly di kelurahan Tanjung Uban Utara merupakan program dari pemerintah Kabupaten Bintan melalui dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk mencapai target dari RPJMD Kabupaten Bintan dan Misi Bapak Bupati Bintan Yaitu menjadikan pemuda yang berdaya saing.

(2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Volly

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.095.000,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.707.857,- atau 99,71 %. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya Alat Olahraga yang lengkap. Di Kab. Bintan.

Hasil kegiatan ini adalah Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Olahraga, terkait kegiatan ini untuk memberikan motivasi masyarakat berolahraga serta menumbuh kembangkan bakat-bakat olahraga masyarakat, mempererat persaudaudaraan antara warga, menumbuh kembangkan sifat percaya diri dan

kekompakan sehingga dapat menumbuh kembangkan generasi muda yang berprestasi. Pembangunan sarana Lapangan Volly di kelurahan Tanjung Uban Utara merupakan program dari pemerintah Kabupaten Bintan melalui dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk mencapai target dari RPJMD Kabupaten Bintan dan Misi Bapak Bupati Bintan Yaitu menjadikan pemuda yang berdaya saing.

Untuk Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.64 Program / kegiatan, Target, Realisasi dan persentase Realisasi kegiatan

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Kegiatannya :			
1.1	PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMUDA	1 Keg Rp. 110.739.800	1 Tim Rp. 109.027.300	98,45%
1.2	TEMU WICARA KEPEMUDAAN	1 Keg Rp. 250.000.000	1 Keg Rp.158.197.800	63,28%
1.3	PELAKSANAAN PASKIBRAKA DI KABUPATEN BINTAN DAN PENGIRIMAN PASKIBRAKA KE TK. PROV. KEPRI	1 Keg Rp. 1.100.190.000	1 Keg Rp. 1.030.675.380	93,68%
1.4	JUMPA BAKTI BERSAMA (JUMBARA)	Rp. 300.000.000	Rp.258.314.900	86,10 %
1.5	PEMBINAAN ESQ BAGI PEMUDA	Rp.125.000.000	Rp. 114.751.591	91,80 %
2.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda			
2.1	PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEMUDA	Rp. 200.000.000	Rp. 186.743.339	93,37 %
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatannya :			
3.1	PENGADAAN PERALATAN OLAHRAGA	1 Keg Rp. 723.570.000	1 Keg Rp. 650.600.301	89,92%
3.2	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA VOLLY T.SURYA	1 Keg Rp. 77.095.000,-	1 Keg Rp.75.188.000	97,53%
4.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Kegiatannya :			
	LOMBA GERAK JALAN			

No	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	%
	4.1	TRI LOMBA JUANG DALAM HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	1 Keg Rp. 198.050.000	1 Keg Rp.190.876.900	96,38%
	4.2	PEMBINAAN ATLET	1 Keg Rp. 138.740.000	1 Keg Rp. 137.435.300	99,06%
	4.3	TURNAMEN BOLA VOLLY BUPATI CUP	1 Keg Rp. 300.000.000	1 Keg Rp.292.565.100	97,52%
	4.4	JALAN SANTAI DAN SENAM SEHAT	1 Keg Rp. 250.000.000	1 Keg Rp.246.015.800	98,41%
	4.5	TURNAMEN GOLF BUPATI BINTAN CUP	1 Keg Rp. 150.000.000	1 Keg Rp.149.653.000	99,77%
	4.6	BALAP MOTOR (ROAD RACE)	1 Keg Rp. 208.000.000	1 Keg Rp.203.949.600	98,05%
	4.7	DRAG BIKE	1 Keg Rp.250.000.000	1 Keg Rp.247.243.400	98,90%
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatannya :				
	4.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 30.000.000	Rp. 29.658.200	98,86%
	4.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Kawasan ktr Rp. 61.250.000	1 Kawasan Ktr Rp. 11.225.500	18,33%
	4.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit Rp. 68.473.000	2 unit Rp. 49.906.290	72,88%
	4.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun Rp.39.110.000	1 Tahun Rp. 38.597.000	98,69 %
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatannya :				
	6.1	Pendidikan dan pelatihan formal	40 orang/tahun Rp. 100.000.000	40 orang/tahun Rp.85.269.880	85,27 %
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatannya :				
	7.1	Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	7 Dokumen Rp. 61.900.000	7 Dokumen Rp.47.619.140	76,93%
8.	Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatannya:				
	8.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Rp. 30.860.000	Rp.30.665.800	81,69 %

Pagu Anggaran Tahun 2019 yang di peroleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui APBD Bintan untuk Kegiatan Belanja (baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) adalah sebesar **Rp. 9.286.735.850,-** dan APBD-P menjadi **Rp.10.850.899.852,-** sedangkan Realisasinya sebesar **Rp 8.173.894.480,-** atau sebesar **75,33 %**, Sisa dana sebesar **Rp. 2.677.005.392,-** atau sebesar **24,67 %**.

3.1.2.13 Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan masuk dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pencapaian indikator kinerja daerah pada urusan ini mendukung **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan.

Urusan Perpustakaan masuk dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pencapaian indikator kinerja daerah pada urusan ini mendukung Misi Ketiga terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan.

1) Presentase Taman Bacaan / Perpustakaan Kelurahan / Desa dan Sekolah yang aktif

Hingga tahun 2019 jumlah Perpustakaan, Taman Bacaan/perpustakaan di Kabupaten Bintan sebanyak 199 unit Perpustakaan yang terdiri dari 199 Perpustakaan yang aktif dan 0 Perpustakaan yang tidak aktif tersebar diseluruh Kecamatan se Kabupaten Bintan, sedangkan prosentase Taman Bacaan/Perpustakaan Kelurahan/Desa dan Sekolah yang aktif mencapai 100%. Capaian kinerja dari tahun 2016 s/d 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.65 Presentase Taman Bacaan / Perpustakaan Kelurahan / Desa dan Sekolah yang aktif

NO	URAIAN	TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019			
		AKTIF	TIDAK AKTIF	JLH	%	AKTIF	TIDAK AKTIF	JLH	%	AKTIF	TIDAK AKTIF	JLH	%	AKTIF	TIDAK AKTIF	JLH	%
1	PERPUSTAKAAN DAERAH	1	0	1	100	1	0	1	100	1	0	1	100	1	0	1	100
2	MOBIL PUSTAKA KELILING	2	0	2	100	2	0	2	100	2	0	2	100	2	0	2	100
3	KAPAL PUSTAKA APUNG	1	0	1	100	1	0	1	100	1	0	1	100	1	0	1	100
4	PERPUSTAKAAN SD	21	82	103	20	40	63	103	39	104	0	104	100	104	0	104	100
5	PERPUSTAKAAN SMP	20	20	40	50	21	19	40	53	40	0	40	100	40	0	40	100
6	PERPUSTAKAAN/TBM DESA/KELURAHAN	15	36	51	29	15	36	51	29	42	9	51	82	51	0	51	100
	JUMLAH	60	138	198	30	80	118	198	40	190	9	199	95	199	0	199	100

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1) **Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 217.684.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 214.929.710., atau 98,73 %. *Outcome* meningkatnya pengembangan perpustakaan.

Dengan kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a) **Pelaksanaan Program**

(1) **Promosi Minat Baca**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.826.000,- dan realisasi sebesar Rp.48545.100,- atau 95,51%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Road Show atau audiensi dengan masyarakat khususnya pelajar dalam sebuah acara terbuka dengan menyampaikan pentingnya membaca sekaligus memberi pelayanan dan promosi koleksi buku perpustakaan di 9 Kecamatan diwilayah Kabupaten Bintan

(2) **Lomba Minat Baca**

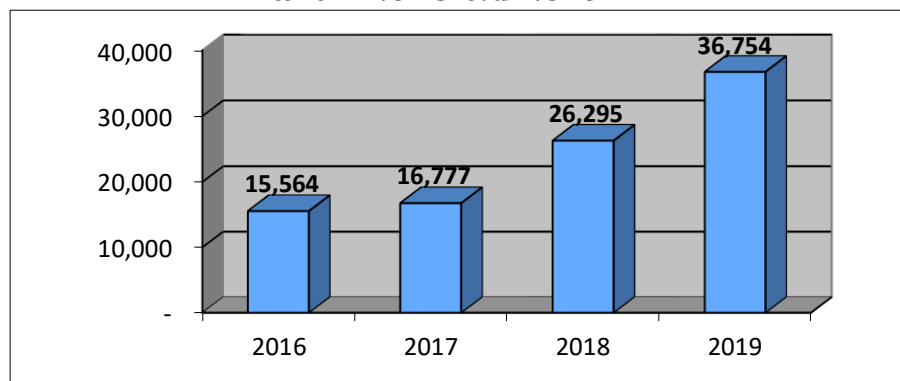
Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.951.000,- dengan realisasi sebesar Rp.89.556.084,- atau 99,56%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan lomba bercerita/mendongeng dan Lomba Pantun bagi anak-anak Sekolah Dasar dan SLTP se-kabupaten Bintan yang juaranya akan diajukan untuk mewakili Kabupaten Bintan dalam Lomba tingkat provinsi sampai di pusat sehingga meningkatkan minat baca

dan menambah angka partisipasi masyarakat berkunjung ke Perpustakaan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) *Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun*

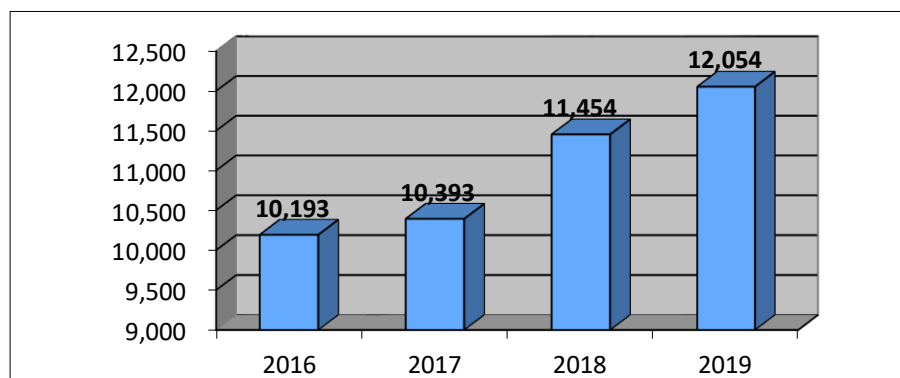
Grafik 3.31 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan dari Tahun 2016 s.d 2019



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip 2019

2) *Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah*

Grafik 3.32 Perkembangan Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dari Tahun 2016 s.d. 2019



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip 2019

a. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Program Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana

2) **Program Pengembangan Perpustakaan**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 200.227.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 192.459.905,- atau 96,12%. *Outcome* meningkatkan pengembangan pelayanan perpustakaan daerah.

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pelayanan Perpustakaan Keliling Terhadap Masyarakat**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.576.000,- dan realisasi sebesar Rp.61.320.000,- atau 99,58%. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan perpustakaan di 9 (sembilan) Kecamatan, 6 (enam) Kecamatan dengan menggunakan Mobil Pustaka Keliling dan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Mantang dan Bintan Pesisir menggunakan Kapal Pustaka Apung. Pelayanan Pustaka Keliling tersebut terus dilaksanakan guna Peningkatan Pelayanan Kepustakaan dan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan memberi ransangan sekaligus sebagai upaya pemetaan dalam pembinaan perpustakaan se Kabupaten Bintan.

(2) **Kegiatan Pemeliharaan Buku Perpustakaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.041.000,- dan realisasi sebesar Rp.37.020.880,- atau 94,83%. *Output* dari kegiatan ini

adalah meningkatkan pelayanan perpustakaan khususnya perpustakaan daerah Kabupten Bintan. Kegiatan untuk perawatan semua buku yang ada di Perpustakaan Daerah agar buku-buku yang ada terawat dan terjaga dengan baik.

(3) Kegiatan Peningkatan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.610.000,- dan realisasi sebesar Rp.94.119.025,- atau 94,49%. *Output* dari kegiatan ini adalah agar bertambahnya koleksi buku perpustakaan dan tersedianya bahan bacaan perpustakaan khususnya masyarakat Kabupten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

❖ Jumlah Perpustakaan Daerah

Sampai tahun 2019 sudah terbangun 1 (satu) unit Gedung Perpustakaan Daerah. Interior dari Perpustakaan tersebut sudah dilaksanakan dan sudah tertata dengan baik namun sarana dan prasarana lainnya sebagai pendukung perpustakaan belum memadai. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan akan memprioritaskan pengadaan sarana dan prasana pendukung Gedung Perpustakaan Daerah yang representatif.

b. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten yang Representatif.

- b) Belum adanya SDM Perpustakaan atau pustakawan yang handal.
- c) Belum adanya dukungan pendanaan yang memadai perpustakaan di sekolah dan perpustakaan Desa/Kelurahan.

2. Solusi

- a) Mengusulkan Kepada Tim TPAD pengadaan sarana dan prasarana Gedung pelayanan perpustakaan daerah yang representatif.
- b) Mengusulkan kepada BKD pengadaan tenaga pustaka/pustakawan
- c) Mengusulkan kepada Tim TPAD untuk memberi tambahan anggaran kepada sekolah dan pemerintah desa/kelurahan untuk pengelolaan perpustakaan

3.1.2.14 Urusan Kearsipan

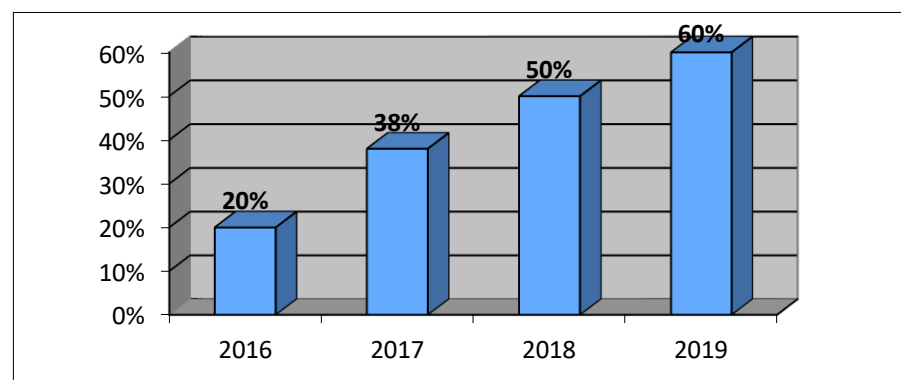
Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Ketiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kearsipan adalah sebagai berikut :

Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Ketiga terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Kearsipan adalah sebagai berikut :

(1) Prosentase Jumlah SKPD, BUMD Dan Desa/Kelurahan Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku

SKPD, BUMD Dan Desa/Kelurahan yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip secara baku adalah sebanyak 60% dari 38 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan telah tertata dengan baik dan benar.

Grafik 3.33 Prosentase Jumlah SKPD, BUMD Dan Desa/ Kelurahan Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2016 s.d 2019



Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program ini dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total

alokasi anggaran sebesar Rp. 94.780.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 93.576.590., atau 98,73%. *Outcome* meningkatnya perbaikan terhadap sistem Administrasi Kearsipan Daerah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94.780.000,- dan realisasi sebesar Rp.93.576.590,- atau 98,73%. *Output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan 31 Desa / Kelurahan se Kabupaten Bintan

Capaian indikator kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

❖ *Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan*

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 1 kegiatan

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Administrasi Kearsipan sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.56.628.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 56.109.616.,- atau 99,08%. *Outcome*

meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Arsip Statis pada OPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Arsip Statis pada OPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Unit kerja di Unit Pengelola Sekretariat, Bidang dan Unit Kearsipan di Lingkungan masing-masing OPD sebanyak 20 OPD dan 15 Desa/Kelurahan Se Kabupaten Bintan. Kegiatan ini sudah di lakukan dimulai dengan rapat koordinasi dilanjutkan pendampingan/ asisitensi penerapan sisitem kearsipan sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan dan di akhoroi dengan penilaian SKPD terbaik penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 dengan pagu Rp. 56.628.000,- dan terserap anggaran Rp. 56.109.616,- atau sebesar 99,08% dari pagu anggaran.

Capaian indikator kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

❖ *Jumlah Gedung Arsip yang representatif*

Hingga tahun 2019 Kabupaten Bintan masih belum memiliki Gedung Arsip yang representatif

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Kearsipan sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.

3.1.2.15 Urusan Statistik

Capaian kinerja **Urusan Statistik** dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Pengembangan data dan informasi**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 815.479.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 681.108.367,- atau 83,52%. *Outcome* Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah yang baik.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Penyusunan RoadMap Sistem Inovasi Daerah (SIDA)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.314.278.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 268.092.240,- atau 85,30%. *Output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bintan diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk menyusun rencana kegiatan bagi tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bintan melalui inovasi.

(2) **Peningkatan dan Penyusunan Sistem Peragaan Data Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 107.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.174.675,- atau 86,90%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen/visualisasi pembangunan dalam bentuk mobile

application/Android mobile app Web dan IOS; serta pemeliharaan mobile apps yang telah ada saat ini.

(3) Pengembangan data website Bapelitbang Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.98.782.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.886.000,- atau 94,03%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen/visualisasi pembangunan dalam bentuk mobile

(4) Updating data System Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 95.199.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.280.195,- atau 70,67%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga data SIPD dimanfaatkan untuk (1) Publikasi keberhasilan pembangunan daerah; (2) Salah satu rujukan dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah; (3) Salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah; serta (4) Publikasi SIPD Nasional.

(5) Penyusunan Capaian Pembangunan Bintan Gemilang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.200.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.675.257,- atau 79,84%. *Output* dari kegiatan ini adalah kegiatan berupa Dokumen Capaian Pembangunan Bintan Gemilang yang dilengkapi dengan Dokumentasi Visual hasil pelaksanaan pembangunan dari tahun 2016-2019 (Triwulan III).

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Capaian Indikator Kinerja tahun 2019 untuk program ini adalah :

1) *Persentase tingkat keterisian data SIPD*

Untuk tahun 2019 indikator ini mencapai 90%

2) *Tingkat kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerah bintang yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintang*

Untuk tahun 2019 indikator ini mencapai 100%

3.1.2.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Pencapaian indikator kinerja daerah pada Misi Ketiga terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintang untuk urusan Komunikasi dan Informatika dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan e-government

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintang** melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 8.379.566.999,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.138.706.330,- atau 97,13%. *Outcome* Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi serta Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

**(1) Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten Bintan
Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.901.100,- atau 75,90 %. *Output* dari kegiatan ini adalah mewujudkan PPIP yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik.

**(2) Pelaksanaan Media Center Kabupaten Bintan Kabupaten
Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.700.600,- atau 99,00 %. *Output* dari kegiatan ini adalah sebagai wahana diseminasi informasi publik, pertukaran informasi, serta pelayanan informasi dan komunikasi publik. Fungsi diseminasi informasi publik merupakan kewajiban Kemkominfo untuk menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

**(3) Peningkatan Kualitas, Pengembangan dan Pemeliharaan
Bintan Radio**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 480.024.999,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 469.203.023,- atau sebesar 97,75%. *Output* dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Peningkatan Kualitas, Pengembangan dan Pemeliharaan Bintan Radio sehingga Pemerintah Daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Bintan Radio dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat atau publik didalam mendapatkan

perkembangan informasi yang terjadi di Pemerintah Daerah dan sekitarnya.

(4) Bimbingan Teknis Jurnalistik dan Juru Bicara OPD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 145.542.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.570.698,- atau 83,53 %. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas keahlian juru bicara OPD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pemerintahan atau hal lainnya sehingga keterbukaan informasi publik bagi masyarakat makin lebih baik dan informasi pembangunan yang sedang gencar dilaksanakan Pemerintah khususnya Kabupaten Bintan dapat tersampaikan. yang diikuti unsur SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan jumlah peserta 80 Orang.

(5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Materi Komunikasi dan Informasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 6.900.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.895.728.099,- atau 99,94%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya Media Informasi melalui media massa cetak, elektronik dan baliho dengan jumlah media massa 100, 3 titik tiang billboard dan baleho di 10 Kecamatan.

(6) Sosialisasi Program Pembangunan Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terciptanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi Program pembangunan Kabupaten Bintan, Perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintan dan Transparansi informasi pemerintah daerah kepada masyarakat/ publik.

(7) Pelayanan Pengembangan dan Pemeliharaan Website

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 229.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.798.842,- atau 85,06%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi di Website Pemerintah Kabupaten Bintan dan Terbangunnya Aplikasi OPD Berbasis Web berupa:

- (1) Tersedianya Domain bintankab.go.id
- (2) Terpeliharanya Website www.bintankab.go.id
- (3) Tersedianya Subdomain Website dan Aplikasi Untuk OPD
- (4) Tersedianya Web Mail Domain bintankab.go.id
- (5) Terbangunnya Website OPD guna keterbukaan informasi publik
- (6) Terbangunnya Aplikasi OPD berbasis web guna kelancaran tugas pokok dan fungsi.

(8) Perencanaan Pengembangan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 235.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.041.202,- atau 53,63%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya informasi di corner internet dan Tersedianya Dokumen perencanaan teknis pembangunan ruang pusat server.

(9) Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.232.266,- atau 70,23%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya informasi di corner internet dan Tersedianya Dokumen perencanaan teknis pembangunan ruang pusat server.

(10) Pameran dan Lomba Foto Instagram Pembangunan Kab. Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 145.530.500,- atau 97,02%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pameran dan Lomba Foto Instagram Pembangunan Kabupaten Bintan, berupa dokumentasi Foto Pembangunan Kabupaten Bintan

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

(1) *Nilai keterbukaan informasi dan komunikasi*

Untuk tahun 2019 indikator ini hasil penilaian keterbukaan informasi publik berdasarkan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 55,66 Poin.

(2) *Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara*

Untuk tahun 2019 indikator ini mencapai 83,33%

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan e-government tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti

2. Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.519.848,- atau 81,87%.

Outcome Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelayanan Pengembangan Dan Pemeliharaan Persandian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,-, anggaran tersebut hanya dapat terserap sebesar Rp. 37.768.595,- atau sebesar 75,54%. *Output* dari kegiatan ini adalah terciptanya tempat kerja sandi yang mendukung agar dapat tercapainya system keamanan informasi yang baik dan juga sebagai pengembangan persandian.

(2) Pengamanan Informasi Pemerintah Melalui Security Sistem

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-, anggaran tersebut hanya dapat terserap sebesar Rp. 72.751.253,- atau sebesar 85,59 %. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengamanan Informasi Pemerintah melalui Security Assessment serta tersedianya keamanan informasi pada web Kabupaten Bintan dan aplikasi ebudgeting di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

❖ ***Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi***

Tahun 2019 perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi sebesar 100,00

%. Yaitu aplikasi yang di security assessment adalah e-budgeting dan web Kabupaten Bintan yang telah digunakan oleh 39 OPD.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti.

3.1.2.17 Urusan Pertanahan

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Pertanahan melalui 11 (sebelas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 8.594.324.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 518.827.290,- atau 6,04%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya penataan, ketatalaksanaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Sertifikasi Aset Lahan Pemda

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 120.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.427.200,- atau 31,19% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan tersebut Meningkatkan aset tanah pemda yang sudah tersertifikat

(2) Rapat dan Koordinasi Pertanahan Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 104.825.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.482.006,- atau 49,1% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan terwujudnya

koordinasi dengan instansi vertikal dan OPD se-Kabupaten Bintan di bidang pertanahan.

(3) Mediasi Sengketa Pertanahan Warga dan Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 107.424.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.878.334,- atau 31,54% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan adalah berkurangnya permasalahan tanah di Kabupaten Bintan.

(4) Pematokan Tanah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 392.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 389.954.150 atau 99,48% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan adalah Adanya kepastian batas-batas tanah diatas lahan aset milik pemerintah Kabupaten Bintan

(5) Pembebasan Lahan Untuk Infrastruktur Sumber Daya Air dan SPAM

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0%.

(6) Pembebasan Lahan Lintas Barat Lanjutan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0%.

(7) Biaya Dokumen Perencanaan Lahan Jalan Bandara Tambelan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0%.

(8) Biaya Dokumen Perencanaan Dam Hulu Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.174.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0%.

(9) Biaya Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan Makam Kelurahan Tanjung Uban Timur

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0%.

b. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a) Pembebasan Lahan Untuk Infrastruktur Sumber Daya Air dan SPAM

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena lahan yang akan diganti rugi ternyata telah diganti rugi oleh pihak ketiga.

b) Pembebasan Lahan Lintas Barat Lanjutan.

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena penyerahan hasil kegiatan pengadaan tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan (BPN) kepada Dinas PUPR Kabupaten Bintan pada bulan September 2019, selanjutnya diperoleh data dimana terdapat pemilik tanah yang tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah, surat tanah dan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah.

c) Biaya Dokumen Perencanaan Lahan Jalan Bandara Tambelan

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena sebagian besar pemilik tanah yang lahannya terkena rencana pembangunan jalan menuju bandara tidak memiliki surat tanah.

d) Biaya Dokumen Perencanaan Dam Hulu Bintan

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena Dam Hulu Bintan sudah dibangun sehingga pihak konsultan selaku pembuat dokumen pengadaan tanah tidak dapat melaksanakan pembuatan dokumen.

e) Biaya Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan Makan Kelurahan Tanjung Uban Timur

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena lokasi lahan makam berada pada kawasan hutan lindung sehingga tidak dapat dilakukan pengadaan lahan.

2. Solusi

- a) Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019 akan dilaksanakan kembali pada tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bintan.
- b) Kegiatan sertifikasi aset lahan pemda agar dapat dilaksanakan pada awal tahun, mengingat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan (BPN), agar target yang telah direncanakan dapat tercapai.
- c) Penyelesaian sengketa pertanahan warga dan pemda dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ("Permen Agraria 11/2016").

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

❖ *Persentase Sengketa Lahan Yang terselesaikan*

Persentase Sengketa Lahan Yang terselesaikan tahun 2019 hanya mencapai 20% Dari 100% yang ditargetkan. hal ini terjadi dikarenakan dari 5 kasus penyelesaian sengketa pertanahan kasus yang terselesaikan, dan 1 kasus penyelesaian sengketa pertanahan masih dalam tahap proses penyelesaian.

❖ *Luas Lahan Milik Pemerintah Daerah*

Target luas lahan pemda pada tahun 2019 adalah seluas + 461 ha, namun penambahan luas lahan hanya seluas + 133.635 m² yang berarti capaian luas lahan + 454,86 ha atau 99%. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan SK Nomor 413/VIII/2018 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil.

❖ *Persentase Lahan Pemda yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat*

Target sertifikasi aset lahan pemda pada tahun 2019 adalah sebanyak 10 sertifikat dan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan hanya 9 sertifikat atau 90%, namun sertifikat tanah dimaksud masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan (BPN) dan belum diserahkan kepada Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Bintan.

3.1.3 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

3.1.3.1 Urusan Pariwisata

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** pada Tahun 2019 terhadap penyeleggaraan urusan pemerintah Kabupaten Bintan untuk **Urusan Pariwisata** adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Jumlah Objek Wisata

Indikator meningkatnya jumlah Objek Wisata Tahun 2019 terdiri dari 67 objek wisata dengan rincian: **wisata alam** sebesar 34 Objek, **wisata buatan** sebanyak 20 objek, **wisata budaya** sebanyak 8 objek wisata, **wisata belanja** sebanyak 1 objek, **wisata kuliner** sebanyak 2 objek, **wisata pendidikan** 1 objek, **wisata pertanian** sebanyak 1 objek. Masih banyak lokasi yang tersebar di Kabupaten Bintan yang memiliki potensi sebagai objek wisata namun di tahun 2019 ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan 35 objek yang layak untuk dikembangkan sebagai Objek Wisata di Kabupaten Bintan, Capaian Indikator ini melebihi target RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan atau diatas 100% dari total indikator.

Tabel 3.66 Objek Wisata di Kabupaten Bintan

NO.	KECAMATAN / ALAMAT	POTENSI WISATA	
I. WISATA ALAM			
	KECAMATAN BINTAN UTARA		
1.	Tanjung Uban Utara	1	Pantai Sakera
2.	Tanjung Uban Utara	2	Pantai Dinda
	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM		
3.	Kuala Sempang	1	Wisata Mangrove Sei Lapan
4.	Kuala Sempang	2	Wisata Bukit Ice Cream
5.	Kuala Sempang	3	Wisata Gurun
6.	Desa Busung	4	Telaga Biru
7.	Desa Busung	5	Pantai Datuk Diraja
	KECAMATAN TELUK SEBONG		

NO.	KECAMATAN / ALAMAT	POTENSI WISATA	
8.	Sebong Lagoi, Lagoi	1	Lagoi Bay
9.	Desa Pengudang	2	Wisata Alam Mangrove Pengudang
10.	Desa Sei Kecil	3	Wisata Mangrove Sungai Kecil
11.	Desa Berakit	4	Wisata Mancing Berakit
12.	Desa Berakit	5	Wisata Mangrove Kampung Panglong
13.	Teluk Sebong	6	Pantai Senggiling
14.	Desa Pengudang	7	Batu Junjung
KECAMATAN GUNUNG KIJANG			
15.	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	1	Pantai Trikora, Wisata Alam
16.	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	2	Pulau Beralas Pasir ,Wisata Bahari *
17.	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	3	Wisata Memancing Nemo Bintang
18.	Malang Rapat Jl. Pantai Trikora Trikora KM 50	4	Kawasan Pariwisata Pantai Trikora KM. 50
19.	Malang Rapat Jl. Pantai Trikora Trikora KM 52	5	Pantai Trikora Kawasan Pariwisata KM. 52
20.	Desa Kawal	6	Pulau Nikoi *
21.	Kawal	7	Wisata Mangrove Kawal
KECAMATAN TOAPAYA			
22.	Toapaya	1	Bukit Zaitun
KECAMATAN TELUK BINTAN			
23.	Teluk Bintan, Desa Bintan Buyu	1	Air Terjun Gunung Bintan, Wisata Alam
24.	Teluk Bintan, Desa Penaga	2	Wisata Mangrove Desa Penaga
25.	Teluk Bintan	3	Gunung Bintan, Wisata Alam
KECAMATAN BINTAN PESISIR			
26.	Pulau Numbing	1.	Pulau Numbing, Wisata Bahari & Alam
27.	Pulau Suka - Mapur	2.	Pulau Suka/ Joyo *
28.	Pulau Pangkil Kelong	3.	Pulau Pangkil, Wisata Bahari & Alam
29.	Pulau Kelong	4.	Pulau Poto, Wisata Bahari & Alam
30.	Pulau Kelong	5.	Pulau Hantu, Wisata Bahari & Alam
31.	Air Gelubi Kelong	6	Pulau Cempedak *
KECAMATAN TEMBELAN			
32.	Tambelan	1	Teluk Abik, Wisata Pantai
33.	Tambelan	2	Teluk Penepat, Wisata Pantai
34.	Tambelan	3	Pulau Bungin, Wisata Pantai
II. WISATA BUATAN			

NO.	KECAMATAN / ALAMAT	POTENSI WISATA	
	KECAMATAN BINTAN UTARA		
1.	Tanjung Uban Utara	1	Desa Wisata Tenun Songket
2.	Tanjung Uban Utara	2	City Park Kampung Bugis Wisata Bahari
3.	Jl. H. Raja Daud, No.1 Tanjung Uban	3	Masjid Raya Baitul Makmur
	KECAMATAN SERI KUALA LOBAM		
4.	Kuala Sempang	1	Trek Sepeda Jalur Batang Nibung
	KECAMATAN TELUK SEBONG		
5.	Sebong Lagoi, Lagoi	1	Treasure Bay *
6.	Sebong Lagoi, Lagoi	2	Taman Safari dan Eko Fam Lagoi
7.	Sebong Lagoi, Lagoi	3	Konservasi Telur Penyu Kampung Baru
8.	Sebong Pereh	4	Taman Rekreasi
9.	Sebong Pereh	5	Kampung Jamur Tiram
10.	Desa Berakit	6	Wisata Mancing Berakit
11.	Ekanq Anculai	7	Desa Wisata Ekanq
	KECAMATAN GUNUNG KIJANG		
12.	Kp Jeropet Kelurahan Kawal	1	Pasar Betuah
	KECAMATAN TOAPAYA		
13.	Toapaya Asri	1	Agrowisata Holtikultura (Buah Salak)
14.	Toapaya	2	Bukit Zaitun
	KECAMATAN TELUK BINTAN		
15.	Teluk Bintan, Desa Poyotomo	1	Pemancingan Poyotomo
	KECAMATAN BINTAN TIMUR		
16.	Kijang Kota	1	Taman Rekreasi Taman Kota Kijang
17.	Kijang Kota	2	Mini Zoo Kijang
18.	Kijang Kota	3	Relief Antam
19.	Kijang Kota	4	Kijang City Walk
20.	Sungai Enam Laut	5	Wisata Kuliner Otak-Otak
III. WISATA BUDAYA			
	KECAMATAN TELUK SEBONG		
1.	Desa Berakit	1	Kampung Suku Laut
	KECAMATAN GUNUNG KIJANG		
2.	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	1	Museum Bahari Bintan
3.	Teluk Bakau Jl. Pantai Trikora	2	Perahu Jong
4.	Kawal Darat	3	Bukit Kerang, Situs Cagar Budaya
5.	Desa Berakit	4	Kampung Suku Laut

NO.	KECAMATAN / ALAMAT	POTENSI WISATA	
	KECAMATAN TELUK BINTAN		
6.	Desa Bintan Buyu	1	Makam Bukit Batu
	KECAMATAN TEMBELAN		
7.	Tambelan	1	Makam Sultan Abdurrahman Batu Lepuk
8.	Tambelan	2	Makam Sultan Muhayatsya Kampung Hilir Gunung Kute
IV. WISATA BELANJA			
	KECAMATAN TELUK SEBONG		
1.	Sebong Lagoi, Lagoi	1	Lagoi Bay
V. WISATA KULINER			
	KECAMATAN TELUK SEBONG		
1.	Sebong Lagoi, Lagoi	1	Lagoi Bay
	KECAMATAN BINTAN TIMUR		
2.	Sungai Enam Laut	1	Wisata Kuliner Otak-Otak
VI. WISATA PENDIDIKAN			
	KECAMATAN TELUK SEBONG		
1.	Sebong Lagoi, Lagoi	1	Bintan Sahid Tourism Institute
VII. WISATA PERTANIAN			
1.	Toapaya Asri	1	Agrowisata Holtikultura

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bintan Tahun 2019

2) Meningkatkan Jumlah Desa Wisata

Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing desa, memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan, serta terwujudnya Sapta Pesona sehingga tercapai peningkatan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat diwilayah itu.

Pemberdayaan Masyarakat dengan mengembangkan desa wisata merupakan salah satu Skala Prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat. Jumlah keseluruhan desa wisata yang akan dibentuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hingga tahun 2021 mendatang adalah sebanyak 8 desa wisata. Untuk tahun 2019 ini, dari target 5 desa wisata yang akan dikembangkan, realisasinya mencapai **6 Desa Wisata**, Capaian Indikator ini melebihi target RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan atau diatas 100% dari total indikator. Adapun rincian desa wisata yang dikembangkan ditahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.67 Daftar Desa Wisata di Kabupaten Bintan

No.	Nama Desa Wisata	Jenis Wisata	Keterangan
1	Desa Wisata Pengudang	Mangrove Pengudang	Teluk Seborg
2	Desa Wisata Berakit	Wisata Mancing, Budaya	Teluk Seborg
3	Desa Wisata Ekan	Wisata Taman Rekreasi	Teluk Seborg
4	Desa Wisata Mapur	Wisata Bahari	Bintan Pesisir
5	Desa Wisata Toapaya Selatan	Wisata Alam	Toapaya
6	Desa Seborg Lagoi	Wisata Alam	Teluk Seborg

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan Tahun 2019

3) Meningkatnya Jumlah Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang Efektif

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam kawasan Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan merupakan magnet wisata yang kini banyak menarik perhatian wisatawan khususnya dari mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke Bintan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai sebesar 369.989 kunjungan, kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 972.077 kunjungan dengan total jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Bintan adalah sebesar 1.338.066 kunjungan. Angka tersebut di mengalami kenaikan

jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya ditahun 2018 sebesar 25,23%, sedangkan pada tahun 2018 total kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 420.749 kunjungan, wisatawan mancanegara sebesar 642.709 kunjungan, dengan total kunjungan wisatawan sebesar 1.063.458 kunjungan. Faktor pendukung dalam pencapaian meningkatnya jumlah wisatawan adalah semakin beragamnya atraksi wisata yang ada di Kabupaten Bintan.

Untuk merespon hal tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan bersama dengan stakeholder pariwisata berupaya untuk meningkatkan jumlah promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif dengan menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan maupun berbagai macam kegiatan-kegiatan promosi guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Semakin banyak penyelenggaraan event-event yang dilakukan oleh para pelaku wisata di Kabupaten Bintan, maka akan semakin banyak menarik wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berkunjung.

Pada tahun 2019 ini, target Jumlah Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang Efektif ditetapkan sebanyak 5 promosi dan pemasaran. Untuk realisasinya sebesar 10 promosi dan pemasaran pariwisata, yaitu antara lain Event Pariwisata Tour de Bintan, Event Bintan Triathlon, Event Ironman Bintan, Penyelenggaraan Sail Bintan, Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Mengikuti Pameran/Ekspo), Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri (Mengikuti Pameran/Ekspo), Penyediaan Materi Promosi Bintan, Penyusunan Buku Highlight Pariwisata, Updating Website, Penyambutan Wisatawan perdana. Capaian Indikator ini melebihi target RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan atau diatas 100% dari total indikator.

4) Jumlah Jasa Pariwisata yang Telah Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Jumlah Jasa Pariwisata yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) pada tahun 2013 sebesar 10 Usaha, tahun 2014 bertambah 3 usaha menjadi 13 usaha, tahun 2015 bertambah 3 menjadi 16 usaha, tahun 2016 bertambah 16 menjadi 32, tahun 2017 bertambah 6 menjadi 38, tahun 2018 bertambah 10 menjadi 48, dan tahun 2019 bertambah 22 menjadi 70 usaha. Capaian Indikator ini melebihi target RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan atau diatas 100% dari total indikator.

5) Jumlah SDM Yang Memiliki Sertifikasi Pariwisata

Untuk jumlah SDM yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 1.400 orang, dapat direalisasikan mencapai 1.522 orang. Capaian Indikator ini melebihi target RPJMD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan atau diatas 100%

6) Jumlah Kemitraan Pengembangan Pariwisata

Target Indikator meningkatnya jumlah kemitraan pengembangan pariwisata Tahun 2019 sebesar 350 kemitraan dan realisasi sebesar 418 kemitraan, dengan rincian: **SPA** sebesar 22 kemitraan, **Tour and Travel** sebanyak 31 kemitraan, **Homestay** sebanyak 29 kemitraan, **Pokdarwis** sebanyak 34 kemitraan, **Desa Wisata** sebanyak 6 kemitraan, **Hotel/Penginapan** sebanyak 52 kemitraan, **Restoran** sebanyak 161 kemitraan, dan **Himpunan Pramuwisata Indonesia** (HPI) Kabupaten Bintan sebanyak 83 kemitraan. Capaian Indikator ini melebihi target RPJMD 2016-2021 yang ditetapkan atau diatas 100% dari total indikator.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.498.755.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.157.808.232,- atau 90,25%. *Outcome* program ini adalah pelayanan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana serta objek dan daya tarik pariwisata. Program ini menitik beratkan kepada 1) menata kawasan objek pariwisata; 2) menyediakan fasilitas objek pariwisata, dan; 3) memelihara, merawat dan mengamankan sarana dan prasarana pariwisata daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembangunan Sarana Objek

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.058.022,- atau 99,14%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terbangunnya Gazebo dan garasi traktor di Km.52 Desa Teluk Bakau. *Outcome* meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana objek wisata.

(2) Pemeliharaan Objek/Kawasan Pariwisata

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.886.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.134.048.003,- atau 91,89%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata di batu 50 & 52 Desa malang rapat dan Gunung Bintan. *Outcome* mengakomodir kebutuhan sarana gedung dan peralatan kerja.

(3) Event Tracking Bintan Camteras

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.935.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.908.470,- atau 97,95%. *Output* dari kegiatan ini adalah

Terlaksananya Event pecinta alam tracking camteras, meningkatnya partisipasi wisatawan minat khusus.

(4) Penataan Kawasan Pariwisata [DAK]

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.227.950.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.047.715.303,- atau 91,91%. *Output* kegiatan adalah Terbangunnya pagar pembatas Km.50, terbangunnya pagar pembatas Km.52, terbangunnya gapura identitas, terpasangnya lampu taman Km.52, dan terpasangnya lampu taman Km. 50. *Outcome* meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestic ke destinasi 50& 52 desa malang rapat;

(5) Amenitas Pariwisata

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 592.675.600,- atau 98,78%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pembangunan sarana objek wisata. *Outcome* meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana objek wisata.

(6) Penunjang Kegiatan Penataan Kawasan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.392.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.145.115.634,- atau 61,65%. *Output* kegiatan adalah Memonitoring dan evaluasi terhadap output pelaksanaan kegiatan DAK. *Outcome* merekonsiliasi dan merekapitulasi progress fisik dan keuangan kegiatan DAK dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan DAK ke Kementerian terkait di Jakarta.

(7) Penyusunan Dokumen Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.296.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.300.000 atau 4,67 %. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya penelitian lingkungan hidup objek wisata

Km. 50 dan 52. Sedangkan *outcome* kegiatan adalah meningkatkan daya tarik wisata.

(8) Penunjang Kegiatan Amenitas Pariwisata

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.296.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.29.986.700,- atau 95,82%. *Output* kegiatan adalah Memonitoring dan evaluasi terhadap output pelaksanaan kegiatan DAK. *Outcome* merekonsiliasi dan merekapitulasi progress fisik dan keuangan kegiatan DAK dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan DAK ke Kementerian terkait di Jakarta.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Objek Lahan yang dikelola masih terkendala *budgeting* yang efisien dan terukur, kedepan agar indikator sasaran output terukur;
- b) Permasalahan pemanfaatan sarana dan prasarana ruang public, Penelitian Ilmiah tentang Lingkungan Hidup (LH) dan regulasi jarak bangun bibir pantai, cost pemeliharaan dan perawatan yang besar agar tetap terjaga dan terpelihara.

(2) Solusi

- a) Maka perlunya perbaikan mekanisme perencanaan menggunakan metode Analisis Standar Biaya (ASB);
- b) Memanfaatkan fasilitas yang ada dan menjaganya dengan baik, dan optimalisasi sarana yang ada untuk kepentingan publik.

2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.764.837.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.462.418.299,- atau 91,97%. *Outcome* program ini adalah

Peningkatan Informasi Pasar Pariwisata, Mempublikasikan dan Mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki ke dalam dan luar negeri sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara dan mancanegara. Program ini menitik beratkan kepada: 1) Melakukan Promosi Wisata; 2) Penyediaan Materi Promosi; 3) Pelaksanaan Event Pariwisata. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Event Pariwisata Tour de Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.672.760.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.594.873.649,- atau 95,34%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya event **Tour de Bintan** berskala Internasional. *Outcome* kegiatan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah sector pariwisata dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestic maupun mancanegara.

(2) Event Ironman Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.773.805.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.720.454.000,- atau 93,11%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya metaman berskala Internasional di Kabupaten Bintan. *Outcome* kegiatan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestic di Kabupaten Bintan. Permasalahan dan solusi adalah perlu di tingkatkan kualitas dan kuantitas event agar lebih menarik minat wisatawan.

(3) Event Bintan Triathlon

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.640.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.148.838.000,- atau 76,85%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya Event Bintan Triathlon berskala

Internasional di Kabupaten Bintan. *Outcome* kegiatan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Bintan. Permasalahan dan solusi adalah sasaran belanja kegiatan agar kemajuan realisasi keuangan tepat dan maksimal.

(4) Penyelenggaraan Sail Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.095.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.88.929.250,- atau 91,59%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya penyelenggaraan sail Bintan. Dukungan atas Kegiatan Sail Indonesia (Sail Karimata) yang menjadikan Pulau Bintan sebagai Eksis Point terakhir pada acara tersebut. *Outcome* kegiatan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Bintan. Permasalahan dan solusi adalah promosi event yang perlu ditingkatkan.

(5) Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri (Mengikuti Pameran/Expo)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.88.020.000,- atau 88,02%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pameran luar negeri [London, Inggris]. *Outcome* kegiatan mempromosikan destinasi & pasar pariwisata Kabupaten Bintan, sumber daya alam dan potensi pariwisata Kabupaten Bintan kedepan.

(6) Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Mengikuti Pameran/Expo)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.807.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.122.799.500,- atau 92,46%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya pameran dalam negeri di kota Jakarta. *Outcome* kegiatan adalah mempromosikan destinasi

pariwisata Kabupaten Bintan guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Bintan.

(7) Penyediaan Materi Promosi Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.212.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.129.375.750,- atau 92,27%. *Output* kegiatan adalah tersusunnya buku materi promosi pariwisata Kabupaten Bintan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Bintan.

(8) Penyusunan Buku *Highlight* Pariwisata

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.050.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.116.339.100,- atau 81,33%. *Output* kegiatan adalah tersedianya informasi pariwisata Kabupaten Bintan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan investor asing di Kabupaten Bintan.

(9) *Updating Website*

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.448.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.38.590.300,- atau 90,91%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersusunnya informasi pariwisata Bintan. *Outcome* kegiatan adalah terupdatenya dan terpeliharanya website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.

(10) Festival Keter Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.960.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.139.794.000,- atau 93,85%. *Output* kegiatan adalah terlaksananya festival budaya Melayu Jong Bintan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik minat khusus.

(11) Event Bintang Culture

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.725.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.98.486.000,- atau 75,92%. *Output* adalah terlaksananya promosi pariwisata Bintang Culture. *Outcome* kegiatan adalah terlaksananya promosi pariwisata Bintang Culture.

(12) Event Wisatawan Perdana

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.575.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.58.717.750,- atau 93,84%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya penyambutan wisatawan perdana yang berkunjung ke Kabupaten Bintan. Kegiatan Penyambutan Wisatawan Perdana sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah terhadap Wisatawan yang datang pertama ke Kabupaten Bintan melalui dengan harapan akan memberikan efek positif terhadap Kunjungan Wisatawan. *Outcome* kegiatan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik.

(13) Event Gowes Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.760.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.117.210.000,- atau 91,74%. *Output* kegiatan adalah Terselenggaranya event Gowes Bintan. *Outcome* kegiatan Terwujudnya atraksi pariwisata Gowes Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Kurangnya paket kerajinan yang *identic*/ unik dan mudah untuk dibawa turis ke negara asalnya;
- b) Gangguan spam dan hacker, pemeliharaan yang intensif dan berkelanjutan;
- c) Permasalahan dan solusi adalah image pariwisata Bintan yang belum tereksplore secara maksimal;

- d) Pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan, support dana yang perlu di tingkatkan dan solusi kedepan agar indikator sasaran output terukur.

(2) Solusi

- a) Perlunya intervensi pemerintah yang lebih optimal dalam mengembangkan industri kerajinan lokal yang berdaya saing;
- b) Kedepan agar menguatkan fire millware, antispam;
- c) Optimalisasi publikasi penyelenggaraan event;
- d) perlunya perbaikan mekanisme perencanaan menggunakan metode analisis standar biaya (ASB).

3) Program Pengembangan Kemitraan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.040.943.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.985.858.220,- atau 94,71%. *Outcome* program ini adalah terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dibidang usaha pariwisata dan terwujudnya fasilitasi dan kerjasama ekonomi kreatif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelatihan Peningkatan Kualitas Pramuwisata Kab. Bintan (Pelatihan B. Inggris)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.305.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.112.876.000,- atau 97,89%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pengembangan SDM Pariwisata. *Outcome* kegiatan terwujudnya SDM yang bergerak di bidang usaha pariwisata.

(2) Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.266.000,- dan realisasi anggaran sebesar

Rp.118.840.000,- atau 93,38%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan workshop pengembangan SDM Destinasi Wisata Mangrove. *Outcome* kegiatan terwujudnya SDM yang bergerak di bidang usaha pariwisata mangrove.

(3) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner (DAK Non Fisik)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.645.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.139.031.900,- atau 99,56%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya kuliner bintang. *Outcome* kegiatan terwujudnya SDM yang baik di bidang usaha pariwisata.

(4) Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata (DAK Non Fisik)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.645.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.139.243.900,- atau 99,71%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pelatihan tata kelola destinasi wisata. *Outcome* kegiatan terwujudnya SDM yang baik di bidang usaha pariwisata.

(5) Pelatihan Pemadu Wisata Budaya Pedesaan (DAK Non Fisik)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.645.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.139.218.820,- atau 99,69%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pelatihan pemandu wisata pedesaan. *Outcome* kegiatan terwujudnya SDM yang baik di bidang usaha pariwisata.

(6) Pelatihan Pemadu Wisata Alam/ Trekking (DAK Non Fisik)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.645.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.139.230.700,- atau 99,70%. *Output* kegiatan adalah

Terlaksananya kegiatan pelatihan pemandu wisata alam/trekking. *Outcome* kegiatan terwujudnya SDM yang baik di bidang usaha pariwisata.

(7) Pelatihan Manajemen *Homestay*/Pondok Wisata/Rumah Wisata (DAK Non Fisik)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.139.645.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.139.243.500,- atau 99,71%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen wisata. *Outcome* kegiatan terwujudnya SDM yang baik di bidang usaha pariwisata.

(8) Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.147.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.58.173.400,- atau 58,09%. *Output* kegiatan adalah Terlaksananya penandatanganan MoU Bupati Bintan dan Kepala Bekraf. *Outcome* kegiatan terwujudnya fasilitasi dan kerjasama Ekonomi Kreatif.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Penerapan Standar Pelayanan Minimal [SPM] dalam penyusunan anggaran belanja untuk pelaksanaan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal [SPM] yang telah ditetapkan belum optimal. Namun demikian dalam menetapkan target capaian kinerja program dan kegiatan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- b) Peran serta masyarakat dalam pemerataan pembangunan serta perhatian tentang potensi dan keanekaragaman daerah;

- c) Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksana kegiatan.

(2) Solusi

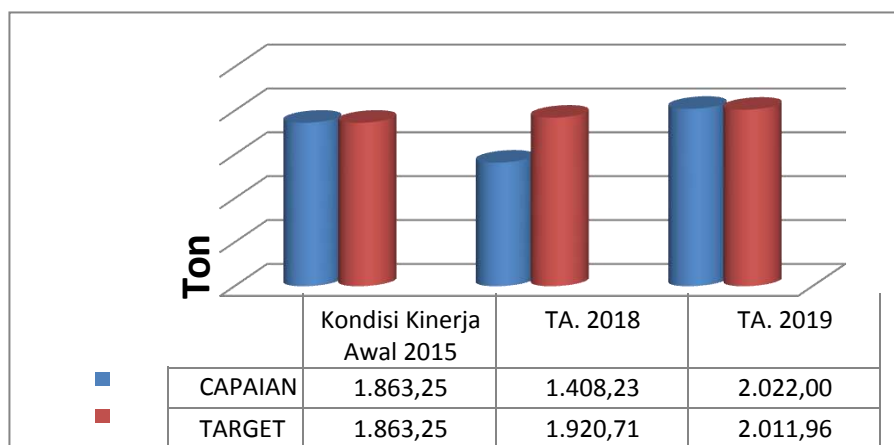
- a) Belanja disusun berpedoman pada peraturan perundangan undangan yang berlaku. Alokasi belanja diperuntukkan sesuai dengan kewenangan dan dipergunakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- b) Penetapan alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran [output] yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya;
- c) Peran serta masyarakat dan stakeholders pariwisata didalam proses perancangan pembangunan, agar output yang ingin dicapai benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran;
- d) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e) Melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada organisasi, stakeholder pariwisata yang ada di Kabupaten Bintan;
- f) Agar terukur sasaran yang ingin di capai maka dalam proses perencanaan rencana kerja dengan menggunakan metode analisis standar biaya (ASB).

3.1.3.2 Urusan Kelautan dan Perikanan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Pertama** yaitu mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan, terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

1) Produksi Perikanan Budidaya

Grafik 3.34 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

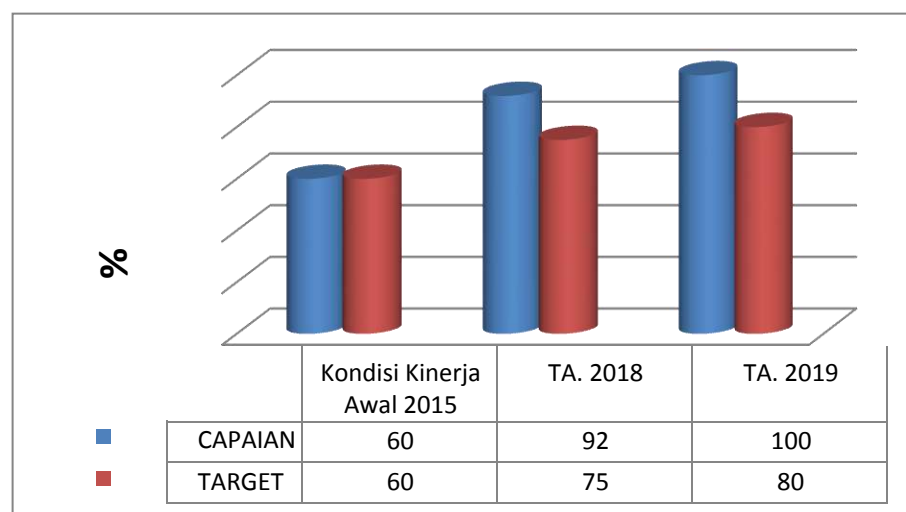


Jumlah Produksi Perikanan Budidaya merupakan indikator kinerja lama didalam indikator capaian program pembangunan. Untuk tahun 2019, jumlah produksi perikanan budidaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai capaian produksi perikanan sebesar **2.022 Ton**. Jumlah produksi perikanan budidaya ini juga meningkat dengan jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2018 yang lalu dimana dengan nilai capaian produksi sebesar 1.408,23 Ton. Selain karena pembinaan yang terus dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, peningkatan produksi perikanan budidaya ini disebabkan oleh sinerginya program dan kegiatan baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, yaitu diantaranya dengan kegiatan DAK

perikanan budidaya yang merupakan program dari pemerintah pusat, bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan juga dari APBD Pemerintah Kabupaten Bintan.

2) Pengendalian, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Ikan Yang Ditangani

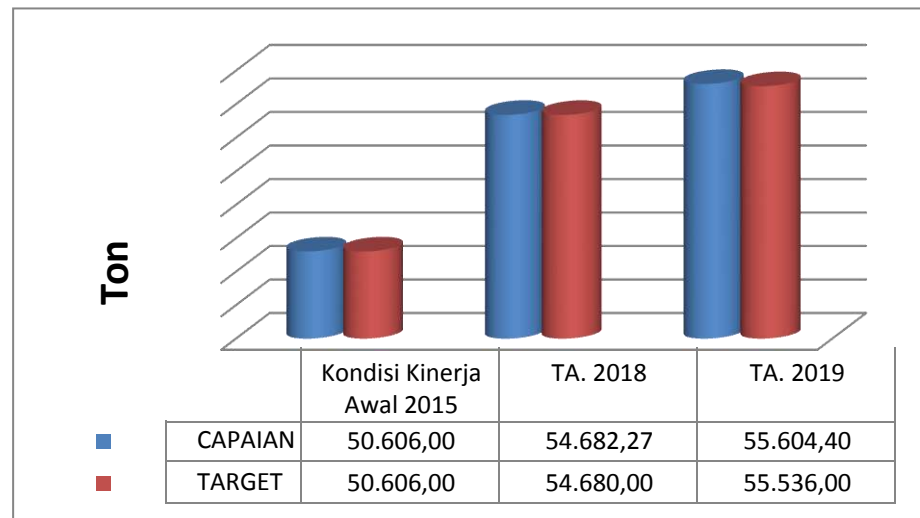
Grafik 3.35 Perkembangan Presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani



Presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani merupakan indikator kinerja lama didalam indikator capaian program pembangunan. Untuk tahun 2019, Jumlah Presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani mencapai bahkan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai presentase capaian sebesar **100%**. Presentase capaian sebesar **100%** ini didapat dari jumlah penyakit ikan yang ditangani yaitu 3 kasus dari jumlah laporan serangan penyakit ikan yang ada yaitu 3 kasus. Presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani ini juga meningkat dibanding dengan tahun 2018 yang lalu dimana dengan nilai presentase capaian sebesar **92%**.

3) Produksi Perikanan Tangkap

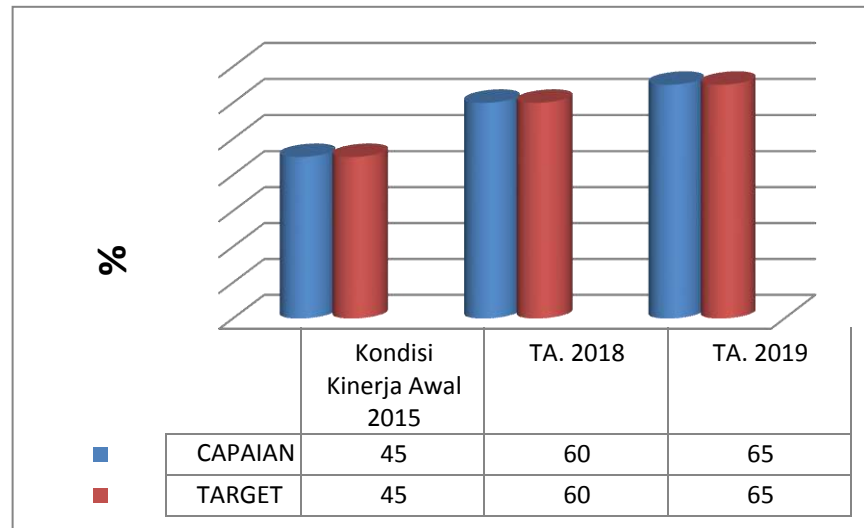
Grafik 3.36 Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap



Jumlah produksi perikanan tangkap merupakan indikator kinerja lama didalam indikator capaian program pembangunan. Untuk tahun 2019, jumlah produksi perikanan tangkap mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai capaian produksi perikanan tangkap sebesar **55.604,4 Ton**. Jumlah produksi perikanan tangkap ini juga meningkat dibanding dengan tahun 2018 yang lalu dimana dengan nilai capaian produksi perikanan tangkap sebesar 54.682,27 Ton. Selain karena pembinaan yang terus dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Bintan yang melimpah dibidang perikanan tangkap dimana luas wilayah perairan Kabupaten Bintan adalah sebesar 95% dari total luasan yang ada, peningkatan produksi perikanan tangkap ini juga disebabkan oleh sinerginya program dan kegiatan baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, yaitu diantaranya dengan kegiatan DAK perikanan tangkap yang merupakan program dari pemerintah pusat, bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan juga dari APBD Pemerintah Kabupaten Bintan.

4) Kelompok Nelayan Aktif

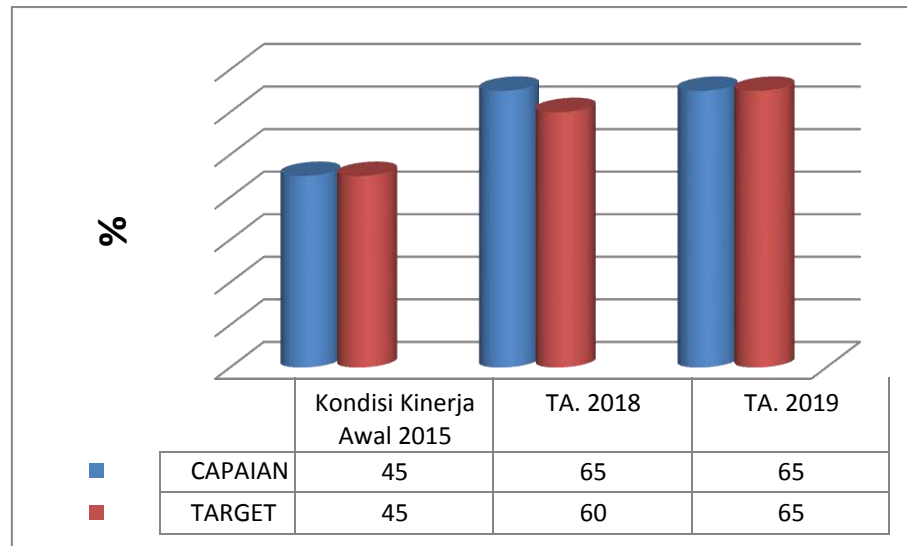
Grafik 3.37 Perkembangan Presentase Kelompok Nelayan Aktif



Presentase Kelompok Nelayan Aktif merupakan indikator kinerja lama didalam indikator capaian program pembangunan. Untuk tahun 2019, Jumlah Presentase kelompok nelayan aktif mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai presentase capaian sebesar **65%**. Capaian nilai presentase tersebut didapat dari presentase jumlah kelompok nelayan yang aktif yaitu 462 kelompok nelayan dari jumlah kelompok nelayan yang pernah dibantu yaitu 708 kelompok nelayan. Presentase kelompok nelayan aktif juga meningkat dibanding dengan tahun 2018 yang lalu dimana memiliki capaian nilai presentase kelompok nelayan yang aktif sebesar 60%.

5) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Aktif

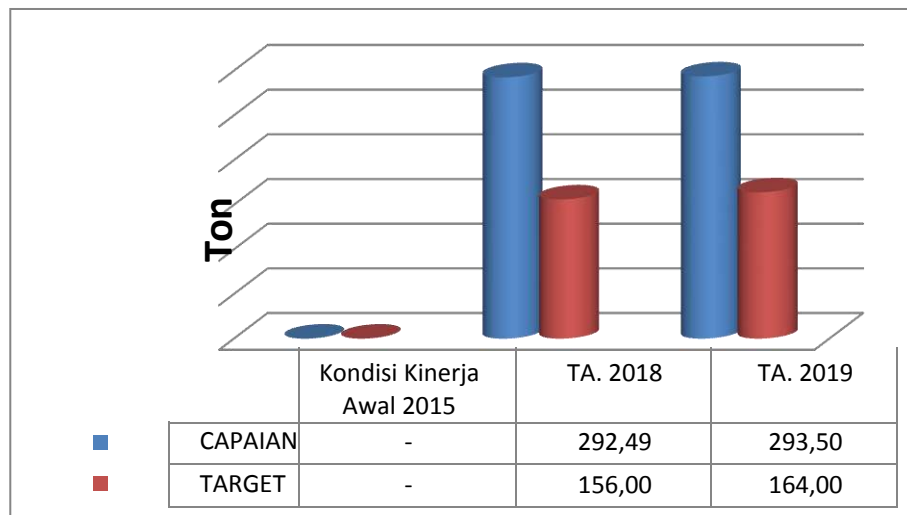
Grafik 3.38 Perkembangan Presentase Pokdakan Aktif



Presentase Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Aktif merupakan indikator kinerja lama didalam indikator capaian program pembangunan. Untuk tahun 2019, jumlah presentase kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) aktif mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai presentase capaian sebesar **65%** dimana didapat dari presentase jumlah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang aktif yaitu 117 Pokdakan dari jumlah Pokdakan yang pernah dibantu yaitu 180 pokdakan. Presentase kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) aktif ini tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun 2018 yang lalu dimana memiliki capaian nilai presentase kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) aktif sebesar 65%.

6) Produksi Pasca Panen Hasil Perikanan

Grafik 3.39 Perkembangan Jumlah Produksi Pasca Panen Hasil Perikanan



Jumlah produksi pasca panen hasil perikanan merupakan indikator kinerja baru didalam indikator capaian program pembangunan. Untuk tahun 2019, jumlah produksi pasca panen hasil perikanan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai capaian produksi perikanan tangkap sebesar **293,5 Ton**. Jumlah produksi pasca panen hasil perikanan ini juga meningkat dibanding dengan tahun 2018 yang lalu dimana dengan nilai capaian produksi sebesar 292,49 Ton. Selain karena pembinaan yang terus dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, peningkatan ini juga dikarenakan oleh potensi sumberdaya alam Kabupaten Bintan yang melimpah dimana luas wilayah perairan Kabupaten Bintan adalah sebesar 95% dari total luasan yang ada.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi

anggaran sebesar Rp. 3.217.005.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.175.794.100,- atau 98,72%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya.

a. Pelaksanaan Program

(1) DAK Perikanan Budidaya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.577.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.571.032.272,- atau 98,88%. *Output* kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Bintan.

(2) Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar dan Laut

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.798.775.000,- dan realisasi sebesar Rp.795.340.081,- atau 99,57%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya perikanan air tawar, payau dan laut di Kabupaten Bintan.

(3) Pendukung DAK Perikanan Budidaya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.900.000,- dan realisasi sebesar Rp.57.276.619,- atau 97,24%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya di Kabupaten Bintan.

(4) Peningkatan Produksi Usaha Budidaya Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.781.830.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.752.145.128,- atau 98,33%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya benih, pakan, vitamin dan obat-obatan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

▪ **Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**

Pada tahun 2019 jumlah produksi perikanan budidaya Kabupaten Bintan ditargetkan sebesar 2.011,96 Ton. Capaian hasil produksi perikanan budidaya sepanjang tahun tahun 2019 telah mencapai target yaitu sebesar **2.022 Ton**.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pembudidaya maupun petugas/aparat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah.
- b) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana usaha budidaya ikan seperti : saluran budidaya air tawar dan budidaya ikan di laut.
- c) Kondisi cuaca yang tidak menentu mengakibatkan peningkatan resiko kematian terhadap bantuan khususnya bibit ikan Administrasi kelompok terkait Kelompok Berbadan Hukum belum sepenuhnya terpenuhi.

(2) Solusi

- a) Perlunya dilakukan diklat teknis dan manajerial bagi para pembudidaya serta penambahan jumlah aparatur bidang perikanan.
- b) Perlunya dilakukan pembangunan BBI/UPR melalui tahap awal detail dokumen dan penyempurnaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- c) Perlunya dilakukan perencanaan waktu yang matang pada saat proses pengadaan sampai pada saat distribusi pemberian bantuan.
- d) Perlunya dilakukan peningkatan terkait sosialisasi

pentingnya Kelompok Berbadan Hukum.

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.134.495.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.133.192.192,- atau 99,03%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya pencegahan dan penanggulangan Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Monev Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.375.357,- atau 98,40%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan perikanan budidaya di 9 (sembilan) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.

(2) Sosialisasi dan Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.545.000,- dengan realisasi sebesar Rp.44.072.310,- atau 98,94%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya seleksi usaha BDIAT untuk memperoleh Sertifikasi CBIB untuk di 7 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.

(3) Pengadaan Vitamin, Obat Ikan dan Alat-alat Kesehatan Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.47.744.525,- atau 99,68%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya vitamin, obat dan alat kesehatan lingkungan perikanan budidaya di wilayah Kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

- **Presentase Pengendalian, Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Ikan yang Ditangani (%)**

Pada tahun 2019 presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani di Kabupaten Bintan ditargetkan sebesar 80%, sedangkan presentase capaian kinerjanya melebihi target yaitu mencapai angka **100%**.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengendalian, pencegahan dan pemberantasan hama, penyakit ikan dan kesehatan lingkungan.

(2) Solusi

- Dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan BKIPM (Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu) Tanjungpinang dan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam.

3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.6.619.107.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.675.685.760,- atau 70,63%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.648.395.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.4.603.267.990,- atau 99,03%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya Kapal penangkap ikan, Bahan Penangkap Ikan dan sarana pendukung diatas kapal penangkap ikan di wilayah Kabupaten Bintan.

(2) DAK Perikanan Tangkap

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.813.142.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.800.000,- atau 0,43%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya Kapal penangkap ikan, Alat Penangkap Ikan dan sarana pendukung diatas kapal penangkap ikan di wilayah Kabupaten Bintan.

(3) Pendamping DAK Perikanan Tangkap

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.157.570.750,- dan realisasi sebesar Rp.64.617.770,- atau 41,01%. *Output* dari kegiatan ini adalah Tersedianya operasional penunjang kegiatan DAK bidang Perikanan tangkap di Kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

▪ Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Pada Tahun 2019 jumlah produksi perikanan tangkap Kabupaten Bintan ditargetkan sebesar 55.536 Ton. Capaian hasil produksi perikanan tangkap sepanjang tahun tahun 2019 memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **55.604,4 Ton**.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Usaha kelautan dan perikanan masih dianggap beresiko dan tergantung dengn cuaca;
- b) Struktur armada penangkapan yang masih pincang, dimana sekitar 85% masih merupakan nelayan tradisional;

- c) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penangkapan, seperti : prasarana Tempat Pelelangan Ikan atau Pelabuhan Perikanan Ikan dan sarana alat penangkapan ikan;
- d) Dinamika perubahan kebijakan di daerah salah satunya yaitu adanya perombakan jabatan yang memakan waktu terlalu lama di awal tahun, sehingga kegiatan terhambat untuk dilaksanakan dan Kurangnya koordinasi dengan KKP dan ULP terkait penerapan pelaksanaan kegiatan DAK yang mana menggunakan aturan baru sehingga menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan akibat dari gagal lelang dan deadline penginputan pelaporan pada aplikasi terkait.
- e) Belum maksimalnya evaluasi hasil dari kegiatan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat bidang perikanan tangkap.

(2) Solusi

- a) Telah dicanangkan Program pemberian asuransi bagi nelayan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b) Perlu dilakukan restrukturisasi armada penangkapan, akselerasi pengembangan perikanan tangkap, rasionalisasi usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
- c) Dilakukan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan atau Pelabuhan Perikanan Ikan secara bertahap melalui penyempurnaan sarana dan prasarana. Sebagai tahap awal telah dilakukan studi kelayakan pelabuhan dan rencana rinci pembangunan pelabuhan perikanan, DED pelabuhan perikanan, AMDAL pelabuhan perikanan dan pengembangan alat

tangkap.

- d) Perlunya dilakukan peningkatan Sinerginitas antara regulasi dan kebijakan terkait tentang pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan DAK perikanan tangkap.
- e) Perlunya dilakukan peningkatan terhadap evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan bidang perikanan tangkap.

4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.540.755.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.530.555.329,- atau 98,11%. Outcome dari program ini adalah meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelayanan Usaha Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.605.000,- dan realisasi sebesar Rp.62.572.156,- atau 99,95%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan usaha perikanan berupa asuransi nelayan, TPKP/Surat Pengantar dan Kartu Kendali BBM.

(2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.650.000,- dan realisasi sebesar Rp.233.615.921,- atau 99,14%. *Output* dari kegiatan ini adalah membantu menumbuhkan, menguatkan dan mengembangkan kelompok pelaku usaha perikanan di Kabupaten Bintan.

(3) FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.234.367.252,- atau 96,65%. *Output* dari kegiatan ini adalah

terlaksananya kegiatan untuk peningkatan konsumsi ikan yaitu lomba masak menu serba ikan yang diikuti oleh perwakilan 10 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

- **Persentase Kelompok Nelayan Aktif**

Pada Tahun 2019 Presentase Kelompok Nelayan Aktif Kabupaten Bintan ditargetkan sebesar 65%, sedangkan capaian kinerjanya memenuhi target yaitu mencapai angka **65%**.

- **Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) Aktif**

Pada Tahun 2019 Presentase Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Aktif Kabupaten Bintan ditargetkan sebesar 65%, sedangkan capaian kinerjanya memenuhi target yaitu mencapai angka **65%**.

- **Produksi Pasca Panen Hasil Perikanan**

Pada tahun 2019 jumlah produksi produksi pasca panen hasil perikanan di Kabupaten Bintan ditargetkan sebesar 164 Ton. Capaian hasil produksi produksi pasca panen hasil perikanan sepanjang tahun tahun 2019 telah mencapai bahkan melebihi target yaitu sebesar 293,5 Ton.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Masih kurangnya gairah atau semangat pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan usaha perikanannya secara mandiri.

(2) Solusi

Perlunya dilakukan peningkatan terhadap evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan bidang Pembinaan, Kelembagaan dan Pemasaran.

3.1.3.3 Urusan Pertanian

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan melalui 4 (empat) kegiatan pokok yaitu: 1) pembinaan dan peningkatan informasi penyuluhan pertanian; 2) penyusunan program penyuluhan pertanian; 3) pertemuan kelompok petani, dan; 4) peningkatan kapasitas kerja penyuluh pertanian lapangan.

Total alokasi anggaran yang disediakan dalam mendukung program ini adalah sebesar **Rp. 667.612.000,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 594.981.016,-** atau sebesar **89,12 %** dari total anggaran yang dialokasikan dan dengan realisasi pencapaian fisik sebesar **100%**.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Kegiatan sebagai berikut:

1) Pembinaan dan Peningkatan Informasi Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 136.720.000,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 121.886.316,-** atau dalam prosentase sebesar **89,15%** dengan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar **100%**.

a. Pelaksanaan Program

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pembinaan terhadap petani dan kelompok tani dalam melakukan usaha tani secara baik dan tepat sasaran. serta menyediakan informasi dalam bentuk data base petani dan kelompok tani sebagai acuan dalam menyusun kebijakan penyuluhan pada tahun berikutnya

dengan harapan sebagai berikut :

- Terbinanya pengurus dan anggota HKTI sebagai ujung tombak pembangunan pertanian secara mantap.
- Terciptanya kondisi pertanian di Kabupaten Bintan yang maju.
- Terwujudnya petani dan nelayan di Kabupaten Bintan yang handal.
- Terlaksananya kegiatan penyuluhan informasi pertanian.
- Terbentuknya wadah bagi Kelompok Tani.

Sasaran dari kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Informasi Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2019 adalah petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di Kabupaten Bintan yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan informasi penyuluhan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Dan Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah meningkatnya pembinaan dan penyampaian informasi penyuluhan pertanian di Kabupaten Bintan

Dalam kegiatan ini juga diperoleh hasil lain berupa susunan kepengurusan HKTI tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Bintan.

Pengurus HKTI Tingkat Kecamatan

1. Kecamatan Bintan Utara

Ketua	: Vera
Sekretaris	: Suparman
Bendahara	: Winarni

2. **Kecamatan Bintan Timur**
Ketua : Suwarwi
Sekretaris : Kasmari
Bendahara : Muliadi
3. **Kecamatan Gunung Kijang**
Ketua : Panut
Sekretaris : Supaat
Bendahara : Poniti
4. **Kecamatan Teluk Sebong**
Ketua : M. Ikrom
Sekretaris : Korina
Bendahara : Afandi
5. **Kecamatan Seri Kuala Lobam**
Ketua : Gino
: Nedi
Sekretaris : Saupriyadi
Bendahara : Sinwan
6. **Kecamatan Teluk Bintan**
Ketua : Nuryanto
Sekretaris : Hajis
Bendahara : Supriatun
7. **Kecamatan Toapaya**
Ketua : Edi rianto
Sekretaris : Siswanto
Bendahara : Sukatman
8. **Kecamatan Bintan Pesisir**
Ketua : Miliha
Sekretaris : Doni
Bendahara : Slemet
9. **Kecamatan Mantang**
Ketua : Amat
Sekretaris : Maryani
Bendahara : Rahima
10. **Kecamatan Tambelan**
Ketua : Hidayat Yahya
Sekretaris : Murtada
Bendahara : Kasmadi

Susunan Pengurus HKTI Tingkat Kabupaten

- I. Dewan Pembina : Bupati Bintan
Wakil Bupati Bintan
Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bintan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bintan
- II. Badan Pertimbangan : Ketua KTNA Kabupaten Bintan
Koordinator Penyuluh Kabupaten Bintan
Kepala BPK Se-Kabupaten Bintan
- III. Pengurus
Ketua : Yorioskandar.S.Pi
Wakil Ketua I : Tukiman
Wakil Ketua II : Edi Subagio
Wakil Ketua III : Suyitno
Wakil Ketua IV : Suryani, SE
Wakil Ketua V : Misdarto
- IV. Komite
 - 1. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi
Koordinator : Sutrisno
Anggota : Luqman
Kasmin
 - 2. Kewirausahaan
Koordinator : Edi Suyani
Anggota : Dadi Rosadi
Asun
 - 3. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Koordinator : Wagino
Anggota : Muriadi
 - 4. Perkebunan
Koordinator : Anang Saiful Huda
Anggota : Mujio
Gino
 - 5. Perternakan
Koordinator : Toman Siahaan
Anggota : Firdaus
Satiman

Pemberdayaan Petani

Koordinator : Syahrinaldi, Sp
Anggota : Sunardi
: M. Ikrom
: Suharmi

7. Pemberdayaan Wanita Tani

Koordinator : Syarifah Azizah
Anggota : Elvi Sumarni
: Suryani
: Sampawati

8. Pendidikan Dan Pelatihan

Koordinator : Gindriawan. S. Z., SP
Anggota : Riaji, S.Sos
: Sopian

9. Riset Dan Perkembangan

Koordinator : E. Supriadi, S.Sos
Anggota : Bambang Sudaryanto
: Ramli

10. Hubungan Masyarakat

Koordinator : Prianto, Amd
Anggota : Sayid
: Rasman

11. Hubungan Luar Negeri

Koordinator : M. Dasar
Anggota : Susi Hamdayani

12. Hukum dan Advokasi

Koordinator : Jurmalis
Anggota : Baharuddin

13. Permodalan, Perbankan dan Investasi

Koordinator : Tusiran
Anggota : Ismun

14. Koperasi , Perdagangan dan Agro Industri

Koordinator : Arison
Anggota : Tjhungkang
: Purwati

Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan informasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan informasi penyuluh pertanian meliputi:
 - a) Penyuluh pertanian dengan sasaran petani se Kabupaten Bintan sejumlah 12 terdiri dari 3 orang laki-laki PNS, 1 orang perempuan CPNS, 1 orang perempuan THL-TB, 1 orang perempuan honor bidang kegiatan, 6 orang laki-laki honor.
 - b) Pengurus HKTI Tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang meliputi: tingkat Kecamatan berjumlah 30 orang sedangkan tingkat Kabupaten berjumlah 50 orang.
- (2) Pertemuan pengurus HKTI tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
 - a) Pertemuan pengurus Tingkat Kecamatan sebanyak 2 kali.
 - Pertemuan I tingkat Kecamatan untuk wilayah Utara terdiri dari Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Bintan dilaksanakan di Rumah Bapak Jumadi pada tanggal 10 April 2019.
 - Pertemuan II tingkat Kecamatan untuk wilayah Selatan terdiri dari Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang dilaksanakan di Pasar Tani, Kecamatan Toapaya pada tanggal 3 Mei 2019.
 - b) Pertemuan pengurus Tingkat Kabupaten Bintan sebanyak 4 kali dalam setahun terealisasi sebanyak 3 kali yang bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.

- Pertemuan I Pengurus HKTI Tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada tanggal 02 September 2019.
 - Pertemuan II Pengurus HKTI Tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada tanggal 07 oktober 2019.
 - Pertemuan III Pengurus HKTI Tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada tanggal 20 November 2019.
- c) Pencetak banner dan brosur untuk di bagikan kepada pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Tingkat Kabupaten Bintan, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Petani untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Brosur yang dicetak dan dibagikan adalah:
- Diagram Proses Pengolahan minyak kelapa.
 - Lima Kelebihan Ayam Kampung Kemala Farm.
 - Bagan Alur Penyediaan Pupuk Bersubsidi.
 - Profil HKTI Kabupaten Bintan.
 - Kebutuhan Pupuk dan Pengendali OPT untuk Budidaya Ubi Jalar.
 - Pestisida Nabati.

b. Permasalahan dan Solusi

Secara Umum, pelaksanaan kegiatan ini masih ditemukan permasalahan namun demikian permasalahan tersebut telah berhasil ditindak lanjuti, sebagaimana uraian sebagai berikut:

(1) Permasalahan

- a) Tingkat kesadaran anggota pengurus HKTI masih rendah untuk menghadiri acara pertemuan pengurus HKTI.
- b) Tidak adanya uang saku dan transportasi peserta di RKA sehingga mengurangi minat peserta pengurus HKTI.
- c) Tidak adanya dana sound sistem untuk kegiatan
- d) Masih kurangnya sinkronisasi antara HKTI Provinsi dengan HKTI Kabupaten sehingga program-program HKTI Pusat tidak diketahui oleh HKTI Kabupaten.
- e) Masih kurangnya kemampuan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman pada penyuluh lapangan.
- f) Faktor cuaca yang sangat mempengaruhi produksi dan pertumbuhan tanaman.
- g) Lahan yang digarap petani ada sebagian menumpang sehingga tidak leluasa melakukan usaha pertanian.
- h) Kurangnya Akses Petani dengan lembaga keuangan untuk penambahan modal usaha.
- i) Harga produk di tingkat petani rendah, sedangkan di tingkat pedagang tinggi.
- j) Dalam pemasaran produk masih bersifat individual sehingga terjadi persaingan tidak sehat antar petani.
- k) Kerjasama petani dan pedagang masih belum menguntungkan dipihak petani.
- l) Kurangnya IPTEK dalam melaksanakan tugas bagi penyuluh.
- m) Kurangnya jumlah tenaga penyuluh.
- n) Pencapaian target kegiatan penyuluhan belum maksimal.
- o) Perlu peningkatan koordinasi antar penyuluh dengan instansi terkait dan lembaga vertikal.

- p) Perlu Penambahan anggaran untuk Kegiatan Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian.

(2) Solusi

- a) Rencana kedepan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Informasi Penyuluhan Pertanian akan dihibahkan ke petani Pengurus HKTI sehingga mendapatkan hasil out put yang lebih optimal.
- b) Akan diupayakan untuk kegiatan mendatang lebih diperbanyak turun lapangan oleh pengurus HKTI
- c) Akan diupayakan untuk bantuan CSR dari kawasan Lagoi dan Lobam untuk bisa di alokasikan ke petani
- d) Perencanaan yang lebih valid dan matang sehingga memastikan ada dana untuk uang saku dan transportasi untuk Pengurus HKTI dan sewa sound sistem untuk berlangsungnya kegiatan.
- e) Penambahan Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga Penyuluh Lapangan
- f) Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
- g) Peningkatan pembinaan dan informasi penyuluh pertanian dengan melakukan studi banding atau diklat ke Badan Diklat atau ke Provinsi lain.

2) Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 42.666.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 28.383.300,-** atau **66,52 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten, memberikan acuan bagi penyuluh di kabupaten dan kecamatan dalam menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian, menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan

untuk disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pertanian, memberikan acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menyusun program penyuluhan dan kebijakan kabupaten agar sejalan dengan kebijakan baik program penyuluhan provinsi maupun nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pasal 13 ayat 1 butir a.

Sasaran Program penyuluhan adalah para penyuluh pertanian para pelaku utama serta pelaku usaha. Untuk tingkat Kabupaten Bintan difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan program penyuluhan tahun 2019 (1 Dokumen) yang didalamnya berisi hal-hal sebagai berikut: 1) keadaan umum wilayah Kabupaten Bintan meliputi deskripsi umum wilayah, luas wilayah, karekteristik tanah dan iklim; 2) kondisi fisik petanian meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta sumber daya manusia; 3) tujuan dan sasaran yang selaras dengan pembangunan nasional; 4) permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian; 5) cara pencapaian tujuan berdasarkan analisa keadaan spesifik lokasi dan masalah yang dihadapi, dan; 6) Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) yang didalamnya berisi tujuan, masalah, metode penyuluhansasaran, volume waktu, lokasi, pembiayaan, penanggungjawab pelaksana dan instansi terkait

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pertemuan penyusunan programa penyuluhan pertanian dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Jl. Nusantara Km. 18 Kijang, dengan peserta tim perumus

programa yang berasal dari petugas baik dari seluruh bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dan penyuluh pertanian lapangan serta Penyuluh Pertanian Swadaya juga pelaku usaha pembangunan pertanian.

b. Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti secara maksimal sebagaimana uraian sebagai berikut: 1) terbatasnya waktu pelatihan penyusunan program karena terbatasnya anggaran pendanaan, dan; 2) tidak adanya format dan pedoman khusus tentang standard penyusunan program tingkat kabupaten yang bersumber dari Kementerian Pertanian.

(1) Permasalahan

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan maka dapat dirumuskan permasalahan dari berbagai sub sektor sebagai berikut :

- a) Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Kurangnya pengetahuan dan minat pelaku utama dalam penggunaan bibit unggul yang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan hasil tanaman selain pupuk, air, pencahayaan dan iklim.
 - Kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam teknik budidaya dan pengolahan tanaman hortikultura.
 - Kurangnya pengetahuan pelaku utama dalam pengendalian hama terpadu (PHT) sehingga

petani memilih menggunakan pestisida daripada melakukan tindakan preventif ataupun menggunakan pestisida alami,

- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tani dalam pengaturan pola tanam dalam upaya memutus siklus hidup organisme pengganggu tanaman (OPT)
- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang pemupukan yang tepat.
- Kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap pelaku utama, pelaku usaha dan petugas tentang mutu, jumlah kontinuitas dan harga produk hortikultura.
- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tani dalam hal budidaya tanaman bawang merah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena harganya relatif stabil dan dapat tumbuh dan berproduksi secara baik di pulau Bintan.
- Kurangnya minat pelaku usaha tani khususnya wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan secara maksimal.

b) Sub Sektor Perkebunan

- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam hal budidaya tanaman kelapa
- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha dalam penyadapan karet.
- Kurangnya minat petani untuk mengembangkan budidaya lada
- Tingginya harga saprodi
- Ketidakstabilan harga produk pertanian ditingkat petani, bahkan relatif rendah karena harga ditentukan oleh tengkulak.

- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam hal pemasaran dan pengolahan hasil pertanian yang dapat meningkatkan nilai produk
- Masih rendahnya produksi tanaman kelapa
- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam memanfaatkan limbah pertanian untuk dimanfaatkan menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk organik pada lahannya bahkan dapat dijual.
- Belum ada penampung ubi kayu dalam skala besar.

c) Sub Sektor Peternakan

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha (peternak) untuk melakukan vaksinasi dan sanitasi kandang
- Tingginya harga sapi prodi dan pakan ternak
- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan juga sikap pelaku utama dalam hal penyediaan kandang, pakan tambahan maupun pengolahan limbah kotoran ternak.
- Orientasi pelaksanaan kegiatan dalam usaha ternak belum bercorak agribisnis kecuali ayam ras.

d) Sub Sektor Sumber Daya Manusia

- Masih rendahnya pengetahuan, ketrampilan pelaku utama dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki.
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama untuk memilih usaha yang paling menguntungkan, mengidentifikasi kebutuhan informasi, teknologi dan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

- Masih rendahnya minat kelompok pelaku utama untuk mencoba inovasi teknologi baru, meskipun teknologi tersebut berkaitan dengan usahanya.
- Masih rendahnya kesadaran anggota kelompok untuk aktif hadir pada pertemuan kelompok.
- Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan kurang berjalan dengan baik
- Peningkatan kompetensi penyuluh melalui diklat masih kurang dan tidak merata.
- Kompetensi penyuluh masih belum sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha
- Belum adanya penyuluh yang memiliki kompetensi dalam teknik pengendalian hama terpadu yang menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produksi secara arif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Belum terpenuhinya penempatan satu desa satu penyuluh (kurangnya jumlah penyuluh pertanian).

(2) Solusi

Beberapa rumusan solusi yang disepakati guna mengatasi permasalahan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan pelaku utama, pelaku usaha dalam mengidentifikasi potensi yang dimilikinya.
- b) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama untuk memilih usaha yang paling menguntungkan, mengidentifikasi kebutuhan informasi, teknologi dan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya secara

berkelanjutan.

- c) Meningkatkan pengetahuan dalam hal keswadanaan dan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan mempertahankan kesetaraan gender.
- d) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dalam teknik fasilitasi dan organisasi petani (penyuluh swadaya)
- e) Penyempurnaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (melalui pembinaan khusus)
- f) Penerapan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan pelaku utama, pelaku usaha dan petugas.
- g) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (penyuluh/petugas dan pelaku utama)
- h) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama melalui upaya peningkatan produktivitas.
- i) Meningkatkan kemampuan Gapoktan dan KTNA dalam perencanaan, mengolah administrasi keuangan (pembukuan) dan sekretariat kelompok.
- j) Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga terkait melalui kegiatan dan pertemuan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.
- k) Peningkatan peran para ibu tani melalui kelompok wanita tani dalam hal teknik pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolahan hasil.
- l) Mengusulkan penambahan pendanaan untuk kegiatan penyusunan program.

3) Pertemuan Kelompok Petani

Kegiatan Pertemuan Petani adalah forum konsultasi antara pelaku utama dan / atau Pelaku Usaha dengan Pihak Pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk

musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha pelaku utama dan atau Pelaku Usaha dalam kaitan dengan pelaksana program pembangaunan pertanian di Kabupaten Bintan. Dengan adanya pertemuan Kelompok petani tersebut maka diharapkan pembangunan pertanian di Kabupaten Bintan dapat maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 292.866.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 263.676.800,-** atau **90,03 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

Tujuan dari kegiatan Pertemuan Kelompok Tani ini adalah :

- Sebagai sarana transfer informasi, teknologi, fasilitasi kemitraan dan jejaring agribisnis para kontak tani.
- Sebagai media fasilitasi kegiatan ekonomi dan kemitraan usaha
- Sebagai sarana transfer pengetahuan, teknologi dan informasi.
- Sebagai wadah mengakomodasi aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bintan
- Sebagai sarana evaluasi kegiatan pembangunan pertanian yang telah dilakukan
- Sebagai penyeleksi petani yang akan mewakili Pekan Nasional (Penas) XX di Padang Sumatera Barat.

Sasaran Kegiatan Pertemuan Kelompok Petani adalah petani, kelompok tani, gapoktan, para pelaku utama serta pelaku usaha pertanian di Kabupaten Bintan yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Pertemuan Kelompok Petani se

Kabupaten Bintan sebanyak 1.000 orang, dan terlaksananya pembangunan pertanian yang didukung oleh semua pihak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Pertemuan Kelompok Petani ini adalah meningkatnya pengembangan pertanian dan produksi di Kabupaten Bintan.

4) Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

Kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kapasitas kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian guna mendukung pencapaian Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 195.360.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 181.034.600,-** atau **92.67%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

Tujuan dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan ini adalah :

- Meningkatkan kemampuan kerja dengan cara menambah jumlah petugas penyuluh pertanian lapangan lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan penunjangnya agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya pertanian sehingga dapat bermanfaat dalam peningkatan produktifitas, pendapatan serta kesejahteraan masyarakat petani
- Mempersempit ruang kerja/rentang kendali sehingga pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat terlaksana lebih optimal

Sasaran dari kegiatan adalah Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Bintan sebanyak 12 orang (3 orang PNS, 1 orang CPNS, 1 orang THL-TB dan 7 orang tenaga kontrak yang dibiayai oleh sumber dana APBD Kabupaten Bintan Tahun

Anggaran 2019 kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan). Keluaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas kerja penyuluh pertanian lapangan sebanyak 7 orang dan Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan ini adalah tercapainya peningkatan kapasitas kerja penyuluh pertanian lapangan.

a. Pelaksanaan Kegiatan

Inti dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan ini adalah: a) honorarium Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan Kontrak sebanyak 7 orang selama 12 bulan; b) insentif Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan Kontrak sebanyak 7 orang selama 12 bulan; c) peralatan kerja berupa tas ransel, jas hujan, dan sepatu boot masing-masing sebanyak 7 buah sebagai pendukung kerja 7 orang Petugas Penyuluh Pertanian kontrak; d) biaya kunjungan ke lapangan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja serta persiapan dokumen kebijakan teknis penyuluh pertanian lapangan, dan; e) biaya konsumsi pertemuan rutin penyuluh pertanian lapangan.

Tabel 3.68 Penetapan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan

No.	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja / Alamat
1.	Syahrinaldi, SP	Penyuluh Pertanian Muda	Desa Penaga, Pengujan, Pangkil, Bintan Buyu
2.	Gindriawan S, SP	Penyuluh Pertanian Muda	Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Bintan Timur dan Mantang
3.	Suyanta	Penyuluh Pertanian	Kelurahan Kota Baru, Ekan Aculai, Sebon Pereh, Sebon Lagoi
4.	Siti Jaziroh, A.Md	THL-TB Penyuluh Pertanian	Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Seri Kuala Lobam

5.	Nurul Hidayati, SP	Penyuluh Pertanian Pertama	Kelurahan Toapaya Asri, Desa Toapaya Selatan, Malang Rapat, Teluk Bakau
6.	Ariani Susanti, SP	Penyuluh Pertanian	Kelurahan Kawal, Desa Gunung Kijang
7.	Arif Gunarso, S.Pt	Penyuluh Pertanian	Desa Toapaya Utara, Toapaya
8.	M. Zamsari, SP	Penyuluh Pertanian	Desa/ Kelurahan Se Kecamatan Bintang Pesisir
9.	Akmal Khairi, SP	Penyuluh Pertanian	Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Tambelan
10.	Dicky Andrian	Penyuluh Pertanian	Desa Berakit, Pengudang, Sri Bintang
11.	Supiandi	Penyuluh Pertanian	Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Bintang Utara
12.	Islaniyanto	Penyuluh Pertanian	Kelurahan Tembeling Tanjung dan Tembeling

- Susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten Masa Jabatan 2019-2021:

I. Ketua merangkap Anggota:

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

II. Wakil Ketua merangkap Anggota:

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

III. Sekretaris merangkap Anggota:

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

IV. Anggota :

1. Penyuluh Pertanian Muda
2. Penyuluh Pertanian Madya.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih perlu dimaksimalkan sebagai upaya penyempurnaan kedepan diantaranya sebagai berikut :

- a) Masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan yang idealnya 2 orang petugas setiap Desa/Kelurahan, hal ini menyebabkan kurang optimalnya intensitas kunjungan pembinaan ke tingkat petani/Kelompok Tani mengingat pada periode 31 Desember 2019 diketahui mengalami peningkatan dan yang sudah mencapai 325 Kelompok.
- b) Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan.

(2) Solusi

Guna mengoptimalkan penyuluhan yang dilakukan, berikut adalah hal yang dapat dilakukan adalah :

- a) Mengusulkan penambahan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian.
- b) Mengusulkan penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan.

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada **Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan** dan **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan** melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 842.962.250,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 700.490.040** atau **90,33%** serta realisasi fisik sebesar **99,09%** dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

Perincian kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 139.152.250,-** dan terealisasi sebesar **Rp.**

128.851.100,- atau **92,60 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Output kegiatan ini adalah tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras dan 12 laporan Ketersediaan Pangan Masyarakat.

Target RPJMD Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Bintan Tahun 2019 adalah sebanyak 5.300 Kg Beras, Realisasi sebesar 5.600 Kg Beras. Realisasi Kegiatan Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah dibanding dengan target (5.300 kg), Capaian Kinerja: 100 % (sangat baik).

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Daerah sejak Tahun 2017 sebanyak 16.100 Kg. Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Bintan, saat ini ada di Gudang BULOG Subdivre Tanjungpinang sebesar 7.308 Kg.

Jenis beras tersebut adalah:

- Kualitas/Jenis: Kualitas Medium dengan spesifikasi:
- Kadar air : maksimum 14 %
- Butir patah : maksimum 20%
- Kadar menir : maksimum 2 %
- Derajat sosoh : minimum 95%

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan,, penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok yaitu beras dalam menghadapi keadaan darurat, pasca bencana dan gejolak harga pangan.

Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- Meningkatkan penyediaan cadangan bahan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil;

- Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana, masalah pangan serta terjadinya gejolak harga;
- Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien (bersifat mendadak dan sementara) khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.
- Gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal dalam waktu 2 (dua) minggu berturut-turut.
- Bencana sosial berupa kebakaran, kebakaran hutan, kerusakan yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian atau kerusakan harta benda, lahan atau kebun sebagai mata pencaharian.
- Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan
- atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam pengelolaannya, untuk:

- Sebagai persediaan yang siap salur sewaktu – waktu, begitu ada bencana.
- Disalurkan kepada masyarakat pasca bencana alam : angin puting beliung, banjir, kebakaran, gempa, tanah

longsor dlsbnya.

- Rawan pangan transien.
- Gejolak harga beras dengan kenaikan 25 % selama 2 minggu berturut-turut.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 melalui MoU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dengan Perum Bulog Subdivre Tanjungpinang Nomor: 520/DKPP/MoU/333/VI/2019 dan Nomor: MoU-008.03A.01.06.2019.

(2) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 133.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp 116.092.662,- atau 86,95 % dengan realisasi fisik sebesar 96,25%. Output kegiatan ini adalah tersedianya Pangan di Lumbung Pangan Masyarakat sebesar 5.000 Kg Beras.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi daerah yang terindikasi rentan pangan akibat cuaca yang menyebabkan sulitnya akses dan distribusi pangan ke suatu daerah seperti Kecamatan Tambelan. Dengan adanya Lumbung Pangan di Kecamatan Tambelan dapat meningkatkan ketersediaan pangan beras di masyarakat.

(3) Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 57. 065.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.754.817,- atau 53,89 % dengan realisasi fisik sebesar 79,38 %. Output kegiatan ini adalah meningkatnya Peran Dewan Ketahanan Pangan Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi Kelompok Kerja Dewan Ketahanan pangan dalam setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dan melibatkan dari unsur perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dari segi aksesibility, distribusi, transportasi dan produksi.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Kurangnya koordinasi data korban bencana.
- b) Laporan kejadian sering terlambat dari Desa/kelurahan atau kecamatan.
- c) Kurangnya pengetahuan dan skill petugas.
- d) Penetapan harga beras mengalami perubahan
- e) Jauhnya rentang kendali petugas.
- f) Kurang lancarnya koordinasi antar OPD dalam Pokja Dewan Ketahanan Pangan.
- g) Perencanaan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

(2) Solusi

- a) Memaksimalkan koordinasi dengan OPD terkait.
- b) Membuat perencanaan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
- c) Sosialisasi ke Kecamatan mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah.
- d) Pelatihan atau bimbingan teknis.

2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

a. Pelaksanaan Program Seksi Konsumsi Pangan

(1) Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Pada Tahun Anggaran 2019 Seksi Konsumsi Pangan mendapat alokasi Kegiatan Pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.035.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.104.841 atau 95,02 % dengan realisasi fisik

sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang tersebar di 10 Kecamatan.

Dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019, diimplementasikan melalui beberapa sub kegiatan, antara lain:

- Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan mengadakan Pelaksanaan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) se Kabupaten Bintan, dimana kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui konsep KRPL dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Dasa Wisma sebagai peserta lomba;
- Pelatihan Diversifikasi Pangan, dengan memberikan anggota stimulus pengetahuan budidaya tanaman pangan;
- Pengadaan Belanja bahan/ bibit tanaman pertanian/ tanaman lainnya, yang bertujuan untuk Praktek dalam budidaya tanaman pangan untuk bisa membudidayakan berbagai tanaman di pekarangan rumah.

Adapun lokasi lomba Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (KRPL) pada 10 (sepuluh) kecamatan dengan jumlah peserta 20 (dua puluh) kelompok. Adapun pelaksanaan pada 1 (satu) Kecamatan Tambelan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni

2019 dan 9 (sembilan) Kecamatan lainnya pada tanggal 01 Juli sd 03 Juli 2019.

Tabel 3.69 Daftar Peserta Lomba KRPL Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Bintang Tahun 2019

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama KWT/Dasawisma	Ketua
1.	Bintang Utara	Desa Lancang Kuning	KWT Lancang Kuning Jaya	Maria Kedy
		Desa Lancang Kuning	KWT Pisang	Sri Suwarni
2.	Seri Kuala Lobam	Kel Teluk Lobam	KWT Maju Bersama	Sukriyah
		Desa Teluk Sasah	KWT Nipah Pantai	Kamisah
		Desa Kuala Sempang	KWT Seroja	Suti Sulaiha
3.	Teluk Sebong	Desa Ekan Angulai	KWT Kemuning	Katmirah
4.	Teluk Bintang	Kel Tembeling	KWT Abdi Karya	Susi Handayani
5.	Toapaya	Kel Toapaya Asri	KWT Kamboja	Khorida
		Kel Toapaya Asri	KWT Barokah	Musponasih
		Desa Toapaya	KWT Bintang Karya	Saudah
6.	Gunung Kijang	Desa Gunung Kijang	DW Bunga Raya	Susiliyah
7.	Bintang Pesisir	Desa Air Glubi	KWT Mandiri	Dwi Cahya Ningsih
8.	Mantang	Desa Mantang Besar	Cenut 1	Idayu
9.	Bintang Timur	Kel Sei Lekop	KWT Puspa Kenanga	Nati
		Kel Gunung Lengkuas	KWT Harapan	Suharmi
		Kel Gunung Lengkuas	KWT Telaga Biru	Suparti
		Kel Kijang Kota	KWT Kusuma Jaya	Masriva
10.	Tambelan	Kel Teluk Sekuni	DW Anggrek	Sari Kurniati
		Desa Kampung hilir	DW Flamboyan	Nana
		Desa Kukup	DW Kemunting	Musniar

Ruang lingkup kerja Kegiatan lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang bersumber dari dana APBD Tahun 2019, yaitu terdiri dari : Pendataan, monitoring dan seleksi. Adapun tahapan dalam pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dimulai dengan tahapan pendataan kepada kelompok,

selanjutnya monitoring dan dilanjutkan dengan tahapan seleksi.

Adapun tim penilai lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terdiri dari :

- a) Tim Penilai dari DKPP Kabupaten Bintan terdiri dari 2 orang;
- b) Tim Penilai dari BPTP Propinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1 orang;
- c) Tim Penilai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan terdiri dari 1 orang;
- d) Tim Penilai dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan terdiri dari 1 orang.

Adapun hasil dari hasil penilaian Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dinilai kelapangan untuk Tahun 2019, diperoleh hasil penilaianan tersebut sebagai berikut :

- a) Juara pertama diraih oleh KWT Kemuning dari Desa Ekan Aculai Kecamatan Telok Sebong, dengan nilai 1.335;
- b) Juara kedua diraih oleh KWT Mandiri dari Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, dengan nilai 1.135;
- c) Juara ketiga diraih oleh KWT Nipah Pantai dari Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam, dengan nilai 945.

Juara Harapan yaitu:

- a) Juara harapan pertama diraih oleh KWT Maju Bersama Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam, dengan nilai 940;
- b) Juara harapan kedua diraih oleh KWT Bintan Karya

- Desa Toapaya Kecamatan Toapaya, dengan nilai 825;
- c) Juara harapan ketiga diraih oleh Dasawisma Flamboyan Desa Kampung Hilir Kecamatan Tambelan, dengan nilai 815.

Sedangkan 14 (empat belas) kelompok lainnya yang juga sebagai peserta mendapatkan dana pembinaan. Adapun semua kelompok peserta menerima Piagam Penghargaan dan Dana Pembinaan mulai dari Rp. 3.000.000,- sd Rp. 500.000,- dari dana APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan sebagai hadiah lomba.

Dalam upaya untuk pengembangan pangan lokal dengan mengadakan pelatihan budidaya tanaman pangan yang diisi oleh narasumber seorang tenaga PPL Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan. Dimana hal ini untuk memberikan stimulus pengetahuan dalam hal bercocok tanam tanaman pangan dan buah, serta agar mengurangi ketergantungan pola pangan masyarakat terhadap komoditi beras. Namun, bisa lebih mengembangkan sumber bahan pangan yang bervariasi, seperti sumber bahan pokok lainnya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk membudidayakan pola konsumsi pangan yang berkonsep Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Kegiatan ini diikuti oleh 60 (enam puluh) orang yang berasal dari 30 (tiga puluh) kelompok wanita (KWT dan Dasawisma), yang dilaksanakan di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada tanggal 09 April 2019.

Pengelolaan tanaman di pekarangan dengan menggunakan konsep organik, adalah suatu sistem pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia buatan. Namun mewujudkan sikap dan perilaku hidup yang menghargai alam dan

berkeyakinan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan yang harus dilestarikan (Joko Prayogo,dkk 1999).

Pengelolaan pekarangan oleh kelompok wanita adalah mengelola tanaman sejumlah 75 polybag/lahan dengan berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Pertanian. Namun dalam pelaksanaan pemantauan di lapangan pada kelompok wanita melebihi dari jumlah minimal dimaksud. Berikut data perkembangan KRPL di Kabupaten Bintan melalui program aksi KRPL.

Tabel 3.70 Daftar Pengelola KRPL di Kab. Bintan

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kelompok KRPL	Jumlah Anggota	Jumlah Tanaman (btg/polybag)	Luas Pekarangan Organic (m2)
1.	2011 s/d 2013	26	520	41.600	13.000
2.	2014	10	161	12.880	4.025
3.	2015	6	98	7.840	2.450
4.	2016	6	85	6.800	2.125
5.	2017	5	85	6.800	2.125
6.	2018	5	115	9.200	2.875
7.	2019	5	150	11.250	2.875
	Jumlah	63	1.214	96.370	29.475

Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan diharapkan Kelompok Wanita Tani sebagai sasaran penerima bantuan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam upaya mengembangkan pekarangan sebagai alternative penyediaan sumber pangan keluarga melalui membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga, dan usaha pengolahan pangan local untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Tabel 3.71 Daftar Penerima KRPL (APBN) Tahun 2019

No.	Nama Kelompok	Desa/ Kelurahan/ Kec.	Jumlah Bantuan
1.	KWT Seroja	Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang	65.000.000
2.	KWT Kusuma Jaya	Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	65.000.000

3.	KWT Maju Bersama	Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam	65.000.000
4.	KWT Kemuning	Desa Ekang Anculai Kec. Telok Sebong	65.000.000
5.	DW Bunga Raya	Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang	65.000.000

Adapun diatas peta sebaran kelompok penerima bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN. Diharapkan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Lokal melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dapat berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Bintan. Perkembangan luasan lahan tanaman organik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya konsistensi penganggran pengembangan KRPL dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan dari dukungan perkembangan APBD Kabupaten Bintan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, berupa : kegiatan diversifikasi pangan yang mensejalankan dengan kegiatan praktek budidaya tanaman,bantuan polybag dan benih serta pelaksanaan lomba KRPL setiap tahunnya, yang dalam hal ini bermaksud untuk memotivasi anggota dalam mengembangkan KRPL di kelompok masing-masing.

(2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- Belum Optimalnya kesadaran anggota kelompok untuk memanfaatkan lahan pekarangan sekitar.
- Belum Optimalnya kerjasama kelompok dalam mengelola kebun bibit dan demplot.
- Terbatas sumber air untuk merawat tanaman khususnya pada saat musim kemarau.
- Belum optimalnya perputaran dana kas kelompok

sehingga kesulitan dalam pengelolaan rumah bibit sebagai sumber bibit kelompok.

- Kurangnya pemahaman dalam pengisian laporan bulanan.

b) Solusi

- Melaksanakan pertemuan sosialisasi, koordinasi dengan melibatkan PPL, anggota kelompok agar lebih optimal dalam memanfaatkan pekarangan.
- Membuat system kerja sama dalam kelompok dengan melibatkan seluruh anggota, tokoh masyarakat desa dan petugas penyuluh lapang terkait pembagian peran dalam kelompok;
- Mencari sumber sumber air aleternatif untuk mengelola KRPL diantaranya mengusulkan pembuatan sumber air dan perlengkapannya kepada Dinas terkati.
- Melakukan sosialisasi terkait pemahaman dan tata cara pengisian laporan bulanan.

b. Pelaksanaan Program Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pada Tahun anggaran 2019 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mendapat alokasi 2 kegiatan yaitu: 1) Lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (LCM B2SA) dana APBD II dengan nilai sebesar Rp. 105.800.000.- dan; 2) Pengembangan pangan lokal bernilai komersil sebesar Rp. 130.000.000.-

(1) Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Amanah (LCM B2SA)

Kegiatan Lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (LCM B2SA) dana APBD II ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.728.640 atau 97,10%

dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya bahan pangan yang segar, berimbang, bergizi sehat dan aman untuk dikonsumsi yang tersebar di 10 Kecamatan.

Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA) dan Promosi Konsumsi Pangan Segar merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, cerdas dan produktif, setiap individu diharapkan mengkonsumsi anekaragaman pangan secara seimbang, baik berasal dari pangan sumber karbohidrat, protein (nabati maupun hewani) serta vitamin dan mineral karena tidak ada satupun bahan pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap. Guna memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan akan terus melakukan promosi dan sosialisasi maupun gerakan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang yang pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan skor Pola Pangan Harapan masyarakat Kabupaten Bintan.

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, dan Aman telah dilaksanakan rutin setiap tahun, dalam pelaksanaan kegiatan lomba cipta menu B2SA selalu bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan . Sebagai upaya promosi pola pangan Beragam, Bergizi, dan Aman lomba dilaksanakan secara berjenjang mulai dari lomba tingkat kecamatan yang dimanfaatkan untuk memilih juara yang akan mewakili kecamatan yang bersangkutan pada lomba tingkat kabupaten.

Tujuan diselenggarakan kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) dan promosi konsumsi pangan segar adalah untuk:

- a) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- b) Mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat pada umumnya dan ibu rumah tangga khususnya dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu beragam, bergizi dan berimbang sesuai potensi sumberdaya local.
- c) Memasyarakatkan dan membiasakan keluarga untuk mengkonsumsi aneka menu makanan beragam, bergizi dan berimbang untuk kebutuhan sehari-hari, dengan memanfaatkan potensi pangan yang ada di sekitar (pekarangan).
- d) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan prinsip B2SA.

Dalam upaya menjaga netralitas dan objektivitas tim juri maka penilaian lomba dilaksanakan oleh Tim Juri yang bersasal dari instansi terkait dan pelaku profesional pada bidangnya, secara detail tim juri tersebut dibawah ini :

- Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan terdiri dari 1 orang.
- Chef ahli gizi Boga dari Hotel Nirwana yang terdiri dari 1 orang
- Dinas Kesehatan ahli gizi Kabupaten Bintan yang terdiri dari 1 orang.

Penilaian mengacu pada kriteria dan mekanisme sebagai

berikut :

- Paket Lunch box B2SA resep makan siang
- Produk Olahan Pangan Lokal komersial

Dalam pemberian penilaian lomba tim juri menggunakan pendekatan beberapa parameter yaitu kreatifitas, penampilan, penyajian, cita rasa, pemanfaatan pangan local serta kreatifitas pengembangan resep pangan local.

Pelaksanaan lomba Cipta Menu B2SA mengacu pada Pedoman umum kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal Tahun 2019 dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan Km. 18 Kijang Bintan Timur diikuti oleh 10 (sepuluh) Kecamatan se-Kabupaten Bintan yaitu :

- a) Kecamatan Bintan Utara
- b) Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- c) Kecamatan Telok Sebong.
- d) Kecamatan Teluk Bintan
- e) Kecamatan Gunung Kijang
- f) Kecamatan Toapaya
- g) Kecamatan Bintan Timur
- h) Kecamatan Mantang
- i) Kecamatan Tambelan
- j) Kecamatan Bintan Pesisir

Berdasarkan hasil penilaian tim juri maka ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan pemenang/juara Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kategori paket *lunchbox* resep makan siang sebagai berikut:

- (1) Juara I utusan dari TP. PKK Kecamatan Teluk Bintan.
- (2) Juara II utusan dari TP. PKK Kecamatan Toapaya.
- (3) Juara III utusan dari TP. PKK Kecamatan Gunung Kijang.
- (4) Juara Harapan I utusan dari TP. PKK Kecamatan Teluk Sebong.
- (5) Juara Harapan II utusan dari TP. PKK Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- (6) Juara Harapan III utusan dari TP. PKK Kecamatan Bintan Timur.
- (7) Serta utusan dari TP. PKK Tambelan dan TP. PKK Mantang, TP. PKK Bintan Pesisir dan Bintan Utara sebagai penerima sagu hati.

Sedangkan pemenang untuk kategori Produk Olahan Pangan Lokal komersial adalah sebagai berikut:

- a) Juara I utusan dari TP. PKK Kecamatan Gunung Kijang.
- b) Juara II utusan dari TP. PKK Kecamatan Bintan Utara.
- c) Juara III utusan dari TP. PKK Kecamatan Teluk Bintan.
- d) Juara Harapan I utusan dari TP. PKK Kecamatan Bintan Timur.
- e) Juara Harapan II utusan dari TP. PKK Kecamatan Toapaya.
- f) Juara Harapan III utusan dari TP. PKK Kecamatan Tambelan.
- g) Serta utusan dari TP. PKK Bintan Pesisir dan TP. PKK

Mantang, TP. PKK Telok Sebong dan Seri Kuala Lobam sebagai penerima sagu hati.

Dalam upaya mendukung dan mensosialisasikan pangan segar dan olahan pangan lokal maka pada saat bersamaan dengan lomba cipta menu B2SA maka diadakan kegiatan bazar pangan segar hasil produk pekarangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dan olahan pangan lokal. Kegiatan bazar diikuti oleh perwakilan dari 9 Kecamatan di Kabupaten Bintan, tanggapan dari pengunjung sangat antusias, karena mendapat sayuran bebas pestisida dan segar yang langsung di panen dari pekarangan rumah anggota kelompok wanita tani. Bazar sayuran segar dan olahan pangan lokal bertujuan mempromosikan program KRPL dan membantu pemasaran olahan produk pangan lokal kelompok wanita tani.

(2) Permasalahan dan Solusi Program LCM B2SA

a) Permasalahan

- Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), sebagai besar masyarakat saat ini masih mengandalkan nasi sebagai sumber karbohidrat,
- Kurangnya sosialisasi dan promosi kepada masyarakat tentang menu yang Beragam, bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) dan olahan pangan lokal komersial.
- Ketersediaan bahan pangan umbi-umbian masih terbatas.
- Pemanfaatan terbatas pada bahan pangan lokal umbi-umbian segar (produk belum beragam).

b) Solusi

- Meningkatkan pengetahuan, budaya dan pendapatan masyarakat bahwa pola konsumsi

pangan B2SA sangat penting untuk kesehatan.

- Menambahkan anggaran Kegiatan, dalam sosialisasi dan promosi kepada masyarakat.
- Ketersedianya dan akses sumber pangan lokal.
- Pengolahan bahan pangan umbi-umbian menjadi tepung untuk memperluas aneka produk olahan dan meningkatkan pemanfaatannya.

(3) Pelaksanaan Program Pengembangan Pangan Lokal Bernilai Komersil

Pengembangan pangan lokal bernilai komersil dana APBD II ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.118.750 atau 98,55% dengan realisasi fisik sebesar 97,38 %. Output kegiatan ini adalah berkembangnya usaha pengolahan pangan pokok lokal telah dilaksanakan dengan baik yang tersebar di 10 Kecamatan.

Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat. Dimana Keanekaragaman pangan merupakan upaya didaerah peningkatnya ketersediaan dan konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas . Hal ini diupayakan agar masyarakat tidak tergantung pada beras dan terigu sebagai makna pokok karbohidrat saja, namun pangan mengenal berbagai olehan pangan lokal lainnya yang bisa dikonsumsi dikreasikan dan dipasarkan, sehingga semuanya semakin suka dan terbiasa mengonsumsi produk olahan pangan lokal.

Penganekaragaman konsumsi pangan khususnya konsumsi karbohidrat harus didukung oleh penyediaan

sumber pangannya dan minat masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang manakala ketersediannya kurang dan harganya relatif mahal. Oleh karena itu untuk meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras perlu didukung upaya pengadaannya yaitu melalui pengembangan pengolahan pangan lokal.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning, dan yang lainnya sudah banyak dikembangkan dengan dijadikan tepung. Kedepan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Melalui kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) ini diharapkan dapat lebih memasifkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional. Gerakan diversifikasi pangan semakin efektif apabila didukung oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan melalui pengembangan industrialisasi usaha pangan lokal dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan.

Pelaksana program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan kegiatan Pengembangan Olahan Pangan Lokal bernilai komersial Lokasi untuk tahun 2019 yang merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan

masyarakat dengan pengembangan olahan pangan lokal yang bernilai komersial berbasis sumber daya lokal yang ada di wilayah daerah. Sampai dengan tahun anggaran 2019 jenis pangan lokal yang telah dikembangkan di Kabupaten Bintan yaitu ubi kayu, ubi jalar, jagung, talas, sukun, labu, pisang, bengkuang dan ganyong.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan olahan pangan lokal bernilai komersial dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2019 bertempat di aula Kantor Camat Toapaya Kabupaten Bintan dengan jumlah peserta sebanyak 130 orang yang merupakan perwakilan kelompok Wanita Tani dan perwakilan Dasawisma di Kabupaten Bintan. Narasumber pada kegiatan ini adalah Ibu Kartika Kusumuwati dan Ibu warlina yang merupakan pengusaha Citra Sari.

Pelatihan Pengembangan Olahan Pangan Lokal yang bernilai komersial akan di adakan melalui dua metode pertama teori yang dilaksanakan didalam ruangan dan praktek mengolah pangan lokal yang dilaksanakan di halamam aula :

- a) Praktek pertama membuat olahan pangan lokal dengan menggunakan bahan baku tepung ganyong membuat kue lapis warna- warni atau sesuai selera.
- b) Praktek kedua membuat olahan pangan lokal dengan menggunakan bahan baku sagu untuk membuat kue kering.
- c) Praktek ketiga membuat olahan pangan lokal dengan menggunakan bahan baku sagu untuk membuat kue lapis berwarna.
- d) Praktek keempat membuat olahan pangan lokal

dengan menggunakan bahan baku ganyong untuk membuat kue kering.

Dengan melalui pelatihan ini diharapkan agar nantinya peserta dapat meningkatkan ketrampilan dalam mengolah bahan pangan serta menambah pendapatan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia.

(4) Permasalahan dan Solusi Program Pengembangan Pangan Lokal Bernilai Komersil

a) Permasalahan

Pengembangan Olahan Pangan Lokal serta pemanfaatan sebagai pangan pokok antara lain :

- Ketersediaan bahan baku terbatas.
- Harga kurang kompetitif dibandingkan beras.
- Produktivitas pangan lokal umumnya masih rendah karena riset baik varietas maupun teknologi kurang intensif.
- Dorongan kebijakan masih terfokus ke komoditas Padi, Jagung dan Kedelai

b) Solusi

Untuk dapat meningkatkan Pengembangan Olahan Pangan Lokal dan mewujudkan Diversifikasi pangan lokal maka diharapkan adanya berbagai upaya diantaranya:

- Meningkatkan Pengembangan tanaman Pangan lokal yang ada di Kabupaten Bintan
- Dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk inovasi pengembangan diversifikasi produk pangan Lokal.
- Meningkatkan implementasi hasil pelatihan pengolahan pangan lokal di kehidupan nyata.
- Meningkatkan alat produksi pembuatan produk

makanan dalam skala besar

- Meningkatkan sosialisasi teknologi dan gizi bahan pangan kepada masyarakat dan petani.

(5) Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 178.400.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 160.798.230 atau 90,13 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pangan di 10 Kecamatan.

Pemerintah melalui Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 di mana pada salah satu pasalnya mengatur tentang keamanan pangan. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan dewasa ini selain terbatasnya produksi adalah juga masih dijumpainya praktek penanganan pangan mulai dari budidaya hingga konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Kondisi meningkatkan potensi terjadinya residu atau kontaminasi pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Sedangkan dari aspek mutu, mutu pangan yang rendah menyebabkan daya saing produk pangan menjadi

berkurang. Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait dengan perdagangan pangan, dimana keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global.

Dalam rangka mewujudkan pangan yang aman, bermutu serta berdaya saing tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan sebagai *leading sector* dalam produksi pangan segar asal tumbuhan telah membentuk Tim Pengawas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) unit kerja di Kabupaten Bintan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 195/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 yang beranggotakan Bupati, wakil Bupati, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bintan, Balai Pengawas Obat dan Makanan Kepulauan Riau Loka Tanjung Pinang, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dan Kepolisian resort Kabupaten Bintan. Tim dimaksud untuk menangani penjaminan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan produk segar pertanian di Kabupaten Bintan. Pada Tahun 2019 tidak terjadi kasus keracunan yang diakibatkan oleh konsumsi pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Bintan.

Koordinasi selalu dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan-kegiatan oknum yang akan merugikan dan membahayakan dalam keamanan pangan yang beredar setiap harinya dan juga pada saat hari – hari besar keagamaan.

Pada hari-hari besar keagamaan melakukan kegiatan sidak bersama terhadap pasar tradisional dan pasar modern

dengan pelaksanaan tupoksi OPD bidang masing-masing.

Hal yang perlu diketahui oleh masyarakat selaku konsumen adalah bahwa setiap bahan pangan baik segar maupun olahan, pada dasarnya sangat memungkinkan mengandung residu bahan kimia yang dilarang dan sangat membahayakan kesehatan manusia. Penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida, bakterisida, nematisida dan rodentisida yang berlebihan berdampak terhadap kesehatan

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya ulah sebagian oknum yang sengaja menjual bahan pangan yang tidak layak dikonsumsi, seperti sayuran dan buah-buahan yang mengandung residu pestisida di atas ambang batas. Residu pestisida dapat berpengaruh terhadap kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang seperti menyebabkan kanker, cacat kelahiran dan mengganggu sistem saraf. Anak-anak yang terpapar pestisida beresiko memiliki stamina dan tingkat kecerdasan yang kurang baik selain itu dapat juga berakibat perubahan orientasi seksual.

Keracunan pangan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial tidak sedikit, tetapi juga mengakibatkan banyaknya korban menderita sakit bahkan meninggal dunia. Perlu disadari bahwa semua kejadian dan akibat buruk dari pangan yang tidak aman, baik terhadap kesehatan maupun terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, menjadi peringatan bagi pemerintah dan pelaku usaha (petani, eksportir maupun importir pengolah bahan pangan), serta konsumen tentang pentingnya penanganan keamanan pangan secara terus menerus. Untuk dapat mewujudkan pangan asal pertanian yang

aman dan berdaya saing tinggi, diperlukan program yang berkelanjutan. Misalnya melalui publikasi di media massa, sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan, dan advokasi terhadap para pengambil kebijakan baik di eksekutif maupun legislatif. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan selain akan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada konsumen untuk dapat memilah dan memilih produk pangan berkualitas, juga meminimalkan pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan, tanpa memperhitungkan dampak kerugiannya. Pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan bekerjasama dengan LOKA BPOM Tanjung Pinang telah melakukan sosialisasi keamanan pangan di sekolah sekolah khususnya SLTA yang ada di Kabupaten Bintan, perincian detail kegiatan dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3.72 Sosialisasi Keamanan Pangan di Kabupaten Bintan Tahun 2019

No.	Sekolah	Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Seri Kuala Lobam	14-Agust-19	150
2.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Bintan Utara	14-Agust-19	150
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Gunung Kijang	15-Agust-19	150
4.	Sekolah Menengah Atas Negeri I Teluk Bintan	15-Agust-19	150
5.	Sekolah Menengah Atas Negeri I Toapaya	16-Agust-19	150
6.	Sekolah Menengah Atas Negeri I Bintan Timur	16-Agust-19	150
	Jumlah		900

Kegiatan dari Pembinaan dilaksanakan kepada para pelaku usaha baik yang berada di pree market dan post market. Pembinaan pree market dilaksanakan dengan turun langsung ke petani-petani yang berada di kabupaten

Bintan dengan memberikan pembinaan keamanan pangan dari mulai penanaman sampai pemanenan serta menerapkan SOP dan GAP yang baik dan tetap sesuai petunjuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan tim teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.

Pembinaan di *post market* dilaksanakan dengan memberikan pembinaan kepada para pedagang yang berada di pasar tradisional maupun modern dalam penataan pangan segar dengan barang – barang lain untuk dapat memisahkannya agar tidak terkontaminasi antara satu dengan lainnya. Selain pembinaan juga melaksanakan pemantauan terhadap para pelaku usaha yang sudah dilakukan pembinaan keamanan pangan. Pemantauan juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Propinsi Kepulauan Riau untuk mutu beras yang beredar di kabupaten Bintan.

Guna mendukung Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang beredar di masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengadakan pembelian alat uji cepat (rapid test kit) yaitu uji deteksi residu pestisida sebanyak 30 test kit. Pengujian cepat dilakukan untuk mendeteksi residu pestisida pada pangan segar dan jenis pangan yang beredar. Pengujian cepat ditujukan terutama pada pangan segar yakni buah dan sayur berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat, isu dan jenis pangan yang dianggap perlu. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan pengujian sebanyak 30 sample yang di lokasi Pasar Barek Motor Kijang Bintan Timur, Pasar Baru Tg Uban Kecamatan Bintan Utara, Pasar Kawal Kecamatan Gunung Kijang, KWT Melati Desa Ekan Angkulai Kecamatan Telok Sebang, Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur, Pasar Berdikari

Kecamatan Bintang Timur. Hasil pengujian menunjukkan dari 30 sample maka ditemui 27 sample negative tercemar residu pestisida dan 3 sample tercemar residu pestisida, namun untuk mengetahui apakah residu pestisida tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (BMR) atau tidak maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan masih dibutuhkan pemeriksaan pada laboratorium yang memenuhi syarat.

Tabel 3.73 Hasil Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Tahun 2019

No.	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditi	Hasil Uji
1.	Pasar Berek Motor	1. Semangka Lokal	-
	Kijang Bintang Timur	2. Sawi Manis Lokal	-
		3. Tomat Medan	+
		4. Cabe Medan	+
		5. Wortel Medan	+
2.	Pasar Baru	1. Cabe Merah Berastagi	-
	Tanjung Uban	2. Bawang Merah Medan	-
		3. Cabe Rawit	-
		4. Buah Naga Lokal	-
		5. Jeruk Medan	-
3.	Pasar Kawal	1. Tomat Hijau Medan	-
	Gunung Kijang	2. Terong Medan	-
		3. Sawi Pahit Wacopek	-
		4. Sawi Pahit Toapaya	-
		5. Pare Wacopek	-
4.	Ekang Anculai	1. Sawi Minyak	-
		2. Daun Sop	-
		3. Daun Bawang	-
5.	Gunung Lengkuas	1. Sawi Putih	-
	Kijang Bintang Timur	2. Selada	-
		3. Timun	-
		4. Bayam	-

No.	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditi	Hasil Uji
		5. Kangkung	-
6.	Pasar Berdikari	1. Cabai Merah	-
	Kijang Bintang Timur	2. Cabai Rawit	-
		3. Kacang Panjang	-
		4. Pare	-
		5. Pepaya	-
7.	Pasar Barek Motor	1. Cabai Merah Lokal	-
	Kijang Bintang Timur	2. Sawi Manis Lokal	-

Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan pangan di tingkat proses produksi (*On Farm*). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan dari aspek keamanan pangan; Prima 2 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan.

Pemberian sertifikasi Prima oleh OKKPD Propinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan DKPP Kabupaten Bintan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan bersama OKKPD Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan sertifikasi di Kabupaten Bintan hasil sertifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.74 Daftar Sertifikasi Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kabupaten Bintan

No.	Petani	Alamat	Jenis Sertifikasi	Komoditi	Tahun
1.	Sofian /Kelompok Tani Makmur	Kampung Pemukiman RT. 003/001 Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang	Prima 3	Cabe Hijau	2018

(6) Permasalahan dan Solusi Program

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan kami masih mengalami kendala diantaranya :

- Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keamanan Pangan yang akan dikonsumsi.
- Sebagian pelaku usaha yang kurang kooperatif apabila Dinas akan melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di pasar.
- Masih rendahnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Good Agriculture Practice* (GAP) ditingkat petani.
- Belum adanya petugas Teknis atau petugas pengambil contoh yang bersertifikat.

b) Solusi

Solusi yang dijalankan sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat ex. anak sekolah, ibu rumah tangga, pelaku usaha dll.
- Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha baik di *free market* dan *post market* tentang Keamanan Pangan.
- Melaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha agar hasil yang diharapkan yaitu

persentase keamanan pangan dapat tercapai .

- Menyarankan kepada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan untuk melaksanakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu.
- Mengikut sertakan aparatur Dinas Keamanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan dalam pelatihan terkait.

3) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 87.000.000,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 83.048.550,-** atau **95,46 %** serta realisasi fisik sebesar **100%**.

Perincian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 44.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 43.404.000,-** atau **98,65%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Output kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan dan pupuk tanaman perkebunan.

Tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah membuka pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan kebun yang benar, meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman

perkebunan, menjamin keberkelanjutan produksi tanaman perkebunan sebagai sumber bahan baku industri, serta meningkatkan pendapatan petani melalui sektor perkebunan karet unggul melalui pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan kondisi tanaman perkebunan di Kabupaten Bintan pada umumnya banyak terserang hama, terutama tanaman karet rakyat dan cengkeh secara umum banyak tanaman Tua dan rusak kondisi tidak terawat dan terserang berbagai macam jenis penyakit. Sedangkan Tanaman perkebunan yang lainya seperti kelapa dalam, kelapa sawit, kakao dan lada belum terlalu banyak di kembangkan di bintan hanya ada beberapa petani yang baru mengembangkannya, hanya sebagian kecil terserang hama.

Dalam upaya menciptakan kebun karet dan cengkeh yang bersih dari gulma dan meminimalkan resiko kebakaran sehingga tanaman karet dan cengkeh dapat terpelihara dengan baik dan produktifitas tetap tinggi maka di perlukan adanya upaya- upaya untuk menjaga kebun tersebut agar tetap terjaga dengan baik. Upaya-upaya tersebut diantaranya dengan memberikan penyuluhan kepada petani.

Produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Bintan masih kurang optimal hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya:

- a) Tanaman karet rakyat terserang hama rayap dan jamur akar putih.
- b) Tanaman Cengkeh terserang hama cacar daun dan penggerek batang.
- c) Tanaman lada terserang hama jamur *Phytophthora Capsici* (busuk pangkal batang).
- d) Tanaman Kakao terserang hama Kepik penghisap buah dan daun muda terpotong.

- e) Tanaman Kelapa terserang hama kumbang nyiur dan kumbang janur.

Tujuan Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tananaman Perkebunan Berkelanjutan sebagai berikut:

- a) Membuka pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan kebun yang benar.
- b) Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan.
- c) Menjamin berkelanjutan produksi tanaman perkebunan sebagai sumber bahan baku industri.
- d) Meningkatkan pendapatan petani melalui sektor perkebunan.
- e) Mengendalikan hama penyakit pada tanaman perkebunan.

Keluaran Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a) Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi (monev) petani kegiatan Pengendalian, pengawasan dan perlindungan tanaman perkebunan di kelompok tani Kabupaten Bintan.
- b) Terlaksananya belanja obat-obatan.
- c) Tersalurnya obat-obatan kepada petani yang tanamannya terserang hama.

Berdasarkan pada hasil pengamatan penyakit tanaman perkebunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, dapat diketahui jumlah serangan penyakit tanaman perkebunan rakyat sebanyak lebih kurang 2.780 batang. Kondisi tanaman Perkebunan rakyat tersebut banyak terserang penyakit Organisme Pengganggu Tumbuhan, Kondisi serangan

penyakit tanaman perkebunan di Kabupaten Bintan sangat mungkin lebih besar dari hasil pengamatan ini, jangkauan petugas pengamat dalam melaksanakan pengamatan masih sangat terbatas hal ini disebabkan minimnya tenaga teknis dan alokasi anggaran yang diberikan kepada Seksi Perlindungan, Pengawasan Tanaman Perkebunan.

Tabel 3.75 Daftar Serangan Penyakit Tanaman Perkebunan Hasil Pengawasan Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, dan Perlindungan Tanaman

No.	Kelompok Tani	Nama Petani	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Serangan				Keterangan
					Karet	Kelapa	Kakao	Lada	
					(btng)	(btng)	(btng)	(btng)	
1.	Ngudi Luhur	Sutarno	Bintan Buyu	2 Ha	100				Rayap/Jap
2.				300 btng				50	Jamur
3.	Jaya Patih	Dullah	Ekang Anculai	2 Ha	100				Rayap/Jap
4.		Cecep		0,5 Ha	30				Rayap/Jap
5.		Sukemi		2 Ha	80				Rayap/Jap
6.	Sekuning Makmur	Tahang	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
7.		Sukatwan		2 Ha	120				Rayap/Jap
8.	Sri Rezeki	Mispani	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
9.									Rayap/Jap
10.	Wijaya	Sarmuji	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
11.									Rayap/Jap
12.	Jati Mulyo	Poniman	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
13.		Jumawan	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
14.	Sumber Rezeki	Sugianto	Sri Bintan	2 Ha	100				Rayap/Jap
15.	Flo Java	Amiruddin	Sebong Pereh	1 Ha		10			Rayap/Jap
16.	Cinta Tanah Air	M. Dharma Sebayang		800 btng				60	Jamur
17.		Caca		500 btng				50	Jamur
18.	Sido Dadi	Pranoto		1600 btng				120	Jamur
19.	Cahaya Purnama	Zainal Abidin	Desa Tembeli ng	1,5 Ha	100				Rayap/Jap
20.				400 btng				30	Jamur

No.	Kelompok Tani	Nama Petani	Alamat	Luas Lahan (Ha)	Serangan				Keterangan
					Karet	Kelapa	Kakao	Lada	
					(btng)	(btng)	(btng)	(btng)	
21.	Sari Makmur	Sugiono	Toapay a Utara	1 Ha	40				Rayap/Jap
22.				200 btng				100	Jamur
23.		Sutrisno		100 btng	20				Rayap/Jap
24.		Sumarjan		1 Ha	35				Rayap/Jap
25.	Maju Jaya	Suyanto	Tuapay a	2 Ha	60				Rayap/Jap/gugur daun
26.	Sumber Rezeki	Sukamto	Tuapay a Asri	2 Ha	80				Rayap/Jap/gugur daun
27.	Makmur Jaya	Sakim		2 Ha	120				Rayap/Jap/gugur daun
28.				200 btng				30	Jamur
29.	Makmur	Supa'at	Kawal	0,5 Ha		10			Kumbang
30.	Sumber Kelapa	M. Saidi	Kawal	2 Ha		20			Kumbang
31.		Kasim		2 Ha		20			Kumbang
32.		Abdul Fatah		4 Ha		40			Kumbang
33.		Abu Bakar		2 Ha		20			Kumbang
34.		M. Ishak		2 Ha		20			Kumbang
35.		Acok		2 Ha		20			Kumbang
36.		Hafizar		1 Ha		10			Kumbang
37.		Barnas Edi		1 Ha		10			Kumbang
38.		Syamsul		2 Ha		20			Kumbang
39.		Samad		2 Ha		20			Kumbang
40.	Beringin Jaya	Sugeng	Kuala Sempa ng	2 Ha	100				Rayap/Jap/gugur daun
41				1000 btng				200	Jamur
42.	Subur Makmur	Munari		2 Ha	60				Jamur
43.		Alias		2 Ha	100				Jamur
44.		Aldi May (Sugiono)		2 Ha	100				Jamur
45.		Hari Susanto		2 Ha	75				Jamur
	Jumlah				1865	240	0	640	2745

**Tabel 3.76 Petani Perkebunan Penerima Bantuan Obat – Obatan
Tahun Anggaran 2019**

No	Petani	Alamat (Desa)	Jenis Obat – Obatan			Jumlah	Tanggal Penyerahan
			Herbisida (Roundap) Liter	Insektisi da (Dusban) liter	Fungisi da (Dithen N 45) kg		
1.	Dullah	Ekang Anculai	2	2	1	5	01-07-2019
2.	Cecep Supiadi	Ekang Ancul	2	2	1	5	01-07-2019
3.	Sukemi	Ekang Anculai	2	2	1	5	01-07-2019
4.	Jumawan	Sri Bintang	2	2	1	5	02-07-2019
5.	Sarmuji	Sri Bintang	2	2	1	5	02-07-2019
6.	Sukatwan	Sri Bintang	2	2	1	5	02-07-2019
7.	M. Saidi	Kawal	2	2	1	5	01-08-2019
8.	M. Ishak	Kawal	2	2	1	5	01-08-2019
9.	Acok	Kawal	2	2	1	5	01-08-2019
10.	Barnabas Edi	Kawal	2	2	1	5	01-08-2019
11.	Caca Hidayat	Sebong Pereh	2	2	1	5	21-08-2019
12.	M. Dharma Sebayang	Sebong Pereh	2	2	1	5	21-08-2019
13.	Odih	Sebong Pereh	2	2	1	5	21-08-2019
14.	Amiruddin	Sebong Pereh	2	2	1	5	21-08-2019
15.	Sutarno	Bintan Buyu	2	2	1	5	23-08-2019
16.	Zainal Abidin	Tembeling	2	2	1	5	23-08-2019
17.	Sugeng	Kuala Sempang	2	2	1	5	23-09-2019
18.	Munari	Kuala Sempang	2	2	1	5	23-09-2019
19.	Sakim	Toapaya	2	2	1	5	08-10-2019
20.	Sugiono	Toapaya Utara	2	2	1	5	15-10-2019
21.	Suyanto	Toapaya	2	2	1	5	24-10-2019
22.	Sugiyanto	Sri Bintang	2	2	1	5	06-11-2019
23.	Mispan	Sri Bintang	2	2	1	5	13-11-2019
24.	Rio May Aldi	Kuala Sempang	2	2	1	5	18-11-2019
25.	Aliyas	Kuala Sempang	2	2	1	5	18 -11-2019
Jumlah			50	50	25	125	

b. Permasalahan dan Solusi Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

(1) Permasalahan

Secara umum, program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bintan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 546.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 529.273.400,- atau 97,30% serta realisasi fisik sebesar 99,83% namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, permasalahan tersebut telah berhasil ditindak lanjuti, sebagaimana uraian sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan kebun bibit perkebunan sebagai sentra pembibitan membutuhkan tenaga teknis yang tetap dan selama ini hanya tenaga THL.
- b) Kondisi alam yang ekstrim mempengaruhi tingkat tumbuh bibit.
- c) Masih rendahnya sebagian kualitas SDM petani dalam pembibitan budidaya lada atau merica.
- d) Kurangnya modal petani untuk perawatan, pemupukan dan pemeliharaan tanaman perkebunan.
- e) Rendahnya pengupahan tenaga THL sehingga pembibitan kurang optimal.
- f) Rendahnya pemanfaatan teknologi sederhana pada tingkat petani.
- g) Maraknya alih fungsi kebun menjadi areal penggunaan lainnya .
- h) Rendahnya harga jual karet sehingga menyebabkan usaha ini kurang menarik hal ini mengakibatkan motivasi petani untuk merawat dan menjalankan usaha perkebunan karet rakyat rendah.

(2) Solusi

- a) Peningkatan modal dan kualitas sumber daya manusia petani sebagai upaya peningkatan produksi perkebunan.
- b) Meningkatkan harga jual karet melalui peningkatan kualitas produksi dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan.
- c) Peningkatan pengembangan tanaman lada untuk meningkatkan taraf hidup petani dikarenakan harga lada yang stabil.
- d) Perlunya tenaga teknis yang tetap dalam pengelolaan kebun bibit perkebunan.

3) Peningkatan Produksi Perkebunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 43.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 39.644.550,-** atau **92,20%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Output kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan dan pupuk tanaman perkebunan.

Seray wangi merupakan salah satu jenis tanaman minyak atsiri, yang tergolong sudah berkembang dan permintaan ke Luar Negeri cukup meningkat. Hasil penyulingan daunnya diperoleh minyak seraywangi yang dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama Citronella Oil. Minyak seray wangi Indonesia dipasaran dunia terkenal dengan nama "Citronella Oil of Java". Industri minyak atsiri memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki keunggulan komperatif dalam penyediaan bahan bakunya, Selain itu pembangunan minyak atsiri akan menimbulkan efek berganda berupa peningkatan pendapatan petani tanaman atsiri, pembukaan lapangan kerja di bidang agro industri serta pengenalan sistem dan perilaku industri di pedesaan. Untuk

Tahun anggaran 2019 Pemerintah Daerah melalui Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan akan merencanakan pengembangan bibit seray wangi sebanyak 5006 batang, dan pengadaan pupuk kandang sebagai penunjang sebanyak 681 karung untuk dikembangkan dikelompok tani tunas harapan di desa Kuala Sempang Kecamatan Sri Kuala Lobam. Disamping itu kita bekerja sama dengan pihak provinsi untuk membuka lahan seluas 5 ha di tanah Pemda untuk mengembangkan kelapa dalam unggul varitas lampanah di desa malang rapat Kecamatan Gunung Kijang sebanyak 600 batang.

Tujuan pelaksanaan program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan melalui kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya bibit seray wangi di Kabupaten Bintan sehingga petani lainnya dapat mengembangkannya di kelompok tani lainnya.
- Tersedianya bibit seray wangi sebanyak 5006 batang
- Tersedianya bibit kelapa dalam unggul.
- Tersedianya pohon indukan kelapa unggul varitas lampanah yang sudah tersertifikasi.
- Meningkatnya jumlah bibit tanaman perkebunan di Kabupaten Bintan.

Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan adalah untuk menyediakan sentra bibit bibit perkebunan yang unggul pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas kebun rakyat dan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Bidang Perkebunan telah mendistribusikan bibit lada, kelapa, karet, cengkeh, pala, dan seray wangi pada tahun 2018 s/d 2019 kepada petani di Kabupaten Bintan dengan jumlah bibit

sebanyak 12.306 bibit dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.77 Kelompok Tani Penerima Bibit Bidang Perkebunan Kabupaten Bintan

No.	Lokasi	Kelompok	Jumlah (Btg)	Tahun
1.	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Harapan	350	2018
2.	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Beringin Jaya Purnama	550	2018
3.	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Tunas Harapan	200	2018
4.	Desa Gunung Kijang	Subur	200	2018
5.	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Beringin Jaya	600	2018
6.	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Beringin	1.150	2018
7.	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Harapan	500	2018
8.	Kecamatan Sri Kuala Lobam	Doa Ibu	500	2018
9.	Kec.Teluk Sebong	Yanto	500	2018
10.	Kec.Teluk Bintan	PKK	200	2018
11.	Kec.Gunung Kijang (Karet)	Lukman	100	2018
12.	Kec.Gunung Kijang (Karet)	Zalmi	200	2018
13.	Kec.Gunung Kijang Kelapa	Tunas Jaya	150	2018
14.	Kec.Gunung Kijang (Kelapa)	Kel.Kawal	100	2018
15.	Kec.Gunung Kijang	Desa Teluk Bakau	100	2018
16.	Kec.Toapaya Pala	UPT Km.27	250	2018
17.	Kec.Teluk Bintan (Cengkeh)	Kota Kara	250	2018
18.	Kec.Srikuala Lobam (Kelapa)	Beringin Jaya	165	2018
19.	Kec.Toapaya Kelapa	Masyarakat	85	2018
20.	Kec.Sri Kuala Lobam (Seray Wangi)	Tunas Harapan	5006	2019
21.	Kec.Gunung Kijang (Kelapa Dalam)	Tanah Pemda	600	2019
	Jumlah		12306	

Produksi perkebunan di Kabupaten Bintan masih kurang optimal hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- Sentra pengembangan bibit tanaman perkebunan belum memadai.

- Anggaran untuk menciptakan produksi tanaman perkebunan cenderung terbatas.
- Tenaga trampil khusus pengelolaan kebun bibit belum ada.
- Tenaga trampil untuk OPT perkebunan belum tersedia.
- Tempat penampungan dan pengolahan hasil belum ada.

4) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara umum, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, telah dilaksanakan dengan baik, Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan terealisasi fisik 97.23%, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, dan permasalahan tersebut telah berhasil ditindak lanjuti, sebagaimana uraian sebagai berikut :

- a) Petugas kebun bibit perkebunan sebagai sentra pembibitan membutuhkan tenaga teknis yang tetap dan selama ini belum ada.
- b) Kondisi alam yang ekstrim mempengaruhi tingkat tumbuh bibit.
- c) Masih rendahnya sebagian kualitas SDM petani dalam budidaya dan pembibitan perkebunan.
- d) Kurangnya modal petani untuk perawatan, pemupukan dan pemeliharaan tanaman perkebunan.
- e) Rendahnya pemanfaatan teknologi sederhana pada tingkat petani.
- f) Maraknya alih fungsi kebun menjadi areal penggunaan lainnya .
- g) Rendahnya fluktuasi harga yang tidak stabil sehingga menyebabkan usaha ini kurang menarik hal ini

mengakibatkan motivasi petani untuk merawat dan menjalankan usaha perkebunan sangat rendah.

b. Solusi

- a) Peningkatan modal dan kualitas sumber daya manusia petani sebagai upaya peningkatan produksi perkebunan.
- b) Meningkatkan fluktuasi harga jual hasil perkebunan melalui peningkatan kualitas produksi dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan.
- c) Peningkatan pengembangan tanaman seray wangi dan alat olahannya untuk meningkatkan taraf hidup petani dikarenakan harga minyak seray wangi yang cenderung stabil.
- d) Perlunya tenaga teknis yang tetap dalam pengelolaan kebun bibit perkebunan.

4) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan

Rincian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Padi

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. Rp. 67.148.000,-** dan terealisasi sebesar **66.122.300,-** atau **98,47 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

Keluaran dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya pupuk 8 Ha dengan lokasi di Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong. Inti dari kegiatan ini adalah pengembangan kawasan Tanaman pangan (Padi). Kegiatan ini merupakan untuk meningkatkan jumlah populasi tanaman pangan dengan cara disebar/dihibahkan kepada masyarakat yaitu: Pupuk untuk lahan 8 Ha berdasarkan SK Bupati Nomor: 191/III/2019 tanggal 01 Maret 2019, diserahkan kepada:

- a) Kelompok Tani Poyotomo Makmur (Ketua Ali Aspan) yang beralamat Jl. Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong sebanyak Pupuk Urea 100 Kg, Pupuk TSP 650 Kg dan Pupuk KCL 650 Kg berdasarkan NPHD Nomor 521/DKPP/160 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Rekomendasi HKTI No 137/HKTI/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.
- b) Kelompok Tani Hidup Bersama (Ketua H. Abdul Rasid) yang beralamat Jl. Desa Sri Bintang Kecamatan Teluk Sebong sebanyak Pupuk Urea 100 Kg, Pupuk TSP 650 Kg dan Pupuk KCL 650 Kg berdasarkan NPHD Nomor 521/DKPP/161 tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Rekomendasi HKTI No 138/HKTI/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.

b. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan. Permasalahan tersebut telah ditindak lanjuti secara maksimal, namun hasilnya masih sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana uraian sebagai berikut:

(1) Permasalahan

- a) Kurangnya jumlah pupuk yang tidak sebanding dengan luas lahan.
- b) Potensi tanah di beberapa daerah masih miskin unsur hara sehingga diperlukan upaya pemupukan.
- c) Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam memperbanyak komoditi tanaman pangan.
- d) Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan petani dalam penanganan hama dan penyakit pada tanaman khususnya tanaman Padi.

- e) Kurangnya keinginan tenaga petani dalam mengembangkan usaha tanaman pangan dan juga kurangnya alsin dalam pengolahan lahan untuk pengembangan tanaman pangan terutama padi.

(2) Solusi

- a) Perlunya penambahan kuota pupuk sehingga dapat meringankan petani dalam pengadaan pupuk.
- b) Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan dan upaya peningkatan kapasitas daya dukung lahan.
- c) Peningkatan penggunaan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara hayati serta perlakuan pasca panen yang baik
- d) Peningkatan Penggunaan dan pengadaan alsin sehingga dalam pelaksanaan olah lahan tidak terhambat.

5) Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Holtikultura Ramah Lingkungan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp.732.824.000,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp 675.315.830,-** atau **92,15%** serta realisasi fisik sebesar **96,97%** dengan beberapa kegiatan pokok antara lain sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Kabupaten Bintan

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. Rp. 250.136.000,-** dan terealisasi sebesar **201,460,000,-** atau **80,54%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

Keluaran dari hasil kegiatan ini adalah tersedianya 4.200

batang tanaman hortikultura (bibit durian) dengan lokasi di Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Sebong. Inti dari kegiatan ini adalah pengembangan produk unggulan daerah pengembangan kawasan tanaman Hortikultura. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah populasi tanaman hortikultura dengan cara disebar/dihibahkan kepada masyarakat, yaitu bibit tanaman durian sebanyak 4.200 batang berdasarkan SK Bupati Nomor : 192/III/2019 tanggal 01 Maret 2019, dan diserahkan kepada :

- a) Kelompok Tani Doa Ibu (Ketua Badrudin) yang beralamat Jl. Kebun Nangka Desa Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam sebanyak 1900 batang bibit Durian berdasarkan NPHD Nomor 521/DKPP/132 tanggal 14 Maret 2019 dan Surat Rekomendasi HKTI No 135/HKTI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.
- b) Kelompok Tani Jaya Patih (Ketua Dullah) yang beralamat Jl. Kp. Bale Rejo RT 003 RW 003 Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 2300 batang bibit Durian berdasarkan NPHD Nomor 521/DKPP/133 tanggal 14 Maret 2019 dan Surat Rekomendasi HKTI No 136/HKTI/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.

b. Permasalahan dan Solusi Pengembangan Tanaman Hortikultura Kabupaten Bintan

(1) Permasalahan

Secara umum, Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura ramah lingkungan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan khususnya dalam pengadaan bibit yang belum ada penangkar dari daerah kabupaten bintan

sehingga proses pengadaan terlalu lama dan pengiriman. Permasalahan tersebut telah ditindak lanjuti secara maksimal, namun hasilnya masih sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana uraian sebagai berikut:

- a) Sumber bibit/benih masih mendatangkan dari luar pulau Bintan
- b) Potensi tanah di beberapa daerah masih miskin unsur hara sehingga diperlukan upaya pemupukan
- c) Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam memperbanyak komoditi hortikultura
- d) Perlu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dan petani dalam penanganan hama dan penyakit pada tanaman khususnya tanaman cabe dan bawang merah yang menjadi fokus pengembangan hortikultura Kabupaten Bintan.

(2) Solusi

- a) Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas Kebun Bibit Pertanian Kabupaten sebagai sumber bibit/benih di Kabupaten Bintan dan menumbuhkan petani penangkar di Kabupaten Bintan.
- b) Peningkatan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan dan upaya peningkatan kapasitas daya dukung lahan.
- c) Peningkatan penggunaan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara hayati serta perlakuan pasca panen yang baik.

3) Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura Ramah Lingkungan

a. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,-** dan terealisasi sebesar 194.743.700,- atau **97,37 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Target keluaran (output) berupa Terlaksananya Perlindungan Tanaman Hortikultura.

Target hasil kegiatan (outcome) adalah Pelatihan Petani dalam Perlindungan Tanaman (OPT).

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum, Program Peningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura ramah lingkungan telah dilaksanakan dengan baik, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, namun demikian permasalahan tersebut telah berhasil ditindak lanjuti, sebagaimana uraian sebagai berikut:

- a) Perlu Peningkatan Pengetahuan petani dalam Pelaksanaan Perlindungan Tanaman berbasis ramah lingkungan.
- b) Perlunya Penyuluh sebagai pendamping petani yang faham permasalahan di lapangan mengenai pengendalian hama penyakit ramah lingkungan.
- c) Perlunya Peningkatan alat penunjang dalam pelaksanaan perlindungan tanaman.

(2) Solusi

- a) Perlunya Pelatihan Petani dan Penyuluh dalam pengendalian Hama dan Penyakit yang ramah lingkungan.

- b) Perlunya penambahan bantuan alat penunjang penanganan OPT di Petani.
- c) Perlunya pendampingan petani baik dari pengolahan lahan penanaman dan perawatan tanaman serta pascapanen.

6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Bintan melalui 6 (enam) kegiatan pokok yaitu:

- Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian;
- Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;
- Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan (BPP) di Kecamatan dan sarana pendukung (DAK);
- Penunjang DAK Bidang Pertanian;
- Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal (DAK);
- DAK Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Pembibitan dan Hijauan Pakan ternak, Pusat Kesehatan hewan, Rumah Potong Hewan Rumansia dan Penyediaan Sarana Pendukung.

Total alokasi anggaran yang disediakan dalam mendukung program ini sebesar **Rp. 1.260.436.600,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 1.093.410.636,-** atau sebesar **97,83 %** dari total anggaran yang dialokasikan, dengan realisasi pencapaian fisik sebesar **100%**.

Perincian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.155.999.600,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp.154.435.900,-** atau dalam prosentase sebesar **99%** dengan

realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar **100%**.

a. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pupuk , pestisida dan alat pengolah tanah berupa cultivator untuk pengembangan usaha tani.

b. Sasaran

Sasaran lokasi kegiatan adalah Kelompok Tani yang berada di daerah sentra produksi hortikultura di wilayah Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang.

c. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan pupuk yang diperlukan dalam usaha tani sebanyak 2.000 Kg, Tersedianya 3 unit Cultivator, dan tersedianya obat obatan tanaman sebanyak 46 Liter yang diharapkan dapat meringankan beban petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

d. Hasil

Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah meningkatnya produktivitas pertanian dan meningkatnya pendapatan/penghasilan petani di Kabupaten Bintan.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pertanian Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Verifikasi Kelompok Tani calon penerima bantuan yang diserahkan kepada masyarakat. Verifikasi dilakukan setelah adanya proses CPCL pada tahun 2018. Seleksi CPCL dilaksanakan berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditentukan. Adapun aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan petani penerima bantuan adalah minat dan kemampuan petani serta

potensi wilayah.

- b) Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan kelompok petani penerima bantuan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pertanian atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan Kelompok Tani penerima bantuan.
- c) Penyiapan Spesifikasi teknis dan Pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- d) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Langsung dan e- pengadaan langsung.
- e) Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 % dari rekanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.dan selanjutnya penyerahan dari Kepala Dinas Pertanian Kepada Kelompok Tani penerima barang.
- f) Perjalanan dinas digunakan untuk verifikasi, penyerahan barang dan pembinaan ke lapangan serta konsultasi kegiatan ke Kementerian Pertanian (Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dan Bagian Perencanaan) dengan hasil diantaranya tentang tata cara pengusulan dan penggaran bantuan Alat dan Mesin Pertanian.

Penyerahan barang hasil pengadaan kepada masyarakat dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pupuk NPK sebanyak 2.000 Kg yang diserahkan kepada kelompok tani Beringin Jaya, Ketua Hasan Basori, Alamat Jl.Kp.Bansun RT.013 / RW. 004

Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang.

- b) Fungisida sebanyak 4 Liter, Insektisida sebanyak 12 Liter dan Cultivator 1 Unit yang diserahkan kepada kelompok tani Karya Tani Jaya, Ketua Saderi, Alamat Jl. Kp. Baru RT.002/RW.001 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur.
- c) Fungisida sebanyak 4 Liter, Insektisida sebanyak 11 Liter dan Cultivator 1 Unit yang diserahkan kepada kelompok tani Mandiri, Ketua Supardi, Alamat Kp. Bina Maju RT.004 / RW. 003 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur
- d) Fungisida sebanyak 4 Liter, Insektisida sebanyak 11 Liter dan Cultivator 1 Unit yang diserahkan kepada kelompok tani Pemuda Lingkar Wacopek, Ketua Edy Yasid, Alamat Jl. Kp. Bina Maju RT.003 / RW. 004 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur.

f. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Pertanian sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana uraian sebagai berikut :

- a) Kemampuan dan pengetahuan petani dalam merawat alat dan mesin pertanian masih rendah sehingga dikhawatirkan alat mesin sehingga akan memperpendek umur ekonomisnya.
- b) Kemampuan dan pengetahuan petani dalam budidaya baik dalam hal perawatan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman masih rendah yang menyebabkan kurang maksimalnya produksi yang

dihasilkan.

- c) Rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian yang menyebabkan kurang maksimal dan meratanya pembinaan dan bantuan sarana produksi kepada petani.

(2) Solusi

- a) Mengotimalkan dan menabahnya intensitas kunjungan dalam rangka pembinaan perawatan alsintan dan budidaya tanaman.
- b) Mengusulkan penambahan anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.

2) Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

Pupuk merupakan kebutuhan mendasar bagi petani karenanya kecukupan pupuk merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan yang dalam berusaha tani. Berdasarkan hal tersebut, masalah pemenuhan kebutuhan pupuk bagi seluruh petani menjadi prioritas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kabupaten Bintan dengan penduduk yang besar bermata pencaharian sebagai petani tentunya pupuk baik itu bersubsidi maupun non subsidi menjadi isu sentral dalam pembangunan pertanian.

Dalam upaya menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bintan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi kegiatan untuk pengamanannya yang tertuang dalam Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi.

Kegiatan utama Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 meliputi pembentukan

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) pembinaan, pertemuan penyusunan RDKK, entry RDKK ke dalam e-RDKK pada seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 45.720.000,-** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **Rp. 37.560.306,-** atau dalam prosentase sebesar **82.15%** dengan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar **100%**.

a. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempermudah pemerintah dan petani dalam mengawasi serta memperoleh pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bintan.

b. Sasaran

Sasaran penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- a) Petani
- b) Kelompok tani
- c) Gabungan Kelompok Tani
- d) Para pelaku utama usaha pertanian

Sasaran lokasi kegiatan ini adalah 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bintan yaitu:

- a) Kecamatan Bintan Timur
- b) Gunung Kijang
- c) Toapaya
- d) Teluk Bintan
- e) Teluk Sebong
- f) Bintan Utara
- g) Seri Kuala Lobam
- h) Bintan Pesisir
- i) Mantang

c. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan tersedianya data RDKK Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bintan tahun 2019.

d. Hasil

Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi terdiri dari beberapa uraian belanja yang masuk kedalam belanja langsung (5.2) yakni belanja pegawai (5.2.1) dan belanja barang dan jasa (5.2.2). Untuk belanja pegawai, berupa honorarium Non PNS yakni honorarium peserta kegiatan (Uang Saku Harian).
- b) Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, ruang lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah belanja perjalanan dinas (5.2.2.15) yang terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah (5.2.2.15.01) dan belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02), dan belanja makanan dan minuman kegiatan (5.2.2.39.04).
- c) Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah tim bidang penyuluhan dengan melibatkan bidang lain di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.
- d) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi untuk belanja honorarium

non PNS (honorarium peserta kegiatan/uang saku harian) dan honorarium PNS (Honorarium Tim Kelompok Kerja untuk petugas Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida/KP3 yang berasal dari luar lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan) dan belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan metode swakelola. Sedangkan untuk belanja makanan dan minuman rapat dilaksanakan melalui penyedia (pihak ketiga).

- e) Seluruh pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Tabel 3.78 Alokasi Awal Pupuk Bersubsidi Tahun 2019

No.	Kecamatan	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (Kg)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Bintan Timur	1,050	400	250	6,100	3,240
2	Bintan Pesisir	100	100	-	-	680
3	Mantang	-	50	-	250	-
4	Gunung Kijang	1,400	150	100	3,950	1,880
5	Toapaya	1,500	350	250	7,600	3,760
6	Teluk Bintan	2,150	550	550	7,250	2,800
7	Teluk Sebong	2,800	350	500	14,100	7,160
8	Bintan Utara	750	50	50	4,000	120
9	Seri Kuala Lobam	250	-	300	1,750	360
JUMLAH		10,000	2,000	2,000	45,000	20,000

Tabel 3.79 Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019

No.	Kecamatan	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (Kg)									
		SEMULA					MENJADI				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Bintan Timur	1,050	400	250	6,100	3,240	1,250	400	250	6,100	3,240
2.	Bintan Pesisir	100	100	-	-	680	100	100	-	-	680
3.	Mantang	-	50	-	250	-	-	50	-	250	-
4.	Gunung Kijang	1,400	150	100	3,950	1,880	1,400	150	100	3,950	1,880
5.	Toapaya	1,500	350	250	7,600	3,760	2,100	350	250	7,600	3,760
6.	Teluk Bintan	2,150	550	550	7,250	2,800	3,000	550	550	7,250	3,240
7.	Teluk Sebong	2,800	350	500	14,100	7,160	2,800	350	500	14,100	7,160
8.	Bintan Utara	750	50	50	4,000	120	750	50	50	4,000	120
9.	Seri Kuala Lobam	250	-	300	1,750	360	250	-	300	1,750	360
JUMLAH		10,000	2,000	2,000	45,000	20,000	11,650	2,000	2,000	45,000	20,440

Tabel 3.80 Realisasi serapan pupuk bersubsidi dari total alokasi yang ditetapkan

NO	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Bintan Timur	1,250	400	250	6,100	3,240
2.	Bintan Pesisir	100	100	-	-	680
3.	Mantang	-	50	-	250	-
4.	Gunung Kijang	1,400	150	100	3,950	1,880
5.	Toapaya	2,100	350	250	7.200	3,760
6.	Teluk Bintan	3,000	550	550	7,250	3,240
7.	Teluk Sebong	2,400	350	500	10.600	7,160
8.	Bintan Utara	750	50	50	4,000	120
9.	Seri Kuala Lobam	250	-	300	1,750	360
JUMLAH		11,250	2,000	2,000	41.100	20,440

Pertemuan evaluasi penyusunan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 yang dimulai pada jam 08.30 WIB, bertempat di Pasar Tani Kabupaten Bintan, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang dan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Bintan dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dalam pertemuan ini dibahas beberapa hal di antaranya:

- a) Perubahan mekanisme pengajuan pupuk bersubsidi tahun 2020;
- b) Penyampaian syarat pengajuan pupuk bersubsidi tahun 2020;
- c) Penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019;
- d) Realokasi pupuk bersubsidi tahun 2019;
- e) Permasalahan dan kendala dalam pengajuan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Tabel 3.81 Rekapitulasi kebutuhan pupuk Bersubsidi tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi e-RDKK

No.	Kecamatan	Jumlah Petani (Orang)	Luas Lahan Garapan (Ha)	Jenis Pupuk Bersubsidi (Kg)				
				Urea	NPK	ZA	SP 36	Organik
1.	Bintan Utara	37	22.15	4,250	15,750	-	2,750	1,100
2.	Seri Kuala Lobam	74	93.80	5,750	19,600	1,400	6,000	2,980
3.	Teluk Sebong	101	130.75	32,150	48,300	4,650	10,350	9,800
4.	Teluk Bintan	55	56.50	16,400	21,350	4,000	1,300	3,050
5.	Toapaya	80	111.30	21,800	37,150	13,200	4,250	10,350
6.	Gunung Kijang	61	66.80	11,550	17,850	3,100	3,450	8,350
7.	Bintan Timur	81	80.60	7,450	26,250	2,850	7,550	3,714

No.	Kecamatan	Jumlah Petani (Orang)	Luas Lahan Garapan (Ha)	Jenis Pupuk Bersubsidi (Kg)				
				Urea	NPK	ZA	SP 36	Organik
8.	Mantang	2	1.00	-	150	-	150	1,000
9.	Bintan Pesisir	3	6.00	500	2,550	-	700	1,120
10.	Tambelan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		494	568.90	99,850	188,950	29,200	36,500	41,464

f. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana uraian sebagai berikut :

- Kuota Pupuk Bersubsidi yang dialokasikan belum dapat mencukupi kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
- Lambatnya pengajuan surat permohonan rekomendasi penebusan dari kelompok tani.
- Lambatnya proses administrasi dalam penerbitan DO dari produsen/distributor yang menyebabkan lambatnya serapan dan adanya realokasi pupuk bersubsidi.
- Lamanya proses waktu yang dibutuhkan untuk penebusan pupuk bersubsidi dikarenakan tidak ada pengecer di wilayah Kabupaten Bintan.
- Lamanya proses waktu yang dibutuhkan untuk penebusan pupuk bersubsidi dikarenakan adanya pergantian pengurus dari distributor pupuk (petrokimia) dan pindahnya gudang pupuk serta tidak

adanya perwakilan dari PT. Petrokimia Gresik di Provinsi Kepulauan Riau.

- f) Banyaknya petani yang melakukan kesalahan transfer yang disebabkan kurangnya pendampingan dari petugas akibat terbatasnya jumlah anggaran dan jumlah petugas untuk pembinaan.
- g) Banyaknya petani yang tidak mau menyerahkan dokumen pelengkap pengajuan RDKK pupuk bersubsidi berupa KK/KTP yang menyebabkan gagalnya proses entry RDKK ke dalam e-RDKK yang secara otomatis petani bersangkutan tidak bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2020.
- h) Masih rendahnya pengetahuan petani dalam hal waktu dan cara penggunaan pupuk yang tepat.
- i) Pelaksanaan pertemuan hanya dapat mengakomodir sebagian kecil petani penerima manfaat pupuk subsidi dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan.
- j) Lambatnya respon balasan surat permintaan petugas yang akan ditetapkan sebagai anggota dalam Komisi Pupuk dan Pestisida dari Kepolisian Resort Bintan serta Kejaksaan Negeri Bintan sehingga menjadi kendala dalam pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bintan.

(2) Permasalahan

- a) Mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi yang dialokasikan di wilayah Kabupaten Bintan.
- b) Mengusulkan untuk pembentukan kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bintan.
- c) Mengusulkan penambahan anggaran guna penambahan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan

dan penambahan intensitas pembinaan petugas ke lapangan serta penambahan peserta pertemuan yang dapat diakomodir.

- d) Mengirimkan surat susulan terkait dengan permintaan petugas yang akan ditetapkan sebagai anggota dalam Komisi Pupuk dan Pestisida dari Kepolisian Resort Bintan serta Kejaksaan Negeri Bintan.

3) Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukung

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 783.546.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 777.049.874,-** atau **99.17%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana berupa pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian dalam rangka untuk menunjang pelayanan prima bagi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, kinerja dan pelayanan penyuluhan di Kabupaten Bintan

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Teluk Bintan

c. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana penyuluh pertanian berupa pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak 1 unit

d. Hasil

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

e. Pelaksanaan Kegiatan

- a) Kegiatan Pembangunan/perbaikan Balai penyuluhan (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukung (DAK) terdiri dari beberapa uraian belanja yang masuk kedalam belanja langsung (5.2) yakni belanja barang dan jasa (5.2.2) dan belanja modal (5.2.3).
- b) Ruang lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah belanja perjalanan dinas (5.2.2.15), Belanja Jasa Konsultansi (5.2.2.48) dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja (52.3.49).
- c) Pelaksanaan Kegiatan ini untuk belanja belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan metode swakelola, sedangkan untuk Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultansi baik untuk konsultansi perencanaan maupun konsultansi pengawasan dilaksanakan melalui penyedia (pihak ketiga).

f. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukung (DAK) sudah terlaksana dengan baik, namun demikian ada beberapa kekurangan diantaranya adalah belum tersedianya alokasi anggaran untuk pemagaran, paving block dan sarana air bersih serta peralatan penunjang kerja.

2) Solusi

Mengusulkan alokasi anggaran untuk pemagaran, paving block dan sarana air bersih serta peralatan penunjang kerja pada tahun 2020.

4) Penunjang DAK Bidang Pertanian

Salah satu aspek pendukung keberhasilan pengembangan

pertanian adalah adanya unsur - unsur yang melibatkan berbagai pihak baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang semuanya memiliki fungsi yang berbeda - beda. Untuk itu diperlukan suatu penguatan kelembagaan dari beberapa aspek pendukung tersebut.

Kabupaten Bintan adalah salah satu Kabupaten yang mendapatkan bantuan alokasi Dana Alokasi Khusus yang ditujukan untuk pembangunan irigasi air tanah, Pembangunan Gedung BPP serta Pemeliharaan Gedung UPT Puskesmas dan Rumah Potong Hewan guna peningkatan prasarana dan sarana pertanian. Untuk itu dana penunjang yang berfungsi untuk pendampingan dan pengawalan dalam penyediaan sarana prasarana merupakan salah satu hal sangat penting dilakukan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian berfungsi membantu mendampingi pengembangan dan pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan dan pengembangan di masa akan datang yang membutuhkan biaya yang cukup besar, maka diperlukan bantuan pembiayaan dari pemerintah yang bersumber dari APBD II dimana dana yang disediakan oleh pemerintah melalui dana APBN jumlahnya tidak mencukupi. Dilain pihak pelaksanaan pendampingan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari DAK akan melibatkan berbagai instansi terkait baik di pusat, wilayah maupun di daerah, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi secara baik dengan instansi terkait tersebut

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 35.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 30.317.556,-** atau **86.62%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan dukungan pembiayaan yang sifatnya operasional untuk pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan irigasi air tanah, Pembangunan Gedung BPP serta Pemeliharaan Gedung UPT Puskesmas dan Rumah Potong Hewan Program Penyediaan dan Penembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah pembangunan irigasi air tanah, Pembangunan Gedung BPP serta Pemeliharaan Gedung UPT Puskesmas dan Rumah Potong Hewan.

c. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian mendukung Hortikultura sebanyak 8 Unit

d. Hasil

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Bintan sebanyak 8 unit

e. Pelaksanaan Kegiatan

- a) Ruang lingkup pekerjaan dari Kegiatan Penunjang DAK terdiri ini adalah belanja barang dan jasa (5.2.2) yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
- b) Pelaksanaan belanja perjalanan dinas dilaksanakan dengan metode swakelola.

f. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian sudah terlaksana dengan baik, namun demikian ada beberapa kekurangan diantaranya adalah alokasi kekurangan pendanaan untuk perjalanan dinas luar daerah yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan mengingat kegiatan yang bersumber dari dana DAK dilaksanakan oleh beberapa bidang.

(2) Solusi

Mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk biaya perjalanan dinas luar daerah pada tahun 2020.

5) Pembangunan Irigasi Air Tanah (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 196.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 49.876.000,-** atau **25,45%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di bidang pengairan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu) Kelompok tani di Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan.

c. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya prasarana dan sarana pertanian irigasi tanah dangkal mendukung hortikultura sebanyak 1 unit.

d. Hasil

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pengairan mendukung hortikultura.

e. Pelaksanaan Kegiatan

- a) Kegiatan Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal terdiri dari beberapa uraian belanja yang masuk kedalam belanja langsung (5.2) yakni belanja barang dan jasa (5.2.2).
- b) Ruang lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga (5.2.2.51) dan Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS (5.2.2.65).
- c) Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode melalui penyedia (pihak ketiga).
- d) Lokasi kegiatan yaitu di Kelompok Tani Unggul Jaya yang beralamat di Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan.

Jenis barang yang diserahkan:

- Sumur gali sebanyak 1 paket.
- Mesin pompa air dan perlengkapannya sebanyak 1 paket.
- Jaringan irigasi air tanah sebanyak 1 paket.

f. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Mekanisme proses Pencairan awal yang agak terlambat dan memakan waktu yang panjang.

(2) Solusi

Persiapan dokumen administrasi di awal

6) Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak Pusat Kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar DAK Pertanian **Rp. 44.171.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 44.171.000,-** atau **100%** dengan realisasi fisik sebesar **100%**.

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk mendukung pencapaian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di di UPTD.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah UPTD RPS dan Puskesmas.

c. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya prasarana dan sarana pada UPTD RPH dan Puskesmas.

d. Hasil

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pengairan mendukung hortikultura.

e. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Mekanisme proses Pencairan awal yang agak terlambat dan memakan waktu yang panjang.

(2) Solusi

Persiapan dokumen administrasi di awal.

7) Program Peningkatan Pemenuhan Keamanan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp

1.806.929.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.644.683.785 atau 91,02 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Outcome dari program ini adalah tersedianya produk pangan asal hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1) Pengembangan Ternak Masyarakat

Pengembangan ternak masyarakat bertujuan untuk mengembangkan ternak yang ada di masyarakat sesuai potensi lokasi dan keinginan masyarakat yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat utamanya keluarga yang pada gilirannya juga dapat menunjang perekonomian keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 894.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 811.555.930,- atau 90,72 % dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan ternak sapi, kambing dan pakan dan ayam buras melalui kegiatan terlaksananya pengembangan ternak sapi (sapi Bali), kambing (rambon) dan pakan dan ayam buras dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sapi sebanyak 27 ekor dikembangkan;
 - a) Kelompok Bumo Jaya (Kelurahan Tanjung Uban Timur) sebanyak 5 ekor jantan.
 - b) Kelompok Bintang Barokah sebanyak 5 ekor (3 jantan; 2 betina).
 - c) Kelompok Puji Mulya (Desa Toapaya Utara) sebanyak 17 ekor.
- b. Kambing sebanyak 48 ekor dikembangkan:
 - a) Kelompok Maju Bersama (Kelurahan Kawal) sebanyak 28 ekor (6 jantan; 22 betina)
 - b) Kelompok Gin Besar (Desa Numbing) sebanyak 20 ekor (2 jantan; 18 betina)

- c. Ayam Buras sebanyak 2.100 ekor beserta pakan ternak sebanyak 4.200 kg dikembangkan:
- a) Kelompok Asri (Kel. Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg.
 - b) Kelompok Karya Mandiri (Kel. Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg.
 - c) Kelompok Jaya Bahagia (Kel. Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg.
 - d) Kelompok Tunas Muda (Kel. Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg.
 - e) Kelompok Jaya Bahagia II (Kel. Toapaya Asri) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg.
 - f) Kelompok Berkah (Desa Toapaya Selatan) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg.
 - g) Kelompok Hidayah (Desa Toapaya Selatan) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg.
 - h) Kelompok Maju Jaya (Kel. Kawal) sebanyak 200 ekor dan pakan 400 kg.
 - i) Kelompok Bina Sejahtera (Kp. Galang Batang) sebanyak 220 ekor dan pakan 440 kg.
 - j) Kelompok Rosela (Desa Teluk Bakau) sebanyak 280 ekor dan pakan 560 kg.

2) Pengembangan Budidaya Ternak Unggas

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 325.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 282.413.530,- atau 86,9 % dengan realisasi fisik 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan budidaya ternak unggas. melalui kegiatan operasional pengembangan budidaya ternak ayam buras dengan rincian sebagai berikut

- a. Kelompok Makaryo (Ke.Toapaya Asri) sebanyak 1000 ekor dan pakan ternak 2000 kg

- b. Kelompok Tunas Muda Satu (Desa Toapaya) sebanyak 500 ekor dan pakan ternak 1000 kg
- c. Kelompok Mandiri II (Desa Teluk Bakau) sebanyak 300 ekor dan pakan ternak 600 kg
- d. Kelompok Makmur Jaya (Ke. Gunung Lengkuas) sebanyak 500 ekor dan pakan ternak 1000 kg

3) Pengembangan Hijauan Makanan Ternak

Pengembangan hijauan makanan ternak untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan makanan ternak yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan ternak, dapat menanggulangi kekurangan hijauan pakan ternak terutama di musim kemarau, serta meningkatkan nilai gizi pada hijauan pakan ternak untuk meningkatkan produktivitas ternak secara optimal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 97.041.250,- atau 97,04 % dengan realisasi fisik 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan hijauan makanan ternak berupa 18.000 tek rumput King Grass kepada Kelompok Puji Mulya Desa Toapaya Utara.

4) Pengamanan Ternak Daerah dan Pengendalian Zoonosis

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 277.829.000,- dan terealisasi sebesar Rp 266.738.975,- atau 96,01 % dengan realisasi fisik 100 %. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan ternak daerah dan pengendalian zoonosis melalui kegiatan pengamanan ternak daerah dan pengendalian zoonosis berupa belanja pengadaan neck tag sapi (penanda sapi telah dilakukan pemeriksaan / Sehat Layak untuk hewan kurban), honorarium petugas lapangan paramedis veteriner dan belanja obat – obatan hewan.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah menjaga kesehatan ternak secara umum (sapi, unggas, kambing dan babi) baik ternak pemerintah maupun yang dimiliki oleh masyarakat

dengan cara pelayanan aktif (active service) kesehatan hewan kepada masyarakat, pengendalian dan surveillance penyakit zoonosis dengan tujuan meningkatnya ketahanan tubuh hewan/ternak sehingga terciptanya kesehatan hewan yang berimplikasi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Bintan. Hingga Tahun 2019 Kabupaten Bintan masih dinyatakan sebagai daerah yang bebas dari beberapa penyakit zoonosis berbahaya seperti Rabies, Anthrak, Brucellosis dan penyakit hewan menular strategis (PHMS) lainnya seperti Jembrana dan Demam Babi (African swine fever). Khusus Untuk Penyakit Rabies Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat sertifikat Bebas Rabies dari Menteri Pertanian pada tahun 2015.

Dalam upaya melakukan pembebasan penyakit Avian influenza (AI/flu burung) provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau serta Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi (BVet Bukittinggi) melakukan monitoring dan surveillans pada tahun 2019 sebanyak 2 kali. Berdasarkan hasil monitoring dan surveillans tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan pemeriksaan AI Real Time-PCR, dari 249 sampel seluruhnya negatif Flu Burung, demikian juga dengan pemeriksaan AI Inokulasi TET/TAB terdapat 222 sampel negatif AI, tetapi sebanyak 27 sampel menunjukkan positif AI. Dari hasil 27 sampel yang positif ini, kondisi ayam tidak menunjukkan gejala sakit flu burung, sehingga secara umum, kasus klinis penyakit zoonosis Flu Burung di Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2019 tidak ada laporan (nihil/zero case).

Pada tahun 2019, dunia kesehatan hewan secara umum

dihadapkan juga pada permasalahan penyakit pada ternak Babi yakni *African Swine Fever* (ASF) yang secara cepat telah menular dari satu negara ke negara lain. Hal ini semakin diperjelas dengan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 820 tahun 2019 tentang pernyataan wabah penyakit demam babi afrika (*African swine fever*) pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, Indonesia pun menjadi salah satu negara tertular penyakit ASF ini. Oleh sebab itu, upaya pengawasan dan pengamanan ternak daerah terhadap babi yang dipelihara oleh peternak lokal Bintan menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan. Tercatat jumlah populasi ternak Babi yang telah dilakukan pembinaan kesehatan hewan sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 1.024 ekor yang tersebar di Kecamatan Teluk Sebong, Toapaya, Gunung Kijang dan Bintan Timur.

Disamping itu, Kegiatan pengamanan ternak daerah dan pengendalian Zoonosis pada tahun 2019 juga melaksanakan kegiatan pengawasan kesehatan hewan untuk hewan kurban 1440 H, dukungan kegiatan yang diberikan berupa pemberian tanda (neck tag) sapi Sehat dan Layak sebagai hewan kurban setelah hewan dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan atau petugas paramedis veteriner dibawah penyeliaan dokter hewan. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. yakni Kecamatan Toapaya, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Bintan Timur, Bintan Pesisir, Seri Kuala Lobam, Mantang, Bintan Utara, Gunung Kijang dan Tambelan. Namun demikian, mengingat daerah potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Bintan terfokus di Pulau Bintan saja, maka fokus pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan hewan kurban dominan di pulau Bintan. Pada tahun 2019, jumlah stok hewan kurban di kandang yang telah dilakukan pengawasan kesehatan hewan kurban sebanyak 875 ekor,

dengan rincian 447 ekor ternak sapi dan 428 ekor ternak kambing. Stok hewan kurban ini sebagian besar di potong di wilayah Kabupaten Bintan dan beberapa yang di potong di wilayah Kota Tanjungpinang.

5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.500.000, terealisasi 85,68% yaitu Rp 85.391.600 dan realisasi fisik sebesar 100%

Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner seperti:

- a) Dilaksanakannya pelatihan juru sembelih halal sebanyak 40 peserta melibatkan LPPOM MUI dan MUI Kabupaten Bintan.
- b) Sertifikasi tempat pemotongan ayam sebanyak 10 unit (sertifikat halal LPPOM MUI).
- c) Sertifikasi juru sembelih halal oleh LPPOM MUI Propinsi Kepulauan Riau.
- d) Pengawasan dan pembinaan tempat pemotongan ayam dan RPH Unggas di Kabupaten Bintan.
- e) Pemeriksaan/uji laboratorium terhadap produk hewan yaitu ayam potong dan bakso sebanyak 30 sampel.
- f) Pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap hewan kurban di mesjid dan tempat pemotongan.
- g) Melakukan sidak, pemantauan dan pengambilan produk hewan bersama instansi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Propinsi Kepulauan Riau dan Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang.

6) Kegiatan Penyusunan DED Rumah Potong Hewan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.000.000, terealisasi 92,31 % yaitu Rp 101.542.500 dan realisasi fisik 100%. Output kegiatan DED ini adalah tersedianya sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU). Kegiatan DED Rumah Potong Hewan Unggas ini dilaksanakan mengingat Kabupaten Bintan baru memiliki 1 (satu) RPH Unggas di Kecamatan Bintan Utara. Adanya RPH Unggas yang sekarang belum maksimal penggunaannya. Kegiatan DED Rumah Potong Hewan Unggas menghasilkan 3 (tiga) dokumen DED di Kecamatan Bintan Timur, Toapaya dan Bintan Timur. Kegiatan DED ini dimaksudkan agar di Kecamatan Bintan Timur, Toapaya dan Bintan Utara dapat memiliki RPH Unggas yang layak dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

7) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- a) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam menjalankan usaha ternaknya.
- b) Kurangnya pelatihan terkait peningkatan SDM Terampil Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c) Kurang maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dan bantuan ternak yang telah diberikan.
- d) Potensi Ancaman Penularan penyakit yang berasal dari Produk Pangan Asal Hewan (PAH) kepada masyarakat.
- e) Rentannya hewan dan ternak tertular penyakit hewan menular dan penyakit hewan menular strategis.
- f) Potensi ancaman Penularan penyakit yang berasal dari hewan ke manusia (zoonosis) khususnya Penyakit Emerging yang dapat menyebabkan wabah.
- g) Harga Produksi peternakan (harga pakan, bibit dan

sapronak) yang tidak stabil.

b. Solusi

- a) Memaksimalkan peran Penyuluh Pertanian yang Polivalen dan optimalisasi pembinaan peternakan oleh petugas lapangan paramedis veteriner.
- b) Melakukan upaya permohonan usulan mengikuti pelatihan atau melakukan kerjasama dengan Balai Pelatihan Peternakan (BBPKH Cinagara, BPTU HPT Padang Mangatas dan BBPP Batu).
- c) Memaksimalkan upaya reward dan punishment.
- d) meningkatkan upaya pengawasan dengan cara pengambilan sampel produk pangan asal hewan.
- e) Melakukan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif kesehatan hewan kepada hewan terdampak dan masyarakat.
- f) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral melalui optimalisasi TGC (Tim Gerak Cepat) Pengendalian dan penanggulangan penyakit emerging dan zoonosis.
- g) Meningkatkan penggunaan pakan, bibit dan sapronak lokal yang berasal dari dalam wilayah Bintan.

3.1.3.4 Urusan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam Pasal 14 (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Ayat (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) yang berkaitan dengan Taman Hutan Raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, bidang kehutananan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota melainkan pemerintah provinsi. Demikian pula

dengan Kabupaten Bintan yang sudah menindaklanjuti kebijakan pusat ini tersebut. Selanjutnya OPD Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bintan, sesuai dengan peraturan terkait telah berubah nama menjadi OPD Dinas Pertanian Kabupaten Bintan, dan OPD ini tidak lagi menangani urusan kehutanan.

3.1.3.5 Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Demikian pula dengan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) tingkat kabupaten/kota. Urusan ini sudah diambil alih oleh pihak pemerintah provinsi. Penyerahan wewenang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan ini dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SE/2015 dan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 4.E/20/DJB/2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Demikian pula dengan Kabupaten Bintan yang sudah menindaklanjuti kebijakan pusat tersebut. Selanjutnya OPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan tidak lagi menangani urusan ini.

3.1.3.6 Urusan Industri

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk Urusan Industri adalah sebagai berikut :

- **Jumlah IKM tahun 2019 = 494 unit**
- **Persentase IKM Bersertifikasi Mutu Produk = 43,84%**

Tabel 3.82 Jumlah IKM Aktif di Kabupaten Bintan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH INDUSTRI	NILAI INVESTASI	JUMLAH TENAGA KERJA
1	TELUK BINTAN	30	89.444.444	50
2	SERI KUALA LOBAM	51	138.125.000	95
3	BINTAN UTARA	70	183.750.000	142
4	TELUK SEBONG	24	85.942.857	53
5	BINTAN TIMUR	139	1.064.981.739	258
6	BINTAN PESISIR	42	214.666.667	71
7	MANTANG	30	107.000.000	58
8	GUNUNG KIJANG	44	208.000.000	93
9	TOAPAYA	36	87.634.286	65
10	TAMBELAN	28	47.950.000	70
2019		494	2.227.494.993	955
2018		469	1.989.500.000	909

Sumber : Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2019 (diolah)

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 900.715.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 819.567.955,- atau 90,99%. *Outcome* meningkatnya Industri Kecil dan Menengah.

a. Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

(1) Kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan Bagi IKM

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.098.200,- atau 99,98%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya bantuan peralatan bagi IKM yang ada di Kabupaten Bintan. Adapun penerima bantuan pengadaan peralatan ini adalah Kelompok Mapan Barokah dari Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan jenis

peralatan diantaranya Mesin Jahit Manual, Mesin Obras, dan Mesin Pencetak Bakso.

(2) Kegiatan Promosi Dan Partisipasi Pameran Produk IKM Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.325.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.710.000,- atau 81,71%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya pameran produk IKM Kabupaten Bintan.

(3) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Bagi IKM

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 286.507.220,- atau 82,30%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi IKM di Kabupaten Bintan.

(4) Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif IKM Berkeunggulan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 177.071.000,- atau 99,41%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya pengembangan Industri Kreatif Berkeunggulan IKM di Kabupaten Bintan.

(5) Kegiatan Penyusunan DED Sentra IKM

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 100,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.987.232,- atau 99,99%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya DED sentra IKM.

(6) Kegiatan Studi Kelayakan Sentra IKM

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.194.303,- atau 98,39%. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya Studi Kelayakan Sentra IKM.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Masih kurangnya promosi dan pemasaran serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah;
- b) Akses IKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan terbatas;
- c) Sumber daya manusia pelaku IKM masih terbatas sehingga pengelolaan IKM belum mencapai hasil maksimal.

(2) Solusi

- a) Bimbingan teknis dan pelatihan bagi para pelaku IKM untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen usaha yang baik;
- b) Sosialisasi dan fasilitasi yang mendorong pemahaman dan manfaat legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk.

3.1.3.7 Urusan Perdagangan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk **Urusan Perdagangan** adalah sebagai berikut:

1) Persentase Tertib Ukur Terhadap Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah UTTP tahun 2019 di Kabupaten Bintan sebanyak 348 UTTP dan yang telah ditera pada tahun 2019 sebanyak 348 UTTP maka persentase tertib ukur terhadap UTTP sebesar 100%.

2) Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat

Makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi dasar. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, oleh karenanya biasanya makanan pokok dilengkapi dengan lauk pauk untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi seseorang dan mencegah kekurangan gizi. Untuk standar di Indonesia dikenal sebagai 9 (Sembilan) Bahan Pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan bahan itu adalah: beras, sagu, dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi, ayam, dan ikan minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, garam beriodium dan bernatrium untuk wilayah Kabupaten Bintan ketersediaan barang kebutuhan pokok seperti khususnya 9 Bahan Pokok telah mencapai 100%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan** melalui 5

(lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.857.470.650,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.284.647.345,- atau 69,16% dengan *Outcome* Meningkatnya pengamanan Perdagangan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.466.600,- atau 99,90%. *Output* kegiatan ini adalah monitoring harga dan pemantauan kesediaan barang/stok yang dilaksanakan mulai Januari s/d Desember 2019 di Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.

(2) Kegiatan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Terhadap UTTP

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.270.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.700.429,- atau 99,55%. *Output* kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap UTTP di Kabupaten Bintan, yang mana pada tahun 2019 telah ditera alat UTTP sebanyak 348 UTTP dengan perolehan retribusi sebesar Rp. 73.697.000,-.

(3) Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 175.680.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 175.238.000,- atau 99,75%. *Output* dari kegiatan ini adalah Pelaksanaan Operasi Pasar (Pasar Murah Sembako) pada saat hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan secara

bertahap di 3 (tiga) Kecamatan Kabupaten Bintan. Adapun jumlah paket yang di bagikan sebanyak 2500 Paket dengan harga Rp. 81.000/paket. Adapun rincian jumlah paketnya adalah untuk Kecamatan Bintan Utara 650 Paket, Bintan Timur 1.100 Paket, Gunung Kijang 750Paket,.

(4) Kegiatan Pembelian Kendaraan Kemetrolagian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 203.000.000,- atau 27,07%. *Output* dari kegiatan ini adalah Pembelian Kendaraan Kemetrolagian. Adapun kendaraan kemetrolagian yang selesai diadakan adalah 4 unit kendaraan roda dua karoseri khusus seharga Rp. 198.000.000,- sedangkan pengadaan 1 unit kendaraan roda empat karoseri khusus gagal lelang.

(5) Kegiatan Pembelian Peralatan Standar Kemetrolagian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 725.242.316,- atau 96,70%. *Output* dari kegiatan ini adalah Pengadaan Peralatan Standar Kemetrolagian untuk menunjang pelayanan kemetrolagian. Adapun Peralatan Standar Kemetrolagian yang selesai diadakan diantaranya Peralatan Standar Kemetrolagian Hand Pallet, Master Meter Arus Minyak dan Pengadaan Alat Lab.

3) Persentase Fasilitas Pasar Yang Memadai

Jumlah pasar di kabupaten bintan berjumlah 10 unit pasar. Adapun dari jumlah tersebut pasar yang telah memiliki fasilitas pasar yang memadai sebanyak 6 unit pasar, sehingga persentase fasilitas pasar yang memadai sebesar 60%.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- atau 100% dengan *Outcome* Meningkatnya pengamanan Perdagangan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Penyusunan DED Pasar Rakyat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.000.000,- atau 100%. *Output* kegiatan ini adalah tersedianya DED Pasar Rakyat.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Terbatasnya sarana perdagangan;
- b) Belum optimalnya kegiatan promosi komoditi perdagangan sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;
- c) Kurangnya akses sistem jaringan informasi perdagangan;
- d) Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar;
- e) Dan juga penguasaan teknologi yang masih rendah.

(2) Solusi

- a) Pembangunan / Revitalisasi sarana perdagangan yang telah ada;
- b) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan;

- c) Pendidikan dan pelatihan kepada para pengelola pasar.

3.1.4. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

3.1.4.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

3.1.4.1.1 Sekretariat Daerah

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Umum melalui 14 (empat belas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 18.337.740.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.431.996.076,- atau 95,06 %. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kerumah tanggaaan yang telah distandarisasi selama 1 tahun dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan kerumahtanggaan dan administrasi perkantoran Bupati, Wakil Bupati, dan lingkup Sekretariat Daerah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 41.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.715.000,- atau 87,11% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpenuhinya kebutuhan materai, perangko dan benda pos lainnya untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.175.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.049.815.556,- atau 89,30% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terbayarnya listrik, air, telepon seluler dilingkungan sekretariat daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah serta kelancaran pelaksanaan dan pelayanan perkantoran.

(3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.536.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.448.300.000,- atau 96,51 % dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Meningkatnya kinerja dan terbayarnya honorarium pengelola keuangan, pengelola pengadaan barang/jasa dan pegawai honorer/tidak tetap dilingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

(4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 400.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 399.042.600,- atau 99,94% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpeliharanya kebersihan di lingkungan sekretariat daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah dan prasarana penunjang perkantoran.

(5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 318.518.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 255.742.080,- atau 80,29% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor.

(6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 320.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 319.369.225,- atau 99,57% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan.

(7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 375.414.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 374.992.200,- atau 99,89% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

(8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.815.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.706.852.610,- atau 96,15% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

(9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.453.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.451.735.600,- atau 99,88% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional, Generator Set dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran.

(10) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 4.218.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.094.847.237 atau 97,06% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpenuhinya Makanan dan Minuman Bagi Pegawai, Peserta Rapat, Tamu dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

(11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.025.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.721.272.524,- atau 85,00% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Menigkatnya Pengetahuan Wawasan dan Kemampuan Pegawai dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah.

(12) Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 772.967.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 699.568.950,- atau 90,50% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terepnuhinya Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dalam Daerah.

(13) Penyediaan Jasa Sewa Sarana Transportasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.496.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.491.654.907,- atau 99,71% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik.

(14) Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Peralatan Kantor/ Perlengkapan Gedung Kantor dan Alat Rumah Tangga

Pagu anggaran Rp.388.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 383.087.587,- yaitu 98,73% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program Administrasi Perkantoran tidak terdapat permasalahan sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Umum** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 11.415.882.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.155.733.977,- atau 97,72% dan realisasi fisik sebesar 100% *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 7.707.882.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.493.919.277,- atau 97,22% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik.

(2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.125.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.092.267.450,- atau 97,09% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional.

(3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.175.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.168.139.950,- atau 99,42% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor.

(4) Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.408.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.401.407.300,- atau 99,53% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terpenuhinya Sarana Gedung/Ruang/Tempat/ Perkantoran.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tidak terdapat permasalahan sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

3) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Umum** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 182.890.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 181.170.000,- atau 99,06%% dan realisasi fisik sebesar 100% *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 75.690.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.646.000,- atau 98,62% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

(2) **Pengadaan Pakaian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Beserta Perlengkapannya**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 107.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 106.524.000,- atau 99,37% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Beserta Perlengkapannya.

b. **Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan program Disiplin Aparatur tidak terdapat permasalahan sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

4) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Umum** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 186.750.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 146.486.113,- atau 78,44% dan

realisasi fisik sebesar 100. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Dan Keterampilan Aparatur Sipil Negara

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp. 186.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 151,986,113,- atau 81,38% dan realisasi fisik sebesar 100% *output* Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan Dan Keterampilan Aparatur Sipil Negara.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan adalah merupakan permasalahan yang berarti namun perlu menamatkan perbaikan yang dikarenakan ada sebagian ruangan yang mengalami kerusakan seperti kebakaran, bocor akibat hujan dan serta ruang rapat yang belum mencukupi untuk kapasitas yang banyak.
- b) Berkurangnya tenaga pelaksana pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan

(2) Solusi

- a) Perlu meningkatkan anggaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dilaksanakan oleh Bagian Umum dengan harapan agar Gedung atau ruangan yang mengalami kerusakan dapat perbaiki dan ruangan untuk melaksanakan rapat agar segera diperluas demi keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan.
- b) Meningkatkan kapasitas pelaksana pengelola keuangan dan pengelola barang/ jasa dengan

mengadakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan barang/jasa di Kabupaten Bintan guna dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Umum** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.718.250,- atau 75,15% *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.718.250,- atau 75,15% dengan *output* Tersusunnya rencana kerja dan pelaporan kegiatan.

b. Permasalahan dan Solusi

Belanja yang tidak terserap dikarenakan adanya sisa belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas yang dikarenakan sisa dari biaya transportasi dan penginapan tidak dapat dibelanjakan dan dialokasikan kepada Uang harian Luar daerah. Dalam merencanakan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dirasakan belum memenuhi kebutuhan yang pasti sehingga banyak perubahan perubahan yang perlu dievaluasi kembali mengenai belanja kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga Perlu merencanakan kegiatan yang baik dan matang agar tercapai sasaran berdasarkan

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.

6) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Hukum** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 720.432.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 652.829.550,- atau 90,62% dan realisasi fisik sebesar 100%. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 207.274.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.646.714,- atau 91,98 dan realisasi fisik sebesar 100%. *output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah Peraturan Daerah (PERDA) sejalan bergantinya peraturan dengan melaksanakan penyusunan Perda. Jumlah Perda yang diajukan pada Tahun 2019 dari target 11 Perda terrealisasi sebanyak 9 Perda.

(2) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 191.446.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 187.535.064,- atau 97,96% dan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* dari kegiatan ini adalah terpublikasinya produk hukum daerah untuk mewujudkan tertib dokumentasi hukum melalui Website Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Kabupaten Bintan (jdih.bintankab.go.id).

Capaian Indikator Kinerja OPD Tahun 2019 untuk program ini adalah:

- **Jumlah perda yang diajukan**

Target Perda yang diajukan untuk Tahun 2019 adalah 10 Perda, Sesuai dengan Properda Tahun 2019 Jumlah Perda yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah 9 Ranperda dengan capaian Perda berjumlah 9 Perda dengan rincian sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.

▪ **Persentase Ranperda menjadi Perda yang disahkan**

Persentase Ranperda menjadi Perda yang disahkan berjumlah 9 (sembilan) Ranperda dan yang disahkan adalah 9 Perda yaitu 100% dengan rincian sebagai berikut :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bintan.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif dan Ruang Air Susu Ibu.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.

- **Presentase Produk Hukum Yang Dipublikasikan**

Tahun 2019 presentasi produk hukum yang dipublikasikan capainnya adalah 100% dari target kinerja awal adalah 100% dari 5 produk hukum ini telah dipublikasikan baik secara Media online (website) www.jdih.bintankab.go.id, media cetak (koran) serta dalam bentuk jilid buku.

- **Persentase Perda yang disosialisasikan**

Persentase Perda yang disosialisasikan 100% yang telah disosialisasikan baik langsung kepada masyarakat dan melalui media yang tersedia.

(3) Litigasi Dan Non Litigasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 204.405.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 167.845.438 atau 82.11% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan *output* terselesaikannya sengketa peraturan perundang-undangan sehingga akan ini diharapkan terselesainya sengketa sesuai Peraturan Perundang-undangan melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum dalam kasus Perdata dan PTUN.

(4) Rapat Koordinasi Kerjasama Permasalahan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 117.305.600,- dengan realisasi sebesar 106.802.334, atau 91,95 % dan realisasi fisik sebesar 100% dengan Output terlaksananya Rapat – rapat kerjasama permasalahan hukum dan terlaksananya Kabupaten / Kota Peduli HAM.

Capaian Indikator Kinerja OPD Tahun 2019 untuk program ini adalah:

▪ **Persentase/Jumlah Kasus Hukum Antar Pemerintah Yang Diselesaikan**

Pada tahun 2019, persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan Pegawai Negeri Bintang 83,33% artinya 5 (lima) kasus/perkara yang diselesaikan di tingkat Pengadilan Tata Usaha negara dan 2 kasus/perkara di tingkat Banding PT TUN Medan jadi total 7 kasus/perkara.

▪ **Persentase/Jumlah Kasus Hukum Antar Pemerintah Dengan Pihak Ketiga Yang Diselesaikan**

Untuk tahun 2019 Target awal persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan berjumlah 1 (satu) kasus yaitu antara Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintang dengan PT. Bintang Lagoon Resort sudah (inkracht) setelah putusan kasasi di Mahkamah Agung

▪ **Persentase/ Jumlah Kasus Hukum Antar Pemerintah Dengan Masyarakat Yang Diselesaikan**

Target awal tahun 2019, persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat diselesaikan berjumlah 2 (dua) namun pada tahun 2019 kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat diselesaikan tidak ada.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Bintang dalam rangka menggagas Ranperda.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mencari informasi serta memahami terhadap produk hukum.

- c) Dalam kegiatan Litigasi dan Non Litigasi, tidak dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan konsultan hukum (Advokat).
- d) Kurangnya melihat permasalahan penerapan peraturan perundang- undangan yang tidak efektif oleh perangkat daerah.
- e) Ketergantungan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) masih berada dibawah jaringan Pemkab Bintan (Jaringan Informasi www.bintankab.go.id) sehingga apabila terjadi gangguan pada server www.bintankab.go.id maka akan langsung berakibat pada JDIH.
- f) Kurangnya kerjasama antara OPD dalam memberikan dokumen produk hukum dalam bentuk soft copy sehingga mengakibatkan tidak lengkapnya data yang bisa dimasukkan kedalam JDIH.

(2) Solusi

- a) Perlu gagasan dari Organisasi Perangkat Daerah untuk mengajukan Rencana Peraturan Daerah yang dapat mendukung iklim usaha serta berpihak kepada rakyat.
- b) Perlunya informasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami produk hukum daerah serta sarana prasarana publikasi terkait penegakan perda seperti papan pengumuman di tempat-tempat umum.
- c) Kasus-kasus yang dihadapi diharapkan bisa ditangani oleh Bagian Hukum, namun dapat melibatkan konsultan hukum.
- d) Perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan setiap tahunnya sehingga pelaksanaan lebih efektif.

- e) Perlu adanya koordinasi dengan bagian Kominfo selaku pemegang jaringan www.bintankab.go.id.
- f) Pelaksanaan terhadap OPD untuk memberikan dokumen produk hukum baik berupa hard maupun soft sopy sebelum registrasi dilakukan.
- g) Tersedianya email konsultasi bantuan hukum sebagai media konsultasi hukum.

7) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Organisasi** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.88.639.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.506.500,- atau 66,01% dan realisasi fisik 100%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyusunan LAKIP Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 88.639.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.506.500,- atau 66,01% dan realisasi fisik 100%. dengan *output* Tersedianya informasi dan dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) Kabupaten Bintan yang sesuai dengan SAKIP.

Capaian Indikator Kinerja OPD Tahun 2019 untuk program ini adalah :

- **Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan**

Evaluasi atas Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka

terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Dari target yang diberikan adalah 70,10 (Nilai BB), realisasinya untuk Tahun 2019 dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 mencapai 62,04 atau dengan (Nilai B).

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Untuk Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur **permasalahan Tahun 2019 :**

- a) Untuk SAKIP laporan Kinerja (LAKIP) Kabupaten Bintan Tahun 2019 yang dinilai oleh KEMENPANRB yang di wakikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk Keselarasan Dokumen SAKIP harus lebih di sinkronkan lagi.
- b) Untuk SAKIP Laporan Kinerja (LAKIP) OPD Keselarasan Dokumen SAKIP juga agar di sinkronka lagi.

(2) Solusi

Melakukan Keselarasan Dokumen SAKIP Laporan Kinerja Kabupaten Bintan dan Laporan Kinerja OPD dengan melakukan :

- a) Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b) Revisi Perjanjian Kinerja dengan Penambahan Pohon Kinerja dengan memperhatikan keselarasan visi, misi, dan Indikator Kinerja yang akan dicapai.

Gambar 3.3 Perbandingan Target Capaian Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan



8) Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan** pada Bagian Organisasi melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.055.726.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 733.222.249,- atau 69,45% dengan realisasi fisik 100%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Penataan , Ketatalaksanaan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Bidang Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 238.807.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.681.127 atau 55,98% dengan realisasi fisik 100%. *output* kegiatan ini Terlaksananya tindak lanjut organisasi perangkat daerah terhadap hasil rakor.

(2) Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 289.954.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 258.812.284 atau 89,26% dengan realisasi fisik

100%. dengan *output* kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Nilai Hasil Penilaian yang dilakukan adalah: organisasi dengan peringkat kinerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dapat diberi penghargaan. Dengan nilai yang tertinggi:

- Rangking I nilai 892 yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Rangking II nilai 890 yaitu Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah.
- Rangking III nilai 878 yaitu Dinas Lingkungan Hidup.
- Rangking IV nilai 871 yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Rangking V nilai 858 yaitu Dinas Pendidikan.

(3) Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 90.563.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.050.000 atau 51,95% dan realisasi fisik 100%. dengan *output* kegiatan ini adalah Terlaksananya Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat.

(4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp323.400.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 227.041.488,- atau 70,20% dan realisasi fisik 100%. dengan *output* kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

(5) Evaluasi Analisa Jabatan Dan Evaluasi Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 113.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 66.637.350,- atau 58,97% dan realisasi fisik

100%. dengan *output* kegiatan ini adalah Erlaksananya Evaluasi Analisa Jabatan Dan Evaluasi Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Capaian Kinerjanya adalah :

- **Persentase Jabatan Yang Sudah Tersusun Standar Kompetensinya**

Untuk tahun 2019 Target Persentase Jabatan Yang Sudah Tersusun Standar Kompetensinya adalah 80%, dari jabatan yang ada adalah 741 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu) Jabatan Struktural yang telah disusun standar kompetensi jabatannya, yaitu 100%. Untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Sementara ini dari 2663 (Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional hanya 70% yang telah tersusun Standar Kompetensi Jabatannya. Rata-rata Persentase Jabatan Yang Sudah Tersusun Standar Kompetensinya adalah 85%

- **Presentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Telah Menyusun SOP**

Guna mempercepat peningkatan Kualitas pelayanan publik salah satu unsur yang dipenuhi dalam rangka pelayanan publik adalah SOP (standar Operational Procedure), dimana Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bintan harus memenuhi kepatuhan standar pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara sesuai UU nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Target Tahun 2019 sama dengan Tahun 2018 untuk jumlah OPD yang telah menerapkan pelayanan publik sesuai Standar Operasional Prosedur adalah sebanyak 28 OPD terealisasi 18 dan 10 Kecamatan OPD yaitu DPMPTSP, DISNAKER, DISDUKCAPIL, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan

Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Sekretariat DPRD. Dimana SOP ini dibuat untuk standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi. Organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya telah menerapkan SOP namun tidak tertulis bahkan tidak dituangkan kedalam Perka (Peraturan Kepala) Perbup bahkan Perda, untuk OPD Kabupaten Bintan secara keseluruhan telah menyusun SOP dengan capaian 71,79%.

▪ **Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019**

Untuk hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 yang dilakukan oleh KEMENPANRB untuk Kabupaten Bintan dengan nilai:

- a) PTSP dengan nilai Hasil Evaluasi sebagai Role model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “BAIK” Tahun 2019.
- b) DISDUKCAPIL sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “CUKUP” Tahun 2019
- c) RSUD Kabupaten Bintan dengan nilai Hasil Evaluasi sebagai Role model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “BAIK” Tahun 2019.

Untuk hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 yang dilakukan oleh OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Kabupaten Bintan dengan nilai : Prediket Kepatuhan Tinggi Tahun 2019 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

▪ **Persentase Indikator yang telah mencapai SPM**

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum pelaksanaan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yaitu :

- a) Bidang Pendidikan.
- b) Bidang Kesehatan.
- c) Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
- d) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- e) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat.
- f) Bidang Sosial.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis standar pelayanan minimal (SPM). Untuk Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bintang Rata rata persentase Indikator yang telah mencapai SPM rata rata sekitar 80 % dari tiap jenis Pelayanan Dasar dari Masing Masing Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, Bidang Sosial.

▪ **Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik**

Capaian Kinerja OPD yang dilakukan melalui penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 untuk OPD berdasarkan penilaian yang terdiri dari :

- a) Pelayanan Publik.
- b) Penilaian Akuntabilitas.
- c) Pemenuhan/ kepatuhan terhadap peraturan.

Nilai Hasil Penilaian yang dilakukan adalah :

Organisasi dengan peringkat kinerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dapat diberi penghargaan. Dengan nilai yang tertinggi :

- Rangking I nilai 892 yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Rangking II nilai 890 yaitu Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah.
- Rangking III nilai 878 yaitu Dinas Lingkungan Hidup.
- Rangking IV nilai 871 yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Rangking V nilai 858 yaitu Dinas Pendidikan.

Dari ketiga point penilaian tersebut rata-rata OPD di Kabupaten Bintan hampir semua memenuhi Penilaian Kinerja OPD dari target 100% dengan capaian yaitu sebesar 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Untuk Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 hasil dari koordinasi KEMENPANRB untuk Keselarasan Dokumen disesuaikan lagi dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017.

- b) Untuk form dari penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan diperbaiki dan dihilangkan saja untuk visi dan misi tersebut.
- c) Untuk Kajian tunjangan penambahan penghasilan bagi Pegawai negeri Sipil sudah ada dan disesuaikan dengan aplikasinya
- d) dengan diterbitkannya PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka untuk penyusunan Standar Kompetensi menunggu dikeluarkannya pedoman penyusunan Standar Kompetensi Manajerial, Teknis dan Sosiokultural oleh Menteri yang berwenang.

(2) Solusi

- a) penghasilan bagi Pegawai negeri Sipil sudah ada dan disesuaikan dengan aplikasinya.
- b) Revisi dalam blangko pengisian Formulir penilaian kinerja.
- c) Revisi dalam Bobot Aspek, Indikator dan Bobot Indeks Pelayanan Publik
- d) Standar kompetensi manajerial yang telah disusun saat ini masih dapat dipedomani, hingga dikeluarkan ketentuan pedoman penyusunan Standar Kompetensi.

9) Program Penataan Dan Pembinaan Pemerintahan Umum Dan Daerah Bawahan

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Pemerintahan** melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 850.312.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 677.925.350,- atau 79,73%79,73% debgab realisasi fisik 100%. *Outcome* dari program ini adalah Terlaksananya Penataan Dan Pembinaan Pemerintahan Umum Dan Daerah Bawahan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyusunan LPPD Dan Suplemen LPPD (IKK)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 142.595.200,- dan realisasi sebesar Rp. 113.037.177,- atau 79,27% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Tersusunnya laporan kinerja pemerintah daerah.

(2) Kegiatan Rapat Kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Bintan

Kegiatan Rapat Kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp. 93.497.200,- dan realisasi sebesar Rp. 79.957.999,- atau 85,52% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Terbinanya lembaga kecamatan, kelurahan, desa .

(3) Kegiatan Pembinaan Lembaga Kecamatan, Kelurahan/Desa

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 142.814.400,- dan realisasi sebesar Rp. 113.829.894,- atau 79,70% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kecamatan, Kelurahan/Desa.

(4) Kegiatan Evaluasi Penegasan Batas Antar Wilayah Kecamatan

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 94.172.400,- dan realisasi sebesar Rp. 72.875.800,- atau 77,39% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Terlaksananya Evaluasi Penegasan Batas Antar Wilayah Kecamatan.

(5) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Kajian Rencana Pemekaran Kecamatan.

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 141.345.600,- dan realisasi sebesar Rp. 125.407.324,- atau 88,72% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Kajian Rencana Pemekaran Kecamatan.

(6) Kegiatan Revisi Peraturan Daerah Tentang Pilkades

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 43.887.200,- dan realisasi sebesar Rp. 36.958.090,- atau 84,21 % dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Terlaksananya Revisi Peraturan Daerah Tentang Pilkades.

(7) Kegiatan Sosialisasi Penamaan Rupa Bumi

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 192.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 135.859.066,- atau 70,76% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Terlaksananya Sosialisasi Penamaan Rupa Bumi.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Dengan masuknya Kabupaten Bintan dalam peringkat 10 (sepuluh) besar nasional, akan dilakukan Common sense oleh Tim Nasional pada Awal Bulan Januari Tahun 2018
- b) Common Sense dilakukan terhadap LPPD Kabupaten Bintan Tahun 2017 yang disusun pada Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan program inovasi daerah yang telah dibuat dan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bintan

- c) Common sense dilakukan untuk menentukan urutan peringkat secara nasional yang akan diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

(2) Solusi

Dibutuhkan Komitmen bersama antara Kepala Daerah beserta seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Binta, mengingat penilaian yang dilakukan terhadap LPPD merupakan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI selama 1 Tahun Anggaran.

Capaian Indikator Kinerja OPD Tahun 2018 untuk program ini adalah:

- **Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)**

Target LPPD atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk tahun 2015 adalah masuk 10 besar. Untuk tahun 2019 target awal adalah 10 besar, target tersebut diharapkan akan mempertahankan 10 besar.

- **Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Yang Sesuai Dengan Permendagri 84 Tahun 2015**

Untuk tahun 2019 Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa telah dilakukan pembinaan terhadap 36 Badan Perwakilan Desa (BPD) yaitu realisasi capaiannya adalah 100%.

- **Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik**

Tahun 2019 target cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik adalah dari 36 Desa adalah

90% dengan capaian 100% yaitu Kantor Desa yang kondisinya baik 36 Desa.

▪ **Persentase Unit Pelayanan Pemerintahan (Kecamatan/Desa) Yang Memiliki Komputer dan Bisa Mengakses Internet Melalui Komputer**

Untuk Tahun 2019 Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/ Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer dari target 85% dengan capaian 100%

10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Pemerintahan dan Protokol** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 824.154.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 578.888.373,- atau 70,24% dengan realisasi fisik 100%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Kerja Pemerintahan Daerah

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 407.039.600,- dan realisasi sebesar Rp. 252.157.582,- atau 61,95% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini terlaksananya rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi.

(2) Pelaksanaan Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu Daerah

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 417.115.000,- dan realisasi sebesar Rp. 326.730.791,- atau 70,76% dengan realisasi

fisik 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu Daerah

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penerapan Pembayaran Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan maka terdapat perubahan kebijakan terkait pembayaran Honorarium Pegawai Negeri Sipil pada kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Kerja Pemerintahan Daerah;
- b) Dalam rangka inventarisasi dan peremajaan data kerjasama Pemerintah Daerah, masih terdapat beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang masih belum melaporkan dan meregistrasikan setiap bentuk kerjasama daerah yang telah dilaksanakan.

(2) Solusi

- a) Solusi yang diambil adalah dengan melaksanakan pembayaran Honorarium hanya kepada Pegawai Negeri Sipil di luar Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan sebagai Anggota Tim/Kelompok Kerja;
- b) Sebagai gantinya isu-isu aktual dan strategis yang terjadi di Kabupaten Bintan pada saat itu dibahas pada rapat selanjutnya pada Triwulan IV;
- c) Solusi yang diambil adalah dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan setiap OPD yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama daerah.

Capaian Indikator Kinerja OPD Tahun 2018 untuk program ini adalah :

- **Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang telah Distandarisasi**

Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi untuk tahun 2019 dengan target 100 % realisasinya tercapai 100%.

11) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekomian

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Perekonomian** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 649.033.350,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 551.780.887,- atau 85,02% dengan realisasi fisik 100%. *Outcome* dari program ini adalah Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Perekomian.

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Rapat Kerja Bidang Perekonomian

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 91.183.350,- dan realisasi sebesar Rp. 71.658.250,- atau 78,59% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Terwujudnya koordinasi dalam penetapan kebijakan bidang perekonomian.

(2) Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Perhitungan Tingkat Inflasi Kabupaten Bintan.

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 161.174.800,- dan realisasi sebesar Rp. 145.788.756,- atau 90,45% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan ekonomi yang stabil di daerah Kabupaten Bintan.

- a) *Volatile Food* (aneka cabai, sayuran (Bayam, Kangkung, Kacang Panjang) dan Ikan Segar.
- b) *Administrasi Price* (Tarif angkutan udara, tarif listrik dan rokok).

c) Kelompok Inti (Sewa Rumah dan Biaya Sekolah).

(3) Kegiatan Monitoring Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 62.773.600,- dan realisasi sebesar Rp. 55.872.540,- atau 89,01% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan pelaporan melalui tim monitoring dan evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) Kabupaten Bintan.

(4) Monitoring Dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 54.024.800,- dan realisasi sebesar Rp. 49.134.210,- atau 90,95% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini aksananya Monitoring Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(5) Monitoring Dan Evaluasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas LPG Kabupaten Bintan

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 145.876.800,- dan realisasi sebesar Rp. 128.186.484,- atau 87,87% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Terpenuhinya kebutuhan sistem pendistribusian bahan bakar minyak (BBM).

(6) Koordinasi, Implementasi dan Evaluasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintan

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 134.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 101.140.647,- atau 75,48% dengan Realisasi Fisik 100%. Output Kegiatan Ini Terlaksananya Koordinasi, Implementasi dan Evaluasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Kab. Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Untuk Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan Kegiatan ini telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

▪ **Presentasse Nilai Turun Harga Yang Menyebabkan Inflasi**

Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi dari target (4+1) dengan realisasi 3% terdiri dari :

- a) Komoditas penyumbang inflasi volatile food antara lain yaitu aneka cabai, sayuran (bayam, kangkung, kacang panjang) dan ikan segar.
- b) Komoditas penyumbang inflasi administreed price antara lain tarif angkutan udara, tarif listrik dan rokok.
- c) Komoditas penyumbang inflasi kelompok inti antara lain sewa rumah dan biaya sekolah.

12) Program Pembinaan BUMD

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Perekonomian** melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 143.244.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 111.450.620,- yaitu 77,80% dengan realisasi fisik 100%. Outcome dari program ini adalah Tercapainya BUMD Kabupaten Bintan yang berkulaitas.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pembinaan BUMD Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 143.244.800,- dan realisasi sebesar Rp. 111.450.620,- atau 77,80% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Tercapainya BUMD Kabupaten Bintan yang berkulaitas.

b. Permasalahan dan Solusi

Untuk Program Pembinaan BUMD terdapat permasalahan dimana sebagian besar (semua) dana DJPL / Dana Reklamasi Pasca Tambang telah beralih ke qq. Gubernur (Provinsi Kepri). Dan solusinya adalah membuat program – program yang dapat meningkatkan pengelolaan BUMD dengan menjalin kerjasama antar BUMD dan membuka peluang bisnis yang baru. Untuk PT Bintang Inti Sukses masih minim dalam memberikan kontribusi PAD dan solusi yang akan dilaksanakan adalah membuat peluang bisnis dan berkerjasama dengan pihak lain dan telah dilakukan penyeleksian direktur.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

▪ **Jumlah BUMD yang beroperasi**

Untuk jumlah BUMD yang beroperasi pada tahun 2019 ada 2 BUMD yang masih beroperasi yaitu dengan capaian 100% adalah :

- a) PT. Bintang Inti Sukses
- b) PD. BPR BINTAN

▪ **Kontribusi BUMD terhadap PAD**

Kontribusi BUMD terhadap PAD 2019 dari target awal adalah 2,87 M terealisasi sebesar 3,106 M untuk PD BPR Bintang sedangkan PT. BIA sebesar 501 Juta dengan total 3,607 M yakni melebihi 100% dari yang ditargetkan. Adapun kontribusi BUMD terhadap Pemerintah Kabupaten Bintang adalah bagi hasil dari pada BUMD PD. BPR Bintang.

13) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang pada Bagian Pembangunan** melalui 6 (enam) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.369.510.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.113.258.429,- atau 81,29%

dengan realisasi fisik 100%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Dukungan Lembaga Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 430.574.000,- dan realisasi sebesar Rp. 384.631.671,- atau 89,33% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

(2) Pengelolaan dan Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bintan

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 143.712.400,- dan realisasi sebesar Rp. 122.045.950,- atau 84,92% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Tersedianya data pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bintan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dukungan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Sumber Pendanaan APBN

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 235.290.000,- dan realisasi sebesar Rp. 166.101.365,- atau 70,59% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Meningkatnya penyerapan anggaran sumber pendanaan APBN di Kabupaten Bintan.

(4) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 207.602.400,- dan realisasi sebesar Rp. 142.017.050,- atau 68,41% dengan realisasi fisik 100%.

Output kegiatan ini Meningkatnya Kapasitas Sdm Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Dukungan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bintan

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 168.671.000,- dan realisasi sebesar Rp. 140.601.485,- atau 83,36% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Meningkatnya penyerapan anggaran APBD di kabupaten Bintan

(6) Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah

Kegiatan tersebut dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 183.660.400,- dan realisasi sebesar Rp. 157.860.908,- atau 85,95% dengan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2018 untuk program ini adalah :

▪ **Tingkat Akurasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)**

Pada dasarnya 39 SKPD yang ada di Kabupaten Bintan Telah menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan telah mengumumkan rencana umum pengadaan Tahun Anggaran 2019 dengan tingkat akurasi berdasarkan DPA SKPD Tahun Anggaran 2019 menurut ketentuan yang telah diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan capaiannya 39 SKPD yaitu 100%, namun masih ditemukan adanya ketidak sesuaian metode pengadaan dengan ketentuan pengadaan

yang berlaku dan masih adanya kesalahan pemilihan metode antara pemilihan langsung, pengadaan langsung maupun pelelangan sederhana oleh beberapa OPD.

▪ **Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN**

Berdasarkan target indikator Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN sebesar 80,58%, telah terealisasi capaian untuk Tahun 2019 sebesar 92,37%.

Secara keseluruhan maka Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK dan APBN telah melebihi target yang ditetapkan mengalami peningkatan kinerja dari capaian Tahun Anggaran 2018 dengan capaian 91,01% yang mengalami peningkatan sebesar 1,36%. Namun ada beberapa hal yang disebabkan tidak dapat terealisasinya penyerapan anggaran DAK Reguler pada dinas Perikanan dan DAK Penugasan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang disebabkan gagalnya dalam pelaksanaan pelelangan.

▪ **Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Difasilitasi Melalui ULP**

Tahun 2019 Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi melalui Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang Jasa mencapai 100%, yang dilakukan secara elektronik pada Web lpse.bintankab.go.id/eproc4/ 100% dengan metode Tender, Non Tender, Pencatatan Non Tender maupun Pencatatan Swakelola. Namun terdapat 7 Paket APBDP mengalami gagal lelang karena tidak ada penawaran.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah dengan pelaksanaan sehingga sering dilakukan revisi RUP terhadap RUP yang telah di umumkan.
- b) Terdapat 6 Paket Pengadaan APBDP tahun 2019 yang mengalami gagal lelang karena tidak ada penawaran dan Proses lelang ulang tidak dapat dilakukan karena sudah tidak mencukupi waktu pelaksanaan.
- c) Keterbatasan Personil pada Sub Bagian LPSE menghambat pengelolaan LPSE dalam memenuhi 17 standarisasi yang sudah di tetapkan LKPP.
- d) Keterbatasan Personil Pengelola Pengadaan Barang Jasa sesuai indek kebutuhan yang dihitung berdasarkan pengelolaan Anggaran yaitu 12 orang personil dimana saat ini personil Pengelola Pengadaan Barang Jasa yang tersedia hanya berjumlah 9 orang, ini juga menghambat terhadap pelaksanaan Pengelola Pengadaan Barang Jasa baik ketepatan waktu maupun ketelitian.
- e) Masih kurangnya pengetahuan teknis dalam melaksanakan proses Tender sehingga menghambat proses pengevaluasian Pengadaan Barang Jasa.
- f) Masih minimnya kesadaran ASN untuk meningkatkan kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa serta pentingnya pengelola pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya jenjang jabatan struktural dengan level manajerial tingkat 3 tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa tingkat dasar. Sehingga

banyak Pejabat Struktural lainnya yang rangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

(2) Solusi

- a) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam hal penayangan data pengadaan barang/ jasa berdasarkan DPA Organisasi Perangkat Daerah secara menyeluruh 100% dan tepat waktu pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) agar masyarakat/ penyedia dapat mengakses paket-paket pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- b) Perlu pengawasan intensif ditahun anggaran berikutnya terkait realisasi penyerapan sesuai ketentuan dengan mempercepat proses perencanaan pembangunan fisik dan optimalisasi system kontrak pekerjaan fisik yang mengacu pada ketentuan penyaluran DAK sehingga tidak ditemukan kontrak kegiatan yang baru ditandatangani pada semester kedua Tahun Berjalan.
- c) Membuat Usulan Penambahan Personil Baik Sub Bagian LPSE maupun Pengelola Pengadaan Barang Jasa sesuai kebutuhan.
- d) Mengikutsertakan Personil LPSE dan Pengelola Pengadaan Barang Jasa dalam Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek terkait teknis dalam meningkatkan kapasitas SDM.
- e) Perlunya peningkatan komitmen pengelola pengadaan yang intens terkait proses pengadaan serta kemauan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan dikarenakan semakin ke depan aturan pengadaan mengalami perubahan menuju ekosistem pengadaan yang kredibel, akuntabel, transparan dan bebas dari praktek korupsi.

14) Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Kesejahteraan** Rakyat melalui 11 (sebelas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.315.268.100,-** dan realisasi anggaran sebesar **Rp. 14.560.019.370,-** atau 89,24% dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Pengetahuan Keagamaan

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran **Rp. 142.786.500,-** dan realisasi sebesar **Rp. 138.499.000,-** atau 97,00%. dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Hubungan Silaturahmi dan Pembinaan Kerohanian Masyarakat Kabupaten Bintan di 9 Kecamatan.

(2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Haji Masyarakat Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran **Rp. 347.220.200,-** dan realisasi sebesar **Rp. 326.918.999,-** atau 94,15% dengan realisasi fisik sebesar 100%.. *Output* dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan Kualitas Ibadah Haji di Kabupaten Bintan dengan hasil dapat merwujudnya Kualitas Haji Mabrur bagi Masyarakat di Kabupaten Bintan.

(3) Pembinaan Kepada Guru Ngaji, Mubaliq, Imam Dan Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu kifayah Se Kab. Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran **Rp. 9.213.303.600,-** dan realisasi sebesar **Rp. 8.170.396.415,-** atau 88,68% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Pembinaan Kualitas Imam, Penjaga Mesjid, Fardhu

Kifayah, Mubaligh/Mubaligah dan Guru Ngaji dengan *output* Terwujudnya Peningkatan Kualitas Imam, Penjaga Masjid, Fardhu Kifayah, Mubaligh/Mubaligah, Guru Ngaji dan Pengelola TPU di Kabupaten Bintan

(4) Pendayagunaan Da'i Pedesaan di Kab. Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 786.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 781.278.000,- atau 99,32% dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* Terwujudnya Pemahaman Keagamaan melalui Pendayagunaan Da'i Pedesaan di Kabupaten Bintan, untuk membina dan meningkatnya pengetahuan keagamaan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dan pulau-pulau di Kabupaten Bintan. Jumlah Da'i / Daiyah (38 Orang) tersebar di (13 Desa/2 Kelurahan Se-Kabupaten Bintan), terdiri dari:

1. Desa Batu Lepuk
2. Desa Pulau Pinang
3. Pulau Mentebung
4. Mantang Baru
5. Desa Numbing
6. Desa Mapur
7. Desa Air Glubi
8. Desa Kelong
9. Desa Pengujan
10. Desa Tembeling
11. Desa Bintan Buyu
12. Desa Berakit
13. Desa Pulau Pinang
14. Kelurahan Toapaya Asri
15. Kelurahan Tembeling

(5) Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.611.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 460.646.200 atau 36,9% dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* Terwujudnya Qori/qoriah terbaik di Kab. Bintan. Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Kab.Bintan Tahun 2019, Kabupaten Bintan selaku Tuan Rumah dalam Pelaksanaan Seleksi Tilawati Qur'an dan Hadist (STQH) VIII Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Sehubungan hal dimaksud dikarenakan jadwal berdekatan maka Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Kab.Bintan Tahun 2019 pelaksanaan diadakan sekala mini untuk mempersiapkan/ mengirim peserta kafilah setiap cabang diperlombakan pada tingkat provinsi dalam mensukseskan Pelaksanaan Seleksi Tilwatil Qur'an Dan Hadist (STQH) VIII Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, Kabupaten Bintan (Selaku Tuan Rumah).

(6) Pelaksanaan Temu Karya Kelompok Pengajian Se Kab. Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.026.000,- dan realisasi sebesar Rp. 481.235.750,- atau 97,61% dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* Terwujudnya hubungan silaturahmi dan pembinaan kerohanian masyarakat Kab. Bintan.

(7) Peningkatan Mutu Pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Madani Unggulan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 759.188.000,- dan realisasi sebesar Rp. 680.553.375,- atau 89,64% dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* untuk Terwujudnya Santri yang berkualitas di Kabupaten Bintan.

(8) Pembinaan Pusat Hafal Al Qur'an

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.611.362.600,- dan realisasi sebesar Rp. 3.050.220.931,- atau 84,46% dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* Terwujudnya Qori dan Hafiz terbaik di Kab. Bintan.

(9) Peningkatan Mutu Manajemen Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 83.482.500,- atau 85,23% dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* Terwujudnya Kepengurusan Badan/Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan Bantuan Hibah sebanyak 40 orang.

(10) Pelaksanaan Pembinaan Harmonisasi Umat Beragama (Kristen, Budha, Hindu)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.135.000,- dan realisasi sebesar Rp. 197.540.200,- atau 97,25% dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* Terwujudnya Kualitas Peserta Persatuan Umat Kristiani dan Budha Kabupaten Bintan.

(11) Pelaksanaan Tabligh Akbar Masyarakat Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 189.248.000,- atau 94,62% dengan realisasi fisik sebesar 100%. *Output* Terwujudnya Hubungan Silaturahmi dan Pembinaan Kerohanian Masyarakat Kab.Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Data mengenai Guru Ngaji, Mubaliq, Imam Dan Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah tidak dapat diukur dan belum valid.
- b) Data calon penerima dana hibah dan bansos harus sudah terdaftar dalam database pada Bagian Kesra.

(2) Solusi

- a) Memverifikasi kembali terhadap data jamaah haji yang masuk agar nama- nama petugas yang ada diteliti kembali sehingga dapat dilakukan perbaikan dan koordinasi lebih ditingkatkan.
- b) Masalah penanganan haji tersebut perlu menjadi catatan bagi panitia pelaksana kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan ibadah haji dengan dibekali pengetahuan social budaya serta aturan-aturan yang berlaku di tanah suci. Sehingga hal-hal buruk yang terjadi dapat dihindari.
- c) Perlu dibentuk kembali Kelompok Kerja untuk kegiatan Da'i.
- d) Diperlukan sistem khusus atau aplikasi dalam mendata penerima Hibah dan Bansos.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

▪ Rasio Tempat Ibadah Per 10.000 Penduduk

Tahun 2019 jumlah penduduk Bintang mencapai 158.512 orang dengan jumlah tempat ibadah 445 buah, Target tahun 2019 rasio tempat ibadah 29,50% dengan capainnya adalah 28,07%.

Tabel 3.83 Rasio Penduduk dan Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Agama	%
1.	Mesjid	178	Islam	40,00%
2.	Mushalla	202	Islam	45,39%
3.	Gereja Katolik	23	Kristen	5,17%
4.	Gereja Protestan	11	Kristen	2,47%
5.	Kapel	1	Kristen	0,22%
6.	Pura	1	Hindu	0,22%
7.	Vihara	13	Budha	2,92%
8.	Cetya	3	Budha	0,67%
9.	Klenteng	12	Khonghuchu	2,70%
	Jumlah	445		100%

▪ **Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan Pengetahuan Keagamaan**

Untuk target Tahun 2019 jumlah yang mengikuti pelatihan keagamaan adalah 10.900 orang, Realisasi capaian Tahun 2018 sebesar 6.941 Orang sedangkan jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan tahun 2019 adalah mengalami penambahan sebanyak 1.200 orang dengan jumlah keseluruhan sebesar 8.141 orang yaitu 74,69%.

▪ **Presentase Pelayanan Masyarakat Miskin**

Pada Tahun 2019 Presentase Pelayanan Masyarakat Miskin yaitu untuk bantuan sosial masyarakat sudah mencapai 100%.

15) Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Perbatasan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 306.758.800,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp. 292.047.065,- atau 95,20% dengan realisasi fisik 100%. Outcome dari program ini adalah Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Monitoring Evaluasi Wilayah Perbatasan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp. 112.814.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.866.407 Yaitu 91,18% dan realisasi fisik 100% . Output kegiatan ini Terwujudnya monitoring dan evaluasi wilayah perbatasan.

(2) Inventarisasi Potensi Pulau-Pulau Di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp. 193.944.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 189.180.658.- yaitu 99.05% dan realisasi fisik 100%. Output kegiatan ini Tercapainya inventarisasi pulau-pulau di kecamatan perbatasan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

- **Jumlah Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan yang mendapatkan alokasi pembangunan sebanyak 5 Lokasi Prioritas**

Untuk target jumlah Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan yang mendapatkan alokasi pembangunan Tahun 2019 adalah 5 Lokasi Prioritas. Dari target yang diberikan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2019 keseluruhan Kecamatan di lokasi perbatasan telah

mendapatkan prioritas pembangunan dengan capainnya yaitu 100% adalah : (1) Kecamatan Tambelan, (2) Kecamatan Gunung Kijang, (3) Kecamatan Bintang Pesisir, (4) Kecamatan Bintang Utara, (5) Kecamatan Teluk Sebong.

16) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintang pada Bagian Perbatasan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 314.616.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.790.000 Yaitu 94,97%%. dengan realisasi fisik 100%. Outcome dari program ini adalah Meningkatnya Pengembangan Wilayah Perbatasan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Dukungan Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp223.176.400 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 215.273.205 atau 51,95% dan realisasi fisik 100%. dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan pengembangan wilayah perbatasan.

(2) Penyusunan Profil Identifikasi Infrastruktur Pemerintahan Wilayah Perbatasan Kab. Bintang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 91.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.516.795 atau 91,34% dan realisasi fisik 100%. dengan output kegiatan ini adalah Tersusunnya Profil Identifikasi Infrastruktur Pemerintahan Wilayah Perbatasan Kab. Bintang

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Masih adanya permasalahan lahan yang menjadi kendala untuk pembangunan usulan renaksi di

lokpri perbatasan.

- b) Belum maksimalnya program dan anggaran pengelolaan perbatasan yang mengalokasikan anggarannya di lokpri perbatasan.
- c) Lemahnya fungsi koordinasi pengelolaan perbatasan seiring di margernya status badan pengelolaan perbatasan daerah.

(2) Solusi

- a) Diperlukan Koordinasi secara aktif dan cepat dalam mengalokasikan program anggaran secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah lokpri perbatasan
- b) Perlunya pendampingan dan komitmen dari Pemerintah daerah untuk secara aktif dan cepat mengusulkan program anggaran pengelolaan perbatasan ke K/L sesuai dengan ketentuan berlaku
- c) Diperlukan penguatan kelembagaan di wilayah perbatasan daerah.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah :

▪ Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan

Untuk Target Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan tahun 2019 adalah 3 unit, dengan realisasi melebihi 100% antara lain:

- a) Pembangunan Baru Puskesmas Tg. Uban Kec. Bintan Utara
- b) Peningkatan Kualitas Rumah swadaya Kelurahan Kawal
- c) Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Malang Rapat, Desa Kelong, Desa Komunal
- d) Pembangunan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kel. Tg. Uban Kota

- e) Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Desa Kelong, Sebong Pereh, Desa Kuala Simpang
- f) Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP 25 Bintan, SMP 27 SATAP Desa Gunung kijing, SMP 28 Bintan
- g) Pembangunan Baru Rumah swadaya Desa Pegudang.
- h) Pembangunan IPA Kapasitas 1,5 liter / detik SPAM Desa Pulau Mentebung, Desa Air Glubi Desa Numbing
- i) Peningkatan Kapasitas SPAM/Uprating IPA SPAM Desa Mapur
- j) Pembangunan Jalan Haji Umar RT. 004 RW. 005 Tg. Kapur Keluarahan Kawal.
- k) Peningkatan Jalan Non Status Jalan Haji Amran RT 005 RW 03 desa Berakit.

18) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan pada Bagian Protokol melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 791.154.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 692.277.648,- atau 87,50% dengan realisasi fisik 100%. Outcome dari program ini adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik Dan Keprotokolan.

a. Pelaksanaan Program

1) Pelaksanaan Penataan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 406.754.800,- dan realisasi sebesar Rp. 359.759.721,- atau 88,45% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan tersebut Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan.

2) Pelaksanaan Keprotokolan Kepala/Pejabat Daerah Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 384.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 332.517.927,- atau 86,50% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output kegiatan tersebut Meningkatnya kapasitas SDM dalam pelaksanaan keprotokolan kepala/pejabat daerah

b. Permasalahan dan Solusi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan tidak ada permasalahan.

▪ Persentase Acara Kedinasan Yang Sesuai Dengan Standard

Persentase acara kedinasan yang sesuai dengan standard dari target 100% telah dapat direalisasikan capaiannya 100%.

▪ Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan Yang Sesuai Dengan Standard

Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standard target 100% telah dapat direalisasikan capaiannya 100%.

3.1.4.1.2 Sekretariat Dprd Kabupaten Bintan

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu, Kedua, Ketiga dan Kelima** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah sebagai berikut :

▪ Persentase disahkannya RANPERDA menjadi PERDA sebagai payung hukum pemerintah daerah

Persentase disahkannya Ranperda menjadi Perda sebagai Payung hukum pemerintah Daerah pada tahun 2019 adalah 100%. Dimana dari 10 Perda yang ditargetkan,

terrealisasi 10 Perda yang disahkan. Hal ini menunjukkan sudah mencapai target 2019 sebesar 100%.

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.2.710.076.000 dengan nilai realisasi keuangan sebesar Rp.2.411.491.943 atau sekitar 88,98%. Dalam kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya peraturan daerah Kabupaten Bintan pada tahun 2019. Perencanaan awal sebanyak 10 perda yang ditargetkan, selama 2019 ada 10 perda yang dapat disahkan atau 100% tercapai targetnya.

Adapun perda yang telah disahkan di tahun 2019 adalah tentang :

- a) Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Beberapa Perda Kabupaten Bintan.
- b) Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Kabupaten Bintan.
- c) Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031.
- d) Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- e) Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi.

- f) Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
- g) Perda Nomor 7 Tahun 2019 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
- h) Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.
- i) Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemekaran Kelurahan Kijang Kota Pada Kecamatan Bintan Timur.
- j) Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019 (P-APBD Tahun Anggaran 2019).

(2) Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna

Pengalokasian dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.88.200.000 dan realisasinya sebesar Rp.87.934.000 atau kurang lebih mendekati 100% terlaksana keuangannya. Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan *output* yaitu disahkannya keputusan dewan melalui paripurna.

(3) Kegiatan Reses

Output atau hasil dari kegiatan ini berupa teresapnya aspirasi masyarakat sesuai dengan daerah pilihan. Masing-masing anggota DPRD melakukan reses ke daerah pilihannya untuk menjaring aspirasi dari masyarakat secara langsung. Dalam tahun 2019, kegiatan reses ditargetkan dapat dilakukan sebanyak 2 kali. Dan realisasinya selama tahun 2019 sebanyak 2 kali. ini menandakan terlaksananya kegiatan fisik sebesar 100%. Dengan anggaran yang direncanakan awal sebesar Rp.2.018.902.000 terealisasi sebesar Rp.1.913.972.267 atau sekitar 94,8% terlaksanan keuangannya.

(4) Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Kegiatan ini menghasilkan *output* yaitu meningkatnya kemampuan dan wawasan pimpinan dan anggota DPRD. Kegiatan yang dianggarkan Rp.652.820.000 ini hanya dapat terealisasi keuangannya sebesar Rp.367.625.745 atau sekitar 56,31%. Dengan rencana kegiatan sebanyak 2 kali, dan terealisasi 1 kali kegiatan. Artinya realisasi fisiknya hanya mencapai 57,66%. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2019 yaitu orientasi Anggota DPRD.

(5) Kegiatan penyebarluaskan informasi kegiatan DPRD

Diharapkan dari kegiatan ini dapat tersedianya informasi/ dokumentasi tentang kegiatan Dewan kepada masyarakat. Dari segi penganggarnya, dana yang disiapkan Rp.1.135.058.200, terealisasi sebesar Rp.1.108.914.049 atau 97,7%.

(6) Kegiatan evaluasi pelaksanaan APBD dan Musrenbang/ Inspeksi Mendadak

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.1.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.997.300.679 atau persentase sebesar 99,73%. *Output* dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pengetahuan perencanaan dan pengawasan APBD.

(7) Kegiatan Konsultasi dalam Rangka Pengawasan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.7.251.580.000 dan terealisasi sebesar Rp.6.605.875.333 atau sekitar 91,1% terlaksana keuangannya, dan 100% terlaksanan fisiknya. Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa tersedianya laporan pengawasan. Dimana dalam pelaksanaannya yaitu perjalanan keluar daerah dalam rangka konsultasi dan studi banding.

- **Persentase Calon Kepala Daerah yang Menyampaikan Visi dan Misinya serta Jumlah Wakil Rakyat Terpilih dan Dilantik**

Persentase Calon Kepala Daerah yang menyampaikan Visi dan Misinya masih 0% dikarenakan kegiatan ini baru terlaksanakan pada tahun anggaran 2020. Sedangkan Jumlah Wakil Rakyat Terpilih dan Dilantik pada tahun 2019 yaitu 100% dari target sebanyak 25 orang Anggota DPRD terpilih.

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Letak geografis Bintang yang terdiri dari ratusan pulau-pulau yang sulit untuk dicapai dan sulit untuk menerapkan perda yang ada didalam kehidupan masyarakat setempat.
- b) Penerapan Peraturan Daerah tersebut terkadang memberatkan masyarakat sehingga penerapan Perda ini berjalan tidak efektif dan hasil yang diharapkan tidak maksimal.
- c) Ranperda yang ada didalam Prolegda kadang belum siap rancangannya untuk diserahkan kepada DPRD walaupun telah ditetapkan Prolegda ini berdasarkan skala prioritas skala waktu yang dibagi tiap per Triwulan.
- d) Kendala yang sering dihadapi yaitu terlambatnya penyerahan Rancangan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- e) Adanya Perubahan Peraturan Perundang Undangan sehingga mempengaruhi terhadap waktu dan pembahasan serta pengesahannya menjadi lebih cepat ataupun menjadi lebih lambat karena harus

menyesuaikan dengan aturan-aturan terbaru dari pusat.

- f) Evaluasi Gubernur terhadap Perda Perda yang memakan waktu
- g) Terlambatnya Proses Penyerahan oleh Kepala Daerah maupun untuk proses Pembahasan KUA PPAS di tingkat eksekutif dan legislatif yang pada akhirnya akan menyebabkan terlambatnya proses penyusunan APBD
- h) Terlambatnya Proses Penyusunan APBD menyebabkan Terlambatnya Penyampaian APBD oleh Kepala Daerah yang pada akhirnya menyebabkan terlambatnya proses penetapan dan pengesahan Ranperda menjadi Peraturan Daerah.
- i) Keterlambatan Masuknya LKPJ Kepala Daerah yang masuk ke DPRD serta lambat proses pemeriksaan oleh BPK sehingga kita terlambat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD tahun yang baru saja berlalu untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(2) Solusi

- a) Ranperda yang sudah menjadi Perda sebaiknya cepat disosialisasikan ke masyarakat terutama masyarakat-masyarakat yang ada didaerah pesisir dan yang berada dipulau-pulau.
- b) Hendaknya Perda yang ada pasal-pasal yang mengatur didalamnya haruslah menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat yang ada.
- c) Dinas yang Ranperda nya masuk di dalam Prolegda hendaknya diawal tahun anggaran telah menyiapkan draft rancangan peraturan daerahnya sehingga tidak terjadi keterlambatan pembahasan ranperda dan

pembahasan ranperda ini berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan waktu dan skala prioritasnya di dalam Prolegda.

- d) Sehingga semua ranperda yang telah siap dapat segera diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sesuai agenda yang telah ditetapkan.
- e) Hendaknya kita di daerah dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap segala perubahan aturan perundang undangan dari pusat dan aturan baru tersebut dapat kita tuangkan didalam ranperda kita sebagai pedoman dasar peraturan daerah.
- f) Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara kabupaten kota dengan pihak provinsi terhadap proses evaluasi Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD agar tidak memakan waktu yg terlalu lama supaya penerapan perda untuk hajat hidup orang ramai dapat segera direalisasikan seperti Perda APBD Perubahan maupun untuk Perda APBD Murni. Karena sekarang adanya Audit pihak BPK maupun pihak Inspektorat terhadap mekanisme alur pembahasan APBD mulai dari Penyampaian KUA PPAS Perubahan dan Penyampaian KUA PPAS Murni
- g) Sampai dengan Masuk dan Penyampiannya oleh Kepala Daerah, Pembahasan hingga Penetapan APBD Perubahan dan APBD Murni hingga proses evaluasi akan keliatan tahapan tahapannya apabila berjalan lambat atau tidak sesuai dengan waktu dan mekanime yang ada akan dapat diketahui secara nyata oleh Badan Pemeriksa. Untuk itu pihak Pemerintah Daerah, Legislatif dan Eksekutif harus cerdas dalam menyikapi waktu dan tahapan tahapan dan

mekanisme Alur untuk sebuah ranperda APBD maupun ranperda ranperda yang lainnya.

- h) Sebagaimana dalam aturan yang ada Kepala Daerah telah menyelesaikan dan harus mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBD paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, jadi LKPJ dilaksanakan tepat waktu dan tidak terjadinya keterlambatan.
- i) Begitu juga dengan Pemeriksaan oleh BPK disetiap awal tahun anggaran agar dapat dilaksanakan tepat waktu agar berdasarkan LHP yang ada dapatlah disusun Rancangan Peraturan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD dapat segera disampaikan kepada DPRD oleh kepala Daerah dan dapat disyahkan sesuai agenda untuk ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah.

3.1.4.1.3 Kecamatan Tambelan

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan diwilayah kecamatan. Outcome program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp. 37,592,400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36,942,000,- atau **98,20%**. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Outcome program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.578.085.400,- realisasi sebesar Rp.560.248.390,- atau 96.91%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 294.651.200,- dan realisasi sebesar Rp.294.022.200,- atau 99.78%. Secara umum, hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui Kegiatan Upacara Hari Besar Nasional salah satunya seperti upacara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 dimana kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Bola Kaki Kecamatan Tambelan Desa Batu Lepuk. Selain itu juga dilaksanakannya lomba gerak jalan memperingati HUT Kemerdekaan RI dan Lomba rakyat seperti lomba Sampan Kayuh dan perlombaan Tarik Tambang.

(2) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.63.284.200,-. dan realisasi sebesar Rp.50.964.500,- atau 80.53%. Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan ini merupakan capaian untuk meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan : (1) Mengikuti Jambore PKK

tingkat Kabupaten, (2) Melaksanakan Lomba Masak se-Kecamatan Tambelan, (3) Mengikuti Lomba Masak Gemar Ikan tingkat Kabupaten, (4) Mengikuti Lomba Masak B2SA tingkat Kabupaten, (5) Mengikuti Bazar Kabupaten Bintan, (6) Melaksanakan Kegiatan peningkatan keterampilan Fardu Kifayah, (7) Melaksanakan Kegiatan peningkatan keterampilan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah berkerjasama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan, (8) Disamping kegiatan tersebut PKK kecamatan mempunyai kegiatan rutin diantaranya, (9) Pembinaan Majelis Taklim Desa/Kelurahan, (10) Pembinaan Dasawisma Desa/Kelurahan, (11) Kunjungan ke Posyandu Desa/Kelurahan, (12) Pemantapan Toga Desa/Kelurahan, (13) Pengembangan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif melalui PAUD Desa/Kelurahan.

(3) Peningkatan Pengetahuan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.113.570.000,- dan realisasi sebesar Rp.108.766.440,- atau 95.77%. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya Pengetahuan Keagamaan diantaranya Pengiriman peserta Seleksi Tilawaatil Qur'an (STQ) di tingkat Kabupaten tepatnya di Kecamatan Bintan Timur, dimana pada saat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Tingkat Kabupaten Bintan tersebut. Peringatan hari-hari besar islam seperti Isra' mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, Perayaan Hari Raya Idul fitri dan Idul Adha. Di samping itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda maka diadakan suatu kegiatan Festival Anak Sholeh se-Kecamatan Tambelan.

(4) Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.106.580.000,- dan realisasi sebesar Rp.106.495.250,- atau 99,92%. Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pembinaan olahraga dan seni di Kecamatan. Dengan bentuk Pembinaan Olahraga dan Seni Kecamatan yaitu pertandingan bola voli di tingkat kecamatan, pertandingan sepakbola tingkat kecamatan, pertandingan sepak takraw tingkat kecamatan, pertandingan seni tarik suara tingkat kecamatan.

3) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.505.515.400,- dan realisasi Rp.503.899.800,- atau 99,68% melalui kegiatan Pembinaan Kapasitas Kelurahan Teluk Sekuni dan Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Operasional Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.13.120.000,- dan yang terealisasi Rp.12.948.500,- atau sekitar 98,69%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelayanan UPT Kecamatan Tambelan

(2) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Teluk Sekuni

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelan dengan alokasi anggaran Rp.467.492.600,- dan realisasi sebesar Rp.466.099.500,- atau 99,70%. Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Teluk Sekuni melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Teluk Sekuni.

(3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.902.800 dengan realisasi sebesar Rp.24.851.800,- atau 99,79%.Outputnya adalah Terlaksananya Fasilitas Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk **Kecamatan Tambelan** adalah :

- a) Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrembang Desa Dan Kecamatan telah mencapai 100%.
- b) Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan sebanyak 18 Kegiatan.
- c) Tingkat Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan dan Kelurahan mencapai 85%.

4) Permasalahan dan Solusi

Adapun di dalam pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan Tambelan juga mengalami beberapa hambatan diantaranya yaitu masalah jarak antar Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tambelan yang berjauhan serta terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan setiap desa dan kelurahan dengan ibukota Kecamatan menyebabkan tingkat partisipasi dari masyarakat menjadi kurang maksimal. Minimnya akses transportasi yang ada menyebabkan masyarakat yang berada di luar Pulau Tambelan, seperti di Desa Mentebung, Desa Pulau Pinang dan Desa Pengikik sulit untuk selalu mengikuti kegiatan yang di selenggarakan.

3.1.4.1.4 Kecamatan Bintan Pesisir

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program perencanaan pembangunan merupakan program yang dianggarkan dengan tujuan untuk memberi wadah bagi masyarakat dalam memberikan sumbangsih dan pemikiran untuk pembangunan diwilayah desanya melalui pelaksanaan

Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi APBDes. Untuk Tahun Anggaran 2019, pencapaian program ini adalah sebesar 100%. Diharapkan penyerapan anggaran yang maksimal ini dapat diiringi dengan maksimalnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan. Pagu pada program ini di Tahun 2019 sebesar Rp. 76,572,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75,563,300,- atau bekisar 98,68%. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan / kecamatan.

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari Anggota DPRD Kabupaten Dapil setempat, perwakilan OPD, perangkat Desa, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp.41,190,000,- realisasi sebesar Rp.40,913,300 ,- atau 99,33%.

(2) Kegiatan Penyusunan dan Verifikasi APBDes

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya namun baru mendapat alokasi tersendiri baik secara Kegiatan ataupun ketersediaan Anggaran. Kecamatan Bintang Pesisir yang keseluruhan wilayah kerjanya merupakan Desa, menjadi tantangan tersendiri bagi Tim Pengawasan Dana Desa. *Output* dari kegiatan ini ialah meningkatnya pembangunan serta kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2019 kegiatan Pembinaan dan Verifikasi APBDes mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 28,410,000,- dan terealisasi secara

penuh 100% atau senilai yang sama yakni Rp. 28,410,000,-.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program pembinaan masyarakat kecamatan adalah program yang dianggarkan dengan tujuan untuk mengakomodir kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat baik dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, olah raga dan seni, organisasi wanita serta penilaian lomba desa terbaik se Kecamatan. Program pembinaan masyarakat kecamatan merupakan salah satu program yang menunjang program pada RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021. Untuk Tahun Anggaran 2019, pencapaian program ini adalah sebesar 99,60 % keuangan dan 100% fisik. Diharapkan penyerapan anggaran yang maksimal ini dapat diiringi dengan meningkatnya kualitas masyarakat di Kecamatan Bintan Pesisir dalam berbagai bidang. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp.534,942,000,- realisasi sebesar Rp.532,842,000 ,- atau 99,60%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.157,393,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.156,762,000,- atau 99,60%. *Output* terbinanya aparatur Desa termasuk RT dan RW yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir. Kegiatan lain yang termasuk ke dalam kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan adalah Pembinaan Siskamling, Pembinaan Kamtibmas (Anggota Linmas), pelatihan Intelijensi bagi masyarakat dan Kegiatan monitoring pelaksanaan Perda di Daerah Kecamatan

Bintan Pesisir serta peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan.

(2) Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.207,609,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.206,928,000,- atau 99.67%. *Output* terbinanya Qori dan Qoriah Kecamatan Bintan Pesisir melalui terlaksananya STQ/MTQ mulai tingkat Desa hingga Tingkat Kabupaten. Selain pelaksanaan STQ/MTQ, kegiatan pembinaan Kegiatan Keagamaan juga terlaksana melalui kegiatan pembinaan Majelis Taqlim, pembinaan guruOguru ngaji TPA(Q), pembinaan Fardhu Kifayah, Peringatan hari besar Islam dan beberapa kegiatan Kegamaan lainnya.

(3) Pembinaan Kegiatan Olahraga Dan Seni

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67,870,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.67,253,000,- 99,10%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Sanggar Seni, LASQI, Atlet dan Tim Olah Raga kepada 1 sanggar/ 1 tim LASQI/1 Tim Olah Raga.

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73,660,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 73,489,000 atau 99.77%. *Output* dari kegiatan ini adalah pemberdayaan Kelompok Wanita seperti TP PKK Desa/Kecamatan, KUBE dan organisasi wanita lainnya (Dasa Wisma).

(5) Lomba Desa/Kelurahan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya namun baru mendapat alokasi tersendiri baik secara Kegiatan ataupun Anggaran. Untuk Kecamatan Bintan Pesisir di Tahun 2019 yang menjadi Desa terbaik

secara pengelolaan anggaran dan pengendalian manajemen aparatur ialah Desa Numbing. *Output* dari kegiatan ini ialah terwujudnya tata pemerintahan Desa yang professional dalam hal penganggaran dan manajemen aparatur. Tahun 2019 kegiatan Lomba Desa/Kelurahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 28,410,000,- dan terealisasi secara penuh 100% atau senilai yang sama yakni Rp. 28,410,000,-.

3) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dan Kelurahan

Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan kelurahan merupakan program yang mengakomodir kegiatan peningkatan pelayanan unit pelayanan terpadu. Focus kegiatan ini adalah pelayanan kepada masyarakat melalui PATEN. Untuk tahun anggaran 2019, realisasi kegiatan ini dapat dikatakan 100%. Pada program ini terdapat tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu peningkatan pelayanan UPT Kecamatan, penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan. Ketiganya berjalan seimbang yang dibuktikan dengan pencapaian 87% tingkat kepuasan masyarakat yang terlaksana melalui Survey Kepuasan Masyarakat. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan. Program ini dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp.72,580,000,- realisasi sebesar Rp.72,230,000 ,- atau 99,51%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu

Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Kecamatan Bintang Pesisir Menganggarkan Dana

Sebesar Rp.18,320,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18,220,000,- atau 99,45%

(2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat

Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 37,020,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36,770,000,- atau 99,32%. output dari kegiatan ini adalah tolak ukur peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Camat Bintan Pesisir.

(3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan

Penyusunan profil Kecamatan Bintan Pesisir merupakan suatu informasi penting bagi seluruh pihak yang membutuhkan informasi terkait Kecamatan Bintan Pesisir. Di dalam profil tersebut memuat data tentang jumlah penduduk, data pendidikan, data Rumah Tangga Miskin dan lain sebagainya. Tahun 2019 alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17,240,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17,240,000,- atau 100%.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk **Kecamatan Bintan Pesisir** adalah :

- a) Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrembang Desa Dan Kecamatan telah mencapai 100%.
- b) Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan 16 Kegiatan.
- c) Tingkat Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan dan Kelurahan 87%.

4) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- a) Pada sisi perencanaan pembangunan, masyarakat cenderung mengajukan usulan pembangunan pada pembangunan fisik, jarang sekali yang mengajukan

kegiatan yang bersifat pengembangan keterampilan sumber daya manusia,

- b) Dari sisi kependudukan dan pencatatan sipil, kondisi geografis dan cuaca alam yang berubah tiba-tiba, terkadang dapat menjadi sumber masalah di bidang pelayanan dikarenakan terputusnya jaringan SIAK,
- c) pemasangan LPJU belum merata pada ruas-ruas jalan di sekitar ibukota kecamatan, maupun tempat-tempat yang strategis untuk diberi penerangan, dari sisi penataan ruang, Masyarakat masih banyak yang awam dengan rencana tata ruang karena sangat kurangnya sosialisasi.
- d) Dari sisi lingkungan hidup, kesadaran masyarakat untuk mengelola persampahan masih sangat rendah dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan laut dan pantai masih rendah.

(2) Solusi

- a) Memberikan pemahaman yang lebih giat lagi kepada masyarakat, bahwa suatu daerah bisa menjadi lebih maju apabila masyarakatnya lebih mempunyai keterampilan-keterampilan yang bisa dijadikan modal untuk mengembangkan wilayahnya.
- b) Dalam hal pembangunan daerah, Kecamatan Bintan Pesisir yang keseluruhannya merupakan Desa, dapat lebih berkembang dengan adanya Dana Desa yang dapat dimanfaatkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan masyarakatnya.
- c) Perlunya sosialisasi lebih besar kepada masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di pinggir

pantai/pesisir laut, agar dapat menjaga kebersihan lingkungannya dengan tidak membuang sampah ke laut.

Kemudian untuk permasalahan terkait pencapaian indikator dan kinerja Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan adalah:

- a) Masih adanya masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya administrasi kependudukan, sehingga apabila ada keperluan yang mendesak baru sibuk untuk mengurus surat-surat kependudukan.
- b) Adanya miskomunikasi antara petugas Desa dan Kecamatan antara penyampaian informasi kekurangan dan permasalahan berkas warga yang tidak lengkap.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah kami rumuskan beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan solusi, yaitu:

- a) Meningkatkan fungsi dan peran Ketua RT/RW sebagai ujung tombak pemerintah agar tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap dirinya sendiri dengan tidak mengabaikan tertib Administrasi sejak dini.
- b) Segera menyampaikan kepada pihak Desa untuk meneruskan kepada warganya terkait kekurangan berkas dan kejelasan identitas dan terus melakukan koordinasi kepada semua pihak seperti masyarakat dan dinas-dinas terkait.

3.1.4.1.5 Kecamatan Bintan Timur

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program perencanaan pembangunan merupakan program yang dianggarkan dengan tujuan untuk memberi wadah bagi masyarakat dalam memberikan sumbangsih dan pemikiran untuk pembangunan diwilayah desanya melalui pelaksanaan

Kegiatan Musrenbang Kecamatan. Untuk Tahun Anggaran 2019, pencapaian program ini adalah sebesar 100%. Diharapkan penyerapan anggaran yang maksimal ini dapat diiringi dengan maksimalnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan. Pagu pada program ini di Tahun 2019 sebesar Rp. 44,844,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44,808,595,- atau bekisar 99,92%. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari Anggota DPRD Kabupaten Dapil setempat, perwakilan OPD, perangkat Desa, Kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp.44,844,000,- realisasi sebesar Rp.44,808,595 ,- atau 100%.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program Pembinaan masyarakat kecamatan adalah program yang dianggarkan dengan tujuan untuk mengakomodir kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat baik dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, olah raga dan seni, organisasi wanita serta penilaian lomba desa terbaik se- Kecamatan. Program pembinaan masyarakat kecamatan merupakan salah satu program yang menunjang program pada RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021. Untuk Tahun Anggaran 2019, pencapaian program ini adalah sebesar 99,02 % keuangan dan 100% fisik. Diharapkan penyerapan anggaran yang maksimal

ini dapat diiringi dengan meningkatnya kualitas masyarakat di Kecamatan Bintan Timur dalam berbagai bidang. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp. 1,387,864,000,- realisasi sebesar Rp. 1.374,316,815,- atau 99,02%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 610,000,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 608,239,500,- atau 99,71%. *Output* terbinanya aparatur Desa/ Kelurahan termasuk RT dan RW yang ada di Kecamatan Bintan Timur. Kegiatan lain yang termasuk ke dalam kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan adalah Pembinaan Siskamling, Pembinaan Kamtibmas (Anggota Linmas), pelatihan Intelijensi bagi masyarakat dan Kegiatan monitoring pelaksanaan Perda di Daerah Kecamatan Bintan Timur serta peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan.

(2) Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 558,250,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 552,090,650,- atau 99.89%. *Output* terbinanya Qori dan Qoriah Kecamatan Bintan Timur melalui terlaksananya STQ/MTQ mulai tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kabupaten. Selain pelaksanaan STQ/MTQ, kegiatan pembinaan Kegiatan Keagamaan juga terlaksana melalui kegiatan pembinaan Majelis Taqlim, pembinaan guru-guru ngaji TPA(Q), pembinaan Fardhu Kifayah, Peringatan hari besar Islam dan beberapa kegiatan Keagamaan lainnya.

(3) Pembinaan Kegiatan Olahraga Dan Seni

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86,800,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 81,465,825 , - 93,85%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Sanggar Seni, LASQI, Atlet dan Tim Olah Raga kepada 1 sanggar/ 1 tim LASQI/1 Tim Olah Raga.

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79,966,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 79,747,890 atau 99.72%. *Output* dari kegiatan ini adalah pemberdayaan Kelompok Wanita seperti TP PKK Kelurahan/Kecamatan, KUBE dan organisasi wanita lainnya(Dasa Wisma).

(5) Lomba Desa/Kelurahan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya namun baru mendapat alokasi tersendiri baik secara Kegiatan ataupun Anggaran. Untuk Kecamatan Bintang Timur di Tahun 2019 yang menjadi Kelurahan terbaik secara pengelolaan anggaran dan pengendalian manajemen aparatur ialah Kelurahan Sei Enam. *Output* dari kegiatan ini ialah terwujudnya tata pemerintahan Kelurahan yang professional dalam hal penganggaran dan manajemen aparatur. Tahun 2019 kegiatan Lomba Desa/Kelurahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 52,838,000,- dan realisasi yakni Rp. 52,772,950,-.atau 99,87%.

3) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dan Kelurahan

Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan kelurahan merupakan program yang mengakomodir kegiatan peningkatan pelayanan unit pelayanan terpadu. Focus kegiatan

ini adalah pelayanan kepada masyarakat melalui PATEN. Untuk tahun anggaran 2019, realisasi kegiatan ini dapat dikatakan 100%. Pada program ini terdapat tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu peningkatan pelayanan UPT Kecamatan, penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan. Ketiganya berjalan seimbang yang dibuktikan dengan pencapaian 87% tingkat kepuasan masyarakat yang terlaksana melalui Survey Kepuasan Masyarakat. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan. Program ini dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp.114,525,800,- realisasi sebesar Rp.103,471,778 ,- atau 90,34 %.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu

Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Kecamatan Bintang Timur Menganggarkan Dana Sebesar Rp.57,574,800,- dengan realisasi sebesar Rp. 50,008,853,- atau 86,85%

(2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat

Dilaksanakan dengan anggaran Rp. 36,288,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36,280,920,- atau 99,98%. output dari kegiatan ini adalah tolak ukur peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor Camat Bintang Timur.

(3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan

Penyusunan profil Kecamatan Bintang Timur merupakan suatu informasi penting bagi seluruh pihak yang membutuhkan informasi terkait Kecamatan Bintang Timur.

Di dalam profil tersebut memuat data tentang jumlah penduduk, data pendidikan, dan lain sebagainya. Tahun 2019 alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20,663,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17,182,005,- atau 83,15%.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk **Kecamatan Bintang Timur** adalah :

- a) Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang Kecamatan/ Desa dan Kelurahan telah mencapai 100%.
- b) Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan 16 Kegiatan.
- c) Tingkat Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan dan Kelurahan 90,34%.

4) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- a) Pada sisi perencanaan pembangunan, masyarakat cenderung mengajukan usulan pembangunan pada pembangunan fisik, jarang sekali yang mengajukan kegiatan yang bersifat pengembangan keterampilan sumber daya manusia,
- b) Dari sisi kependudukan dan pencatatan sipil, kondisi geografis dan cuaca alam yang berubah tiba-tiba, terkadang dapat menjadi sumber masalah di bidang pelayanan dikarenakan terputusnya jaringan,
- c) pemasangan LPJU belum merata pada ruas-ruas jalan di sekitar masing-masing Kelurahan, maupun tempat-tempat yang strategis untuk diberi penerangan, dari sisi penataan ruang, Masyarakat masih banyak yang awam dengan rencana tata ruang karena sangat kurangnya sosialisasi.

- d) Dari sisi lingkungan hidup, kesadaran masyarakat untuk mengelola persampahan masih sangat rendah dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan untuk dilingkungan sekitar masih sangat minim.

b. Solusi

- a) Memberikan pemahaman yang lebih giat lagi kepada masyarakat, bahwa suatu daerah bisa menjadi lebih maju apabila masyarakatnya lebih mempunyai keterampilan-keterampilan yang bisa dijadikan modal untuk mengembangkan wilayahnya.
- b) Dalam hal pembangunan daerah, Kecamatan Bintan Timur yang keseluruhannya merupakan Kelurahan, dapat lebih berkembang dengan adanya Dana Kelurahan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan masyarakatnya.
- c) Perlunya sosialisasi lebih besar kepada masyarakat agar dapat menjaga kebersihan lingkungannya dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
- d) Pengadaan PATEN Mobile untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Kemudian untuk permasalahan terkait pencapaian indikator dan kinerja Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan adalah:

- a) Masih adanya masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya administrasi kependudukan, sehingga apabila ada keperluan yang mendesak baru sibuk untuk mengurus surat-surat kependudukan.

- b) Adanya miskomunikasi antara petugas Kecamatan dan Kelurahan antara penyampaian informasi kekurangan dan permasalahan berkas warga yang tidak lengkap.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah kami rumuskan beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan solusi, yaitu:

- a) Meningkatkan fungsi dan peran Ketua RT/RW sebagai ujung tombak pemerintah agar tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap dirinya sendiri dengan tidak mengabaikan tertib Administrasi sejak dini.
- b) Segera menyampaikan kepada pihak Kelurahan untuk meneruskan kepada warganya terkait kekurangan berkas dan kejelasan identitas dan terus melakukan koordinasi kepada semua pihak seperti masyarakat dan dinas-dinas terkait.

3.1.4.1.6 Kecamatan Toapaya

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program perencanaan pembangunan merupakan program yang dianggarkan dengan tujuan untuk memberi wadah bagi masyarakat dalam memberikan sumbangsih dan pemikiran untuk pembangunan diwilayah Kelurahan dan Desa melalui pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan. Untuk Tahun Anggaran 2019, pencapaian fisik program mencapai 100% dan 99,43% penyerapan anggaran. Diharapkan dengan diadakan kegiatan musrenbang ini dapat diiringi dengan maksimalnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran

Rp.37.360.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.37.146.350 ,- atau 99,43%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program pembinaan masyarakat kecamatan adalah program yang dianggarkan dengan tujuan untuk mengakomodir kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Toapaya kepada masyarakat baik dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, olah raga dan seni serta keorganisasian wanita. Program pembinaan masyarakat kecamatan merupakan salah satu program yang menunjang program pada RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021. Untuk Tahun Anggaran 2019, penyerapan keuangan program pembinaan masyarakat kecamatan ini adalah sebesar 97,21 % keuangan dan 100% fisik. Diharapkan penyerapan anggaran yang maksimal ini dapat diiringi dengan meningkatnya kualitas masyarakat di Kecamatan Toapaya dalam berbagai bidang. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp.1.067.800.780,- realisasi sebesar Rp.1.036.365.200 ,- atau 97,21%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Pembinaan kegiatan kemasyarakatan dilaksanakan oleh Kecamatan Toapaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.309.460.000 dengan realisasi Rp.303.546.300 atau 98,09%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan yang terdiri dari kegiatan kepemudaan, Pramuka dan Karang Taruna.

(2) Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Pembinaan kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh Kecamatan Toapaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.285.030.000 dengan realisasi Rp.269.245.400 atau 94,46%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya qori dan qoriah dari Kecamatan Bintan Utara melalui kegiatan STQ Tingkat Kecamatan, pembinaan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan, dan pembinaan LASQI. Pertandingan Tingkat Kabupaten telah menghasilkan Bintan Juara I Lomba Qasidah, Juara Harapan I Lomba Marawis Tingkat Kabupaten Bintan, Juara I Lomba Profil Bunda Paud Tingkat Kabupaten Bintan.

(3) Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni

Pembinaan kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh Kecamatan Toapaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.327.731.780,- dengan realisasi Rp.319.901.100,- atau 97,61%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan Olahraga dan seni di masyarakat melalui pembinaan dalam bidang olahraga dan seni. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan sportifitas para atlet agar mampu bersaing dalam setiap event perlombaan yang diselenggarakan serta memelihara kelestarian budaya daerah lokal dan meningkatkan gairah masyarakat untuk memajukan kesenian budaya Melayu.

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Pemberdayaan dan pembinaan organisasi wanita dilaksanakan oleh Kecamatan Toapaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.145.579.000,- dengan realisasi Rp.143.672.400,- atau 98,69%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemberdayaan

dan pembinaan organisasi wanita di Kecamatan Bintan Utara melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK dan Organisasi Wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Dalam beberapa kompetisi yang diadakan ditingkat Kabupaten Bintan Kecamatan Toapaya berhasil meraih beberapa penghargaan yaitu Juara III Lomba Yel-Yel Deville PKK Tingkat Kabupaten Bintan, Juara II Lomba Drama Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Bintan. Juara Harapan I Lomba Profil Bunda PAUD Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Juara III Lomba berbalas Pantun Tingkat Kabupaten Bintan, Juara III Lomba PHBS Tingkat Kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah **Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan mencapai 20 Kegiatan.**

3) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dan Kelurahan

Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan kelurahan merupakan program yang mengakomodir kegiatan peningkatan pelayanan unit pelayanan terpadu. Focus kegiatan ini adalah pelayanan kepada masyarakat melalui PATEN. Untuk tahun anggaran 2019, realisasi fisik kegiatan ini dapat dikatakan 100% dan realisasi keuangan mencapai 98,01%. Pada program ini terdapat tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu peningkatan pelayanan UPT Kecamatan, Pembinaan Kapasitas Kelurahan Toapaya Asri dan penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh **Kecamatan Toapaya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.623.423.000,- dan realisasi sebesar Rp.618.256.614 ,- atau 98,01%. *Outcome* meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dan Kelurahan.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.683.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.185.000,- atau sebesar 96,61% *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasional UPT di Kecamatan.

(2) Peningkatan Kapasitas Kelurahan Toapaya Asri

Peningkatan kapasitas Kelurahan Toapaya Asri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.578.326.000,- dengan realisasi Rp.574.230.214,- atau 99,29%. *Output* dari Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Toapaya Asri.

(3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.414.000,- dengan realisasi sebesar Rp.29,841,400,- atau 98,12%. *Outputnya* adalah Terlaksananya Fasilitas Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk **Kecamatan Toapaya** adalah :

- a) Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrembang Desa Dan Kecamatan telah mencapai 100%.
- b) Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan 20 Kegiatan.
- c) Tingkat Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan dan Kelurahan 94,92%.

4) Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- a) Adanya gangguan alam seperti cuaca buruk dan petir yang mengakibatkan jaringan internet sering terganggu sehingga ada keterlambatan pengurusan

berkas masyarakat yang mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan.

- b) Adanya missskomunikasi antara petugas Desa dan Kecamatan antara penyampaian informasi kekurangan dan permasalahan berkas warga yang tidak lengkap.

b. Solusi

- a) Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kecamatan untuk secara intensif melakukan perawatan jaringan internet terutama sistem SIAK yang mengakomodir proses percetakan berkas administrasi kependudukan.
- b) Segera menyampaikan kepada pihak Desa untuk meneruskan kepada warganya terkait kekurangan berkas dan kejelasan identitas.
- c) Terus melakukan koordinasi kepada semua pihak seperti masyarakat dan dinas-dinas terkait.

3.1.4.1.7 Kecamatan Mantang

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan diwilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.24.049.500,- atau 68,71%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan.

Musrenbang dilaksanakan dengan peserta yang terdiri dari perangkat Desa, kecamatan, masyarakat dan pemuda.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.577.630.000,- realisasi sebesar Rp.529.009.580,- atau 91.58%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan

Untuk kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan, Kecamatan Mantang telah menganggarkan dana sebesar Rp.166.400.000,- Adapun anggaran yang terealisasi sebesar Rp.163.320.000,- Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dengan capaian program terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat, dimana sasarannya adalah masyarakat Kecamatan Mantang itu sendiri sehingga diharapkan hasilnya terbinanya kegiatan masyarakat di Kecamatan. Sejauh ini, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan tidaklah begitu berarti, sehingga diharapkan prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik di tahun berikutnya.

(2) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Dalam kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita pada tahun 2019 ini telah dianggarkan sebesar

Rp.77.000.000,- Adapun anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp.46.311.000,- Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita ini merupakan kegiatan ke empat yang memiliki capaian meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran adalah PKK dan Posyandu di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Beberapa event yang diikuti PKK Kecamatan Mantang adalah Jambore PKK Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019, Lomba Masak Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019 dan B2SA Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019

(3) Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Pada Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Kecamatan Mantang mengalokasikan dana sebesar Rp.122.440.000,-. Sedangkan realisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang terserap sebesar Rp.114.114.680,-. Kegiatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan ini merupakan kegiatan yang memiliki capaian meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran adalah masyarakat di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, akan meningkatnya pengetahuan keagamaan di Kecamatan. Kegiatan Peningkatan Keagamaan merupakan 2 (dua) kegiatan yang terangkum dalam satu kegiatan, yaitu Pelaksanaan STQ di tingkat Kecamatan dan Pengiriman Peserta MTQ serta Pembinaan Kegiatan Keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Mantang.

- a) Pelaksanaan STQ di tingkat Kabupaten dan Pengiriman Peserta STQ, Kegiatan STQ tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019, peserta yang mengikuti pertandingan tersebut diambil dari perwakilan masing-masing Desa yang ada

di Kecamatan Mantang sebanyak 2 (dua) orang perwakilan dalam kategori perlombaan hafiz dan membaca Al-Qur'an untuk kemudian sebagai perwakilan dari Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan dalam ajang Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bintan yang dilaksanakan di Kijang Kecamatan Bintan Timur.

- b) Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Pada kegiatan ini di fokuskan pada 3 (tiga) agenda yang telah ditetapkan, antara lain : (1) Menggalakan pengajian Majelis Ta'lim oleh ibu-ibu di Kecamatan Mantang dengan disertai siraman rohani dari para Mubaliq dan Penyuluh Agama Non PNS yang ada di Kecamatan Mantang dan di luar Kecamatan Mantang serta memeriahkan dan menyemarakkan bulan Ramadhan di setiap Desa dan dengan disejalankan Safari Ramadhan Bupati Bintan yang telah menjadi agenda rutin tahunan dimana kegiatan Safari Ramadhan tersebut dilaksanakan di Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan; (2) Peyuluhan agama kepada anak-anak remaja terutama para siswa-siswi SMP 23 Mantang dan SMAN 8 Bintan yang secara rutin dilaksanakan 2 (dua) minggu sekali; (3) Pengiriman peserta dari masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bintan maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya : Pembinaan Guru-guru Ngaji, Imam dan pengurus Masjid, Pelatihan Fardhu Kifayah, dll.

(4) Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni di Kecamatan

Pada kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan, Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan

menganggarkan dana sebesar Rp.185.550.000 Sedangkan realisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang terserap sebesar Rp.181.578.300,-. Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni di Kecamatan ini sasarannya adalah masyarakat di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, akan meningkatnya pembinaan dan prestasi dibidang olahraga dan seni di Kecamatan. Tidak banyak prestasi yang dapat diraih selama tahun 2019 baik di bidang seni maupun olahraga, namun dalam pembinaan Kegiatan Seni khususnya Sanggar Seni Bungsu Sakti yang mempertahankan budaya lisan Mak Yong dengan kepengurusan baru yang melibatkan remaja dan pelajar telah berhasil menunjukkan eksistensinya dengan adanya undangan untuk tampil di dalam dan luar negeri. Kecamatan Mantang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan seni yang diadakan oleh Kabupaten Bintan dengan mengirimkan satu Kelompok Tari pada Festival Tari Bintan yang diadakan di Kecamatan Bintan Timur. Sedangkan di bidang olahraga Kecamatan Mantang terus diadakan pembinaan dan juga aktif berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diadakan di dalam maupun di luar kecamatan diantaranya Sepak Bola, Futsal dan Turnamen Volly.

Selain itu pada Tahun 2019 Kecamatan Mantang juga mengadakan Kegiatan Jalan dan Senam Sehat bersama Bupati Bintan dan Masyarakat, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi dan kesadaran untuk selalu menjaga kesehatan, pada pelaksanaan kegiatan ini juga disejalankan dengan memperingati Hari Jadi Kecamatan Mantang yang ke-12 Tahun dan Program Bupati Bintan Penyerahan “Secanting Beras” kepada masyarakat Mantang.

3) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.600.000 dengan realisasi sebesar Rp.17.536.500. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasional UPT di Kecamatan

(2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.100.000 dengan realisasi sebesar Rp.15.441.600. *Outputnya* adalah Terlaksananya Fasilitas Tingkat Kepuasan Masyarakat. Gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantang dapat dilihat melalui Dokumen IKM Kecamatan Mantang Tahun 2019.

(3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.100.000 dengan realisasi sebesar Rp.13.789.500. *Outputnya* adalah Tersedianya Dokumen Profil Kecamatan yang menginformasikan kondisi Kecamatan Mantang pada 1 Tahun Terakhir.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk **Kecamatan Mantang** adalah:

- a) Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrembang Desa Dan Kecamatan telah mencapai 100%.
- b) Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan 17 Kegiatan.
- c) Tingkat Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan dan Kelurahan 81,24%.

4) **Permasalahan dan Solusi**

a. Permasalahan

Dengan Rentang kendali Jarak antara kecamatan Mantang ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang lumayan jauh dan terpisah Pulau menjadi perhatian khusus bagi kami untuk dapat mempercepat pelayanan yaitu menugaskan salah satu petugas pelayanan untuk dapat mengambil berkas Kependudukan yang telah selesai setiap hari ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

b. Solusi

- a) Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten.
- b) Diperlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan unsur pelayanan seperti dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan SDM petugas layanan.
- c) Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan perlu ditinjau ulang guna lebih memperlancar dalam pelayanan publik.

3.1.4.1.8 Kecamatan Teluk Bintan

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan diwilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah **Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan** dengan alokasi anggaran Rp.34.800.000,- dan realisasi anggaran

sebesar Rp.34.686.000,- atau 99,28%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang berasal dari perangkat kelurahan, kecamatan masyarakat dan pemuda

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.591.026.311,- realisasi sebesar Rp.568.468.200,-

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.220.000.000,- Adapun anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp.221.469.000,- atau sekitar 99,76%. *Output* kegiatan ini adalah meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran adalah PKK Se Kecamatan Teluk Bintan. Kegiatan lainnya yang diikuti oleh PKK Kecamatan Teluk Bintan adalah ikut serta dalam kegiatan PKK yang dikoordinir oleh PKK Kabupaten Bintan.

(2) Pembinaan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.151.276.311,- dan yang terealisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp.131.754.200 atau sekitar 87.01%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan peningkatan pengetahuan keagamaan di Kecamatan, seperti STQ tingkat kecamatan, majelis taklim yang dibina dan LASQI.

(3) Pembinaan Olahraga dan Seni

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.122.000.000 dan realisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang terserap sebesar Rp.120.860.000 atau sekitar 98,07%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya berbagai kegiatan seperti antara lain Pembinaan atlit Olahraga dan pegiat Seni di Kecamatan.

(4) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.95.750.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.94.385.000,- atau sekitar 98,57%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti siskamling, karang taruna, dan kepemudaan.

3) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh **Kecamatan Teluk Bintan** melalui 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.550.482.800,- dan realisasi sebesar Rp.514.588.248,-. *Outcome* meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dan Kelurahan.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Peningkatan pelayanan unit pelayanan terpadu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.22.000.000,- dan yang terealisasi Rp.21.768.000,- atau sekitar 98,95%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelayanan UPT Kecamatan Teluk Bintan

(2) Peningkatan kapasitas Kelurahan Tembeling Tanjung

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.493.482.800,- dan yang terealisasi Rp.457.920.248,- atau sekitar 92,79%. *Output* dari

kegiatan ini adalah untuk terlaksananya Pembinaan Kelurahan dikelurahan Tembeling Tanjung.

(3) Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dan yang terealisasi Rp.20.000.000- atau sekitar 100%. *Output* dari kegiatan ini adalah untuk terlaksananya penyusunan dokumen tingkat kepuasan masyarakat.

(4) Penyusunan Dokumen Profile Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan yang terealisasi Rp.14.900.000,- atau sekitar 99,33%. *Output* dari kegiatan ini adalah untuk terlaksananya Penyusunan Dokumen Profile Kecamatan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk **Kecamatan Teluk Bintan** adalah:

- a) Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrembang Desa Dan Kecamatan telah mencapai 100%
- b) Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan sebanyak 4 Kegiatan
- c) Tingkat Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan dan Kelurahan mencapai 100%

4) Permasalahan dan Solusi

Secara umum program dan kegiatan di Kecamatan Teluk Bintan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan program maupun kegiatan kegiatan. Semuanya berjalan sesuai rencana.

3.1.4.1.9 Kecamatan Gunung Kijang

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan di wilayah kecamatan.

Outcome program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat .

Program ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 87,278,800,- realisasi sebesar Rp. 86,873,350,-

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Fasilitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/ Kelurahan/Kecamatan

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp 44,146,000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 43,877,750,- atau 99.39%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang berasal dari perangkat kelurahan, kecamatan masyarakat dan pemuda

(2) Pembinaan dan Verifikasi APBDes

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran Rp 43,132,800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 42,995,600,- atau 99.68% . *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi Penyusunan APBDes. Pembinaan dan Verifikasi Penyusunan APBDes dilaksanakan pada tiap tiap Desa yang ada di bawah koordinasi Kecamatan Gunung Kijang

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1,802,449,600,- realisasi sebesar Rp 1,799,761,600,-atau 98,85%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.737,033,600.- dan realisasi anggaran sebesar Rp 736,053,700.- atau 99.87%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan RT/RW se-Kecamatan Gunung Kijang

(2) Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.430,371,600 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 429,627,000,- atau 99,83%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan qori dan qoriah se- Kecamatan Gunung Kijang

(3) Pembinaan Kegiatan Olahraga Dan Seni

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.473,607,800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.472,856,600,- 99.84%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Sanggar Seni, LASQI dan Tim Olah Raga.

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135,528,400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 135,338,300,- atau 99,86%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Kelompok PKK, Posyandu dan organisasi wanita lainnya.

(5) Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25,908,200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.25,886,000,- atau 99,91%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Lomba Desadan Kelurahan

3) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Kijang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.576,554,300,- dan realisasi Rp.556,644,772,- *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu

Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Kijang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29,092,000,- dengan realisasi Rp. 28,942,000.- *Output* dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Kecamatan Gunung Kijang melalui peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu.

(2) Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelurahan Kawal

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.497,038,700,- dan realisasi sebesar Rp. 477,541,822,-. *Output* dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Kawal melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Kawal.

(3) Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33,864,000,- dan realisasi sebesar Rp. 33,631,650,- . *Output* dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pelayanan masyarakat melalui penilaian tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Gunung Kijang.

(4) Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16,559,600,- dan realisasi sebesar Rp.16,529,300,- .

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan Gunung Kijang.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk Kecamatan Gunung Kijang adalah :

- a) Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrembang Desa Dan Kecamatan telah mencapai 100%.
- b) Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan sebanyak 5 Kegiatan.
- c) Tingkat Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan dan Kelurahan mencapai 80%.

4) Permasalahan dan Solusi

Secara umum program dan kegiatan di Kecamatan Gunung Kijang dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan program maupun kegiatan kegiatan. Semuanya berjalan sesuai rencana.

3.1.4.1.10 Kecamatan Seri Kuala Lobam

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan diwilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.54.250.000,- dan realisasi anggaran Rp.42.447.700,- atau 78,24%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan/Kelurahan** dengan alokasi anggaran Rp.29.150.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.28.124.400,- atau 96,48%. *Output*

dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat kecamatan/Kelurahan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

(2) Pembinaan dan Verifikasi APBDes dengan alokasi anggaran Rp.25.100.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp14.323.300,- atau 57,06%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan anggaran dan verifikasi APBDes.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.698.474.441,- realisasi sebesar Rp.680.931.650,- atau 97,49%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.298.259.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.297.913.950,- atau 99,88%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan RT/RW se-Kecamatan Seri Kuala Lobam.

(2) Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.118.574.000,- atau 98,81%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan qori dan qorih se-Kecamatan Seri Kuala Lobam.

(3) Pembinaan Kegiatan Olahraga Dan Seni

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.023.441,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.120.476.200,- 99,55%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Sanggar Seni, LASQI dan Tim Olah Raga.

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.412.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.113.795.000,- atau 96,92%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan Kelompok PKK, Posyandu dan organisasi wanita lainnya.

(5) Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.780.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.30.172.500,- atau 72,22%. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan lomba desa/kelurahan dan pembinaan terhadap desa/kelurahan.

3) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.063.087.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.025.241.444,- atau 96,44%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.068.000,- atau 99,31%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Operasional UPT di Kecamatan.

(2) Kegiatan Pembinaan Kapasitas Kelurahan Teluk Lobam

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.490.002.000,- dengan realisasi sebesar Rp.481.335.705,- atau 98,23%. *Output* dari Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Teluk Lobam.

(3) Kegiatan Pembinaan Kapasitas Kelurahan Tanjung Permai

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.481.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.470.759.739,- atau 97,87%. *Outputnya* adalah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Permai.

(4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.885.000,- dengan realisasi sebesar Rp.34.110.000,- atau 75,99%. *Outputnya* adalah Terlaksananya Fasilitas Tingkat Kepuasan Masyarakat.

(5) Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.19.968.000,- atau 71,31%. *Outputnya* adalah Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan.

4) Program Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di Kelurahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan. *Outcome* program ini adalah Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Kelurahan dengan total anggaran sebesar Rp.1.672.982.242,- dengan realisasi sebesar Rp.569.818.400,- atau 34,06%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kelurahan Tanjung Permai

Alokasi anggaran di Kelurahan ini sebesar Rp.834.897.200,- dengan realisasi sebesar Rp.329.779.400,- atau 39,50%. Outputnya adalah terlaksananya percepatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tanjung Permai.

(2) Kelurahan Teluk Lobam

Alokasi anggaran di Kelurahan ini sebesar Rp.838.085.042,- dengan realisasi sebesar Rp.240.039.000,- atau 28,64%. Outputnya adalah terlaksananya percepatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Teluk Lobam.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di Kelurahan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. *Outcome* program ini adalah Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Kelurahan dengan total anggaran sebesar Rp.622.899.758,- dengan realisasi sebesar Rp.564.389.000,- atau 90,61%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kelurahan Tanjung Permai

Alokasi anggaran di Kelurahan ini sebesar Rp.313.043.800,- dengan realisasi sebesar Rp.308.105.300,- atau 98,42%. Outputnya adalah terlaksananya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tanjung Permai.

(2) Kelurahan Teluk Lobam

Alokasi anggaran di Kelurahan ini sebesar Rp.309.855.958,- dengan realisasi sebesar Rp.256.283.700,- atau 82,71%. Outputnya adalah terlaksananya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Teluk Lobam.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk Kecamatan Seri Kuala Lobam adalah :

- a) Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang Desa/Kelurahan Dan Kecamatan telah mencapai 100%.
- b) Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan sebanyak 75 Kegiatan.
- c) Tingkat Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan dan Kelurahan mencapai 80%.

6) Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya koordinasi antara PPTK dengan bagian perencanaan program dan Keuangan sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK tidak sesuai dengan jadwal kegiatan (*Time Schedule*) yang mengakibatkan realisasi tidak tercapai dengan maksimal sehingga perlu ditingkatkan koordinasi antar seksi dengan bagian perencanaan dan keuangan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai

dengan jadwal kerja yang telah disusun.

3.1.4.1.11 Kecamatan Teluk Sebong

1) Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan diwilayah kecamatan. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan

Alokasi anggaran Rp.36.697.200,- (*Tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.656.400,- (*Tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah*). atau 99,34%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya usulan rencana pembangunan dari tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan. Musrenbang dilaksanakan dengan dihadiri peserta yang terdiri dari perangkat kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan pemuda.

(2) Pembinaan dan Verifikasi APBDes

Pada Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi APBDes ini Kecamatan Teluk Sebong Menganggarkan sebesar Rp. 9,200,000,-,Kegiatan ini bertujuan agar Kecamatan Teluk Sebong dapat Membina Desa-desa dalam Kendala Penyusunan dan Penganggaran APBDes.

2) Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan serta penataan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Outcome* program ini adalah meningkatnya penataan hubungan

Pemerintah dan Masyarakat kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.700.806.618,- realisasi sebesar Rp.694.050.900,- atau 99,036%.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan

Untuk kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan, Kecamatan Teluk Sebong telah mengalokasikan dana Rp. 477.316.218,- (*Empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus delapan belas rupiah*.) Adapun anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 472.606.300,- (*Empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga ratus rupiah*).Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dengan capaian program terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat, dimana sasarannya adalah masyarakat Kecamatan Teluk Sebong itu sendiri sehingga diharapkan hasilnya terbinanya kegiatan masyarakat di Kecamatan. Sejauh ini, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan tidaklah begitu berarti, sehingga diharapkan prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik di tahun berikutnya.

(2) Kegiatan Pembinaan Keagamaan

Pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan mengalokasikan dana sebesar Rp. 138.150.000,- (*Seratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah*). Sedangkan realisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang terserap sebesar Rp. 137.765.800,- (*Seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*). Kegiatan

Peningkatan Pengetahuan Keagamaan ini merupakan kegiatan yang memiliki capaian meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran adalah masyarakat di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, akan meningkatnya pengetahuan keagamaan di Kecamatan. Kegiatan Peningkatan Keagamaan merupakan 2 (dua) kegiatan yang terangkum dalam satu kegiatan, yaitu Pelaksanaan STQ di tingkat Kecamatan dan Pengiriman Peserta STQ serta Pembinaan Kegiatan Keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Teluk Sebong.

a) Pelaksanaan STQ di tingkat Kecamatan dan Pengiriman Peserta STQ Kegiatan MTQ Kecamatan Teluk Sebong dilaksanakan pada Akhir Februari 2018, peserta yang mengikuti pertandingan tersebut diambil dari perwakilan masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Teluk Sebong sebanyak 3 (tiga) orang perwakilan dalam setiap kategori perlombaan untuk kemudian dipilih 1 (satu) orang sebagai perwakilan dari Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan dalam ajang Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bintan. Perwakilan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan ini sebelumnya telah diseleksi dan dibina oleh Tim Seleksi Tingkat Kecamatan dalam mempersiapkan mereka untuk mengikuti STQ tingkat Kabupaten Bintan.

b) Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Pada kegiatan ini di fokuskan pada agenda yang telah ditetapkan, antara lain : Memperingati hari-hari besar Agama Islam yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Sebong, Pengiriman peserta dari masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang keagamaan

yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bintan maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya : Pembinaan Guru-guru Ngaji, Imam dan pengurus Masjid, Pelatihan Fardhu Kifayah, dll.

(3) Kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan

Pada kegiatan Pembinaan Olahraga dan Seni di Kecamatan, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan mengalokasikan dana sebesar Rp. 33.391.200 (*Tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus rupiah*). Sedangkan realisasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut yang terserap sebesar Rp. 31.924.000,- (*Tiga puluh satu juta dua Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Kegiatan mengirimkan satu tim mengikuti Pertandingan Olahraga Bupati CUP serta mengikuti Parade Tari di Tingkat Kabupaten Bintan.

(4) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan

Dalam kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan pada tahun 2018 ini telah dianggarkan sebesar Rp. 33.391.200,- (*Tiga puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*). Adapun anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 33.225.000,- (*Tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pedesaan/Kelurahan ini merupakan kegiatan ke empat yang memiliki capaian meningkatnya penataan hubungan pemerintah dan masyarakat dengan sasaran adalah PKK dan Posyandu di Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

(5) Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan

Dalam kegiatan Lomba Desa / Kelurahan ini pada tahun 2019 ini telah dianggarkan sebesar Rp. 18.558.000,- (*Delapan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah* ratus. Adapun anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 18.529.800,- (*Delapan belas juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah*). Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan ini dilaksanakan dalam rangka untuk Kegiatan Penilaian lomba Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan Teluk Sebong sampai Tingkat Kabupaten Bintan.

3) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan kelurahan

Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Sebong dengan alokasi anggaran sebesar Rp.554.391.100,- dan realisasi Rp.535.857.829,- atau 96,65%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan.

a. Pelaksanaan Kegiatan

(1) Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu, dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Sebong dengan anggaran sebesar Rp. 11.100.400,- (*Sebelas juta seratus ribu empat ratus rupiah*) dan terealisasi dalam penggunaannya sebesar Rp. 10.600.000,- (*sepuluh juta enam ratus ribu rupiah*).

(2) Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kota Baru

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kota Baru, dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Sebong dengan anggaran sebesar Rp. 495.612.700,- (*Empat ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus dua belas ribu tujuh*

ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 478.758.829,- (*Empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah*) atau 95,50% hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Kapasitas Kelurahan Kelurahan Kota Baru melalui peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Kota Baru.

(3) Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Penusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat, dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Sebong dengan anggaran sebesar Rp. 29.850.000,- (*Dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.220.000,- (*Dua puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) atau 92,04% hasil dari kegiatan ini adalah Mengukur Tingkat Kepuasan masyarakat Kecamatan Teluk Sebong terhadap Pelayanan yang diberikan Pegawai Kantor Camat Teluk Sebong.

(4) Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan Teluk Sebong

Kegiatan Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan ini, dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Sebong dengan anggaran sebesar Rp. 17.828.000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.279.000,- (*Dua puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) atau 96,92% hasil dari kegiatan ini adalah Mengumpulkan data-data yang ada di Desa / Kelurahan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2018 untuk **Kecamatan Teluk Sebong** adalah:

- a) Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrembang Desa Dan Kecamatan telah mencapai 100%.

- b) Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilaksanakan sebanyak 5 Kegiatan.
- c) Tingkat Kepuasan Masyarakat Representatif Kecamatan dan Kelurahan dari hasil survey Indeks Kepuasan MAsyarakat (IKM) capaian Kinerja Unit Pelayanan Kantor Camat Teluk Sebong dengan nilai 80,74 adalah BAIK.

3.1.4.1.12 Kecamatan Bintang Utara

1) Pembinaan Masyarakat Kecamatan

a. Pembinaan Kegiatan Keagamaan

(1) Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan Bintang Utara

Pada tahun 2019, Kecamatan Bintang Utara melaksanakan STQ Tingkat Kecamatan Bintang Utara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2019 di Masjid Baitul Makmur Tanjung Uban. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang keagamaan, khususnya dalam memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan untuk menyeleksi qori dan qoriah yang ada di Kecamatan Bintang Utara. Kegiatan ini terdiri dari 2 cabang dan diikuti oleh 18 Peserta yang merupakan utusan dari desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Bintang.

(2) Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan salah satu sarana pembinaan keagamaan yang ditujukan untuk membina masyarakat, khususnya kaum wanita atau ibu-ibu yang tinggal di Kecamatan Bintang Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Kecamatan Bintang Utara, terdapat 40 kelompok pengajian atau majelis taklim. Kelompok-kelompok ini dibina di bawah koordinasi PERMATA (PERsatuan MAjelis TAKlim) dan BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim)

Kecamatan Bintan Utara untuk melaksanakan seluruh kegiatannya. Setiap tahunnya, majelis taklim di Kecamatan Bintan Utara selalu mengikutsertakan anggota-anggotanya dalam acara-acara bernuansa Islami baik yang diadakan oleh Kabupaten Bintan maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021, target yang direncanakan untuk jumlah majelis taklim yang dibina di Kecamatan Bintan Utara adalah 5 (lima) kelompok dengan asumsi 1 (satu) kelompok untuk tiap kelurahan dan desa, sementara yang terealisasi berjumlah 40 (empat puluh) kelompok. Artinya, capaian program sudah menunjukkan angka 100 % karena 40 (empat puluh) kelompok tersebut tersebar di 4 (empat) kelurahan dan 1 (satu) desa yang ada di Kecamatan Bintan Utara dengan jumlah rata-rata 8 (delapan) kelompok tiap desa/kelurahan.

(3) LASQI

LASQI merupakan salah satu unsur pendukung dalam pembinaan kegiatan keagamaan di Kecamatan Bintan Utara. Di Kecamatan Bintan Utara terdapat 1 (satu) kelompok kesenian qasidah yang dibina oleh DPC LASQI Kecamatan Bintan Utara di bawah pimpinan Bapak Usman M. Nil yang juga merupakan pimpinan kelompok kesenian Marawis yang ada di Kecamatan Bintan Utara. Kelompok kesenian qasidah yang dibina oleh DPC LASQI Kecamatan Bintan Utara tersebut senantiasa tampil dalam event-event yang bernuansa Islami dan ikut dalam event perlombaan seperti STQ (Seleksi Tilawatil Qur'an) dan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), baik pada Tingkat Kabupaten Bintan maupun pada Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Kelompok LASQI yang dibina di Kecamatan Bintan Utara adalah 6 (enam) kelompok, sementara yang terealisasi

hanya 1 (satu) kelompok saja. Artinya, capaian program baru menunjukkan angka 16,7 %. Berdasarkan informasi yang diperoleh dan hasil observasi di lapangan, walaupun masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bintan Utara mayoritas beragama Islam, namun tingkat antusiasme masyarakat untuk menghidupkan kesenian qasidah masih belum seperti yang diharapkan, bukan karena kurangnya daya tarik dari kesenian qasidah itu sendiri, tapi lebih kepada masih kurangnya individu-individu yang kompeten untuk membina kelompok dan menguasai secara spesifik kesenian qasidah.

(4) Pembinaan Kegiatan Keagamaan Lainnya

Selain melaksanakan STQ, Kecamatan Bintan Utara juga berpartisipasi dalam pengantaran dan penjemputan Jamaah Haji Kabupaten Bintan yang berasal dari Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Sebong.

b. Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni

(1) Olahraga

Dalam rangka meningkatkan semangat masyarakat untuk hidup sehat serta mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat, Kecamatan Bintan Utara telah melaksanakan pembinaan kegiatan olahraga melalui pembinaan atlet dari berbagai cabang olahraga yang berbeda. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan sportifitas para atlet agar mampu bersaing dalam setiap event perlombaan yang diselenggarakan. Para atlet yang dibina di Kecamatan Bintan Utara pada umumnya berasal dari kalangan pelajar, dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat SMA/SMK. Sebagian besar atlet adalah pelajar/siswa laki-laki karena olahraga yang paling menonjol adalah sepakbola.

Untuk melaksanakan pembinaan kegiatan olahraga, para atlet diundang oleh pihak Kecamatan Bintan Utara untuk melaksanakan pertemuan. Dalam hal ini pihak kecamatan akan bertukar pikiran dan menyaring aspirasi dari para atlet untuk meningkatkan konsistensi pembinaan kegiatan olahraga di Kecamatan Bintan Utara mengingat cukup tingginya intensitas perlombaan olahraga yang diadakan di Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.

Sesuai RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021, target yang direncanakan untuk jumlah atlet yang dibina di Kecamatan Bintan Utara adalah 51 (lima puluh satu) orang, sementara yang terealisasi adalah 51 (lima puluh satu) orang. Artinya, capaian program sudah menunjukkan angka 100 %.

(2) Seni

Dalam rangka memelihara kelestarian budaya daerah lokal dan meningkatkan gairah masyarakat untuk memajukan kesenian budaya Melayu, Kecamatan Bintan Utara telah melaksanakan pembinaan kegiatan seni melalui pembinaan sanggar seni agar mampu bersaing dalam setiap event perlombaan seni yang diselenggarakan.

Hingga saat ini, kegiatan seni yang dibina oleh Kecamatan Utara adalah kesenian tari daerah tradisional dan tari kontemporer. Terdapat 2 (dua) sanggar seni di Kecamatan Bintan Utara yang secara serius menekuni kesenian tersebut. Salah satunya adalah Sanggar Seni Sang Nila Utama yang dipimpin oleh Bapak drs.Sutarto. Sebenarnya sanggar ini tidak hanya mempelajari dan mengembangkan kesenian tari daerah dan tari kontemporer saja, tapi juga kesenian lain yang masih ada hubungannya dengan budaya daerah lokal dan juga budaya nasional. Anggota dari sanggar ini sebagian besar berasal dari kalangan

pelajar, dan sebagian lagi berasal dari kalangan umum. Sanggar ini selalu mengikutsertakan anggota-anggotanya di dalam event-event yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain Sanggar Seni Sang Nila Utama, terdapat satu sanggar seni lain di Kecamatan Bintan Utara yaitu sanggar seni yang berada di daerah Mentigi Kelurahan Tanjung Uban. Sanggar ini sama aktifnya dengan Sanggar Seni Sang Nila Utama dan selalu ikut serta dalam event-event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, namun karena belum optimalnya koordinasi dengan pihak kecamatan maka informasi yang diketahui tentang sanggar seni ini masih belum begitu jelas.

c. Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Tim Penggerak PKK Kecamatan Bintan Utara melakukan pembinaan kepada anggota TP-PKK Kecamatan serta PKK Kelurahan dan Desa. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TP-PKK Kecamatan Bintan Utara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Mengadakan rapat setiap bulan untuk mengevaluasi kinerja Ketua dan Anggota TP-PKK kelurahan/desa, serta sebagai media menyelesaikan setiap masalah yang ada;
- b) Mengikuti Rapat Pengurus setiap bulan yang diadakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan;
- c) Mengikuti setiap agenda kegiatan TP-PKK Kabupaten Bintan yang melibatkan TP-PKK Kecamatan Bintan Utara;
- d) Mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam melalui seminar, sosialisasi, perlombaan dan lain sebagainya;

- e) Memperingati dan menghadiri perayaan Hari-hari Besar Islam di tingkat kabupaten dan kecamatan;
- f) Memotivasi dan mengaktifkan kegiatan Posyandu dan Dasawisma di tingkat desa/kelurahan.

2) Perencanaan Pembangunan Kecamatan

a. Fasilitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan & Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan intensitas penataan daerah otonomi baru yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bintan, Kecamatan Bintan Utara telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Kegiatan musrenbang ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk kemudian dicarikan solusinya.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan. Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa dan kelurahan sampai pada tingkat nasional.

Kegiatan musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Musrenbang harus dipandang sebagai saluran resmi yang dipersiapkan untuk mengkanalisasi aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Untuk itu, maka mutu proses dan mutu hasil musrenbang akan sangat

menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, musrenbang hendaknya dipandang sebagai wadah yang dipersiapkan untuk melakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan tersebut, sehingga aspirasi masyarakat dapat turut mewarnai hasil perencanaan pembangunan.

Berangkat dari kerangka berpikir tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang ini disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Musrenbang Kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Bintang Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya sinkronisasi dan keselarasan antar berbagai usulan kegiatan yang dihasilkan melalui Musrenbang Desa dan Kelurahan;
- b) Terbangunnya kesepakatan dari berbagai *stakeholders* se-kecamatan tentang skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun;
- c) Disepakatinya ranking/prioritas kegiatan yang akan memperoleh pendanaan dari program yang akan masuk di kecamatan, seperti PNPM Mandiri perdesaan, PNPM P2SPP, dan sebagainya;
- d) Disepakatinya kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan kepada SKPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- e) Disepakatinya Delegasi Kecamatan yang akan hadir dalam Musrenbang Kabupaten Bintang.

Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi rencana program/kegiatan di desa/kelurahan dan kecamatan beserta permasalahannya serta menghimpun dan merumuskan isu-isu strategis yang didasarkan atas kondisi riil di masyarakat. Pada musrenbang tingkat desa/kelurahan akan dibahas kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan dari masyarakat. Selanjutnya pada musrenbang tingkat kecamatan akan dibahas lagi dan diseleksi menjadi usulan prioritas.

Pada saat pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Bintan Utara, sebanyak 100 (seratus) orang masyarakat diundang sebagai peserta rapat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan permasalahan yang dihadapi dan aspirasinya terhadap pembangunan, dan kemudian akan ditanggapi oleh dinas/instansi yang terkait dengan isu yang dibahas. Kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan prioritas dalam musrenbang tingkat kecamatan akan dipersiapkan sebagai bahan untuk pembahasan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten Bintan.

Musrenbang mulai dilaksanakan di tingkat kelurahan dan desa di Kecamatan Bintan Utara pada tanggal 11 Februari 2019 dilanjutkan dengan musrenbang di tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2019 pukul 09.00 Wib bertempat di Gedung Nasional Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Musrenbang di Kecamatan Bintan Utara dihadiri oleh 100 undangan berasal dari kelurahan, desa, uspika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK dan unsur-unsur kecamatan lainnya.

3) Realisasi Anggaran

a. Pembinaan Masyarakat Kecamatan

(1) Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan

Pembinaan kegiatan kemasyarakatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 458.905.000 dengan realisasi Rp. 357.362.500 atau 77.87%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan yang terdiri dari kegiatan kepemudaan, Pramuka dan Karang Taruna.

(2) Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Pembinaan kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.020.722 dengan realisasi Rp. 109.241.900 atau 99.29%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya qori dan qoriah dari Kecamatan Bintan Utara melalui kegiatan STQ Tingkat Kecamatan, pembinaan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan, dan pembinaan LASQI.

(3) Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni

Pembinaan kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.644.543 dengan realisasi Rp. 42.486.000 atau 99.63%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan Olahraga dan seni di masyarakat melalui pembinaan dalam bidang olahraga dan seni. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan sportifitas para atlet agar mampu bersaing dalam setiap event perlombaan yang diselenggarakan serta memelihara kelestarian budaya daerah lokal dan meningkatkan gairah masyarakat untuk memajukan kesenian budaya Melayu.

(4) Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita

Pemberdayaan dan pembinaan organisasi wanita dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi Rp. 19.780.000 atau 98.9%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan organisasi wanita di Kecamatan Bintan Utara melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK dan Organisasi Wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri.

b. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan

(1) Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu

Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dengan realisasi Rp. 17.195.000 atau 98.28%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Kecamatan Bintan Utara melalui peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu.

(2) Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan

Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 488.972.400 dengan realisasi Rp. 316.921.314 atau 64.81%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan.

(3) Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara

Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 483.824.400 dengan realisasi Rp. 117.199.750 atau 24.22%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kapasitas

Kelurahan Tanjung Uban Utara melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara.

(4) Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur

Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 481.840.400 dengan realisasi Rp. 296.385.250 atau 61.51%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur.

(5) Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban

Peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 476.416.400 dengan realisasi Rp. 257.302.726 atau 54.01%. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kapasitas Kelurahan Tanjung Uban melalui peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban.

c. Perencanaan Pembangunan Kecamatan

(1) Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan & Kecamatan

Fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan & kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.478.800 dengan realisasi Rp. 16.369.320 atau 99.34%. Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi rencana program/kegiatan di desa/kelurahan dan kecamatan beserta permasalahannya serta menghimpun dan merumuskan isu-isu strategis yang didasarkan atas kondisi riil di masyarakat. Pada musrenbang tingkat desa/kelurahan akan dibahas kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan dari masyarakat.

Selanjutnya pada musrenbang tingkat kecamatan akan dibahas lagi dan diseleksi menjadi usulan prioritas.

Tabel 3.84 Realisasi Anggaran & Capaian Kinerja beserta Permasalahan yang Dihadapi

No.	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	Output	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan							
1.	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	458.905.000	357.362.500	77.87%	100 %	Terfasilitasinya kegiatan PKK,Kepemudaan,Pramuka dan Karang Taruna	Kurangnya intensitas kegiatan di masyarakat yang bersifat perlombaan	Perencanaan anggaran disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang akan direalisasikan
2.	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	110.020.722	109.241.900	99.29%	100 %	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan, terlaksananya pembinaan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan, terlaksananya pembinaan LASQI		
3.	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	42.644.543	42.486.000	99.63 %	100 %	Terlaksananya pembinaan kemasyarakatan dalam bidang olahraga dan seni		
4.	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	20.000.000	19.780.000	98.9 %	100 %	Terlaksananya pemberdayaan dan pembinaan organisasi wanita		
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan							
1.	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	17.500.000	17.195.000	98.28 %	100 %	Terlaksananya peningkatan pelayanan Unit Pelayanan Terpadu		

No.	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	Output	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan	488.972.400	316.921.314	64.81%	100 %	Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan	Barang yang tersedia di pasaran mengalami kenaikan harga sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan	Perencanaan belanja disesuaikan dengan spesifikasi dan harga di pasaran
3.	Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara	483.824.400	117.199.750	24.22 %	100 %	Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara		
4.	Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur	481.840.400	296.385.250	61.51 %	100 %	Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur	Kurangnya pengendalian oleh PPTK terhadap kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi antara PPTK dengan Bendahara
5.	Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban	476.416.400	257.302.726	54.01 %	100 %	Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban	Kurangnya pengendalian oleh PPTK terhadap kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi antara PPTK dengan Bendahara
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan							
9.	Fasilitas MusrenbangTingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	16.478.800	16.369.320	99.34 %	100%	Teridentifikasinya rencana program kegiatan beserta permasalahannya		
	Jumlah	2.596.602.665	1.550.243.760	67.50 %	100 %			

Sumber : Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Bintang Utara Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.84 di atas, realisasi keuangan adalah sebesar 67.50 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Dari 10 (sepuluh) indikator sasaran yang terkait dengan program/kegiatan pembangunan di Kecamatan Bintan Utara, seluruh kegiatan memiliki realisasi fisik 100 %, Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bintan Utara telah sukses dalam melakukan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab melalui penataan hubungan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kecamatan Bintan Utara berdasarkan RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021.

**Tabel 3.85 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan
Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya hubungan pemerintah dan masyarakat	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan					631.570.265	528.870.400	84%
	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah LPM yang dibina	5	5	100	458.905.000	357.362.500	77.87%
		Jumlah Organisasi Pemuda/Ormas yang dibina	5	5	100			
		Jumlah Gudep Kepramukaan yang dibina	36	36	100			
	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah peserta MTQ yang dikirim	20	26	100	110.020.722	109.241.900	99.29%
		Jumlah cabang MTQ yang diikuti	8	8	100			
		Jumlah peserta yang mengikuti STQ	30	58	100			
		Jumlah cabang STQ yang diselenggarakan	4	4	100			
		Pembinaan Majelis Ta'lim	5	5	100			
		Jumlah LASQI yang dibina	6	2	33.33			
	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	Jumlah atlet yang dibina	51	51	100	42.644.543	42.486.000	99.63 %
		Jumlah cabang olahraga yang dibina	8	8	100			
		Jumlah atlet yang dikirim	51	51	100			
		Jumlah cabang olahraga yang diikuti	8	8	100			

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah sanggar seni yang dibina	4	1	25			
	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	1 Desa/ 4 Kelurahan	1 Desa/4 Kelurahan	100	20.000.000	19.780.000	98.9 %
		Jumlah pertemuan PKK yang dilaksanakan	72	65	90.27			
		Jumlah kelompok Dasawisma yang dibina di Desa/Kelurahan	50	76	100			
		Pembinaan Organisasi Wanita di Kecamatan	7	7	100			
Meningkatnya Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan	Pogram Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan					1.948.553.600	1.005.004.040	52%
	Peningkatan Unit Pelayanan Terpadu	Terlaksananya peningkatan Unit Layanan Terpadu				17.500.000	17.195.000	98.28 %
	Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan	12 bln	12 bln	100	488.972.400	316.921.314	64.81%
	Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara	Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara	12 bln	12 bln	100	483.824.400	117.199.750	24.22 %
	Peningkatan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur	Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur	12 bln	12 bln	100	481.840.400	296.385.250	61.51 %
	Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya peningkatan	12 bln	12 bln	100	476.416.400	257.302.726	54.01 %

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelurahan Tanjung Uban	kapasitas Kelurahan Tanjung Uban						
Mendapatkan kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama prioritas pembangunan di Tingkat Kecamatan	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan					16.478.800	16.369.320	99.34 %
	Fasilitas Musrenbang Tingkat Kecamatan/ Desa dan Kelurahan	Jumlah peserta Musrenbang	100 org	100 org	100	16.478.800	16.369.320	99.34 %
		Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang	100%	100%	100			
		Membantu menyiapkan sarana dan prasarana/fasilitas untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan	5	5	100			

Sumber : Laporan Realisasi Program & Kegiatan Pembangunan Kecamatan Bintan Utara Tahun 2019

Berdasarkan data pada Tabel 3.85, jumlah pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan di Kecamatan Bintan Utara pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2,596,602,665 dengan perincian sebagai berikut:

- i. Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

Pagu Kegiatan	:	Rp. 631.570.265
Realisasi Keuangan	:	Rp. 528.870.400
Persentase Keuangan	:	84%

- Persentase Fisik : 100%
- ii. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
- Pagu Kegiatan : Rp. 1.948.553.600
- Realisasi Keuangan : Rp 1.005.004.040
- Persentase Keuangan : 52%
- Persentase Fisik : 100%
- iii. Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
- Pagu Kegiatan : Rp. 16.478.800
- Realisasi Keuangan : Rp. 16.369.320
- Persentase Keuangan : 99.3%
- Persentase Fisik : 100%

Tabel 3.86 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah	orang	54	36	66.67%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja DPA SKPD Kantor Camat Bintan Utara

Berdasarkan Tabel 3.86 di atas, peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Bintan Utara memiliki tingkat capaian kinerja **66.67%**. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021, target yang direncanakan untuk jumlah ASN tahun 2019 adalah 54 orang, sedangkan yang terealisasi berjumlah 34 orang. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menjadi kendala bagi Kecamatan Bintan Utara dalam melakukan upaya untuk mewujudkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan sesuai dengan Misi Kabupaten Bintan, yaitu

melanjutkan upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggungjawab, serta sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kecamatan Bintan Utara berdasarkan RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021.

Tabel 3.87 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 dengan 2018

No.	Program / Kegiatan / Rincian Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tidak Langsung	5.542.727.127	5.150.408.533	392.318.594	93%
2.	Belanja Langsung	4.402.323.057	4.071.866.075	330.456.982	95.15%
Jumlah		8.955.266.057	8.193.695.437	761.570.620	92.85%
Tahun Anggaran 2017		8.46.333.600	7.41.942.797	1.004.390.803	88.09%

Sumber : Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kantor Camat Bintan Utara

Berdasarkan Tabel 3.87 di atas, maka informasi yang dapat kita ketahui adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2019, anggaran yang ingin direalisasikan oleh Kecamatan Bintan Utara berjumlah Rp. 9.482.148.328. Namun, dalam pelaksanaannya anggaran yang dapat direalisasikan adalah Rp. 8.193.695.47. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Kecamatan Bintan Utara adalah sebesar 92.85% dari target anggaran yang ingin direalisasikan.
- Pada tahun 2019, terjadi kenaikan jumlah anggaran dari Rp. 9.482.148.328, pada tahun 2019 menjadi Rp. 10.051.192.327 pada tahun 2019. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah anggran yang terealisasikan, dari

Rp. 8.955.266.057 pada tahun 2018 menjadi Rp. 8.955.266.057 pada tahun 2018.

- c) Kecamatan Bintan Utara memiliki tingkat capaian kinerja 92.85% dengan predikat baik dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2018.

Tabel 3.88 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya informasi tentang Realisasi Laporan Keuangan	dokumen	5	5	100 %

Berdasarkan Tabel 3.88 di atas, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan di Kecamatan Bintan Utara memiliki tingkat capaian kinerja **100%**. Yang merupakan dokumen-dokumen dari Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut :

- Laporan Realisasi Anggaran 2018
- Neraca 2018
- Catatan atas Laporan Keuangan 2018
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 2018
- Laporan TEPRA 2018

Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bintan Utara telah sukses dalam melakukan upaya untuk mewujudkan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, dan sesuai dengan Misi Kabupaten Bintan, yaitu melanjutkan upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggungjawab, serta sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kecamatan Bintan Utara berdasarkan

RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021.

3.5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN

3.5.1. INSPEKTORAT DAERAH

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) telah dilakukan pengawasan internal yang merupakan bagian dari fungsi manajemen pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional intern Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan mempunyai urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan umum guna mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah, yang didukung dalam program dan kegiatan.

1) Program dan Kegiatan

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Program utama yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.89 Program Pengawasan Utama Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	APBD Murni	APBD-P	Tolak Ukur Kinerja Keuangan	Target Kinerja Keuangan
1	2	3	4	5	6
Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	110.000.000	270.000.000	Terpenuhinya aparatur pemerintah yang bersertifikasi	20 Orang

No.	Program/Kegiatan	APBD Murni	APBD-P	Tolak Ukur Kinerja Keuangan	Target Kinerja Keuangan
Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal					
	Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan internal secara berkala	874.260.400	1.050.000.000	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagai bahan evaluasi	97 LHP
2	Pemutakhiran data dan tindak lanjut hasil pengawasan	122.206.200	145.000.000	Tersedianya Data dan Tindak Lanjut Hasil	67 Objek Pemeriksaan
Program Peningkatan dan Pembinaan Akuntabilitas Pemerintah Daerah					
1.	Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan	90.000.000	90.000.000	Terlaksananya Review sebagai bahan evaluasi terhadap Laporan Keuangan	1 Dokumen
2.	Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan	55.000.000	55.000.000	Terlaksananya reuiu sebagai bahan evaluasi kinerja	1 Dokumen
3.	Sosialisasi dan Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	359.321.600	359.321.600	Jumlah OPD Yang Bersih dari Pungli	100 Orang
4.	Pelaksanaan Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG)	61.000.000	61.000.000	Jumlah OPD Yang Bersih dari Gratifikasi	38 OPD
5.	Pelaksanaan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK	89.500.000	89.500.000	Tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan (Korsupgah) KPK	9 OPD
6.	Review Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan	65.000.000	65.000.000	Terlaksana nya Review sebagai bahan evaluasi kinerja	1 Dokumen

No.	Program/Kegiatan	APBD Murni	APBD-P	Tolak Ukur Kinerja Keuangan	Target Kinerja Keuangan
7.	Pelaksanaan Pendampingan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	396.000.000	396.000.000	Jumlah Pekerjaan Pembangunan Daerah terlaksana dengan baik	

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

(1) Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal

- a) Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan internal secara berkala merupakan kegiatan reguler pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan terhadap pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan target sebanyak 97 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Namun berdasarkan skala prioritas dalam pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan hanya melakukan pemeriksaan sebanyak 13 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Semester II Tahun 2019 dari 97 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atau 13,00%. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan internal secara berkala dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.901.084.470,- atau 85,82%.
- b) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut bertujuan untuk melakukan updating data temuan terhadap data yang sudah ditindaklanjuti. Data

temuan tersebut mencakup data Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pemutakhiran data tindak lanjut dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau per semester.

- c) Kegiatan Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.121.376.546,- atau 83,71%, hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemutakhiran data dan tindak lanjut hasil pengawasan yaitu dengan melakukan updating data temuan terhadap data yang sudah ditindaklanjuti. Data temuan tersebut mencakup data Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

(2) Program Peningkatan dan Pembinaan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

a) Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat 3 diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan revidi atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pelaksanaan review dilakukan terhadap laporan keuangan 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan

Kegiatan Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 63.421.000,- atau 70,47%.

b) Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan

Merupakan satu kegiatan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Review adalah penelaahan atas

laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Pihak yang melaksanakan review Laporan kinerja adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, dalam hal ini harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk itu. Waktu pelaksanaan review mencakup tahapan reviu laporan kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Review dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Review harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB RI. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk mereviu, telah melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan yang merupakan kompilasi dari 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.55.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 53.571.900,- atau 97,4%.

c) Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

Pada 38 OPD di Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan dalam hal ini peran APIP adalah

APIP mendorong Unit Kerja/OPD untuk menerapkan manajemen resiko dan pengendalian, APIP monitoring dan mengevaluasi Unit Kerja/OPD yang menerapkan manajemen resiko dan pengendalian, APIP mendorong perbaikan manajemen resiko dan pengendalian. Adapun tujuan dari pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada 38 OPD ini agar sebagai upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan menimbulkan efek jera.

Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.359.321.600,- dan realisasi sebesar Rp. 312.927.225,- atau 87,09%.

d) Pelaksanaan Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG)

Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan pasal 8 tentang susunan keanggotaan Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG). Kegiatan Pelaksanaan Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) di Pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.61.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.027.600,- atau 75,46%.

e) Pelaksanaan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK

Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 01 Tahun 2015 Organisasi dan

Tata Kerja KPK pasal 10 yakni Unit Kerja Korsupgah. Pelaksanaan kegiatan ini tujukan pada 9 (OPD) di Kabupaten Bintan dan Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Pemerintah Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.89.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 62.990.400,- atau 70,38%.

f) Review Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan

Merupakan satu kegiatan untuk membantu penyelenggaraan sistem pelaksanaan anggaran yang akuntabel pada instansi pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi anggaran Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Anggaran yang berkualitas. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan, dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk mereviu, telah melakukan reviu terhadap Laporan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan yang merupakan kompilasi dari 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Review Laporan Rencana Kerja Anggaran Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan dengan anggaran sebesar Rp.65.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 53.856.600,- atau 82,86%.

g) Pelaksanaan Pendamping Tim Pengawasan, Pengamanan Pembangunan Daerah (TP4D)

Merupakan satu kegiatan untuk membantu dalam hal pengawasan penyelenggaraan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan agar pembangunan di pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Nomor : KEP-05/N.10.15/TP4D/05/2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Bintan dengan anggaran sebesar Rp.396.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 225.979.897,- atau 57,07%.

(3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah

a. Evaluasi dan Pembinaan LAKIP OPD Tahun 2019

Dilaksanakan dengan melakukan asistensi yang difasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan diambil sampel sebanyak 27 (dua puluh tujuh) institusi yaitu Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, BKPSDM, Bapelitbangda, Dinas Pendidikan, BKAD, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPMPTSP, Setwan, Bakesbangpol, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas PUPR, Setda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bapenda, BPBD, DP3KB, Dinas Koperasi, UKM, Perindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:

- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Evaluasi Atas Implementasi SAKIP dilakukan melalui:

- **Evaluasi atas Komponen SAKIP**

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria- kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Unit kerja/OPD dalam menyusun, mereview dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil;
2. Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
3. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;

5. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
6. Capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi pemerintah/unit kerja/OPD;
7. Tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah/unit kerja/OPD;
8. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

▪ **Penilaian dan Penyimpulan**

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing- masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
 - Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria.
 - Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.90 Komponen Penilaian SAKIP

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2.	Pengukuran Kinerja	25	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan Kinerja	15	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4.	Evaluasi Kinerja	10	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5.	Capaian Kinerja	20	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
Total		100	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya.

Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan melalui tahapan Survei Pendahuluan dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Survei pendahuluan dilaksanakan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan evaluasi implementasi terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Setelah melaksanakan tahapan-tahapan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.91 Kategori dan Penilaian Angka

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	A A	>90 -100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	B B	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	C C	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

7.	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi SAKIP terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019, lihat data sebagai berikut :

Tabel 3.92 Hasil evaluasi SAKIP terhadap OPD dan Kategori Penilaian

No	Nama	Kategori
1	Inspektorat Daerah	A
2	Dinas Kesehatan	BB
3	BKPSDM	A
4	Bapelitbang	BB
5	Dinas Pendidikan	BB
6	BKAD	BB
7	Dinas Perikanan	A
8	Dinas Ketahanan Pangan dan	BB
9	DPMPTSP	BB
10	Sekretariat DPRD	BB
11	Bakesbangpol	BB
12	Dinas Sosial	BB
13	Dinas Perumahan dan Kawasan	BB
14	Dinas PUPR	BB
15	Sekretariat Daerah	BB
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BB
17	Dinas Kependudukan dan Pencacatan	BB
18	Dinas Perhubungan	BB
19	Satuan Polisi Pamong Praja	BB
20	Badan Pendapatan Daerah	A
21	BPBD	BB
22	DP3KB	BB
23	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	BB
24	Dinas Lingkungan Hidup	A
25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	BB
26	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BB
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	BB

b. Permasalahan dan Solusi

(1) Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal

a) Persentase rekomendasi temuan eksternal (BPK) yang ditindak lanjuti

Target Tahun 2019 sebesar 86,05 % dan capaian Tahun 2019 adalah sebesar 90,39 %. Sedangkan untuk Tahun 2018 target sebesar 85,45 % dengan capaian sebesar 85,72 %.

- Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator sasaran ini adalah:
 1. Jumlah Hasil Pemeriksaan BPK RI semakin bertambah yang merupakan jumlah akumulasi setiap tahunnya, disamping itu, OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI belum dilaksanakan secara tepat waktu.
 2. Masih kurang efektifnya OPD dalam menagih kepada pihak ketiga atas temuan kerugian negara/daerah.
- Solusi dalam mencapai indikator sasaran ini adalah:
 1. Bupati Bintan memberikan ketegasan (rewards and punishment) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal.
 2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Tabel 3.93 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Kabupaten Bintan

No.	Tahun Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Sesuai	Belum Sesuai	Belum di TL	Tidak Dapat di TL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2019	24	32	24	8	24	0	75,0
2.	2018	21	43	23	20	13	0	53,49
3.	2017	21	58	17	41	0	0	29,31
4.	2016	23	41	34	7	0	0	82,93
5.	2015	19	53	36	12	5	0	67,92
6.	2014	18	40	35	5	0	0	87,50
7.	2013	36	51	46	5	0	0	90,20
8.	2012	22	34	32	1	1	0	94,12
9.	2011	42	105	104	1	0	0	99,05
10.	2010	33	60	60	0	0	0	100,00
11.	2009	30	45	43	2	0	0	95,56
12.	2008	27	44	44	0	0	0	100,00
13.	2007	14	29	29	0	0	0	100,00
J U M L A H		330	635	574	60	44	0	90,39

Dari Tabel 3.93 di atas terlihat bahwa dari temuan sebanyak 330 temuan, 635 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi atau selesai sebanyak 574 rekomendasi, dalam proses atau belum sesuai sebanyak 60 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 44 rekomendasi, dengan persentase capaian sebesar 90,39%.

b) Persentase Rekomendasi Temuan Internal yang Ditindak Lanjuti

Target Tahun 2019 sebesar 89.40 % dan capaian Tahun 2019 adalah sebesar 87,93%.

- Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator sasaran ini adalah :
 1. Dalam hal ini objek pemeriksaan (OPD) telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan baik, namun masih ada OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan belum sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
 2. Kurang tanggapnya OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
- Solusi dalam mencapai indikator sasaran ini adalah:
 1. Bupati Bintan memberikan ketegasan (*rewards and punishment*) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal.
 2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Tabel 3.94 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah

No	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai		Belum Sesuai		%
		Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
1.	2019	133	410.825.210,0	133	410.825.210,0	25	764.800,00	111	410.060.410,0	19%
2.	2018	195	37.428.777,00	195	37.428.777,00	74	29.976.869,00	120	7.451.908,00	38%
3.	2017	144	123.316.703,0	137	123.316.703,0	121	75.662.804,00	23	47.653.899,00	88%
4.	2016	112	-	112	-	87	-	25	-	78%
5.	2015	109	4.642.066,00	116	4.642.066,00	98	4.642.066,00	9	-	84%
6.	2014	119	181.028.971,0	130	181.028.971,0	122	170.689.093,0	8	10.339.878,00	94%
7.	2013	130	49.587.553,00	158	49.587.553,00	127	49.162.472,00	31	425.081,00	80%
8.	2012	170	109.916.323,0	181	109.916.323,0	172	73.230.905,00	9	36.685.418,00	95%
9.	2011	248	827.828.099,0	297	827.828.099,0	285	365.973.099,0	12	461.855.000,0	96%
10.	2010	356	1.050.386.575,	427	1.050.386.575,	410	618.999.190,0	17	431.387.385,0	96%
11.	2009	308	453.340.824,0	384	453.340.824,0	377	453.340.824,0	7	-	98%
12.	2008	251	679.703.388,0	287	679.703.388,0	286	620.683.744,0	1	59.019.644,00	100%
13.	2007	241	443.449.848,0	267	443.449.848,0	260	399.481.051,0	7	43.968.797,00	97%
14.	2006	186	1.092.499.971,	194	1.092.499.971,	191	376.070.088,0	3	716.429.883,0	98%
15.	2005	346	4.260.036.487,	370	4.260.036.487,	344	4.066.342.266,	26	193.694.221,0	93%
Jumlah		3048	9.723.990.795,00	3.388	9.723.990.795,00	2.979	7.305.019.271,00	409	2.418.971.524,00	87,93

Dari Tabel 3.94 terlihat bahwa dari temuan sebanyak 3048 temuan, 3388 rekomendasi, telah ditindaklanjuti atau selesai sebanyak 2979 temuan, dalam proses sebanyak 409 temuan, dengan persentase capaian sebesar 87.93%.

(2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

a) Jumlah OPD Yang Mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal Kategori CC

Target tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) OPD dan capaian Tahun 2019 adalah sebanyak 27 (duapuluh tujuh) dengan kategori komulatif “A” dan “BB”.

- Hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan dalam mencapai indikator sasaran ini adalah:
 1. Masih banyak penetapan indikator kinerja yang sulit diukur,
 2. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran.
 3. Sebagian indikator kinerja belum didukung oleh data yang informatif dan memadai, andal, serta akurat, yang mengarah pada pencapaian sasaran yang diinginkan.
 4. Sebagian angka realisasi dari indikator kinerja belum dijelaskan secara rinci dari mana perhitungannya, sehingga menyulitkan dalam menelusuri angkanya. Dalam penyajian Laporan Kinerja (LKJ) disarankan untuk mempergunakan hanya realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, jangan menggunakan angka yang tidak dapat ditelusuri dan tidak andal, serta lemah akurasinya.
 5. Angka realisasi dari indikator kinerja yang disajikan di dalam Laporan Kinerja (LKj) disarankan untuk lebih banyak dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan upayakan untuk melakukan perbandingan dengan Kab/Kota

lain di Provinsi Kepulauan Riau, serta berikan analisis yang memungkinkan.

- Solusi dalam mencapai indikator sasaran ini adalah:
 1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti saran dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
 2. Mengumpulkan data yang informatif dan memadai, andal, serta akurat, yang mengarah pada pencapaian sasaran yang diinginkan.
 3. Memanfaatkan IKU di dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
 4. Memperkuat analisis data yang diberikan/ disajikan di dalam Laporan Kinerja.

(3) Program Peningkatan Pembinaan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

a) Persentase OPD yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dapat dilihat melalui data berikut:

- Sesuai Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 disebutkan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara luas dikoordinasikan oleh Menteri dan untuk daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati / Wakil Walikota. Pencapaian OPD yang berhasil mencapai target kinerja yang

ditetapkan, dapat terlihat melalui Hasil Tindak Lanjut hasil Pengawasan Eksternal (BPK-RI) (Tabel II.5) dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah (Tabel II.6), serta Hasil evaluasi SAKIP terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.95 Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019

No	Nama OPD	Hasil Penilaian	Kategori
1.	Inspektorat Daerah	82,39	A
2.	Dinas Kesehatan	77,99	BB
3.	BKPSDM	81,21	A
4.	Bapelitbang	79,39	BB
5.	Dinas Pendidikan	78,32	BB
6.	BKAD	79,71	BB
7.	Dinas Perikanan	80,01	A
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	77,36	B
9.	DPMPTSP	79,21	BB
10.	Sekretariat DPRD	77,65	B
11.	Bakesbangpol	77,82	BB
12.	Dinas Sosial	77,87	BB
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	77,68	B
14.	Dinas PUPR	78,47	BB
15.	Sekretariat Daerah	78,38	BB
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	78,04	BB
17.	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	78,16	BB

No	Nama OPD	Hasil Penilaian	Kategori
18.	Dinas Perhubungan	78,11	BB
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	77,77	BB
20.	Badan Pendapatan Daerah	81,04	A
21.	BPBD	77,41	BB
22.	DP3KB	78,54	BB
23.	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	77,80	B

Dari data tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 94,08% ($(100 \% + 100 \% + 98,36\% + 100 \%) / 4$).

3.1.4.3 Urusan Pemerintah Daerah Fungsi Perencanaan

3.1.4.3.1 bapelitbang

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Tiga** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2019, pemerintah Kabupaten Bintan berpedoman kepada RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019. Proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan selalu dalam koridor mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dokumen perencanaan akan menjadi acuan seluruh OPD di Kabupaten Bintan dalam membangun Kabupaten Bintan.

Capaian kinerja **Urusan Perencanaan Pembangunan** dicapai melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) **Program Pengembangan Data dan Informasi**

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 815.479.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 681.108.367,- atau 83,52%. *Outcome* Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah yang baik. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. **Pelaksanaan Program**

(1) **Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDA)**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.314.278.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 268.092.240,- atau 85,30%. *Output* dari kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bintan diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk menyusun rencana kegiatan bagi tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bintan melalui inovasi.

(2) **Peningkatan dan Penyusunan Sistem Peragaan Data Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 107.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.174.675,- atau 86,90%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen/visualisasi pembangunan dalam bentuk mobile application/Android mobile app Web dan IOS; serta pemeliharaan mobile apps yang telah ada saat ini.

(3) **Pengembangan data website Bapelitbang Kabupaten Bintan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.98.782.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.886.000,- atau 94,03%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen/visualisasi pembangunan dalam bentuk mobile

(4) Updating data System Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 95.199.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.280.195,- atau 70,67%. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga data SIPD dimanfaatkan untuk (1) Publikasi keberhasilan pembangunan daerah; (2) Salah satu rujukan dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah; (3) Salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah; serta (4) Publikasi SIPD Nasional.

(5) Penyusunan Capaian Pembangunan Bintang Gemilang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.200.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.675.257,- atau 79,84%. *Output* dari kegiatan ini adalah kegiatan berupa Dokumen Capaian Pembangunan Bintang Gemilang yang dilengkapi dengan Dokumentasi Visual hasil pelaksanaan pembangunan dari tahun 2016-2019 (Triwulan III).

Capaian Indikator Kinerja tahun 2019 untuk program ini adalah :

- (1) Persentase Tingkat Keterisian data SIPD:** Untuk tahun 2019 indikator ini mencapai 90%.

(2) Tingkat kepuasan pengguna informasi atas data/informasi pembangunan daerah bintang yang disajikan dalam website Pemkab/Bappeda Bintang: Untuk tahun 2019 indikator ini mencapai 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintang** melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.942.564.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.473.128.568,- atau 75,83%. *Outcome* dari program ini adalah terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah yang baik.

a. Pelaksanaan Program

(1) Penyusun Rancangan RKPD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 345.632.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 280.664.527,- atau 81,20%. *Output* dari kegiatan ini adalah 2 (dua) dokumen tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dokumen RKPD tahun 2020 dan perubahan RKPD tahun 2019.

(2) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan Rp. 213.560.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.071.875,- atau 64,65%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen tentang Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tahun

2020 sehingga tersedianya rencana program dan kegiatan kecamatan tahun 2020 melalui asistensi Bapelitbang pada acara musrenbang di 10 Kecamatan.

(3) Penyelenggaraan Forum SKPD

Anggaran sebesar Rp. 204.198.000,- dialokasikan untuk kegiatan ini, dengan realisasi sebesar Rp. 164.489.970,- atau sebesar 80,55%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan Forum SKPD yang diikuti oleh 38 OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sehingga tersedianya rumusan akhir rencana kerja OPD tahun 2020.

(4) Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.368.522.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.321.537.250,- atau 87,25%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen tentang Rencana Program dan Kegiatan di Kabupaten Bintan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kabupaten yang diikuti unsur OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, DPRD, KADIN, Tokoh Masyarakat, PMDN, Ormas dengan jumlah peserta 200 Orang.

(5) Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBAGDA)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.274.032.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.191.839.117,- atau 70,01%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) sistem sehingga terlaksananya pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBAGDA) 2016 – 2020.

(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 266.730.000,- dan realisasi sebesar Rp. 204.783.950,- atau 76,78%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan sehingga tercapainya konsistensi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bintan.

(7) Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan yang Bersumber dari Pendanaan Provinsi dan Pusat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.269.890.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.171.741.879,- atau 63,63%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan yang Bersumber dari Pendanaan Provinsi dan Pusat. sehingga terwujudnya perencanaan daerah yang handal di Kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2018 untuk program ini adalah **Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan:** untuk tahun 2019 indikator ini menghasilkan 2 (dua) dokumen perencanaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu RKPD 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2019 pada tanggal 28 Juni 2019 dan RKPD Perubahan 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 2019 pada tanggal 19 Juni 2019.

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

3) Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.

138.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.749.225,- atau 74,32%. *Outcome* Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah yang baik.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Survey Perencanaan Pembangunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. Rp.138.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.749.225,- atau 74,32%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen tentang pelaksanaan survey lokasi pembangunan di 10 Kecamatan untuk Tahun Anggaran 2020 sehingga Meningkatnya Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah **Jumlah Pengembangan Inovasi Yang Dihasilkan:** Setelah dilakukan survey pada tahun 2019 tidak ditemukan aktivitas pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

4) Program Perencanaan Pembangun Ekonomi

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan melalui 9 (sembilan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.934.438.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.453.612.655,- atau 75,14%. *Outcome* yang ingin dicapai pada program ini adalah tersedianya meningkatnya persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam

RKPD bidang perekonomian dan meningkatnya persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD bidang perekonomian.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pengendalian dan Evaluasi Program-program Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.221.067.400,-, anggaran tersebut hanya dapat terserap sebesar Rp.152.487.825,- atau sebesar 68,98%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen tentang Pengendalian dan Evaluasi Program-program Pembangunan Ekonomi Masyarakat

(2) Penyusunan Analisa Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.174.506.000,- dan realisasi sebesar Rp.156.279.015,- atau 89,56%. *Output* kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen tentang Analisa Indikator Pertumbuhan Ekonomi di 10 Kecamatan sehingga tersediannya Data Analisa Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Bintan.

(3) Potret Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.342.000,-, anggaran tersebut hanya dapat terserap sebesar Rp.146.715.450,- atau sebesar 88.73%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen tentang Potret Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan sehingga tersediannya Data Pembangunan Manusia di Kabupaten Bintan.

(4) Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.331.667.400,- dan realisasi sebesar Rp.300.793.910,- atau 90,69%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu)

dokumen yang berisi tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD).

(5) Pengendalian dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.112.110.000,- dan realisasi sebesar Rp.73.937.805,- atau 65,95%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan tentang Pengendalian dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan terintegrasinya program-program penanggulangan Kemiskinan secara efektif dan efisien yang bersumber dari dana *cost sharing* Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi pembangunan serta pelaksanaan monitoring di 10 Kecamatan.

(6) Rakor program perencanaan Bidang Daya Saing dan Ekonomi Kerakyatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.164.732.000,-. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.110.718.225,- atau 67,21%. *Output* dari kegiatan ini adalah Pemahaman yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016–2021, sinkronisasi program dan kegiatan sebagai usulan rencana kegiatan.

(7) Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) di Kabupaten Bintan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.247.608.000,-. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.182.114.910,- atau 73,55%. *Output* dari kegiatan ini

adalah 1 (satu) laporan tentang Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) di Kabupaten Bintan.

(8) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bintan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.217.405.400,-. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.167.010.525,- atau 76,82%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bintan.

(9) Pemetaan Kemiskinan Berbasis WEB/Teknologi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.300.000.000,-. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp.163.554.990,- atau 54,52%. *Output* dari kegiatan ini adalah acuan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk menyusun rencana kegiatan bagi tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertujuan meningkatkan perekonomian kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

- (1) Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD bidang perekonomian: Pada tahun 2019, persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD bidang perekonomian mencapai 100%.
- (2) Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD bidang perekonomian: Pada tahun 2019, persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD bidang perekonomian mencapai 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti

sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

5) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan SDA

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 919.325.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 659.774.810,- atau 71,77%. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bintan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Koordinasi Sub Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.100.000,- dan realisasi sebesar Rp.114.084.675,- atau 68,68%. Kegiatan Koordinasi Sub Bidang Lingkungan Hidup adalah wadah koordinasi dalam penyusunan rencana maupun pada pelaksanaan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup. Oleh karena diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan pada tahun – tahun kedepan dalam rangka membangun koordinasi yang kuat dan sistematis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian, Lembaga Pemerintah lainnya serta stakeholder dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Bintan.

(2) Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.322.125.000,- realisasi sebesar Rp.280.594.975,- atau 84,48%. *Output* dari kegiatan ini adalah mewujudkan

keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Bintan, keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya dan mewujudkan perencanaan wilayah dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas

(3) Penunjang Kegiatan Pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Kabupaten Bintan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.550.000,- realisasi sebesar Rp.108.637.995,- atau 71,21%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan rapat-rapat koordinasi pembangunan perumahan, kawasan permukiman, air minum dan sanitasi (PPAS) Kabupaten Bintan.

(4) Sosialisasi Perencanaan Penataan Wilayah Kabupaten Bintan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.050.000,- realisasi sebesar Rp. 32.609.940,- atau 26,72%. *Output* dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang serta memaparkan hasil tahapan proses penyusunan RTRW Kabupaten Bintan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2019. Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 26,72 %.

Meskipun serapan anggaran untuk kegiatan ini kecil, tetapi output dari kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan sasaran penerima sosialisasi diperluas ke seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bintan (baik pemerintah, swasta maupun masyarakat).

(5) Review dokumen RAD AMPL Kabupaten Bintan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 123.847.225,- atau 84,54%. *Output* dari kegiatan ini adalah sebagai acuan OPD dan *stake Holder* terkait dalam menyusun perencanaan tahunan sebagai penguatan procedural dan komitmen dukungan pendanaan dari eksternal, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bantuan luar negeri, masyarakat dan atau kerjasama dengan swasta serta semua pihak yang peduli terhadap pengembangan sektor air minum dan sanitasi.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

- (1) Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD bidang pembangunan infrastruktur dan SDA:** Pada tahun 2019, persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD bidang infrastruktur dan SDA mencapai 100%.
- (2) Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD bidang infrastruktur dan SDA:** Pada tahun 2019, persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD bidang infrastruktur dan SDA mencapai 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan SDA tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.

527.244.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 320.653.509,- atau 60,82%. *Outcome* dari program ini adalah Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.358.000,- dan realisasi sebesar Rp. 135.195.802,- atau 77,10%. *Output* dari kegiatan ini adalah **Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Desa** 36 Desa dengan 4 kali pelaksanaan sinkronisasi program dan kegiatan-kegiatan.

(2) Rapat koordinasi Sub Bidang Pemerintahan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 222.434.000,- dan realisasi sebesar Rp. 185.457.707,- atau 83,38%. *Output* dari kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi bagi 20 OPD dibawah Bidang Pemerintahan Umum yang menaganinya berkaitan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan OPD terkait.

(3) Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 222.434.000,- dan realisasi sebesar Rp. 185.457.707,- atau 83,38%. *Output* dari kegiatan ini adalah Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) sesuai dengan Aksi yang sudah ditetapkan pada tahun 2019, dimana ada kewajiban Kab/ Kota untuk melaksanakan pelaporan. Salah satu indikator kab/kota Layak HAM juga berdasarkan pelaporan RAN-HAM

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

(1) Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD bidang pemerintahan:

Pada tahun 2019, persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD bidang pemerintahan mencapai 100%.

(2) Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD bidang pemerintahan:

Pada tahun 2019, persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD bidang pemerintahan mencapai 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan daerah bawahan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

7) Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten** Bintan melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 680.499.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 572.751.793,- atau 84,17%. *Outcome* meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

(1) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.258.782.500,- dan realisasi sebesar Rp.224.210.259,- atau 86.64%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan di 10 Kecamatan di Kabupaten Bintan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun serta evaluasi pembangunan daerah yang

dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Bintan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun sehingga meningkatnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan yang bersumber anggaran APBD.

(2) Penyusunan Laporan Bulanan OPD

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.482.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.573.300,- atau 88,09% *Output* dari kegiatan ini terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan OPD serta terintegrasinya data laporan progres fisik dan keuangan kegiatan bulanan 36 OPD kedalam Sistem Informasi Manajemen Monitoring Dan Evaluasi (SIMONEV) sehingga terlaksananya pengendalian pembangunan daerah.

(3) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 196.385.000,- dan realisasi sebesar Rp. 171.016.650,- atau 87,08%. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017. Hasil dari kegiatan ini adalah tersampainya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD, tepat pada waktunya sesuai yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Bintan yang bersumber dari dana APBD melalui konsolidasi data bersama dengan OPD terkait.

(4) Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.116.840.000,- dan realisasi sebesar Rp.81.951.584,- atau 70,14%. *Output* dari kegiatan ini adalah Evaluasi hasil RKPD untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran. Hasil yang diharapkan pelaksanaan kegiatan evaluasi RKPD adalah terhimpunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

- (1) Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Dengan Pelaksanaan Dilapangan:** Tingkat kesesuaian ini dilihat dari capaian realisasi fisik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD berbanding dengan target yang telah ditetapkan. Dari seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2019 mencapai %.
- (2) Prosentase Dokumen Pelaporan Yang disusun Tepat Waktu:** Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu pada 38 OPD di Kabupaten Bintan sudah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2019.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

8) Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 601.569.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 505.066.995,- atau 83,96%. *Outcome* meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan bidang sosial dan Budaya.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp. 327.169.500,-, dengan realisasi sebesar Rp. 291.894.900,- atau sebesar 89,22%. *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat dengan baik dapat dibuktikan dengan Kabupaten Bintan yang mendapat penghargaan **Swasti Saba Kategori Wiwerda Tingkat Nasional sebagai salah satu Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia.**

(2) Rakor Sub Bidang Sosial Budaya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.145.200.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.96.671.630,- atau sebesar 66,58%. *Output* dari kegiatan ini adalah untuk mengkoordinasikan penyusunan renja OPD terkait secara vertikal horizontal.

Sasaran kegiatan ini adalah penyusunan program OPD dibawah koordinasi:

- a) Dinas DP3KB.

- b) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- c) Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
- d) Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- e) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan.
- f) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan.
- g) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.

(3) Penyusunan data terpilah untuk penganggaran yang responsive gender

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.129.200.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.116.500.465,- atau sebesar 90,17%. Output dari kegiatan ini adalah :

- a) Untuk memberikan informasi terbaru database menyangkut isu dan permasalahan gender di kabupaten Bintan.
- b) Untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan dan gender perencanaan dan pelaksanaan pembangunan evaluasi program dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- c) Untuk mendukung kesediaan data yang terkait dengan gender di kabupaten Bintan.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

(1) Persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD bidang sumber daya manusia: Pada tahun 2019, persentase usulan melalui mekanisme perencanaan yang diakomodir dalam RKPD bidang pembangunan manusia mencapai 100%.

(2) Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD bidang sumber daya manusia: Pada tahun 2019,

persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD bidang pembangunan manusia mencapai 100%.

b. Permasalahan dan Solusi

- a) Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan daerah bawahan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
- b) Ketercapaian pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya pada tahun 2019 sebesar 75% dari yang ditargetkan 100% ketercapaian. Hal ini dikarenakan jumlah kegiatan yang dianggarkan hanya tiga kegiatan, sedangkan target yang ingin dicapai berjumlah 4 (empat) dokumen perencanaan sosial budaya.

9) Program Penelitian Perencanaan Pembangunan

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan** melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 214.906.540,- atau 85,96%. *Outcome* meningkatnya kapasitas penelitian pembangunan daerah.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-, anggaran tersebut hanya dapat terserap sebesar Rp. 178.638.030,- atau sebesar 89,32%. *Output* dari kegiatan ini adalah Dokumen pedoman dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) Penelitian dan Pengkajian aspek pembangunan Bintang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 401.288.000,-, anggaran tersebut hanya dapat terserap sebesar Rp. 360.985.920,- atau sebesar 89,96%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih sesuai visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bintang 2016-2021.

(3) Penyusunan rencana induk Kelitbangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.758.000,-, anggaran tersebut hanya dapat terserap sebesar Rp. 221.770.190,- atau sebesar 90,24%. *Output* dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen tentang dalam mewujudkan keunggulan kelitbangan dan inovasi di daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelitbangan, dan mengefisiensikan tata kelola kelitbangan di Bapelitbang Kabupaten Bintang, Penyusunan rencana jangka menengah tentang kelitbangan, baik kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

(4) Penyelenggaraan rapat koordinasi teknis penelitian dan pengembangan

Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, yang dialokasikan untuk kegiatan ini dapat terserap sebesar Rp. 214.906.540,- atau 85,96%. *Output* dari kegiatan ini adalah Meningkatkan pemahaman akan penyelenggaraan fungsi kelitbangan sesuai permendagri nomor 17 tahun 2016, sinergisitas perencanaan kelitbangan, wadah komunikasi dan peningkatan inovasi daerah dengan mempelajari

inovasi daerah lain yang terus berkembang serta terpublikasi.

Capaian Indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah: **Jumlah Penelitian Yang Dihasilkan.** Target yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 untuk Program Penelitian Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2019 ialah 1 (satu) penelitian dari kegiatan Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan Bintan, yaitu Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan dan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bintan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Program Penelitian Perencanaan Pembangunan tidak terdapat permasalahan maupun kendala yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian terhadap Pemkab Bintan perlu disebarakan secara luas dalam bentuk jurnal maupun buletin.

3.1.4.4 Urusan Pemerintah Daerah Fungsi Penunjang Keuangan

3.1.4.4.1 Bapenda

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Permendagri Nomot 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Adapun pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan melalui 13 (tiga belas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 2.739.192.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.486.429.014,- atau 90,77%. *Outcome* Meningkatnya penerimaan dan pengamanan keuangan daerah sesuai target.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelayanan Pendaftaran, Pendataan Dan Penagihan Pajak Daerah Untuk Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong Dan Kecamatan Seri Kuala Lobam

Dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 103.554.800,- realisasi sebesar Rp. 77.046.555,- atau 74.40%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelayanan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah di wilayah UPT Pelayanan Tanjung Uban dan Tersedianya data wajib pajak dan objek pajak daerah yang akurat dalam peningkatan penerimaan pajak daerah di wilayah kerja UPT Pelayanan Tanjung Uban. Berikut hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Untuk Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong Dan Kecamatan Seri Kuala Lobam :

a) Penggalian Pajak Daerah (Penagihan dan pemungutan Pajak Daerah)

Penggalian Pajak Daerah dilakukan untuk mencari Wajib Pajak baru, maupun sumber penerimaan Pajak

yang belum tergali. Pada tahun 2019, penggalian pajak yang telah dilakukan berupa :

- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Reklame, dengan melakukan pemeriksaan dan pengukuran Objek yang akan di daftarkan.
- Pendataan dan Penagihan/pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Tanah Urug).
- Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak PBB-P2 baru, Mutasi dan Pembetulan dengan melakukan pemeriksaan lapangan Objek pajak PBB-P2 yang akan didaftarkan.
- Pendataan dan Pendaftaran Wajib pajak Restoran dan Sarang Burung Walet dengan mengambil dokumen persyaratan pendaftaran untuk dapat segera dikukuhkan menjadi objek pajak restoran.

Tabel 3.96 Pendapatan Pajak Daerah Uptd Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Tanjung Uban

No.	Jenis Pajak	Pajak Daerah Yang diterima
1.	Pajak Hotel Melati Satu	Rp. 80,566,500,-
2.	Pajak Restoran/Rumah Makan/Kedai Kopi/cafe	Rp. 133,705,000,-
3.	Pajak Sarang Burung Walet	Rp. 2,280,000,-
4.	Pajak Reklame	Rp. 123,617,195,-
5.	Pajak Hiburan	Rp. 108,065,396,-
6.	Pajak Mineral bukan logam dan Batuan	Rp. 25,470,000,-
J U M L A H		Rp. 473,428,646,-

b) Pendataan Objek Pajak Reklame

Kegiatan Pendataan Objek Pajak Reklame Tetap/Objek Pajak Reklame papan, di lakukan bertujuan untuk menjaring semua Reklame Tetap, yang ada agar terdaftar dan dapat di tagih Pajak Reklamenya.

Adapun sasaran pendataan Pajak Reklame tetap tersebut, adalah Reklame, Baleho, Shop Sigh, Neon Box ATM Bank, dan Reklame menara. Pada Tahun 2019 Objek Pajak Reklame Tetap dan terdata Baru berjumlah 68 Objek Pajak, dengan jumlah Pajak Reklame yang dapat di tagih sebesar Rp. 118,904,875,- (Seratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) Serta denda keterlambatan pembayaran yang dapat ditagihkan sebesar Rp. 275,445,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Tabel 3.97 Rekapitulasi Pajak Reklame Tahun 2019
UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Uban

No	Nama Wajib Pajak	Pajak Yang Di Bayarkan	Denda
1	PT.BANK RIAU CAB PEMBANTU TG.UBAN	Rp. 1,211,250	
2	PT.BANK RIAU CAB PEMBANTU TG.UBAN	Rp. 1,561,250	
3	PT.BANK RIAU CAB PEMBANTU TG.UBAN	Rp. 3,065,625	
4	PT.KIMIA FARMA APOTEK	Rp. 1,282,500	
5	PT.KIMIA FARMA APOTEK	Rp. 3,656,250	
6	PT.KIMIA FARMA APOTEK	Rp. 1,353,750	
7	SUNG FRIED CHICKEN	Rp. 1,701,750	
8	SUNG FRIED CHICKEN	Rp. 3,765,000	
9	PT.BANK MANDIRI PERSERO	Rp. 2,021,250	
10	PT.BANK MANDIRI PERSERO	Rp. 1,165,000	
11	PT.BANK MANDIRI PERSERO	Rp. 1,165,000	
12	PT.BANK MANDIRI PERSERO	Rp. 1,533,750	
13	PT.BANK MANDIRI PERSERO	Rp. 1,165,000	
14	PT.BANK MANDIRI PERSERO	Rp. 883,750	
15	PT.BANK SYARIAH MANDIRI	Rp. 1,380,000	
16	PT.BANK SYARIAH MANDIRI	Rp. 787,500	
17	PT.BANK SYARIAH MANDIRI	Rp. 761,250	
18	PT.BANK SYARIAH MANDIRI	Rp. 755,000	
19	PT.BANK SYARIAH MANDIRI	Rp. 1,258,750	
20	PT.TELESINDO SHOP (TDC)	Rp. 2,192,500	
21	TRI PUTRA PAINT	Rp. 3,783,750	
22	TRI PUTRA PAINT	Rp. 2,217,500	
23	TRI PUTRA PAINT	Rp. 1,367,500	
24	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (TG.SELATAN)	Rp. 1,692,500	
25	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (TG.SELATAN)	Rp. 1,692,500	
26	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (ANDRAWIKA)	Rp. 1,692,500	
27	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (ANDRAWIKA)	Rp. 1,339,250	
28	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (TG.SELATAN)	Rp. 1,339,250	
29	PT.AGUNG AUTO MALL	Rp. 1,521,250	
30	PT.SURYA BUANA BINTAN	Rp. 1,106,250	
31	PT.SURYA BUANA BINTAN	Rp. 1,106,250	
32	PT.SURYA BUANA BINTAN	Rp. 1,106,250	
33	OPTIK OVA	Rp. 988,750	

No	Nama Wajib Pajak	Pajak Yang Di Bayarkan	Denda
34	PT.BCA KCP TG.UBAN	Rp. 1,503,750	
35	SENI PHOTO	Rp. 1,140,000	
36	PT.SELARAS PRIMA MANDIRI	Rp. 2,396,875	
37	PT.SUBUR INTI SURYA GAS	Rp. 2,396,875	
38	PERUM PEGADAIAN / UPC PERMAISURI	Rp. 1,188,750	
39	PERUM PEGADAIAN / UPC PERMAISURI	Rp. 2,554,000	
40	TOKO GLORY OPTICAL	Rp. 937,750	
41	PT.ANEKA CIPTA JAYA SUKSES	Rp. 2,048,750	
42	PT.ANEKA CIPTA JAYA SUKSES	Rp. 2,778,750	
43	KSP MAKMUR MANDIRI CAB TG.UBAN	Rp. 993,750	
44	PT.INDOPROF MOTOR SEJATI	Rp. 3,672,500	
45	PT.INDOPROF MOTOR SEJATI	Rp. 5,583,750	
46	CV.ASLI MOTOR	Rp. 1,078,125	
47	TOKO SUNG JAYA (JOTUN)	Rp. 1,645,000	
48	TOKO SUNG JAYA (SIGNATURE)	Rp. 1,595,000	
49	TOKO SUNG JAYA (MOWILEX)	Rp. 1,645,000	
50	TOKO SUNG JAYA (SEIWXURIOUS)	Rp. 1,595,000	
51	TOKO SUNG JAYA (ARWANA TILES)	Rp. 1,595,000	
52	PT.TELESINDO SHOP (TELKOMSEL)	Rp. 1,460,000	
53	PT.TELESINDO SHOP (TELKOMSEL)	Rp. 1,283,750	
54	PT.KARYA PUTRA BINTAN (DEVLOPER)	Rp. 1,890,000	
55	PT.KARYA PUTRA BINTAN (DEVLOPER)	Rp. 1,481,250	
56	PT.KARYA PUTRA BINTAN (DEVLOPER)	Rp. 2,133,750	
57	PT.BINTAN PERSADA SUKSES INDO (DEVLOPER)	Rp. 3,555,000	
58	PT.BANK MAYBANK INDONESIA TBK	Rp. 1,168,750	
59	PT.BANK MAYBANK INDONESIA TBK	Rp. 1,193,500	
60	SWALAYAN PRIMA INDAH	Rp. 2,208,750	
61	SWALAYAN PRIMA INDAH	Rp. 2,228,125	
62	SWALAYAN PRIMA INDAH	Rp. 2,208,750	
63	SWALAYAN PRIMA INDAH	Rp. 2,228,125	
64	SUNG BAKERY & CAKE	Rp. 4,171,250	
65	PT.BANK TABUNGAN MANDIRI	Rp. 1,878,750	
66	PT.BFI FINANCE INDONESIA TBK	Rp. 1,123,750	Rp. 44.950
67	REILLY AUTO BAN	Rp. 1,530,000	Rp. 275,400
68	PT.BANK TABUNGAN MANDIRI	Rp. 1,630,000	

No	Nama Wajib Pajak	Pajak Yang Di Bayarkan	Denda
	J U M L A H	Rp. 123,341,750	Rp. 275,445

(2) Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Untuk Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 96.865.600,- realisasi sebesar Rp. 58.341.469,- atau 60.23%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Terlaksananya pelayanan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah di wilayah UPT Pelayanan Kijang dan Tersedianya data wajib pajak dan objek pajak daerah yang akurat dalam peningkatan penerimaan pajak daerah di wilayah kerja UPT Pelayanan Kijang.

Adapun Hasil yang dicapai dari kegiatan Pelayanan Pendaftaran, Pendataan Dan Penagihan Pajak Daerah Untuk Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang sebagai berikut :

a) Monitoring dan pengawasan Objek pajak Reklame

Pelaksanaan Kegiatan monitoring dan pengawasan ini dilakukan dalam rangka pendataan ulang terhadap objek pajak reklame yang berada diwilayah Kecamatan Bintan Timur sebagai berikut:

- Reklame yang terpasang dan masa pajaknya masih berlaku sebanyak 16 Objek pajak.
- Reklame yang terpasang namun berakhir masa pajaknya sebanyak 57 Objek pajak.

b) Pengawasan Objek Pajak Hotel dan Restoran

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap objek pajak Hotel dan Restoran sebagai berikut :

- Objek pajak Hotel sebanyak 4 Objek pajak
- Objek pajak restoran sebanyak 73 Objek pajak.
- Pendataan dan Penggalian Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendataan dan Penggalian objek pajak ini dilakukn dalam rangka pendataan ulang terhadap objek pajak baru yang bertujuan untuk mendapatkan data objek dan subjek pajak yang akurat yang ada diwilayah kerja UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kijang sebagai berikut :

- a) Kecamatan Bintan Timur sebanyak 2 objek data baru.
- b) Kecamatan Tambelan sebanyak 16 objek data baru.
- c) Kecamatan Bintan Pesisir sebanyak 15 objek data baru.
- d) Kecamatan Mantang sebanyak 4 objek data baru.
- e) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan berkenaan pelayanan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD Bapenda Kijang kepada setiap Desa / Kelurahan yang menjadi wilayah kerja UPTD Bapenda Kijang, kegiatan ini dilakukan dengan cara koordinasi kepada petugas PBB di masing – masing Kelurahan/ Desa.
- f) Melakukan penyampai surat tagihan pajak daerah dan melakukan penagihan ke wajib pajak sebanyak 44 Surat Tagihan Pajak Daerah.
- g) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui spanduk terkait pembayaran pajak daerah dapat

diterima oleh bendahara pembantu penerima di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah – Kijang.

(3) Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Untuk Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Toapaya

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Kawal Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 107.473.600,- realisasi sebesar Rp. 89.697.834,- atau 83.46%. *Output* dan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah Terlaksananya pelayanan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah di wilayah UPT Pelayanan Kawal dan Tersedianya data wajib pajak dan objek pajak daerah yang akurat dalam peningkatan penerimaan pajak daerah di wilayah kerja UPT Pelayanan Kawal.

a) Realisasi Penerimaan Pendapatan

Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2019 realisasi penerimaan pendapatan yang dilakukan UPT Pelayanan Kawal melalui kegiatan Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Untuk Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Toapaya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.98 Realisasi Pemungutan Pajak UPT Kawal Bulan Januari s/d Desember 2019

No	Bulan	Jumlah Pajak yang dipungut/ditagih UPT Pendapatan BAPENDA Kawal			
		Kec. Gunung Kijang	Kec. Teluk Bintan	Kec. Toapaya	Jumlah
1	Januari 2019	Rp 24.203.734	Rp 3.277.382	Rp 15.021.416	Rp 42.502.532
2	Februari 2019	Rp 27.384.646	Rp 3.874.517	Rp 2.171.592	Rp 33.430.755
3	Maret 2019	Rp 24.648.571	Rp 3.862.805	Rp 4.576.125	Rp 33.087.501
4	April 2019	Rp 20.321.080	Rp 10.779.787	Rp 3.399.116	Rp 34.499.983
5	Mei 2019	Rp 17.135.006	Rp 3.809.306	Rp 4.251.254	Rp 25.195.566
6	Juni 2019	Rp 22.793.362	Rp 5.755.367	Rp 6.428.483	Rp 34.977.212
7	Juli 2019	Rp 24.452.999	Rp 8.349.784	Rp 24.549.822	Rp 57.352.605
8	Agustus 2019	Rp 29.188.000	Rp 18.892.374	Rp 9.965.751	Rp 58.046.125
9	September 2019	Rp 21.819.886	Rp 10.692.953	Rp 33.294.023	Rp 65.806.862
10	Oktober 2019	Rp 19.042.166	Rp 11.515.347	Rp 12.895.435	Rp 43.452.948
11	November 2019	Rp 20.996.562	Rp 3.174.302	Rp 5.804.752	Rp 29.975.616
12	Desember 2019	Rp 17.550.644	Rp 2.130.000	Rp 4.243.818	Rp 23.924.462
	Total	Rp 269.536.656	Rp 86.113.924	Rp 126.601.587	Rp 482.252.167

b) Pelaksanaan Kegiatan

Untuk Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Toapaya Pada tahun 2019, UPT Bapenda Kawal melalui kegiatan Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah yang telah dilakukan di wilayah kerja UPT Kawal berupa :

- Penertiban Objek Pajak Reklame Sebanyak 140 (seratus empat puluh) objek pajak reklame.

- Penggalian Potensi PBB-P2 objek pajak PBB-P2 bagi warga yang belum mendaftarkan tanah dan bangunan untuk dijadikan wajib pajak PBB-P2 terdapat sebanyak (enam ratus sepuluh) 610 objek pajak.
- Pendataan Objek Pajak Reklame sebanyak 150 (seratus lima puluh) objek pajak reklame.
- Penggalian Potensi Pajak Reklame sebanyak 30 (tiga puluh) pajak reklame.
- Mendampingi Penyampaian SPPT PBB-P2 di wilayah kerja UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kawal 3 (tiga) Kecamatan.
- Pendataan Terhadap Pelaku Usaha yang dianggap menjadi objek pajak daerah sebanyak 21 (dua puluh satu) pelaku usaha.
- Pengukuhan Wajib Pajak Restoran sebanyak 6 (enam) Objek Pajak Restoran.
- Pengukuhan Wajib Pajak Hotel sebanyak 2 (dua) objek Pajak Hotel.
- Pengawasan terhadap pemasangan pajak reklame sebanyak 12 (dua belas).

(4) Penagihan Tunggalan Pajak Daerah

Kegiatan Penagihan Tunggalan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.122,311,800,- realisasi sebesar Rp. 121.812.580,- atau 99.59%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah tertagih pajak terhutang tahun sebelumnya yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga penerimaan daerah terealisasi lebih optimal. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

a) Penerbitan Surat Tagihan Pajak Tahun 2019

Pada Tahun 2019 telah diterbitkan 1.256 Surat Tagihan Pajak Daerah untuk 8 Jenis Pajak dengan jumlah nominal penagihan sebesar Rp. 50.566.353.020.24. Berikut penjelasannya:

Tabel 3.99 Penerbitan Surat Tagihan Pajak Tahun 2019

NO.	JENIS PAJAK	STPD			
		TERBIT	NOMINAL		
			POKOK	DENDA	POKOK+DENDA
1	HOTEL	74	24,130,541,267.00	1,491,113,277.00	25,621,654,544.00
2	RESTORAN	195	19,692,736,380.00	1,322,664,825.74	21,015,401,205.74
3	HIBURAN	23	50,080,050.00	7,274,592.00	57,354,642.00
4	REKLAME	785	313,572,275.00	102,305,321.50	415,877,596.50
5	PPJ	1	-	2,039.00	2,039.00
6	MBLB	1	-	120.000,00	120.000,00
7	PARKIR				-
8	SBW				-
9	BPHTB	5	5,767,000.00	5,445,872.00	11,212,872.00
10	PBB	172	2,433,224,409.00	1,011,505,712.00	3,444,730,121.00
JUMLAH		1.256	46.625.921.381.00	3.940.431.639.24	50.566.353.020.24

b) Penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Dari Jumlah STPD yang diterbitkan, sebanyak 589 Surat tagihan yang tersampaikan dengan nominal sebesar Rp. 47.290.702.060,24 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.100 STPD Yang Tersampaikan

NO.	JENIS PAJAK	STPD			
		TERSAMPAIKAN	NOMINAL		
			POKOK	DENDA	POKOK+DENDA
1	HOTEL	74	24,130,541,267.00	1,491,113,277.00	25,621,654,544.00
2	RESTORAN	195	19,692,736,380.00	1,322,664,825.74	21,015,401,205.74
3	HIBURAN	23	50,080,050.00	7,274,592.00	57,354,642.00
4	REKLAME	208	313,572,275.00	102,305,321.50	415,877,596.50
5	PPJ	1	-	2,039.00	2,039.00
6	MBLB	1	-	120,000.00	120,000.00
7	PARKIR				-
8	SBW				-
9	BPHTB	5	5,767,000.00	5,445,872.00	11,212,872.00
10	PBB	82	132,415,704	36,664,124	169,079,828
JUMLAH		589	44.325.112.676.00	2.965.590.051.24	47.290.702.060.24

c) Perkembangan Hasil Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Tahun 2019.

Untuk Surat Himbauan selama Tahun 2019 telah diterbitkan dan tersampaikan sebanyak 25 Surat dengan jumlah nominal Rp. 1.676.862.61.00, atas penyampaian Himbauan tersebut telah terealisasi piutang pajak daerah sebesar Rp. 1.676.862.61.00.

Sedangkan jumlah Surat Teguran selama Tahun 2019 telah tersampaikan 9 Surat untuk Teguran I dengan jumlah nominal Rp. 4.624.775.00 dan terealisasi sebesar Rp.4.624.775.00.

Tabel 3.101 Perkembangan Hasil Kegiatan Penagihan

No.	Jenis Surat	Jumlah Surat	Nominal Tersampaikan	Nominal Realisasi
1	STPD	1.132	9.493.367.230.00	9.493.367.230.00
2	Himbauan	25	1.676.862.361.00	1.676.862.361.00
3	Teguran I	9	4.624.775.00	4.624.775.00
4	Teguran II			
5	Teguran III			
TOTAL		1.166	11.174.854.366.00	11.174.854.366.00

(5) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp.500.000.000,- realisasi sebesar Rp. 476.634.686,- atau 95.33%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah dan Terwujudnya Kualitas Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah.

a) Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah

Adapun jenis pelayanan Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan dan hasil pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pelayanan Pajak PBB P2

1. Pendaftaran data baru = 1753 NOP
2. Mutasi = 802 NOP
3. Pembetulan = 389 NOP/tahun pajak
4. Keberatan = 16 NOP
5. Pembatalan = 624 NOP
6. Pengurangan Pokok Tagihan = 10 NOP
7. Pengurangan Denda Tagihan = 1 NOP
8. Pemberian informasi PBB P2 = 319 pelayanan

Total berkas pelayanan = 3914 pelayanan PBB P2

- Pelayanan Pajak BPHTB
Jumlah berkas masuk hingga desember 2019 adalah = 1793 berkas.
- Pendaftaran data baru dan penghapusan wajib pajak
 1. Data baru wajib pajak hotel: 2 perusahaan
 2. Penghapusan wajib pajak hotel: 2 perusahaan
 3. Data baru wajib pajak restoran: 18 perusahaan
 4. Penghapusan wajib pajak restoran 17 perusahaan
- Jumlah data wajib pajak
 1. Wajib Pajak Hotel: 48 wajib pajak
 2. Wajib pajak restoran: 183 wajib pajak
 3. Wajib pajak hiburan: 14 wajib pajak
 4. Wajib pajak reklame: 80 wajib pajak
 5. Wajib pajak sarang burung walet: 7 wajib pajak
 6. Wajib pajak BPHTB: 1.793 wajib pajak

7. Wajib pajak PBB P2 - (DHKP awal 2019):
77.886 NOP; (DHKP akhir/desember 2019,
penambahan 3398 = 81.284 NOP).

- Wajib pajak mineral bukan logam = 34 wajib pajak
- Wajib pajak perangan jalan = 11 wajib pajak
- Wajib pajak parkir = 1 wajib pajak

b) Pelaksanaan Sarana Pelayanan Pajak Daerah.

Tersedianya :

- X- banner 28 lembar
- Spanduk 20 lembar
- Foemulir SPOP PBB P2 sebanyak 250 blok
- Blanko LSPOP PBB P2 sebanyak 250 blok
- Blanko SSPD BPHTB sebanyak 150 blok
- Formulir SPTPD 250 blok
- Baliho 20 buah
- Maklumat wajib pajak daerah 30 buah
- Brosur informasi wajib pajak 2000 lembar
- Stiker melekat wajib pajak 2.260 lembar
- Stiker NPWPD 500 lembar

c) Pelaksanaan Workshop Peningkatan Pajak Daerah.

Melaksanakan workshop peningkatan pajak daerah dengan mengundang nara sumber dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia – Badan pendidikan dan pelatihan keuangan – Pusat pendidkan dan pelatihan kekayaan negara dan perimbangan keunagan yaitu :

- Izzuddin, Ak. MM (Widyaiswara Ahli Madya)
- Agung Haris Setiawan (Widyaiswara Ahli madya

Acara dilaksanakan di ruang pertemuan Bapenda Kabupaten Bintan, dengan jumlah peserta 31 orang.

d) Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Petugas Pelayanan Pajak Daerah.

Melaksanakan Pertukaran informasi ke kabupaten/Kota lain guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan proses administrasi dan peraturan:

- Badan Pendapatan Kabupaten Sleman
- Badan Pendapatan Kota Batam

(6) Hasil Verifikasi Pajak Hotel dan Restoran

Kegiatan Verifikasi Pajak Hotel dan Restoran dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 142,721,000,- realisasi sebesar Rp. 139.803.085,- atau 97.96%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya data pajak terutang yang akurat dan Terwujudnya ketepatan penghitungan nilai pajak terhutang.

a) Verifikasi Pajak Hotel dan Restoran.

Sasaran objek pemeriksaan yang dilaksanakan terdiri dari: 10 (sepuluh) Objek Pajak self assessment.

Berikut disampaikan Hasil dari Kegiatan Verifikasi Pajak Hotel dan Restoran:

Tabel 3.102 Verifikasi Pajak Hotel dan Restoran

No.	Nama Wajib Pajak	Kurang bayar
1.	PT. BINTAN PUTRA BERJAYA/HOOK ON	Rp. 324.885,82
2.	D'BINTAN SPA	Rp. 1.600.254,00
3.	PT. BINTAN ONBASE RESORT	Rp. 56.578,72
-	PT. BINTAN AGRO WISATA PERMAI	Rp. 16.162.072,54
4.	PT. BINTAN PUTRA BERJAYA/TEE OFF	Rp. 3.858.381,09
5.	PT. PULAU CEMPEDAK	Rp. 6.975.575,84
6.	PT. PULAU NIKOI	Rp. 1.385.732.422,19
7.	PT. BINTAN VISTA/THE RESIDENCE	Rp. 278.426.160,39
	Total	Rp. 1.693.136.330,59

b) Rincian Verifikasi Pajak Hotel dan Restoran.

Adapun rincian verifikasi pajak hotel dan restoran per wajib pajak sebagai berikut :

- PT. Bintang Putra Berjaya/Hook On terdapat kekurangan penyetoran Pajak Restoran sebesar Rp. 324.885,82 dengan rincian Pokok sebesar Rp. 212.454,13 dan Denda sebesar Rp. 112.431,69. Pendapatan Restoran PT. Bintang Putra Berjaya/Hook On Periode Januari s.d Desember 2018 terdiri dari:

Tabel 3.103 Pajak Restoran PT Bintang Putra Berjaya/Hook On Periode Januari s.d Desember 2018

Jenis	Uraian
Restoran	Rp. 1.132.266.940,00
Total Pendapatan	Rp. 1.134.391.481,30
Pajak 10% Pajak Dibayar	Rp. 113.439.148,13 Rp. 113.226.694,00
Pajak kurang bayar Sanksi Administrasi	Rp. 212.454,13 Rp. 112.431,69
Total Kurang bayar	Rp. 324.885,85

Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Pencatatan Pendapatan PT. Bintang Putra Berjaya/Hook On yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan untuk dasar perhitungan Pajak terhutang sebenarnya.

Terhadap kurang bayar tersebut telah diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPKDB).

- D' Bintang Spa Terdapat kekurangan penyetoran Pajak Hiburan sebesar Rp. 1.600.254,00 dengan rincian Pokok sebesar Rp. 1.023.450,00 dan Denda sebesar Rp.576.804,00.

Tabel 3.104 Pendapatan Hotel D'Bintan Spa Periode Januari s.d Desember 2018

Jenis	Uraian
Hiburan	Rp. 499.320.000,00
Total Pendapatan	Rp. 506.143.000,00
Pajak 10% Pajak Dibayar	Rp. 75.921.450,00 Rp. 74.898.000,00
Pajak kurang bayar Sanksi Administrasi	Rp. 1.023.450,00 Rp. 576.804,00
Total Kurang bayar	Rp. 1.600.254,00

Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Pencatatan Pendapatan D'Bintan Spa yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan untuk dasar perhitungan Pajak terhutang sebenarnya.

Terhadap kurang bayar tersebut telah diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPDKB)

- PT. Bintan Onbase Resort Terdapat kekurangan penyetoran Pajak Hotel sebesar Rp. 31.326,67,-. Perhitungan tersebut berdasarkan pada Laporan Pencatatan Pendapatan PT. Bintan Onbase Resort dengan rincian Pokok sebesar Rp. 31.326,67,- dan Denda sebesar Rp. 25.252,05,-.

Tabel 3.105 Pendapatan Restoran PT. Bintan Onbase Resort Periode Januari s.d Desember 2018

Jenis	Uraian
Restoran	Rp. 1.164.223.090,00
Total Pendapatan	Rp. 1.164.536.356,70
Pajak 10% Pajak Dibayar	Rp. 116.453.635,67 Rp. 116.422.309,00
Pajak kurang bayar Sanksi Administrasi	Rp. 31.326,67 Rp. 25.252,05
Total Kurang bayar	Rp. 56.578,72

Terhadap kurang bayar tersebut telah diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPKDB).

- PT.Bintan Agro Wisata Permai terdapat kekurangan penyetoran Pajak Hotel sebesar Rp. 2.136.584,41 dengan rincian Pokok sebesar Rp. 1.396.460,40 dan Denda sebesar Rp. 740.124,01.

**Tabel 3.106 Pendapatan Hotel PT. Bintan Agro Wisata Permai
Periode Januari s.d Desember 2018**

Jenis	Uraian
Hotel	Rp. 27.608.334.780,00
Total Pendapatan	Rp. 27.622.299.384,00
Pajak 10% Pajak Dibayar	Rp. 2.762.229.938,40 Rp. 2.760.833.478,00
Pajak kurang bayar Sanksi Administrasi	Rp. 1.396.460,40 Rp. 740.124,01
Total Kurang bayar	Rp. 2.136.584,41

**Tabel 3.107 Pendapatan Restoran PT. Bintan Agro Wisata Permai
Periode Januari s.d Desember 2018**

Jenis	Uraian
Restoran	Rp. 15.495.926.630,00
Total Pendapatan	Rp. 15.590.034.533,74
Pajak 10% Pajak Dibayar	Rp. 1.559.003.453,37 Rp. 1.549.592.663,00
Pajak kurang bayar Sanksi Administrasi	Rp. 9.410.790,37 Rp. 4.614.697,76
Total Kurang bayar	Rp. 14.025.488,13

Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Pencatatan Pendapatan PT. Bintan Agro Wisata Permai yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan untuk dasar perhitungan Pajak terhutang sebenarnya.

Terhadap kurang bayar tersebut telah diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPDKB).

- PT. Bintang Putra Berjaya/Tee Off terdapat kekurangan penyetoran Pajak Restoran sebesar Rp. 3.858.381,09 dengan rincian Pokok sebesar Rp. 2.464.458,10 dan Denda sebesar Rp. 1.393.922,99.

Tabel 3.108 Pendapatan Restoran PT. Bintang Putra Berjaya/Tee Off Periode Januari s.d Desember 2018

Jenis	Uraian
Restoran	Rp. 939.648.130,00
Total Pendapatan	Rp. 964.292.711,01
Pajak 10%	Rp. 96.429.271,10
Pajak Dibayar	Rp. 93.964.813,00
Pajak kurang bayar	Rp. 2.464.458,10
Sanksi Administrasi	Rp. 1.393.922,99
Total Kurang bayar	Rp. 3.858.381,09

Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Pencatatan Pendapatan PT. Bintang Putra Berjaya/Tee Off yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan untuk dasar perhitungan Pajak terhutang sebenarnya.

Terhadap kurang bayar tersebut telah diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPDKB).

- PT. Pulau Cempedak Terdapat kekurangan penyetoran Pajak Hotel sebesar Rp.6.975.575,84 dengan rincian Pokok sebesar Rp. 3.981.623,97 dan Denda sebesar Rp.2.993.951,87.

Tabel 3.109 Pendapatan PT. Pulau Cempedak Periode Januari s.d Desember 2018

Jenis	Uraian	
Hotel	Rp.	33.869.880.230,00
Total Pendapatan	Rp.	33.909.696.469,67
Pajak 10%	Rp.	3.390.969.646,67
Pajak Dibayar	Rp.	3.386.988.023,00
Pajak kurang bayar	Rp.	3.981.623,97
Sanksi Administrasi	Rp.	2.993.951,87
Total Kurang bayar	Rp.	6.975.575,84

Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Pencatatan Pendapatan PT. Pulau Cempedak yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan untuk dasar perhitungan Pajak terhutang sebenarnya.

Terhadap kurang bayar tersebut telah diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPDKB).

- PT. Pulau Nikoi Terdapat kekurangan penyeteroran Pajak Hotel sebesar Rp. 1.385.732.422,19 dengan rincian Pokok sebesar Rp. 799.222.298,54 dan Denda sebesar Rp. 586.510.123,65

Tabel 3.110 Pendapatan PT. Pulau Nikoi Periode Januari 2016 s.d Desember 2016

Jenis	Uraian	
Hotel	Rp.	124.732.823.881,00
Total Pendapatan	Rp.	132.725.049.355,38
Pajak 10%	Rp.	13.272.504.935,53
Pajak Dibayar	Rp.	12.473.282.637,00
Pajak kurang bayar	Rp.	799.222.298,54
Sanksi Administrasi	Rp.	586.510.123,65
Total Kurang bayar	Rp.	1.385.732.422,19

Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Pencatatan Pendapatan PT. Pulau Nikoi yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan untuk dasar perhitungan Pajak terhutang sebenarnya.

Terhadap kurang bayar tersebut telah diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPDKB).

- PT. Bintang Vista / The Residence Terdapat kekurangan penyetoran Pajak Hotel sebesar Rp. 78.865.896,22 dengan rincian Pokok sebesar Rp. 41.110.441,53 dan Denda sebesar Rp. 37.755.454,68.

**Tabel 3.111 Pendapatan Hotel PT. Bintang Vista / The Residence
Periode Januari 2018 s.d April 2019**

Jenis	Uraian	
Hotel	Rp.	39.054.336.680,00
Total Pendapatan	Rp.	39.465.441.095,30
Pajak 10%	Rp.	3.946.544.109,53
Pajak Dibayar	Rp.	3.905.433.668,00
Pajak kurang bayar	Rp.	41.110.441,53
Sanksi Administrasi	Rp.	37.755.454,68
Total Kurang bayar	Rp.	78.865.896,22

**Tabel 3.112 Pendapatan Restoran PT. Bintang Vista / The
Residence Periode Februari 2018 s.d April 2019**

Jenis	Uraian	
Restoran	Rp.	36.212.561.980,00
Total Pendapatan	Rp.	37.402.403.471,40
Pajak 10%	Rp.	3.740.240.347,14
Pajak Dibayar	Rp.	3.621.256.198,00
Pajak kurang bayar	Rp.	118.984.149,14
Sanksi Administrasi	Rp.	64.620.876,51
Total Kurang bayar	Rp.	183.605.025,64

Tabel 3.113 Pendapatan Penerangan Jalan Non PLN PT. Bintang Vista / The Residence Periode Februari 2018 s.d April 2019

Jenis	Uraian
Restoran	Rp. -,-
Total Pendapatan	Rp. 717.433.728,00
Pajak 10%	Rp. 10.761.505,92
Pajak Dibayar	Rp. -,-
Pajak kurang bayar	Rp. 10.761.505,92
Sanksi Administrasi	Rp. 5.193.732,61
Total Kurang bayar	Rp. 15.955.238,53

Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Pencatatan Pendapatan PT. Bintang Vista / The Residence yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan untuk dasar perhitungan Pajak terhutang sebenarnya.

Terhadap kurang bayar tersebut telah diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPDKB).

(7) Pencetakan Massal

Kegiatan Pencetakan Massal dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 193,640,000,- realisasi sebesar Rp. 191.967.600,- atau 99.14%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pencetakan massal dan tercetaknya surat pemberitahuan pajak terhutang PBB P2.

a) Hasil pelaksanaan pencetakan massal

Pada tahun 2019 telah dilakukan pencetakan massal sebanyak 77.886 SPPT PBB P2 dari target 77.000 SPPT PBB P2 dengan jumlah SPPT terhutang Rp. 34.178.128.444,- (*Tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*). Dapat

diuraikan per Kecamatan dan kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.114 Jumlah Pencetakan SPPT PBB P2

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH SPPT	NILAI SPPT TERUTANG
1	GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG	2112	838.513.320
		TELUK BAKAU	1432	457.336.196
		MALANG RAPAT	1291	808.917.197
		K A W A L	3240	553.927.536
JUMLAH			8.075	2.658.694.249
2	TOAPAYA	TOAPAYA SELATAN	5729	613.565.227
		TOAPAYA ASRI	4632	704.141.791
		TOAPAYA	1486	184.172.112
		TOAPAYA UTARA	1840	489.369.883
JUMLAH			13.657	1.991.249.013
3	BINTAN UTARA	TG. UBAN UTARA	2869	285.955.492
		TG. UBAN KOTA	1900	1.383.348.804
		TG. UBAN SELATAN	3764	644.994.171
		TG. UBAN TIMUR	1211	200.805.082
		LANCANG KUNING	697	59.562.542
JUMLAH			10.441	2.574.666.091
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH SPPT	NILAI SPPT TERUTANG
4	TELUK SEBONG	B E R A K I T	533	338.171.783
		PENGUDANG	83	667.134.947
		SRI BINTAN	1196	1.463.205.426
		SEBONG PEREH	2811	247.625.533
		SEBONG LAGOI	1421	15.086.988.937
		EKANG ANCULAI	1443	130.281.987
		KOTA BARU	1970	1.853.674.178
JUMLAH			9.457	19.787.082.791
5	SERI KUALA LOBAM	TANJUNG PERMAI	1583	258.893.332
		TELUK SASAH	2836	296.190.597
		TELUK LOBAM	839	2.259.613.729
		BUSUNG	409	458.526.627
		KUALA SEMPANG	1086	138.974.850
JUMLAH			6753	3.412.199.135

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH SPPT	NILAI SPPT TERUTANG
6	BINTAN TIMUR	KIJANG KOTA	8259	1.526.837.973
		GUNUNG LENGKUAS	3781	540.748.468
		SUNGAI ENAM	1093	182.396.787
		SUNGAI LEKOP	5194	681.807.128
JUMLAH			18.327	2.931.790.356
7	MANTANG	MANTANG BARU	293	11.960.623
		MANTANG BESAR	338	18.266.241
		MANTANG LAMA	681	30.188.779
		DENDUN	194	3.997.464
JUMLAH			1.506	64.413.107
8	BINTAN PESISIR	KELONG	654	47.265.294
		NUMBING	386	12.383.614
		MAPUR	930	39.142.118
		AIR GLUBI	300	7.021.072
JUMLAH			2.270	105.812.098
9	TAMBELAN	PULAU PINANG	86	2.210.978
		PULAU MENTEBUNG	37	1.132.914
		KAMPUNG HILIR	279	8.023.850
		MELAYU UJUNG	228	5.626.274
		BATU LEPUK	180	4.560.578
		TELUK SEKUNI	277	6.332.672
		PENGIKIK	32	541.738
		KUKUP	178	3.194.368
JUMLAH			1.297	31.623.372
NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH SPPT	NILAI SPPT TERUTANG
10	TELUK BINTAN	BINTAN BUYU	2451	215.387.840
		PENAGA	703	132.550.860
		PENGUJAN	209	6.386.079
		PANGKIL	142	5.060.474
		TEMBELING	1216	161.026.107
		TEMBELING TANJUNG	1352	100.186.872
JUMLAH			6.073	620.598.232
JUMLAH TOTAL			77.886	34,178,128,444

(8) Penyampaian SPPT PBB P2

Kegiatan Penyampaian SPPT PBB P2 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 624.801.000,- realisasi sebesar Rp. 595.138.400,- atau 95.25%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyampaian SPPT PBB P2 dan Tercapainya target penyampaian SPPT PBB P2.

a) Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan Kegiatan Penyampaian SPPT PBB P2 Tahun 2019 adalah agar SPPT PBB P2 yang telah dicetak massal dapat segera mungkin tersampaikan ke Lurah/Kades/RT di 10 (sepuluh) Kecamatan Kabupaten Bintan. Selanjutnya diharapkan petugas dapat segera menyerahkan SPPT tersebut kepada warganya masing-masing. Dengan penyampaian SPPT PBB P2 yang tepat waktu Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada tempat Pembayaran (TP) yang ditentukan pada masing-masing SPPT PBB, yang selanjutnya tercapainya target penyampaian dan penerimaan PBB. Sasaran kegiatan penyampaian SPPT PBB P2 adalah tersampainya seluruh SPPT PBB P2 yang telah tercetak ke seluruh petugas penyampaian di tingkat RT sehingga target penyampaian dan penerimaan PBB bisa tercapai.

Hasil yang diharapkan adalah tersampainya SPPT PBB di 10 Kecamatan yang ada di Bintan.

Tahapan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 :

- Tahap penyampaian SPPT PBB P2 ke Kelurahan dan Desa dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019 s/d 25 Maret 2019.

- Tahap Monitoring dan evaluasi penyampaian SPPT PBB P2 pada bulan Agustus s/d November 2019.
- Tahap penyerahan honorarium penyampaian SPPT PBB pada tanggal 25 November s/d 28 November 2019.
- Penyerahan SPPT PBB P2 melibatkan petugas PBB Kecamatan, Petugas PBB Kelurahan/Desa dan Ketua RT setempat di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.
- Dari total SPPT PBB P2 yang dicetak sejumlah 77.886, yang tersampaikan adalah 73,62 % atau 57.343 lembar.
- Dihitung dari jumlah tagihan Rp. 34.178.128.444,- jumlah piutang yang tersampaikan adalah 81,09 atau sama dengan Rp. 27.715.596.038,-
- Penyebab SPPT PBB tidak tersampaikan secara umum adalah: Data yang tidak akurat, SPPT yang bukan warga tempatan, tanah yang sudah diperjual belikan namun tidak dilaporkan sehingga data yang tertera di SPPT PBB P2 bukan lagi memiliki yang sekarang.

Berikut rincian pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 tahun 2019:

Tabel 3.115 Jumlah penyampaian SPPT PBB P2 tahun 2018

No	Kecamatan	Target 2018		S i s a			
		SPPT	PBB Terutang	SPPT	PBB Terutang	Jumlah Tersampaikan (%)	PBB Terutang Tersampaikan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Total	77.886	34.178.128.444	20.543	6.462.532.406	73,62	81,09

1	Bintan Timur	18.327	2.931.790.356	4.983	856.400.068	72,81	70,79
2	Mantang	1.506	64.413.107	156	5.338.613	89,64	91,71
3	Bintan Pesisir	2.270	105.812.098	1.206	76.448.046	46,87	27,75
4	Gunung Kijang	8.075	2.658.694.249	2.046	905.738.523	74,66	65,93
5	Toapaya	13.687	1.991.249.013	2.414	364.273.733	82,36	81,71
6	Bintan Utara	10.441	2.574.666.091	3.484	524.363.241	66,63	79,63
7	Sri Kuala Lobam	6.753	3.412.199.135	1.136	189.150.228	83,18	94,46
8	Teluk Sebong	9.457	19.787.082.791	1.865	3.199.364.115	80,28	83,83
9	Teluk Bintan	6.073	620.598.232	2.830	329.990.180	53,40	46,83
10	Tambelan	1.297	31.623.372	423	11.465.659	67,39	63,74

(9) Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan PBB

Kegiatan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan PBB dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran Rp. 44.721.000,- realisasi sebesar Rp. 44.581.335,- atau 99.69%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Terlaksananya penyelesaian keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan PBB P2 serta terwujudnya data PBB P2 yang valid.

a) Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan PBB-P2 Tahun 2019 Per Kecamatan Per NOP sebanyak 529 permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.116 Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan PBB P2 Tahun 2019 Per Kecamatan

KECAMATAN	PERMOHONAN			
	KEBERATAN N	PEMBATALAN N	PEMBETULAN N	PENGURANGAN N
BINTAN PESISIR			14	

BINTAN TIMUR	1	21	92	
BINTAN UTARA	1	18	65	6
GUNUNG KIJANG	5	23	74	1
SERI KUALA LOBAM	1	4	21	2
TELUK BINTAN	2	5	32	
TELUK SEBONG		13	15	2
TOAPAYA	6	19	76	
TOAPAYA ASRI			14	
TOTAL NOP	16	113	389	11

Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan PBB-P2 Tahun 2019 Per Kelurahan / Desa Per Berita Acara (BA) dan Laporan Hasil Penelitian (LHP) sebagai berikut

Tabel 3.117 Penyelesaian Keberatan, Pengurangan, Pembetulan Dan Pembatalan PBB P2 Tahun 2019 Per Kelurahan/ Desa

KELURAHAN/DESA	PROSES PERMOHONAN							
	Keberatan		Pembatalan		Pembetulan		Pengurangan	
	BA	LHP	BA	LHP	BA	LHP	BA	LHP
Air Kelubi								
Berakit				6	1	2		
Bintan Buyu				5		4		
Busung								
Ekan Aculai				1	1			
Gunung Kijang				1		41		
Gunung Lengkuas				4	11	5		
Kawal		2		15	5	8		
Kelurahan/Desa	PROSES PERMOHONAN							
	Keberatan		Pembatalan		Pembetulan		Pengurangan	
	BA	LHP	BA	LHP	BA	LHP	BA	LHP
Kijang Kota		1	2	6	7	33		
Kota Baru					2	2		
Kuala Sempang								2
Lancang Kuning						16		
Malang Rapat			4	3		7		1
Penaga						3		
Sebong Lagoi						1		

KELURAHAN/DESA	PROSES PERMOHONAN							
	Keberatan		Pembatalan		Pembetulan		Pengurangan	
	BA	LHP	BA	LHP	BA	LHP	BA	LHP
Sebong Pereh						2		2
Sei Enam			2	4	3	2		
Sri Bintang					14			
Sungai Enam								
Sungai Lekop				1	1	17		
Tanjung Permai			4	4	3	18		
Tanjung Permai								
Tanjung Uban								
Tanjung Uban Kota								
Tanjung Uban Selatan			3	2	1	14		
Tanjung Uban Timur		1		10	4	28		
Tanjung Uban Utara			2		1	1		6
Teluk Bakau			6	1	2	4		
Teluk Lobam		3	1	3	1	12		
Teluk Sasah						1		
Tembeling		1	3	1	3	17		
Tembeling Tanjung		2				12		
Toapaya					10	2		
Toapaya Asri		2		2		1		
Toapaya Selatan		2		12	2	36		
Toapaya Utara				5	9	12		
Total Laporan		16	27	86	81	308		11

Dari Laporan diatas telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang Keberatan, Pembatalan, Pembetulan, dan Pengurangan PBB-P2 sebagai berikut :

Tabel 3.118 SK keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan PBB P2 tahun 2019 per Kelurahan/ Desa.

KELURAHAN/DESA	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN (SK)			
	KEBERATAN	PEMBATALAN	PEMBETULAN	PENGURANGAN
Air Kelubi				
Berakit		6	3	
Bintan Buyu		5	4	
Busung				
Ekang Anculai		1	1	

KELURAHAN/DESA	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN (SK)			
	KEBERATAN	PEMBATALAN	PEMBETULAN	PENGURANGAN
Gunung Kijang		1	41	1
Gunung Lengkuas		4	16	
Kawal	2	15	13	
Kijang Kota	1	8	37	
Kota Baru			4	
Kuala Sempang				2
Lancang Kuning			16	
Malang Rapat		7	7	
Penaga			3	
Sebong Lagoi			2	2
Sebong Pereh		6	5	
Sei Enam			14	
Sri Bintang			1	
Sungai Enam		1	18	
Sungai Lekop		8	21	
Tanjung Permai				
Tanjung Permai				
Tanjung Uban				
Tanjung Uban Kota		5	15	
Tanjung Uban Selatan	1	10	26	
Tanjung Uban Timur		2	2	6
Tanjung Uban Utara		7	6	
Teluk Bakau	3	4	13	
Teluk Lobam			1	
Teluk Sasah	1	4	20	
Tembeling	2		12	
Tembeling Tanjung			12	
Toapaya	2	2	1	
Toapaya Asri	2	12	38	
Toapaya Selatan		5	30	
Toapaya Utara	2		7	
Total SK	16	113	389	11

(10) Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD).

Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 143.903.500,- realisasi

sebesar Rp. 143.800.000,- atau 99.93%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah.
- Terlaksananya pembuatan web design pajak dan retribusi daerah.
- Terlaksananya pembuatan web service pajak dan retribusi daerah.

Serta Hasil yang dicapai adalah :

- Terwujudnya sub sistem informasi manajemen retribusi daerah.
- Terwujudnya web design pajak dan retribusi daerah.
- Terwujudnya web service pajak dan retribusi daerah berbasis Json.

a) Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) merupakan sistem yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yang diharapkan dapat berfungsi untuk melakukan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah kab. Bintan.

Tujuannya dari kegiatan ini adalah

- Terpeliharanya dan tersimpannya Data yang menyangkut dengan penerimaan Pajak Asli Daerah.
- Didapatkan informasi pengelolaan Pajak Asli Daerah secara cepat dan akurat.
- Meningkatnya efisiensi kinerja dalam pengelolaan pendapatan Daerah.
- Menyajikan data penerimaan pajak dan retribusi daerah secara akurat.

- Didapatkan Informasi Penerimaan secara cepat, akurat dan Metode Pertukaran Data dari 2 platform Web Service.

Pengguna Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah ini di klasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu Wajib Pajak, Operator (Pendataan, Penetapan, Penagihan, Pembayaran, Pembukuan), dan Administrator.

- Wajib Pajak : Dapat melihat dan mengelola informasi seperti data usaha, data pemilik, data pimpinan, data izin usaha, objek pajak yang dimiliki, SPTPD, surat teguran, surat tagihan, informasi kurang bayar dan laporan.
- Operator Pendataan : Dapat melihat dan mengelola informasi mengenai Wajib Pajak, Pengukuhan, SPTPD dan Surat Teguran.
- Operator Penetapan : Dapat melihat dan mengelola nota perhitungan, SKPD, SKPDN, SKPDLB, dan SKPDKB
- Operator Penagihan : Dapat melihat dan mengelola informasi mengenai info SPPT, SKPD/SPPT, SKPDKB, Piutang
- Operator Pembayaran : Dapat melihat dan mengelola informasi ketetapan, penerimaan, STS, dan Validasi.
- Operator Pembukuan : Dapat melihat dan mengelola informasi terkait Ketetapan, DKHP awal, DKHP Perubahan, Piutang, Penerimaan, dan Validasi
- Supervisi : Hanya dapat melihat informasi mengenai Pendataan, Penetapan, Penagihan, Pembayaran, dan Pembukuan.
- Administrator : Mengelola User / Pengguna

Sistem.

Web Service Bapenda Kab. Bintan adalah sebuah metode pertukaran data, tanpa memperhatikan dimana sebuah database ditanamkan, dibuat dalam bahasa apa sebuah aplikasi yang mengkonsumsi data, dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi. Web service mampu menunjang interoperabilitas. Sehingga web service mampu menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem dan platform yang ada.

Terdapat 2 user platform Web Service Bapenda Kab. Bintan ini yaitu :

- a) PT. POS Indonesia
- b) PT. BANK RIAU KEPRI

Hasil yang diharapkan :

- Mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban untuk melaporkan pajak dan pembayaran secara cepat.
- Menyajikan data secara cepat dan akurat.
- Menjadi sebuah jembatan penghubung antara berbagai sistem dan platform yang ada khususnya PT. POS Indonesia dan PT. Bank Riau Kepri dalam menyajikan data pembayaran wajib pajak/retribusi.

Dengan mengakses ke alamat web **<http://simpad.padbintan.id>** maka akan tampil halaman login untuk semua pengguna aplikasi simpad.

(11) Sosialisasi Perhitungan Nilai, Informasi Tagihan Online dan Pembayaran SPPT PBB-P2

Kegiatan Sosialisasi Perhitungan Nilai, Informasi Tagihan Online dan Pembayaran SPPT PBB-P2 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 266.200.000,- realisasi sebesar Rp. 215.512.000,- atau

80.96%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Sosialisasi perhitungan nilai SPPT PBB P2 dan Terwujudnya masyarakat taat pajak terhadap PBB P2. Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Perhitungan Nilai, Informasi Tagihan Online dan Pembayaran SPPT PBB-P2 adalah Meningkatkan ketertiban dalam hal administrasi PBB-P2 dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mengenai perhitungan nilai, informasi tagihan online dan terkait teknis pembayaran SPPT PBB-P2.

Kegiatan Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh Ketua RT dan RW se-Kabupaten Bintan dan dilaksanakan 4 (Empat) lokasi yaitu Aula Kantor Bupati Bintan untuk peserta Ketua RT dan RW wilayah kerja Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Gunung Kijang, Lokasi Aula Kantor Kecamatan Bintan Timur untuk peserta Ketua RT dan RW wilayah kerja Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir, Lokasi Aula Kantor Kecamatan Teluk Sebong untuk peserta Ketua RT dan RW Kecamatan Teluk Sebong, Lokasi Gedung Melayu Berdendang untuk peserta Ketua RT dan RW wilayah kerja Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Bintan Utara dan terakhir lokasi Gedung PKK Kecamatan Tambelan untuk peserta Ketua RT dan RW Kecamatan Tambelan. Dengan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dimaksud melalui Ketua RT dan RW se Kabupaten Bintan disamping dapat memberikan pemahaman kepada warganya masing-masing terkait nilai perhitungan SPPT PBB-P2 serta memberikan informasi kemudahan layanan pembayaran PBB P2 sudah bisa bertransaksi menggunakan ATM (Automatic Teller Machine) yang bekerja sama dengan PT. Bank Riau Kepri.

a. Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Perhitungan Nilai, Informasi Tagihan Online dan Pembayaran SPPT PBB-P2 di Wilayah Kabupaten Bintan.
 - a) Melakukan pemilihan peserta yang akan mengikuti Sosialisasi/Workshop di Wilayah Kabupaten Bintan.
 - b) Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sosialisasi/Workshop di Wilayah Kabupaten Bintan.
 - c) Rapat panitia untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Workshop di Wilayah Kabupaten Bintan.
- (2) Tempat Pelaksanaan:
 - a) Aula Kantor Bupati Bintan
 - b) Aula Kantor Camat Bintan Timur
 - c) Aula Kantor Camat Teluk Sebong
 - d) Gedung Melayu Berdendang Tg. Uban
 - e) Gedung Pertemuan PKK Kec. Tambelan
- (3) Jumlah Peserta: 800 (delapan ratus) peserta dari Ketua RT dan RW se-Kabupaten Bintan.
- (4) Nara Sumber :
 - a) Kepala Bapenda Kab. Bintan
 - b) Sekretaris Bapenda Kab. Bintan
 - c) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kab. Bintan.

(12) Kajian Perhitungan Target Pajak dan Retribusi Daerah.

Kegiatan Kajian Perhitungan Nilai Target Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 240.000.000,- realisasi sebesar Rp.208.145.910,- atau 86.73%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Data perhitungan target pendapatan daerah berdasarkan kajian

potensi pajak daerah dan Terwujudnya data potensi pendapatan daerah tahun 2020.

a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan dari Kegiatan Kajian Potensi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 adalah:

- a) Untuk memverifikasi target pajak daerah di Kabupaten Bintan;
- b) Untuk mengevaluasi dan identifikasi pelaksanaan pemungutan dan permasalahan yang timbul dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- c) Untuk memperoleh data potensi penerimaan jenis pajak daerah di wilayah Kabupaten Bintan;
- d) Untuk memperoleh data penetapan target penerimaan jenis pajak daerah.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memperoleh suatu cara penetapan proyeksi target penerimaan perpajakan daerah secara ilmiah dan juga didasarkan pada potensi yang ada di Kabupaten Bintan. Selain itu kajian ini merupakan sarana analisis dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi dan tindak lanjut kegiatan ke depan dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah dan profesionalisme petugas pengelola pajak daerah. Hasil kajian ini disimpulkan dalam bentuk sebuah dokumen kajian perhitungan target pajak dan retribusi daerah.

Kajian ini menghasilkan olahan data berupa analisis deskriptif yang mendeskripsikan kinerja penerimaan perpajakan daerah, analisis proyeksi penerimaan pajak daerah perjenis pajak daerah untuk Tahun 2020 sampai dengan 2025, analisis terhadap potensi yang mencerminkan keadaan objek perjenis pajak daerah,

dan rekomendasi strategi pencapaian proyeksi penerimaan pajak daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum melakukan analisis atas proyeksi dan potensi atas penerimaan pajak daerah, terlebih dahulu perlu mengetahui kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Bintan. Adapun hasil analisis kinerja penerimaan perjenis pajak daerah Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

- (1) Analisis Varians yaitu membandingkan selisih antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Analisis Derajat Desentralisasi untuk melihat seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dari suatu daerah.
- (3) Analisa Efektivitas untuk melihat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan maka kita perlu menganalisis efektifitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Bintan.
- (4) Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan perjenis pajak daerah dalam memberikan kontribusinya pada total pajak daerah/pendapatan asli daerah/pendapatan daerah.
- (5) Analisis Pertumbuhan untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pencapaian pendapatan dari periode ke periode berikutnya.

(13) Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Daerah

Kegiatan Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 153.000.000,-

realisasi sebesar Rp.123.947.560,- atau 81.01%. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Perencanaan Dan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah dan Tersusunnya Target Pendapatan Asli Daerah dan Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

a. Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019

Proyeksi target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan menjadi target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD Murni tahun anggaran 2019 sebesar Rp 204.174.600.000.00 dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp.214.719.020.000.00

Rincian besaran target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.119 dan tabel 3.120.

Tabel 3.119 Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah APBD Murni 2018 dan 2019

No	Uraian	APBD Murni		
		2018	2019	Bertambah / (Berkurang)
	Total Pajak dan Retribusi	166.583.045.764	204.174.600.000	31.746.154.236
I	Pajak Daerah	155.170.045.764	192.451.200.000	32.281.154.236
	1. Pajak Hotel	67.700.000.000	88.025.000.000	4.040.000.000
	1. Pajak Restoran	29.839.700.000	35.145.000.000	(618.500.000)
	2. Pajak Hiburan	1.447.000.000	2.580.000.000	246.000.000
	3. Pajak Reklame	317.000.000	418.000.000	6.000.000
	4. Pajak Penerangan	11.000.000.000	10.955.000.000	1.800.000.000

	Jalan			
	5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.001.563.127	10.595.200.000	(47.563.127)
	6. Pajak Parkir	230.000.000	230.000.000	(10.000.000)
	7. Pajak Air Bawah Tanah	-		-
	8. Pajak Sarang Burung Walet	-	3.000.000	-
	9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.000.000.000	12.000.000.000	27.500.000.000
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	32.634.782.637	32.500.000.000	(634.782.637)
No	Uraian	APBD Murni		
		2018	2019	Bertambah / (Berkurang)
II	Retribusi Daerah	11.413.000.000	11.723.400.000	(535.000.000)
	1. Retribusi Jasa Umum	1.058.000.000	359.000.000	(35.000.000)
	2. Retribusi Jasa Usaha	3.600.000.000	6.284.400.000	-
	3. Retribusi Perizinan Tertentu	6.755.000.000	5.080.000.000	(500.000.000)

Tabel 3.120 Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	APBD 2019		
		Murni	Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
	Total Pajak dan Retribusi	204.174.600.000	214.719.020.000	14.953.053.755
I	Pajak Daerah	192.451.200.000	201.352.420.000	8.901.220.000

No	Uraian	APBD 2019		
		Murni	Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
	1. Pajak Hotel	88.025.000.000	93.751.220.000	5.726.220.000
	2. Pajak Restoran	35.145.000.000	38.078.280.000	2.933.280.000
	3. Pajak Hiburan	2.580.000.000	5.558.500.000	2.978.500.000
	4. Pajak Reklame	418.000.000	399.800.000	(18.200.000)
	5. Pajak Penerangan Jalan	10.955.000.000	12.088.370.000	1.133.370.000
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.595.200.000	16.017.700.000	5.422.500.000
	7. Pajak Parkir	230.000.000	237.800.000	7.800.000
	8. Pajak Air Bawah Tanah	-	-	
	9. Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000	3.750.000	750.000
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.000.000.000	12.000.000.000	0
	11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	32.500.000.000	23.217.000.000	(9.283.000.000)
II	Retribusi Daerah	11.723.400.000	13.366.600.000	1.643.200.000
	1. Retribusi Jasa Umum	359.000.000	327.400.000	(31.600.000)
	2. Retribusi Jasa Usaha	6.284.400.000	6.654.200.000	369.800.000
	3. Retribusi Perizinan Tertentu	5.080.000.000	6.385.000.000	1.305.000.000

b. Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun 2019

Pada APBD Murni tahun 2019 rencana penerimaan pajak daerah pada triwulan I sebesar Rp. 42.381.270.000, triwulan II sebesar Rp. 52.559.730.000, triwulan III sebesar Rp. 59.980.150.000, dan triwulan IV sebesar Rp. 37.530.050.000 sedangkan pada APBD Perubahan tahun 2019 direncanakan penerimaan pajak di triwulan IV sebesar Rp. 40.148.000.000.

Rincian besaran target penerimaan Pajak Daerah per triwulan dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.121 berikut:

Tabel 3.121 Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun 2019

No	Uraian	Rencana Penerimaan			
		TW I Murni/ Perubahan	TW II Murni/ Perubahan	TW III Murni/ Perubahan	TW IV Murni/ Perubahan
	Pajak Daerah	42.381.270.000	52.559.730.000	59.980.150.000	37.530.050.000
		48.294.920.000	59.389.400.000	61.661.400.000	40.148.000.000
1	Pajak Hotel	23.835.550.000	20.059.150.000	24.491.750.000	19.638.550.000
		26.311.040.000	21.231.230.000	25.430.200.000	20.778.750.000
2	Pajak Restoran	9.022.270.000	8.473.280.000	9.380.050.000	8.269.400.000
		10.423.730.000	9.389.010.000	9.642.490.000	8.655.750.000
3	Pajak Hiburan	644.400.000	644.600.000	645.200.000	645.800.000
		1.359.900.000	1.082.500.000	955.200.000	886.500.000
4	Pajak Reklame	149.400.000	117.700.000	83.800.000	67.100.000
		(119.060.000)	(115.530.000)	90.710.000	74.500.000
5	PPj	2.725.900.000	2.663.100.000	2.858.800.000	2.707.200.000
		3.340.320.000	3.312.650.000	(2.843.500.000)	2.691.900.000
6	Pajak MBLB	2.579.000.000	2.669.000.000	2.809.000.000	2.538.200.000
		4.970.300.000	4.679.500.000	3.335.600.000	3.032.300.000
7	Pajak Parkir	61.400.000	54.700.000	57.200.000	56.700.000
		66.200.000	57.700.000	57.200.000	56.700.000
8	Pajak				

	ABT				
9	Pajak SBW	750.000	600.000	750.000	900.000
		970.000	980.000	900.000	900.000
10	BPHTB	3.037.600.000	3.252.600.000	3.403.600.000	2.306.200.000
		(1.378.400.000)	4.895.300.000	(3.055.600.000)	2.670.700.000
11	PBB P2	325.000.000	14.625.000.000	16.250.000.000	1.300.000.000
		325.000.000	14.625.000.000	16.250.000.000	1.300.000.000

c. Jumlah Wajib Pajak dan transaksi sebagai dasar penetapan target tahun 2019

Besaran target pajak daerah tahun 2019 diasumsikan berasal dari proyeksi pelaporan pajak terutang Wajib Pajak dan proyeksi transaksi yang terjadi pada tahun 2019. Adapun jumlah Wajib Pajak Kabupaten Bintan dan transaksi yang dijadikan sebagai dasar penghitungan target tahun 2019 adalah sebagaimana pada tabel 3.122 berikut ini:

Tabel 3.122 Jumlah Wajib Pajak Dan Transaksi Sebagai Dasar Penghitungan Target Pajak Tahun 2019

No	Jenis Pajak	Jumlah WP/Transaksi	
		APBD Murni	APBD Perubahan
1	Pajak Hotel	41 WP	43 WP
2	Pajak Restoran	166 WP	136 WP
3	Pajak Hiburan	9 WP	13 WP
4	Pajak Reklame	3 WP	3 WP
5	Pajak Penerangan Jalan	11 WP	11 WP
6	Pajak MBLB	4 WP	5 WP
7	Pajak Parkir	1 WP	1 WP
8	Pajak ABT	-	-
9	Pajak SBW	8 WP	8 WP
10	BPHTB	1385 Transaksi	1385 Transaksi
11	PBB P2	72.000 NOP	72.0P

d. Realisasi Pajak Terutang (Pendapatan LO) Tahun 2019

Total realisasi pajak terutang (pendapatan LO) pada tahun 2019 sebesar Rp 311.543.708.757,51 yang terdiri dari masa pajak Des 2018 sampai dengan Nov 2019 sebesar Rp.310.457.663.303,00 masa pajak dibawah masa Desember 2018 sebesar Rp 26.408.400,00 dan dari ketetapan kurang Bayar sebesar Rp 1.061.013.054,51.

Rincian realisasi pajak terutang (pendapatan LO) dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.123 berikut ini:

Tabel 3.123 Realisasi Pajak Terutang (Pendapatan LO) Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Pajak Terutang Tahun 2019	Keterangan
	Total	311.543.708.757,51	
1	Pajak Hotel	99.991.768.460,00	532 SPTPD
2	Pajak Restoran	42.783.202.352,00	2.008 SPTPD
3	Pajak Hiburan	6.020.524.646,00	151 SPTPD
4	Pajak Reklame	459.160.903,00	276 SPTPD
5	Pajak Penerangan Jalan	13.933.844.723,00	145 SPTPD
6	Pajak MBLB	24.893.998.942,00	451 SPTPD
7	Pajak Parkir	255.010.501,00	12 SPTPD
8	Pajak Air Bawah Tanah	-	
9	Pajak Sarang Burung Walet	3.900.000,00	28 SPTPD
10	BPHTB	87.964.532.732,00	1.793 SSPD BPHTB
11	PBB P2	34.178.128.444,00	77.886 SPPT
12	Ketetapan Kurang Bayar	1.061.013.054,51	13 SKPDKB

Jumlah pajak terutang sebagaimana pada tabel 3.123 bersumber dari pelaporan Wajib Pajak, permohonan penelitian SSPD BPHTB, penetapan secara jabatan, dan penetapan kurang bayar dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.124 berikut ini:

Tabel 3.124 Jumlah Wajib Pajak Yang Berdasarkan Realisasi Pajak Terutang Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Pajak Hotel	48 WP
2	Pajak Restoran	183 WP
3	Pajak Hiburan	14 WP
4	Pajak Reklame	80 WP
5	Pajak Penerangan Jalan	11 WP
6	Pajak MBLB	35 WP
7	Pajak Parkir	1 WP
8	Pajak ABT	-
9	Pajak SBW	7 WP
10	BPHTB	1.793 NOP/Transaksi
11	PBB P2	77.886 NOP
12	SKPDKB	10 WP

e. Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Pendapatan LRA) Tahun 2019

Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan tahun 2019 sebesar Rp 220.166.074.430,74 dengan rincian sebagaimana pada tabel 3.125 berikut ini:

Tabel 3.125 Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Pendapatan LRA) Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi Penerimaan *
	Total Pajak dan Retribusi	319.398.482.215,92
I	Pajak Daerah	300.371.879.784,92
	1) Pajak Hotel	100.141.322.470,75
	2. Pajak Restoran	42.231.740.607,12

	3. Pajak Hiburan	6.637.708.016,15
	4. Pajak Reklame	472.274.278,00
	5. Pajak Penerangan Jalan	13.944.606.349,92
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.773.584.512,98
	7. Pajak Parkir	255.010.501,00
	8. Pajak Air Bawah Tanah	-
	9. Pajak Sarang Burung Walet	3.900.000,00
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	87.968.455.033,00
	11. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	21.943.278.016,00
II	Retribusi Daerah	19.026.602.431,00
	1. Retribusi Jasa Umum	266.012.000,00
	2. Retribusi Jasa Usaha	8.773.738.384,00
	3. Retribusi Perizinan Tertentu	8.835.898.169,00

f. Pencapaian realisasi pajak terutang dan realisasi penerimaan terhadap target tahun 2019

Pencapaian realisasi pajak terutang terhadap target tahun 2019 sebesar Rp 311.543.708.757,51 atau sekitar 116,81 % dari target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 300.371.879.784,92 atau sekitar 149,18% dengan rincian sebagaimana pada tabel 3.135 berikut ini:

Tabel 3.126 Pencapaian realisasi pajak terutang dan realisasi penerimaan pajak terhadap target tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi Pajak Terutang	%	Realisasi Penerimaan	%
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7 (6/3*100)
	Jumlah	201.352.420.000,00	311.543.708.757,51	154,73	300.371.879.784,92[*]	149,18
1	Pajak Hotel	93.751.220.000,00	99.991.768.460,00	106,66	100.141.322.470,75	106,82
2	Pajak Restoran	38.078.280.000,00	42.783.202.352,00	112,36	42.231.740.607,12	110,91
3	Pajak Hiburan	5.558.500.000,00	6.020.524.646,00	108,31	6.637.708.016,15	119,42

No	Uraian	Target	Realisasi Pajak Terutang	%	Realisasi Penerimaan	%
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7 (6/3*100)
4	Pajak Reklame	399.800.000,00	459.160.903,00	114,85	472.274.278,00	118,13
5	PPj	12.088.370.000,00	13.933.844.723,00	115,27	13.944.606.349,92	115,36
6	Pajak MBLB	16.017.700.000,00	24.893.998.942,00	155,42	26.773.584.512,98	167,15
7	Pajak Parkir	237.800.000,00	255.010.501,00	107,24	255.010.501,00	107,24
8	Pajak ABT	-	-		-	
9	Pajak SBW	3.750.000,00	3.900.000,00	104,00	3.900.000,00	104,00
10	BPHTB	12.000.000.000,00	87.963.156.732,00	733,03	87.968.455.033,00	733,07
11	PBB P2	23.217.000.000,00	34.178.128.444,00	147,21	21.943.278.016,00	94,51
12	SKPDKB		1.061.013.054,51			

g. Evaluasi (penilaian)

- (1) Total realisasi pajak terutang pada tahun 2019 sebesar Rp.311.543.708.757,51 yang terdiri dari masa pajak Des 2018 sampai dengan Nov 2019 sebesar Rp.310.457.663.303, masa pajak dibawah Desember 2018 sebesar Rp. 26.408.400, dan dari ketetapan kurang bayar sebesar Rp. 1.061.013.054,51. Jika dibandingkan dengan total target yang ditetapkan yakni sebesar Rp.201.352.420.000,00 maka dapat di simpulkan bahwa realisasi pajak terutang telah melampaui target tahun 2019 sebesar Rp. 109.105.243.303 atau sekitar 54,18%.
- (2) Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp 300.371.879.784,92 merupakan penerimaan dari pembayaran atas piutang pajak tahun sebelumnya, pembayaran atas masa pajak

tahun berjalan dan pembayaran atas kekurangan pelaporan pajak terutang yang dilaporkan pada tahun 2019 serta atas pembayaran pajak kurang bayar yang ditetapkan pada tahun 2019. Secara total realisasi penerimaan pajak daerah jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan telah melampaui target sebesar Rp 99.019.459.785 atau sekitar 49,17 %.

- (3) Terdapat selisih antara realisasi pajak terutang dan realisasi penerimaan sebesar Rp 10.085.783.518, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat realisasi pajak terutang yang belum dilakukan pembayaran pada tahun 2019 sehingga akan mempengaruhi bertambahnya nilai piutang pada Neraca keuangan Bapenda Kabupaten Bintan.
- (4) Secara total realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 19.026.602.431, telah melampaui target sebesar Rp 5.660.002.431 atau sekitar 42,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 13.366.600.000.
- (5) Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 90.681.954.251,18 atau sekitar 43,25% jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018 yakni sebesar Rp 209.689.925.533,74.
- (6) Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 8.562.848.534,00 atau sekitar 81,83% jika dibandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2018 yakni sebesar Rp 10.463.753.897,00.

2) Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan

a. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

- (1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;
- (2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun 2017 dengan 2016;
- (3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yaitu tahun 2016-2021;
- (4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- (5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2019, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah

$$\text{Capaian indikator} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

- Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran

- Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
85 s/d 100 : Sangat Berhasil
70 s/d < 85 : Berhasil
55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun Indikator Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan berdasarkan Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.127 Capaian Kinerja Bapenda Kabupaten Bintan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (M)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
1	Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD				
		Persentase Pendapatan Asli Daerah	Rp.256,74	354.661.851.702,43	138,14
2	Menurunnya tunggakan pajak daerah	Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah	Rp.9.923	14.925.838.955,42	150,42

Komponen Pendapatan secara keseluruhan adalah menjadi tugas dan fungsi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Komponen tugas dan fungsi Bapenda Kab. Bintan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya yaitu Bagian Laba Usaha

Daerah dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah masih dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan.

b. Analisis Pencapaian Kinerja

▪ **Perbandingan Target dan Realisasi**

Misi 3 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Tujuan 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis.

Sasaran : Tercapainya target dan pengamanan semua Jenis PAD.

Indikator Sasaran Kinerja adalah Persentase Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah pada tahun 2019 mengambil Kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan daerah pada tingkat yang maksimal guna membiayai belanja daerah, kebijakan dimaksud disesuaikan dengan asumsi-asumsi makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dalam kerangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah.

Berdasarkan realisasi, pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan, tetapi masih sangat perlu dilakukan upaya-upaya/ terobosan untuk mengoptimalkan, menggali potensi penerimaan berdasarkan perluasan basis pajak daerah

serta jenis pajak dan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.128 berikut ini:

Tabel 3.128 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

NO	KOMPONEN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	240.554.279.251,96	286.602.276.549,94	119,14
	Pajak Daerah	193.966.820.000,00	209.689.787.533,74	108,11
	Retribusi Daerah	8.624.000.000,00	10.386.023.897,00	120,43
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.994.946.188,00	13.994.946.188,00	100
	Lain-lain PAD yang Sah	23.968.513.063,96	52.531.518.931,20	219,17

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018, maka realisasi penerimaan daerah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,96%. Peningkatan PAD secara keseluruhan dari komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah sebesar 41,16%, Retribusi Daerah sebesar 21,91. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan 2019 dapat dilihat pada tabel 3.129 berikut ini:

Tabel 3.129 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

KOMPONEN	TARGET	REALISASI (*)	%
Pendapatan Asli Daerah	256.744.718.840,00	354.661.851.702,43	138,14
Pajak Daerah	201.352.420.000,00	300.131.811.946,81	149,06
Retribusi Daerah	13.366.600.000,00	19.026.602.431,00	142,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.477.231.219,00	12.120.731.219,00	115,69
Lain-lain PAD yang Sah	31.548.467.621,00	23.382.706.105,62	74,12

(*) data unaudited

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa target atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.256.744.718.840,00 terealisasi sebesar Rp. 354.661.851.702,43 atau 138.14%. Dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp.300.131.811.946,81 atau 149.06% dari target yang ditetapkan, realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 19.026.602.431,00 atau 142.34% dari target yang ditetapkan, Hasil Kekayaan yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 12.120.731.219,00 atau 115.69% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 23.382.706.105,62 atau sebesar 74.12% dari target yang ditetapkan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan terutama pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Realisasi penerimaan pada sektor Pajak dan Retribusi Daerah mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Adapun tren peningkatan penerimaan kedua sektor pajak daerah ini dapat dilihat melalui tabel 3.130 sebagai berikut :

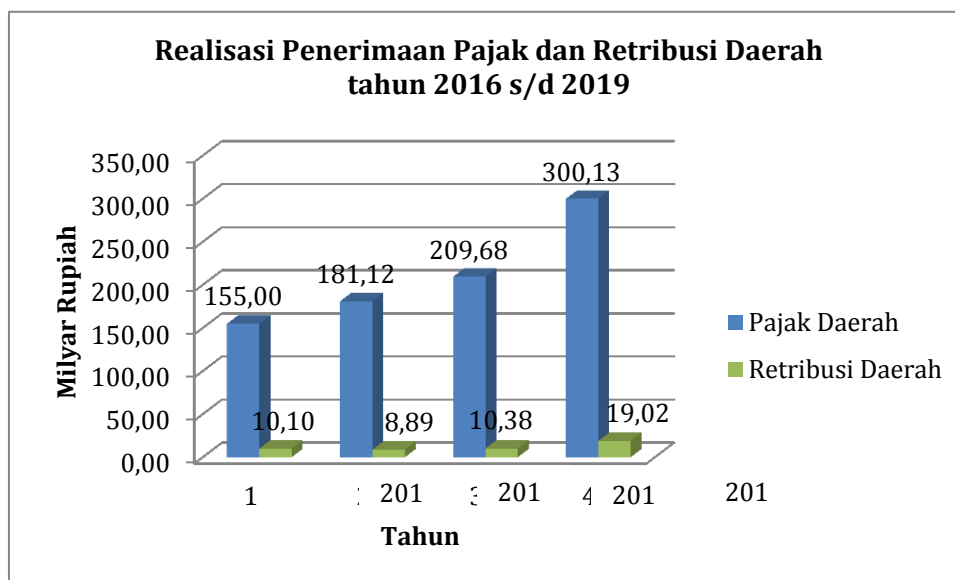
Tabel 3.130 Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2016 s/d 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
Pajak Dan Retribusi		165.115.978.280,08	190.013.718.703,88	220.075.811.430,74	319.158.414.377,81
Pajak Daerah		155.008.420.849,08	181.122.766.938,88	209.689.787.533,74	300.131.811.946,81
1	Pajak Hotel	70.944.862.526,66	82.562.359.215,66	97.284.585.816,86	99.901.245.452,64
2	Pajak Restoran	28.177.223.797,40	31.264.003.425,64	36.515.248.070,51	42.231.740.607,12
3	Pajak Hiburan	1.936.952.849,88	2.435.828.674,00	3.244.029.986,49	6.637.708.016,15
4	Pajak Reklame	514.386.226,85	356.011.359,78	532.501.954,00	472.274.278,00
5	PPJ	14.925.860.587,79	12.927.927.227,00	12.962.961.564,08	13.944.606.349,92
6	Pajak MBLB	9.599.553.585,00	11.185.756.814,00	16.697.747.842,00	26.773.584.512,98

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
7	Pajak Parkir	220.311.999,00	244.040.500,00	236.663.334,00	255.010.501,00
8	Pajak ABT	-	-	-	-
9	Pajak SBW	4.450.000,00	3.510.000,00	3.070.000,00	3.900.000,00
10	Pajak BPHTB	5.878.702.042,50	19.834.629.940,80	20.370.037.358,80	87.968.464.213,00
11	PBB P2	22.806.117.234,00	20.308.699.782,00	21.842.941.607,00	21.943.278.016,00
Retribusi Daerah		10.107.557.431,00	8.890.951.765,00	10.386.023.897,00	19.026.602.431,00
1	Retribusi Jasa Umum	393.403.500,00	314,373,400	286.525.690,00	266.012.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	3.376.067.190,00	3.787.548.000	6.927.016.900,00	9.498.183.976,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	6.338.086.741,00	4,789,030,365	3.172.481.307,00	9.262.406.455,00

Grafik realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2016 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.40 Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016 s.d 2019



Dari tabel dan grafik diatas dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bintan dalam hal peningkatan penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Misi 3 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Tujuan 1 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis.

Sasaran : Menurunnya tunggakan pajak daerah.

Indikator sasaran kinerja : Jumlah Piutang pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah.

Pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan ditargetkan untuk Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah sebesar Rp.9.923 M. Realisasi Penerimaan atas Piutang dan koreksi atas piutang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.131 dibawah ini:

Tabel 3.131 Realisasi Penerimaan atas Piutang Dan Koreksi atas Piutang

No	Uraian	Realisasi Pembayaran Piutang	Koreksi Piutang
	Pendapatan Asli Daerah	14.925.838.955,42	230.667.536,20
	Pajak Daerah	13.972.028.288,71	(66.455.703,76)
1	Pajak Hotel	3.856.115.414,60	(44,10)
2	Pajak Restoran	3.662.249.743,98	18,00
3	Pajak Hiburan	631.764.418,15	-
4	Pajak Reklame	13.113.375,00	(311.461.707,06)
5	PPJ	-	(121,00)
6	Pajak MBLB	1.918.998.878,98	(1.170.185,00)
7	Pajak Parkir	-	-

8	BPHTB	-	(173.201,00)
9	PBB P2	3.889.786.458,00	246.349.536,39
10	Pajak Sarang Burung Walet	-	-
Retribusi Daerah		56.403.976,00	-
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	- Sewa Rumah Dinas	56.403.976,00	-
Lain-lain PAD yang Sah		897.406.690,71	297.123.239,96
12	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	156.725.023,95	-
13	Denda Pajak Hotel	32.638.647,74	87.346.859,67
14	Denda Pajak Restoran	11.863.064,00	(42.071,88)
15	Denda Pajak Hiburan	1.964.590,00	-
16	Denda Pajak Reklame	-	-
17	Denda PPJ	197.001.121,02	-
18	Denda Pajak MBLB	-	-
19	Denda PBB P2	248.092.819,00	213.406.742,16
20	Denda Pajak SBW	-	-
21	Angsuran / Cicilan Penjualan Rumah	249.121.425,00	(3.588.290,00)
22	Angs. Kendaraan Dinas Roda 4	-	-

Realisasi Penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penerimaan atas Penagihan sisa Piutang Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 14.925.838.955,42 disamping itu juga dilakukan pula koreksi terhadap piutang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.230.667.536,20 yang merupakan koreksi terhadap piutang pajak daerah dan piutang lainnya. Koreksi ini dilakukan karena adanya penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Bintang tentang Penetapan Penghapusan Pajak Terutang Pajak Hotel, Surat Keputusan (SK) Bupati Bintang tentang Pengurangan Sanksi Administratif Pajak terhutang, Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintang tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan Pedesaan yang tidak benar atas SPPT Tahun 1998 s.d 2016 Secara Jabatan Kelurahan/Desa dan adanya koreksi pembayaran terhadap bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan atas piutang yang telah dibayarkan pada tahun sebelumnya yang masih tercatat sebagai piutang oleh KPP Pratama Bintan.

Target pencapaian Penagihan piutang dapat kita lihat pada tabel 3.132 dibawah ini :

Tabel 3.132 Target Pencapaian Penagihan Piutang Tahun 2019

URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
Piutang Pajak dan Lain-Lain	9.923.000.000,00	14.925.838.955,42	150.42

Berdasarkan tabel diatas untuk target pencapaian penagihan piutang tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.923.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 14.925.838.955,42 atau 150,42%.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp. 300.131.802.766,81 berasal dari pembayaran atas masa berjalan pajak tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 286.159.774.478,10 dan atas piutang pajak tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp.13.972.028.288,71. Realisasi penerimaan atas masa berjalan Retribusi Daerah sebesar Rp. 6.000.000 dan atas piutang pajak tahun sebelumnya sebesar Rp. 56.403.976,00. Serta realisasi penerimaan atas masa berjalan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.485.790.757,07 dan atas piutang tahun sebelumnya sebesar Rp.897.406.690,71. Rincian tersebut Dapat dilihat pada tabel 3.133 dibawah ini:

Tabel 3.133 Rincian Realisasi Pembayaran Atas Piutang Dan Atas Masa Berjalan Tahun 2019

No	Jenis Pajak	Atas Piutang	Atas Masa Berjalan	Jumlah
Pendapatan Asli Daerah		14.925.838.955,42	286.651.565.235,17	301.577.404.190,59
Pajak Daerah		13.972.028.288,71	286.159.774.478,10	300.131.802.766,81
1	Pajak Hotel	3.856.115.414,60	96.045.130.038,04	99.901.245.452,64
2	Pajak Restoran	3.662.249.743,98	38.569.490.863,14	42.231.740.607,12
3	Pajak Hiburan	631.764.418,15	6.005.943.598,00	6.637.708.016,15
4	Pajak Reklame	13.113.375,00	459.160.903,00	472.274.278,00
5	PPJ	-	13.944.606.349,92	13.944.606.349,92
6	Pajak MBLB	1.918.998.878,98	24.854.585.634,00	26.773.584.512,98
7	Pajak Parkir	-	255.010.501,00	255.010.501,00
8	BPHTB	-	87.968.455.033,00	87.968.455.033,00
9	PBB P2	3.889.786.458,00	18.053.491.558,00	21.943.278.016,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	-	3.900.000,00	3.900.000,00
Retribusi Daerah		56.403.976,00	6.000.000,00	62.403.976,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Rumah Dinas	56.403.976,00	6.000.000,00	62.403.976,00
Lain-lain PAD yang Sah		897.406.690,71	485.790.757,07	1.383.197.447,78
12	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	-	-	-
13	Denda Pajak Hotel	156.725.023,95	452.579.936,07	609.304.960,02
14	Denda Pajak Restoran	32.638.647,74	11.802.327,00	44.440.974,74
15	Denda Pajak Hiburan	11.863.064,00	7.479.716,00	19.342.780,00
16	Denda Pajak Reklame	1.964.590,00	1.276.150,00	3.240.740,00
17	Denda PPJ	-	2.039,00	2.039,00
18	Denda Pajak MBLB	197.001.121,02	-	197.001.121,02
19	Denda BPHTB	-	5.397.382,00	5.397.382,00
20	Denda PBB P2	248.092.819,00	7.253.207,00	255.346.026,00

No	Jenis Pajak	Atas Piutang	Atas Masa Berjalan	Jumlah
21	Denda Pajak SBW	-	-	-
22	Angsuran / Cicilan Penjualan Rumah	249.121.425,00	-	249.121.425,00
23	Angs. Kendaraan Dinas	-	-	-

- **Membandingkan antara target kinerja DPA dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, 2017, 2016, dan 2015 dapat dilihat pada tabel 3.134 berikut:

Tabel 3.134 Target kinerja DPA/DPPA tahun 2015 s/d 2019

Sasaran	Indikator Kinerja		Target DPA/DPPA				
			2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD	1	Persentase Pendapatan Asli Daerah	176,62 M	184,81 M	225,73 M	240,55 M	256,74 M
Menurunnya tunggakan pajak daerah	2	Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah	-	3.650 M	14.657 M	10.318 M	9.923 M

Tabel 3.135 Realisasi Kinerja DPA/DPPA tahun 2015 s/d 2019

Sasaran	Indikator Kinerja		Realisasi DPA/DPPA				
			2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD	1	Persentase Pendapatan Asli Daerah	186,63 M	206,29 M	257,00 M	286,60 M	354,66 M
Menurunnya tunggakan	2	Jumlah Akurasi	-	3.623 M	11.042 M	8.858 M	14.925 M

pajak daerah		Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah					

Tabel 3.136 Rasio Kinerja DPA/DPPA tahun 2015 s/d 2018

Sasaran	Indikator Kinerja		Rasio DPA/DPPA (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD	1	Persentase Pendapatan Asli Daerah	105,66	111,62	113,85	119,14	138,14
Menurunnya tunggakan pajak daerah	2	Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah	-	99,26	75,34	85,86	150,42

Dari tabel perbandingan kinerja DPA/DPPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan tahun 2015 s/d 2019 terhadap indikator kinerja utama, yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sebesar 111,62 %, tahun 2017 113,85 %, tahun 2018 sebesar 119,14 % dan tahun 2019 sebesar 138,14%. Jumlah Akurasi Piutang Pajak Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan serta Penyelesaian Piutang Pajak Daerah tahun 2016 sebesar 99,26 %, tahun 2017 75,34 %, tahun 2018 85,86 % dan tahun 2019 150,42%, terlihat peningkatan rasio capaian kinerja setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan terutama dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah Daerah 2016-2021.**

Perbandingan Capaian Kinerja pada Misi dengan Target Jangka Menengah Daerah yang di jabarkan kedalam Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.137 Target Kinerja Renstra Bapenda Kabupaten Bintan 2016-2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2016-2021			
		2016	2017	2018	2019
Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD	1 Persentase Pendapatan Asli Daerah	100% (184,81 M Penetapan target DPA)	100% (225,73 M Penetapan target DPA)	100% (240,55 M Penetapan target DPA)	100% (256,74 M Penetapan target DPA)
Menurunnya tunggakan pajak daerah	2 Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah	3.650 M	14.657 M	10.318 M	9.923 M

Tabel 3.138 Capaian Kinerja Renstra Bapenda Kabupaten Bintan 2016-2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Renstra 2016-2021			
		2016	2017	2018	2019
Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD	1 Persentase Pendapatan Asli Daerah	206,29 M	257,00 M	286,60 M	354,66 M
Menurunnya tunggakan pajak daerah	2 Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah	3.623 M	11.042 M	8.858 M	14.925

**Tabel 3.139 Rasio Capaian Kinerja Renstra Bapenda Kabupaten
Bintan 2016-2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	Rasio Capaian Renstra 2016-2021 (%)			
		2016	2017	2018	2019
Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD	1 Persentase Pendapatan Asli Daerah	111,62	113,85	119,14	138,14
Menurunnya tunggakan pajak daerah	2 Jumlah Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah	99,26	75,34	85,86	150,42

Jika dilihat berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah terhadap target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan 2016-2021 dapat dikatakan tercapai dan melebihi target terutama pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu 111,62 % pada tahun 2016, 113,85 % tahun 2017, 119,14% di tahun 2018 dan 138,14% di tahun 2019. Untuk indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan termasuk dalam predikat **Sangat Berhasil**. Sedangkan untuk Akurasi Piutang Pajak tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian piutang pajak daerah yaitu 99,26 % tahun 2016, 75,34 % tahun 2017, 85,86 % tahun 2018 dan 150,42% di tahun 2019 dikategorikan dalam predikat **Berhasil**.

3.1.4.5 Urusan Fungsi Penunjang Kepegawaian

3.2.4.5.1 BKPSDM

Pencapaian indikator kinerja daerah pada **Misi Kesatu, Kedua, Ketiga dan Kelima** terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bintan untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah sebagai berikut :

1) Program Pendidikan Kedinasan

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan** melalui 5 (lima) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3,280,913,600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2,734,082,272,- atau 83.40%. *Outcome* Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

a. Pelaksanaan Program

(1) Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan

Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116,217,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (0%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan target jumlah peserta sebanyak 2 Peserta. Pelaksanaan Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II dilingkungan Kabupaten Bintan mengacu pada Perka LAN nomor 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II.

Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi para pejabat eselon II yang telah

mengikuti Pengiriman diklat Kepemimpinan dengan capaian target sebanyak 2 Peserta.

Kegiatan Pengiriman Diklat Kepemimpinan tidak bisa dilaksanakan dengan alasan Pimpinan tidak mengizinkan karena mangingat waktu jadwal pelaksanaan dari LAN pada bulan oktober sehingga bisa mengganggu kegiatan di OPD nya masing-masing. Dan dengan demikian serapan anggaran sebesar 0%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan.

(2) Kursus Bahasa Inggris

Kegiatan Kursus Bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79,650,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 71,990,500 (90.38%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Kursus Bahasa Inggris dengan target jumlah peserta sebanyak 25 peserta. Kursus ini diikuti oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan dilaksanakan selama 32 (tiga puluh dua) pertemuan. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kompetensi Berbahasa Inggris bagi ASN yang mengikuti kursus yaitu sebanyak 25 peserta.

Kegiatan Kursus Bahasa Inggris telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan realisasi fisik 100% dan serapan anggaran sebesar 90.38%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis.

(3) Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak

Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169,802,600 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 143,112,208 (84.28%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak dengan target jumlah peserta sebanyak 38 peserta. Diklat ini diikuti oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kompetensi Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak yaitu sebanyak 38 peserta. Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan realisasi fisik 100% dan serapan anggaran sebesar 84.28%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis.

(4) Pelatihan Manajemen Pengendalian Diri

Kegiatan Orientasi Pegawai Non PNS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 431,626,620 (95.92%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Orientasi Pegawai Non PNS dengan target jumlah peserta sebanyak 1156 peserta. Pelatihan ini diikuti oleh Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Memberikan perhatian kepada Pegawai Non PNS atau Tenaga Honorer di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bintan agar mampu memberikan pelayanan prima dan Melakukan Evaluasi terhadap Pegawai Non PNS atau Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dan hasil evaluasi ini akan digunakan untuk salah satu persyaratan penentu perpanjangan Perjanjian Kinerja dari Pegawai Non PNS atau Tenaga Honorer. Kegiatan Orientasi Pegawai Non PNS telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan realisasi fisik 100% dan serapan anggaran sebesar 95.92%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Teknis.

(5) Kegiatan Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar

Kegiatan Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,465,191,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.089.452.944 (84.76%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar dengan target jumlah peserta sebanyak 250 CPNS. Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar dilaksanakan di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam dan dilaksanakan dalam 3 gelombang, dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 15 Desember 2019. Peserta Pelatihan Dasar adalah CPNS Gol. II dan III Formasi Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, berjumlah 195 orang dengan rincian 163 untuk golongan III dan 61 untuk golongan II. Untuk capaian target peserta CPNS yang mengikuti Latsar hanya sebanyak 190 orang , 3 orang CPNS dari STTD dan 2 orang CPNS dari Kemenkes berdasarkan jumlah CPNS yang lulus tahun 2018.

Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan CPNS tersebut tentang bagaimana menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kegiatan Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar telah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan realisasi fisik 100% dan serapan anggaran sebesar 84.76%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan.

Capaian Indikator Kinerja OPD Tahun 2019 untuk program ini adalah:

(1) Indikator Persentase Jumlah Aparatur Yang Sudah Mengikuti Diklat Pim Dan Prajabatan

Merupakan indikator yang ditujukan untuk melihat sejauh mana realisasi dari salah satu tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan yaitu meningkatkan kompetensi para CPNS Kabupaten Bintan, STTD dan Kemenkes dengan mendiklatkan para CPNS. Indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh kegiatan Diklat Prajabatan dan data-data pejabat yang sudah mengikuti Diklat PIM. Untuk indikator persentase jumlah aparatur yang sudah mengikuti Diklat PIM dan Prajabatan, pada tahun 2019 terealisasi sebesar 79%. Persentase tersebut diperoleh dari penghitungan jumlah CPNS yang Lulus Diklat Prajabatan berbanding jumlah CPNS. Adapun jumlah CPNS yang Lulus Diklat Prajabatan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 195 orang. Sedangkan jumlah CPNS Tahun 2019 adalah sebanyak 195 orang. Sementara Jumlah Struktural yang telah mengikuti Diklat PIM sebanyak 403 Orang sedangkan Jumlah Pejabat Struktural 702 Orang. Hal ini tidak

mencapai target dikarenakan Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk.II, Tk.III dan Diklat Kepemimpinan Tk.IV belum terakomodir didalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja.

(2) Persentase Jumlah Aparatur Fungsional Yang Dinyatakan Lulus Dalam Diklat Fungsional

Merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana peningkatan kompetensi fungsional bagi para pejabat fungsional tertentu. Capaian dari indikator ini diperoleh dari hasil penyelenggaraan diklat fungsional baik yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan maupun OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan maupun Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2019, penghitungan terhadap indikator ini menggunakan data hasil rekapitulasi jumlah ASN yang didalamnya memuat jumlah pejabat fungsional tertentu yaitu sebanyak 1.675 orang dari total jumlah ASN sebanyak 3.288. Penghitungan terhadap indikator persentase jumlah aparatur fungsional yang dinyatakan lulus dalam diklat fungsional adalah jumlah aparatur fungsional yang lulus diklat fungsional tertentu berbanding dengan jumlah pejabat fungsional tertentu. Data jumlah aparatur fungsional yang lulus diklat fungsional tertentu adalah sebanyak 1.675 orang sedangkan data jumlah pejabat fungsional tertentu adalah sebanyak 1.675. Dengan demikian dapat diperoleh persentase sebesar 100%. Persentase tersebut berada sedikit diatas target yang ditetapkan.

(3) Persentase Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis

Merupakan indikator yang ditujukan untuk melihat sejauhmana peningkatan kompetensi teknis PNS dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Pencapaian target dari indikator ini, pada tahun 2019 di dukung oleh kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak, Orientasi Pegawai Non ASN dan Kursus Bahasa Inggris. Ketiga Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan informasi kebutuhan diklat pada OPD. Realisasi indikator persentase jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis diperoleh dari penghitungan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis berbanding dengan jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis. Untuk tahun 2019, jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimbingan teknis adalah sebanyak 1.247 orang. Dari 1.247 peserta tersebut telah dinyatakan lulus/berhasil dalam mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa capaian kinerja dari indikator ini adalah 100%. Capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk terus menciptakan aparatur yang profesional, maka diklat/bimbingan teknis/kursus harus tetap diselenggarakan setiap tahunnya.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Kedinasan secara umum tidak ditemui hambatan yang berarti sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan antara lain :

- a) Belum tersedianya infrastruktur Balai Diklat yang representatif yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai tempat penyelenggaraan Diklat,

sehingga pelaksanaan diklat Prajabatan khususnya dan diklat-diklat lainnya pada umumnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan harus menggunakan hotel/penginapan sebagai tempat penginapan/asrama peserta diklat.

- b) Belum tersedianya tenaga pengajar/widyaiswara yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang mengikuti Training of Fasilitator (ToF), sehingga di dalam pelaksanaan Diklat dimaksud sangat bergantung pada widyaiswara yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dan Lembaga Administrasi Negara serta lembaga lainnya.

2) Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan** melalui 8 (delapan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1,184,887,400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1,055,480,396,- atau 89,08%. Outcome program ini adalah Meningkatnya sistem informasi manajemen kepegawaian.

a. Pelaksanaan Program

(1) Pelaksanaan Mutasi dan Kepangkatan

Kegiatan Pelaksanaan Mutasi dan Kepangkatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 668,865,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 618,623,458 (92,49%), merupakan kegiatan

dengan keluaran (output) jumlah Pegawai yang mengurus kenaikan pangkat dengan target sebanyak 600 ASN; 400 ASN, terlaksananya Penyelenggaraan Baperjakat mutasi yaitu sekitar 196 ASN. Terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan eselon II.b 1 orang, jabatan administrator yang setara dengan eselon III.a dan III.b 43 orang dan jabatan pengawas yang setara dengan eselon IV.a dan IV.b sebanyak 152 orang. Proses pengurusan kenaikan pangkat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu kenaikan pangkat periode April dan kenaikan pangkat periode Oktober. Target dari kegiatan ini adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Sementara itu, Baperjakat dilaksanakan setiap akan diadakan mutasi baik pejabat maupun pelaksana, untuk waktunya tidak dapat ditentukan dan bersifat rahasia. Rata-rata jumlah frekuensi Baperjakat tiap tahunnya berbeda-beda tergantung dari kondisi dan kebutuhan akan pegawai.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbitnya Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat untuk 574 ASN, Penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya yaitu 702 ASN Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 92.49%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya.

(2) Penataan SIMPEG Daerah

Kegiatan Penataan SIMPEG Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42,840,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40,252,429 (93.95%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya updating data

kepegawaian (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 4 dokumen DUK. Kegiatan Penataan SIMPEG Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2019. Pada kegiatan tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan melakukan peremajaan data kedalam Aplikasi SIMPEG mencakup peremajaan pangkat, jabatan, status kepegawaian yang akan dituangkan kedalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Selain melakukan peremajaan Data di Aplikasi SIMPEG juga melakukan Peremajaan Data pada SAPK, hal ini dilakukan untuk mensinkronisasikan antara Data di SIMPEG dan SAPK. Untuk saat ini SIMPEG dan SAPK belum terintegrasi sehingga memerlukan rekonsiliasi dan sinkronisasi antara kedua Aplikasi tersebut. Namun kedepan nya akan ada Aplikasi SIMPEG Nasional dari BKN yang sudah terintegrasi dengan Pelayanan SAPK. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya akurasi data kepegawaian di aplikasi SIMPEG dan SAPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu sebanyak 4 Dokumen DUK. Kegiatan Penataan SIMPEG Daerah secara fisik telah terealisasi secara tuntas (100%) yaitu dengan 4 Dokumen DUK. Adapun serapan anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar 93.95%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya.

(3) Seleksi Calon Praja IPDN dan Taruna STTD

Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN dan Taruna STTD yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43,280,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 35,101,044 (81.10%), merupakan kegiatan

dengan keluaran (output) Jumlah calon Praja IPDN dan Taruna STTD yang lulus seleksi dengan target sebanyak 2 calon Praja IPDN/Taruna STTD. Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN dan Taruna STTD dimaksudkan untuk memfasilitasi para lulusan SLTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu IPDN dan STTD. Selain itu juga, agar lulusan SLTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan lebih mudah melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, maka pada tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Bintan membuka peluang dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan pihak STTD. Adapun peserta seleksi adalah anak-anak lulusan SLTA di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan calon praja IPDN dan Taruna STTD yaitu sebanyak 2 Orang Praja IPDN/Taruna STTD. Dari hasil pelaksanaan seleksi calon praja IPDN tahun 2018, untuk Kabupaten Bintan, calon praja IPDN yang dinyatakan lulus sebanyak 2 Praja dan calon Taruna STTD yang dinyatakan lulus sebanyak 1 Taruna IPDN dan 1 Taruna STTD. Jumlah calon praja/taruna yang lulus masih berada dibawah target yang telah ditentukan.

Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 81.10%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya.

(4) Pengurusan Kartu Pegawai

Kegiatan Pengurusan Kartu Pegawai dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44,312,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41,980,549 (94.73%). Keluaran (output) dari kegiatan Pengurusan Kartu Pegawai adalah terlaksananya Pengurusan Kartu Pegawai yang ditargetkan 60 Kartu namun yang dapat terselesaikan adalah 61 Kartu. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan Pengurusan Kartu Pegawai adalah Meningkatnya Efektifitas Pengurusan Kartu Pegawai yaitu 61 Kartu Pegawai. Kegiatan pengurusan kartu pegawai secara fisik telah terealisasi secara tuntas (100%) dengan serapan anggaran sebesar 94.73%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

(5) Pengurusan Karis dan karsu PNS

Kegiatan Pengurusan Karis-karsu PNS dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46,590,400 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 42,739,021 (91.73%). Keluaran (output) dari kegiatan Pengurusan Karis-karsu PNS adalah terlaksananya Pengurusan Kartu Suami dan Kartu Istri yang ditargetkan 100 Orang namun yang dapat terselesaikan adalah 128 orang. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan Pengurusan Karis-karsu PNS adalah Meningkatnya Efektifitas Pengurusan Karis-karsu PNS yaitu 129 Orang. Kegiatan pengurusan kartu pegawai secara fisik telah terealisasi secara tuntas (100%) dengan serapan anggaran sebesar 91.73%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

(6) Pengurusan Pensiun Pegawai

Kegiatan Pengurusan Pensiun Pegawai dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 93,598,810 (78.65%). Keluaran (output) dari kegiatan Pengurusan Pensiun Pegawai adalah terlaksananya Pengurusan Pensiun PNS dan Pensiun PTT/Honorer yang ditargetkan 40 PNS dan 10 PTT/Tenaga Honorer namun yang dapat terselesaikan adalah 114 PNS dan 1 PTT/Tenaga Honorer. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan Pengurusan Pensiun Pegawai adalah Meningkatnya Efektifitas Pengurusan Pensiun Pegawai. Kegiatan pengurusan kartu pegawai secara fisik telah terealisasi secara tuntas (100%) dengan serapan anggaran sebesar 78.65%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

(7) Pelaksanaan Penyusunan Pola Karir

Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Pola Karir dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90,413,304 (75.34%). Keluaran (output) dari kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Pola Karir adalah Terlaksananya Penyusunan pola karir PNS. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan Pelaksanaan Penyusunan pola karir adalah Pedoman pola karir PNS. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan pola karir secara fisik telah terealisasi secara tuntas (100%) dengan serapan anggaran sebesar 75.34%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya.

(8) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 92,771,781 (92.77%). Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2019 dibuka Oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bintan dalam sambutannya dikatakan bahwa kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan sistem CAT merupakan salah satu bentuk komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bintan dalam menerapkan prinsip obyektif, transparansi dan akuntabilitas. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah merupakan bentuk ujian untuk mendapatkan penghargaan bagi para pegawai sehingga tidak setiap pegawai berhak memperolehnya. Terdapat persyaratan administrasi hingga persyaratan kompetensi yang harus diuji kelayakannya sehingga berhak memperoleh penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya peserta diharapkan untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Keluaran (output) dari kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah adalah jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah dengan target 45 ASN dan realisasinya 57 ASN yang mengikuti. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah adalah terpenuhi persyaratan kenaikan pangkat PNS. Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah secara fisik telah terealisasi secara tuntas (100%) dengan serapan anggaran sebesar 92.77%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

Capaian Indikator Kinerja OPD Tahun 2019 untuk program ini adalah:

(1) Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensinya

Merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana persentase kesesuaian antara aparatur dengan kompetensi yang dimilikinya dalam menduduki suatu jabatan tertentu. Untuk mencapai targetnya, indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Kepangkatan, Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN/Taruna STTD, kegiatan Penataan SIMPEG Daerah dan uji Kompetensi. Persentase capaian dari indikator ini diperoleh dari hasil penghitungan jumlah aparatur yang menduduki jabatan berbanding dengan jumlah total jabatan. Untuk tahun 2019, jumlah aparatur yang menduduki jabatan adalah sebanyak 2.377 pejabat yang terdiri dari 702 pejabat struktural dan 1.675 pejabat fungsional tertentu. Sedangkan jumlah total jabatan adalah sebanyak 2.423 jabatan yang terdiri dari 748 jabatan struktural dan 1.675 jabatan fungsional tertentu. Sehingga dapat diketahui capaian dari indikator ini adalah 98.10%. Artinya bahwa hampir seluruh jabatan telah terisi dengan tepat sesuai dengan kompetensi pejabat yang bersangkutan.

(2) Persentase Kelengkapan Administrasi Kepegawaian

Merupakan indikator yang ditujukan untuk melihat sejauh mana persentase kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dapat terlengkapi. Indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain kegiatan Pengurusan Kartu Pegawai, Pengurusan Karis-karsu PNS dan Pengurusan Pensiun Pegawai. Persentase capaian dari indikator ini diperoleh dari penghitungan jumlah dokumen

kepegawaian yang terselesaikan berbanding dengan jumlah usulan dokumen administrasi kepegawaian. Data jumlah dokumen kepegawaian yang terselesaikan adalah sebanyak 305 dokumen. Sedangkan target jumlah usulan dokumen administrasi kepegawaian juga sebanyak 210 dokumen. Sehingga diperoleh capaian kinerja dari indikator ini adalah sebesar 100%. Hal ini bermakna bahwa setiap usulan dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi kepegawaian dapat ditindaklanjuti dengan baik/terselesaikan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah tidak terdapat kendala yang berarti namun karena kurangnya personil dalam melakukan pengentrian untuk itu perlu adanya penambahan personil dalam pengentrian sehingga data yang dikelola lebih akuntabel dan lebih akurat.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bintan** melalui 9 (sembilan) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1,248,017,753,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.873,236.572,- atau 69.97%. *Outcome* program ini adalah Meningkatnya ketepatan penanganan kasus-kasus pegawai dan Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur

a. Pelaksanaan Program

(1) Pemberian Penghargaan Bagi PNS

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 40,114,720 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26,661,438 (66.46%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS dengan target sebanyak 220 Orang PNS. Kegiatan ini diikuti oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Penghargaan yang diberikan berupa penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun, XX Tahun, XXX Tahun. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan penghargaan bagi PNS yaitu sebanyak 220 Orang PNS. Secara fisik kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS telah terealisasi 100.00% dengan penerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya sebanyak 205 Orang PNS dan Usulan penghargaan Satya Lancana Karya Satya Tahun 2019 sebanyak 260 Orang PNS. Adapun serapan anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar 66.46%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja indeks kepuasan aparatur.

(2) Penanganan Kasus-Kasus Disiplin

Kegiatan penanganan kasus-kasus disiplin yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120,749,920 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90,516,882 (74.96%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya penanganan kasus-kasus pegawai dengan target penyelesaian sebanyak 10 Kasus Disiplin dan 15 Kasus Perceraian. Kasus-kasus pegawai yang ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan adalah kasus-kasus disiplin dan kasus-kasus perceraian. Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas penanganan kasus-kasus pegawai

yaitu sebanyak 25 kasus. Berdasarkan hasil laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal. Pada tahun 2019 ini jumlah kasus yang ditangani sebanyak 12 kasus yang terdiri dari 7 kasus perceraian dan 5 kasus disiplin. Secara fisik kegiatan ini terealisasi 100.00% dengan serapan anggaran sebesar 74.69%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penanganan kasus-kasus disiplin aparatur.

(3) Pembinaan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Kegiatan pembinaan tugas belajar dan ikatan dinas yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 321,544,400 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 160,086,182 (49.78%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya pembinaan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dengan target sebanyak 15 orang. Pada kegiatan Pembinaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas, Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diberikan dukungan anggaran selama yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas dengan mengajukan proposal terlebih dahulu. Besarnya dukungan anggaran tersebut berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikutinya dan kemampuan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi ASN yang mengikuti ijin belajar berjumlah 41 pemohon baru, tugas belajar dan ikatan dinas yaitu sebanyak 3 orang dengan rincian 1 (satu) orang pegawai tugas belajar yang dibiayai oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PUSBINDIKLATREN BAPPENAS),

dan 2 (dua) orang PNS tugas belajar yang memperoleh bantuan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Bintan. Terdapat 3 (tiga) orang PNS tugas belajar yang melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri/pribadi dengan catatan tidak akan meminta ganti rugi biaya pendidikan dan akan mengabdikan pada Pemkab Bintan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan 4 (empat) orang PNS tugas belajar yang telah diwisuda atau dinyatakan selesai menjalani pendidikan formal dan telah kembali mengabdikan pada Pemkab Bintan. Dari hasil laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan ini secara fisik telah terlaksana 100% dan resapan anggaran 49.78%, dikarenakan 4 orang yang telah diwisuda dan tidak lagi dibantu beasiswa perkuliahannya. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja indeks kepuasan aparatur.

(4) Pembekalan Pembinaan Pegawai

Kegiatan Pembekalan Pembinaan Pegawai yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 150,010,855 (75.01%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya pembekalan pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 38 Peserta. Sasaran dari Penyelenggaraan Pembekalan Pembinaan Kepegawaian adalah untuk meningkatkan pemahaman dan teknik pengimplementasian Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai, Pemberhentian Pegawai, Pemberhentian Pegawai, Cuti, Izin Perkawinan, dan Perceraian PNS sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya efektifitas pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan

laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan pembekalan pembinaan pegawai telah terealisasi 100%. Dan menyerap anggaran sebesar 81.91%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase penanganan kasus-kasus disiplin aparatur.

(5) Asistensi Penyusunan LHKPN

Kegiatan Asistensi Penyusunan LHKPN yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37,860,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 30,965,818 (81.79%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Asistensi Penyusunan LHKPN bagi Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 200 Orang. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah Meningkatnya Efektifitas Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Pada Tahun 2019 adanya sistem baru yang memerlukan beberapa tahapan diantaranya:

- a) Pembentukan Tim Admin Kabupaten Bintan Melalui SK Kepala BKPSDM Kabupaten Bintan.
- b) Pembentukan Tim Admin Unit Kerja
- c) Pembuatan Master Kabupaten Bintan
- d) Penyampaian Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-filling ke setiap OPD
- e) Melakukan Verifikasi terhadap laporan yang akan disampaikan ke KPK

Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan Asistensi Penyusunan LHKPN telah terealisasi 100%. Dan Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 81.79% dengan realisasi target kinerja 163 orang wajib lapor. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

(6) Pelaksanaan Uji Kompetensi

Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86,739,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 70,934,870 (81.78%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Uji Kompetensi bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 30 PNS. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah Terpenuhinya Persyaratan Kompetensi bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi telah terealisasi 100.00%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 81.78%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi.

(7) Supervisi Administrasi dan Kinerja Pegawai

Kegiatan Supervisi Administrasi dan Kinerja Pegawai yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109,418,645 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 97,860,727 (89.44%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Pelaksanaan Supervisi Administrasi dan Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 1 Laporan. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah Meningkatnya Tertib Administrasi dan Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Dalam Hal pelaporan kepatuhan terhadap penyusunan P2KP di tahun 2019 telah dilaporkan kinerja PNS yang bernilai baik sebanyak 2.711 (dua ribu tujuh ratus sebelas) orang dari 3.190 (tiga ribu seratus Sembilan puluh) orang PNS

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan Supervisi Administrasi dan Kinerja Pegawai telah terealisasi 100.00%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 89.44%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase jumlah pegawai dengan nilai SKP > baik.

(8) Penyusunan Alat Ukur Indeks Kepuasan Pegawai

Kegiatan Penyusunan Alat Ukur Indeks Kepuasan Pegawai yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31,591,068 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 25,865,400 (81.88%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) tersusunnya Alat Ukur Indeks Kepuasan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 1 Dokumen. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah Terukurnya Indeks Kepuasan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah telah dilaksanakan pengukuran dan penyusunan Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKPSDM. Pengukuran dan penyusunan Indeks Kepuasan Pegawai dilaksanakan oleh pihak CV. Cipta Ganistama Consultan dengan mengambil sample responden sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) orang dari total populasi berjumlah 1.105 (seribu seratus lima) orang. Dari kegiatan tersebut dari hasil oleh data menunjukkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Pegawai adalah senilai 80.78 dan skor senilai 3,231 dengan Mutu B. Penilaian ini muncul dengan uraian sebagai berikut:

- a) Unsur biaya/tarif senilai 97,9 dan skor senilai 3,918 dengan Mutu A.

- b) Unsur waktu penyelesaian adalah unsur terendah dengan nilai 75,6 dan skor 3,204 dengan Mutu C.

Unsur dengan kinerja Baik yaitu unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, Perilaku Pelaksana, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, serta Sarana dan Prasarana.

Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan Penyusunan Alat Ukur Indeks Kepuasan Pegawai telah terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 81.88%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja Indeks kepuasan aparatur.

(9) Penataan Presensi Online

Kegiatan Penataan Presensi Online yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 220,334,400 (89.44%), merupakan kegiatan dengan keluaran (output) terlaksananya Penataan Presensi Online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan target sebanyak 72 Unit Aplikasi Finger Print. Hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatnya akurasi data kehadiran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Kegiatan ini merupakan aplikasi penunjang dari alat finger print yang kita punya di masing-masing OPD dan sebagai alat memudahkan dalam rangka rekap data kehadiran tiap-tiap OPD. Berdasarkan laporan kemajuan program dan kegiatan, kegiatan Penataan Presensi Online telah terealisasi 100.00%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 73.44%. Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja persentase kelengkapan administrasi kepegawaian.

Capaian Indikator Kinerja OPD Tahun 2019 untuk program ini adalah:

(1) Kinerja Persentase Penanganan Kasus-Kasus Disiplin Aparatur

Merupakan indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana kasus-kasus yang masuk pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bintan dapat terselesaikan dengan tuntas. Indikator ini didukung oleh kegiatan Penanganan Kasus-kasus Disiplin Pegawai. Persentase capaian dari indikator ini diperoleh dari penghitungan jumlah kasus-kasus aparatur yang terselesaikan berbanding dengan jumlah kasus-kasus aparatur keseluruhan. Untuk tahun 2019, jumlah kasus yang terselesaikan adalah sebanyak 12 kasus yang terdiri dari 7 kasus Perceraian dan 5 kasus disiplin pegawai. Sedangkan total jumlah kasus-kasus aparatur yang masuk pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan adalah sebanyak 12 kasus yang terdiri dari 7 kasus Perceraian dan 5 kasus pelanggaran disiplin. Sehingga dapat diketahui capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

(2) Indeks Kepuasan Aparatur

Merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana kepuasan aparatur yang diperoleh melalui hasil survei terhadap aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Pada Tahun 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan bekerjasama dengan CV. Cipta Ganistama Consultan Tanjungpinang melakukan Penusunan Alat Ukur Indeks Kepuasan Pegawai, Hal ini mengukur Indeks Kepuasan Pegawai penilaian Responden terhadap Kinerja BKPSDM Kabupaten Bintan,

Penyampaian informasi tentang Reformasi Birokrasi, Performance BKPSDM dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi, profesionalisme kinerja BKPSDM dan kendala dalam berurusan dengan BKPSDM baik bersifat administratif maupun urusan lain. CV. Cipta Ganistama Consultan mengambil sample responden sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) orang dari total populasi berjumlah 1.105 (seribu seratus lima) orang. Dari kegiatan tersebut dari hasil oleh data menunjukkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Pegawai adalah senilai 80.78 dan skor senilai 3,231 dengan Mutu B. Penilaian ini muncul dengan uraian sebagai berikut:

- a) Unsur biaya/tarif senilai 97,9 dan skor senilai 3,918 dengan Mutu A.
- b) Unsur waktu penyelesaian adalah unsur terendah dengan nilai 75,6 dan skor 3,204 dengan Mutu C.
- c) Unsur dengan kinerja Baik yaitu unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, Perilaku Pelaksana, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, serta Sarana dan Prasarana.

(3) Persentase Jumlah Pegawai Dengan Nilai SKP > Baik

Merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana jumlah pegawai dengan nilai SKP > baik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Indikator ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Supervisi Administrasi dan Kinerja Pegawai. Persentase capaian dari indikator ini diperoleh dari penghitungan jumlah nilai SKP > baik berbanding dengan jumlah pegawai keseluruhan. Untuk tahun 2019, jumlah pegawai dengan nilai SKP > baik adalah 2711. Sedangkan jumlah pegawai yang mengumpulkan SKP adalah 2711 pegawai. Sedangkan total

jumlah keseluruhan pegawai adalah sebanyak 3190 orang. Sehingga dapat diketahui capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 85%. Hal ini jauh dari target dikarenakan belum semua pegawai yang mengumpulkan SKP sehingga pengukuran belum maksimal.

b. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengembangan tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti namun rendahnya angka penyerapan anggaran dikarenakan ada beberapa rekening yang tidak dapat direalisasikan misalnya: rekening honorarium belanja tenaga ahli/narasumber pada kegiatan Pengiriman Pelatihan Dasar dan Belanja Beasiswa tugas belajar Spesialis dan S2 pada kegiatan Tugas belajar.

3.1.5 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

3.1.5.1 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

a. Kebijakan dan Kegiatan

Pelaksanaan Kerja sama dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah kesepakatan antar gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan/atau gubernur atau bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, atau yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kebijakan kerjasama Kabupaten Bintan dengan pihak ketiga juga dilakukan dalam rangka pencapaian **misi ketiga** RPJMD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016–2021 yakni Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (**good governance**), dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerja sama antar daerah, yaitu: efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Perum LKBN

Bupati Bintan Apri Sujadi didampingi Kepala Dinas Kominfo Bintan Aupa Samake menandatangani **MoU (Memorandum of Understanding) dengan Perum LKBN** Antara bersama 6 Kabupaten/Kota lainnya di Lobby Adhiyana, Wisma Antara Lt. 2, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019. Dengan penandatanganan MoU tersebut, maka ini menjadi komitmen bagi Dinas Kominfo Bintan untuk dapat bekerjasama dengan Perum LKBN Antara dalam mengisi konten-konten informasi yang dibutuhkan masyarakat di lokasi – lokasi strategis berbentuk visual seperti video trone. Kepala Dinas Kominfo Bintan Aupa Samake saat ditemui mengatakan bahwa bentuk kerjasama berlangsung dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kominfo Bintan dapat menyiapkan lahan yang strategis, listrik serta jaringan internet untuk video trone, sementara perlengkapannya menjadi tanggungjawab pihak Perum LKBN Antara. Pemerintah Daerah menyiapkan beberapa hal pendukung seperti lokasi yang strategis, jaringan listrik dan internet sementara pengadaan dan pembangunan berasal dari pihak Perum LKBN Antara. Nanti untuk content video trone 60% dari pihak Perum LKBN Antara sementara Dinas Kominfo Bintan menyiapkan 40 % nya. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi masyarakat dalam bentuk visual. Sementara itu, Bupati Bintan mengungkapkan bahwa Dinas Kominfo memiliki peran yang sangat penting. Dengan kerjasama ini tentunya banyak informasi terkait Bintan khususnya dunia pariwisata menjadi lebih dikenal tidak saja mancanegara namun juga di Indonesia. Kominfo memiliki peranan strategis dalam memasarkan potensi daerah.

Tentunya harapan kita, kerjasama ini dapat memasarkan potensi pariwisata yang kita miliki, Apalagi dikatakannya bahwa tuntutan zaman digital sangat penting, dimana Bintan berbatasan dengan negara lain. Apalagi peranan integrasi sistem oleh Dinas Kominfo sangat memerlukan bantuan dari seluruh pihak. Selain Kabupaten Bintan, beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya juga menerima bantuan video trone indoor dan outdoor. Diantaranya Pemkab Tojo Una-Una, Pemkab Boven Digoel, Pemkab Majene, Pemkot Prabumulih dan Pemkot Palembang.

2.Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Kementerian Agama Bintan

Bertempat di Gedung Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, **Kementerian Agama Bintan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan pada hari Rabu, 17 Juni 2019.** Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) ini dilakukan oleh Kepala Kantor Kemenag Bintan; Drs. H. Erman Zaruddin, M.M.Pd dengan Kepala Dinas Kesehatan Bintan; dr. H. Gama Afisnaeni, Sp.A, M.Sc dan disaksikan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji & Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau; Drs. H. Afrizal, M.Pd dan para Kepala KUA Kecamatan Se-Kabupaten Bintan. MoU kerjasama ini tentang Pembinaan Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin Melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Se- Kabupaten Bintan. Menurut Kakankemenag Bintan kerjasama ini sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga dan mempersiapkan calon pengantin (catin) untuk mengandung dan melahirkan generasi yang cerdas. Dengan kerjasama pembinaan ini diharapkan dapat mewujudkan ketahanan nasional yang berawal dari ketahanan keluarga.

Menurut Kadis Dinkes Bintan, Gama mengatakan selain pengecekan kesehatan reproduksi, kerjasama ini juga melingkupi pemberian vitamin, edukasi tentang penyakit, dan imunisasi TT (Tetanus Toksoid) kepada catin. imunisasi TT ini sebaiknya diberikan 6 kali dan minimal 5 kali, terlebih jika lingkungan catin kurang fasilitas tenaga kesehatan, misalnya masih ada yang menggunakan jasa dukun. Bentuk kegiatan MoU ini dilaksanakan oleh setiap KUA (Kantor Urusan Agama) dan Puskesmas Kecamatan. Para Pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat diarahkan untuk mengecek kesehatan reproduksinya di Puskesmas yang ditunjuk. Setelah melakukan pengecekan kesehatan, pihak Puskesmas memberikan bukti kertas sebagai konfirmasi telah melaksanakan pengecekan kesehatan jika diminta oleh pihak KUA. Kerjasama ini tidak ada batasnya, hanya akan diperpanjang atau disudahi jika dirasa sudah cukup dilaksanakan

3. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bintan dengan BPJS Kota Tanjungpinang

Sebagai badan hukum publik yang mengelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada peserta, baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan juga di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (FKTR). Selain peningkatan pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan juga meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait yang akan berperan penting dalam pelaksanaan program JKN-KIS. Dalam rangka perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan penyelenggaraan program JKN-KIS di Kabupaten Bintan, **BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, pada**

19 Maret 2019. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Lenny Marlina T.U.M. mengatakan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan PKS yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dengan BPJS Kesehatan. Setiap tahunnya, BPJS Kesehatan akan melaksanakan forum koordinasi pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan badan usaha, dimana Dinas Tenaga Kerja juga termasuk anggota forum koordinasi tersebut. Forum ini kita adakan 2 kali setiap tahunnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Indra Hidayat menambahkan penandatanganan PKS ini merupakan bentuk komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dalam mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS di Kabupaten Bintan. Program JKN-KIS ini sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kabupaten Bintan, semoga dengan penandatanganan PKS ini dapat membantu meningkatkan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Bintan. Hingga Maret 2019, total kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Bintan adalah 115.354 jiwa, dimana dari total ini sebanyak 31.102 dari peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, sebanyak 44.764 dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), 1.264 dari segmen Bukan Pekerja (BP), 20.495 dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan sebanyak 17.729 merupakan peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD. Persentase kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Bintan hingga bulan Maret 2019 adalah sebesar 75.06% dimana dari total penduduk Bintan 153.675 jiwa yang telah bergabung menjadi peserta JKN-KIS adalah sebanyak 115.354 jiwa. Dan kita berharap jumlah ini akan segera bertambah hingga cakupan semesta dapat segera tercapai di Kabupaten Bintan.

4. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan, Wan Rudy Iskandar dan staf berkunjung ke Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri, pada 9 September 2019. Ke depannya, Disbudpar Bintan-BPNB Kepri akan menandatangani kerjasama dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) untuk kajian sejarah dan budaya Bintan. Dalam pertemuan ini, Kepala BPNB Kepri diwakili Kasubag TU Dwi Sobuwati menjelaskan tentang tugas fungsi BPNB Kepri yang fokus dalam pelestarian Kebudayaan Melayu melalui kegiatan internalisasi dan juga kajian atau penelitian sejarah dan budaya. Kami banyak bekerjasama dengan instansi lain di wilayah kerja kami yang mencakup Kepri, Riau, Jambi dan Babel. Dengan senang hati, kami siap saling bantu dengan Disbudpar Bintan. Kami siap bermitra. Dalam kesempatan ini juga, Koordinator Peneliti Sejarah BPNB Kepri, Anastasia Wiwik Swastiwi memaparkan tentang jejak sejarah Melayu di Bintan. Bintan, katanya memiliki peran penting dalam kesejarahan Melayu. Bintan memiliki jejak sejarah yang banyak, baik itu cagar budaya maupun aspek kesejarahan lain. Kesultanan Riau Lingga dan lain- lainnya semuanya bermula dari Bintan. Kerajaan Bentan sudah ada jauh sebelumnya. Tak hanya soal sejarah, permasalahan tradisi yang ada di Kabupaten Bintan juga dijelaskan Peneliti Budaya BPNB Kepri, Hendri Purnomo. Hendri juga memaparkan tentang tradisi dan juga warisan budaya tak benda (WBTB) yang ada di Kepri. Bintan sangat minim dalam pencatatan WBTB. Karya budaya yang sudah ditetapkan dari Bintan juga sedikit. Minim sekali. Sementara, Kadisbudpar Bintan, Wan Rudy Iskandar menyebutkan, Disbudpar Bintan

mau MoU dengan BPNB Kepri untuk melakukan kajian sejarah dan budaya di Bintan.

5. Dukungan Kerjasama oleh Pemerintahan Daerah dengan Tim Riset Unggulan Stretegis Nasional Universitas Diponegoro dengan Koperasi Marin Agri Sejahtera Kabupaten Bintan

Tim Riset Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN) Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro (Undip) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Koperasi Marin Agri Sejahtera Kabupaten Bintan pada 16 Maret 2019, masa yang lalu di SMKN I Perikanan Seri Kuala Lobam, Bintan. PKS ini dilakukan dalam rangka mengembangkan budidaya produktif berkelanjutan system Integrated Multi Trophic Aquaculture (IMTA) menggunakan produk inovatif keramba jaring apung bulat bertingkat di Kabupaten Bintan. Sekedar diketahui, IMTA ialah praktek budidaya perikanan yang melibatkan hubungan mutualistik antara organisme pada tingkatan tropik rendah, misalnya organisme pemakan suspensi terlarut dalam air (suspension feeders) ke tropik yang lebih tinggi, misalnya ikan, sedemikian sehingga limbah nutrisi dari satu spesies dapat menjadi sumber masukan nutrisi untuk organisme lainnya. Budidaya sistem IMTA (seperti kombinasi rumput laut, herbivora, omnivora, dan detritivores) memiliki keuntungan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan monokultur, karena badan perairan merupakan ruang tiga dimensi yang dapat menampung produk-produk limbah dari satu tingkat trofik dimanfaatkan oleh biota yang lain. Kerja sama ini didukung penuh oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kepulauan Riau, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, PT. Stargold Internusa Jaya, Center of Marine Ecology and Biomonitoring for

Sustainable Aquaculture (Ce-MEBSA) Undip, dan SMKN 1 Perikanan Seri Kuala Lobam. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau, Drs Edy Sofyan, MSi menyatakan bahwa produksi perikanan budidaya saat ini dipandang masih belum optimal dibandingkan potensi yang dimiliki Kepri. Ketua Ce-MEBSA FSM Universitas Diponegoro yang juga ketua pelaksana PUSN, Drs Sapto P. Putro, MSi, PhD menyatakan bahwa karya inovatif anak bangsa yang dihasilkan oleh peneliti perguruan tinggi sudah semestinya dapat diserap masyarakat untuk mampu menjawab permasalahan di masyarakat. Sejak 2015, laboratorium Ce-MEBSA telah melaksanakan berbagai riset untuk pengembangan productive sustainable aquaculture, dan telah bekerjasama dengan dengan berbagai pihak diantaranya BKPB Sea Farming Karang Lebar, Kepulauan Seribu, Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, BPBL Batam, Kepulauan Riau, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Laut Permai Abadi, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. Sementara itu, Direktur PT Stargold, Imam Kadarisman menyatakan kegiatan dengan strategi penta-helix ini (Pemerintahan, Akademisi, Bisnis, Komunitas, dan Media masa) ini diharapkan dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan budidaya perikanan laut system KJAB IMTA ini akan dilakukan di pesisir wilayah sekitar sekolah tersebut. Kami juga mendukung untuk hilirisasi hasil riset menjadi start up usaha dengan cara ahli teknologi pembuatan kerambah jaring apung modern yang ramah lingkungan. Kepala SMKN I Perikanan Seri Kuala Lobam, Erdatati M berharap kegiatan ini mampu meningkatkan performa portofolio bagi guru khususnya bidang perikanan

budidaya. Untuk diketahui, portofolio ialah dokumen yang diciptakan oleh guru, yang menyatakan, menghubungkan dan menggambarkan kewajiban, tingkat kemahiran dan pertumbuhannya dalam pengajaran. Terakhir, Kepala Dinas KUM Perindag Kabupaten Bintan, Dian Nusa, yang juga turut hadir menyatakan hasil kerja sama dengan Koperasi Marine Sejahtera ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian koperasi.

6. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Balai Latihan Kerja Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan menjajaki perihal kerjasama dengan sejumlah **Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten/Kota di Indonesia**. Salah satu prioritas adalah **Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Kota Medan**, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Indra Hidayat menuturkan bahwa peluang kerjasama dengan sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di sejumlah kota merupakan alternatif bagi meningkatkan sektor keahlian bagi tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Bintan terus menjajaki peluang kerjasama dalam meningkatkan keahlian tenaga kerja, dimana kita bisa mengirimkan perwakilan kita guna meningkatkan SDM pencari kerja pada 3 Juli 2019. Dikatakannya juga terkait Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya telah memberikan kesempatan yang sangat terbuka dimana salah satunya telah memberikan peluang latihan kerja keahlian di bidang bangunan dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bintan diminta mengirimkan utusan untuk mengikuti pelatihan kerja keahlian di bidang bangunan dan pariwisata di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Kota

Medan dimana ini sebuah kesempatan yang sangat bagus tentunya, kita juga sedang menjajaki beberapa sektor pariwisata dan bidang lainnya untuk proses magang sebelum benar-benar terjun ke lapangan.

3.1.5.2 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah

a. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam Pasal 363 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan: (a) Daerah lain; (b). pihak ketiga; dan/atau (c). lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan

sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi lain dengan instansi vertikal berada di daerah diantaranya adalah kerjasama antara Bappeda Kabupaten Bintan dengan **Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan** dalam rangka pengolahan, analisis data indikator makro dan statistik daerah. Terkait dengan Tramtibmas Pemda Kabupaten Bintan juga bekerjasama dengan **Kepolisian, TNI, Kejari, Badan Intelijen Negara, Badan Pertanahan Nasional**. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2019 adalah terlaksananya pengolahan, analisis data dan statistik daerah, terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat. Program serta kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 antara lain tersebar di beberapa OPD, seperti pelaksanaan anggaran bersumber Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan koordinasi dengan **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan** dan **Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan**.

3.1.5.3 Pembinaan Batas Wilayah

Program serta pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 ini dapat dilihat pada Penjabaran di BAB III **Urusan Pemerintahan Umum - Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**

3.1.5.4 Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Hasil dan/atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana.

Dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan melalui 5 (lima) kegiatan, dengan total alokasi Anggaran sebesar Rp. 541.362.700,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp. 473.324.365,- atau 87,34 %, *Outcome* program ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam rangka penanggulangan musibah dan bencana.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

a. Pelaksanaan Program

1. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Dengan Anggaran Rp 174.586.400; Realisasi Anggaran sebesar Rp.155.035.725,- Atau 88,80%; output dari kegiatan ini adalah Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Kejadian Kebakaran. kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran bagi Masyarakat.

2. Monitoring Daerah Bencana dan Rawan Bencana.

Kegiatan Monitoring Daerah Bencana dan Rawan Bencana dengan Anggaran Rp. 26.551.300; Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 26.488.500; Atau 99,76% output dari kegiatan ini adalah Tercapainya Pengurangan Resiko Terhadap Bencana Alam di Kabupaten Bintan. Didalam Penanganan bencana di wilayah kabupaten Bintan yang terdiri dari 10 kecamatan, Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah

Terfasilitasinya kebutuhan dalam Penanganan Bencana (outcome), Untuk Tahun 2019 penanganan Bencana Telah dilaksanakan di 10 Kecamatan.

3. Penanganan dan Penanggulangan Bencana dan Keselamatan di Laut/Pantai

Dengan anggaran Rp. 194.556.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 185.956.400; Atau 95,58%; output dari kegiatan ini adalah Terciptanya kondisi keamanan dan keselamatan dilaut/pantai bagi pengunjung/masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk ikut menjaga kondisi keamanan dilaut/pantai trikora Kabupaten Bintan, tugas ini dilaksanakan oleh Petugas Penjaga Pantai/Petugas Tim Reaksi Cepat, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini dengan adanya petugas penjaga pantai/petugas tim reaksi cepat yang ikut menjaga keamanan dan keselamatan dilaut/pantai dapat mengurangi resiko kejadian bencana yang terjadi dilaut/pantai bagi pengunjung/masyarakat.

4. Penanganan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Dengan anggaran Rp. 115.299.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 104.465.740; Atau 90,60%; output dari kegiatan ini adalah Meningkatnya tingkat waktu tanggap (respon Time) daerah/wilayah kebakaran, kegiatan ini dilaksanakan saat kejadian kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Bintan yang terbagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang dengan pelaksana tugasnya yaitu UPTD Kijang, Wilayah Kecamatan Toapaya, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Gunung Kijang dengan Pelaksana Tugas yaitu UPTD Toapaya, Wilayah Kec. Bintan Utara, Kec.Seri Kuala Lobam, Kec.Teluk Sebong dengan pelaksana tugasnya yaitu UPTD Tanjung Uban,

hasil yang diharapkan dari kegiatan ini penanganan dan penanggulangan kebakaran dapat dilaksanakan dengan tanggap dan cepat sehingga dapat mengurangi resiko kebakaran ataupun korban.

5. Penilaian Kerusakan Pasca Bencana

Dengan anggaran Rp.30.360.000,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp.22.668.700,- atau 74,67% output dari kegiatan ini adalah tersedianya Rekomendasi dari hasil laporan verifikasi kegiatan serta peninjauan lapangan terhadap penilaian kerusakan serta adanya data dan informasi akibat dampak pasca bencana yang ada di Kabupaten Bintan.

Capaian indikator kinerja OPD Tahun 2019 untuk program ini adalah :

1. Persentase Kejadian Kebakaran yang ditangani. Sampai dengan tahun 2019 cakupan pelayanan Bencana Kebakaran telah meliputi 10 Kecamatan atau telah mencapai 100 %
2. Persentase Kejadian Bencana Laut/pantai yang ditangani. Sampai dengan tahun 2019 ada 24 Orang Petugas Tim Reaksi Cepat dan siap terjun serta menangani bilamana diperlukan untuk penanggulangan bencana walaupun ketersediaan ini sangat terbatas dan sangat tidak mencukupi, selama ini tingkat partisipasi mencapai 100 %.
3. Terselenggaranya Sosialisasi tentang Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan sosialisasi Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yaitu di lokasi Kecamatan Bintan Pesisir Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan Utara, telah mencapai 100 %.

**Tabel 3.140 Realisasi Program Penanggulangan Bencana
(Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran, Kegiatan Monitoring Daerah Bencana dan Rawan
Bencana, Kegiatan Penanganan dan Penanggulangan Bencana
dan Keselamatan di Laut/Pantai dan Kegiatan Penanganan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi ancaman bencana	Persentase kejadian Bencana yang ditangani	87 %	87 %	100
Terwujudnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi ancaman bencana	Persentase Cakupan penduduk dan harta benda yang tertangani	77 %	77 %	100

2. Pada Program Mitigasi Bencana

Dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan, melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 76.984.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.189.375,- atau 96,36 %. Outcome program ini adalah mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

1. Kegiatan Forum Koordinasi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana

Dengan anggaran Rp. 38.956.200,- Realisasi Anggaran Rp. 36.874.700,- atau 94,65 % Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi atau sosialisasi ke masyarakat di Kecamatan, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

terlaksananya tem Forum komunikasi Kesiapsiagaan setiap Kecamatan,

2. Kegiatan Pelatihan Desa Siaga Bencana

Dengan anggaran Rp. 38.028.700,- Realisasi anggaran Rp. 37.314.675,- atau 98,12 % Output dari kegiatan ini adalah pelatihan pembentukan desa siaga bencana, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang diberikan pada 30 orang masyarakat kecamatan Seri Kuala Lobam di kabupaten Bintan dengan memberikan materi dan simulasi tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian para masyarakat di kecamatan dalam mengatasi mengurangi resiko bencana yang terampil dan siaga dalam penanganan dan penanggulangan bencana.

Capaian indikator Kinerja OPD tahun 2019 untuk program ini adalah:

1. Pada tahun 2019 telah terjadi 444 kejadian bencana alam, kebakaran dan lainnya. Seluruh kejadian bencana dapat ditangani secara baik. Maka seluruh kejadian bencana yang ditangani mencapai 100 %.

Secara ringkas realisasi program mitigasi bencana ini disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.141 Realisasi Program Mitigasi Bencana
(Kegiatan Forum Koordinasi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan
Bencana dan Kegiatan Pelatihan Desa Siaga Bencana)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi ancaman bencana	Jumlah sistem informasi kebencanaan.	0 %	0 %	0
Tersedianya tenaga profesional dalam penanggulangan bencana	Persentase cakupan masyarakat yang tanggap dan siaga Bencana	56 %	56 %	100

3.1.5.5 Pengelolaan Kawasan Khusus

Pengelolaan Kawasan khusus dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Kabupaten Bintan atau *Free Trade Zone* Kawasan Bintan. Adapun capaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi investasi PMA Kabupaten Bintan pada tahun 2019 sebesar US \$457.009.600 (Kurs Rp 14.000,-) atau senilai Rp 6.398.130.000, -
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi investasi PMDN Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 sebesar Rp 99.241.000.000,-

Realisasi investasi PMA dan PMDN yang tercatat pada *Business Intelligence* tahun 2019 adalah sebesar US \$ 464.098.242. atau Rp 6.497.375.388.000,- (Kurs Rp 14.000,). Realisasi tersebut merupakan akumulasi nilai investasi dari seluruh perusahaan yang masih beroperasi di Kawasan FTZ

Bintan dan realisasi tersebut meningkat 43,% dari tahun 2018.

Adapun pendaftaran investasi baru di Kabupaten Bintan di Tahun 2019 adalah sebanyak 21 investor dengan rincian 11 investasi dalam jenis PMA dan 10 dalam jenis PMDN. Total nilai investasi melalui investor baru tersebut di tahun 2019 adalah dengan rincian sebagai berikut.

- a. Investasi Baru PMA sebesar US \$ 14.503.000,- atau senilai Rp 203.042.000.000,- (Kurs Rp 14.000),
- b. Investasi baru PMDN sebesar Rp 74.681.000.000,-

Prospek investasi Triwulan 1 Tahun 2020 dan keseluruhan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pembangunan Villa Chiva Som yang berlokasi di Kawasan Pariwisata Lagoi dengan kategori *Super Luxury Villas*. Rencana pembangunan villa sebanyak 37 villa, dan akan menyerap investasi sebesar Rp 20 Miliar,
2. Pembangunan *Tower the Havent* yang akan membangun tower sebanyak 9 tower. Proyek ini berkonsep Condotel. Untuk saat ini baru 2 tower yang sudah dibangun. Nilai investasi ini mencapai Rp 800 Miliar,
3. Pengembangan kawasan Penaga Bay. Lahan sebesar 270 Ha. Kawasan ini akan berkonsep pariwisata budaya Melayu yang akan mengembang *Agro Tourism*, *Eco Tourism* dan *Center of Malay Heritage*. Nilai investasi mencapai Rp 280 Miliar,
4. Pembangunan Bandara Internasional Bintan di Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam, Perkiraan proyek selesai pada tahun 2019. Nilai investasi mencapai Rp 700 Miliar,

5. Pengembangan perluasan di kawasan *treasure bay*, pengembangan *marine life park*, nilai investasi Rp 100 Milliar.

Adapun Perkembangan Proyek Insfrastruktur KPBPB Bintan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan / Pelebaran Jalan Penaga – Sp. Segelap,
2. Peningkatan / Pelebaran jalan menuju Kawasan Wisata Tanah Merah Tahap II,
3. Peningkatan / Pelebaran Jalan Penghujan – Kuala Sempang,
4. Peningkatan / Pelebaran jalan akses menuju Kawasan Wisata Ekang Anculai,
5. Pembangunan Jembatan Kp. Belak-Kemalai
6. Pembangunan Jembatan Tanah Merah (Lanjutan)
7. Peningkatan / Pelebaran Jalan Simpang Kawasan Industri Lobam Pelabuhan Teluk Sasah.

Adapun upaya BP Bintan dalam mendorong investasi di Kawasan FTZ Bintan adalah sebagai berikut.

1. Promosi investasi baik di dalam maupun luar negeri,
2. Membangun infrastruktur,
3. Menjalin harmonisasi dengan para pengusaha dan instansi terkait (*meeting point*, sarasehan, sosialisasi)

Adapun hambatan dan tantangan dalam pengelolaan kawasan khusus adalah sebagai berikut.

1. BP Bintan sampai saat ini masih bersifat *enclave*, belum secara menyeluruh, sehingga ruang gerak para investor juga masih terbatas dan terbatas,
2. Sejak pemberlakuan OSS, BP Bintan sulit memperoleh data rencana investasi karena OSS tidak mengakomodir

penyediaan dan penarikan data khusus untuk BP, melainkan berakumulasi di dalam *database* Kabupaten Bintan,

3. Jika kepastian kelembagaan BP Bintan telah direalisasikan / ditetapkan, maka kewenangan dalam hal pengembangan proyek / pembangunan kawasan semakin dapat diperluas ruang geraknya, seperti membangun infrastruktur, pelabuhan. Bandara, termasuk kesehatan dan pertanian,
4. Belum tuntasnya pembahasan tentang perubahan PP No. 10 Tahun 2012 dan PMK terkait pembahasan cukai di KPBPB menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di KPBPB.

3.1.5.6 Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Realisasi Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 162.695.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 91.849.910,- atau 56,46%. Capaian program ini adalah meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Program

1. Pengawasan dan Operasi Kantrantibum.

Pengawasan dan Operasi Kantrantibum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.695.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 60.989.910,- (73,75%).

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan operasional kantrantibum (keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum). Patroli menggunakan kendaraan dinas

roda empat maupun roda dua dalam rangka mengawasi dan memantau kondisi ketertiban masyarakat serta melakukan tindakan jika ditemukan potensi ataupun tindak pelanggaran kantrantibum.

Sasaran kegiatan ini adalah kawasan perkotaan (pasar dan pertokoan), fasilitas umum (taman kota, akau, pelabuhan, tempat keramaian lainnya), maupun sekitar jalan raya/umum serta tempat tertentu yang dirasa perlu dan berpotensi adanya gangguan. Tahun 2019 frekwensi operasi dominan dilaksanakan pada Kec. Bintang Timur, Bintang Utara, Teluk Bintang (termasuk di dalamnya Bandar Seri Bintang), Gunung Kijang, dan Toapaya. Selanjutnya beberapa titik lokasi di Kec. Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong. Operasi kantrantibum melibatkan kelompok patroli dari anggota Satpol PP yang berada di kantor/markas besar dan personil yang berada di kecamatan, dengan prioritas pada tempat tujuan kegiatan masyarakat yang berpotensi terciptanya gangguan ketertiban umum. Dalam beberapa operasi tertentu juga melibatkan pihak terkait seperti Kepolisian Resort Bintang, Satpol PP Prov. Kepri, Dinas Perhubungan, Camat, Lurah, dan tenaga teknis OPD terkait.

2. Pengamanan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Acara Penting.

Kegiatan Pengamanan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Acara Penting dilaksanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 30.860.000,- (38,58%). Rendahnya realisasi anggaran ini dikarenakan adanya anggaran yang tidak dibelanjakan yakni honorarium non pns dan menjadi sisa anggaran, namun secara fisik kegiatan tersebut tetap berjalan secara keseluruhan.

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat secara aman dan terkendali. Pengamanan acara/kegiatan dengan melibatkan anggota Satpol PP dan atau pihak terkait lainnya pada saat adanya kunjungan pejabat negara/daerah (persiapan maupun pelaksanaan kegiatan) serta pada saat penyelenggaraan acara penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat.

Sasaran dari pengamanan ini adalah pejabat pusat dan pejabat daerah yang melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Bintan (sebagai tempat tujuan), antara lain : Gubernur dan Wagub Prov. Kepulauan Riau, Bupati Bintan, Wakil Bupati Bintan, Menteri Peranan Wanita dan Pemberdayaan Anak, pejabat Kemenag, dan Pimpinan/Anggota DPRD Prov Kepri, dan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Sedangkan acara penting yang menjadi sasaran kegiatan pengamanan ini antara lain mencakup Tour de Bintan, Rapat paripurna DPRD, Pawai Adipura, Festival Tari, Senam massal dan jalan santai, Turnamen Olahraga (sepakbola, takraw, woodball, gerak jalan), Kegiatan Kemah Besar Pramuka, Hari Besar Agama, Pagelaran Seni Budaya, Pesta Jong, Bintan Trekking, Pawai Ta'ruf dan pelaksanaan MTQ, Pawai O2SN, Safari ramadhan, Mudik gratis, Takbir keliling idul fitri, Open house Bupati Bintan, dan lainnya.

2. Realisasi Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat.

Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melalui 4 (empat) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1.014.052.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 997.900.856,- atau 98,41%. Capaian

program ini adalah meningkatnya potensi ketahanan dan perlindungan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.760.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.612.806,- atau 91,13%.

Output kegiatan ini adalah keamanan lingkungan yang terkendali. Pelaksanaan pembinaan dilakukan terhadap petugas poskamling di tingkat kelurahan/desa agar dapat bertindak secara tepat dan benar dalam melakukan tugas pengamanan lingkungan. Disamping itu juga dilakukan pemantauan terhadap aktifitas poskamling dalam melaksanakan fungsinya terutama untuk poskamling yang telah diberikan bantuan stimulan (perangsang) dan kerjasama petugas poskamling dengan aparat desa/kelurahan setempat.

2. Pemantauan dan Pengawasan Pengamanan Pemilu di Kabupaten Bintan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 27.445.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.432.000,- atau 99,95%.

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengamanan Pemilu. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemantauan dan pengawasan oleh petugas Satpol PP terhadap petugas pengamanan yakni anggota Linmas yang pada saat Pemilu (Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif) melakukan pengamanan di TPS pada hari H maupun sebelum dan sesudah hari H pelaksanaan.

3. Pelatihan Linmas dalam rangka Pengamanan Pemilu di Kabupaten Bintan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 713.644.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 703.083.401,- atau 98,52%.

Output dari kegiatan ini adalah terlatihnya petugas Linmas pengaman Pemilu. Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada seluruh anggota Linmas yang bertugas melakukan pengamanan di lokasi TPS Pemilu pada seluruh TPS di 10 kecamatan. Lokasi pelatihan di Hotel Bhadra, Kec Toapaya Kabupaten Bintan dengan materi tentang teknis pengamanan Pemilu. Pelaksanaan pelatihan melibatkan narasumber dari Polres Bintan, KPU Kabupaten Bintan, Bawaslu Kabupaten Bintan, Kesbangpol Kab Bintan, serta pejabat Satpol PP Kabupaten Bintan.

4. Pengamanan Pemilu di Kabupaten Bintan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 226.203.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 224.772.649,- atau 99,37%.

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengamanan Pemilu. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian insentif dan konsumsi petugas Linmas pada saat pelaksanaan Pemilu dengan tujuan agar pengamanan pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

3.1.5.7 Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang Dilaksanakan Oleh Daerah

- *E-Procurement*

Untuk menanggulangi resiko tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia membangun sistem pengadaan dengan metode pengadaan secara

elektronik atau *e-procurement*. Inisiasi dari *e-Procurement* dimulai dengan implementasi *e-government procurement* (EGP) di Indonesia melalui regulasi Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 (Keppres 80/2003) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara eksplisit Keppres 80/2003 mengizinkan proses pengadaan melalui *e-procurement*. Beberapa instansi mulai mengembangkan sistem EGP masing-masing. Sistem Pengadaan *e-Procurement* Nasional yang diberi nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sendiri dimulai pada tahun 2006-2008. Sistem ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Melalui LPSE di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses

informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*). Perkembangan LPSE di daerah (provinsi/kabupaten/kota) jauh lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat karena melakukan pendirian dengan inisiatif sendiri.

- Pelaksanaan LPSE di Kabupaten Bintan telah diberlakukan sejak Tahun 2011. Dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 (Inpres 17/2011) pada 19 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Kementerian /Lembaga /Daerah/ dan Institusi lainnya telah mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagai bagian dari Strategi Pencegahan KKN.

Salah satu rencana aksi sebagai bagian Strategi Pencegahan tersebut adalah **“Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Publik Pemerintah.”** Sasaran Inpres 17/2011 adalah APBD tahun 2012 berupa porsi 40% belanja Pemda (Prov./ Kab/ Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/ jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau terdekat.

- Sampai dengan tahun 2019 dengan penerapan *e-procurement* Kabupaten Bintan telah melakukan penghematan APBD yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2014 tercatat penghematan mencapai Rp 9,47 milyar lebih. Dan pada tahun 2015 penghematan dapat dilakukan sebesar Rp 6,45 milyar lebih sedangkan pada tahun 2016 penghematan meningkat menjadi Rp 11,48 milyar lebih. Sementara itu pada tahun 2017 penghematan sebesar Rp 5,85 milyar lebih dan pada tahun 2018 penghematan yang dapat dilakukan sebesar Rp 12,70 milyar lebih serta pada tahun 2019 penghematan dapat dilakukan sebesar Rp 12,705 milyar, dengan penghematan lebih besar senilai Rp 2.687.973,- Hal ini tentunya merupakan prestasi kinerja pemerintahan yang tentunya melibatkan peran serta *stake holder* dalam mewujudkan ***clean governance***.

Tabel 3.142 Data Efisiensi Pelelangan /Seleksi Melalui LPSE Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Tahun Anggaran	Total Paket	Pagu Anggaran	HPS	Selisih HPS Terhadap Pagu Anggaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Selisih Terhadap Pagu Anggaran	Selisih Terhadap HPS
1	2014	219	199.379.478.255	199.081.262.163	298.216.092	189.902.841.008	9.476.637.247	9.178.421.155
2	2015	165	173.242.056.231	172.096.085.544	1.145.970.687	166.790.599.997	6.451.456.234	5.305.485.547
3	2016	194	213.775.877.500	209.648.697.703	4.127.179.797	202.290.315.920	11.485.561.580	7.358.381.783
4	2017	154	164.970.852.000	164.600.835.650	5.852.224.829	159.118.627.171	5.852.224.829	9.178.421.155
5	2018	172	277.633.094.985	274.504.419.607	3.128.675.378	264.929.998.992	12.703.095.993	9.574.420.615
6	2019	163	214.395.251.514	213.645.676.213	749.575.301	201.689.467.548	12.705.783.966	11.956.208.665

Sumber : LPSE Kabupaten Bintan 2019

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Bintan memperhatikan kebijakan Provinsi Kepulauan Riau dan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 menggariskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - 1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - 2) Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
 - 3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
- b. Tiga Dimensi Pembangunan
 - 1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter

menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

- 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
 - a. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
 - b. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
 - c. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
 - d. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

- 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan
- Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:
- a. Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
 - b. Wilayah pinggiran;
 - c. Luar Jawa;
 - d. Kawasan Timur.
- c. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.
- Kondisi tersebut antara lain:
- 1) Kepastian dan penegakan hukum;
 - 2) Keamanan dan ketertiban;
 - 3) Politik dan demokrasi; dan
 - 4) Tatakelola dan reformasi birokrasi.
- d. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya) Pembanguna merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan

terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

b. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam

pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

e. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin

mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

f. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang

Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

g. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar diseluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Tabel 3.143
MISI 1 Mewujudkan Kabupaten Bintang sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintang yang sesuai dengan tata ruang;	1. Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi	• Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintang • Optimalisasi pelayanan perijinan
		2. Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang	• Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten
2	Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan	1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	• Memberdayakan potensi masyarakat lokal serta Optimalisasi potensi ekonomi lokal dibidang pariwisata • Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
		2. Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD	• Memfasilitasi pembentukan organisasi usaha industri pariwisata serta pengembangan kemitraan • Mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui peningkatan cluster yang aktif • Mengembangkan pengelolaan aset dan peluang di bidang kelautan dan pariwisata
		3. Meningkatnya jumlah produksi perikanan	• Meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya dan tangkap
		4. Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	• Mendorong tumbuhnya industri pengolahan • Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok

Tabel 3.144
MISI 2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman	1. Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan prasarana transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum	• Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah • Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih di lingkungan permukiman serta meningkatkan rumah tinggal bersanitasi
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan	• Rehabilitasi kawasan kumuh melalui penataan lingkungan
2	Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana	1. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan	• Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan pengairan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan
3	Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	1. Terhubungnya aktivitas antar pulau	• Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.

Tabel 3.145
MISI 3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis	1. Meningkatnya profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah
Strategi		
• Menata sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap • Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah • Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah • Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah • Meningkatkan penataan kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan daerah bawahan • Mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk legislasi daerah • Memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan Daerah • Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel • Mewujudkan integrasi/ konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan		

Strategi	
•	Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah
•	Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
•	Meningkatkan kualitas aparatur serta sarana prasarana pendukung
•	Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan
•	Meningkatkan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan
•	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum
•	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta wawasan kebangsaan

Tabel 3.146

MISI 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing	1. Meningkatnya keluasaan dan pemerataan akses PAUD bermutu	• Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini untuk pembangunan berkelanjutan
		2. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)	• Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Kabupaten Bintan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu
		1. Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	• Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui pengutan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.	1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	• Peningkatan Upaya Kesehatan masyarakat melalui Puskesmas serta melaksanakan bina gizi dan kesehatan bagi ibu
			• dan anak serta Peningkatan Penyehatan Lingkungan
			• Peningkatan Upaya Pencegahan dan pengendalian
		2. Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	• penyakit menular dan tidak menular.
			• Peningkatan pemberdayaan desa/ kelurahan dan CSR dari perusahaan untuk program kesehatan serta
			• promosi kesehatan kepada masyarakat
3	Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya	1. Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan	• Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan kefarmasian, pengawasan obat dan makanan
			• Peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
			• Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB
			• Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga
			• Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
	saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya.	tenaga kerja 2. Meningkatkan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	kompetensi. • Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja

Tabel 3.147

MISI 5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu	1. Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	• Memberdayakan lembaga- lembaga adat terutama adat melayu untuk melestarikan nilai- nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.
2	Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan.	1. Terwujudnya toleransi antar umat beragama 2. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing- masing	• Meningkatkan kerukunan umat bergama. • Pengembangan pendidikan agama di masyarakat dan sekolah

Tabel 3.148

MISI 6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	1. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	• Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.
2	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	• Memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta • menciptakan pembangunan yang inklusif. • Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa	• Memperkuat Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Tabel 3.149
MISI 7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di
Kabupaten Bintan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	1. Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
			• Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan diperguruan

Tabel 3.150
MISI 8.Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	• Peningkatan produktivitas perkebunan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan
			• Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Pangan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan
			• Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura ramah lingkungan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan
			• Peningkatan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan
			• Peningkatan produktivitas peternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok peternak secara berkelanjutan
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah	• Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok..
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	• Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
		2. Terpenuhi standar luas ruang terbuka hijau yang dikelola	• Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum

3.2.2 Arah Kebijakan

Strategi harus dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Tabel 3.151
Arah Kebijakan MISI 1 Mewujudkan Kabupaten Bintang sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kerjasama investasi di Kabupaten Bintang	Peningkatan kerjasama investasi di tingkat lokal, regional maupun nasional dengan menjaga investasi yang sudah ada serta melalui promosi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Optimalisasi pelayanan perijinan	Perbaikan kualitas pelayanan perijinan dengan menyederhanakan proses birokrasi	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
2	Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang	Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang	Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada instrumen tata ruang	Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang
3	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Memberdayakan potensi masyarakat lokal serta Optimalisasi potensi ekonomi lokal dibidang pariwisata	Pembangunan Destinasi wisata dengan memberdayakan potensi ekonomi maupun kebudayaan lokal	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata	Promosi dan Pemasaran wisata melalui penyelenggaraan even berskala nasional maupun internasional	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4	Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui	Memfasilitasi pembentukan organisasi usaha industri pariwisata serta	Fasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar usaha pariwisata	Program Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata
			Mengembangkan pola-	Program

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	kemitraan dan pembinaan BUMD	pengembangan kemitraan	pola kemitraan industri pariwisata lintas sektor	Pengembangan Kemitraan
		Mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui peningkatan cluster yang aktif	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta peningkatan jumlah wirausaha baru	Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM
				Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro
		Mengembangkan pengelolaan aset dan peluang di bidang kelautan dan pariwisata	Melakukan revitalisasi terhadap BUMD dengan difokuskan pada bidang kelautan dan pariwisata	Program Pembinaan BUMD
5	Meningkatnya jumlah produksi perikanan	Meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya dan tangkap	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengembangan budidaya perikanan
				Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap
			Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
6	Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Mendorong tumbuhnya industri pengolahan	Memberdayakan koperasi dan UMKM serta pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya Industri pengolahan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok	Meningkatkan volume operasi pasar serta pengawasan barang beredar	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
				Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Tabel 3.152
MISI 2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan prasarana transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi, air	Meningkatkan keandalan sistem jaringan jalan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan bagi	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi dengan fokus jalan dan jembatan.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
				Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	bersih/ minum	peningkatkan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah		
		Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih di lingkungan permukiman serta meningkatkan rumah tinggal bersanitasi	Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih serta peningkatan rumah tinggal bersanitasi melalui pembangunan jaringan air bersih serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang bersanitasi	Program Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Program Pengembangan Kinerja Air Limbah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan	Rehabilitasi kawasan kumuh melalui penataan lingkungan	Peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pembangunan infrastruktur dasar	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
				Program Pengembangan Sarana prasarana Perumahan Dan Permukiman
				Program Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan
				Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Jasa Konstruksi Serta Verifikasi Perizinan
				Program Sertifikasi Perumahan dan Permukiman
3	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan pengairan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan sarana prasarana pengairan	Peningkatan kualitas jaringan pengairan dengan melakukan normalisasi saluran / sungai serta pembangunan drainase jalan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
				Program Pengendalian Banjir
				Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan
4	Terhubungnya aktivitas antar pulau	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, dan pengembangan sistem manajemen transportasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
				Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
				Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
				Pengoperasian Kendaraan Bermotor
				Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Tabel 3.153 Arah Kebijakan MISI 3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	Menata sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap	Peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat pemerintah Daerah	Program Pendidikan Kedinasan
				Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembangunan	Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
				Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal
				Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
				Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
				Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan
		Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Mewajibkan kepada semua SKPD untuk menyusun SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
				Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
		Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah	Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan tentang hukum maupun bantuan hukum	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
				Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
				Program Pembinaan Pertanahan
		Meningkatkan penataan kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan daerah bawahan	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang kebijakan bidang perekonomian, kualitas pelayanan informasi publik, administrasi pembangunan dan pembinaan pemerintahan daerah bawahan	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
				Program Pembinaan BUMD
				Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan
		Mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap bencana, serta	Peningkatan pemantauan kualitas dan daya dukung lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Program Penanggulangan Bencana
				Program Mitigasi Bencana

		memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	penanggulangan pasca bencana	
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk legislasi daerah	Membangun harmonisasi antara legislatif dan eksekutif melalui peningkatan kualitas produk legislasi daerah	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		Memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan Daerah	Peningkatan intensifikasi pajak, retribusi daerah dan pemanfaatan asset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Manajemen Aset Daerah Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
		Mewujudkan integrasi/ konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan	Program Pengembangan Data dan Informasi Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Sektoral Program Penelitian Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan
		Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Menjabarkan perencanaan pembangunan yang ada di tingkat yang lebih tinggi ke dalam perencanaan pembangunan di bawahnya	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
		Meningkatkan kapasitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dengan melibatkan semua instansi terkait sesuai dengan SOP	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kualitas aparatur serta sarana	Melakukan pengembangan kapasitas terhadap	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Program Pelayanan Administrasi

		prasarana pendukung	aparatur yang melakukan pelayanan publik serta mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pendukung	Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
				Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
		Meningkatkan jumlah jaringan sistem kependudukan di seluruh kecamatan	Peningkatan akurasi data informasi kependudukan, Catatan Sipil melalui pembangunan sistem informasi kependudukan yang berkualitas	Program Penataan Administrasi Kependudukan
			Meningkatkan kepemilikan akte kelahiran dan KTP-el dengan menyederhanakan birokrasi	
		Meningkatkan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan	Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku serta peningkatan SDM pengelola kearsipan dan pustaka	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
				Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
				Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
				Program Pengembangan Perpustakaan
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum	Meningkatkan cakupan penegakan penerapan peraturan daerah dan perkara	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
				Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP
				Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta wawasan kebangsaan	Membekali masyarakat tentang wawasan kebangsaan, serta meningkatkan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
				Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.154
Arah Kebijakan MISI 4. Meningkatkan kualitas pendidikan,
kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi
global

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu	Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini untuk pembangunan berkelanjutan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik PAUD yang merata di Kecamatan	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
2	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Kabupaten Bintan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu	Melaksanakan wajib belajar 9 Tahun dengan cara melanjutkan upaya gratis biaya sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat menengah	Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
				Program Non Formal
3	Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui pengutan sistem uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa	Meningkatkan kualifikasi akademik, sertifikasi guru dan tenaga kependidikan dengan perbaikan desain program keselarasan disiplin ilmu	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan Upaya Kesehatan masyarakat melalui Puskesmas serta melaksanakan bina gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak serta Peningkatan Penyehatan Lingkungan	Meningkatkan Pembinaan Upaya Kesehatan masyarakat, usaha pelayanan kesehatan lansia dan Penyehatan Lingkungan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatkan Pembinaan Upaya Bina Gizi Masyarakat, serta Kesehatan Ibu dan Anak	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
		Peningkatan Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Peningkatan pemberdayaan	Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

		desa / kelurahan dan CSR dari perusahaan untuk program kesehatan serta promosi kesehatan kepada masyarakat	Kesehatan kepada Masyarakat	
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan kefarmasian, pengawasan obat dan makanan	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Standarisasi Akreditasi Sarana Prasarana pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan serta Meningkatkan SDM kesehatan	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
			Meningkatkan Akses dan Mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		Peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi masyarakat	Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB	Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Peningkatan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
7	Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja	Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, dan penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi.	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja diutamakan untuk para pemuda Bintang yang belum bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi..	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
				Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
				Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
8	Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja	Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis.	

Tabel 3.155
Arah Kebijakan MISI 5. Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang Religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Memberdayakan lembaga-lembaga adat terutama adat melayu untuk melestarikan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.	Peningkatan kegiatan budaya, penyelenggaraan festival seni budaya, serta Cagar Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2	Terwujudnya toleransi antar umat beragama	Meningkatkan kerukunan umat bergama.	Peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan dan kerukunan umat beragama melalui komunikasi lintas Agama	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama
				Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan
				Program Pembinaan Keagamaan
3	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Pengembangan pendidikan agama di masyarakat dan sekolah	Pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat dan sekolah-sekolah dan pembangunan rumah tahfiz di setiap kecamatan	Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

Tabel 3.156
Arah Kebijakan MISI 6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, serta Peningkatan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap anak, perempuan, dan kelompok marjinal.	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Perlindungan anak
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Memperbaiki program perlindungan	Peningkatan implementasi program-program penanggulangan	

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.	kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.	Program Penanganan Fakir Miskin
		Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Peningkatan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Program Pemberdayaan Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Memperkuat Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat	Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta peningkatan keswadayaan masyarakat	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
4	Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
				Program Pengembangan Lembaga ekonomi desa
				Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan desa

Tabel 3.157

Arah Kebijakan MISI 7. Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga	Meningkatkan kualitas generasi muda dan olah raga	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
		Meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan diperbatasan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
				Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga

Tabel 3.158
Arah Kebijakan MISI 8. Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Peningkatan Produktivitas perkebunan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
		Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Pangan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan melalui Pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Tanaman Pangan
		Peningkatan produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura ramah lingkungan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu tanaman hortikultura ramah lingkungan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
		Peningkatan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani secara berkelanjutan	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
		Peningkatan produktivitas perternakan melalui revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok peternak secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu ternak berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, Kelembagaan dan Kemitraan usaha, Investasi usaha peternakan sesuai dengan kaedah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Pemenuhan keamanan pangan Asal ternak dan Agribisnis peternakan rakyat
2	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok	Peningkatan cadangan pangan, pemantauan harga, distribusi dan keamanan pangan, serta penganeekaragaman konsumsi pangan secara merata di seluruh wilayah	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
3	Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan yang menyeluruh melalui Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4	Terpenuhinya standar luas ruang terbuka hijau yang dikelola	Meningkatkan/ Mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum	Pengelolaan ruang terbuka hijau dan tempat pemakaman umum dengan memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan
				Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum

3.2.3 Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

MISI 1

Mewujudkan kabupaten bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan

Adapun program untuk mendukung misi ini adalah:

A. Urusan Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

B. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang

C. Urusan Pariwisata

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Usaha dan Industri Pariwisata
- d. Program Pengembangan Kemitraan

D. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM
- b. Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro

E. Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Program Pembinaan BUMD

F. Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Program pengembangan budidaya perikanan
b. Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan
c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
d. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

G. Urusan Perindustrian
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

H. Urusan Perdagangan
a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
b. Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

MISI 2

Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas, Terintegrasi dan Merata

Adapun program untuk mendukung misi ini adalah:

A. Urusan Perhubungan
a. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
d. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
f. program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

B. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
c. Program Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
d. Program Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan
e. Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Jasa Konstruksi Serta Verifikasi Perizinan
f. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya

- g. Program Pengendalian Banjir
- h. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong Jalan

C. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Program Pengembangan Kinerja Air Limbah
- b. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
- c. Program Pengembangan Sarana prasarana Perumahan Dan Permukiman
- d. Program Sertifikasi Perumahan dan Permukiman

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

MISI 3

Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Demokratis

Adapun program untuk mendukung misi ini adalah:

A. Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Program Pendidikan Kedinasan
- b. Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- d. Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan
- e. Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal
- f. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- g. Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah
- h. Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan
- i. Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- j. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
- k. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- l. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
- m. Program Pembinaan BUMD
- n. Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah
- o. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- p. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- q. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- r. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- s. Program Manajemen Aset Daerah
- t. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
- u. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- v. Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
- w. Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan
- x. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan
- y. Program Penanggulangan Bencana
- z. Program Mitigasi Bencana

B. Urusan Pertanahan

- a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- b. Program Pembinaan Pertanahan

C. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan
- c. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- d. Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA
- e. Program Perencanaan Sosial Budaya
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
- g. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- h. Program Penelitian Perencanaan Pembangunan

E. Urusan Statistik

- a. Program Pengembangan Data dan Informasi
- b. Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Sektoral

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

G. Urusan Kearsipan

- a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- b. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- c. Program Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

H. Urusan Perpustakaan

- a. Program Pengembangan Perpustakaan
- b. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

I. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- d. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP
- e. Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat

MISI 4

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Serta Kualitas Sdm Agar Bisa Bersaing Dalam Kompetisi Global

Adapun program untuk mendukung misi ini adalah:

A. Urusan Pendidikan

- a. Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak
- b. Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)
- c. Program Non Formal
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

B. Urusan Kesehatan

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
- f. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- g. Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

C. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- b. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

D. Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- b. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

MISI 5

Mewujudkan Pembangunan Karakter Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Melayu Sebagai Landasan Pembangunan Masyarakat

Adapun program untuk mendukung misi ini adalah:

A. Urusan Kebudayaan

- a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

B. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

C. Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Program Pemenuhan Kebutuhan Sarana Peribadatan
- b. Program Pembinaan Keagamaan
- c. Program Pembinaan Kesejahteraan Rakyat

MISI 6

Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dan Pengarus Utamaan Gender Dalam Berbagai Aspek Pembangunan

Adapun program untuk mendukung misi ini adalah:

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Program Perlindungan Anak

B. Urusan Sosial

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Penanganan Fakir Miskin
- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

C. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- c. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan
- b. Program Percepatan Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Kelurahan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

MISI 7

Memberdayakan Pemuda Sebagai Pelopor Pembangunan Di Kabupaten Bintan

Adapun program untuk mendukung misi ini adalah:

A. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan
- b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga

MISI 8

Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Adapun program untuk mendukung misi ini adalah:

A. Urusan Pertanian

- a. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan
- c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
- d. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- e. Program Pemenuhan keamanan pangan Asal ternak dan Agribisnis peternakan rakyat
- f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

B. Urusan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

C. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- e. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum
- b. Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum
- c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

3.2.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Berikut ini tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2019.

Tabel 3.159. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang Pada Misi 1
Misi 1: Mewujudkan Kabupaten Bintang sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Terciptanya iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Bintang yang sesuai dengan tata ruang	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	≥5	Meningkatnya realisasi investasi dan pelayanan perijinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi	Realisasi Investasi PMA/PMDN	juta USD	1.251	1.251	1.351	1.451	1.551	1.661	1.771
						Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	5,96	6,17	≥5	≥5	≥5	≥5
						Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda penataan Ruang	%	100	87,62	84,72	70	72	75	75
Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	493.495	850.000	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	493.495	574.337	722.284	760.000	780.000	800.000	850.000
	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	7,8	≥7,0	Meningkatnya pengembangan usaha dan industri pariwisata melalui kemitraan dan pembinaan BUMD	Kontribusi BUMD terhadap PAD	Milyar Rupiah	2.84	4,46	4,46	2.86	2.87	2.88	2.89
					Meningkatnya nilai produksi perikanan	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	7,8	≥7,0	≥7,0	≥7,0	≥7,0	≥7,0	≥7,0
					Berkembangnya industri pengolahan dan terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Persentase pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	%	6,8%	≥6,0	≥6,0	≥6,0	≥6,0	≥6,0	≥6,0
						Tingkat Inflasi	%	2,46	3,06	3,37	(4±1)%	(4±1)%	(4±1)%	(4±1)%

Tabel 3.160 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 2
Misi 2: Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase kawasan pemukiman yang tertata	%	3,3	28	Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan prasarana transportasi serta kapasitas dan fungsi sanitasi, air bersih/minum	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	n/a	42,516	52,057	52,057	52,064	53,028	54,153
						Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	0	27,5	30	32,5	35,83	42,19	100
					Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan dikawasan perkotaan dan perdesaan	Persentase kawasan permukiman yang tertata	%	3,3	6,07	10	25,7	26	27	28
Meningkatkan sarana prasarana pengairan untuk mengurangi resiko bencana	Rata-rata lama genangan	menit	n/a	85	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan	Rata-rata lama genangan	menit	n/a	360	300	240	180	120	85
Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	8	11	Terhubungnya Aktivitas antar pulau	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	8	8	8	9	10	11	11

Tabel 3.161 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang di Misi 3
Misi 3: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis					Meningkatnya profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	n/a	36	38	40	42	44	46

Tabel 3.162 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintang di Misi 4
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Meningkatkan Kualitas sumberdaya manusia agar berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	11,98	13,20	Meningkatnya keluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu	APK PAUD 3-6 Tahun	%	n/a	50,1	52,10	57,1	59,1	61,1	61,10

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,28	9	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI/SLB/Paket A dan SMP/MTS/Paket B)	APM SD/MI/SLB/Paket A	%	94,69	95,21	95,75	96,31	96,89	97	97,5
						APM SMP/MTs/Paket B	%	76,95	77,3	77,8	78	78,3	78,95	80
						Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	11,98	12,27	12,45	12,64	12,83	13,01	13,20
						Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,28	9	9	9	9	9	9
					Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	Persentase guru yang bersertifikat profesi	%	33,70	33,13	45,17	57,77	76,4	87,86	87,86
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,98	70	Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu, anak dan lansia serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Presentase balita gizi buruk	%	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33
						Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	13	12	12	12	12	12	12

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
						Angka Kematian ibu	Per 100.000 KH	<231	< 231	< 231	< 231	< 231	< 231	< 231
						Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk	Jumlah Kecamatan	10	10	10	10	10	10	10
						Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	33	33	33	33	33	33	33
						Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (sucess rate)	%	80	81	82	83	84	85	85
						Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	Jumlah Desa/Kel	29	29	43	51	51	51	51
					Meningkatnya kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan Tersedianya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	%	50	60	70	85	100	100	100
						Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Jumlah Puskesmas	0	1	4	8	15	15	15
						Status Akreditasi Rumah Sakit oleh komisi Akreditasi rumah sakit (KARS)	Status	-	-	Perdana	TK.Dasar	TK.Dasar	TK.Madya	TK.Madya

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
					Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	%	n/a	3,7	3,65	3,2	3,0	2,8	2,8
Meningkatkan calon tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing serta terpenuhi hak dan perlindungannya .	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,74	5,39	Meningkatnya kualitas, daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,74	8,06	7,44	6,91	6,40	5,89	5,39
					Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	%	92,6	70	100	100	100	100	100

Tabel 3.163 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 5
Misi 5 : Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	n/a	12	Meningkatnya kelestarian nilai-nilai dan seni budaya melayu sebagai kekayaan budaya daerah	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	n/a	2	4	6	8	10	12

Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintan	Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama	konflik	0	0	Terwujudnya toleransi antar umat beragama	Jumlah Kasus Perselisihan antar umat beragama	konflik	0	0	0	0	0	0	0
					Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Persentase siswa SMP beragama Islam memiliki sertifikat khatam Al Quran	%	n/a	80	81	81	82	82	83

Tabel 3.164 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 6
Misi 6 : Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41	92,41	92,41	92,41	92,41	92,41
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,92	≥70	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,92	72,38	72,62	≥70	≥70	≥70	≥70
	Persentase penduduk miskin	%	6,07	<6,5		Persentase penduduk miskin	%	6,07	6,43	6,01	<6,5	<6,5	<6,5	<6,5

						Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	68,97	78	78	80	81	81	82
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	n/a	>50	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Masyarakat	poin	n/a	n/a	n/a	>50	>50	>50	>50
					Meningkatnya pengelolaan pembangunan oleh pemerintah desa	Indeks Desa Membangun	poin	n/a	n/a	n/a	n/a	>50	>50	>50

Tabel 3.165 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 7
Misi 7 : Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10	80	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10	60	65	50	60	70	80
						Jumlah prestasi olah raga yang diraih tingkat provinsi dan nasional	Prestasi	43	33	40	45	48	50	53

Tabel 3.166 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 8
Misi 8 : Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Akhir RPJMD	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran						
								Kondisi Kinerja Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1,2%	1,3%	Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,3%
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat secara merata di seluruh desa dan kelurahan	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat di seluruh wilayah	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Persentase RTH	%	n/a	100	Meningkatnya kebersihan lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Hasil pengukuran indeks kualitas air	poin	70	70	70	70	70	70	70
						Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	poin	1	1	1	1	1	1	1
					Terpenuhinya standar luas ruang terbuka hijau yang dikelola	Persentase RTH	%	n/a	100	100	100	100	100	100

3.2.5 Prioritas Pembangunan Daerah 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan salah satunya adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.2.6 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2019, antara lain antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 2,5 - 4,5%;
3. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,5 %;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98;

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 – 5,2%;
6. Gini rasio pada kisaran 0,38-0,39.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Tema RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan *Money Follow Program*. Rencana pembangunan nasional tahun 2019 dijabarkan dalam 5 prioritas nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energy, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

3.2.7 Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2019

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan

pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Bintan menetapkan tema pembangunan **“Pemerataan Pembangunan Kabupaten Bintan untuk Pertumbuhan Berkualitas”** dengan prioritas pada beberapa bidang pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Penjabaran lebih lanjut mengenai prioritas pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.167 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2019

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DI RKPD 2019	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1	Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan	Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan Kelautan	34.818.849.000
2	Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah dan antar pulau untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	185.341.013.000

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DI RKPD 2019	ALOKASI ANGGARAN (RP)
3	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati	Meningkatkan kinerja perencanaan Pembangunan	125.869.760.400
4	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global	Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas.	161.569.689.800
5	Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat	Melestarikan Nilai-Nilai dan Seni Budaya Melayu	15.604.569.900
6	Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	16.347.913.800
7	Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan	Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga	3.823.895.000
8	Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan	8.832.105.000

3.2.8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditentukan dalam rangka penetapan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bintan berikut ini indikator kinerja utama daerah:

Tabel 3.168
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	≥ 5	≥ 5
2	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	juta USD	1.551	1.771
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	780.000	850.000
4	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB	%	$\geq 7,0$	$\geq 7,0$
5	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	%	52,064	54,153
6	Jumlah Pulau yang berpenghuni yang tercakupi jaringan transportasi	%	10	11
7	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	42	46
8	Total Fertility Rate (TFR)	%	3,0	2,8
9	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,40	5,39
10	Peraturan yang mendukung kelestarian nilai dan seni budaya melayu	Jumlah Peraturan	8	12
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	≥ 70	≥ 70
12	Indeks Pembangunan Gender	%	92,41	92,41
13	Persentase penduduk miskin	%	$< 6,5$	$< 6,5$
14	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	60	80

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	Kondisi Akhir RPJMD (2021)
15	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	100	100
16	Hasil pengukuran indeks kualitas air	poin	70	70
17	Hasil pengukuran indeks kualitas Udara	poin	1	1

2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.169 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Th 2019
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1)	Tingkat pengangguran terbuka	6,40
2)	Indeks Pembangunan Manusia	≥ 70
3)	Persentase penduduk miskin	$< 6,5$
B	Aspek Pelayanan Umum	
1.	Pendidikan	
4)	APK PAUD 3-6 Tahun	59,1
5)	Rasio guru murid PAUD	01:08
6)	APM SD/MI/SLB/Paket A	96,89
7)	APK SD/MI/SLB/Paket A	103,11
8)	APM SMP/MTs/Paket B	78,3
9)	APK SMP/MTs/Paket B	121,7
10)	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9.00

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Th 2019
11)	Persentase guru TK bersertifikat profesi	22,6
12)	Persentase guru SD bersertifikat profesi	63
13)	Persentase guru SLTP bersertifikat profesi	81,53
14)	Persentase pengawas bersertifikat profesi	100
15)	Angka Melek Huruf (AMH)	99,91
2.	Kesehatan	
16)	Persentase Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapat Skrining Kesehatan	100
17)	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	78
18)	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	51
19)	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	75
20)	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Kabupaten Bintan	55
21)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Kabupaten Bintan	78
22)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	32
23)	Persentase Anemia Ibu Hamil	< 5
24)	Persentase balita gizi kurang	< 5
25)	Presentase balita gizi buruk	< 0,5
26)	Angka Kematian Bayi	12
27)	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) dengan pelayanan 10T	78
28)	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)	97,1
29)	Persentase kunjungan ibu nifas Lengkap	97,1
30)	Angka kematian ibu	< 231
31)	Persentase Bumil Komplikasi yang Ditangani	100
32)	Persentase Desa yang melaksanakan	62

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Th 2019
	PHBS	
33)	Persentase Desa Siaga Aktif	100
34)	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	95
35)	Jumlah Kecamatan dengan API < 1 per 1.000 penduduk	10
36)	Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk	33
37)	Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (<i>sucess rate</i>)	84
38)	Persentase angka kasus HIV yang diobati.	90
39)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	40
40)	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	15
41)	Jumlah Puskesmas yang Minimal Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan	12
42)	Status Akreditasi Rumah Sakit oleh komisi Akreditasi rumah sakit (KARS)	Tk.Dasar
43)	Peningkatan Kelas/Type Rumah Sakit	C
44)	Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas	78
45)	Jumlah Puskesmas yang Memiliki 70% Alat Kesehatan Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014	9
46)	Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	100
47)	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBD Kab. Bintan	18.000
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
48)	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Marginal)	52,064
49)	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan	1
50)	Rata-rata lama genangan	220
51)	Persentase Prasarana Pantai dan Sungai yang Terbangun	45
52)	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	39,69
53)	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,	31,97

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Th 2019
	perdesaan	
54)	Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	72
55)	Persentase bangunan kantor pemerintahan dalam kondisi baik	95
56)	Persentase pelayanan verifikasi perijinan jasa konstruksi (IUJK) dan IMB	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
57)	Jumlah Rumah perdesaan yang tersambung instalasi air limbah	480
58)	Jumlah Rumah perkotaan yang tersambung instalasi air limbah	70
59)	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	12,7
60)	Persentase timbunan sampah yang diangkut ke TPA	45
61)	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	1,5
62)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	60
5.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
63)	Jumlah sarana dan prasarana di wilayah perbatasan	3 unit
64)	Jumlah Lokasi Prioritas Kecamatan Perbatasan yang mendapatkan alokasi pembangunan	5 Lokpri
65)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	80
66)	Persentase jabatan yang sudah tersusun standar kompetensinya	80
67)	Persentase OPD yang memiliki capaian kinerja baik	100
68)	Persentase Indikator yang telah mencapai SPM	100
69)	Persentase capaian sasaran strategis yang telah dilaporkan akuntabilitas kinerjanya	100
70)	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bintan	80.00 (Nilai A)
71)	Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)	10
72)	Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa yang sesuai dengan Permendagri 84 Tahun 2015	7
73)	Persentase sarana prasarana	90

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Th 2019
	perkantoran pemerintahan desa yang baik	
74)	Persentase unit pelayanan pemerintahan (Kecamatan/Desa) yang memiliki komputer dan bisa mengakses internet melalui komputer	85
75)	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan	100
76)	Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan	100
77)	Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan	100
78)	Jumlah perda yang diajukan	10
79)	Presentase Ranperda menjadi perda yang disahkan	100
80)	Presentase produk hukum yang dipublikasikan	100
81)	Presentase perda yang disosialisasikan	100
82)	Presentasse Nilai turun harga yang menyebabkan inflasi	(4±1)
83)	Jumlah BUMD yang beroperasi	2
84)	Kontribusi BUMD terhadap PAD	2.87
85)	Tingkat Akurasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	39
86)	Tingkat Kesesuaian Implementasi Terhadap Perencanaan Sumber Pendanaan DAK, APBN dan APBD	82.05
87)	Persentase pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi melalui ULP	90
88)	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan yang telah distandarisasi	100
89)	Rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk	29.50
90)	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dan pendidikan pengetahuan keagamaan	10900
91)	Presentase Pelayanan Masyarakat Miskin	100
6.	Sosial	
92)	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100
93)	Persentase Penyandang Masalah	81

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Th 2019
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	
94)	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100
B	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	
7.	Tenaga kerja	
95)	Tingkat pengangguran terbuka	6,4
96)	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	
97)	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	100
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	
98)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,41
99)	Persentase penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak	100%
9.	Pangan	
100)	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	100
10.	Lingkungan hidup	
101)	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	7
102)	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Bersama PEMDA yang Terlibat Dalam Melaksanakan 3 R (Reduce,Reuse,Recycle) dan Bank Sampah	14
103)	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangi Melalui 3R dan Bank Sampah	18%
11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
104)	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran penduduk 0-18 Tahun	43.092/ 58.136
105)	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	98.935/ 109.199
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
106)	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	70%
107)	Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap APBDesa	50%

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Th 2019
108)	Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	60%
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
109)	Total Fertility Rate (TFR)	3
110)	Persentase unmet need	10,25
14.	Perhubungan	
111)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	80
112)	Jumlah Penurunan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	52
113)	Persentase kepemilikan KIR kendaraan bermotor wajib uji	100
15.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
114)	Persentase Pelaku Usaha mikro yang terlatih	24
115)	Persentase koperasi aktif	59
16.	Penanaman Modal	
116)	Indeks kepuasan masyarakat	87,50%
117)	Realisasi investasi (PMA/PMDN)	749
17.	Kepemudaan dan olah raga	
118)	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75
119)	Jumlah pemuda yang mandiri dan berdaya saing	57
120)	Jumlah prestasi olah raga tingkat Provinsi dan Nasional yang diraih	48
18.	Kebudayaan	
121)	Persentase grup kesenian yang dibina	30
122)	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	30
19.	Kearsipan	
123)	Pengelolaan arsip secara baku	80

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Th 2019
C	Urusan Pemerintahan Pilihan	
20.	Kelautan dan Perikanan	
124)	Produksi perikanan budidaya	2.011,96
125)	Produksi perikanan tangkap	55.536
126)	Persentase kelompok nelayan aktif	65
127)	Persentase Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) aktif	65
21.	Pariwisata	
128)	Jumlah desa yang dikembangkan menjadi desa wisata	5
129)	Jumlah jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	35
22.	Pertanian	
130)	Produktivitas tanaman perkebunan unggulan daerah (ton/ha)	11,8
131)	Produktivitas tanaman pangan (ton/ha)	8.8
132)	Jumlah Produksi Daging dan Telur (Ton)	2.571,43/1.790,07
23.	Perdagangan	
133)	Persentase tertib ukur terhadap UTTP	100
134)	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat	100
135)	Persentase Fasilitas Pasar yang Memadai	65
24.	Perindustrian	
136)	Jumlah IKM	439
C	Aspek Daya Saing	
137)	Pertumbuhan Ekonomi	≥5
138)	Jumlah kunjungan wisatawan	780.000
139)	Persentase tingkat kemantapan jalan (Mantap Sempurna)	52,064
140)	Jumlah Pulau yang tercakupi jaringan Transportasi	10
141)	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang	72
142)	Realisasi Investasi PMA/ PMDN	1.551

a. Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Tabel 3.170 Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	Pendidikan Anak Usia Dini warga negara usia 5 s.d.6 tahun bersekolah di PAUD	%	100
2	Pendidikan dasar	%	100
3	Pendidikan kesetaraan	%	100
B	Kesehatan		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	%	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	%	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	%	100
4	Pelayanan kesehatan balita;	%	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	%	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	%	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus),	%	100
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	%	100
2	Penyediaan pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	%	100
D	Perumahan dan Kawasan permukiman		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	%	100

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target
	kabupaten/kota		
E	Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	%	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
F	Sosial		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;	%	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;	%	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;	%	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan pengemis di luar panti;	%	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	%	100

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BINTAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KABUPATEN BINTAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

Didalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada era otonomi daerah, kerjasama daripada pemerintah daerah (eksekutif) dengan dewan perwakilan rakyat daerah (legislatif) untuk memastikan cita-cita dan harapan masyarakat dapat terpenuhi. Pelaksanaan fungsi pemerintahan baik pada tataran eksekutif maupun legislatif diKabupaten ditunjukkan dengan sinergitas kelembagaan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bintan di tahun 2019 juga berlandaskan pada tindak lanjut catatan strategis atas laporan keterangan pertanggungjawaban pada tahun 2018. Pada LKPJ 2018, DPRD Kabupaten Bintan memberikan saran dan rekomendasi terhadap serangkaian penyelenggaraan pemerintahan sebagai perbaikan-perbaikan dan inovasi yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bintan. Selanjutnya dengan memperhatikan catatan-catatan strategis bagi memastikan tata kelola pemerintahan yang baik terlaksana maka pemerintah Kabupaten Bintan mereduksi setiap arahan yang diberikan. Ini juga merupakan amanat konstitusional didalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya diatur didalam Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007.

Adapun tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2019 didalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.171 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Bintan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan yang telah berhasil meraih sejumlah prestasi nasional sepanjang tahun 2018.	Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten menerima penghargaan dari pemerintah pusat serta apresiasi lainnya daripada lembaga-lembaga non pemerintah. Penghargaan paling prestisius selama kurun waktu penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2019 dibidang kesehatan yaitu Penghargaan Kabupaten Sehat Kategori Tertinggi, Swasti Saba Wistara dan Puskesmas Tanjunguban, di Kecamatan Bintan Utara meraih Penghargaan Tingkat Nasional Pelayanan Ramah Anak Terbaik 2019, penghargaan Puskesmas Pelayanan Ramah Anak Terbaik 2019 Tingkat Nasional hanya diberikan kepada 21 Puskesmas Se-Indonesia. Disamping itu juga penghargaan Standar Pelayanan Publik tahun 2019. pada penilaian tahun 2019, Pemkab Bintan meraih predikat kepatuhan tinggi (zona hijau). Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang komitmen, untuk memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU nomor 25/2009 tentang pelayanan publik. Kabupaten Bintan pada tahun 2019 menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke Delapan kalinya, Keberhasilan meraih dan mempertahankan Opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2018 ini, merupakan cerminan atas komitmen dan kerja

		keras dari aparaturnya pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka perbaikan dan penataan pengelolaan keuangan yang lebih baik, demi mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dibiidang pariwisata pada tahun 2019 Pemkab Bintan menerima dari Markplus Center for Tourism and Hospitality di Calender of Event Award 2019, Penghargaan tersebut diberikan bagi pihak penyelenggara yang telah memberikan dampak sosial kepada daerah lewat event-event pariwisata yang masuk dalam Calender Of Event (COE), penghargaan yang diberikan MarkPlus Center for Tourism and Hospitality ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi, menjaga dan meningkatkan semangat penyelenggara sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi yang telah diberikan kepada pariwisata Indonesia.
2	Peningkatan kualitas ASN sangat dibutuhkan terutama dalam rangka memaksimalkan PDRB untuk ditahun-tahun berikutnya.	Dalam rangka peningkatan profesionalitas ASN dilingkungan Kabupaten Bintan khususnya berimplikasi terhadap kinerja ekonomi daerah dan memastikan kondusifitas daripada iklim investasi. Pemerintah Kabupaten Bintan terus meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur didalam kemudahan pelayanan bagi dunia usaha dengan tetap memperhatikan ketentuan legal-formal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi yang dilakukan mulai dari melakukan Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensinya. Hal ini dilakukan selain target indikator yang digunakan namun juga untuk melihat sejauh

mana persentase kesesuaian antara aparatur dengan kompetensi yang dimilikinya dalam menduduki suatu jabatan tertentu. Untuk mencapai targetnya, indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Kepangkatan, Kegiatan Seleksi Calon Praja IPDN/Taruna STTD, kegiatan Penataan SIMPEG Daerah dan uji Kompetensi. Persentase capaian dari indikator ini diperoleh dari hasil penghitungan jumlah aparatur yang menduduki jabatan berbanding dengan jumlah total jabatan. Untuk tahun 2019, jumlah aparatur yang menduduki jabatan adalah sebanyak 2.377 pejabat yang terdiri dari 702 pejabat struktural dan 1.675 pejabat fungsional tertentu. Sedangkan jumlah total jabatan adalah sebanyak 2.423 jabatan yang terdiri dari 748 jabatan struktural dan 1.675 jabatan fungsional tertentu. Sehingga dapat diketahui capaian dari indikator ini adalah 98.10%. Artinya bahwa hampir seluruh jabatan telah terisi dengan tepat sesuai dengan kompetensi pejabat yang bersangkutan. Pada kegiatan Pembinaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas, Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diberikan dukungan anggaran selama yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas dengan mengajukan proposal terlebih dahulu. Besarnya dukungan anggaran tersebut berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikutinya dan kemampuan anggaran dari Pemerintah Daerah. Hasil (outcome) yang

		diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi ASN yang mengikuti ijin belajar. Pola-pola ini terus dilakukan inovasi untuk peningkatan kompetensi secara keseluruhan bagi ASN didalam kinerja birokrasi pemerintahan Kabupaten Bintan.
3	Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel harus selalu menjadi yang terdepan. Namun, kami merekomendasikan kepada Kepala Daerah, untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya ASN. Sebab, pemerintahan yang bersih dan berwibawa terkait erat dengan kualitas ASN sebagai motor penggerak pembangunan di Kabupaten Bintan.	Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan serangkaian program dan kegiatan untuk tetap memastikan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang baik terimplementasi tidak hanya oleh kepala daerah namun diikuti seluruh organisasi perangkat daerah. Arahan dari pemerintah pusat terutama tentang agenda “Reformasi Birokrasi” di daerah pada tahun 2019 ini menjadi prioritas dengan melakukan penyusunan “Road Map reformasi birokrasi Kabupaten Bintan”. Ini menjadi agenda strategis pemerintah daerah didalam <i>research and development</i> (R & D) untuk efektivitas kinerja birokrasi pemerintahan yang berimplikasi terhadap kualitas kinerja ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Disamping itu juga ragam pelatihan, bimbingan teknis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung kognitif daripada ASN. Usaha didalam peningkatan kapabilitas ASN juga dilakukan BKPSDM melalui kegiatan pelaksanaan pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II dilingkungan Kabupaten Bintan mengacu pada Perka LAN nomor 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Hasil (outcome)

		yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi para pejabat eselon, selain itu juga terdapat kegiatan Kursus Bahasa Inggris, bimbingan teknis manajemen kontrak, pelatihan manajemen pengendalian diri dan bagi CPNS mengikuti kegiatan pengiriman peserta pelatihan dasar. kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan CPNS tersebut tentang bagaimana menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
4	Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sertifikasi guru, merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan serta sebaran tenaga pendidik yang merata.	Perhatian pemerintah daerah untuk urusan pendidikan berdasarkan amanat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tenaga pendidik mesti memiliki sertifikat pendidik Persentase Capaian guru TK yang bersertifikat profesi pada tahun 2019 ini sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 20.47%. Namun capaian ini masih dapat memenuhi dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan. Pemerintah kabupaten bintan saat ini mendorong seluruh pendidik Taman Kanak-kanak (TK) yang belum memiliki kualifikasi Strata-1 untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi sehingga dapat memenuhi kualifikasi pendidik TK yang professional serta dapat mengikuti persyaratan wajib untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ).

	Untuk capaian kinerja Dinas Pendidikan terhadap indikator ini pada tahun 2019 terkait persentase guru SD bersertifikat profesi terjadi peningkatan mencapai 47.10% atau naik 0,49% dibanding tahun 2018 sebesar 46.61%. Sementara itu untuk sertifikasi guru SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan memfasilitasi proses persiapan sertifikasi sehingga sertifikasi guru SMP meningkat. Capaian kinerja terhadap indikator persentase guru SMP yang bersertifikat profesi pada tahun 2019 mencapai 54,60% atau naik 1,71% dibanding tahun 2018 sebesar 52,89%. Tantangan kompetensi guru di Kabupaten Bintan didalam proses sertifikasi ini dari sisi jenjang kualifikasi pendidikan tinggi serta tahapan assessment awal sertifikasi. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pendidikan melakukan perancangan program pembekalan PPGJ bagi peserta sertifikasi guru dengan tujuan kegiatan memberikan informasi tentang perubahan-perubahan dalam proses penetapan dan pendaftaran yang pada prosesnya keluaran kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mendapatkan sertifikat pendidik hasilnya adalah meningkatnya pemahaman. Selain itu juga program Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ) serta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menghadapi Pre Test.

5	Bidang Kesehatan, dimana perhatian Pemerintah terhadap program pemberantasan penyakit menular malaria hendaknya menjadi prioritas mengingat Pendapat Asli Daerah (PAD) dominan dibidang Pariwisata sebagaimana kita ketahui bahwa daerah wisata harus bebas dari penyakit tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus memenuhi penempatan minimal 5 jenis tenaga kesehatan seperti tenaga farmasi, analis labor, gizi, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan disetiap Puskesmas.	Secara keseluruhan angka penemuan dan pengobatan kasus malaria di Kabupaten Bintan dalam seribu penduduk atau <i>Annual Parasite Inciden</i> (API) masih sesuai dengan target secara Nasional yaitu API kurang dari satu. Upaya didalam pemberantasan penyakit menular khususnya Malaria di tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melakukan serangkaian kegiatan selain itu juga dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Penyakit Malaria ini pemerintah mengantisipasinya dengan mengedukasi masyarakat sebagai bagian dari inovasi dan peran serta partisipasi untuk upaya mencegah atau menanggulangi penyakit malaria. Langkah-langkah baik secara preventif maupun kuratif untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh malaria. Menurutnya kejadian penyakit malaria dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi lingkungan, suhu udara, sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat. Kondisi lingkungan yang potensial sebagai tempat perindukan malaria adalah rawa-rawa dan laguna yang digenangi air dibersihkan untuk menjaga pengendalian Malaria. Berdampingan dengan Malaria, penyakit DBD juga ditindak lanjuti secara serius oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Untuk menurunkan angka kesakitan dan

	kematian karena penyakit DBD telah dilakukan beberapa upaya pengendalian penyakit DBD, dimulai dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) setelah adanya laporan kasus dari Rumah Sakit/Puskesmas, pengendalian vektor untuk menurunkan faktor resiko penularan dengan meminimalkan habitat perkembangbiakan, menurunkan kepadatan dan umur vektor, mengurangi kontak antara vektor dengan manusia, memutus rantai penularan penyakit. Kemudian dilakukan pengasapan (Fogging Focus) dan abatesasi massal dengan radius ± 100 meter dari tempat tinggal kasus. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN-DBD) lebih dioptimalkan dengan meningkatkan kinerja Kader Pemantau Jentik Berkala (PJB) yang bertugas untuk memantau secara berkala tempat-tempat penampungan air bersih yang memungkinkan sebagai tempat perindukan nyamuk <i>Aedes Aegypti</i> di setiap rumah di masing-masing wilayah kerja dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan gotong royong secara rutin minimal setiap minggu sekali, serta dengan melakukan Gerakan 3M (menguras, menutup, mengubur) secara serentak dan Plusnya adalah membubuhkan larvasida butiran pada tempat-tempat penampungan air yang sulit dijangkau/dibersihkan, serta menjaga kebersihan lingkungan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, apabila Angka Bebas Jentik (ABJ) pada setiap rumah (House Index) dan tempat

		penampungan air (Container Index) sudah lebih dari 95%, maka tingkat kepadatan nyamuk penular DBD akan menurun, hal ini dapat mengurangi faktor resiko penularan penyakit DBD. Untuk penempatan 5 jenis tenaga kesehatan dasar di puskesmas terus dilakukan demi menjaga pelanana publik kepada masyarakat. Tantangan kualitas hasil pendidikan Sumber Daya Manusia kesehatan dan pelatihan kesehatan penempatan, jumlah tenaga medis yang ada menjadi dinamika bagi Dinas Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan akan kesehatan bagi masyarakat. Upaya yang terus dilakukan untuk pemenuhan standar tersebut dan penempatan saat ini yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan dasar di puskesmas Se-Kabupaten Bintan, pada tahun 2019 yaitu 8 Puskesmas
6	Untuk pembangunan yang menempatkan infrastruktur dalam skala prioritas, agar lebih digesa. Untuk itu kami merekomendasikan Dinas terkait untuk lebih sigap untuk mendapatkan bantuan pembangunan yang bersumber dari APBN.	Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan 4 jenis penganggaran dari DAK. Baik DAK Non Fisik, DAK regular, DAK Penugasan maupun juga DAK Afirmasi. Adapun Anggaran DAK Non Fisik untuk Kabupaten Bintan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 52,261,481,000.00 yang terdistribusi untuk bidang pendidikan, kesehatan dan kependudukan. Alokasi anggaran DAK Reguler sebesar Rp. 70,740,816,884.00 pada tahun 2019 terdistribusi pada 7 Bidang yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Air Minum, Jalan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata serta Pertanian. Adapun distribusi

		anggaran DAK Penugasan Rp. 22,600,939,000.00 pada tahun 2019 pada 5 Bidang yaitu: Kesehatan, Air Minum, Jalan, Lingkungan Hidup dan Pasar. Jumlah anggaran DAK Afirmasi untuk Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 20,787,937,000.00, yang terdistribusi pada 6 Bidang yaitu: Bidang Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman, Transportasi, Pendidikan, Air Minum dan Sanitasi.
7	Dibidang Perikanan perlu adanya terobosan-terobosan Dinas terkait dalam rangka peningkatan ekonomi nelayan serta peningkatan sumber daya ASN dan masyarakat, seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Pada tahun 2019, jumlah produksi perikanan budidaya dengan nilai capaian produksi perikanan sebesar 2.022 Ton. Jumlah produksi perikanan budidaya ini juga meningkat dengan jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2018 yang lalu dimana dengan nilai capaian produksi sebesar 1.408,23 Ton. Selain karena pembinaan yang terus dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, peningkatan produksi perikanan budidaya ini disebabkan oleh sinerginya program dan kegiatan baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, yaitu diantaranya dengan kegiatan DAK perikanan budidaya yang merupakan program dari pemerintah pusat, bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan juga dari APBD Pemerintah Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap pada tahun 2019, jumlah produksi perikanan tangkap memiliki nilai capaian produksi perikanan tangkap hingga sebesar 55.604,4 Ton. Jumlah produksi perikanan tangkap ini juga meningkat dibanding

	dengan tahun 2018 yang lalu dimana dengan nilai capaian produksi perikanan tangkap sebesar 54.682,27 Ton. Disamping itu juga jumlah produksi pasca panen hasil perikanan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan nilai capaian produksi perikanan tangkap sebesar 293,5 Ton. Jumlah produksi pasca panen hasil perikanan ini juga meningkat dibanding dengan tahun 2018 yang lalu dimana dengan nilai capaian produksi sebesar 292,49 Ton. Serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan bagi para pembudidaya maupun juga nelayan tangkap ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti memberikan pembelajaran dan pelatihan SDM meliputi Sosialisasi dan Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dengan adanya kegiatan ini dapat terlaksana seleksi usaha BDIAT untuk memperoleh Sertifikasi CBIB untuk di 7 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan serta berdampak langsung pula terhadap presentase pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan yang ditangani di Kabupaten Bintan yang awalnya ditargetkan sebesar 80%, pada presentase capaian dapat melebihi target yaitu mencapai angka 100%. Program lainnya yang menyasar pada masyarakat rumah tangga nelayan adalah dengan pencaanangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Mulai dari pelayanan usaha perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha perikanan hingga mendorong peningkatan

		konsumsi ikan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pemasaran usaha perikanan oleh kelompok-kelompok nelayan.
8	Untuk pembangunan lingkungan hidup, kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bintan bekerja sama dengan lintas terkait agar secara serius mengatasi limbah minyak hitam di sepanjang pantai di Pulau Bintan, tidak hanya fokus pada wilayah wisata, melainkan juga di wilayah pesisir terkhusus perkampungan nelayan.	Permasalahan limbah minyak hitam yang terdapat diperairan Kabupaten Bintan pada dasarnya walaupun kewenangan zonasi laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun dampak yang ditimbulkan memberikan efek besar terutama bagi pariwisata daerah dan juga kondisi perikanan yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir. Untuk sifatnya pengendalian ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bintan. Salah satu strategi yang dilakukan sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bintan sudah melakukan koordinasi hingga melaporkan hal ini kepada Presiden RI, soal limbah ini. Limbah sludge oil tahunan ini sudah menjadi isu internasional. Justru itu, Pemkab menyurati Presiden RI. Disamping itu juga Pemkab Bintan mengadukan soal permasalahan limbah ini, agar ada tindak lanjut dari pusat. Terutama dalam penegakkan hukum terhadap pelaku pembuangan minyak hitam. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan melakukan koordinasi secara intensif bersama pengelola kawasan pariwisata untuk menangani limbah yang muncul. Tindak lanjut terkait limbah minyak hitam ini menjadi perhatian khusus kepala daerah karena sumber limbah minyak berasal

dari perairan internasional. Pemkab Bintan sudah koordinasi ke seluruh sektor vertikal dan horizontal, dalam mengatasi hal tersebut. Walaupun ini seharusnya menjadi urusan kewenangan kelautan berada di pemerintah provinsi. Namun langkah-langkah pengendalian tetap pemerintah Kabupaten Bintan lakukan. Selain itu juga koordinasi intensif dengan pihak keamanan seperti TNI-AL dilakukan, Lantamal IV Tanjungpinang menggunakan citra satelit untuk memantau serta memaksimalkan patroli untuk memburu pelaku pembuang limbah minyak hitam yang mencemari pantai dan laut di Bintan provinsi Kepri. Ini dilakukan guna memantau sekaligus mencegah aktivitas kapal-kapal tanker asing yang membuang limbah sembarangan. Selain Pembahasan ini sampai di KEMENKO MARITIM RI. Adapun hasil rapat di Kemenko Maritim dan Investasi beberapa waktu lalu, pemerintah fokus memaksimalkan operasi laut di perbatasan Kepri termasuk Bintan yang terdampak untuk mencegah pencemaran limbah. Beberapa hasil pertemuan itu dirumuskan dalam beberapa poin penting yaitu: (1) Pihak yang terlibat dalam penanganan masalah limbah tar mohon dukungan anggaran operasional di laut agar dapat lebih efektif melaksanakan tugasnya, melalui perwakilan kementerian Keuangan; (2) Merencanakan melaksanakan survey dasar laut di wil opl utk mengetahui limbah tar yg dibuang di dasar laut. (3) Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Singapura dan

		Malaysia mengenai penanganan masalah tar di Kepri melalui kemenlu. Tindak lanjut lainnya visitasi lapangan ke beberapa titik terutama di Bintan yang terdampak langsung seperti Senggiling, pengudang, berakit dan kawal. Lokasi ini ditinjau KLHK, Kemenko Maritim, Polairud dan instansi lainnya. Dibentuk juga Tim Daerah diprovinsi Kepulauan Riau termasuk juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Berdasarkan arahan rapat kementerian juga diharapkan dukungan DPRD didalam proses penganggaran didalam urusan lingkungan hidup terutamanya pelaksanaan penanganan limbah minyak hitam bagi daerah yang terdampak.
9	Hendaknya setiap OPD membuat perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi ketimpangan antara target dan realisasi.	Pemerintah Kabupaten Bintan terutamanya pimpinan daerah beserta jajaran eksekutif terus berkoordinasi dan melakukan serangkaian kerja sinkronisasi didalam perencanaan pembangunan terutamanya memastikan target-target didalam RPJMD dan RKPD tahunan sebagai indikator penyelenggaraan kinerja pemkab Bintan. Begitu juga dengan pelaksanaan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan baik teknis maupun administrasi agar dapat dilakukan langkah-langkah “Quick Wins” didalam penyelesaiannya.
10	Pansus menegaskan hendaknya rekomendasi dan catatan strategis yang telah disampaikan dapat dipedomani untuk menjadi bahan evaluasi kinerja juga perbaikan	Berdasarkan masukan terutama rekomendasi atas LKPJ Tahun 2018 didalam proses evaluasi RPJMD maupun juga penyusunan RKPD tahun 2019 on-going, evaluasi daripada DPRD menjadi perhatian terutama maksimalisasi pelaksanaan program-program yang menyasar kepada

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan dimasa akan datang.	peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta didalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan “Good Governance” hal ini juga berlaku pada standar pelayanan minimum pemerintah Kabupaten Bintan.

Seluruh catatan strategis terutamanya berkenaan dengan apresiasi, saran serta rekomendasi dalam perjalanannya tetap menemui tantangan pada tataran implementasi. Serangkaian kebijakan-kebijakan diiringi dengan kebijaksanaan pimpinan daerah demi memastikan arah pencapaian pembangunan hasil sinergitas lintas sektoral termasuk DPRD Kabupaten Bintan menjadi catatan tersendiri didalam pembahasan. Menjaga sinergitas kelembagaan terutamanya urgensi kepentingan rakyat akan selalu menjadi prioritas seluruh elemen pelaksana pemerintahan, hal ini juga menjadi amanah bersama untuk pencapaian “Bintan Gemilang” secara berkelanjutan.



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

BAB IV

CAPAIAN KINEJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah lain agar memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan karena tidak semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat menggunakan Asas Desentralisasi.

4.1. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan di Kabupaten Bintan

Pada tahun 2019 pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan terdapat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Adapun tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.

Kelompok sasaran dari pelaksanaan program ini di Kabupaten Bintan kepada Kelompok Tani kawasan bawang merah, kawasan sayuran daun dan kawasan aneka cabai

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran untuk Kabupaten Bintan sebesar Rp. 961.365.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 899.850.000 atau 93.60% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- 2) Kegiatan Fasilitasi Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) dan Sarana Prasarana Pengolahan Cabai Dan Bawang Merah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran untuk Kabupaten Bintan sebesar Rp. 1.071.015.000,- dan terealisasi sebesar 620.000.000 atau 57.889% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Secara umum kegiatan ini tidak melibatkan 100% kita sebagai

pelaksana di kabupaten bintang pelaksanaan langsung di tangani oleh DKP2KP provinsi kepulauan riau.

b) Permasalahan dan solusi

Secara umum, Program Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Hortikultura Tugas Perbantuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan khususnya dalam pengadaan bibit yang belum ada penangkar dari daerah kabupaten bintang sehingga proses pengadaan terlalu lama dan pengiriman. Permasalahan tersebut telah ditindak lanjuti secara maksimal, namun hasilnya masih sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a) Pelaksanaan lelang agak lama sehingga pelaksanaan pendistribusian agak lama sehingga penanaman agak terlambat
- b) Kurangnya keinginan petani dalam pengadaan untuk bibit dikarenakan petani sudah memiliki bibit sendiri.
- c) Kurangnya pengalaman dan pengetahuan petani dalam pelaksanaan program
- d) Kurangnya koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan
- e) Kurang transparannya antara Provinsi dan Kabupaten

2. Solusi

- a) Agar pelaksanaan lelang di percepat sehingga pendistribusian barang dan pelaksanaan penanaman tidak terlambat.
- b) Dalam pelaksanaan pengadaan barang hendaknya saprodi penunjang kegiatan yang diadakan sehingga dalam dapat memenuhi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan sangat besar.
- c) Adanya studi banding atau pelaksanaan magang untuk petani dalam penunjang program dan pendamping yang handal sehingga mengurangi kegagalan petani dalam pelaksanaan kegiatan
- d) Harus ada kejelasan dan transparan antara provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- e) Harus tingkatkan koordinasi antar instansi sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

a) Pelaksanaan Program

- 1) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Komoditas Ubi Kayu.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran untuk Kabupaten Bintan sebesar Rp.200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.200.000.000 atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara umum, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tugas Perbantuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam

pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan khususnya dalam pengadaan bibit yang belum ada penangkar dari daerah kabupaten bintan sehingga proses pengadaan terlalu lama dan pengiriman. Permasalahan tersebut telah ditindak lanjuti secara maksimal, namun hasilnya masih sesuai dengan yang diharapkan, sebagaimana uraian sebagai berikut:

b) Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Waktu pelaksanaan sangat singkat dikarenakan dilaksanakan di akhir tahun
- b) Petani sebenarnya tidak mau pengadaan bibit dikarenakan petani ada bibit
- c) Petani mengharapkan pupuk akan tetapi melaksanakan pengembangan ubi kayu tahun ini hanya berupa stek ubi kayu.

2. Solusi

- a) Diharapkan pelaksanaan jangan di Akhir Tahun dikarenakan waktu sanga singkat
- b) Diharapkan bantuan berupa pupuk bukan Stek ubi kayu karena petani sudah ada bibit ubikayu.

C. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

a) Pelaksanaan Program

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, dengan realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan mencapai 98 %. Pagu dana Rp.613.500.000,- realisasi Rp. 602.560.000,- bersisa Rp.

10.940.000,- dan kondisi sarana mencukupi, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Yang diberdayakan.
- 2) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 3) Dukungan Manajemen dan Administrasi

b) Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan

- a) Kurangnya kesadaran KWT untuk tertib administrasi
- b) Kurangnya dokumentasi dari KWT
- c) Kurang tanggapnya dan bimbingan dan pendampingan kecamatan sehingga terkendala dalam pelaporan
- d) Kurangnya kesadaran kelompok untuk mengkonsumsi pangan lokal
- e) Komposisi kebutuhan pangan masih didominasi oleh beras.
- f) Belum optimalnya peningkatan mutu produk pangan.
- g) Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok.
- h) Peran serta Badan/ Dinas/ LSM dan Pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal.
- i) Belum optimalnya pemanfaatan perkarangan untuk penganekaragaman konsumsi pangan dan penambahan nilai gizi masyarakat.

2. Solusi

- a) Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada KWT dalam pengisian administrasi dan pelaporan dari pendamping di Kecamatan.
- b) Penyuluhan secara intensif dan berkelanjutan tentang pemanfaatan produk pangan lokal menjadi pangan pokok pengganti beras dan terigu.
- c) Penyuluhan dan bimbingan secara intensif tentang pemanfaatan lahan perkarangan.
- d) Pemanfaatan database daerah rawan pangan secara benar.
- e) Mengoptimalkan fungsi Kelompok-Kelompok Afinitas didalam meningkatkan mutu ketahanan pangan dan kesejahteraan anggotanya.

D. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

a) Pelaksanaan Program

Program ini merupakan tugas pembantuan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian satuan kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan pokok. Anggaran pelaksanaan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Yang Berasal Dari Dana Tugas Pembantuan berasal dari APBN tahun anggaran 2019 pada Satker Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019

Nomor DIPA: 018.08.4.329082/2019/2018 Tanggal 05 Desember 2018. Total alokasi anggaran yang disediakan dalam mendukung program ini sebesar Rp. 488.880.000,-. dengan realisasi pencapaian fisik sebesar 100%

1) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Untuk yang berlokasi di Kabupaten Bintan kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.400.000,- dengan realisasi dengan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan penyediaan alat dan mesin Pertanian pra panen mendukung sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Sasaran dari kegiatan ini adalah Kelompok Tani yang berusaha komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan alat dan mesin pra panen sub sector tanaman pangan sebanyak 8 unit dan penyediaan alat dan mesin pra panen sub sector hortikultura sebanyak 2 unit yang diharapkan dapat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelompok tani/petani dalam penyediaan alat dan mesin pertanian untuk usaha taninya yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Untuk yang berlokasi di Kabupaten Bintan kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.990.000,- dengan realisasi dengan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyediakan

anggaran untuk operasional kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Sasaran dari lokasi kegiatan ini adalah Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan anggaran pendanaan untuk biaya operasional kegiatan Tugas pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selama 12 bulan. Dan Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan kegiatan fisik Tugas pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3) Fasilitas Pupuk dan Pestisida

Untuk yang berlokasi di Kabupaten Bintan kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.400.000,- dengan realisasi dengan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%.. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyediakan anggaran untuk operasional kegiatan dalam hal pupuk dan pestisida. Sasaran dari lokasi kegiatan ini adalah Kabupaten Bintan. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan anggaran pendanaan untuk fasilitas pupuk dan pestisida selama 12 bulan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah terlaksananya fasilitas pupuk dan pestisida di Kabupaten Bintan. Pada Kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan yang berarti, Kegiatan berjalan dengan lancar.

4) Fasilitas Pembiayaan Pertanian

Fasilitas dan revitalisasi dari pembiayaan pertanian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan fasilitas akses petani terhadap pembiayaan / permodalan. Revitalisasi pembiayaan ini di tujukan untuk mendorong dan menjamin ketersediaan

pembiayaan / permodalan untuk pengembangan usaha tani. Akses petani terhadap sumber pembiayaan yang salah satunya melalui kredit ke sektor pertanian masih terbilang rendah, selain itu juga telah dilakukan berbagai upaya yang mendekatkan pelaku usaha tani untuk akses kepada sumber pembiayaan lainnya. Namun demikian upaya tersebut masih belum optimal, terlihat dari pemanfaatan skim kredit program yang disediakan oleh pemerintah dan masih rendah penyalurannya oleh perbankan pelaksana.

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian adalah suatu yang menjembatani petani dalam melakukan akses kepada perbankan, sehingga tercapai revitalisasi pembiayaan pertanian di mana pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan kepada petani untuk mengembangkan usaha taninya

Untuk yang berlokasi di Kabupaten Bintan kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.090.000,- dengan realisasi dengan realisasi pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi petani melalui pendampingan FPPS untuk dapat mengakses sumber pembiayaan pertanian. Sasaran dari lokasi kegiatan ini adalah 7 kecamatan dalam Pulau Bintan yaitu kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Toapaya dan Bintan Timur. Sasaran pelaksanaannya adalah terfasilitasnya petani melalui pendampingan FPPS di kabupaten untuk mengakses sumber pembiayaan pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah

1. Terlaksannya kegiatan FPPS dalam rangka fasilitasi pembiayaan pertanian
2. Akses petani menjadi Calon Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah meningkatnya kemampuan permodalan ditingkat petani.

b) Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Lambatnya proses pelelangan barang yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang menyebabkan lambatnya proses serapan anggaran.
- b) Tidak adanya biaya transportasi untuk pengangkutan barang dari titik serah di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan ke lokasi penerima bantuan. Kurangnya dokumentasi dari KWT.
- c) Tidak dapat terserapnya beberapa pos anggaran belanja yang disebabkan adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam penyerapan anggaran misalnya belanja perjalanan paket meeting luar kota dan belanja perjalanan paket meeting dalam kota yang mensyaratkan adanya surat mengenai pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaannya.
- d) Masih rendah nya penyaluran kredit untuk sektor pertanian dan kurang optimal akses pelaku usaha terhadap perbankan dan minimnya jaminan

(angguan) serta belum optimalnya peningkatan mutu produk pangan.

2. Solusi

- a) Melakukan koordinasi dengan Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.
- b) Mengusulkan apabila melakukan penyerahan barang di lokasi penerima bantuan ditambah dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan secara intensif tentang pemanfaatan lahan perkarangan.
- c) Mengusulkan agar kedepan dalam penyusunan RKAKL sedapat mungkin agar dapat disinkronkan dengan agenda dari kementerian/lembaga.
- d) Melalui upaya fasilitasi pembiayaan atau permodalan yang merupakan unsur pendukung yang sangat penting dalam pengembangan usaha budidaya di sub sektor tanaman pangan / Hortikultura / perternakan / perkebunan dan usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/ bakulan dan usaha lain berbasis pertanian (tanaman pangan / Hortikultura/ Perternakan / Perkebunan) oleh Petani / Kelompok Tani / Gapoktan.

4.2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan bersumber dari Dana Alokasi Khusus

Pada tahun 2019 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau memberikan penghargaan kepada Kabupaten Bintan **Kinerja terbaik ke-II (Dua) dalam penggunaan DAK Fisik** dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

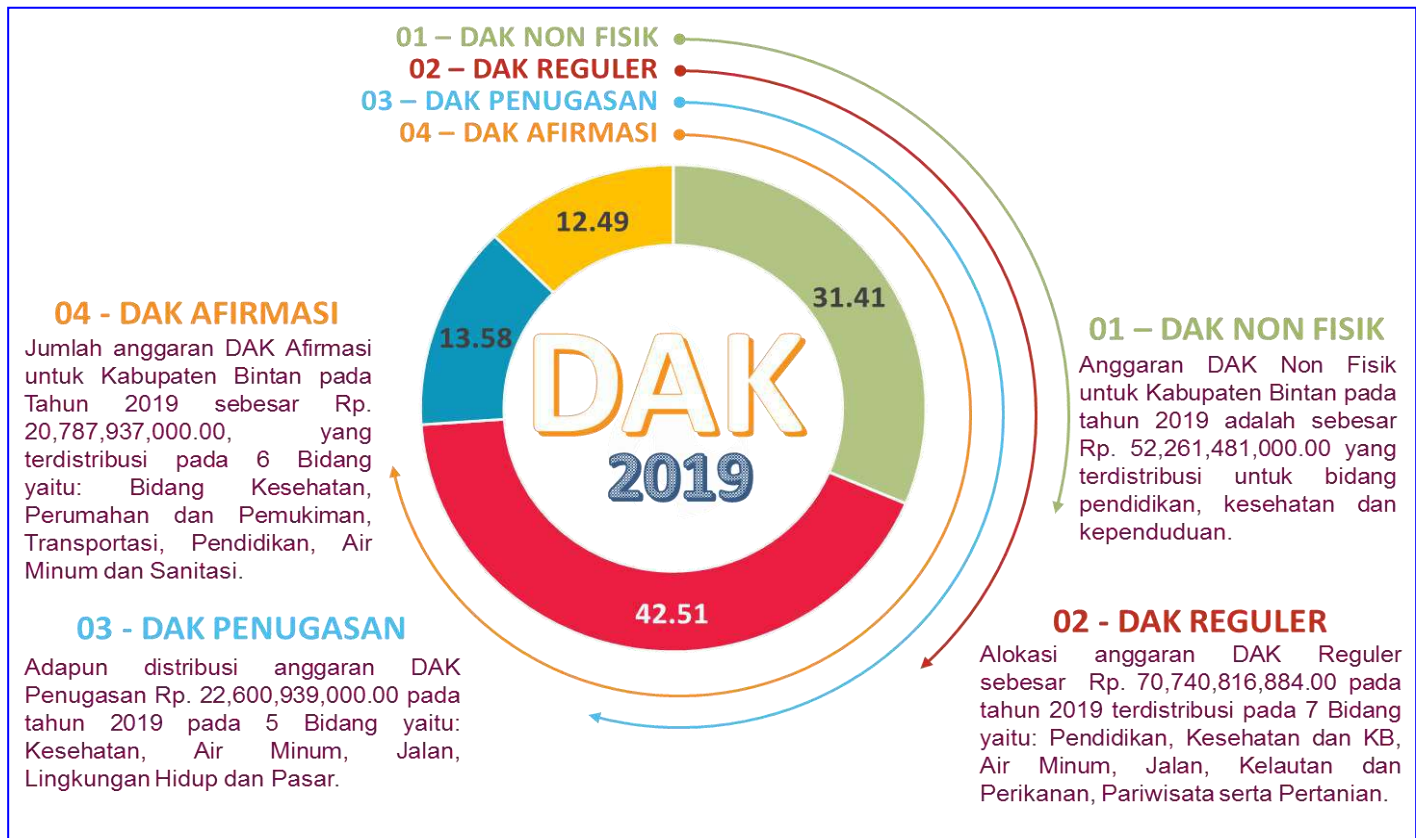
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik Specific Grants, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi dari 2 (Dua) jenis yaitu DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Berdasarkan laporan daripada Bagian Pembangunan pada tahun 2019 Kabupaten Bintan menyelenggarakan DAK Non Fisik serta DAK Fisik baik itu DAK Reguler, DAK Penugasan dan juga DAK Afirmasi dengan akumulasi anggaran berjumlah Rp. 166,391,173,884.00 sedangkan untuk realisasi mencapai 96.93 persen. Untuk pembagian persentase daripada DAK fisik sebesar 68,59 Persen atau dengan nilai Rp. 114,129,692,884.00. Sedangkan DAK Non Fisik persentasenya sebesar 31,41 persen dengan jumlah anggaran sebesar Rp52,261,481,000.00 untuk tahun 2019 di Kabupaten Bintan. Baik secara persentase maupun akumulasi anggaran pada

dasarnya terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.123.177.913.000,- dan terealisasi sebesar Rp.115.572.160.116,-.

Grafik 4.1
Alokasi DAK di Kabupaten Bintan Pada Tahun 2019



Sumber: Diolah dari Data Laporan DAK 2019, Bagian Pembangunan-Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Tabel 4.1

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Non Fisik Tahun Anggaran 2019

NO	DAK/BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN		PAGU DAK (Rp.)	REALISASI			
				KEUANGAN		FISIK	
				Jumlah (Rp.)	(%)	Vol	(%)
1	2		6	12	13	14	15
	KABUPATEN BINTAN		166.391.173.884	145.048.935.581	87,17		96,93
I	DAK NON FISIK		52.261.481.000	38.216.384.544	73,13		103,07
	A. BIDANG PENDIDIKAN		36.938.943.000	35.914.854.600	97,23		100
	1	Sub Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	103.200.000	103.200.000	100		100
	a	Bantuan Operasional Sekolah PAUD	103.200.000	103.200.000	100	-	100
	2	Sub Bidang Tunjangan Profesi Guru	34.847.265.000	34.489.186.600	98,97		100
	a	Tunjangan Profesi Guru PNSD	34.847.265.000	34.489.186.600	98,97		100
	3	Sub Bidang Tambahan Penghasilan Guru	882.000.000	435.500.000	49,38		100
	a	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	882.000.000	435.500.000	49,38		100
	4	Sub Bidang Tunjangan Khusus Guru	1.106.478.000	886.968.000	80,16		100
	a	Tunjangan Khusus Guru	1.106.478.000	886.968.000	80,16		100
	B. BIDANG KESEHATAN		14.340.200.000	1.417.082.826	9,88		32,69
	1	Sub Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.711.000.000	857.720.099	50,13		49,89
	a	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Lansia, Remaja dan UKS (BOK DAK Non Fisik)	118.510.000	23.757.250	20,05		47,22
	b	Monitoring, dan Evaluasi Penyehatan Lingkungan (BOK DAK Non Fisik)	158.428.000	61.190.000	38,62		69,99
	c	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Kesehatan Tradisional/Komplementer Alternatif (BOK DAK Non Fisik)	118.510.000	53.829.000	45,42		59,56
	d	Dukungan Manajemen BOK	723.000.000	271.068.167	37,49		52,62
	e	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Desa Siaga dan Promosi Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)	118.510.000	23.883.250	20,15		-
	f	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu (BOK DAK Non Fisik)	118.512.000	283.143.877	238,92		59,07
	g	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Imunisasi (BOK DAK Non Fisik)	118.510.000	53.216.150	44,9		56,1
	h	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyakit Menular (BOK DAK Non Fisik)	118.510.000	40.028.225	33,78		35,02
	j	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (BOK DAK Non Fisik)	118.510.000	47.604.180	40,17		69,44
	2	Sub Bidang Akreditasi Puskesmas	1.123.750.000	276.218.850	24,58		43,33

NO	DAK/BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN		PAGU DAK (Rp.)	REALISASI			
				KEUANGAN		FISIK	
				Jumlah (Rp.)	(%)	Vol	(%)
1	2		6	12	13	14	15
	a	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1.123.750.000	276.218.850	24,58		43,33
	3	Sub Bidang Jaminan Persalinan	821.000.000	283.143.877	34,49		23,06
	a	Jaminan Persalinan Normal (DAK Non Fisik)	821.000.000	283.143.877	34,49		23,06
	4	BOK untuk distribusi obat, vaksin, dan BMHP serta pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	146.450.000	42.459.000	28,99		14,45
	a	Distribusi Obat dan e-Logistik (DAK Non Fisik)	146.450.000	42.459.000	28,99		14,45
	5	BOK untuk Puskesmas	10.538.000.000	3.738.330.501	35,47		25
	a	Bantuan Operasional Puskesmas	10.538.000.000	3.738.330.501	35,47		25
	C.	BIDANG KEPENDUDUKAN	982.338.000	884.447.118	90,03		73,46
	1	Sub Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	982.338.000	884.447.118	90,03		73,46
	a	Pelayanan Dokumen Kependuduk, Penerbitan Dokumen Kependudukan, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) serta Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan.	982.338.000	884.447.118	90,03		73,46
II	DAK FISIK		114.129.692.884	106.832.551.037	93,61		92,98
	A	DAK REGULER	70.740.816.884	66.738.156.937	94,34		87,26
	1	BIDANG PENDIDIKAN	12.214.338.000	12.211.854.052	99,98		63,63
	a	Sub Bidang SD	6.203.707.000	6.201.534.552	99,96		85,9
	-	Penunjang DAK	310.185.348	308.012.900	99,3		100
	-	Peningkatan Prasarana Pendidikan	5.893.521.652	5.893.521.652	100		85,15
	b	Sub Bidang SMP	5.810.631.000	5.810.631.000	100		4,99
	-	Penunjang DAK	290.000.000	290.000.000	100		100
	-	Peningkatan Prasarana Pendidikan	5.520.631.000	5.520.631.000	100		
	c	Sub Bidang SKB	200.000.000	199.688.500	99,84		100
	-	SUB BIDANG PENDIDIKAN SKB	200.000.000	199.688.500	99,84		100
	2	BIDANG KESEHATAN DAN KB	29.384.317.884	28.477.050.837	96,91		96,56
	a	Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	6.749.999.000	6.566.209.328	97,28		91,25
	-	Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas dan Penyediaan Perangkat Sistem Informasi Kesehatan	3.762.000.000	3.591.811.980	95,48		82,5
	-	Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas	2.987.999.000	2.974.397.348	99,54		100
	b	SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	4.195.165.884	3.951.703.563	94,2		96,73
	-	Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Tingkat Kabupaten/Kota	4.195.165.884	3.951.703.563	94,2		96,73

NO	DAK/BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN		PAGU DAK (Rp.)	REALISASI			
				KEUANGAN		FISIK	
				Jumlah (Rp.)	(%)	Vol	(%)
1	2		6	12	13	14	15
	c	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	17.129.153.000	16.721.614.427	97,62		100
	-	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	3.203.769.178	3.168.439.572	98,9		100
	-	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	13.925.383.822	13.553.174.855	97,33		100
	c	Sub Bidang Keluarga Berencana	1.310.000.000	1.237.523.519	94,47		98,25
	-	Pembangunan/Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluhan KB	1.200.000.000	1.127.798.519	93,98		94,74
	-	Pengadaan Alat Peraga Program KBPK bagi PPKBD dan Sub PPKBD	37.676.470	37.565.000	99,7		100
	-	Pengadaan Sarana Pendataan	72.323.530	72.160.000	99,77		100
	3	BIDANG AIR MINUM	1.967.369.000	1.829.319.807	92,98		100
	a	Sub Bidang Air Minum	1.967.369.000	1.829.319.807	92,98		100
	-	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah-SR dan jiwa terlayani)	1.967.369.000	1.829.319.807	92,98		100
	4	BIDANG JALAN	20.932.483.000	20.125.206.602	96,14		100
	a	Sub Bidang Infrastruktur Jalan	20.932.483.000	20.125.206.602	96,14		100
	-	Pembangunan Infrastruktur Jalan	20.932.483.000	20.125.206.602	96,14		100
	5	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.390.642.000	583.237.849	24,4		50,62
	a	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	2.390.642.000	583.237.849	24,4		50,62
	-	Program sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya ikan air tawar	577.500.000	575.437.849	99,64		100
	-	Program pengembangan perikanan tangkap	1.813.142.000	7.800.000	0,43		1,24
	6	BIDANG PARIWISATA	2.827.950.000	2.640.390.916	93,37		100
	a	Sub Bidang Penataan Kawasan Pariwisata	2.827.950.000	2.640.390.916	93,37		100
	-	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	2.227.950.000	2.047.715.316	91,91		100
	-	Amenitas Pariwisata (DAK)	600.000.000	592.675.600	98,78		100
	7	BIDANG PERTANIAN	1.023.717.000	871.096.874	85,09		100
	a	Sub Bidang Pertanian	1.023.717.000	871.096.874	85,09		100
	-	Pembangunan/perbaikan irigasi air tanah (dangkal/dalam) dan embung	1.023.717.000	871.096.874	85,09		100
	B	DAK PENUGASAN	22.600.939.000	20.898.826.670	92,47		95,8
1		BIDANG Kesehatan	372.555.000	222.597.960	59,75		100

NO	DAK/BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN		PAGU DAK (Rp.)	REALISASI			
				KEUANGAN		FISIK	
				Jumlah (Rp.)	(%)	Vol	(%)
1	2		6	12	13	14	15
	a	Sub Bidang Penurunan Stunting	372.555.000	222.597.960	59,75		100
	-	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	372.555.000	222.597.960	59,75		100
	-	Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemeriksaan HIV (DAK Penugasan)	149.952.000	100.804.480			100
	2	BIDANG AIR MINUM	1.875.000.000	1.830.308.410	97,62		100
	a	Sub Bidang Air Minum	1.875.000.000	1.830.308.410	97,62		100
	-	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah-SR dan jiwa terlayani)	1.875.000.000	1.830.308.410	97,62		100
	3	BIDANG JALAN	18.767.349.000	17.942.127.820	95,6		100
	a	Sub Bidang Infrastruktur Jalan	18.767.349.000	17.942.127.820	95,6		100
	-	Kegiatan pemeliharaan berkala/ rehabilitasi, dan peningkatan jalan	18.767.349.000	17.942.127.820	95,6		100
	4	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	636.035.000	623.292.480	98		99
	a	Sub Bidang Lingkungan Hidup	636.035.000	623.292.480	98		99
	-	Pengolahan sampah, bank sampah dan sarana pendukungnya, serta Pusat Daur Ulang Sampah dan rumah pengkomposan.	636.035.000	623.292.480	98		99
	5	BIDANG PASAR	950.000.000	280.500.000	29,53		80
	a	Sub Bidang Pasar	950.000.000	280.500.000	29,53		80
	-	Belanja Modal Pengadaan Operasional Kemetrologian Roda 2 (2 Matic & 2 Manual) dan Karoseri	200.000.000	198.000.000	99		80
	-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-PengadaanAlat Laboratorium Lainnya	750.000.000	82.500.000	11		80
	C	DAK AFFIRMASI	20.787.937.000	19.195.567.430	92,34		95,87
	1	BIDANG KESEHATAN	5.170.058.000	4.861.132.359	94,02		96
	a	SUB BIDANG PENGUATAN PUSKESMAS DTPK	5.170.058.000	4.861.132.359	94,02		96
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas DTPK (DAK Afirmasi)	5.170.058.000	4.861.132.359	94,02		96
	2	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4.274.393.000	3.500.000.000	81,88		82,69
	a	Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.274.393.000	3.500.000.000	81,88		82,69
	-	Penunjang DAK	21.893.000	21.000.000	95,92		95,52

NO	DAK/BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN		PAGU DAK (Rp.)	REALISASI			
				KEUANGAN		FISIK	
				Jumlah (Rp.)	(%)	Vol	(%)
1	2		6	12	13	14	15
	-	Pembangunan Rumah Swadaya	4.252.500.000	3.500.000.000	82,3		69,86
	3	BIDANG TRANSPORTASI	5.500.000.000	5.183.308.596	94,24		100
	a	Sub Bidang Transportasi	5.500.000.000	5.183.308.596	94,24		100
	-	Kegiatan fisik berupa pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan non status	5.500.000.000	5.183.308.596	94,24		100
	4	BIDANG PENDIDIKAN	995.486.000	995.483.700	100		97,64
	a	Sub Bidang SD	520.704.000	520.701.700	100		100
	-	Penunjang DAK	26.035.200	26.032.900			100
	-	Pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot.	494.668.800	494.668.800	100		100
	b	Sub Bidang SMP	474.782.000	474.782.000	100		100
	-	Penunjang DAK	23.500.000	23.500.000			100
	-	Pembangunan rumah dinas guru baik beserta perabot dan/atau tanpa perabot.	451.282.000	451.282.000	100		100
	5	BIDANG AIR MINUM	2.358.000.000	2.277.940.603	96,6		100
	a	Sub Bidang Air Minum	2.358.000.000	2.277.940.603	96,6		100
	-	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal (satuan sambungan rumah-SR dan jiwa terlayani)	2.358.000.000	2.277.940.603	96,6		100
	6	BIDANG SANITASI	2.490.000.000	2.377.702.172	95,49		98,9
	a	Sub Bidang Sanitasi	2.490.000.000	2.377.702.172	95,49		98,9
	-	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Daerah Perdesaan	2.490.000.000	2.377.702.172	95,49		98,9
TOTAL			166.391.173.884	145.048.935.581	87,17		96,93

4.3. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pada tahun 2019 Kabupaten Bintan meraih penghargaan untuk Kabupaten terbaik dalam **Kinerja pencairan Dana Desa**. Pada Rakor Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 dan Persiapan Penyaluran DAK dan Dana Desa Tahun 2019 penghargaan tersebut diraih **Kabupaten Bintan sebagai terbaik ke-III (Tiga)** yang diberikan oleh Kanwil Dirjen Pembendaharaan Provinsi Kepri sebagai apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kepri yang terbaik dalam penyerapan dan perealisasiannya.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menyalurkan Dana Desa (DD) dan pemerintan daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar untuk disalurkan kepada Desa.

Pada tahun 2019, total (DD dan ADD) disalurkan sebesar Rp128,04 milyar yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen APBDDesa Tahun 2019. Dari implementasi APBDDesa dan APBD Kabupaten Bintan dapat dipaparkan beberapa pencapaian. Pada tahun 2019 besaran Dana Desa meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 36,845,062,000.00 dengan persentase 28.78 Persen dari total keseluruhan APBDes di Kabupaten Bintan Rp 128,043,702,047.00. Peningkatan ini diikuti juga dengan jumlah Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 sebesar Rp 64,238,788,000.00 lebih besar daripada tahun 2018 yang hanya berjumlah Rp 53,075,293,800.00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2019

No	Uraian	2018	%	2019	%
1	Jumlah Dana Desa (Rp)	Rp 30,903,914,000.00	33.13	Rp 36,845,062,000.00	29.37
2	Pajak Bagi Hasil (PBH)	-	0.00	Rp 19,759,852,047.00	15.75
3	Jumlah ADD (Rp)	Rp 53,075,293,800.00	56.91	Rp 64,238,788,000.00	51.21
4	SILPA (Tahun Sebelumnya)	Rp 9,289,840,380.00	9.96	Rp 4,597,115,587.00	3.66
Total APBDes		Rp 93,269,048,180.00	100.00	Rp 125,440,817,634.41	100.00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa pemanfaatan daripada Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Ada 4 hal dasar yang menjadi arahan pemerintah pusat kepada daerah terkait dengan *outcome* pemanfaatan dana desa. Pertama berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pada menurunnya ketimpangan pendapatan antara wilayah desa dan kota yang juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dampak terhadap pendapatan asli masyarakat dengan adanya dukungan aksesibilitas secara memadai. Kedua ditinjau dari penciptaan lapangan kerja, dengan adanya program-program yang menyasar kepada pemberdayaan masyarakat terutamanya kepada masyarakat yang memiliki pekerjaan musiman, dengan adanya dana desa bisa menurunkan angka pengangguran yang ada didesa dengan penggelontoran paket-paket kegiatan dengan pendekatan padat

karya. Selanjutnya yang ketiga dampak signifikan yang diharapkan adalah dengan menurunnya garis kemiskinan disuatu wilayah terutama dengan pemanfaatan anggaran pemerintah pusat dan daerah melalui danan desa maupun juga alokasi dana desa. Sehingga pada area yang keempat pemerintah dapat menjaga keseimbangan kondisi *inequality* ditengah-tengah masyarakat sehingga ketimpangan sosial, ekonomi diikuti dengan stigma tentang kehidupan masyarakat desa dengan adanya dana desa ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai tujuan inti.

Grafik 4.2
Penerimaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Bintan Tahun 2018-2019



Sumber: Diolah dari Data DPMD Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2019

Pertambahan pada alokasi dana desa di Kabupaten Bintan ini diharapkan bukan hanya dimanfaatkan menyasar aspek pembangunan infrastruktur melainkan urgensi didalam usaha pembangunan manusia khususnya aspek pemberdayaan masyarakat desa yang unggul. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bintan terutamanya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

secara terus menerus melakukan serangkaian inovasi bagi seluruh desa di Kabupaten Bintan, perkembangan ini dapat dilihat daripada varietas desa dengan potensi serta keunggulannya masing-masing yang pada arah kedepannya dapat menjadi klaster desa berdasarkan potensinya.

Tentu saja ini memerlukan sinergitas lintas sektoral didalam penyelenggara urusan pemerintahan untuk selalu memastikan pemerataan pembangunan bagi masyarakat. Dengan memastikan bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Bintan terjamin kesejahteraannya bukan saja berbicara pada ranah ekonomi masyarakat namun juga memastikan akar budaya nilai-nilai sosial budaya masyarakat dengan segala kearifan lokalnya terjaga sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Kabupaten Bintan terutama berkenaan dengan nilai budaya ditengah-tengah kehidupan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bintan tahun 2019 ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspek urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara komprehensif, terintegrasi dan informatif. Selain daripada itu LKPJ juga disampaikan berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas hasil-hasil kinerja/capaian indikator makro pembangunan daerah serta capaian pelaksanaan program dan agenda strategis proses kegiatan pembangunan. Didalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun 2019 pada dasarnya memiliki urgensi dan kepentingan strategis seluruh komponen daerah terutamanya kepada masyarakat. Upaya-upaya pimpinan daerah baik dilevel eksekutif maupun juga legislatif pada tataran pelaksanaan peran strategis institusionalnya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan yang berkelanjutan, serta menjadi media komunikasi pertanggungjawaban kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada masyarakat.

Dinamika proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan implementasi kinerja pemerintah daerah didalam pembangunan Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 telah mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, peran dan partisipasi komunitas masyarakat dan pelaku usaha serta para akademisi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Berbagai capaian kinerja telah diraih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan berdasarkan beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, sebagai berikut : **(1) Indikator Kesejahteraan Masyarakat, (2) Indikator Pelayanan Umum, dan (3) Indikator Daya Saing Daerah, serta (4) Posisi Kinerja Kabupaten Bintan dalam Konstelasi Nasional.**

(1) Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2019 **LPP Kabupaten Bintan** diestimasi **1%**. Angka ini menunjukkan keberhasilan program pengendalian pertumbuhan penduduk masih berjalan cukup efektif. Dilain pihak dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan, kondisi penduduk Kabupaten Bintan menjadi potensi dan tantangan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah mencapai keberhasilan dalam pembangunan.

Disamping itu juga capaian keberhasilan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan diwujudkan melalui upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan

indeks ekonomi. Tren positif dari IPM terus dijaga oleh pemerintah Kabupaten Bintan, berdasarkan rilis data dari BPS Kabupaten Bintan bahwa **pencapaian IPM di Kabupaten Bintan pada tahun 2019 tergolong kategori tinggi yaitu 73,98** ini meningkat dari tahun 2018 IPM Kabupaten Bintan **73,41 poin** serta dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 72,91 poin.

Keberhasilan dalam peningkatan IPM Kabupaten Bintan ditopang oleh keberhasilan dalam pencapaian dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada tahun 2019 yang mencapai **8,36 tahun**. Hal ini menunjukkan tren penurunan angka *drop out* dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan.

Selanjutnya berdasarkan dari Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun diketahui bahwa pada tahun 2019 **Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD 99,69%**. Data tersebut menunjukkan angka pencapaian yang sama dengan tahun 2018 yang juga senilai 99,69%, jika dari total jumlah penduduk 7-12 tahun sebanyak 17.990 orang di Kabupaten Bintan, yang bersekolah di jenjang SD adalah sebanyak 17.953 orang anak. Sedangkan **Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD** pada tahun 2019 mencapai **105.90%**. Angka capaian ini naik 1.28% dibanding dengan capaian 2018 sebesar 104.6%, dan ini menunjukkan bahwa banyak anak usia dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun sudah atau masih bersekolah di jenjang Sekolah Dasar.

Untuk **APM Jenjang SMP/MTs** pada tahun 2019 berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada indikator ini mencapai **88.35%**. Ini berarti, dari total jumlah penduduk 13-

15 tahun sebanyak 8.036 orang di Kabupaten Bintan, yang bersekolah di jenjang SMP/MTs/Paket B adalah sebanyak 7.100 orang anak usia 13-15. Dibanding angka capaian 2018 sebesar 86.73%, capaian pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 1.62%. Untuk **APK jenjang SMP/MTs** tahun 2019 adalah mencapai **95.66%**, ini menunjukkan bahwa masih ada anak di bawah usia 13 tahun dan atau di atas 15 tahun yang masih atau bersekolah di jenjang SMP/MTs/Paket B. Angka capaian ini turun 1.69% dibanding capaian tahun 2018 sebesar 97,35%.

Beberapa indikator pembangunan pembangunan yang menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan pada Tahun 2019, antara lain: pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) **4.71%**; pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp.14,54 triliun; Pengendalian jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 angka kemiskinan mengalami **penurunan sebesar 0.24 persen** menjadi **6.37 persen (%)** yang sebelumnya pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Bintan adalah 6,61 persen (%). Disamping itu juga pengendalian **Tingkat Pengangguran Terbuka** mencapai **8.01%**. Sementara itu **Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Bintan** yang mengacu pada **IHK Kota Tanjungpinang** dimana secara umum pada tahun 2019 IHK Kota Tanjungpinang masih terkendali pada posisi **2.40 %**. Secara nasional untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) 2019 tetap rendah terkendali pada level 2,72% (yoy) dan berada dalam kisaran sasaran 3,5±1%., sedangkan secara tahunan IHK dikepri mengalami infasi sebesar 2,03 persen (yoy), inflasi Bintan yang mengikuti dari perkembangan Tanjungpinang 2019 terkendali capaian Inflasi sebesar 2,40 persen (Year on year)

dipicu oleh kelompok bahan makanan sebesar 4,01 % (Year on year)) dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,81 persen (month to month) terutama tarif angkutan udara. Keberhasilan pemerintah didalam pengendalian angka inflasi ini merupakan salah satu bukti nyata Pengendalian dari angka inflasi ini merupakan salah satu bukti nyata kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha pengendalian harga pasar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dengan mekanisme penguatan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan yang akan terus dilanjutkan dengan menerapkan strategi 4K dalam menekan inflasi yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif untuk dapat menjaga dan mendukung capaian sasaran inflasi nasional sebesar $3 \pm 1\%$ ditahun ini.

(2) Indikator Pelayanan Umum

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah melalui pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang peduli terhadap kualitas pelayanan masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip penatausahaan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (**good governance**).

Wujud nyata kinerja dari Pemerintah Kabupaten Bintan ini kemudia diganjar apresiasi dengan 2) Bintan mendapatkan penghargaan Standar Pelayanan Publik tahun 2019, dari Ombudsman RI. Pemerintah Kabupaten Bintan meraih predikat kepatuhan tinggi (zona hijau). Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang komitmen, untuk memenuhi

standar pelayanan publik sesuai UU nomor 25/2009 tentang pelayanan publik

Didalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan pembangunan tata pemerintahan daerah pada Tahun 2019, berdasarkan spirit di atas ditunjukkan dalam pencapaian Indikator Pelayanan Umum yang dibangun oleh 3 (tiga) komponen dasar, yaitu: **Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas** dan **Transparansi**.

Pertama, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya untuk melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan Kabupaten Bintan yang ditandai dengan adanya dukungan dan keterlibatan yang nyata dari unsur-unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha dan komunitas masyarakat di Kabupaten Bintan. Dukungan dan keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan dari ruang lingkup pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan Kabupaten Bintan. Dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan Kabupaten Bintan partisipasi masyarakat telah diwadahi melalui penyelenggaran **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)** secara berjenjang dalam wujud musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Kegiatan tersebut telah memberikan tempat bagi komunitas atau kelompok masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan kebutuhan dalam rencana pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

Gambaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bintan melalui perwujudan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan

Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 tercermin melalui tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bintan dalam penyelenggaraan **Musrenbang** di Kabupaten Bintan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dinilai cukup berhasil dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 100%. Demikian pula dengan jumlah kehadiran masyarakat desa dalam setiap musyawarah desa dari undangan yang disebar. Jumlah inisiatif penyampaian usulan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat cukup banyak dan variatif (tidak terfokus pada pembangunan fisik saja) serta keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan.

Kedua, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya untuk menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan yang taat dan patuh terhadap semua ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Selanjutnya, dengan didukung oleh sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi komputer dan SDM pengelola keuangan daerah yang profesional, maka semakin mewujudkan akuntabilitas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terutama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi yang tersebut, maka pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan kembali mendapatkan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** dari BPK RI. **Keberhasilan Opini WTP untuk ke Delapan kalinya** bagi Kabupaten Bintan Opini WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Keberhasilan meraih dan mempertahankan Opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2018 ini, merupakan cerminan atas komitmen dan kerja keras dari aparatur pemerintah Kabupaten Bintan

dalam rangka perbaikan dan penataan pengelolaan keuangan yang lebih baik, demi mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aspek penilaian tersebut meliputi Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan, Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dinyatakan sebagai daerah dengan Kinerja Pelaksanaan DAK Fisik Terbaik 2 dan Kinerja Pelaksanaan Dana Desa Terbaik 3 TA 2018 Tingkat Provinsi Kepri oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri pada saat Rakor Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 dan Persiapan Penyaluran DAK dan Dana Desa Tahun 2018.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bintan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan serta pengembangan mekanisme *e-government* dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam bentuk **Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA), E-Planning dan E-Budgeting, SIMONEV, serta Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD)** pada Pemerintah Kabupaten Bintan berbasis komputerisasi dengan melibatkan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Implementasi SIPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan tersebut juga dalam rangka memenuhi ketentuan tentang Penyelenggaraan Informasi Pembangunan Daerah kepada masyarakat dan stakeholders pembangunan di Kabupaten Bintan, berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bintan dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan transparansi di era revolusi industri 4.0 terutamanya didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah mendapatkan respon positif dari *stakeholders* pembangunan Kabupaten Bintan yang terkait.

(3) Aspek Pelayanan Dasar

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada Tahun 2019, ditunjukkan dalam pencapaian beberapa keberhasilan, sebagai berikut.

Pertama, melalui bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Kabupaten Bintan melalui pemenuhan alokasi pendanaan pendidikan lebih dari 20% dari total APBD Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang digunakan berbagai peruntukan penting dan mendasar, yaitu : (1) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, (2) Program bagi Pendidikan Non Formal, (3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (4) Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam Bidang

Pendidikan dicerminkan dari upaya pencapaian kinerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

Kedua, melalui bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintan melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Kabupaten Bintan yaitu melalui Peningkatan kualitas kesehatan. Komitmen pemerintah ini ditunjukkan pada tahun 2019 sudah disahkan Perda ASI Eksklusif Kabupaten Bintan dan untuk Tahun 2020 akan dilakukan Sosialisasi Perda Asi Eksklusif di Tingkat Kecamatan. Sedangkan Untuk intervensi pada Balita dengan Gizi Buruk di tahun 2019 terjadi penurunan prevalensi balita kurang gizi secara bermakna dengan upaya melaksanakan pencegahan dan penanggulangan balita gizi buruk melalui pembinaan gizi secara terus menerus, pemberian PMT pemulihan dan perawatan kasus gizi buruk. Secara khusus juga pemerintah Kabupaten berupaya keras untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah dilakukan melalui serangkaian usaha yang meliputi:

- (1) Revitalisasi operasional Posyandu dan Pengembangan TOGA/UPGK,
- (2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu,
- (3) Peningkatan pelayanan kesehatan anak (bayi),
- (4) Peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi (Pelayanan Medik KB),
- (5) Jaminan persalinan normal,
- (6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Ibu.

Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan ibu dan bayi secara bertahap terus menjadi prioritas. Begitu pula dengan penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu terus dilaksanakan dengan tidak mengabaikan program-program lain

yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan.

Untuk tahun 2019 jumlah penduduk miskin yang menjadi peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Bintan dengan nilai capaian 17.937 jiwa (99.65%) dibanding tahun 2018 untuk kepesertaan JKN yang dibiayai oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan. Sebelumnya pada tahun 2018 peserta penerima bantuan (PBI) melalui JKN yaitu sebesar 15.500 jiwa. Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN pada tahun 2019 sebesar 78,03% (120.104 jiwa) hal ini disebabkan oleh belum seluruh masyarakat Kabupaten Bintan terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik itu PBI APBN maupun PBI APBD. Peningkatan ini bukan berarti masyarakat miskin meningkat tetapi verifikasi dan validasi data kemiskinan sudah lebih baik.

Disamping itu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mensukseskan Program Keluarga Berencana ditunjukkan dengan cakupan peserta KB aktif. Angka ini terus meningkat dan menunjukkan tren yang cukup baik sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang berkeluarga.

Selanjutnya berkenaan dengan capaian Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan juga dicerminkan dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). peningkatan umur UHH ini ditahun 2019 menjadi 70.30 tahun dapat merepresentasikan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bintan yang semakin baik yang terlihat dari panjang umur dan hidup yang sehat dari sebelumnya sebesar 70,18 tahun pada tahun 2018. Meskipun terjadi peningkatan indeks kesehatan, namun tampaknya masih diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral agar perbaikan derajat

kesehatan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya angka harapan hidup dan terus menurunnya angka kematian ibu dan bayi secara baik dapat terwujud dimasa mendatang.

Ketiga, melalui pembangunan infrastruktur yang merupakan kegiatan Bidang Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Bintan terus melakukan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. Upaya tersebut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan di bidang infrastruktur jalan, pada tahun 2019 telah dilaksanakan peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi jalan, pembangunan dan rehabilitasi jembatan serta pemeliharaan jalan. Melalui kegiatan tersebut telah terealisasi jalan sepanjang 8,547 Km. Sehingga total panjang jalan Kabupaten Bintan sampai dengan tahun 2019 adalah 656,239 Km.

Melalui anggaran DAK, DAK-Reguler, DAK-Penugasan dan DAK-Afirmasi di tahun 2019 untuk pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan prasarana jalan, menambah kapasitas jalan serta memperlancar arus transportasi darat, kapasitas pembangunan jalan dan jembatan, operasional penunjang pengelolaan kegiatan pembangunan jalan sebagai konektivitas seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan

Infrastruktur air bersih juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu (1) Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Perdesaan, adapun output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Program penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat dan rumah panel dengan hasil keluaran Tersedianya Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Perdesaan dan sanitasi, (2) Pembangunan Infrastruktur Air Minum, adapun *Output* dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengembangan, Optimalisasi dan pembangunan SPAM, dengan hasil tersedianya bangunan dan infrastruktur SPAM serta

Terlaksananya pengembangan SPAM IKK dengan hasil tersedianya bangunan dan infrastruktur SPAM IKK. Sedangkan untuk jumlah saluran rumah (SR) di perkotaan, kondisi existing sampai tahun 2019 sesuai RPJMD 2016 – 2021 sebesar 37%. Target penanganan di tahun 2019 39.69 % dengan realisasi pelaksanaan sebesar 43.993% kawasan perkotaan realisasi pelaksanaan telah memenuhi target dari rencana penanganan yaitu sebesar 100 % dari yang direncanakan pada tahun 2019.

Kebijakan pembangunan dalam **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** ditujukan untuk mengurangi kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, penyediaan tempat pembuangan sampah, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemakaman umum dan lampu jalan. Upaya yang telah dilakukan antara lain Pembebasan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Bintan Utara, Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dan Sosial, Pembangunan Jalan Semenisasi/Paving Block dan Buras, Pembangunan Talud/Dinding Penahan Tanah, Pembangunan Pelantar/Tambatan Perahu, Penataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan, Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum melalui pengadaan serta pemeliharaan lampu-lampu jalan yang tersebar di tempat yang strategis serta Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di seluruh kecamatan.

Sementara itu untuk **Urusan Penataan Ruang** diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas industri, pariwisata, kelautan dan perikanan melalui optimasi pemanfaatan ruang yang terintegrasi serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Urusan Penataan

Ruang diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas industri, pariwisata, kelautan dan perikanan melalui optimasi pemanfaatan ruang yang terintegrasi serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Maka diperlukan upaya penyelarasan kebijakan Penataan Ruang baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan penataan ruang kepala daerah dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Sebagai tindak lanjut pada tahun 2016 Pemerintah Daerah telah melakukan Peninjauan Kembali Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan, hal ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa pada pasal 16 ayat satu bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang melalui koordinasi penataan ruang wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 78 rekomendasi dengan jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dapat diberikan sejumlah 27 rekomendasi. Di tahun 2019 rekomendasi yang masuk sebanyak 239 dan yang dapat diberikan dari jumlah tersebut sebanyak 194 rekomendasi, dengan **Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bintan mencapai 78%.**

(4) Aspek Daya Saing Daerah

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keunggulan Kabupaten Bintan, melalui berbagai langkah antara lain: (1) Meningkatkan infrastruktur jalan (2) Meningkatkan Jaringan Transportasi antar Pulau (3) Optimalisasi Pemanfaatan Ruang (4) Memangkas birokrasi perizinan (5) Menarik investor serta melakukan

promosi di tingkat nasional maupun internasional (2) Menyelenggarakan even-even olahraga bertaraf internasional (3) mendorong penciptaan tenaga kerja terampil, menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyediakan pasar kerja bekerjasama dengan PMDN maupun PMA (4) menarik aktivitas inovasi dan ilmu pengetahuan melalui kompetisi dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam peningkatan daya saing daerah ditunjukkan dengan meningkatnya Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (Mantap Sempurna) mencapai 47,936%; Jumlah pulau yang tercakupi jaringan transportasi sebanyak 11 Pulau berpenghuni; Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mencapai 78,43%; Sedangkan realisasi investasi di Kabupaten Bintan pada Tahun 2019 yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$ 4,454 Milyar; nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 1,240 Triliun. Capaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam peningkatan daya saing daerah ditopang oleh kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi guna tersampainya informasi potensi investasi Kabupaten Bintan calon investor di dalam maupun luar negeri, opinion makers dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan minat investasi di Kabupaten Bintan.

Di samping itu, dalam rangka peningkatan daya saing daerah telah pula diwujudkan berbagai Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dibidang pelayanan, di antaranya:

Inovasi di bidang Pelayanan Publik meliputi :

- a. Pengembangan aplikasi sistem *e-Planning* dan *e-Budgeting* Kabupaten Bintan dan pengembangan lanjutan SIMONEV

dalam rangka mendukung pelaporan monitoring evaluasi hasil pembangunan, dan perencanaan tahunan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;

Penerapan *e-Procurement* atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional. Pada Tahun 2019 LPSE Kabupaten Bintan telah melaksanakan 163 paket pengadaan dengan rincian Pengadaan Barang sebanyak 31 paket, Jasa Konsultansi sebanyak 26 paket, Pekerjaan Konstruksi sebanyak 100 paket dan Jasa Lainnya sebanyak 6 paket dengan total pagu sebesar Rp 214.395.251.514,- dan realisasi sebesar Rp 201.689.467.548,- dengan total penghematan mencapai Rp 12.705.783.966,- atau sebesar 5,93%.

(5) Posisi Kabupaten Bintan Dalam Konstelasi Nasional

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menempatkan posisi Kabupaten Bintan dalam konstelasi nasional secara signifikan, strategis dan penting untuk mencerminkan tentang kemajuan dan keunggulan Kabupaten Bintan terhadap Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Penempatan posisi Kabupaten Bintan dalam konstelasi nasional secara signifikan, strategis dan penting dipetakan berdasarkan capaian kinerja pembangunan dan raihan berbagai prestasi atau penghargaan pada tingkatan nasional.

1) Kinerja Pembangunan

Kinerja pembangunan Kabupaten Bintan dapat digambarkan pula dalam konstelasi Nasional adalah sebagai berikut: sebagai sektor unggulan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Bintan di tahun 2019

merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar, pada tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019 telah menyumbang sebesar Rp 235,78 millar lebih atau 63,35% dari PAD Kabupaten Bintan yang sebesar Rp 372,15 miliar, adapun jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bintan sebesar 1.338.066 kunjungan, angka tersebut mengalami kenaikan jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya 2018 sebesar 25,23%, sedangkan pada tahun 2018 total kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 420.749 kunjungan, wisatawan mancanegara sebesar 642.709 kunjungan, dengan total kunjungan wisatawan sebesar 1.063.458 kunjungan, angka di atas telah melebihi target yang ditetapkan tahun 2019.

2) Penghargaan Tingkat Nasional

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Bintan selama Tahun 2018 ditunjukkan dengan diperolehnya prestasi dan penghargaan Tingkat Nasional yaitu terhitung sejak 17 Februari 2016 atau lebih kurang 3 Tahun lebih sejak **Bupati Bintan H. Apri Sujadi, S.Sos** dan **Wakil Bupati Bintan Drs. H. Dalmasri Syam, MM** dilantik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan berhasil mengukir Anugerah Prestisius Tingkat Nasional maupun di Tingkat Propinsi. Untuk Tahun 2019 Penghargaan lain yang diterima antara lain :

1. Bupati Bintan, Apri Sujadi didampingi Sekda Kabupaten Bintan Adi Prihantara menerima **Penghargaan Kabupaten Sehat Kategori Tertinggi, Swasti Saba Wistara** di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri RI, Selasa, (19/11). Penganugerahan penghargaan itu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/664/ 2019. Penghargaan juga diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian disaksikan Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto. **Predikat Swasti Saba Wistara** itu merupakan untuk pertama kalinya diraih Kabupaten Bintan. Selama kurun waktu, 2016 hingga 2019, Bupati Bintan Apri Sujadi selalu berhasil mendapatkan Penghargaan Kabupaten Sehat dengan peningkatan kategori setiap periodenya.

2. Bintan mendapatkan penghargaan **Standar Pelayanan Publik tahun 2019**, dari **Ombudsman RI**, di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta, Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Rabu (27/11). Penghargaan ini diberikan kepada Bupati Bintan H Apri Sujadi melalui Assiten 1 Setdakab **Mohd. Setioso**. Penyerahan penghargaan itu dilaksanakan dalam seminar Ombudsman dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik. Kegiatan ini untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang progresif dan partisipatif (propartif). Bupati Bintan H Apri Sujadi menjelaskan bahwa pada penilaian tahun 2019, Pemkab Bintan meraih predikat kepatuhan tinggi (zona hijau). Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang komitmen, untuk memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU nomor 25/2009 tentang pelayanan publik.
3. **Bunda Paud Bintan**, Deby Maryanti menerima langsung PIN Penghargaan Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2019, dari Ibu Nadiem Makarim. Penyerahan penghargaan ini, disaksikan Wury Estu Ma'aruf Amin dan Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim di Balai Kartini, Kartika Expo Centre, Jakarta

Selatan, Senin (18/11) pagi. Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim dalam sambutannya menuturkan bahwa peran penting dari Bunda PAUD di daerah, adalah wujud dalam rangka peduli pendidikan anak usia dini. Khususnya dalam pembentukan karakter anak. Dikatakannya juga bahwa pembentukan karakter anak sangat penting dalam menjaga dan membentuk generasi bangsa Indonesia mulai dari 10 hingga 20 tahun ke depan.

4. Kabupaten Bintan menerima **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke Delapan kalinya**. Penyerahan tersebut dilakukan di Aula Kantor BPK RI perwakilan Prov Kepri, Jalan Raja Isa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Plt Kepala BPK RI perwakilan Prov Kepri Azhar mengutarakan, penyerahan LHP ini merupakan wujud komitmen bersama untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota Prov Kepri dapat terselenggara secara transparan dan akuntabel. Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini hasil pemeriksaan tentang kewajaran penyajian laporan keuangan daerah yang dilaporkan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang undangan. Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaannya dan memberikan hasil **Opini WTP** bagi LKPD Pemkab Bintan. Keberhasilan meraih dan mempertahankan Opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2018 ini, merupakan cerminan atas komitmen dan kerja keras dari aparatur pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka perbaikan dan penataan pengelolaan keuangan yang lebih baik,

demi mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati Bintan juga mengapresiasi jajaran Pemkab Bintan atas kinerjanya yang mampu mempertahankan WTP dengan melaporkan pengelolaan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Puskesmas Tanjunguban, di Kecamatan Bintan Utara meraih Penghargaan Tingkat Nasional **Pelayanan Ramah Anak Terbaik 2019**. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Dari seluruh Puskesmas yang ada di Indonesia, penghargaan Puskesmas Pelayanan Ramah Anak Terbaik 2019 Tingkat Nasional hanya diberikan kepada 21 Puskesmas. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise. Bupati Bintan H Apri Sujadi menerima langsung pada malam anugerah penghargaan **Kota Layak Anak (KLA)**.
6. Kepulauan Riau berhasil meraih dua penghargaan dari **Markplus Center for Tourism and Hospitality di Calender of Event Award 2019**, apresiasi tersebut diterima oleh Dinas pariwisata Kepri, Dinas Pariwisata Bintan dan Group PT. BRC, pada Kamis (25/04), di Now Stage-Atrium Mal Kota Kasablanka, Jakarta pusat (25/4). Untuk Pemerintah Provinsi Kepri sendiri, diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepulauan Riau Boeralimar, **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Wan Rudi Iskandar** dan Group General Manager (GGM) PT. BRC, Abdul Wahab. **Markplus Center for Tourism and Hospitality**

merupakan salah satu pusat pengembangan pariwisata Indonesia yang didukung oleh Kementerian Pariwisata. Penghargaan tersebut diberikan bagi pihak penyelenggara yang telah memberikan dampak sosial kepada daerah lewat event-event pariwisata yang masuk dalam **Calender Of Event (COE)** selama tahun 2018. Kepri sendiri dianggap telah menjadi pihak penyelenggara yang berkualitas, sehingga berhasil mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Adapun iven yang mengantarkan Kepri pada penghargaan bergengsi tersebut dibidang pariwisata adalah iven Festival Bahari Kepri (FBK) dan **Iron Man 70.3 Bintan** yang berhasil mendongkrak kunjungan wisata di level nasional dan internasional. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Boeralimar menuturkan penghargaan yang diberikan **MarkPlus Center for Tourism and Hospitality** ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi, menjaga dan meningkatkan semangat penyelenggara sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi yang telah diberikan kepada pariwisata Indonesia. “Penghargaan ini, diberikan sebagai apresiasi kepada pihak penyelenggara, atas kualitas penyelenggaraan secara keseluruhan, (baik *pre-event, on-event, dan post event*), berdasarkan perspektif langsung dari wisatawan yang hadir di masing-masing event tersebut. Penghargaan FBK masuk dalam kategori wisata alam, sedangkan **Iron Man 70.3 Bintan** untuk kategori iven nasional.

7. Bupati Bintan, Apri Sujadi yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Aprizal Bahar menerima **Penghargaan Piala Adipura** yang keempat kalinya berturut-turut. Penghargaan Piala Adipura ini diserahkan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla didampingi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya di Kementerian LHK, Jakarta, Senin (14/1). Penghargaan bergengsi nasional tersebut sudah terhitung empat kali berturut-turut berhasil diraih dan dipertahankan Bupati Bintan Apri Sujadi. Hal tersebut merupakan prestasi nasional yang tentunya sangat sulit untuk diraih.

8. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bintan dengan nilai 64,28 berhasil meraih predikat B. Laporan tersebut diterima oleh Sekda Bintan Drs. Adi Prihantara, MM, Senin (10/2) di Radisson Golf & Convention Center Batam. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bintan saat ditemui memberi apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah berupaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas kinerja para Aparatur Pemerintah Kabupaten Bintan.
9. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memberikan penghargaan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Terbaik bagi Kabupaten Bintan dengan ranking ke-7 dari total 397 Kabupaten se-Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan tersebut langsung kepada Bupati Bintan, H Apri Sujadi, S.Sos dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XXIII Tingkat Nasional Tahun 2019 yang diselenggarakan di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/4) pagi. Bupati Bintan, Apri Sujadi usai menerima penghargaan mengapresiasi bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan peningkatan kualitas terhadap laporan penyelenggaraan keuangan daerah.

10. Kabupaten Bintang meraih **Anugerah Kabupaten Layak Anak (KLA)** dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Bintang saat menghadiri Malam Puncak Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2019 di Four Points by Sheraton Kota Makassar, Selasa malam (23/7) yang diserahkan langsung oleh Menteri PPPA RI Yohana Susana Yembise. Menteri Yohana menjelaskan bahwa KLA tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Tahun lalu 177 Kabupaten/Kota, tahun ini meningkat jadi 247 Kabupaten/Kota yang artinya meningkat hampir 40 %. Saya bangga dengan Kabupaten/Kota yang berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan di tahun ini, demi 80 juta anak di Indonesia” ungkapnya.

Berdasarkan capaian dan tantangan pelaksanaan pembangunan Tahun 2019, untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Bintang Tahun 2020, diperlukan hal penting sebagai berikut:

- a. Mewujudkan hasil pembangunan yang dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pencapaian indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh Kepala Daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintang.
- b. Di dalam menjalankan program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara OPD/Bagian serta Pemerintahan tingkat Kecamatan termasuk sinergitas kepada Pemerintahan Tingkat

Provinsi dan juga unsur Pemerintahan vertikal tingkat Pusat yang ada di Kabupaten Bintan.

- c. Pengintegrasian perencanaan pembangunan dan penganggaran Pemerintah dengan sistem berbasis *e-government* sangat diharapkan sebagai bentuk inovasi pemerintahan dan pelayanan publik.
- d. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan memfokuskan pada sektor-sektor unggulan daerah dan juga pengembangan UMKM perlu dilakukan sehingga lebih meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya LKPJ ini disusun dengan lebih memfokuskan pada pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan melalui program dan kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai hasil dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan serta permasalahan selama tahun 2019 yang telah dituangkan. Dalam dinamika pemerintahan saat ini didalam kesempatan penyampaian LKPJ tahun 2019 ini pada tahap selanjutnya dapat menjadi bahan masukan untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.

Seluruh pencapaian Keberhasilan diraih atas kerjasama dan sejatinya tidak dapat lepas atas kerjasama serta peran serta seluruh komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan segenap rekan kerja Pemerintah Kabupaten Bintan di unsur Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tentunya seluruh elemen masyarakat. Pimpinan daerah di Kabupaten Bintan pada kesempatan ini juga memberikan sekalung penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten

Bintan yang bersama-sama selalu mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bintan pada Tahun Anggaran 2019, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk bersama-sama mewujudkan “BINTAN GEMILANG”.

“ *Tumbuh merekah bunga di laman
Indah laman tampak di seberang
Demikian madah selamat disampaikan
Bukti pembangunan untuk Bintan Gemilang*

*Burung terbang di petang hari
Hinggap mendarat dipokok ara
Bintan gemilang makmurnya negeri
Tanda rakyat aman sejahtera*

“



**LAMPIRAN KEPUTUSAN
DPRD KABUPATEN BINTAN
TENTANG
CATATAN STRATEGIS DAN
REKOMENDASI
ATAS
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI BINTAN AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2019**



KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 04 / SK / DPRD / 2020

TENTANG

**CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI BINTAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Bupati Bintan telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada tanggal 20 April 2020 ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, DPRD Kabupaten Bintan telah melakukan pembahasan dan membuat Catatan Strategis dan Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang

3. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8) ;
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63) ;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 52).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan tanggal 20 April 2020 dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Catatan Strategis dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua ...

- KEDUA** : Hal - hal yang akan menjadi Catatan Strategis dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar menjadi perhatian Bupati Bintan dan ditindaklanjuti dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 11 Mei 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA**

Ttd

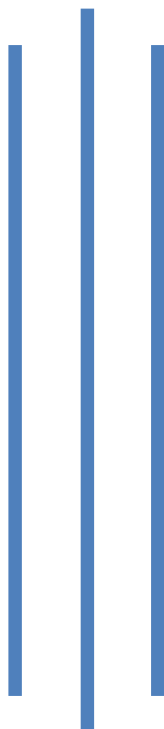
AGUS WIBOWO

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Dompok ;
2. Anggota DPRD Kabupaten Bintan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN
DPRD KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 04/SK/DPRD/2020
TENTANG
CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI BINTAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019



BINTAN, 11 MEI 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Rekan-Rekan wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan
yang berbahagia.

Mengawali penyampaian lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 04/SK/DPRD/2020 tentang Catatan Strategis dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan do'a dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat dilindungi dari wabah Covid 19 yang melanda kita saat ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada juru bicara Pansus untuk menyampaikan Catatan Strategis dan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 ini.

Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pembahasan terhadap LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Panitia Khusus, berdasarkan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan Nomor 03/DPRD/2020 tanggal 20 April 2020 dengan Pimpinan dan Keanggotaan, sebagai berikut :

1. Hj. Fiven Sumanti, S.IP	Ketua
2. Indra Setiawan, S.ST	Wakil Ketua
3. Sahak	Sekretaris
4. Agus Wibowo	Anggota
5. Agus Hartanto, ST	Anggota
6. Zulkifli, S.Pd	Anggota
7. Daeng M. Yatir, SH	Anggota
8. Muttaqin	Anggota
9. Mirwan	Anggota
10. Arwan	Anggota

Bapak Bupati yang kami hormati, rapat paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) berbunyi, DPRD harus melakukan Pembahasan LKPJ dengan memperhatikan Capaian Kinerja dan Kegiatan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

Setelah Penyampaian LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 tanggal 20 April 2020, Pansus telah melakukan rapat-rapat internal, rapat bersama Ketua-Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Bintan serta rapat kerja bersama dengan beberapa OPD untuk memberikan penjelasan, serta klarifikasi terkait sejumlah data dalam dokumen LKPJ, dan sesuai dengan Pengawasan DPRD di lapangan, sebagai wujud evaluasi, perbaikan dan peningkatan kinerja bagi OPD secara maksimal.

Selanjutnya hasil pembahasan Panitia Khusus atas LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan pembahasan LKPJ diatur secara teknis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan laporan pelaksanaan tugas (*Progress Report*) dari Bupati kepada DPRD selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019 ini, DPRD Kabupaten Bintan mempunyai satu prinsip utama pemerintahan, yaitu dalam rangka mewujudkan *local good governance* yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Sehingga hasil

rekomendasi DPRD yang memiliki dampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang meliputi aspek-aspek politik, hukum, sosial dan ekonomi di Kabupaten Bintan

Atas dasar peraturan di atas yang sekaligus menjadi parameter dalam rangka melakukan evaluasi untuk membuat rekomendasi dan catatan strategis demi perkembangan pembangunan dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan ke depan, DPRD memberikan tanggapan dan catatan-catatan strategis sebagai bahan rekomendasi terhadap Laporan Kinerja Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019.

II. **CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BINTAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BINTAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019.**

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tiga aspek penting yaitu :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah;
2. Kebijakan Belanja Daerah; dan
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Ketiga kebijakan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan saling bersinergi. Dokumen LKPJ Bupati Bintan Tahun Anggaran 2019 berisikan poin-poin penting tentang kebijakan keuangan sebagai upaya pencapaian visi dan misi tahun keempat RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016 - 2021. Dari hasil pembahasan tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain PAD yang sah. DPRD Kabupaten Bintan memberikan **“apresiasi kepada Saudara Bupati atas kinerjanya dalam meningkatkan PAD, melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan”**, dan diharapkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus terus di pacu demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan

2. Keberhasilan di bidang Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui pembangunan dibidang Pendidikan, Kesehatan serta percepatan pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2019 mencapai 73,98 poin meningkat dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 73,41 poin. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah harus lebih intensif lagi dalam mengupayakan tercapainya IPM dengan langkah nyata.
3. DPRD Kabupaten Bintan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dalam upaya memantapkan kinerja Pemerintah Daerah yang tidak terlepas dari efektifitas pendaya gunaan sumber daya aparatur yang tersedia dilingkungan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019 ditunjukkan dengan terus meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan indikator kinerja persentase bidang pelayanan dasar yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen. Sedangkan pada aspek penyelenggaraan administrasi bidang keuangan pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 8 kali berturut-turut, sebagai capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Urusan Pendidikan
 - DPRD Kabupaten Bintan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan Pendidikan gratis, transportasi gratis dan seragam gratis, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) se kabupaten Bintan.
 - Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional BOSNAS-SD/MI/SDLB kepada 17.809 siswa dari 96 SD Negeri dan Swasta dengan total dana mencapai 14 miliar lebih, masing-masing siswa mendapatkan 800 ribu rupiah. Sedangkan BOSNAS-SMP/MTs diberikan kepada 7.038 siswa untuk 28 SMP Negeri dengan total dana mencapai 6,8 miliar lebih, masing-masing siswa memperoleh 1 juta rupiah.DPRD Kabupaten Bintan mengharapkan Pemerintah Daerah

melalui Dinas Pendidikan meningkatkan pengawasan dalam penggunaan dan pemanfaatan Dana BOSNAS di setiap sekolah.

- Perlu evaluasi dari Dinas Pendidikan terkait dengan adanya paguyuban – paguyuban di setiap sekolah, karena masih adanya laporan dari wali murid kegiatan ini memberatkan beban mereka.

b. Urusan Kesehatan

- Kurang tersedianya tenaga medis di daerah pesisir, Pustu dan Polindes, untuk itu DPRD Kabupaten Bintan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar secepatnya menyediakan tenaga medis agar pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan
- Tingkat kedisiplinan tenaga medis yang berada di daerah pesisir dianggap masih kurang baik dikarenakan kehadirannya tidak sesuai dengan pemberlakuan jam kerja.

c. Urusan Perikanan

- Perlu adanya evaluasi terhadap segala bentuk bantuan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan nelayan dan pelaku budidaya ikan.

d. Urusan Pariwisata

- DPRD Kabupaten Bintan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah meningkatkan kontribusi pariwisata di Kabupaten Bintan sehingga menghasilkan pendapatan asli daerah terbesar.
- DPRD Kabupaten Bintan mengharapkan agar pemerintah daerah lebih meningkatkan promosi pariwisata dengan pelaksanaan event – event berskala Nasional dan Internasional.

e. Urusan Pertanian

- Perlu adanya penataan kelompok tani dalam penerimaan bantuan pemerintah, agar bantuan tepat sasaran.
- Bagi para petani mandiri yang tidak memiliki kelompok, diharapkan pemerintah dapat memberikan kebijakan agar petani mandiri bisa mendapatkan pupuk subsidi.

- Memberikan perhatian dan pendampingan khusus kepada petani/kelompok yang telah menjadikan salak dan padi sebagai komoditi unggulan Bintan.

f. Urusan Pekerjaan Umum

- Banyaknya fasilitas umum baik gedung maupun sarana olah raga yang pengelolaannya belum maksimal, Atas kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Bintan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menata dan mengelola fasilitas umum tersebut agar terjaga dan terawat dengan baik.
- Perlu adanya perhitungan perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga kegagalan lelang tidak akan terjadi lagi
- Perlunya perencanaan yang optimal terhadap pelaksanaan kegiatan SPAM, karena terdapat beberapa SPAM yang tidak terurus dan dianggap tidak sesuai dengan perencanaan awal.

g. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bintan, sehingga berpengaruh pada peningkatan volume sampah. Untuk itu DPRD Kabupaten Bintan merekomendasikan agar Pemerintah Daerah segera membangun Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) di beberapa lokasi (Bintan Utara/Seri Kuala Lobam dan Gunung Kijang/Toapaya), sehingga permasalahan sampah dapat segera teratasi.

h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Apresiasi diberikan kepada Dinas PMD Kabupaten Bintan atas keberhasilan pelaksanaan Dana Desa tahun 2019 dengan mendapat posisi terbaik ke 3 se-Kepulauan Riau, demikian pula dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan fisik, Kabupaten Bintan telah berhasil meraih Predikat Terbaik untuk Tingkat Propinsi Kepulauan Riau
- Berkaitan dengan pengelolaan BumDes yang dianggap belum maksimal, DPRD Kabupaten Bintan merekomendasikan agar Dinas PMD Kabupaten Bintan memberikan pelatihan serta

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada semua pengurus BumDes.

i. Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bintan, perlu penambahan tenaga pendidik yang memenuhi standar pendidikan S1 baik di tingkat PAUD, TK, SD dan SLTP.
- Mengingat masih kurangnya tenaga kesehatan dan belum meratanya pendistribusian tenaga kesehatan sehingga pelayanan kesehatan dirasakan belum maksimal pada fasilitas-fasilitas kesehatan.

Untuk itu DPRD Kabupaten Bintan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dalam perekrutan CPNS untuk memprioritaskan formasi pada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan, serta penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing daerah.

- BKPSDM diminta agar selalu melakukan koordinasi dengan semua OPD sebelum melakukan perekrutan CPNS.

III. KESIMPULAN

1. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan telah membahas secara seksama apa yang menjadi pelaporan pemerintah Kabupaten Bintan yang di tuangkan di dalam LKPJ ini, Pansus dapat menerima LKPJ Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2019, Bupati telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan segala prestasi yang sudah di peroleh, namun masih kami dapati bahwa ada beberapa OPD yang hanya mampu melaksanakan kegiatan, namun tidak mampu untuk memahami serta mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi Kepala Daerah sehingga out put dari pelaksanaan kegiatan tersebut jauh dari harapan kita bersama.
2. Harapan DPRD Kabupaten Bintan agar Kepala Daerah dapat menempatkan ASN terbaik dalam mengimplementasikan visi misi Kepala Daerah sehingga target capaian RPJMD Akhir Tahun Jabatan Bupati dapat direalisasikan dan Bintan Gemilang dapat kita wujudkan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.

IV. PENUTUP

Demikian Catatan Strategis dan Rekomendasi ini kami sampaikan, semoga dapat menjadikan Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan menjadi lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian ini.

Billahitaufik Walhidayah

Wasssalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Seri Bentan, 11 Mei 2020

PANITIA KHUSUS
LKPJ BUPATI BINTAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA,

Ttd

Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP

SEKRETARIS,

Ttd

S A H A K